



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja pemerintah daerah agar selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dibutuhkan dokumen perencanaan tahunan untuk menjadi landasan operasional;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan tahunan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu diatur rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RKPD Tahun 2026 untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya RKPD Tahun 2026 sebagai:
 - a. kerangka acuan bagi penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026; dan
 - b. bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - BAB VII : PENUTUP.
- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja bagi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR 23





RKPD 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2026

*“Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan”*





**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025**

2.2.2	Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2024.....	II – 284
2.2.3	Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024.....	II – 287
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II – 384
2.3.1	Isu Strategis.....	II – 384
2.3.2	Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II – 388
2.3.3	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	II – 391
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III – 1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi 2019-2023.....	III – 1
3.1.2.	Pertumbuhan Ekonomi	III – 3
3.1.3.	PDRB Per Kapita.....	III – 5
3.1.4.	Ketenagakerjaan.....	III – 6
3.1.5.	Kemiskinan.....	III – 7
3.1.6.	Ketimpangan Pendapatan.....	III – 8
3.1.7.	Sumber Daya Manusia.....	III – 9
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 10
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III – 11
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III – 15
3.2.3.	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	III – 18
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV – 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV – 1
4.2	Tema Pembangunan Tahun 2026.....	IV – 5
4.2.1	Tema RKPD Tahun 2026.....	IV – 5
4.2.2	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	IV – 6
4.2.3	Keselaran Tema RKPD Tahun 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.....	IV – 11
4.2.4	Keselaran Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2026 dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029.....	IV – 12
4.2.5	Keselaran Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027.....	IV – 13
4.2.6	Keselaran Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2026.....	IV – 15
4.2.7	Keselaran Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun	

	2026.....	IV – 16
4.3	Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV – 17
4.3.1	Maksud dan Tujuan.....	IV – 18
4.3.2	Rekomendasi DPRD.....	IV – 19
4.4	Keselarasn Kegiatan Prioritas Utama.....	IV – 20
4.5	Keselarasn Intervensi Pembangunan Kewilayahan.....	IV – 25
4.6	Penerapan Proyek Strategis Nasional.....	IV – 27
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V – 1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI – 1
BAB VII	PENUTUP.....	VII – 1
7.1	Kaidah Pelaksanaan.....	VII – 1
7.2	Kesimpulan.....	VII – 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo.....	II – 1
Tabel 2.2	Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo.....	II – 5
Tabel 2.3	Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 6
Tabel 2.4	Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 8
Tabel 2.5	Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo.....	II – 10
Tabel 2.6	Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates....	II – 11
Tabel 2.7	Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 11
Tabel 2.8	Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 12
Tabel 2.9	Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo.....	II – 13
Tabel 2.10	Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2023.....	II – 15
Tabel 2.11	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2024.....	II – 17
Tabel 2.12	Sebaran Peruntukan Ruang berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo	II – 21
Tabel 2.13	Kelas Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo.....	II – 24
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Tahun 2024 (jiwa).	II – 40
Tabel 2.15	Kejadian Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 40
Tabel 2.16	Desa Rawan Bencana dan Desa Tangguh Bencana per Kapanewon Tahun 2024.....	II – 41
Tabel 2.17	Data Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022- 2024.....	II – 42
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 43
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo (jiwa) Tahun 2020-2024.....	II – 43
Tabel 2.20	Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 44
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kapanewon Tahun 2020 – 2024.....	II – 45
Tabel 2.22	Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kapanewon Tahun 2020 – 2024 (jiwa/km ²)....	II – 46
Tabel 2.23	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (dalam Milyar Rupiah).....	II – 47
Tabel 2.24	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (dalam Milyar Rupiah).....	II – 48
Tabel 2.25	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (persen).....	II – 50
Tabel 2.26	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persen).....	II – 51

Tabel 2.27	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persen).....	II – 51
Tabel 2.28	PDRB Perkapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (juta rupiah).....	II – 54
Tabel 2.29	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024...	II – 56
Tabel 2.30	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II – 56
Tabel 2.31	Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 57
Tabel 2.32	Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024.....	II – 58
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 61
Tabel 2.34	Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 61
Tabel 2.35	Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 63
Tabel 2.36	Keterbandingan Komponen IPM dan IPM tiap Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2024.....	II – 63
Tabel 2.37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 64
Tabel 2.38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2020-2024(%).....	II – 65
Tabel 2.39	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2020-2024.....	II – 65
Tabel 2.40	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo....	II – 66
Tabel 2.41	Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2020-2024.....	II – 68
Tabel 2.42	Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 69
Tabel 2.43	Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 69
Tabel 2.44	Jumlah Sarana Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 70
Tabel 2.45	Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 70
Tabel 2.46	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun ke Tahun.....	II – 71
Tabel 2.47	Kondisi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 73
Tabel 2.48	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	II – 76
Tabel 2.49	Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2020–2024.....	II – 76
Tabel 2.50	Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II – 77
Tabel 2.51	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024.....	II – 80
Tabel 2.52	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2022-2024.....	II – 82
Tabel 2.53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022-2024.....	II – 83
Tabel 2.54	Kejadian Luar Biasa (KLB) Berdasarkan Waktu, Jenis, Lokasi Kejadian dan Jumlah Kasus Tahun 2020-2024.....	II – 84
Tabel 2.55	Data Prevalensi dan Kasus Penyakit Tahun 2020-2024.....	II – 87
Tabel 2.56	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024.....	II – 89

Tabel 2.57	Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 89
Tabel 2.58	Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 91
Tabel 2.59	Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	II – 92
Tabel 2.60	Kondisi Jembatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 93
Tabel 2.61	Data Embung di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 97
Tabel 2.62	Panjang dan Luas Daerah Irigasi berdasar kewenangan Tahun 2024.....	II – 99
Tabel 2.63	Pemanfaatan Sumber Air Baku Untuk Akses Air Bersih Masyarakat.....	II – 100
Tabel 2.64	Cakupan Akses Air Bersih di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 102
Tabel 2.65	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II – 105
Tabel 2.66	Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo.....	II – 107
Tabel 2.67	Capaian Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang hingga Tahun 2025.....	II – 108
Tabel 2.68	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020–2024.....	II – 110
Tabel 2.69	Perubahan Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.....	II – 110
Tabel 2.70	Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 112
Tabel 2.71	Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024.....	II – 113
Tabel 2.72	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Sumber Dana tahun 2024.....	II – 114
Tabel 2.73	Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 (Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 416/A/2020).....	II – 115
Tabel 2.74	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	II – 116
Tabel 2.75	Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2020 -2024.....	II – 117
Tabel 2.76	Jumlah Kegiatan politik, jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP Tahun 2019-2023.....	II – 118
Tabel 2.77	Pencapaian Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2019-2023.....	II – 120
Tabel 2.78	Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 121
Tabel 2.79	Data PPKS menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 122
Tabel 2.80	Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2024.....	II – 122
Tabel 2.81	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023.....	II – 123
Tabel 2.82	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY.....	II – 124
Tabel 2.83	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY.....	II – 124
Tabel 2.84	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2024-2029 Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	II – 124
Tabel 2.85	Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	II – 125
Tabel 2.86	Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) Kabupaten Kulon	

	Progo Tahun 2021-2024.....	II – 125
Tabel 2.87	Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024..	II – 126
Tabel 2.88	Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020-2024.....	II – 127
Tabel 2.89	Data Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.....	II – 127
Tabel 2.90	Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten / Kota di DIY Tahun 2020-2024.....	II – 127
Tabel 2.91	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 128
Tabel 2.92	Angkatan kerja menurut golongan umur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 128
Tabel 2.93	Lowongan Kerja, Pencaker dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 129
Tabel 2.94	Jumlah Perusahaan Menurut Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	li – 129
Tabel 2.95	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 130
Tabel 2.96	Data Produktivitas Tenaga Kerja 2020-2024.....	II – 131
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2024.....	II – 131
Tabel 2.98	Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 132
Tabel 2.99	Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani.....	II – 134
Tabel 2.100	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 135
Tabel 2.101	Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024.....	II – 136
Tabel 2.102	Kondisi dan Sebaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 136
Tabel 2.103	IKLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 138
Tabel 2.104	Capaian IKLH Tahun 2024.....	II – 138
Tabel 2.105	Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024.....	II – 141
Tabel 2.106	Prestasi Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	II – 144
Tabel 2.107	Jumlah Penduduk Ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024.....	II – 145
Tabel 2.108	Layanan Catatan Sipil Tahun 2020-2024.....	II – 145
Tabel 2.109	Jumlah Bantuan Keuangan Kalurahan (Desa) dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 146
Tabel 2.110	Kondisi Kantor Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 146
Tabel 2.111	Realisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kalurahan Tahun 2020 – 2024	II – 147
Tabel 2.112	Swadaya Masyarakat Pembangunan Kalurahan Tahun 2020-2024.....	II – 148
Tabel 2.113	Jumlah Lembaga Ekonomi Kalurahan Tahun 2021-2024.....	II – 148
Tabel 2.114	Pasar Desa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 148

Tabel 2.115	BUMDes se Kabupaten Kulon Progo tahun 2024.....	II – 149
Tabel 2.116	Perkembangan Jumlah Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 153
Tabel 2.117	Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024.....	II – 155
Tabel 2.118	Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2020-2024	II – 155
Tabel 2.119	PUS Bukan Peserta KB (Unmet Need) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 156
Tabel 2.120	Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 156
Tabel 2.121	Jumlah Kampung KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 158
Tabel 2.122	Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 159
Tabel 2.123	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 2020-2024.....	II – 160
Tabel 2.124	Titik Rawan Kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo.....	II – 161
Tabel 2.125	VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 162
Tabel 2.126	Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 163
Tabel 2.127	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 165
Tabel 2.128	Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum yang Beroperasi.....	II – 165
Tabel 2.129	Rute Layanan <i>Shuttle</i> Damri Pendukung Bandara Internasional Yogyakarta.....	II – 167
Tabel 2.130	Data Terminal di Kabupaten Kulon Progo.....	II – 167
Tabel 2.131	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024.....	II – 168
Tabel 2.132	Cakupan Layanan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 169
Tabel 2.133	Kapasitas <i>Bandwith</i> Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 169
Tabel 2.134	Cakupan Jaringan Internet Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 170
Tabel 2.135	Cakupan Jaringan Internet Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024...	II – 173
Tabel 2.136	Capaian Dimensi dan Sub Dimensi <i>Smart City</i> Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 174
Tabel 2.137	Indeks SPBE Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2024.....	II – 175
Tabel 2.138	Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 175
Tabel 2.139	Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 178
Tabel 2.140	Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 179
Tabel 2.141	Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 179
Tabel 2.142	Data Omset UMKM yang Mendapat Fasilitas Tahun 2019-2023.....	II – 180
Tabel 2.143	Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (TOMIRA) Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024.....	II – 180
Tabel 2.144	Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024 (juta Rupiah).....	II – 181
Tabel 2.145	Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Sektor Tahun 2024	

	(Juta Rupiah).....	II – 181
Tabel 2.146	Pelayanan Perizinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 182
Tabel 2.147	Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 183
Tabel 2.148	Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 183
Tabel 2.149	Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi.....	II – 184
Tabel 2.150	Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.....	II – 184
Tabel 2.151	Data Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 187
Tabel 2.152	Perkembangan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa /Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020-2024.....	II – 189
Tabel 2.153	Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 189
Tabel 2.154	Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2020-2024.....	II – 190
Tabel 2.155	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat tahun 2020- 2024.....	II – 191
Tabel 2.156	Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 191
Tabel 2.157	SDM Pengelola Arsip Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 191
Tabel 2.158	Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.....	II – 192
Tabel 2.159	Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan Tahun 2020-2024	II – 193
Tabel 2.160	Kondisi Produksi Ikan, Konsumsi Ikan, Pembinaan Nelayan, dan Proporsi Tangkapan Ikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 194
Tabel 2.161	Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Dikelola Pemerintah (Dinas Pariwisata) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 196
Tabel 2.162	Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 197
Tabel 2.163	Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota Se-DIY (Jumlah Pengunjung Per Orang) Tahun 2020-2024.....	II – 197
Tabel 2.164	Data Desa Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 198
Tabel 2.165	Perkembangan Wisatawan ke Obyek Wisata Non Beretribusi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 199
Tabel 2.166	Data Pemandu Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 200
Tabel 2.167	Data Usaha Jasa Pariwisata ber-NIB tahun 2024.....	II – 200
Tabel 2.168	Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2024.....	II – 202
Tabel 2.169	Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024.....	II – 203
Tabel 2.170	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2022-2024.....	II – 204

Tabel 2.171	Penerbitan Perizinan Sektor Pasar Tradisional Tahun 2020-2024.....	II – 205
Tabel 2.172	Perkembangan Ekspor Bersih Tahun 2020-2024.....	II – 205
Tabel 2.173	Jenis Komoditi dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 205
Tabel 2.174	Perkembangan Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024	II – 207
Tabel 2.175	Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Rakyat dan Jumlah Pedagang Tahun 2022	II – 208
Tabel 2.176	Rekapitulasi Kondisi Fisik Pasar Rakyat Tahun 2020-2024.....	II – 209
Tabel 2.177	Jumlah Pedagang Pasar Negeri Berdasarkan Sarana Perdagangan yang digunakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 209
Tabel 2.178	Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Tahun 2020 – 2024.....	II – 210
Tabel 2.179	Data Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024..	II – 210
Tabel 2.180	Penempatan Dan Bantuan Modal Transmigrasi Tahun 2020 – 2024.....	II – 211
Tabel 2.181	Daftar Inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2020-2024.....	II – 212
Tabel 2.182	Daftar Perangkat Daerah Tahun 2024.....	II – 213
Tabel 2.183	Data Perkembangan Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020-2024.....	II – 215
Tabel 2.184	Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan Tahun 2023.....	II – 217
Tabel 2.185	Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan Tahun 2024.....	II – 217
Tabel 2.186	Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (juta Rupiah).....	II – 218
Tabel 2.187	Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (juta Rupiah).....	II – 218
Tabel 2.188	Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 218
Tabel 2.189	Lembaga BUMD Tahun 2024.....	II – 220
Tabel 2.190	Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2020-2024.....	II – 221
Tabel 2.191	Nilai SPIP Untuk Perangkat Daerah Se-Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024...	II – 222
Tabel 2.192	Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2020-2024.....	II – 224
Tabel 2.193	Perkembangan Jumlah ASN Tahun 2020-2024.....	II – 226
Tabel 2.194	Pelatihan Kepemimpinan ASN Tahun 2020-2024.....	II – 226
Tabel 2.195	Data ASN Menurut Jabatan Tahun 2020-2024.....	II – 227
Tabel 2.196	Capaian Pemkab Kulon Progo dalam Innovative Government Award.....	II – 229
Tabel 2.197	Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2020-2024.....	II – 230
Tabel 2.198	Jumlah SILPA Tahun 2020-2024.....	II – 231
Tabel 2.199	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021-2024.....	II – 231
Tabel 2.200	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021-2024.....	II – 232
Tabel 2.201	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2021-2024.....	II – 232
Tabel 2.202	Perbandingan Kelompok Belanja Tahun 2020-2024 (Rp).....	II – 232

Tabel 2.203	Jumlah Belanja Bagi Hasil ke Kalurahan Tahun 2020-2024.....	II – 233
Tabel 2.204	Alokasi Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 235
Tabel 2.205	Urusan Kelembagaan.....	II – 236
Tabel 2.206	Urusan Kebudayaan.....	II – 245
Tabel 2.207	Kondisi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2022.....	II – 259
Tabel 2.208	Urusan Pertanahan.....	II – 260
Tabel 2.209	Progres Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan.....	II – 263
Tabel 2.210	Urusan Tata Ruang.....	II – 265
Tabel 2.211	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (persen).....	II – 270
Tabel 2.212	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makana di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (persen).....	II – 271
Tabel 2.213	Rasio Pengeluaran Non Pangan terhadap Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 271
Tabel 2.214	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024.....	II – 272
Tabel 2.215	Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023..	II – 273
Tabel 2.216	Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal Tahun 2020-2024.....	II – 274
Tabel 2.217	Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 274
Tabel 2.218	Jumlah Kejadian Kejahatan Kabupaten Kulon Progo 2020-2024.....	II – 275
Tabel 2.219	Jumlah Demo Tahun 2020- 2024.....	II – 277
Tabel 2.220	Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2020-2024.....	II – 277
Tabel 2.221	Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 279
Tabel 2.222	Predikat Kinerja Tujuan & Sasaran Daerah Berdasarkan Target RKPD Tahun 2024.....	II – 281
Tabel 2.223	Rekap Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah Tahun 2024.....	II – 282
Tabel 2.224	IKU Perangkat Daerah yang Tidak Mencapai Target Tahun 2024.....	II – 282
Tabel 2.225	Predikat Kinerja IKU Perangkat Daerah Tahun 2024.....	II – 283
Tabel 2.226	Tingkat Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Akhir Tahun 2024.....	II – 284
Tabel 2.227	Predikat Kinerja Program RKPD Triwulan IV Tahun 2024.....	II – 285
Tabel 2.228	Realisasi Keuangan Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV Tahun 2024.....	II – 285
Tabel 2.229	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.....	II – 288
Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2022 s.d 2026 Kabupaten Kulon Progo.....	III – 14
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2022 s.d 2026 Kabupaten Kulon Progo.....	III – 17
Tabel 3.3	Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	

	Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 s.d. 2026.....	III – 19
Tabel 3.4	Struktur Keuangan Tahun 2026.....	III – 19
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025-2026.....	IV – 2
Tabel 4.2	Keselaran Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2026..	IV – 10
Tabel 4.3	Keselaran Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	IV – 12
Tabel 4.4	Keselaran Prioritas Pembangunan RKPD Kulon Progo 2026 dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027.....	IV – 14
Tabel 4.5	Keselaran Prioritas Pembangunan DIY pada RKPD DIY 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2026.....	IV – 15
Tabel 4.6	Keselaran Prioritas Nasional pada RKP 2026 dan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2026.....	IV – 16
Tabel 4.7	Daftar Keselaran Kegiatan Prioritas Utama.....	IV – 20
Tabel 4.8	Daftar Keselaran Intervensi Pembangunan Kewilayahan.....	IV – 25
Tabel 4.9	Intervensi Kabupaten Kulon Progo terhadap Proyek Strategis Nasional.....	IV – 27
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026.....	VI – 1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026...	VI – 1
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026.....	VI – 3
Tabel 6.4	Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026.....	VI – 8
Tabel 6.5	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.....	VI – 34
Tabel 6.6	Indikator Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2026.....	VI – 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahap Penyusunan RKPD	I – 2
Gambar 1.2	Hubungan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya.....	I – 4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo.....	II – 3
Gambar 2.2	Posisi Geostrategis Kabupaten Kulon Progo.....	II – 4
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Kulon Progo.....	II – 7
Gambar 2.4	Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 16
Gambar 2.5	Peta Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kulon Progo.....	II – 25
Gambar 2.6	Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Kulon Progo.....	II – 27
Gambar 2.7	Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kulon Progo.....	II – 28
Gambar 2.8	Peta Wilayah Rawan Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Kulon Progo..	II – 29
Gambar 2.9	Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kulon Progo.....	II – 30
Gambar 2.10	Peta Wilayah Rawan Bencana Gelombang Ekstrem Kabupaten Kulon Progo..	II – 31
Gambar 2.11	Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kulon Progo.....	II – 33
Gambar 2.12	Peta Wilayah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 34
Gambar 2.13	Peta Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kulon Progo.....	II – 36
Gambar 2.14	Peta Wilayah Rawan Bencana Wabah Penyakit Kabupaten Kulon Progo.....	II – 37
Gambar 2.15	Peta Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Kulon Progo.....	II – 38
Gambar 2.16	Peta Wilayah Rawan Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kulon Progo	II – 39
Gambar 2.17	Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.....	II – 44
Gambar 2.18	PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 (ribu rupiah).....	II – 53
Gambar 2.19	PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (ribu rupiah).....	II – 53
Gambar 2.20	Perbandingan Tingkat Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II – 55
Gambar 2.21	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kulon Progo (%) Tahun 2023-2024.....	II – 58
Gambar 2.22	Angka Melek Huruf di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024.....	II – 59
Gambar 2.23	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 (tahun).....	II – 60
Gambar 2.24	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2020 -2024.....	II – 62
Gambar 2.25	Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 (tahun).....	II – 62
Gambar 2.26	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II – 64

Gambar 2.27	Persentase Capaian Indikator TPB.....	II – 67
Gambar 2.28	Persentase Balita Stunting di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 88
Gambar 2.29	Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024.....	II – 94
Gambar 2.30	Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2018 – 2023.....	II – 95
Gambar 2.31	Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Pusat Tahun 2018 – 2023.....	II – 95
Gambar 2.32	Jumlah Pelanggan Air Minum Tirta Binangun Tahun 2020-2024.....	II – 100
Gambar 2.33	Akses Air Bersih Layak dan Aman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024	II – 103
Gambar 2.34	Akses Air Limbah Layak dan Aman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 104
Gambar 2.35	Kondisi Gedung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2024.....	II – 105
Gambar 2.36	Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2024.....	II – 112
Gambar 2.37	Cakupan Semesta Peserta Aktif BPJS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024.....	II – 130
Gambar 2.38	Kondisi BUMDes Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 152
Gambar 2.39	Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024.....	II – 176
Gambar 2.40	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024.....	II – 182
Gambar 2.41	Perkembangan Laba Disetor oleh BUMD Tahun 2020-2024.....	II – 220
Gambar 2.42	Tingkat Capaian Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.	II – 225
Gambar 2.43	Perkembangan Jumlah Peserta Anugerah Iptek Keanova Menoreh Tahun 2020-2024.....	II – 228
Gambar 2.44	Crime Rate di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024.....	II – 276
Gambar 2.45	Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024.....	II – 385
Gambar 3.1	PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo Tahun 2019-2024 dan Proyeksi 2025 dan 2026 (miliar rupiah)	III – 2
Gambar 3.2	Kontribusi Lima Sektor Terbesar Pada Struktur Perekonomian Kulon Progo Tahun 2020-2024 (%).....	III – 3
Gambar 3.3	Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2024 Menurut Lapangan Usaha (%).....	III – 4
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2020-2024 dan Proyeksi 2025-2026	III – 5
Gambar 3.5	PDRB Per Kapita ADHB tahun 2020-2024 dan Proyeksi 2025-2026 (juta rupiah).....	III – 6
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2020-2024 dan Proyeksi 2025-2026.....	III – 7
Gambar 3.7	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2020-2024 dan Proyeksi 2025 dan 2026.....	III – 8
Gambar 3.8	Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025 dan 2026.....	III – 9
Gambar 3.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025 dan 2026.....	III – 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa indikator tujuan dan sasaran daerah yang memerlukan perhatian serius. Persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas yang akan diselesaikan Pemerintah Kabupaten. Pada tahun 2024, persentase penurunan kemiskinan hanya 0,02 persen poin dari 15,64% menjadi 15,62%. Jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 pada 0,75 persen poin. Kabupaten Kulon Progo juga masih menjadi kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di DIY. Persoalan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga harus menjadi perhatian khusus. Walaupun indikator indeks pembangunan manusia mampu mencapai target yang ditetapkan namun masih di bawah rata-rata DIY, sehingga prioritas pembangunan SDM juga harus selalu ditingkatkan.

Permasalahan dan kondisi yang dihadapi pada tahun 2024 tersebut menjadi perhatian dalam menentukan fokus pembangunan tahun 2026, yang merupakan tahapan transisi yaitu yang terakhir pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Hal ini juga untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan daerah, RKPD tahun 2026 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah:

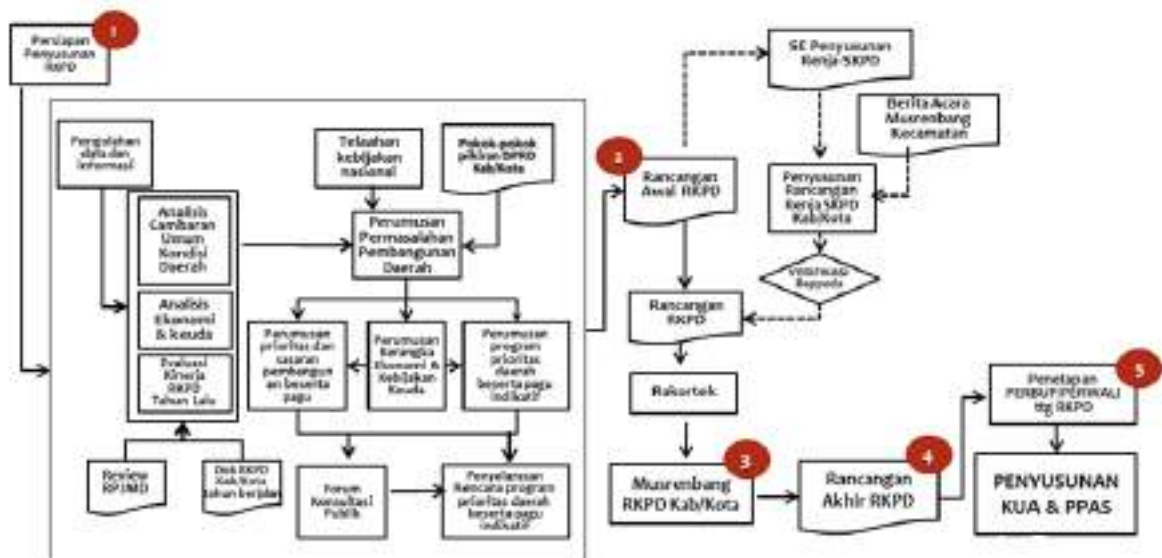
- a. Merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- b. Merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program daerah yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- c. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.
- d. Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- e. Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Tahapan Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, khususnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai representasi fungsi pengawasan lembaga legislatif. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kalurahan/ kelurahan, kapanewon, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Penyusunan RKPD Kabupaten Kulon Progo dimulai dari analisis hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya, serta memperhatikan kondisi daerah, kebijakan nasional dan provinsi, yang selanjutnya dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik yakni berupa analisis isu strategis daerah. Selanjutnya dalam rangka menjamin keberhasilan pembangunan yang menyentuh permasalahan dan kebutuhan daerah maka disusun prioritas pembangunan daerah yang merupakan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam merespon isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Tahap penyusunan RKPD dimulai dengan orientasi penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, pelaksanaan reviu oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah, pelaksanaan fasilitasi Gubernur DIY, dan penetapan RKPD tahun 2026. Secara detail, tahapan penyusunan RKPD disajikan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1.1
Tahap Penyusunan RKPD

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 7 tahun 2024).

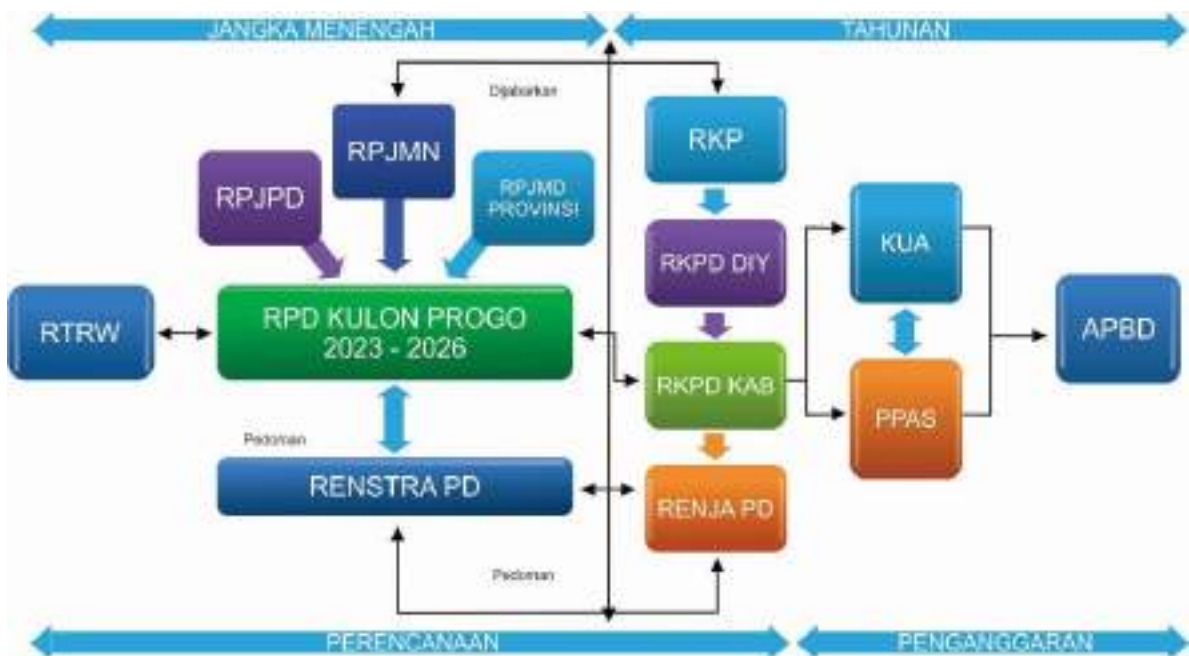
1.4 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan/ berpedoman pada RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka RKPD Kabupaten Kulon Progo akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini



Gambar 1.2

**Hubungan antara Dokumen RKPD
dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya**

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2026 adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2026 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 antara DPRD Kabupaten Kulon Progo

dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum Kabupaten Kulon Progo, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu, perkiraan tahun berjalan, serta proyeksi tahun $n+1$, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan Akhir RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan Akhir RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat DIY. Kabupaten Kulon Progo tidak bersinggungan langsung dengan Kota Yogyakarta dan harus menempuh jarak kurang lebih 25 km untuk mencapainya. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kapanewon, setiap kapanewon memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya. Berdasarkan karakteristik topografinya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 3 zona yakni wilayah utara, tengah dan selatan. Dengan karakteristik topografi demikian menyebabkan perbedaan karakteristik kegiatan ekonomi yang berbeda di tiap zona. Uraian kondisi umum kondisi daerah akan lebih rinci dijelaskan dalam sub-sub bab selanjutnya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 Kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga dan 4.469 Rukun Tetangga. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan luas keseluruhan wilayah Kulon Progo adalah 577,22 km². Jumlah luasan berdasarkan kepmendagri tersebut belum dirinci untuk setiap kecamatan. Menurut data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 576,88 km². Perbedaan luasan ini kemudian akan menjadi bahan yang akan disinkronkan dalam penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo yang masih berproses. Secara rinci nama Kapanewon dan prosentase luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1

**Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo**

No	Kapanewon	Persentase (%)
1.	Temon	6,32
2.	Wates	5,66
3.	Panjatan	7,65

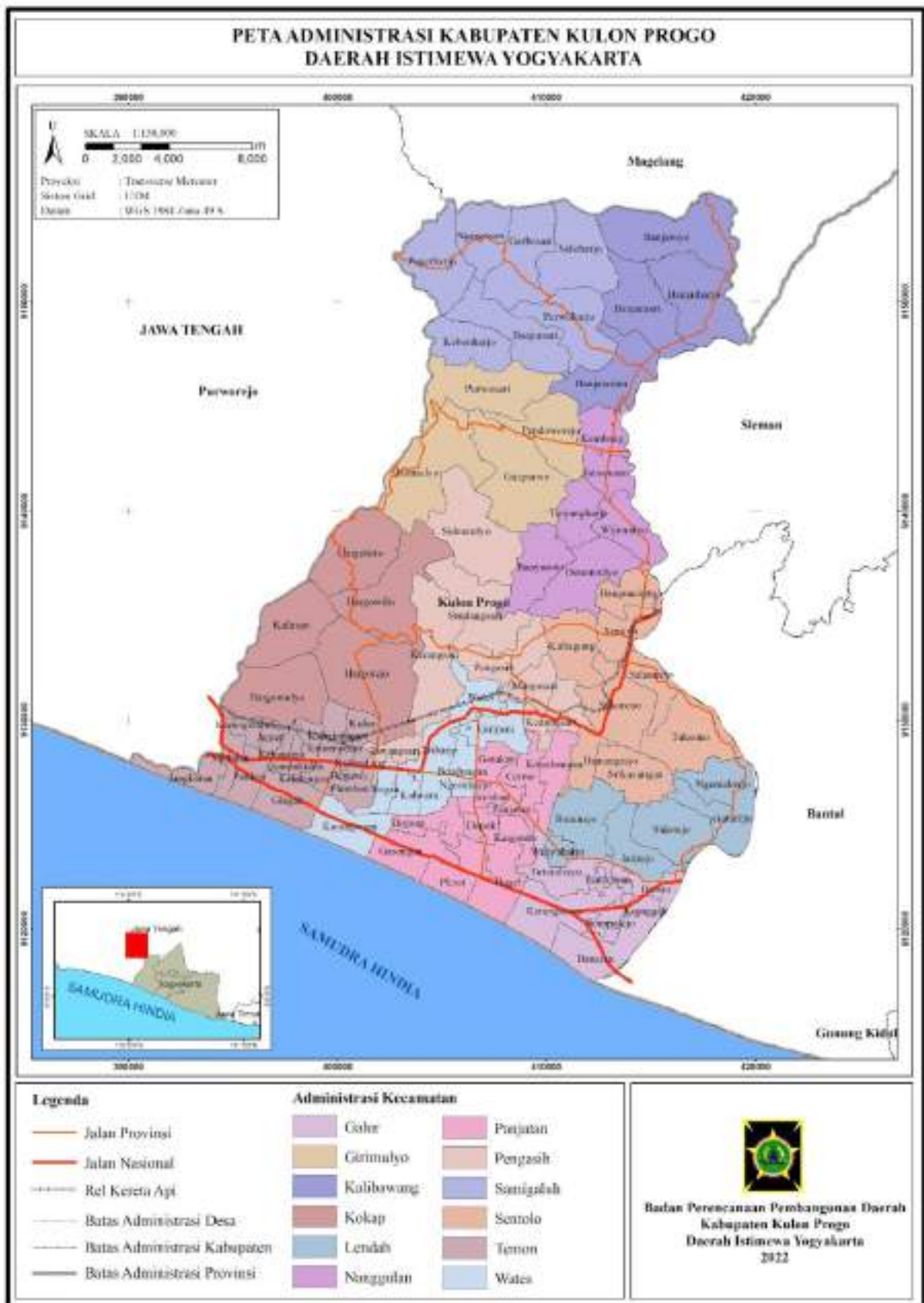
No	Kapanewon	Persentase (%)
4.	Galur	5,61
5.	Lendah	6,51
6.	Sentolo	9,33
7.	Pengasih	10,04
8.	Kokap	12,16
9.	Girimulyo	9,58
10.	Nanggulan	6,78
11.	Kalibawang	8,88
12.	Samigaluh	11,49
Kabupaten Kulon Progo		100,00

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, 2024

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

- Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di bagian utara.
- Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur.
- Samudera Hindia di bagian selatan.
- Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di bagian barat.

Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara $7^{\circ}38'30''$ – $7^{\circ}58'3''$ LS dan $110^{\circ}1'37''$ – $110^{\circ}16'26''$ BT. Lokasi Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi *geostrategic* mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, merupakan 'pintu gerbang' Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa (Kabupaten Purworejo) dan bagian utara Pulau Jawa (Kabupaten Magelang, KSPN Borobudur). Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia juga dapat menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan negara tetangga yang terletak di bagian selatan Indonesia seperti Australia. Posisi *geostrategic* dari Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Posisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo

Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang dibangun di Kapanewon Temon dan telah ditetapkannya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Borobudur, tentunya akan banyak wisatawan yang akan menggunakan bandara baru tersebut. Jalur wisata dari bandara baru menuju Borobudur akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo. Keberadaan BIY dapat memberikan nilai tambah/*global value chain* bagi Kabupaten Kulon Progo dalam hal penyediaan transportasi dan akomodasi.

Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai di Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Pulau Jawa bagian selatan. Posisi *geostrategic* tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun perkembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan yaitu:

a. Kawasan pesisir

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, Kapanewon Lendah, sebagian Kapanewon Sentolo, dan sebagian Kapanewon Pengasih. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2 persen, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.

b. Kawasan dataran

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Nanggulan, sebagian Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih dan sebagian Kapanewon Kalibawang. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2–15 persen, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Kawasan pegunungan

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang.

2.1.1.1.3 Topografis

a. Kemiringan Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam wilayah dengan kemiringan lereng $<2^{\circ}$ (40,11%) dan 18,73% wilayah dengan kemiringan $>40^{\circ}$. Untuk lebih jelasnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut kemiringan lerengnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng
Kabupaten Kulon Progo

No	Kemiringan Lereng	Persentase (%)
1.	$< 2^{\circ}$	40,11
2.	$3^{\circ}-15^{\circ}$	18,70
3.	$16^{\circ}-40^{\circ}$	22,46
4.	$>40^{\circ}$	18,73
Kabupaten Kulon Progo		100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2020, diolah

Dilihat dalam skala kapanewon wilayah dengan kemiringan lereng $>40^{\circ}$ (daerah pegunungan) berada pada kawasan barat Kulon Progo yang membentang dari Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Nanggulan. Sedangkan Kapanewon yang tidak mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng $>40^{\circ}$ meliputi Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon

Galur, Kapanewon Lendah, dan Kapanewon Sentolo. Kelima Kapanewon tersebut terletak di daerah dataran rendah sehingga tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi pegunungan. Kapanewon yang mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng $<2^{\circ}$ terluas adalah Kapanewon Panjatan. Sedangkan Kapanewon Samigaluh merupakan kapanewon yang hampir tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi dataran. Kondisi topografi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan wilayah, aktivitas ekonomi maupun konektivitas antar daerah.

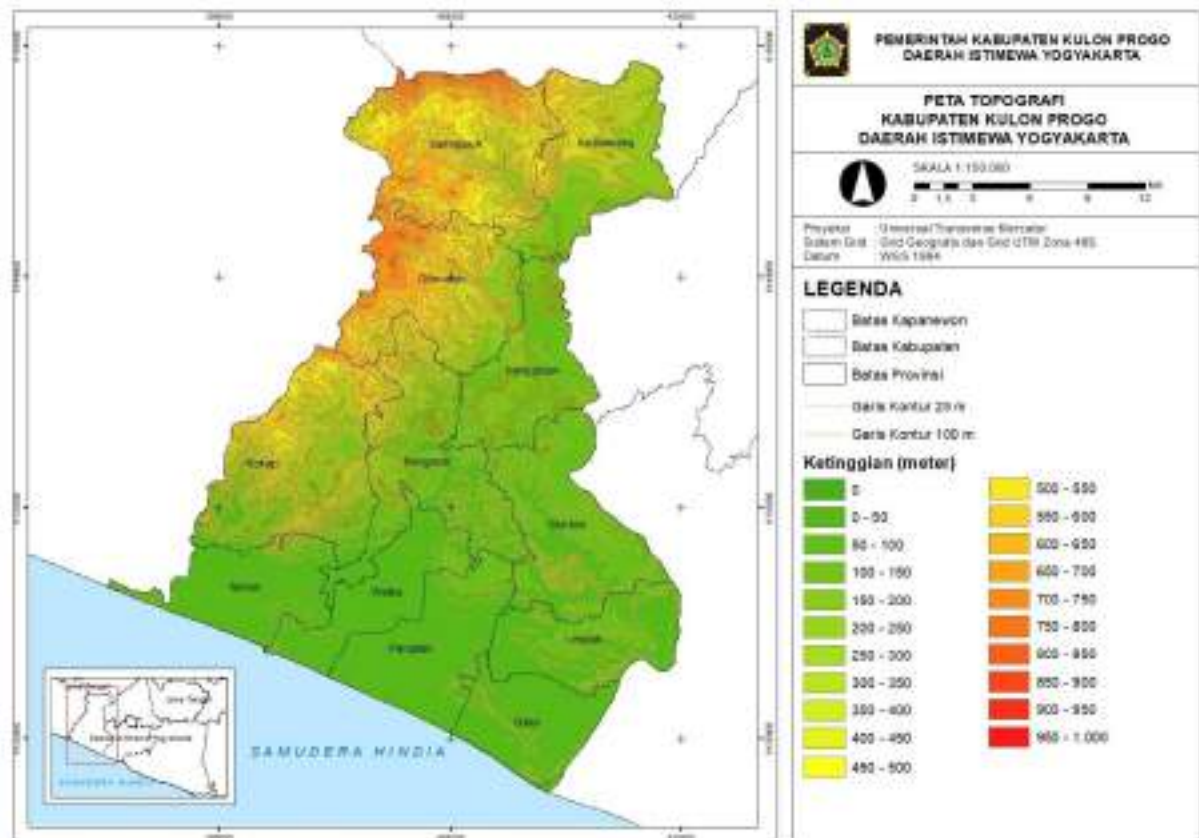
b. Ketinggian Lahan

Berdasarkan ketinggian lahan, persentase luas tanah di Kabupaten Kulon Progo menurut ketinggiannya dari permukaan air laut, meliputi: 17,58% berada pada ketinggian <7 meter di atas permukaan laut (dpal), 15,20% berada pada ketinggian 8-25 meter dpal, 22,84% berada pada ketinggian 26-100 meter dpal, 33,0% berada pada ketinggian 101-500 meter dpal, dan 11,37% berada pada ketinggian >500 meter dpal. Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi 3 wilayah menurut ketinggian lahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo

No	Ketinggian Lahan	Cakupan Kapanewon
1.	500-1000 m dpal	Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang
2.	100-500 m dpal	Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Nanggulan dan Kapanewon Kokap
3.	0-100 m dpal	Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Lendah

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2020 diolah



Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Kulon Progo

2.1.1.1.4 Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

1. Karakteristik dan Struktur

Karakteristik Kabupaten Kulon Progo secara umum berupa kubah atau menyerupai kubah (*Dome*), dengan struktur geologi daerah terdiri atas :

- Struktur Geologi berupa *Perlipatan Batuan (Fold)*, merupakan deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Perlipatan ini terdapat di bagian perbukitan Formasi Sentolo di daerah Pengasih, Sentolo, Panjatan, Lendah dan Galur.
- Struktur Geologi *Patahan/Sesar (Fault)*, merupakan bagian dari batuan yang saling bergerak antara bagian blok batuan satu dengan blok batuan yang lain yang dipisahkan oleh zona patahan atau dapat diistilahkan pecahan batuan yang disertai gerakan massa batuan. Patahan di wilayah Kulon Progo dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - Patahan Regional, merupakan satu kesatuan patahan Yogyakarta. Patahan ini merupakan Patahan Graben Yogyakarta. Patahan Graben Yogyakarta adalah Patahan Opak dan Patahan Progo yang menyebabkan wilayah Kulon Progo dan Wonosari menjadi daerah dataran Tinggi dan di Kota Yogyakarta menjadi dataran rendah. Patahan Opak berarah barat daya - Timur Laut, sedangkan patahan Progo berarah Utara Selatan. Patahan ini terletak di bagian timur Kulon Progo meliputi wilayah Kalibawang bagian timur, Nanggulan bagian timur, Sentolo, Panjatan, Galur dan Lendah.

- Patahan Lokal, merupakan patahan yang hanya terjadi di Kulon Progo. Patahan ini banyak terjadi di bagian pegunungan atau kubah di Kulon Progo utara bagian barat, dimana patahan berbentuk relatif radial yaitu berarah barat laut – tenggara, barat – timur dan barat daya – timur laut. Patahan ini terdapat di wilayah Kapanewon Kokap, Temon bagian utara, Pengasih, Nanggulan bagian barat.
- c. Struktur Kekar (*joint*) yaitu pecahan batuan yang tidak mengalami pergerakan. Struktur kekar ini sangat intensif terdapat di formasi batuan andesit dan formasi andesit tua.

2. Formasi Batuan

Formasi batuan dan sebarannya dibedakan menjadi endapan gunung api (40,37%), batuan sedimen (47,81%), batuan gunung api (7,48%) dan batuan terobosan (4,43%). Lebih detail dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4
Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo

No	Kapanewon	Luas Satuan Batuan (Ha)				Jumlah
		Endapan Gunung Api	Batuan Sedimen	Batuan Gunung Api	Batuan Instrusi	
1.	Temon	3.688	-	-	-	3.688
2.	Wates	3.063	138	-	-	3.197
3.	Panjatan	3.872	588	-	-	4.454
4.	Galur	2.229	-	1.063	-	3.288
5.	Lendah	2.009	1.075	475	-	3.555
6.	Sentolo	3.165	1.175	925	-	5.259
7.	Pengasih	4.342	1.825	-	-	6.161
8.	Kokap	550	4.230	-	2.600	7.372
9.	Girimulyo	125	5.366	-	-	5.485
10.	Nanggulan	250	2.736	975	-	3.957
11.	Kalibawang	375	3.971	950	-	5.290
12.	Samigaluh	-	6.929	-	-	6.922
TOTAL		23.667	28.032	4.388	2.600	58.628
Persentase		40,37%	47,81%	7,48%	4,43%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007

Kabupaten Kulon Progo secara stratigrafis termasuk ke dalam stratigrafis Pegunungan Kulon Progo. Unit stratigrafis yang paling tua di daerah Pegunungan Kulon Progo dikenal dengan Formasi Nanggulan, kemudian secara tidak selaras diatasnya diendapkan batuan-batuan dari Formasi Jonggaran dan Formasi Sentolo, yang menurut Van Bemmelen (1949) kedua formasi terakhir ini mempunyai umur yang sama, keduanya hanya berbeda faises.

a. Formasi Nanggulan

Formasi Nanggulan merupakan formasi yang paling tua di daerah pegunungan Kulon Progo. Singkapan batuan-batuan penyusun dari Formasi Nanggulan dijumpai di sekitar Kalurahan Nanggulan, yang merupakan kaki sebelah timur dari Pegunungan Kulon Progo. Penyusun batuan dari formasi ini terdiri dari batupasir dengan sisipan lignit, Napal pasiran, batulempung dengan

konkresi limonit, sisipan napal dan batugamping, batupasir dan tuff serta kaya akan fosil foraminifera dan moluska. Diperkirakan ketebalan formasi ini adalah 300 meter.

b. Formasi Andesit Tua

Batuan penyusun dari formasi ini terdiri atas breksi andesit, tuff, tufflapili, aglomerat dan sisipan aliran lava andesit. Lava, terutama terdiri dari andesit hiperstein dan andesit augit hornblende. Formasi Andesit Tua ini mempunyai ketebalan mencapai 660 meter mempunyai kedudukan yang tidak selaras di atas formasi Nanggulan. Batuan penyusun formasi ini berasal dari kegiatan vulkanisme di daerah tersebut, yaitu dari beberapa gunung api tua di daerah Pegunungan Kulon Progo yang oleh Van Bemmelen (1949) disebut sebagai Gunung Api Andesit Tua. Gunung api yang dimaksud adalah Gunung Gajah, di bagian tengah pegunungan, Gunung Ijo di bagian selatan, serta Gunung Menoreh di bagian utara Pegunungan Kulon Progo. Formasi Andesit Tua diperkirakan berumur Oligosen Atas sampai Meiosen Bawah.

c. Formasi Kaligesing

Formasi Kaligesing tersusun oleh litologi breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir tufaan. Formasi ini berdasarkan radiometroi berumur Oligosen dan menumpang tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Formasi ini terdapat di bagian Tengah sisi selatan barat dan barat laut dari kubah Kulon Progo.

d. Formasi Dukuh

Formasi Dukuh tersusun oleh perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, batugamping dan batu lempung. Litologi satuan ini menunjukkan perlapisan baik dan silang – siur, sejajar pada batulempung dan batupasir. Formasi ini tidak selaras diatas Formasi Nanggulan. Formasi ini berumur Oligo-Miosen dan pelamparan di daerah Dukuh Kapanewon Samigaluh.

e. Formasi Jonggrangan

Litologi dari Formasi Jonggrangan ini tersingkap baik di sekitar Kalurahan Jonggrangan, suatu Kalurahan yang ketinggiannya di atas 700 meter dari muka air laut dan disebut sebagai Plato Jonggrangan. Bagian bawah dari formasi ini terdiri dari Konglomerat yang ditumpangi oleh Napal tufan dan Batupasir gampingan dengan sisipan Lignit. Formasi Jonggrangan ini terletak secara tidak selaras di atas Formasi Andesit Tua. Ketebalan dari Formasi Jonggrangan ini mencapai sekitar 250 meter (Van Bemmelen, (1949). Formasi Jonggrangan dan Formasi Sentolo keduanya merupakan Formasi Kulon Progo (*“Westopo Beds”*) diduga berumur Miosen Tengah.

f. Formasi Sentolo

Litologi penyusun Formasi Sentolo ini di bagian bawah, terdiri dari Aglomerat dan Napal, semakin ke atas berubah menjadi Batugamping berlapis dengan fasies neritik. Batu gamping koral dijumpai secara lokal, menunjukkan umur yang sama dengan formasi Jonggrangan, tetapi di beberapa tempat umur Formasi Sentolo adalah lebih muda Formasi Sentolo ini mempunyai ketebalan sekitar 950 meter. Satuan Endapan Vulkanik Kuartar merupakan endapan Gunung Merapi yang tersusun oleh breksi sisipan laca dan endapan lahar. Satuan ini berumur Pliosen-Pleistosen. Satuan ini terdapat di atas semua formasi di bagian timur. Satuan Endapan Aluvial tersusun oleh endapan kerikil, pasir, lanau dan lempung dan bongkah sepanjang sungai dan dataran pantai.

Untuk lebih jelasnya stratigrafi formasi geologi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5
Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo

Umur	Formasi	Deskripsi Litologi	Ketebalan (m)
Kuarter	Aluvium	Kerikil, pasir, lanau dan lempung sepanjang sungai dan dataran pantai.	100
Pliosen-Pleistosen	Endapan Vulkanik Kuarter	breksi sisipan lava dan endapan lahar	20
Miosen Bawah	Sentolo	Bagian atas batu gamping berlapis baik kaya foraminifera Bagian bawah konglomerat alas di atasnya napal tufaan bersalangan dengan vitriks tuf	950
Miosen Bawah	Jonggrangan	Bagian atas batu gamping berlapis ke arah atas menjadi batu gamping koral Bagian bawah konglomerat di atasnya napal tufaan dan bapsir gampingan berselang-seling dengan lignit	250
Oligo-Miosen	Dukuh	Perselangselingan antara breksi, batupasir kerikil, batugamping dan batulempung	660
Oligosen	Kaligesing	breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir tufaan	600
Oligo-Miosen	Andesit Tua	Breksi andesit, tuf, lapilli tuf, aglomerat dan berselingan dengan lava andesit. Terdapat fragmen batuan lebih tua.	660
Eosen Atas – Oligosen	Nanggulan	Batu pasir seling-seling dengan lignit, napal pasiran, batu lempung gampingan struktur konkresi, selang-seling napal dan batu gamping, batu pasir dan tuf, kaya foraminifera dan moluska foraminifera dan moluska	300

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2012

b. Potensi

1. Potensi Air Tanah

Kabupaten Kulon Progo mempunyai potensi air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) tersendiri yang tidak melampaui ke wilayah kabupaten lain yaitu Cekungan Wates. CAT Wates telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Hendrayana (2020) selain CAT Wates, terdapat pula CAT Menoreh yang saat ini masih dalam tahap pengkajian. Berdasarkan kalkulasi pada penelitian tersebut, CAT Wates memiliki potensi air tanah bebas sejumlah 34.650.385 m³/tahun sedangkan CAT Menoreh sebesar 56.889.340 m³/tahun. Pemanfaatan CAT pada umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, pertanian, industri dan non industri lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan perkantoran. Berdasarkan perhitungan, proyeksi pemanfaatan air tanah bebas pada CAT Wates pada tahun 2021 mencapai 7.721.376 m³. Selain Cekungan Air Tanah (Cekungan Wates), sumber mata air yang ada di Kabupaten Kulon Progo lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6

Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates

No	Sumber	Lokasi (Kapanewon)	Debit (Liter/Detik)	Pemanfaatan
1.	Mata air Clereng	Pengasih	125	Sudah/PDAM
2.	Tuk Mudal	Girimulyo	5 – 15	Sudah
3.	Tuk Gua Kiskendo	Girimulyo	24 – 60	Sudah
4.	Tuk Grembul	Kalibawang	5 – 10	Sudah/PDAM
5.	Tuk Gua Upas	Samigaluh	1,5 - 3,5	Sudah/PDAM
6.	Mata air Sekepyar dan Kayangan	Samigaluh	-	Belum
7.	Tuk Mudal Anjir	Pengasih	3 – 11	MCK
8.	Cekungan Air Tanah Wates *)	Pengasih, Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan	34,6 juta m ³ /th	Sudah

Sumber data : - Bappeda, DPU, Disperindag ESDM, PDAM Kab. Kulon Progo, 2018

- *) Hendrayana, Heru.dkk. 2020. Neraca Airtanah Cekungan Airtanah (CAT) Menoreh dan Wates Kabupaten Kulo Progo. Geomedia Vol.18 No.2 Tahun 2020.Hal 10-29

2. Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Selain potensi geologi serta potensi air tanah, Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai potensi Energi Baru dan Terbarukan yang tersebar di beberapa Kapanewon. Untuk lebih lengkapnya sebaran potensi energi alternatif di Kabupaten Kulon Progo diperlihatkan di Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.7

Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo

No	Kluster	Bahan	Lokasi	Pemanfaatan*
1.	Biofuel, Biokerosene, Bioethanol	Ketela rambat, jarak pagar, nyamplung	Seluruh Kapanewon	n.a.
2.	Biogas	Limbah tahu, limbah ternak	122 unit usaha tahu, 51.405 populasi ternak bisa dikembangkan biogas 15 ribu	Memenuhi kebutuhan rumah tangga
3.	Briket	Limbah kayu	Seluruh Kapanewon	n.a.
4.	Energi Tenaga Surya	Sinar matahari	Seluruh Kapanewon	n.a.
5.	Mikrohidro	Air	Semawung, Kedungrong, Kalisangga, Sermo	Semawung (kapasitas 600 kwh) dikelola oleh PT. Energy Puritama
6.	Energi Tenaga Angin	Angin	Sepanjang pantai dan pegunungan	n.a.
7.	Energi Limbah Sampah	Limbah sampah	TPA Sampah 70-75 m ³	n.a.

Sumber : Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022, diolah.

2.1.1.1.5 Hidrologi**a. Daerah Aliran Sungai**

Menurut data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam DAS Progo, DAS Serang dan sebagian kecil yang masuk dalam DAS Bogowonto. Sedangkan menurut Direktorat Bina Penatagunaan Sumberdaya Air, Kabupaten Kulon Progo masuk dalam Wilayah Sungai Serang-Bogowonto, dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang. Adapun nama DAS dan sub DAS tersebut beserta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo

No.	DAS	Luas DAS (ha)	Sub DAS
1	Bogowonto	2.509,931	Dekso
			Gesing
			Keduren
			Kodil
			Ngasinan
			Plamping
			Semanggung
2	Serang	23.532,85	Nagung
			Ngrancah
			Serang Hilir
			Serang Sekiyep
			Sidatan
			Sumitro
3	Progo	30.141,92	Batang
			Bedog
			Blongkeng
			Diro
			Gandri
			Jenes
			Kedung-Gong
			Konteng
			Krasak
			Krawang
			Mlinting Putih
			Penter
			Progo Hilir
			Sileng
			Sindon Salak
			Sudu
			Tangsi
			Tinalah

Sumber data: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, 2017

Daerah Aliran Sungai Progo dengan sungai utama Kali Progo memiliki daerah pengaliran seluas 8.894 hektare, dengan debit maksimum 381,90 m³/detik dan debit minimum 13,00 m³/detik. Daerah Aliran Sungai Serang dengan sungai utama Kali Serang dengan anak-anak sungainya, memiliki daerah pengaliran seluas 3.635,75 hektare, dengan debit maksimum 153,6 m³/detik dan debit minimum 0,03 m³/detik. Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan untuk irigasi persawahan seluas 9.351 ha.

Kabupaten Kulon Progo memiliki danau buatan yaitu Waduk Sermo yang terletak di Kapanewon Kokap dengan luas genangan waduk sebesar 157 Ha. Waduk ini dibuat dengan membendung Kali Menguri dan anak-anak cabangnya, Kali Pantaran, Kali Kembang, Kali Papon dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Kali Ngrancah. Waduk Sermo berfungsi sebagai suplesi irigasi sawah yang berada di Kapanewon Temon, Wates dan Pengasih dan sebagian suplesi kebutuhan air minum.

b. Sungai

Beberapa sungai yang melintas di wilayah Kulon Progo memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara umum sungai utama di Kulon Progo adalah Sungai Progo dan Sungai Serang. Sungai Progo memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Kulon Progo. Sungai Progo menjadi sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM Kulon Progo untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan industri khususnya pada kawasan perkotaan. Sungai Progo juga menjadi penyokong utama air irigasi lahan pertanian pada Daerah Irigasi Kalibawang dan Daerah Irigasi Sapon yang merupakan area pertanian irigasi teknis terluas yang berada di Kulon Progo. Berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) Wilayah Sungai Progo Opak Serang 2015-2035 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/KPTS/M/2016, Debit maksimum yang tercatat di stasiun Kalibawang adalah sebesar 331 m³/detik dan debit minimum sebesar 12 m³/detik.

Sungai Serang meliputi daerah tangkapan air seluas 280 kilometer persegi dengan debit rerata bulanan yang tercatat di stasiun Durungan sebesar 10,83 m³/detik dengan debit maksimum sebesar 61,10 m³/detik dan debit minimum sebesar 0,28 m³/detik. Sungai Serang memiliki anak Sungai Ngrancah yang dibendung untuk mengoperasikan Waduk Sermo untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan suplesi irigasi pada sistem Daerah Irigasi Kalibawang. Secara umum kondisi morfologi sungai di Kulon Progo sebagaimana disajikan pada Tabel 2.10 yang menyajikan data inventarisasi sungai di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.9
Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Kedalaman (m)
1	Progo	56,70	650	6
2	Serang	23,16	60	8
3	Ngrancah	9,12	50	10
4	Gede	11,17	50	10
5	Nagung	10,97	20	8
6	Seling	7,75	15	4
7	Pening	7,63	15	6

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Kedalaman (m)
8	Sidatan	3,86	8	2
9	Sari	3,31	6	3
10	Bogem	2,60	6	3
11	Kopat	1,69	8	3
12	Papah	21,94	30	5
13	Tinalah	6,70	50	15
14	Kamal/Sudu	11,60	20	12
15	Salak	5,64	10	6
16	Dunggong	5,45	10	7
17	Klegung	6,48	15	6
18	Rowo Jembatan	8,30	12	3
19	Banyu Meneng	5,03	8	5

Sumber data: Neraca Sumber Daya Alam Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2018.

2.1.1.1.6 Klimatologi

a. Iklim

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 (enam) bulan. Iklim musim terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kabupaten Kulon Progo juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia maka terjadi penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi. Sedangkan klasifikasi iklim dengan menggunakan deskripsi tipe iklim menurut F. H. Schmidt dan J. H. A Ferguson yang didasarkan atas nisbah antara jumlah bulan kering dengan jumlah bulan basah, dimana bulan basah adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif >100 mm, bulan kering adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif <60 mm dan bulan lembab adalah bulan dengan curah hujan rata-rata antara 60-100 mm. Terdapat delapan kelompok iklim yang didasarkan pada nisbah bulan kering ke bulan basah yang disimbolkan dengan Q (dalam persen), yaitu iklim A, $Q < 14,3$, daerah sangat basah, hutan hujan tropis; iklim B, $14,3 \leq Q < 33,3$, daerah basah, hutan hujan tropis; iklim C, $33,3 \leq Q < 60,0$, daerah agak basah, hutan rimba peluruh (daun gugur pada musim kemarau); iklim D, $60,0 \leq Q < 100,0$, daerah sedang, hutan peluruh; iklim E, $100,0 \leq Q < 167,0$, daerah agak kering, padang sabana; iklim F, $167,0 \leq Q < 300,0$, daerah kering, padang sabana; iklim G, $300,0 \leq Q < 700,0$, daerah sangat kering, padang ilalang; dan iklim H, $Q \geq 700,0$ daerah ekstrim kering, padang ilalang.

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh selama 5 tahun (2015-2019) dalam Buku Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka yang diterbitkan BPS Tahun 2020, maka Kabupaten Kulon Progo

mempunyai rata-rata bulan kering sebanyak 3,83 dan rata-rata bulan basah sebanyak 7,17, sehingga akan didapatkan nilai Q sebesar 53,49%. Dengan demikian menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson Kulon Progo termasuk dalam tipe iklim C kategori daerah agak basah.

b. Curah Hujan

Curah hujan dan hari hujan diukur menurut 5 stasiun hujan (Gejagan, Singkung, Gembongan, Beji, Brosot) di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam sub DAS Progo Hilir dengan tipe iklim Am, Aw, dengan curah hujan Tahun 2013-2018 sebesar 153 mm/hari sampai 271 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan berkisar dari 8-14 hari dalam sebulan.

Secara umum curah hujan dan hari hujan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan mengalami naik turun dalam tiap tahun. Curah Hujan dan Hari Hujan tinggi terjadi pada bulan Januari - April dan November - Desember tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan.

Berikut secara rinci Curah Hujan dan Hari Hujan menurut bulan dan rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini.

Tabel 2.10

Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2023

No	Bulan	2022		2023	
		CH	HH	CH	HH
1	Januari	397	20	199,4	27
2	Pebruari	251	11	232,1	24
3	Maret	289	18	203	19
4	April	176	8	115,9	14
5	Mei	178	13	85,2	5
6	Juni	191	10	53,4	8
7	Juli	32	3	49,4	9
8	Agustus	76	7	6	2
9	September	41	6	-	1
10	Oktober	700	22	-	-
11	Nopember	803	21	8	8
12	Desember	438	16	36,4	6
Jumlah		3.572	155	988,8	123
Rata-rata		297,67	12,92	98,88	11,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dapat dikategorikan menggunakan pendekatan klasifikasi penutup lahan sesuai dengan SNI 7654:2010 terdiri atas daerah bervegetasi dan daerah tak bervegetasi. Daerah bervegetasi terdiri atas lahan pertanian dan lahan non pertanian. Sedangkan daerah tak bervegetasi terdiri dari lahan terbuka, permukiman serta perairan. Mendasar pada hal tersebut, penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 terdiri atas daerah bervegetasi sebesar 77% dan daerah tak bervegetasi sebesar 23%. Adapun pada daerah bervegetasi terdiri dari 73% lahan pertanian dan 4% lahan non pertanian. Sedangkan pada daerah tak bervegetasi terdiri dari 20,4% permukiman, 2,3% perairan dan 0,5% lahan terbuka. Penggunaan lahan yang masih didominasi oleh lahan pertanian

Tabel 2.11

Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan 2024

Penggunaan Lahan	2023		2024	
	Ha	%	Ha	%
Kebun	25.155,62	43,59	25.218,52	43,79
Permukiman	10.449,03	18,11	10.421,25	18,10
Sawah Irigasi	9.864,50	17,09	9.881,12	17,16
Ladang	5.707,84	9,89	5.479,53	9,52
Sawah Tadah Hujan	1.358,65	2,35	1.320,05	2,29
Sungai	985,23	1,71	926,94	1,61
Semak Belukar	736,18	1,28	738,49	1,28
Kawasan Hutan Produksi Tetap	605,48	1,05	605,48	1,05
Bandar Udara/Pelabuhan	595,29	1,03	594,20	1,03
Rumput	503,21	0,87	502,88	0,87

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) Kab.Kulon Progo, 2024. *Diolah*.

Penggunaan lahan pada data Tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, masih didominasi oleh lahan kebun yang kemudian disusul oleh permukiman dan sawah irigasi. Hal tersebut mengindikasikan aktivitas ekonomi yang masih didominasi dari sektor pertanian. Luas lahan sawah irigasi meningkat menunjukkan adanya cetak sawah baru. Sementara itu proporsi permukiman sedikit mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2024 ada pendetailan penggunaan lahan.

2.1.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan substansi pola ruang yang dirumuskan dalam substansi revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari DPRD Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

A. Kawasan lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan terdiri dari:

1. Badan Air

Kawasan Lindung Badan air meliputi waduk dan sungai. Luas Badan air adalah kurang lebih 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) hektar yang terdiri atas waduk, embung, dan sungai yang berada di seluruh kapanewon.

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 254 (dua ratus lima puluh empat) hektar, berada di Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, dan Samigaluh.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 428 (empat ratus dua puluh delapan) hektar berupa sempadan pantai yang terdapat di Kapanewon Galur, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Temon, dan Kapanewon Wates.

4. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi terdiri atas:

- a. Kawasan suaka alam berupa suaka margasatwa dengan luas kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektare berada di Kapanewon Kokap dan Kapanewon Pengasih.
- b. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa suaka pesisir dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektare, berada di Kapanewon Galur..

5. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan Lindung Geologi berupa:

- a. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil; dan
- b. Kawasan Keunikan Bentang Alam.

Untuk kawasan Keunikan Batuan dan Fosil seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektare, meliputi:

- a. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang yang berada di Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, dan Kapanewon Naggulan.
- b. Mangan Kliripan-Karangsari yang berada di Kapanewon Kokap dan Kapanewon Pengasih.

Sedangkan untuk Kawasan Keunikan Bentang Alam seluas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektare yang meliputi:

- a. Goa Kiskendo yang berada di Kapanewon Girimulyo;
- b. Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari yang berada di Kapanewon Samigaluh; dan
- c. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo yang berada di Kapanewon Samigaluh.

6. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya memiliki luas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa Makam Girigondo yang berada di Kapanewon Temon.

7. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar berada di Kapanewon Temon.

B. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam kawasan budidaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan. Kesesuaian kawasan untuk kegiatan budidaya, selain berdasar atas perhitungan skor kesesuaian lahan, secara lebih rinci juga dilakukan identifikasi faktor-faktor fisik kawasan untuk kesesuaian fungsi kegiatan tertentu. Bentang alam Kabupaten Kulon Progo merupakan area dataran, perbukitan, dan pegunungan dengan lerengan beragam mulai 0-70 persen. Kawasan budidaya terdiri dari:

1) Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, dan Kapanewon Samigaluh. Sedangkan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 625 (enam ratus dua puluh lima) hektar berada di Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Temon.

2) Kawasan perkebunan rakyat

Perkebunan Rakyat merupakan perkebunan yang dikelola masyarakat dan bertempat di lahan milik masyarakat. Luasan kawasan perkebunan rakyat adalah 4.885 (empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar yang berada di seluruh Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Temon, dan Kapanewon Wates.

3) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan sebagian besar merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kawasan tanaman pangan kurang lebih seluas 11.041 (sebelas ribu empat puluh satu) hektare yang berada di seluruh kapanewon.

b. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura ditetapkan pengelolaannya untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan hortikultura sebagian besar merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Lokasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 3.544 (tiga ribu lima ratus empat puluh empat) hektar tersebar di seluruh kapanewon.

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kawasan atau lokasi perkebunan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo dan tidak diatur berdasarkan komoditi tertentu namun disesuaikan dengan potensi/kesesuaian lahan, terdiri atas komoditas kakao, kopi, kelapa, cengkeh, tembakau, nilam, lada, teh, gebang, jambu mete. Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 2.876 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektare yang berada di Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Sentolo, dan Kapanewon Temon.

4) Kawasan perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Lokasi pengembangan kawasan perikanan:

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap (laut) meliputi Kapanewon Temon dan Kapanewon Wates seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare.

b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Kawasan perikanan budidaya seluas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektare yang berada di Kapanewon Galur, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Pengasih, dan Kapanewon Temon.

5) Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari kawasan pertambangan mineral logam dengan luasan kurang lebih 11 (sebelas) hektare yang terdapat di Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Temon, Kapanewon Galur, Kapanewon Panjatan dan Kapanewon Wates.

6) Kawasan peruntukan industri

Kawasan ini merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri yang pematangan tanah dan penyediaan sarana sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha kawasan industri. Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan seluas kurang lebih 2.313 (dua ribu tiga ratus tiga belas) hektare yang berada di Kapanewon Wates, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan dan Kapanewon Temon.

7) Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata meliputi luasan kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektare meliputi:

- a. Laguna Pantai Glagah di Kapanewon Temon;
- b. Laguna Pantai Trisik di Kapanewon Galur;
- c. Pantai Congot di Kapanewon Temon;
- d. Taman Wisata Ancol di Kapanewon Kalibawang;
- e. Taman Wisata Embung Krpyak di Kapanewon Kalibawang; dan
- f. Wisata Hutan Mangrove di Kapanewon Temon.

8) Kawasan Permukiman meliputi:

- a. Permukiman perkotaan seluas 8.945 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektare yang berada di seluruh kapanewon.
- b. Permukiman perdesaan seluas kurang lebih 20.180 (dua puluh ribu seratus delapan puluh) hektare tersebar di seluruh kapanewon.

9) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi berupa kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) seluas kurang lebih 595 (lima ratus sembilan puluh lima) hektare di Kapanewon Temon.

10) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare meliputi:

- a. Satuan Radar 215 Congot berada Kapanewon Temon;
- b. Detasemen 2 Satuan Brigade Mobil Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kapanewon Sentolo;
- c. Pos Pengamat TNI Angkatan Laut Congot berada di Kapanewon Temon;
- d. Kepolisian Resor (Polres) Kulon Progo berada di Kapanewon Pengasih; dan
- e. Lapangan Tembak Sentolo berada di Kapanewon Sentolo.

Adapun sebaran peruntukan ruang berdasarkan pola ruang Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.12

Sebaran Peruntukan Ruang berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo

NO	PERUNTUKAN RUANG BERDASARKAN POLA RUANG	LUAS (Ha)
A	KAWASAN LINDUNG	
	1. Badan air (Waduk dan Sungai)	1.143
	2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Hutan lindung)	254
	3. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan waduk/embung)	428
	4. Kawasan Konservasi Kawasan Suaka Alam Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil (Konservasi Penyu)	185 2
	5. Kawasan lindung geologi Kawasan keunikan batuan dan fosil Kawasan keunikan bentang alam	84 17
	6. Cagar Budaya	2
	7. Kawasan ekosistem mangrove	3
B	KAWASAN BUDIDAYA	
	1. Badan Jalan	363
	2. Kawasan hutan produksi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasn Hutan Produksi Tetap	1 625
	3. Kawasan Perkebunan Rakyat	4.885
	4. Kawasan peruntukan pertanian Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Hortikultura Kawasan Perkebunan	11.041 3.544 2.876
	5. Kawasan Perikanan Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan Perikanan Budidaya	10 163
	6. Kawasan Pertambangan dan Energi Kawasan Pertambangan Mineral Logam	11
	7. Kawasan Peruntukan Industri	2.313
	8. Kawasan Pariwisata	33
	9. Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perdesaan	8.945 20.180
	10. Kawasan Transportasi (Kawasan BIY)	595
	11. Kawasan Pertanahan dan Keamanan	16

Sumber data : Substansi Revisi RTRW Kulon Progo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala sarta Tata Sasana) Kab.Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel diatas, tidak semua peruntukan ruang dapat terdokumentasikan secara numerik karena beberapa peruntukan ruang sifatnya tersebar di seluruh kapanewon. Satu ruang dalam pola ruang Kabupaten Kulon Progo dapat diperuntukkan untuk pemanfaatan ruang yang berbeda – beda (bukan merupakan peruntukan ruang tunggal) asalkan pemanfaatan ruangnya tidak saling bertentangan.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo juga dapat dilihat berdasarkan rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo. Dalam substansi reviu RTRW Kabupaten Kulon Progo banyak dinamika perubahan struktur ruang yang cukup signifikan dibandingkan dengan yang ada dalam substansi RTRW Kabupaten Kulon Progo yang lama. Rencana struktur ruang yang cukup signifikan berperan sebagai pendorong pengembangan wilayah salah satunya adalah keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Jika merujuk pada tujuan penataan ruang sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2012 bahwa arah penataan ruang kabupaten lebih menitik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian sebagai basis yang didukung oleh pariwisata, pertambangan dan industri bahari kemudian dengan mempertimbangkan keberadaan BIY dan semua potensi ikutannya maka tujuan penataan ruang bergeser dan menjadikan sektor pertanian dan pariwisata menjadi sektor tumpuan yang didukung oleh bahari, kebudayaan, perdagangan dan jasa serta industri. Adapun keberadaan BIY menimbulkan efek berganda bagi munculnya pusat pertumbuhan kawasan – kawasan strategis baru di Kabupaten Kulon Progo.

1) Pengembangan Kawasan Aerotropolis

Keberadaan BIY di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2020 merupakan pemicu perubahan arah pengembangan wilayah di Kabupaten Kulon Progo yang paling signifikan. Kawasan sekitar BIY menjadi kawasan strategis Kabupaten yang dikembangkan dengan konsep Aerotropolis. Kawasan Aerotropolis Kabupaten Kulon Progo meliputi 8 Kapanewon yaitu Kapanewon Temon, Wates, Pengasih, Kokap, Galur, Lendah, Panjatan dan Sentolo dengan luas total mencapai 26.605,5 Ha.

Kawasan Sekitar BIY menjadi pusat transportasi udara berskala Internasional yang memberikan peluang besar bagi tumbuhnya pusat kegiatan baru yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Sebagai Bandar Udara skala internasional baru, diharapkan dapat menjadi gerbang keluar masuknya barang maupun orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengusung konsep pengembangan wilayah sekitar BIY sebagai Aerotropolis yang terarah dan terencana diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk potensi ekonomi lokal kawasan. Selain itu, dalam pengembangan dan pembangunan kawasan sekitar BIY harus tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan serta memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana.

Infrastruktur pendukung keberadaan BIY dan kawasan Aerotropolis juga terus dikembangkan antara lain dengan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang berstandar internasional dalam rangka menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, pengembangan sarana prasarana transportasi darat juga dilakukan dengan pembangunan jalur kereta api Bandara yang memudahkan dan mempercepat para penumpang tujuan Bandara untuk langsung menuju Bandara. Dengan dibangunnya jalur kereta api tersebut, stasiun Kedundang yang semula non aktif saat ini direaktivasi untuk mendukung operasional kereta tersebut.

Kedepannya dengan semakin berkembangnya transportasi massal yang saling terkoneksi maka direncanakan pengembangan kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) di sekitar kawasan Stasiun Wates dan Stasiun Kedundang. Sebagai tambahan, dalam rangka memperlancar pergerakan para pengguna jasa angkutan udara menuju BIY direncanakan pembangunan jalan bebas hambatan yang merupakan rangkaian dari rencana pembangunan jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo. Selain pengembangan infrastruktur di bidang transportasi, pengembangan infrastruktur penunjang pemenuhan kebutuhan dasar khususnya air minum juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro. Adapun pembangunan bendungan Kamijoro terletak di Kapanewon Sentolo. Rencananya air baku dari bendung Kamijoro akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Kulon Progo terutama untuk memenuhi kebutuhan di kawasan Aerotropolis dan kawasan Peruntukan Industri Sentolo serta kawasan perkotaan di Kapanewon Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Temon dan Wates. Potensi air baku yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Kulon Progo adalah sekitar 286 Liter/detik. Sumber alternatif air baku lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Kulon Progo dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum adalah dari rencana pembangunan bendung Bener yang terletak di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Potensi air baku yang dapat dimanfaatkan oleh Provinsi DIY termasuk Kabupaten Kulon Progo didalamnya adalah sebesar 700 Liter/detik.

- 2) Pengembangan Kawasan Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Dengan ditetapkannya Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dengan target pencapaian kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo yang terletak bersebelahan dengan kawasan Borobudur memiliki potensi besar untuk menangkap peluang positif yang ada. Kawasan perbukitan Menoreh sebagai kawasan penyangga KSPN Borobudur memiliki potensi daya tarik pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan agar dapat bersinergi dengan pengembangan pariwisata Borobudur. Rencana pembangunan Koridor Temon – Borobudur merupakan salah satu strategi daerah dalam rangka menyediakan akses transportasi dari BIY menuju kawasan Borobudur. Rencana *exit – entry* jalan Tol juga mengakomodir keberadaan Koridor Temon – Borobudur agar konektivitas wilayah tetap sinergi.
- 3) Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten, bahwa strategi pengembangan pola ruang Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten dilakukan dengan penetapan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten dalam rangka mewujudkan pelestarian nilai – nilai budaya dan sosial masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Di Kabupaten Kulon Progo, terdapat 4 (empat) Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten meliputi 1) Perbukitan Menoreh; 2) Makam Girigondo; 3) Pusat Kota Wates; dan 4) Pantai Selatan Kulon Progo.

2.1.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kajian risiko bencana, Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 (dua belas) potensi bencana meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah/ tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, epidemi/ wabah penyakit, serta kegagalan teknologi. Adapun tingkat risiko dari keduabelas potensi bencana sebagai berikut.

Tabel 2.13
Kelas Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo

NO.	KATEGORI BENCANA	JENIS POTENSI BENCANA	TINGKAT RISIKO BENCANA
1	Geologi	Gempa Bumi	Tinggi
2		Tsunami	Tinggi
3		Letusan Gunung Api	Rendah
4		Gerakan Tanah/ Tanah Longsor	Tinggi
5	Hidrometeorologi	Banjir	Tinggi
6		Banjir Bandang	Tinggi
7		Kekeringan	Tinggi
8		Cuaca Ekstrem	Tinggi
9		Gelombang Ekstrem	Sedang
10		Kebakaran Hutan Dan Lahan	Sedang
11	Biologi	Epidemi/ Wabah Penyakit	Tinggi
12	Anthropogenik	Kegagalan Teknologi	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Dari aspek kemiringan lereng wilayah Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Girimulyo memiliki tingkat kemiringan lereng dengan kategori sangat curam ($>40^\circ$), sehingga ketiga wilayah kapanewon ini merupakan wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor yang tinggi. Selain ketiga kapanewon ini juga ada Kapanewon Kalibawang, Pengasih, dan Nanggulan yang sebagian wilayahnya memiliki kemiringan lereng curam sampai sangat curam dengan potensi bahaya longsor tinggi. Sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada peta berikut:



Peta Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Kulon Progo

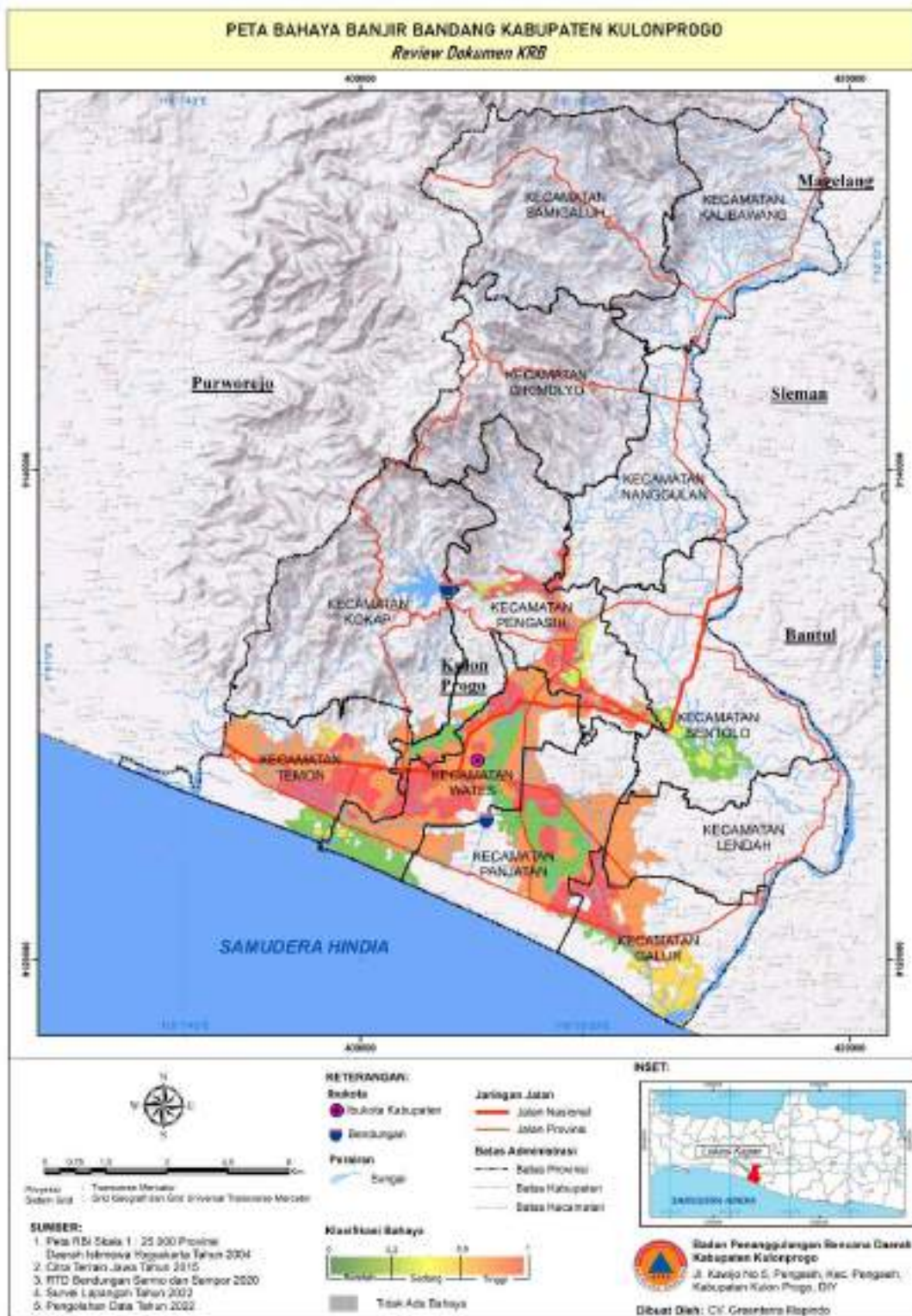
II - 25

(Early Warning Systems), dan lain-lain. Mitigasi non struktural dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman, kajian-kajian, regulasi di level Kalurahan; pembuatan SOP, dan simulasi/gladi. Adapun kegiatan mitigasi non struktural secara komprehensif dilaksanakan dalam program Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana.

Karakteristik geografis dan administratif Kabupaten Kulon Progo berpengaruh terhadap adanya potensi bencana lintas batas wilayah administratif seperti misalnya intensitas hujan tinggi yang terjadi terjadi di kawasan Hulu DAS Progo dan DAS Bogowonto dapat mengakibatkan banjir atau banjir bandang yang dampaknya sampai ke wilayah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, kemiringan lereng yang besar di perbukitan menoreh terutamanya di Kapanewon Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Sentolo, Pengasih, Kokap, dan Nanggulan, menyebabkan daerah ini memiliki potensi banjir bandang (Flash Flood Potential Index - FFPI) yang tinggi. Ditambah wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang luas menghasilkan debit aliran yang besar. Selain itu, banjir terjadi karena limpasan air hujan yang berada di bentang topografi yang relatif rendah terhambat mengalir ke pantai akibat drainase/sungai tidak berfungsi optimal. Selanjutnya, tingginya intensitas curah hujan pada periode musim hujan berdampak terhadap kejadian bencana banjir terutamanya di wilayah langganan banjir di Kapanewon Panjatan dan Temon.

Banjir hampir terjadi di setiap musim penghujan mengakibatkan kerugian di semua sektor, terutama sektor jasa, pertanian, dan perikanan. Penanganan banjir dan genangan dilakukan dari level pemerintah pusat, propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai kewenangan. Bentuk penanganannya berupa kegiatan konservatif (pengurangan laju run off dengan vegetasi) maupun teknis (rehabilitasi dan normalisasi saluran) serta pembuatan bangunan sipil teknis lainnya. Saat ini masih berlangsung proyek multiyears pengendali banjir sekitar kawasan Bandara Internasional Yogyakarta yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian PUPR yang bertujuan untuk menanggulangi banjir di kawasan sekitar bandara.

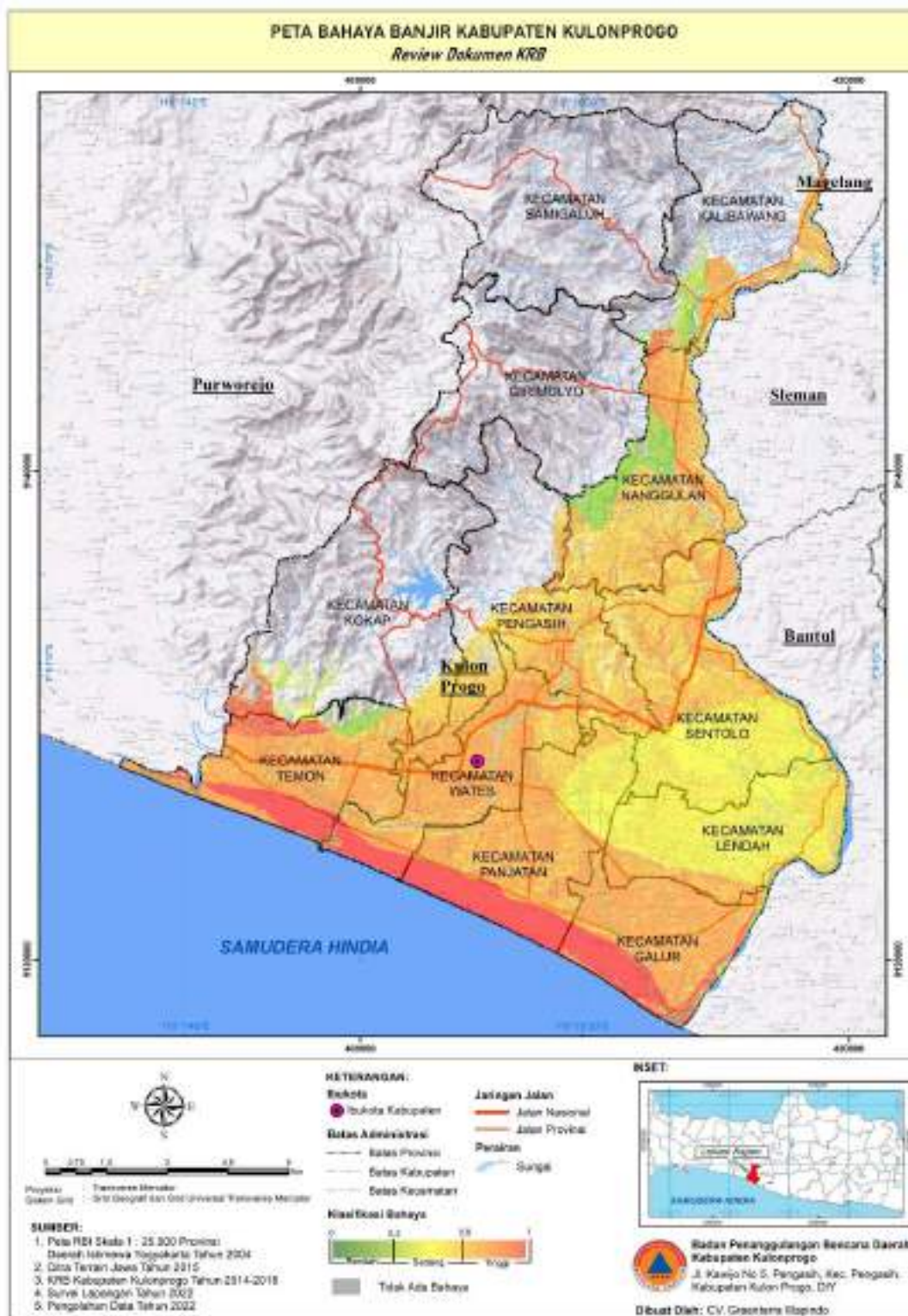
Sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana banjir bandang dan banjir di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.6

Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.7

Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kulon Progo

Dampak hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunungapi Merapi yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, Sleman, Boyolali, dan Klaten dapat melanda wilayah Kabupaten Kulon Progo. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana letusan gunung api dapat dilihat pada peta berikut.

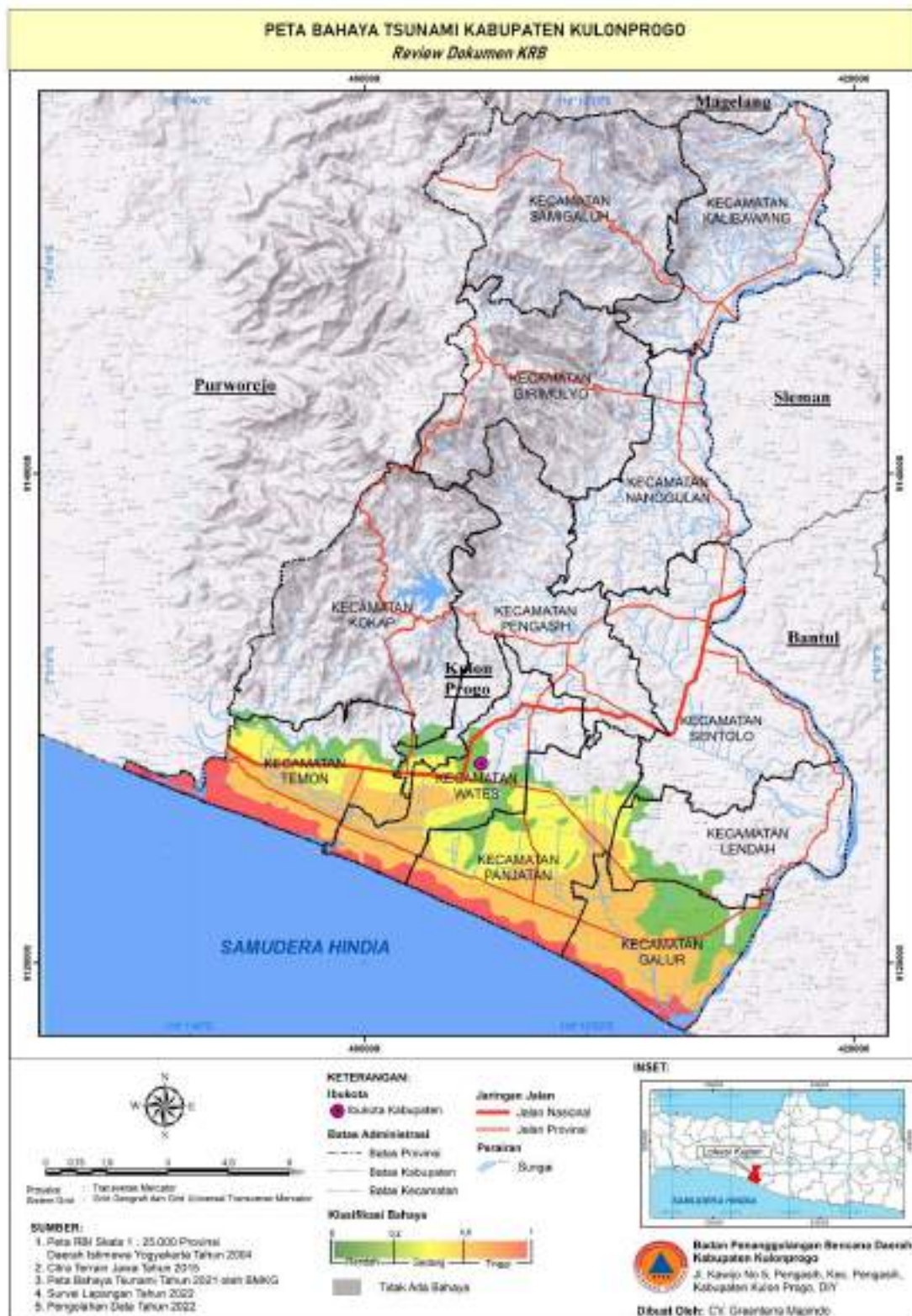


Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.8

Peta Wilayah Rawan Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Kulon Progo

Tatanan geologi dan geomorfologi di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bentang lahan pesisir meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, dan Galur memiliki potensi bahaya tsunami, banjir, liquifaksi, gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana Tsunami dan Gelombang Ekstrem dan Abrasi dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.9

Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kulon Progo



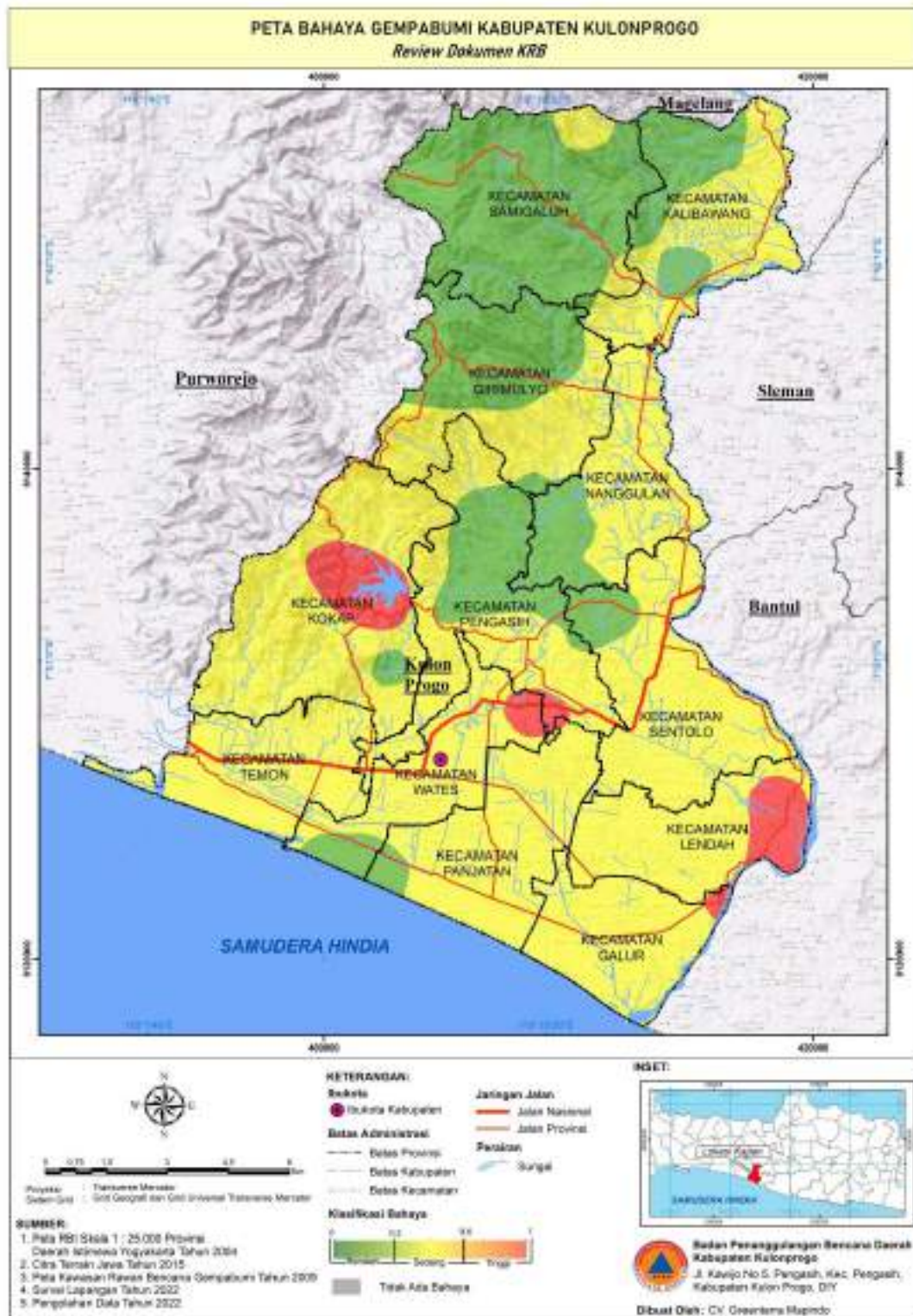
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.10

Peta Wilayah Rawan Bencana Gelombang Ekstrem Kabupaten Kulon Progo

Tsunami adalah ancaman dengan probabilitas relatif rendah tetapi berdampak sangat tinggi terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengkajian dan modeling BMKG (2021) dengan skenario terburuk, potensi gempa bumi berkekuatan 8,8 M berpotensi memicu tsunami di selatan Pulau Jawa. Wilayah yang berpotensi terdampak di Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Di Kabupaten Kulon Progo terdapat 4 Kapanewon dan 31 Kalurahan yang berpotensi terdampak tsunami akibat gempa bumi megathrust dengan waktu tiba gelombang tsunami berkisar 38 – 42 menit dengan ketinggian maksimum 18 – 22 meter dan landasan maksimal sejauh 7 km. Daerah yang berpotensi terlanda tsunami adalah daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kawasan strategis bagi pengembangan dan pembangunan Kulon Progo bagian selatan. Untuk meminimalkan dampak tsunami, di wilayah selatan sudah menginisiasi pembentukan Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan berbagai pihak juga telah menyediakan layanan peringatan dini tsunami yang selalu diuji coba setiap jam 10.00 WIB pada tanggal 26 setiap bulannya. Pemerintah juga sudah menyusun dan mensosialisasikan SOP dan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi tingkat kabupaten untuk kemudian di breakdown di level Kalurahan; pemerintah juga sudah menyusun rencana kontigensi yang diuji dengan simulasi tsunami yang melibatkan berbagai pihak.

Secara geologi wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki keragaman yang sangat tinggi. Banyaknya struktur sesar di wilayah Kabupaten Kulon Progo mengakibatkan potensi bencana karena faktor geologis seperti gempa bumi menjadi semakin tinggi. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana gempa bumi dapat dilihat pada peta berikut.



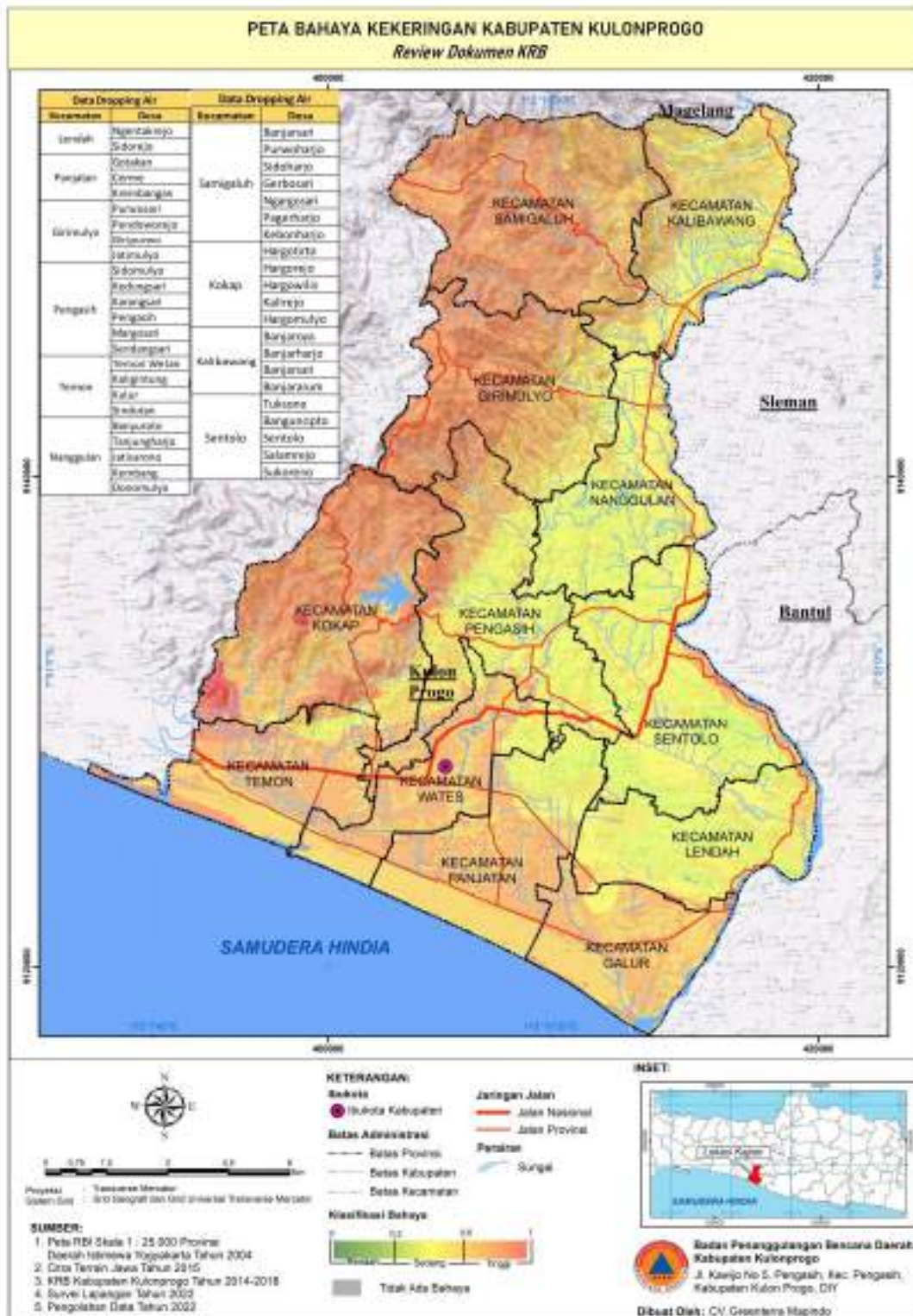
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.11

Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan kondisi karakteristik akuifer, pada periode musim kemarau beberapa wilayah di perbukitan menoreh yang meliputi Kapanewon Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap mengalami bencana kekeringan, sehingga pada puncak musim kemarau diperlukan upaya dropping air untuk memenuhi

kebutuhan air bersih warga masyarakat terdampak. Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana kekeringan dapat dilihat pada peta berikut



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.12

Peta Wilayah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Kulon Progo

Upaya dalam rangka menanggulangi bencana kekeringan dilakukan secara komprehensif dari berbagai pihak. Mulai dari upaya (edukasi) pelestarian sumber mata air yang digagas masyarakat, PAMSIMAS, SPAM Kalurahan, SPAM Mandiri Masyarakat, penambahan jaringan air bersih oleh Perumda Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo. Dalam kondisi kekeringan parah dan panjang upaya dropping air bersih dilakukan dengan pelibatan kolaborasi berbagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten, BAZNAS, PMI, Perumda Air Minum Tirta Binangun dan lembaga lainnya.

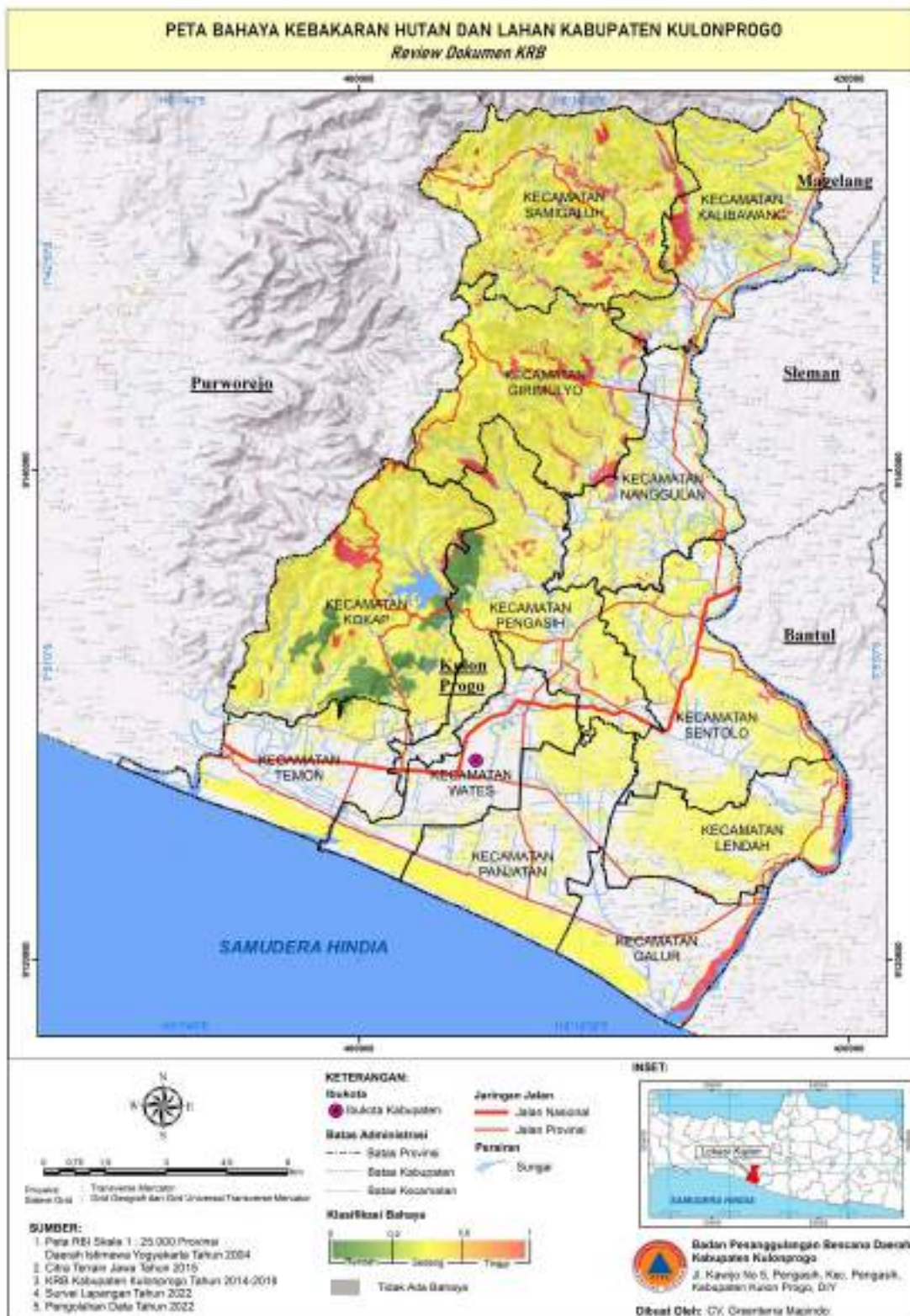
Ancaman bencana lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan, epidemi/ wabah penyakit, cuaca ekstrem dan kegagalan teknologi juga terjadi di Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat risiko bencana bervariasi dari tinggi hingga sedang.

Cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di wilayah Kabupaten Kulon Progo, antara lain : fenomena cuaca panas, hujan lebat dan angin kencang. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor terutama di wilayah perbukitan yang mempunyai potensi hujan lebat. Hujan disertai angin juga dapat disertai dengan kilat/petir bisa menyebabkan pohon maupun baliho tumbang/robuh selain itu dapat meningkatkan tinggi gelombang air laut. Penyebab terjadinya cuaca ekstrem ini antara lain akibat peningkatan aliran udara basah dari Asia menuju wilayah Jawa. Selain itu juga faktor siklon tropis Savannah, yang berdampak pada ketersediaan uap air melimpah dalam pembentukan awan hujan di wilayah Jawa.

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Penyebab kegagalan teknologi antara lain disebabkan karena: kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik teknologi, kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/teknologi, kerusakan komponen dan kebocoran reaktor. Kejadian tersebut dapat menimbulkan dampak berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia berbahaya atau bahan radioaktif, kecelakaan industri atau kecelakaan transportasi yang menimbulkan korban tewas serta kerugian harta benda.

Di wilayah Kulon Progo ada beberapa potensi terjadinya bencana karena kegagalan teknologi antara lain: potensi banjir bandang akibat jebolnya tanggul Waduk Sermo yang bisa mengancam Wilayah Perkotaan Wates. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana tersebut, dapat dilakukan mitigasi dan upaya pengurangan risiko bencana, antara lain dengan : peningkatan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini, perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan penanganan bencana, tanggap darurat dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk di sekitar, sosialisasikan rencana penyelamatan kepada pegawai dan masyarakat sekitarnya bekerjasama dengan instansi terkait, peningkatan standar keselamatan di bangunan dan Desa peralatan, antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain bangunan, pembuatan prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi.

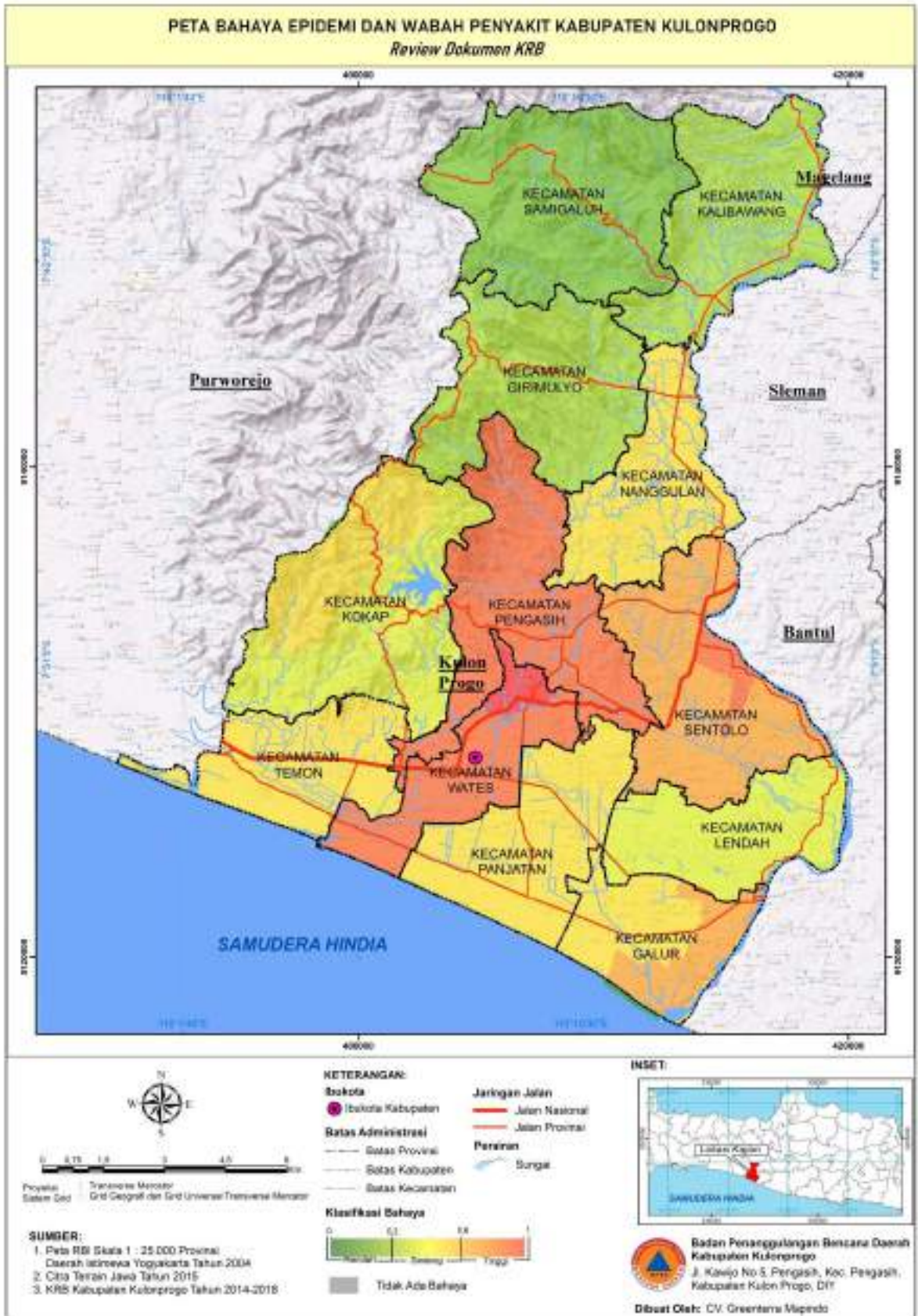
Adapun sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan, epidemi, cuaca ekstrem dan kegagalan teknologi dapat dilihat pada peta – peta berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

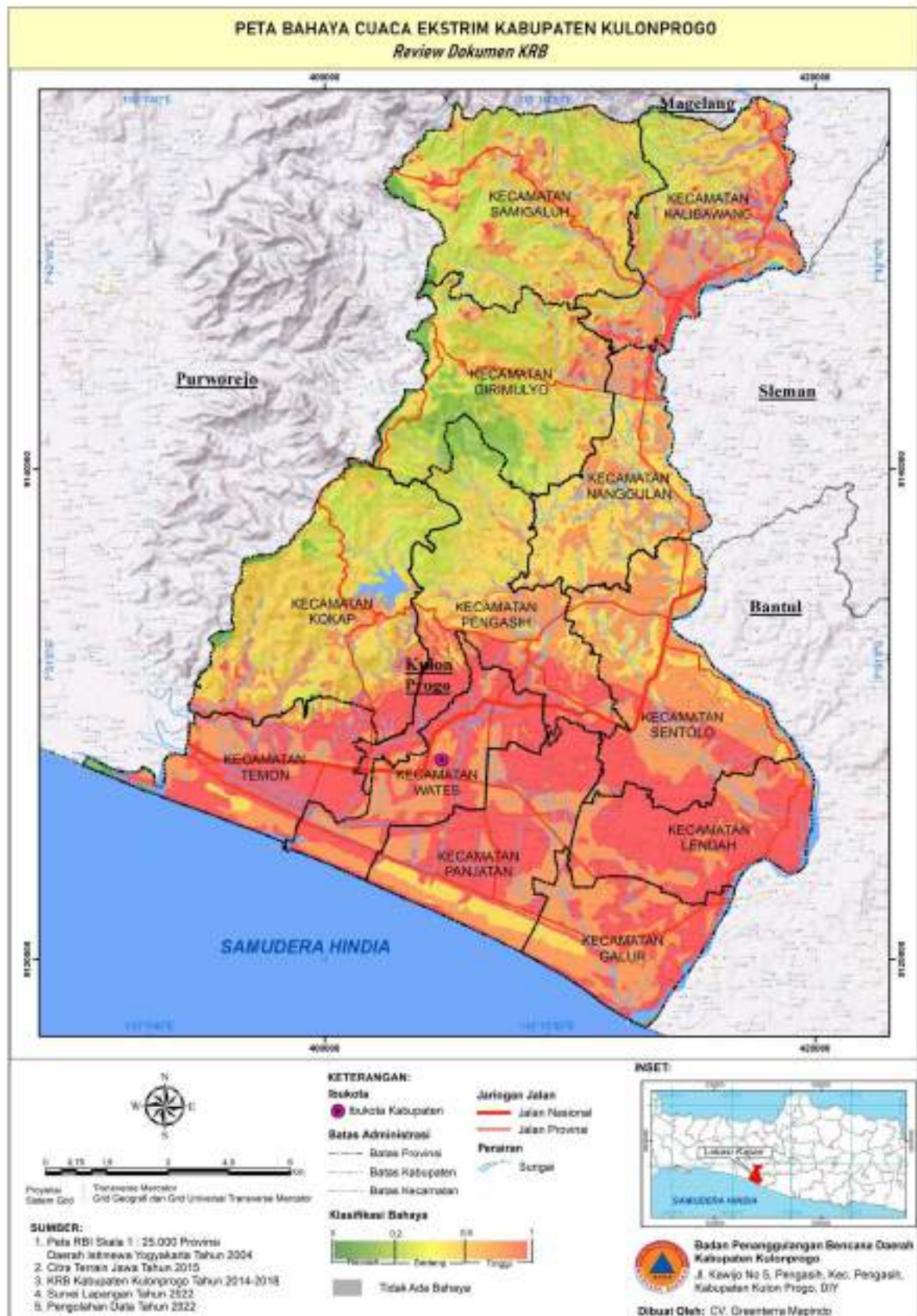
Gambar 2.13

Peta Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

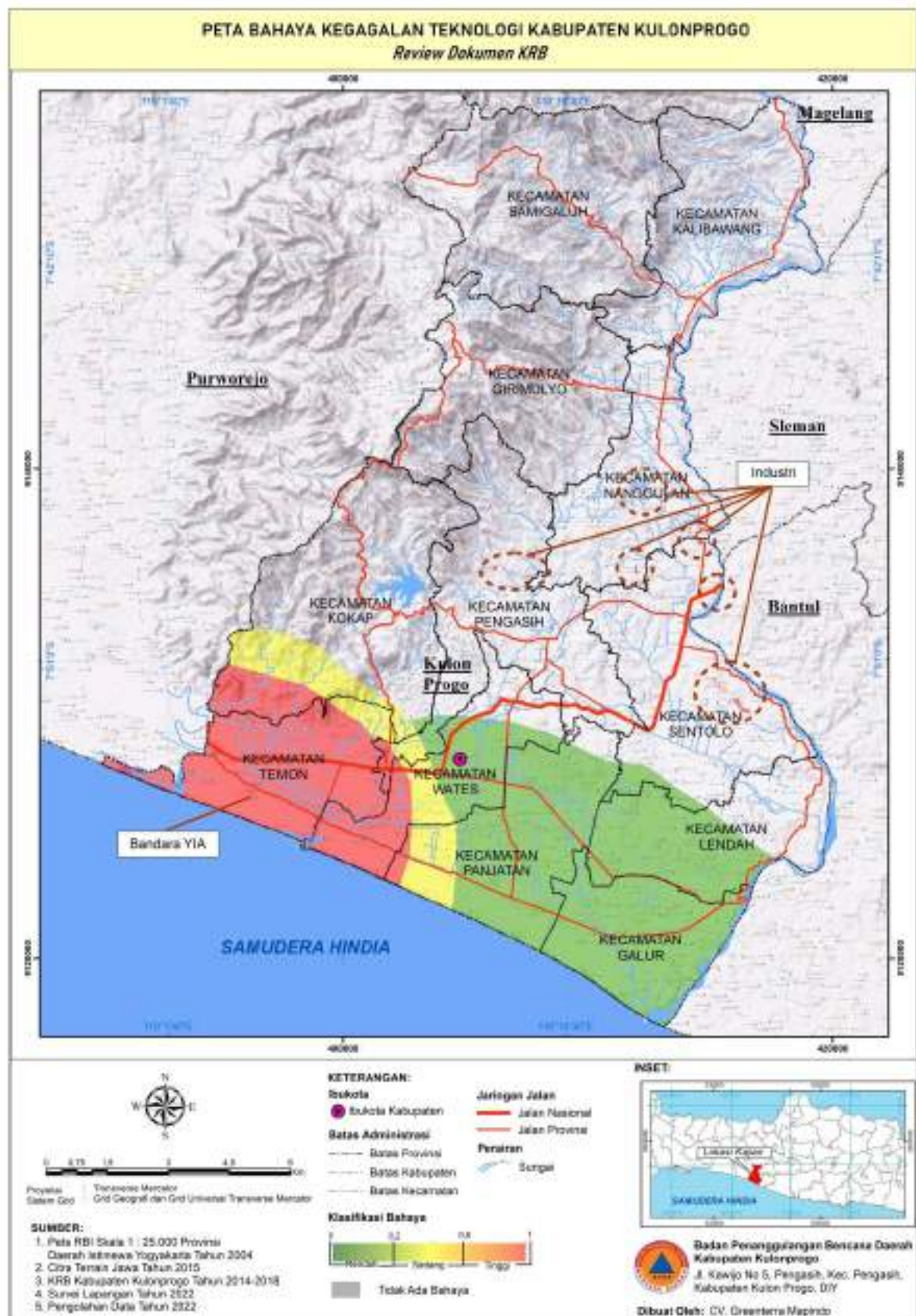
Gambar 2.14
Peta Wilayah Rawan Bencana Wabah Penyakit Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.15

Peta Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022

Gambar 2.16

Peta Wilayah Rawan Bencana Kegagalan Teknologi Kabupaten Kulon Progo

Dengan kondisi topografi dan geografi seperti di atas, hampir dipastikan tidak ada daerah yang benar-benar aman dari ancaman bencana, sehingga kejadian bencana di Kulon Progo hampir dipastikan selalu terjadi tiap tahun. Hal itu disebabkan banyaknya penduduk Kulon Progo yang tinggal di daerah rawan bencana. Ada kawasan yang memiliki satu ancaman bencana, namun lebih banyak daerah yang memiliki multi ancaman bencana. Untuk informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14

Jumlah Penduduk Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Tahun 2024 (jiwa)

No	Kapanewon	Penduduk Yang Tinggal Di Wilayah Ancaman Bencana										
		Jumlah Penduduk	Longsor	Banjir	Kekeringan	Gempa	Tsunami	Cuaca Ekstrem	Kebakaran	Epidemi Wabah	Gelombang Ekstrem	Letusan Gunung Api
1	Temon	29.125	7714	29.125	29.125	29.125	29.125	29.125	29.125	29.125	9.414	0
2	Wates	48.948	0	48.948	48.948	48.948	26.630	48.948	48.948	48.948	3.526	0
3	Panjatan	38.784	0	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784	38.784	13.097	0
4	Galur	32.749	0	32.749	32.749	32.749	32.749	32.749	32.749	32.749	13.851	12.997
5	Lendah	41.108	0	41.108	41.108	41.108	18152	41.108	41.108	41.108	0	29.885
6	Sentolo	50.042	0	50.042	50.042	50.042	3378	50.042	50.042	50.042	0	26.683
7	Pengasih	52.529	31.567	35.934	52.529	52.529	4929	52.529	52.529	52.529	0	0
8	Kokap	36.115	36.115	0	36.115	36.115	17568	36.115	36.115	36.115	0	0
9	Girimulyo	24.621	24.621	5652	24.621	24.621	0	24.621	24.621	24.621	0	0
10	Nanggulan	30.883	24.345	30.883	30.883	30.883	0	30.883	30.883	30.883	0	15.458
11	Samigaluh	27.093	27.093	0	27.093	27.093	0	27.093	27.093	27.093	0	0
12	Kalibawang	29.877	29.877	29.877	29.877	29.877	0	29.877	29.877	29.877	0	29.877
Total		441.874	181.332	343.102	441.874	441.874	171.315	441.874	441.874	441.874	39.888	114.900

Sumber data : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 lebih banyak didominasi oleh bencana hidrometeorologi daripada bencana geologi. Bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta tanah longsor. Sedangkan kelompok bencana geologi adalah gempa bumi terjadi dengan probabilitas yang cukup rendah. Untuk informasi kejadian bencana di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15

Kejadian Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Kapanewon	JENIS BENCANA											KEBAKARAN					Jumlah Kejadian
		Gempa Bumi	Tsunami	Banjir	Tanah longsor	L. Gunung	Gelombang	Cuaca Ekstrem / Angin Kencang	Kekeringan	Wabah Penyakit	Kegagalan	Konflik Sosial	Lahan	Gedung	Hutan	Pemukiman	Lain-lain	
1	Temon	0	0	0	2	0	0	22	0	0	0	0	6	0	0	2	0	32
2	Wates	0	0	7	4	0	0	23	0	0	0	0	5	2	0	10	2	53
3	Panjatan	0	0	0	0	0	0	63	38	0	0	0	4	0	0	2	0	107
4	Galur	0	0	0	1	0	0	37	0	0	0	1	4	1	0	4	0	48
5	Lendah	0	0	3	0	0	0	28	0	0	0	0	3	0	0	2	1	37
6	Sentolo	1	0	0	0	0	0	27	0	0	0	2	5	1	0	5	1	42

No	Kapanewon	JENIS BENCANA											KEBAKARAN					Jumlah Kejadian
		Gempa Bumi	Tsunami	Banjir	Tanah longsor	L. Gunung	Gelombang	Cuaca Ekstrim / Angin Kencang	Kekeringan	Wabah Penyakit	Kegagalan	Konflik Sosial	Lahan	Gedung	Hutan	Pemukiman	Lain-lain	
7	Pengasih	0	0	5	20	0	0	31	48	0	0	0	7	1	0	6	0	118
8	Kokap	0	0	0	91	0	0	52	359	0	0	0	7	0	0	6	0	515
9	Girimulyo	0	0	0	28	0	0	29	140	0	0	0	0	0	0	3	0	200
10	Nanggulan	0	0	1	3	0	0	24	3	0	0	0	2	1	0	5	1	40
11	Samigaluh	0	0	0	37	0	0	28	124	0	0	0	1	0	0	2	0	192
12	Kalibawang	0	0	0	21	0	0	42	66	0	0	0	0	0	0	2	0	131
	JUMLAH	1	0	16	207	0	0	406	778	0	0	3	44	6	0	49	5	1515

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Salah satu bentuk mitigasi bencana non struktural yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu melalui pembentukan Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana adalah desa/ kalurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak – dampak bencana yang merugikan. Pengembangan Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Dalam Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko – risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. Sebaran desa rawan bencana dan progress pembentukan Desa/ Kalurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Kulon Progo diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16

Desa Rawan Bencana dan Desa Tangguh Bencana per Kapanewon Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Desa Rawan Bencana	Jumlah Desa Tangguh	Rincian Desa Tangguh		
					Utama	Madya	Pratama
1	Temon	15	15	15	4	1	10
2	Wates	8	8	8	5	-	3
3	Panjatan	11	11	11	6	2	3
4	Galur	7	7	7	7	-	-
5	Nanggulan	6	6	3	-	-	3
6	Sentolo	8	8	4	-	-	4
7	Pengasih	7	7	7	1	1	5
8	Kokap	5	5	5	5	-	-
9	Girimulyo	4	4	4	2	2	-
10	Lendah	6	6	6	-	-	6
11	Samigaluh	7	7	7	5	2	-
12	Kalibawang	4	4	4	3	1	-
	Total	88	88	81	38	9	33

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Salah satu stakeholder yang berperan dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah institusi pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah sebagai institusi yang setiap harinya didatangi oleh para siswa menjadi potensi dalam menanamkan nilai-nilai kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam skala besar. Banyaknya siswa yang datang ke sekolah menjadi institusi yang dapat menanamkan nilai-nilai siaga dalam menghadapi bencana lewat kurikulum yang ada. Data sebaran Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.17

Data Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024

No	Tahun		
	2022	2023	2024
1	SMA Negeri 1 Temon - Temon	SDN Trayu Samigaluh	MIN 1 Kulon Progo
2	SMK Negeri 1 Kokap - Kokap	SDN Madigondo Wetan Samigaluh	SD N Karangwuni
3	SLB Dekso - Nanggulan		
4	MTsN 4 Girimulyo - Girimulyo		
5	SMP N 1 Kokap - Kokap		
6	SMP N 2 Kokap - Kokap		
7	SMP N 3 Kokap - Kokap		
Jumlah	7	2	2

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.1.2 Demografi**2.1.1.2.1 Komposisi dan Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo di tahun 2024 adalah 444.994 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 220.557 jiwa dan perempuan sebanyak 224.437 jiwa dengan jumlah keluarga sebesar 157.726. Dari tahun 2020-2023, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo terus mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2024, pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 0,32 persen. Pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk. Jumlah keluarga di Kabupaten Kulon Progo trennya terus meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 157.726 keluarga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 7 Ayat g disebutkan: penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Oleh karena itu masih ditemukan data ganda (data ganda dapat terjadi karena elemen data nama sama atau bisa diartikan punya kependudukan lebih dari satu, data ganda karena perekaman KTP Elektronik di lebih dari satu tempat, juga data kematian umpan balik kerja sama dari lembaga lain misalnya BPS, dan PT. Taspen), selain itu kematian belum dilaporkan, dan anomali lain yang kemudian dilakukan pembersihan data di level nasional, hal ini menyebabkan fluktuasi data penduduk. Secara rinci perkembangan penduduk disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Penduduk				Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)	
1	2020	219.505	223.498	443.003	-0,95	152.251
2	2021	219.347	223.527	442.874	-0,03	153.404
3	2022	219.776	223.815	443.591	0,16	155.219
4	2023	221.249	224.943	446.192	0,59	156.775
5	2024	220.557	224.437	444.994	-0,27	157.726

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

Berdasarkan data penduduk menurut komposisi umur dapat diketahui pada tahun 2024 jumlah penduduk berusia 0-4 tahun mengalami penurunan jumlah terbesar dibandingkan kelompok umur lain, yakni 24.546 pada tahun 2023 menjadi 23.365 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan kenaikan jumlah penduduk terbesar terjadi pada kelompok umur 65-69 tahun dari semula 20.765 jiwa pada tahun 2023 menjadi 21.735 jiwa pada tahun 2024.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan pada tahun 2024, dimana jumlahnya ada sekitar 302.719 jiwa. Sebelumnya, jumlah penduduk usia produktif mengalami kenaikan selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun 2020 ada 300.094 jiwa. Kemudian pada tahun 2021 ada 300.743 jiwa. Kemudian naik menjadi 303.633 jiwa pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 303.846 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut batasan umur disajikan pada tabel berikut.

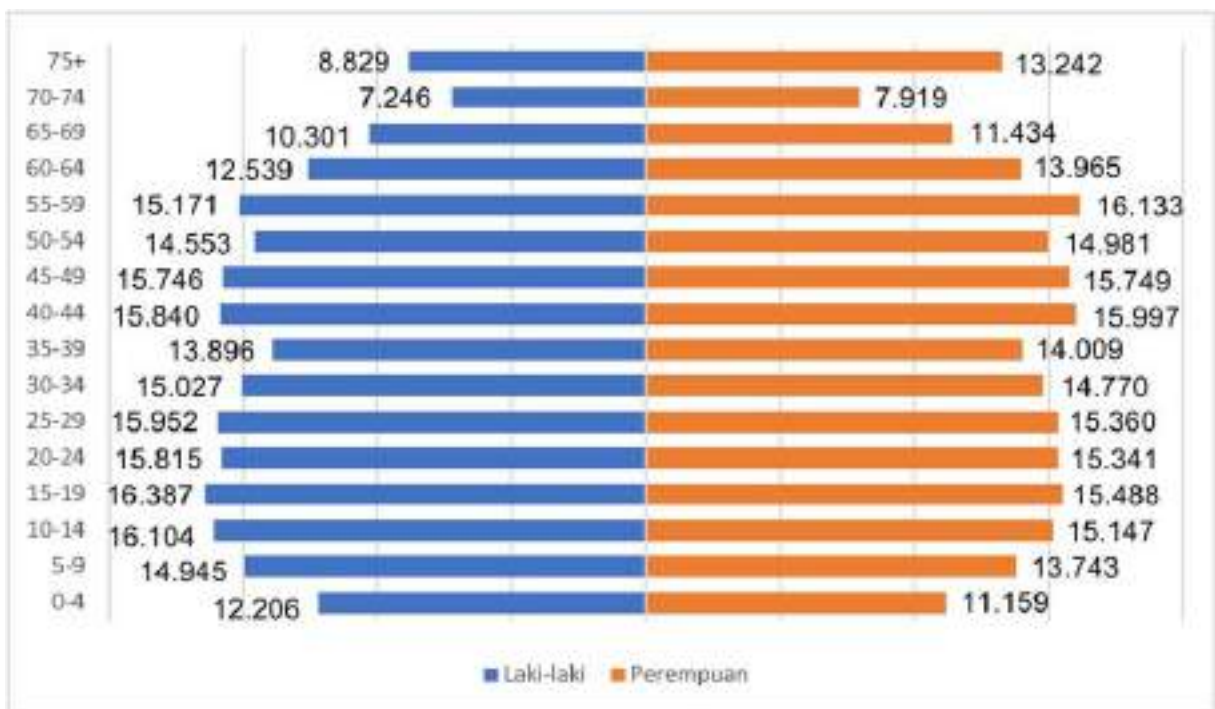
Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo (jiwa)
Tahun 2020-2024

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	0 – 4	26.372	25.506	19.970	24.546	23.365
2.	5 – 9	30.322	29.933	29.111	29.217	28.688
3.	10 – 14	32.377	32.561	31.616	31.861	31.251
4.	15 – 19	31.299	31.065	31.574	31.819	31.875
5.	20 – 24	32.480	32.196	31.822	31.321	31.156
6.	25 – 29	30.860	31.666	31.574	31.482	31.312
7.	30 – 34	27.403	27.656	29.312	29.365	29.797
8.	35 – 39	31.787	30.829	28.578	28.782	27.905
9.	40 – 44	31.412	31.665	32.065	32.366	31.837
10.	45 – 49	30.280	30.589	30.703	30.861	31.495
11.	50 – 54	31.457	31.153	30.533	30.626	29.534
12.	55 – 59	28.167	28.725	30.553	30.490	31.304
13.	60 – 64	24.949	25.199	26.919	26.734	26.504
14.	65-69	18.366	19.049	21.088	20.765	21.735
15.	70-74	12.984	13.261	14.780	14.312	15.165

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
16	>75	22.488	21.821	23.516	21.645	22.071
TOTAL		443.003	442.874	443.591	446.192	444.994

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2025

Sedangkan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan kelompok umur serta jenis kelamin ditampilkan dalam piramida penduduk seperti pada gambar berikut ini. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang rendah. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran (natalitas) dan angka kematian (mortalitas) cenderung seimbang, jumlah penduduk muda dengan jumlah penduduk tua seimbang.



Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo, 2025 diolah

Gambar 2.17

Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2024 jumlah penduduk perempuan Kulon Progo sebesar 50,44%, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 49,56%. Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023 Sex ratio pada tahun 2024 sebesar 98,27 yang berarti terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk menurut sex ratio disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio
2020	219.505	223.498	443.003	98,21

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio
2021	219.347	223.527	442.874	98,12
2022	219.776	223.815	443.591	98,19
2023	221.249	224.943	446.192	98,40
2024	220.557	224.437	444.994	98,27

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.1.2.2 Distribusi dan kepadatan penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Kulon Progo di tahun 2024 tidak berbeda signifikan dengan tahun 2023. Jumlah penduduk terbesar secara berurutan berada di Kapanewon Pengasih dengan jumlah 53.2357 jiwa, Kapanewon Sentolo dengan jumlah 50.424 jiwa, kemudian Kapanewon Wates dengan jumlah 49.396 jiwa. Di tahun 2024, pertumbuhan penduduk terjadi di Kapanewon Panjatan, Kapanewon Lendah, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih, dan Kapanewon Nanggulan. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kapanewon Pengasih. Sedangkan penurunan penduduk terjadi di Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Galur, Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Kalibawang. Penurunan penduduk paling besar terjadi di Kapanewon Wates.

Tabel 2.21

Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kapanewon Tahun 2020 – 2024

No.	Kapanewon	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
1	Temon	29.116	29.125	29.148	29.442	29.171	-0,92
2	Wates	48.949	48.948	49.088	50.041	49.396	-1,29
3	Panjatan	38.745	38.784	38.939	39.203	39.239	0,09
4	Galur	32.742	32.749	32.751	32.869	32.834	-0,11
5	Lendah	41.083	41.108	41.241	41.385	41.404	0,05
6	Sentolo	49.959	50.042	50.150	50.346	50.424	0,15
7	Pengasih	52.457	52.529	52.784	53.237	53.357	0,23
8	Kokap	36.214	36.115	36.016	36.094	35.814	-0,78
9	Girimulyo	24.689	24.621	24.647	24.712	24.708	-0,02
10	Nanggulan	30.874	30.883	31.044	31.286	31.296	0,03
11	Samigaluh	28.143	28.093	27.959	27.848	27.683	-0,59
12	Kalibawang	30.032	29.877	29.824	29.729	29.668	-0,21
Jumlah		447.007	443.003	442.874	443.591	444.994	-0,27

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

Kepadatan penduduk Kulon Progo tertinggi berada di Kapanewon Wates dengan angka 1.543,63 jiwa/km² atau setara dengan 3,86 kali lebih padat dibandingkan dengan Kapanewon Samigaluh yang memiliki kepadatan terendah yaitu 399,52 jiwa/km². Hal ini dikarenakan Kapanewon Wates merupakan pusat perkantoran, pelayanan, perbelanjaan dan hiburan di lingkup Kabupaten Kulon Progo. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, kepadatan penduduk tertinggi selalu berada di Kapanewon Wates, diikuti Kapanewon Lendah dan Kapanewon Galur.

Tabel 2.22

Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kapanewon Tahun 2020 – 2024 (jiwa/km²)

No.	Kapanewon	Luas Wilayah (Km ²)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Temon	36,30	802,09	802,34	802,98	811,07	803,61
2	Wates	32,00	1.529,66	1.529,63	1.534	1.563,78	1.543,63
3	Panjatan	44,59	868,92	869,79	873,27	879,19	880,00
4	Galur	32,91	994,90	995,11	995,17	998,75	997,69
5	Lendah	35,59	1.154,34	1.155,04	1.158,78	1.162,83	1.163,36
6	Sentolo	52,65	948,89	950,47	952,52	956,24	957,72
7	Pengasih	61,66	850,75	851,91	856,05	863,40	865,34
8	Kokap	73,80	490,70	489,36	488,02	489,08	485,28
9	Girimulyo	54,90	449,71	448,47	448,94	450,13	450,05
10	Nanggulan	39,61	779,45	779,68	783,74	789,85	790,10
11	Samigaluh	69,29	406,16	405,44	403,51	401,91	399,52
12	Kalibawang	52,96	567,07	564,14	563,14	561,35	560,09
Jumlah		586,26	755,64	755,42	756,65	761,08	759,03

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, jumlah grup kesenian dan sarana olah raga. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarnya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi: PDRB atas dasar harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per

satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 2020-2024 secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, PDRB ADHB mencapai 11,99 triliun rupiah, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 11,66 triliun rupiah. Kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang dimulai di akhir Triwulan I 2020 turut mempengaruhi pencapaian PDRB Kabupaten Kulon Progo. Hampir semua sektor mengalami penurunan, diakibatkan Pandemi Covid-19 ini, namun beberapa diantaranya justru naik dan dapat bertahan yaitu: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Di tahun 2021, PDRB meningkat menjadi 12,64 triliun rupiah dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 14,3 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB mencapai 15,84 triliun Rupiah. Kemudian pada tahun 2024 mencapai 16,91 triliun Rupiah selengkapnya nilai PDRB berdasar ADHB Tahun 2020-2024 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.23

**PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024 (dalam miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.959,54	2.039,61	2.233,50	2.450,14	2.566,07
Pertambangan dan Penggalian	167,51	167,39	178,30	205,75	209,29
Industri Pengolahan	1.304,83	1.367,02	1.464,83	1.576,90	1.709,15
Pengadaan Listrik dan Gas	9,83	10,08	11,08	12,36	13,67
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,31	15,46	16,51	17,41	18,32
Konstruksi	1.962,14	2.146,80	2.279,42	2.365,63	2.546,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.485,15	1.544,66	1.750,48	1.871,59	2.004,42
Transportasi dan Pergudangan	902,88	1.151,84	1.760,89	2.363,58	2.534,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	393,21	453,00	542,97	597,42	655,55
informasi dan Komunikasi	601,32	721,86	781,71	829,18	864,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	329,35	352,14	406,90	455,94	493,56
Real Estate	388,22	395,80	420,56	444,05	467,35
Jasa Perusahaan	31,69	34,71	38,75	43,46	46,70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	949,83	963,22	1.030,73	1.071,59	1.152,12
Jasa Pendidikan	633,96	680,72	716,48	772,42	819,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189,18	204,17	222,16	248,28	269,80

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Lainnya	331,35	394,07	470,66	515,70	539,69
Produk Domestik Regional Bruto	11.654,32	12.642,56	14.325,95	15.841,34	16.911,59

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo

Tahun 2022 : Angka Revisi; Tahun 2023: Angka Sementara; Tahun 2024 : Angka sangat Sementara

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010) secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2020-2024. Pada tahun 2019, PDRB ADHK mencapai 8,77 triliun Rupiah. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak pandemi Covid-19 menjadi sebesar 8,41 triliun Rupiah, namun pada tahun 2021 berhasil naik menjadi 8,77 triliun Rupiah. Di tahun 2022, PDRB ADHK kembali naik menjadi 9,41 triliun Rupiah, di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 9,95 triliun Rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 10,43 triliun Rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24

PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (dalam miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.224,90	1.244,58	1.267,43	1.283,51	1.294,36
Pertambangan dan Penggalian	127,05	124,14	125,78	134,03	134,95
Industri Pengolahan	978,80	988,14	1.009,18	1.051,75	1.097,32
Pengadaan Listrik dan Gas	8,20	8,40	8,95	9,60	10,60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,69	11,35	11,84	12,22	12,81
Konstruksi	1.390,05	1.446,02	1.491,30	1.565,35	1.669,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.081,96	1.098,60	1.169,49	1.215,41	1.278,88
Transportasi dan Pergudangan	704,85	772,66	1.017,89	1.207,62	1.276,76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281,61	311,42	351,87	375,65	400,89
informasi dan Komunikasi	605,44	710,78	747,10	780,94	813,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	218,87	221,90	233,94	260,39	279,36
Real Estate	297,39	298,98	307,74	317,21	330,08
Jasa Perusahaan	26,54	28,64	30,63	33,06	34,90
Administrasi Pemerintahan,	596,45	584,79	601,68	613,82	652,66

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	501,58	523,43	529,61	548,76	575,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,68	150,79	157,66	165,99	175,82
Jasa Lainnya	269,25	313,53	357,24	376,63	388,70
Produk Domestik Regional Bruto	8.468,29	8.838,14	9.951,95	9.951,95	10.426,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kulon Progo

Tahun 2022 : Angka Revisi; Tahun 2023 : Angka Sementara; Tahun 2024 : Angka sangat Sementara

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS Kulon Progo, pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo masih mengalami peningkatan hingga mencapai angka 13,49%. Angka ini relatif sangat tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten kota, provinsi bahkan angka pertumbuhan nasional. Bila dicermati secara rinci, pertumbuhan terbesar masih berasal dari sektor konstruksi yang masih mengalami peningkatan sebesar 68,64 % naik sekitar 10% bila dibandingkan tahun 2018. Kenaikan sektor konstruksi ini sejalan dengan aktivitas penyelesaian BIY yang ditargetkan beroperasi penuh pada 29 Maret 2020 serta pembangunan *underpass* JJLS yang diselesaikan pada Tahun 2019. Sektor lain yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah pengadaan listrik dan gas, transportasi dan perdagangan. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan drastis dari 26,64% pada tahun 2018 menjadi 3,26% pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, dengan adanya Pandemi Covid-19, perekonomian hampir di seluruh dunia mengalami perubahan yang cukup drastis. Berdasarkan hasil analisis sementara, pada Tahun 2020, perekonomian di Kulon Progo mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam menjadi -3,45%. Hampir seluruh sektor mengalami penurunan bahkan hingga level negatif seperti yang terjadi pada sektor konstruksi yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi. Sektor yang tumbuh pesat pada kondisi pandemi ini adalah jasa kesehatan, komunikasi dan informasi serta layanan transportasi dan perdagangan. Hal ini merupakan hasil *refocusing* anggaran pemerintah serta perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap jasa kesehatan serta berkembangnya aktivitas *work from home* yang membutuhkan media komunikasi dan informasi serta belanja online yang mendorong tumbuhnya sektor logistik yang melibatkan transportasi dan perdagangan.

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Kulon Progo sudah menunjukkan peningkatan yang berarti terbukti dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami rebound dari -3,45% di tahun 2020 menjadi 4,37% di tahun 2021 dengan penyumbang terbesar adalah sektor Informasi dan komunikasi. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo kembali mengalami peningkatan mencapai 6,57% dengan penyumbang terbesar adalah sektor transportasi dan perdagangan dengan persentase mencapai 31,76%.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,65% pada kategori pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha, Transportasi dan Perdagangan memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi, yaitu sebesar 18,64%. Pertumbuhan tertinggi kedua terdapat pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yaitu sebesar 10,24%, disusul oleh jasa perusahaan sebesar 7,92%. Tahun 2024 pertumbuhan

ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 4,77%, kontribusi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 disumbangkan oleh Sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,41%.

Rincian laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2020-2024 dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.25

**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (persen)**

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.62	1.61	1.84	1.27	0,84
Pertambangan dan Penggalan	-8.56	-2.29	1.33	6.55	0,69
Industri Pengolahan	-3.49	0.95	2.13	4.22	4,33
Pengadaan Listrik dan Gas	-1.27	2.46	6.61	7.18	10,41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.07	6.23	4.32	3.23	4,76
Konstruksi	- 18.44	4.03	3.13	4.97	6,68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1.59	1.54	6.45	3.93	5,22
Transportasi dan Pergudangan	5.48	9.65	31.74	18.64	5,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5.13	10.59	12.99	7.47	6,72
Informasi dan Komunikasi	17.17	17.40	5.11	4.53	4,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	-4.88	1.38	5.43	10.24	7,28
Real Estate	4.65	0.53	2.93	3.08	4,06
Jasa Perusahaan	2.58	7.90	6.97	7.92	5,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3.26	-1.96	2.89	2.02	6,33
Jasa Pendidikan	1.24	4.36	1.18	3.62	4,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.27	4.22	4.56	5.28	5,92
Jasa Lainnya	- 16.28	16.45	13.94	5.43	3,21
Produk Domestik Regional Bruto	-3.45	4.37	6.58	5.65	4,77

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo

Tahun 2021 : Angka Revisi; Tahun 2022 : Angka Sementara; Tahun 2023 : Angka sangat sementara

3. Distribusi Persentase PDRB

Pada tahun 2020-2024, secara garis terjadi pergeseran dominasi sektor terkait kontribusinya terhadap PDRB. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang awalnya merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Kulon Progo karena memiliki digeluti oleh mayoritas penduduk, kini telah digeser oleh sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan seiring makin meningkatnya aktivitas Bandara YIA. Perkembangan distribusi persentase PDRB ADHB selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26

**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persen)**

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.69	16.13	15.53	15.43	15,17
Pertambangan dan Penggalian	1.39	1.32	1.25	1.30	1,24
Industri Pengolahan	11.07	10.81	10.23	9.95	10,11
Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.12	0.12	0.11	0,11
Konstruksi	16.67	16.98	15.92	14.93	15,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.65	12.22	12.23	11.81	11,85
Transportasi dan Pergudangan	8.56	9.11	12.30	14.98	14,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.35	3.58	3.79	3.77	3,88
informasi dan Komunikasi	5.11	5.71	5.46	5.23	5,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.81	2.79	2.84	2.88	2,92
Real Estate	3.29	3.13	2.94	2.80	2,76
Jasa Perusahaan	0.27	0.27	0.27	0.27	0,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	8.09	7.62	7.20	6.76	6,81
Jasa Pendidikan	5.39	5.38	5.01	4.87	4,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.61	1.61	1.55	1.57	1,60
Jasa Lainnya	2.83	3.12	3.29	3.25	3,19
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo

Tahun 2022 : Angka Revisi; Tahun 2023 : Angka Sementara; Tahun 2024 : Angka sangat Sementara

Tabel 2.27

**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persen)**

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,0%	14,2%	13,5%	12,9%	
Pertambangan dan Penggalian	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	
Industri Pengolahan	11,2%	11,3%	10,7%	10,6%	
Pengadaan Listrik dan Gas	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
Konstruksi	15,8%	16,3%	15,8%	15,7%	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,3%	12,5%	12,4%	12,2%	

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Transportasi dan Pergudangan	7,4%	7,9%	10,8%	12,1%	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,2%	3,5%	3,7%	3,8%	
informasi dan Komunikasi	6,9%	8,4%	7,9%	7,8%	
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	
Real Estate	3,4%	3,4%	3,3%	3,2%	
Jasa Perusahaan	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	6,8%	6,7%	6,4%	6,2%	
Jasa Pendidikan	5,7%	6,0%	5,6%	5,5%	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	
Jasa Lainnya	3,1%	3,6%	3,8%	3,8%	
Produk Domestik Regional Bruto	95,9%	100,0%	100,0%	100,0%	

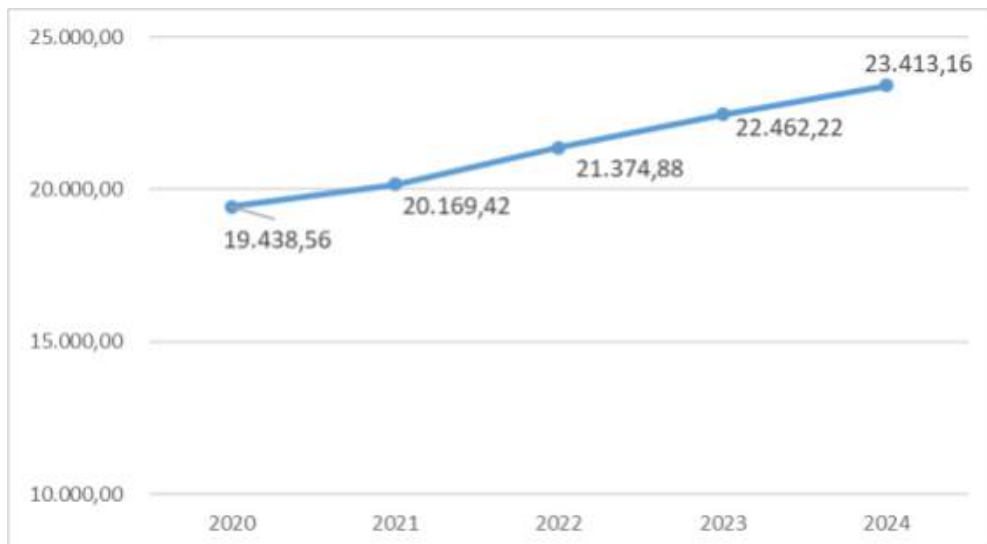
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab, Kulon Progo

Tahun 2021 : Angka Revisi; Tahun 2022 : Angka Sementara; Tahun 2023 : Angka sangat Sementara

4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita, Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk, Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk,

Selama kurun waktu 2020-2024, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan mengalami fluktuasi, Pada tahun 2019 PDRB Per kapita mencapai 20.300 ribu Rupiah, namun pada tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19 mengalami penurunan menjadi 19.438,56 ribu Rupiah, Pada tahun 2021 dan 2022 PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo terus mengalami peningkatan menjadi 20.169,42 ribu Rupiah dan 21.374,88 ribu Rupiah. Sedangkan di tahun 2023, PDRB per kapita mencapai 22.462,22 ribu Rupiah, dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 23.413,16 ribu Rupiah.



Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

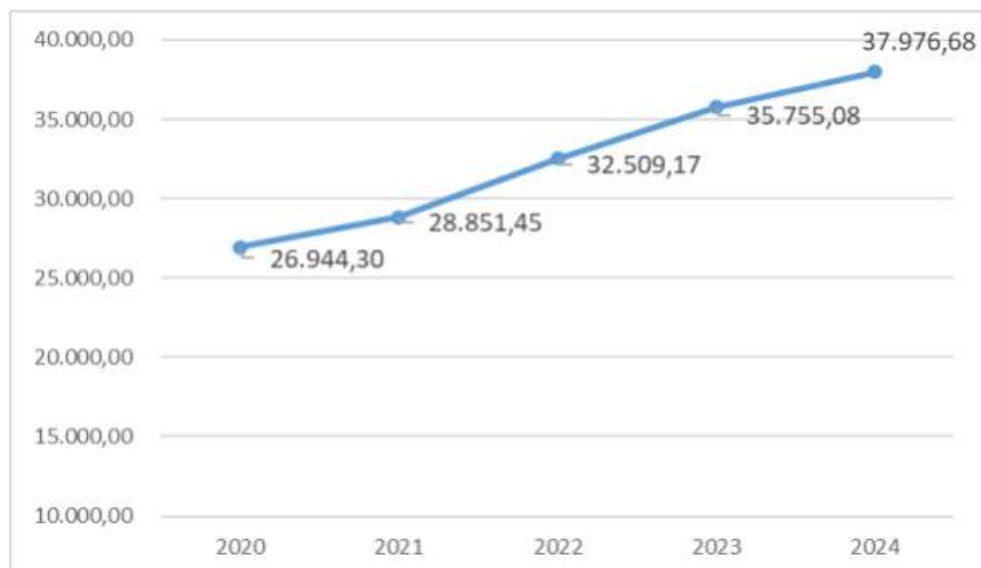
Keterangan : *) angka sementara

***) angka sangat sementara

Gambar 2.18

PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 (ribu Rupiah)

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Selama kurun waktu 2019-2020 mengalami penurunan disebabkan karena adanya pandemi covid 19. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB turun menjadi 26.944 ribu Rupiah, namun kembali naik pada tahun 2021 menjadi sebesar 28.851 ribu Rupiah. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan menjadi sebesar 32.509 ribu Rupiah. Kemudian di tahun 2023, PDRB per kapita mengalami kenaikan menjadi 35.755 ribu rupiah. Selanjutnya pada tahun 2024 naik lagi menjadi 37.977 ribu Rupiah



Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Keterangan : *) angka sementara

***) angka sangat sementara

Gambar 2.19

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024 (ribu Rupiah)

Berdasarkan hasil hitungan PDRB per kapita ADHB kabupaten/kota di DIY oleh BPS DIY menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar wilayah yang cukup besar. Sampai tahun 2023 Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi yaitu 122.951 ribu Rupiah. Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai PDRB relatif besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit. Sementara Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai PDRB paling tinggi untuk tingkat kabupaten di wilayah Provinsi DIY mencatat PDRB per kapita sebesar 51.354 ribu Rupiah jauh di bawah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Kabupaten Sleman cukup besar yaitu 3 kali lipat penduduk Kota Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai PDRB per kapita berada pada posisi 3 setelah Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman. Berikut ini nilai PDRB perkapita se Provinsi DIY.

Tabel 2.28

**PDRB Perkapita menurut Kabupaten/Kota di DIY Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2024 (ribu Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
Kulon Progo	26.965	28.851	32.484	35.768	37.977
Bantul	26.556	28.356	31.158	33.694	35.843
Gunung Kidul	25.398	27.304	30.344	33.257	35.503
Sleman	40.568	43.560	47.739	51.354	54.501
Kota Yogyakarta	95.591	102.702	113.505	122.951	131.433

Sumber data : BPS DIY, 2025

Keterangan : *) angka sementara

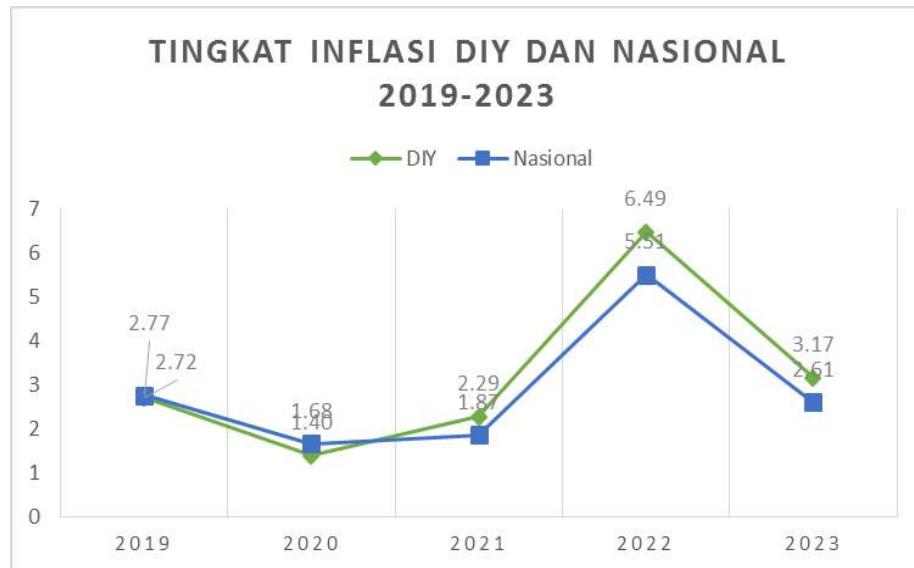
**) angka sangat sementara

5. Laju Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Perhitungan inflasi di Kabupaten Kulon Progo masih menggunakan acuan nilai dari Kota Yogyakarta dikarenakan BPS belum menetapkan Kota Wates sebagai salah satu lokasi dalam mengidentifikasi inflasi. Laju inflasi year on year (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 3,17%. Berdasarkan kelompok pengeluaran inflasi paling tinggi disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya mencapai 1,20% dengan andil 0,28%. Kedua kelompok kesehatan dengan inflasi 0,62% berikan andil 0,02%, dan ketiga adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 0,40% dan andil 0,02%. Untuk mengendalikan laju inflasi telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan program antara lain: operasi pasar, monev harga pasar terutama pada momentum menjelang hari raya keagamaan, tahun baru, dan libur panjang. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo telah mengembangkan sistem informasi terkait harga pangan yaitu SIKEPOKU (sistem

informasi kebutuhan pokok Kabupaten Kulon Progo) dimana harga pokok dipantau setiap hari pada 6 pasar (Pasar Wates, Bendungan, Sentolo, Temon, Galur, Nanggulan).



Sumber data: BPS DIY, 2024

Gambar 2.20

Perbandingan Tingkat Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2019-2023

6. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan sesuai dengan BPS digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 sebesar Rp 438.007,00 naik dari tahun 2023 yaitu sebesar Rp 416.870,00. Garis kemiskinan sebesar Rp 438.007,00 artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai konsumsi di bawah Rp 438.007,00 selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa, garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selalu di bawah D.I Yogyakarta dan Nasional.

Garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 sebesar Rp 438.007,00 per kapita per bulan. Jika dibandingkan tahun 2023 dengan garis kemiskinan sebesar Rp 416.870,00 per kapita per bulan, maka terjadi kenaikan sebesar 9,51%. Pada waktu yang sama, kenaikan ini lebih rendah

dibandingkan D.I Yogyakarta yang mencapai 9,84% namun diatas kenaikan nasional yang mengalami kenaikan sebesar 8,9%.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dibanding tahun 2023. Perbandingan kondisi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta selengkapnya ditunjukkan dengan tabel berikut.

Tabel 2.29

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)					Penduduk Miskin									
						Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	353.807	360.202	381.666	416.870	438.007	78,06	81,14	73,21	70,74	71,48	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
Bantul	405.613	418.265	445.511	488.340	510.740	138,66	146,98	130,13	128,51	126,93	13,50	14,04	12,27	11,96	11,66
Gunungkidul	319.851	325.907	350.739	382.249	401.209	127,61	135,33	122,82	122,24	120,41	17,07	17,69	15,86	15,6	15,18
Sleman	411.610	422.933	450.763	491.652	513.926	99,78	108,93	98,92	97,5	97,94	8,12	8,64	7,74	7,52	7,46
Kota Yogyakarta	533.423	556.674	601.905	662.267	686.973	31,62	34,07	29,68	29,48	28,79	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26
DIY	404.861	482.855	521.673	573.022	602.437	475,73	506,45	454,76	448,47	445,55	12,28	12,80	11,34	11,04	10,83

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.30

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024**

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	3,32	3,01	2,32	2,54	2,48	0,86	0,75	0,56	0,61	0,62
Bantul	1,85	2,24	2,11	1,79	2,18	0,43	0,54	0,50	0,44	0,56
Gunungkidul	2,68	2,98	2,63	2,71	2,56	0,63	0,76	0,67	0,60	0,65
Sleman	1,37	1,26	0,80	0,86	1,21	0,33	0,32	0,27	0,32	0,27
Kota Yogyakarta	1,19	1,07	1,18	1,34	0,76	0,20	0,21	0,13	0,18	0,14
D.I.Yogyakarta	1,94	2,42	2,01	1,72	1,87	0,46	0,65	0,50	0,38	0,45

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 secara umum semakin kecil. Pada tahun 2020 menjadi 18,01% dan kembali meningkat menjadi 18,38% pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 16,39% di tahun 2022. Penurunan di tahun 2022 ini sebesar 1,99 persen poin merupakan penurunan terbesar baik di DIY maupun untuk Kulon Progo sendiri sepanjang waktu. Pada tahun 2024 penurunan juga terjadi namun dengan poin persen yang sangat kecil yaitu pada 0,02 persen poin menjadi 15,62% dibanding tahun 2023.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan keterampilan dan pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja. Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, namun secara umum mengalami penurunan, dari 3,32 di tahun 2020 menjadi 2,48 di tahun 2024. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi.

7. Rasio Gini

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang atau rendah ketimpangannya secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Adapun data Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel berikut.

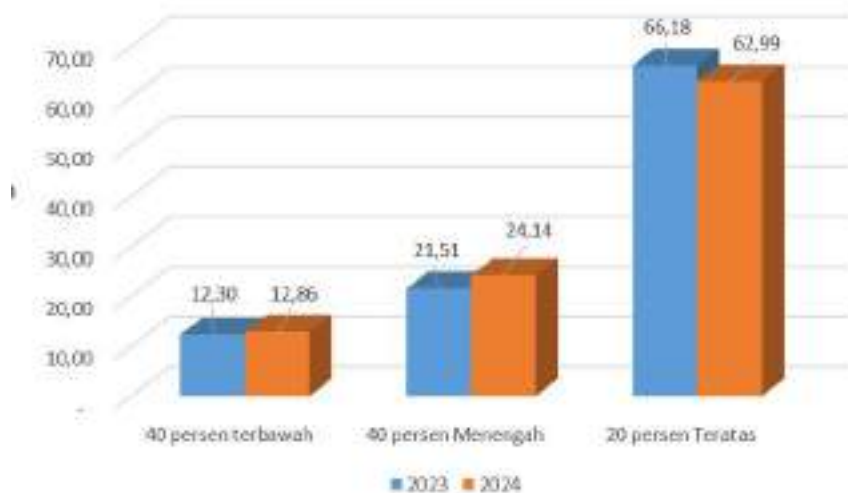
Tabel 2.31

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Gini	Kriteria Oshima
2020	0,383	Ketimpangan Moderat
2021	0,367	Ketimpangan Moderat
2022	0,380	Ketimpangan Moderat
2023	0,402	Ketimpangan Moderat
2024	0,373	Ketimpangan Moderat

Sumber data: BPS DIY dan BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 menggambarkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat yang semakin melebar, namun demikian pada tahun 2024 kondisinya membaik dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu menurun sebesar 0,029 poin. Apabila dilihat dari 3 kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas penurunan ini disumbang paling besar peranannya dari penurunan kelompok pengeluaran 20 persen teratas, yang turun dari 66,18% menjadi 62,99% atau 3,19 persen poin. Di sisi lain kelompok menengah dan terendah naik masing-masing dari 21,51% menjadi 24,14% dan 12,30% menjadi 12,86%. Selengkapnya ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.21

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Kulon Progo (%) Tahun 2023-2024

Besaran Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 lebih rendah dari rata-rata DIY dan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang Kabupaten Kulon Progo yang lebih merata dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional. Gini ratio pada Tahun 2020 sebesar 0,383, turun menjadi 0,367 pada tahun 2021. Tahun 2022, rasio gini masyarakat di Kulon Progo selisih 0,001 point dengan nasional dan pada Tahun 2023 rasio gini sempat meningkat menjadi 0,402, namun menurun lagi menjadi 0,373 pada tahun 2024.

Tabel 2.32

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2020–2024

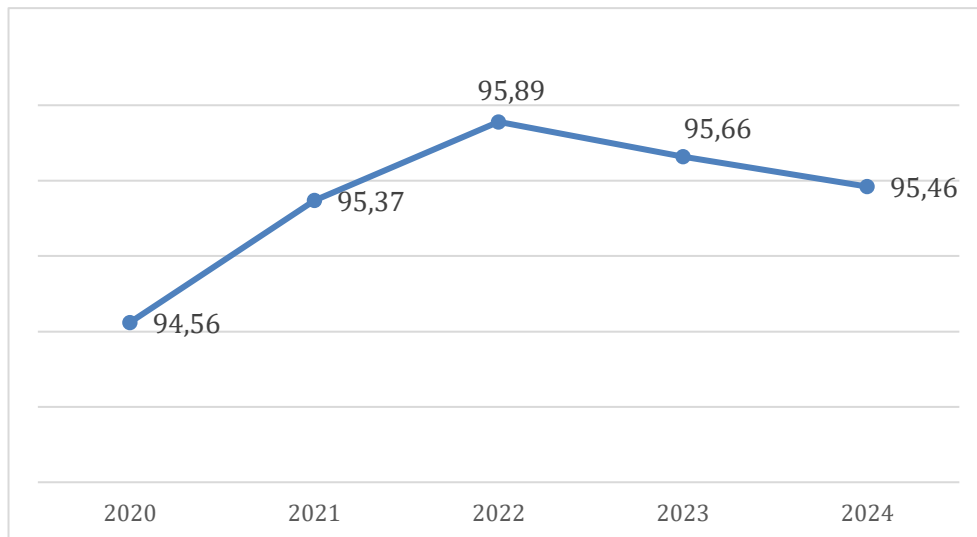
No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kulon Progo	0,383	0,367	0,380	0,402	0,373
2.	DIY	0,437	0,441	0,439	0,449	0,435
3.	Nasional	0,385	0,384	0,381	0,388	0,379

Sumber data : BPS DIY, 2024

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (tidak buta aksara) yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Kondisi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya anak yang berkebutuhan khusus (ABK) yang hingga usia lebih dari 15 tahun belum dapat membaca, dan/atau belum terbaharuinya data kependudukan yang menyebutkan masih pelajar, belum bersekolah atau PAUD, sehingga dianggap belum dapat membaca. Selanjutnya untuk Tahun 2022 mulai naik kembali. Mendasar pada data statistik terkait angka melek huruf yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DIY angka melek huruf pada tahun 2024 sebesar 95,66%, angka melek huruf dari tahun 2020-2024 ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



Sumber data: BPS DIY, 2024

Gambar 2.22

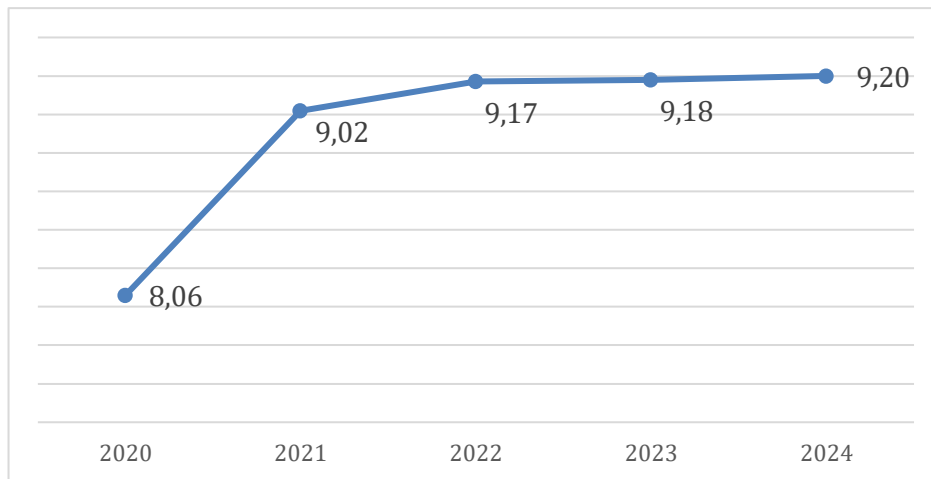
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Angka Melek Huruf yang turun secara umum disebabkan karena adanya anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mana hingga usia lebih dari 15 tahun masih belum dapat membaca, dan/atau belum terbaruinya data kependudukan yang menyebutkan masih pelajar, belum bersekolah atau PAUD, sehingga dianggap belum dapat membaca. Selain itu di Kulon Progo juga terdapat buta aksara pada masyarakat usia non produktif. Mengingat Angka Harapan Hidup Kulon Progo yang cukup tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa meski tidak dapat membaca, tetapi masyarakat usia non produktif yang buta aksara tersebut dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan berusia panjang.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kulon Progo semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tabel rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut.



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2024

Gambar 2.23

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (tahun)

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kulon Progo terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 8,86 tahun hingga pada tahun 2024 meningkat menjadi 9,20 tahun. Angka 9,20 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata lama sekolah 9,20 tahun atau sudah menyelesaikan sekolahnya sampai dengan tingkat SMP, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal.

3. Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sedangkan APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

APM pada jenjang SD/MI pada tahun 2019 hingga tahun 2024 memiliki tren kenaikan positif dari 92,79 menjadi 98.54 persen. Pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 93,73 persen. Akan tetapi pada tahun 2022 APM SD/MI kembali naik mencapai 98,52 persen. Angka partisipasi sekolah jenjang SMP/MTs mengalami kecenderungan menurun. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2022, yaitu 79,90 persen, di tahun 2023-2024 mengalami perbaikan menjadi 86.28 persen.

APM jenjang SD/MI di bawah 100% artinya: (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 Tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya. Nilai APK dan APM Kabupaten Kulon Progo selengkapnya tercantum pada Tabel berikut. Nilai APK dan APM Kabupaten Kulon Progo selengkapnya tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 2.33

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (%)						
1.	SD/MI (%)	93,76	93,73	88,17	89,09	98,54
2.	SMP/MTs(%)	95,01	95,22	79,90	92,64	86.28
Angka Partisipasi Kasar (%)						
1.	SD/MI(%)	95,08	95,11	95,16	93,32	99.82
2.	SLTP/MTs(%)	98,46	98,53	98,56	109,69	94.71
Angka partisipasi sekolah (%)						
1.	SD/MI(%)	93,94	93,98	94,00	99,46	98.54
2.	SLTP/MTs(%)	97,02	97,04	97,06	99,13	98.76

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

4. Angka Kelulusan

Capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Pada tahun 2024, Angka Kelulusan jenjang SD dan SMP masih belum mencapai 100%. Upaya untuk memperbaiki hal ini adalah adanya pengawasan kepada seluruh siswa menjelang, saat, dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan berlangsung. Angka kelulusan di Kabupaten Kulon Progo selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34

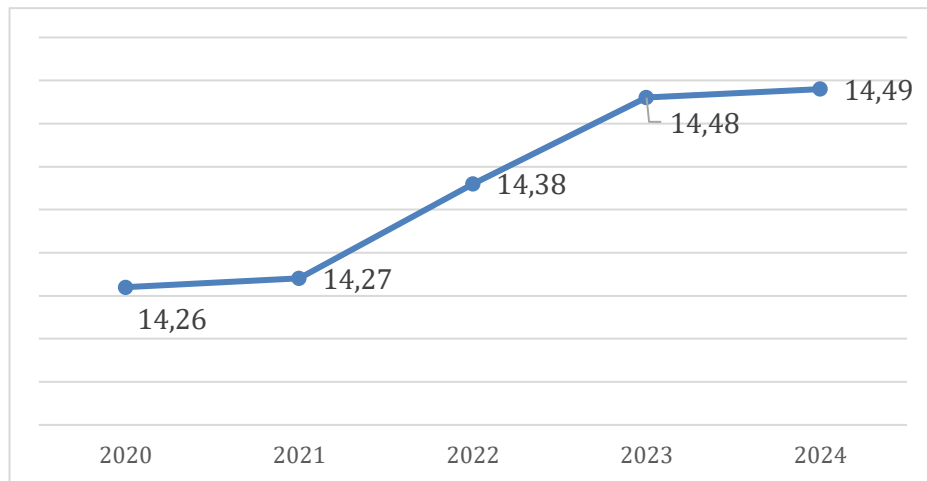
Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kelulusan SD (%)	100	100	100	100	99,99
2.	Angka Kelulusan SMP (%)	100	100	100	100	99,99

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

5. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

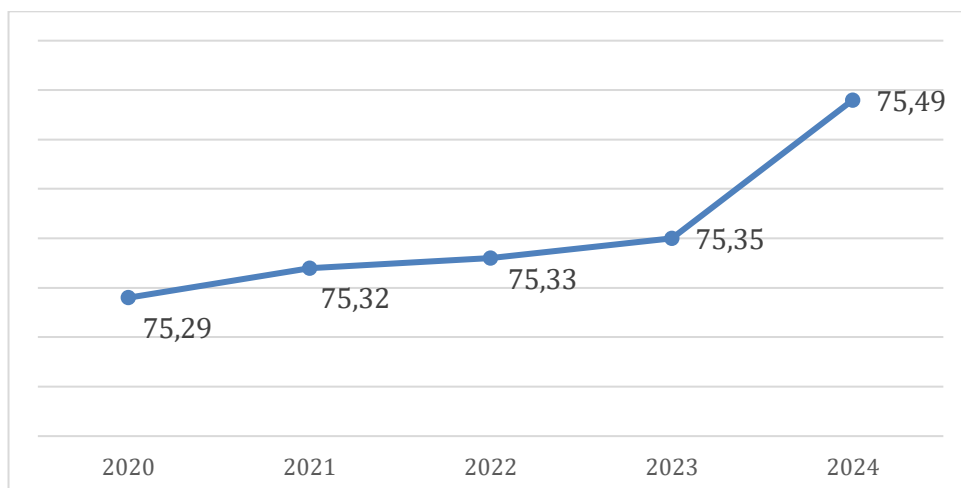
Gambar 2.24

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2020-2024

Dari gambar diatas terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020-2024 terus menunjukkan peningkatan terutama di 2 tahun terakhir.

6. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup selalu meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan usia harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebesar 75,49 masih di atas angka DIY sebesar 75,36 tahun.



Sumber data: BPS DIY, 2024 (diolah)

Gambar 2.25

Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 (tahun)

7. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2020-2024 angka IPM Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren meningkat. Berikut ini perkembangan indikator komponen IPM di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2020-2024.

Tabel 2.35

Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usia Harapan Hidup (tahun)	75,29	75,32	75,33	75,35	75,49
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,26	14,27	14,38	14,48	14,49
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,86	9,02	9,17	9,18	9,2
4.	Konsumsi Riil per kapita (000 Rp.)	10.041	10.069	10.511	10.723	10,99
IPM		74,48	74,73	75,48	75,82	76,18

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Apabila dilihat pencapaian nilai IPM di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang cukup stabil. Komponen IPM yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

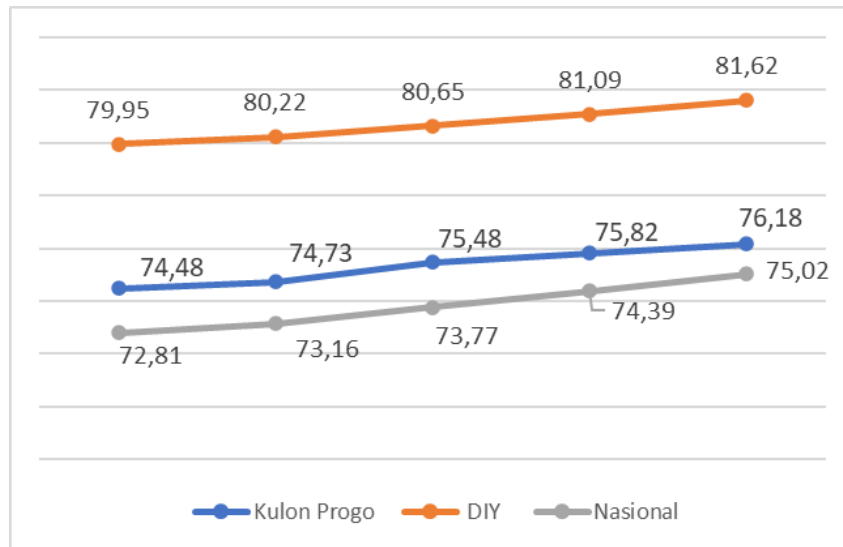
Sampai dengan tahun 2024 status pembangunan manusia kabupaten/ kota di DIY terbagi hanya menjadi 2 kategori, yaitu Sangat Tinggi dan Tinggi. Kategori Sangat Tinggi dicapai: Kota Yogyakarta (89,10), Kabupaten Sleman (85,71), dan Kabupaten Bantul (82,05), sedangkan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo (76,18) dan Kabupaten Gunungkidul (72,14) termasuk wilayah yang pencapaian kinerjanya tinggi. Berikut ini keterbandingan komponen IPM di DIY tahun 2024.

Tabel 2.36

Keterbandingan Komponen IPM dan IPM tiap Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2024

Kab/Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran riil per kapita disesuaikan (Rp.000)	IPM
Kulon Progo	75,49	14,49	9,20	10.990	76,18
Bantul	74,80	15,63	9,81	16.851	82,05
Gunungkidul	74,91	13,40	7,35	10.630	72,14
Sleman	75,48	16,79	11,33	17,586	85,71
Yogyakarta	75,73	17,66	12,12	20,603	89,10
DIY	75,36	15,70	9,92	15,361	81,62

Sumber data: BPS Kulon Progo, 2024



Sumber data: BPS Kulon Progo, 2024

Gambar 2.26

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2020-2024**

Gambar di atas menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo, DIY dan Nasional kurun waktu 2020-2024. Dalam grafik tersebut terlihat IPM Kulon Progo mempunyai pola yang searah dengan IPM DIY maupun IPM Nasional. Secara umum perkembangan IPM Kulon Progo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau semakin baik, dengan nilai yang kategori tinggi yaitu 76,18 pada tahun 2024 dibandingkan angka IPM pada tahun 2020 yang sebesar 74,48.

8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK menurut jenis kelamin selama periode Tahun 2020–2024 seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.37

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (%)**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2020	86,07	70,16	77,88
2021	85,65	68,32	76,72
2022	87,15	70,99	78,83
2023	85,53	66,31	75,75
2024	84,69	72,66	78,57

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

TPAK 2024 mengalami peningkatan menjadi 78,57 yang sebelumnya berada pada angka 75,75 di tahun 2023. Peningkatan ini di dorong oleh pertumbuhan partisipasi tenaga kerja perempuan dari 66,31 tumbuh menjadi 72,66 sedangkan partisipasi laki-laki mengalami penurunan dari 85,53 menjadi 84,69 di tahun 2024.

Tabel 2.38

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (%)

Tahun	Kulon Progo	DIY	Indonesia
2020	77,88	71,12	66,35
2021	76,72	73,52	74,20
2022	78,83	72,60	73,10
2023	75,75	74,08	73,90
2024	78,57	74,78	70,63

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Nilai TPAK Kulon Progo pada tahun 2024 sebesar 78,57, dimana angka tersebut berada diatas nilai Provinsi dan Nasional. Nilai TPAK di DIY sebesar 74,78 sedangkan nilai TPAK Nasional adalah 70,63.

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2024 TPT Kulon Progo berada pada nilai 2,01 turun 0,39 dibandingkan tahun sebelumnya. TPT Kulon Progo dari periode 2020 – 2024, selalu di bawah rata-rata TPT D.I Yogyakarta dan TPT Nasional.

Tabel 2.39

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo, D.I.Yogyakarta, dan Indonesia Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	3,71	3,69	2,80	2,40	2,01
Bantul	4,06	4,04	3,97	3,78	3,62
Gunung Kidul	2,16	2,20	2,08	2,09	2,16
Sleman	5,07	5,17	4,78	4,47	4,13
Yogyakarta	9,16	9,13	7,18	6,07	5,80
DIY	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
Indonesia	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

10. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Capaian indikator TPB di Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan upaya dalam pencapaiannya. Penilaian capaian TPB di Kulon Progo dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Penilaian pencapaian TPB didasarkan pada dua aspek yaitu data kuantitatif dan kualitatif yang bersifat penilaian objektif terhadap suatu indikator TPB melalui persetujuan dalam rapat.

Berdasarkan data yang terkumpul, dikelompokkan atas 4 (empat) kategori yaitu: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional. (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional, (3) belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional, dan (4) belum ada data. Pencapaian TPB di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40**Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	KODE	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Jumlah
TPB 1. Tanpa Kemiskinan	TPB-1	12	3	7	2	24
TPB 2. Tanpa Kelaparan	TPB-2	5	1	3	2	11
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	TPB-3	3	1	30	0	34
TPB 4. Pendidikan Berkualitas	TPB-4	9	2	0	2	13
TPB 5. Kesenjangan Gender	TPB-5	2	2	9	1	14
TPB 6. Air Bersih	TPB-6	5	0	12	1	18
TPB 7. Akses Energi	TPB-7	0	0	1	1	2
TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi	TPB-8	4	2	10	3	19
TPB 9. Inovasi Industri Infrastruktur	TPB-9	2	0	8	3	13
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan	TPB-10	3	1	7	0	11
TPB 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	TPB-11	6	1	5	1	13
TPB 12. Produksi Berkelanjutan	TPB-12	2	0	3	0	5
TPB 13. Perubahan Iklim	TPB-13	2	0	0	0	2
TPB 14. Ekosistem Lautan	TPB-14	0	0	0	0	0
TPB 15. Ekosistem Daratan	TPB-15	1	0	2	1	4
TPB 16. Perdamaian dan Keadilan	TPB-16	3	5	11	2	21
TPB 17. Kemitraan Berkelanjutan	TPB-17	2	1	13	0	16
Total		61	19	121	19	220

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

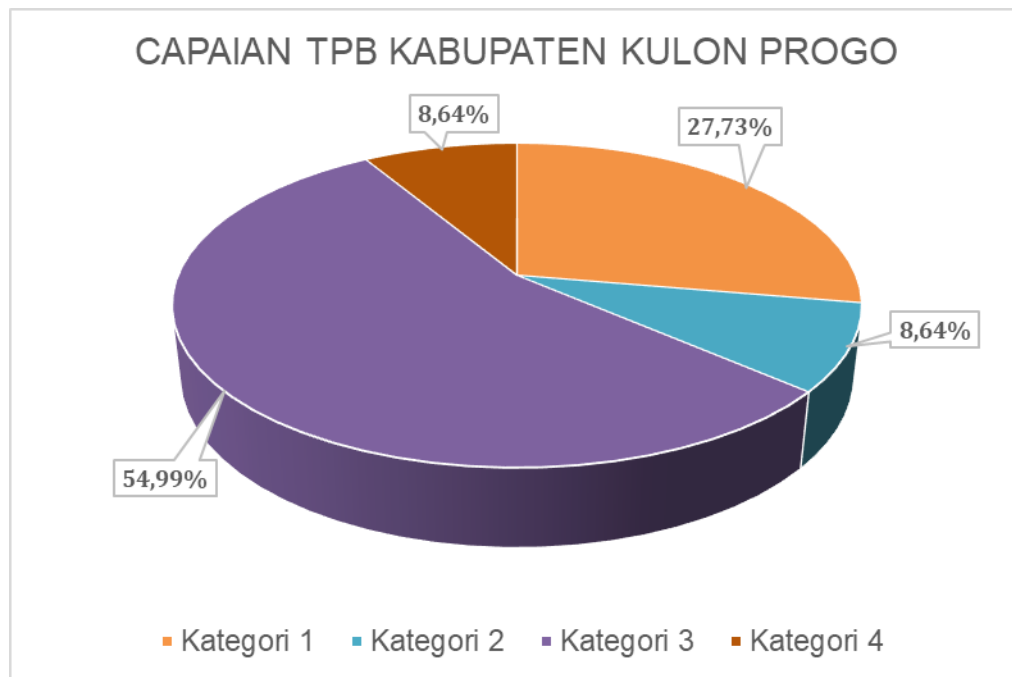
Keterangan : Kategori 1: Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional;

Kategori 2: Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

Kategori 3: Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

Kategori 4: Indikator yang belum memiliki data

Ringkasan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan kategori pencapaian terhadap target indikator daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

Gambar 2.27
Persentase Capaian Indikator TPB

Secara umum Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam upaya pencapaian indikator TPB. Hal ini dapat dilihat dari jumlah capaian jumlah indikator TPB yang telah mencapai target daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Kulon Progo yang telah dilaksanakan dan mencapai target daerah baru mencapai 27,73 persen (61 indikator) dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai ketentuan yang ada. Terdapat capaian TPB yang relatif rendah yaitu kategori 3 dan 4, hal ini dikarenakan tidak semua indikator menjadi kewenangan kabupaten sehingga tidak tersedia datanya.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Pembangunan keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional

a. Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni budaya melingkupi semua jenis seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo cukup beragam yaitu kelompok seni tari, musik, kriya, rupa, Majelis Luhur Kebudayaan (MLK), upacara adat, desa budaya, penyelenggaraan lomba budaya dan juga sarana prasarana seni budaya. Perkembangan Seni Budaya di Kabupaten Kulon Progo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2020-2024

No.	Kondisi Perkembangan Kebudayaan	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jenis Seni						
	1. Seni Tari						
	a. Tradisional	366	366	366	352	394	Buah
	b. Kreasi baru	31	31	31	30	33	Buah
	2. Seni Musik						
	a. Diatonis	104	104	104	61	78	Buah
	b. Pentatonis	171	171	171	171	171	Buahi
	3. Seni Rupa						
	a. Lukis	9	9	9	6	6	Buah
	b. Pahat	-	-	-	-	-	Buah
	4. Seni Theater						
	a. Tradisional	153	153	153	153	153	Buah
	b. Modern	7	7	7	6	10	Buah
	Jumlah	841	841	841	779	845	Buah
2.	Jumlah Grup Kesenian	1.279	1.320	1.365	1.454	1.552	Grup
3.	Penyelenggaraan Lomba Unit						
	a. Banyaknya Lomba/Festival	19	24	16	13	14	Kali
	b. Jenis Lomba /Festival	13	5	5	5	7	Jenis
4.	Upacara Adat	93	75	80	15	44	Kel
5.	Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	18	18	20	20	20	Kel
6.	Jumlah gedung kesenian	2	2	2	2	2	Unit
7.	Kesenian khas Kab. Kulon Progo	13	13	13	13	13	Buah
8.	Desa Budaya	15	16	16	21	21	Kalurahan

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Kelompok/grup kesenian yang ada di masyarakat memiliki peran penting dalam mewadahi pelaku pelaku seni untuk melaksanakan kegiatan pelestarian budaya agar tetap terpelihara sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya serta mendukung berkembangnya desa budaya. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki grup kesenian yang jumlahnya cukup banyak. Pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 jumlah grup kesenian menurun menjadi 1.279 grup, namun pada tahun 2021 jumlah grup kesenian bertambah lagi menjadi 1.320 grup, meningkat lagi menjadi 1.365 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 1.454 di tahun 2023. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.552. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah grup yang aktif dengan jumlah grup yang ada jumlahnya masih relatif sedikit.

Di Kabupaten Kulon Progo, ada 13 ragam seni yang telah dikembangkan dan menjadi seni unggulan seperti Seni Angguk Putri yang menjadi salah satu jenis seni unggulan di Kabupaten Kulon Progo. Adapun seni unggulan lainnya meliputi Ketoprak, Jathilan, Incling, Keroncong, Reog, Oglek,

Hadrah/Sholawatan, Lengger Tapan, Wayang Tapeng, Panjidor, Krumpyung, dan Jabur. Selain itu budaya tradisi berupa upacara adat juga sudah dikemas dengan cukup baik sehingga memiliki daya tarik wisata daerah.

Pemerintah daerah terus meningkatkan pengembangan seni lainnya seperti sendratari dengan mengangkat tema lokal dan seni musik krumpyung. perkembangan kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat dengan adanya dukungan Dana Keistimewaan DIY. Semakin banyak kegiatan atau festival seni budaya yang diselenggarakan pemerintah maka akan mendukung peningkatan pelestarian nilai budaya. Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya fisik dan nilai budaya dari masa lalu berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya.

Tabel 2.42
Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peninggalan Sejarah dan Purbakala	345	364	316	371	373
	a. Masa Prasejarah	11	11	4	3	5
	b. Masa Hindu-Budha	159	166	119	128	128
	c. Masa Islam	81	83	51	82	82
	d. Masa Kolonial/Perjuangan	77	86	127	139	139
	e. Tradisional	16	18	15	19	19
2.	Museum	-	-	-	-	-

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025

b. Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo cenderung meningkat lima tahun terakhir dan jumlah klub olahraga cenderung fluktuatif lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 jumlah organisasi olahraga meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 46 organisasi, sedangkan jumlah klub olahraga menurun menjadi 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Organisasi Olahraga	42	45	45	46	46
2.	Jumlah Klub Olahraga	280	280	148	173	173

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga selain melalui pembinaan klub dan atlet olahraga juga harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang baik. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat namun perlu peningkatan dari segi kualitasnya. Sampai dengan tahun 2024 telah tersedia gedung olahraga

sebanyak 92 unit meningkat satu gedung olahraga dibandingkan tahun 2019, dan lapangan olahraga sebanyak 1.193 unit dari 13 cabang olahraga berprestasi yang diminati masyarakat dan tersebar di Kabupaten Kulon Progo. Data selengkapnya dapat dilihat sesuai pada tabel berikut.

Tabel 2.44

Jumlah Sarana Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Kapanewon	Cabang Olah Raga													Jumlah
		Sepak Bola	Bulu Tangkis	Voli	Tenis meja	Tenis Lapangan	Renang	Tinju	Panjat Tebing	Sepak Takraw	Voli Pantai	Dayung	Basket	Futsal	
1	Temon	8	33	28	34	0	2	0	0	0	2	1	2	1	111
2	Wates	10	54	32	47	5	1	0	1	15	0	1	4	3	173
3	Panjatan	10	34	24	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102
4	Galur	6	16	10	10	2	0	0	0	2	0	0	0	0	46
5	Lendah	7	20	12	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
6	Sentolo	12	44	48	41	1	2	0	0	0	0	0	2	1	151
7	Pengasih	15	32	28	17	2	0	1	0	2	0	0	4	1	102
8	Kokap	3	17	23	43	0	0	0	0	0	0	1	2	0	89
9	Girimulyo	2	34	14	36	0	0	0	0	0	0	0	4	0	90
10	Nanggulan	4	10	22	11	0	0	0	0	0	0	0	3	0	50
11	Samigaluh	6	21	45	38	0	3	0	1	0	0	0	6	0	120
12	Kalibawang	4	20	26	27	1	0	1	0	1	0	0	0	0	80
JUMLAH		95	335	312	369	11	8	2	2	20	2	3	28	6	1.193

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.45

Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Gedung Olahraga	92	92	92	92	92

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan publik diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

Sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan, telah dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh unit pelayanan publik yaitu sejumlah 42 unit pelayanan yang terdiri atas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, 21 UPTD Puskesmas, 12 Kapanewon, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 bahwa nilai interval konversi hasil survei pada 25,00-64,99 kinerja unit pelayanan “Tidak Baik”, nilai interval konversi hasil survei pada 65,00-76,60 kinerja unit pelayanan “Kurang Baik”, nilai interval konversi hasil survei pada 76,61-88,30 kinerja unit pelayanan “Baik”, dan nilai interval konversi hasil survei pada 88,31-100 kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei dimana nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 sebesar 86,797 naik dari pencapaian Tahun 2023 sebesar 85,63 dengan predikat “Baik”.

Secara umum hasil survei kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.46

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Dari Tahun ke Tahun

No.	Perangkat Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
1	BKAD	83,664	80,135	83,604	82,196	85,942
2	Dinas DUKCAPIL	83,111	86,452	88,392	89,254	89,189
3	UPT Pengujian Kend. Bermotor	79,058	78,856	78,924	82,745	82,862
4	Dinas NAKERTRANS	87,352	89,633	88,578	87,662	86,745
5	DPMPT	86,320	85,331	87,921	89,455	85,970
6	Dinas PERPUSSIP	87,482	84,2	86,959	87,654	85,378
7	Dinas Sosial PPPA	78,484	-	80,286	80,634	83,409
8	Bag. Adm Kesra SETDA	80,303	-	85,066	85,342	84,813
9	RSUD NAS	80,897	80,247	84,181	84,527	84,864
10	Kelurahan Wates	87,277	85,416	85,723	85,544	87,875
11	Kapanewon Kalibawang	81,730	81,199	87,274	90,952	89,882
12	Kapanewon Samigaluh	80,137	83,19	80,906	84,714	85,331
13	Kapanewon Girimulyo	93,832	89,466	83,576	90,632	89,161
14	Kapanewon Nanggulan	94,828	95,46	87,912	86,358	87,385
15	Kapanewon Sentolo	84,868	83,828	78,167	81,85	86,136
16	Kapanewon Pengasih	86,694	88,023	87,44	92,186	86,053
17	Kapanewon Wates	88,312	83,916	83,992	87,246	82,563
18	Kapanewon Kokap	85,034	81,689	81,113	83,964	89,300
19	Kapanewon Temon	82,170	81,974	82,536	90,861	82,343
20	Kapanewon Panjatan	82,499	91,575	87,811	85,137	92,768
21	Kapanewon Lendah	87,067	86,414	88,023	90,943	92,824
22	Kapanewon Galur	86,611	83,084	82,679	86,108	84,776

No.	Perangkat Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
23	Puskesmas Kalibawang	83,885	78,563	79,477	84,274	84,952
24	Puskesmas Samigaluh I	84,660	82,14	81,596	85,259	87,857
25	Puskesmas Samigaluh II	84,542	81,038	80,236	83,842	88,486
26	Puskesmas Girimulyo I	82,834	81,437	83,031	85,933	88,727
27	Puskesmas Girimulyo II	81,238	75,4	81,907	85,211	86,673
28	Puskesmas Nanggulan	81,506	82,452	81,699	84,934	86,414
29	Puskesmas Sentolo I	81,906	79,518	79,994	84,638	89,744
30	Puskesmas Sentolo II	79,569	76,812	80,148	83,618	89,725
31	Puskesmas Pengasih I	84,992	84,138	82,234	85,97	86,321
32	Puskesmas Pengasih II	85,306	83,694	81,541	85,382	85,137
33	Puskesmas Wates	82,281	79,032	81,382	82,954	82,368
34	Puskesmas Kokap I	83,916	74,774	81,696	84,804	89,836
35	Puskesmas Kokap II	80,123	78,493	81,641	83,783	89,670
36	Puskesmas Temon I	83,885	85,877	83,725	85,581	85,230
37	Puskesmas Temon II	88,788	82,664	83,417	84,934	85,452
38	Puskesmas Panjatan I	85,850	76,849	82,825	83,25	88,615
39	Puskesmas Panjatan II	83,360	81,881	84,656	83,287	89,614
40	Puskesmas Lendah I	79,765	81.169	82,843	84,49	84,508
41	Puskesmas Lendah II	82,876	80,279	83,38	85,504	86,895
42	Puskesmas Galur I	85,257	75,436	81,936	84,12	85,470
43	Puskesmas Galur II	82,668	80,253	80,11	84,527	86,081
Kulon Progo		84,115	82,487	83,268	85,63	86,797

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dilakukan oleh surveyor non ASN pada Unit Pelayanan Publik tersasar. Hasil survei menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai IKM. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey dari Tahun 2019 dengan nilai IKM sebesar 82,96 dan untuk capaian IKM Tahun 2020 sebesar 84,12. Pada Tahun 2021 capaian IKM mengalami penurunan menjadi 82,49 hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 menggunakan 12 indikator penilaian sedangkan pada Tahun 2021 menggunakan 9 indikator penilaian (sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017), selain itu pelayanan di masa pandemi bisa mempengaruhi persepsi penilaian dari masyarakat. Pada tahun 2022, capaian IKM kembali mengalami peningkatan yaitu pada nilai 83,268, pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 85,63. Kemudian Pada tahun 2024 nilai IKM mencapai 86.797 dan melebihi target. Faktor pengungkit nilai IKM diantaranya adalah keberadaan Mall Pelayanan Publik dan digitalisasi layanan dengan penerapan SPBE sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara cepat, aman dan nyaman.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**2.1.3.1.1 Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.47
Kondisi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Melek Huruf	%	94,56	95,37	95,89	95,66	95,46
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,86	9,02	9,17	9,18	9,20
3.	Angka Partisipasi Murni						
	- APM SD	%	93,76	93,73	88,17	89,09	98,54
	- APM SMP	%	95,01	95,22	79,90	92,64	86,28
4.	Angka Partisipasi Kasar						
	- APK SD	%	95,08	95,11	93,45	93,32	99,82
	- APK SMP	%	98,46	98,53	100,04	109,69	94,71
5.	Angka Partisipasi Sekolah						
	- APS SD	%	93,94	93,98	99,72	99,46	98,54
	- APS SMP	%	97,02	97,04	99,59	99,13	98,76
6.	Angka Kelulusan						
	- Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	99,90
	- Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	99,90
7.	Angka melanjutkan						
	- Angka melanjutkan SD ke SMP	%	100	100	100	100	97,08
	- Angka melanjutkan SMP ke SMA	%	100	100	100	100	99,80
8.	Angka Putus Sekolah						
	- SD	Orang	10	1	6	6	0
	- SMP	Orang	17	6	34	11	0
9.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,26	14,27	14,38	14,48	14,49
10.	Standar Kompetensi Pendidik						
	- Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	%	89,40	89,45	89,61	89,8	88,82
	- Guru yang telah bersertifikat pendidik	%	76,71	76,73	76,81	60,79	56,43

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kemampuan membaca menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat hidup sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis ini tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek huruf secara umum menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2020 sebesar 94,56% menjadi sebesar 95,66% pada tahun 2023. Angka tahun 2024 sebesar 95,46%.

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan dari 8,86 di tahun 2020, kemudian 9,02 di tahun 2021, 9,17 di Tahun 2022, menjadi 9,18 pada Tahun 2023 dan menjadi 9,2 di tahun 2024. Adanya tren kenaikan angka rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun disebabkan (1) adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan anak-anaknya melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, (2) adanya dukungan tertib administrasi oleh seluruh masyarakat, khususnya pada pembaharuan data pendidikan di dinas terkait, dan (3) adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pendidikan sepanjang hayat, baik pada pendidikan formal, maupun pada pendidikan non formal (Paket A, B atau C), serta adanya mutasi penduduk dari luar kabupaten ke dalam kabupaten.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM jenjang SD/MI pada Tahun 2020 sebesar 93,76 % dan pada tahun 2021 turun sedikit sebesar 93,73 %, pada Tahun 2022 menurun menjadi 88,17% dan naik lagi menjadi 98,90% di tahun 2023 dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 98,54% . APM jenjang SD/MI di bawah 100% artinya (1) belum semua warga masyarakat menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, seperti masih adanya siswa usia Jenjang SD/MI dan sederajatnya yang masih berusia kurang dari 7 Tahun (masih usia PAUD dan/atau atas kondisi/kebutuhan/karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus), sehingga berdampak pada usia yang semestinya masih mengikuti pendidikan di SD/MI dan sederajatnya, ataupun adanya anak kelompok usia kurang dari sudah mengikuti pendidikan di SMP/MTs dan sederajatnya, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 95,01% dan tahun 2021 naik menjadi sebesar 95,22% dan pada tahun 2022 turun menjadi 79,9% dan tahun 2024 naik lagi menjadi 86,28%. Kenaikan dan penurunan APM SMP/MTs disebabkan oleh (1) sebagian warga masyarakat telah menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, namun masih terdapat sebagian yang belum sesuai harapan (misalnya: siswa usia lebih dari 13 Tahun masih ada di SD/MI dan sederajatnya dan/atau siswa usia lebih dari 15 Tahun masih di SMP/MTs dan sederajatnya), hal ini dapat pula karena alasan tertentu, yakni kondisi/kebutuhan/ karakteristik khusus seperti anak berkebutuhan khusus, (2) masih terdapat sebagian warga masyarakat mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di luar kabupaten, karena alasan tertentu misalnya: mengikuti kerja orang tuanya, mencari sekolah yang favorit, mendekati tempat tinggal (daerah perbatasan), menyesuaikan alat transportasi umum yang ada, maupun alasan tertentu lainnya.

Angka kelulusan cenderung stabil dimana naik turunnya tidak lebih dari 1% atau berkisar di angka 99-100%. Pada Tahun 2020 hingga 2023, angka kelulusan SD maupun SMP mencapai 100%, namun di tahun 2024 angka kelulusan sebesar 99.90%. Angka kelulusan umumnya dipengaruhi adanya perubahan kurikulum dan strategi pembelajaran dengan cara pandang yang berbeda. Setingkat SD/MI saat ini menggunakan sistem tema (Tematik) dan pada Jenjang SMP/MTs menggunakan sistem mata pelajaran. Bobot soal tingkat daerah dan nasional pun berubah-ubah sesuai kebijakan yang ditetapkan, tentu dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dan tantangan zaman, serta karakteristik peserta didik di setiap daerah.

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah juga mengalami peningkatan yang lebih baik, dengan tren peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 sebesar 14,26, tahun 2021 sebesar 14,17, tahun 2022 sebesar 14,38, tahun 2023 sebesar 14.48 dan tahun 2024 naik menjadi 14,49 berdasarkan data BPS. Peningkatan tersebut atas dukungan semua pihak, baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal, maupun non formal.

Pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020–2024 dilihat dari kondisi tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi pendidik meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dengan capaian yang bervariasi yaitu tahun 2020 sebesar 89,4%, tahun 2021 meningkat menjadi 89,45%, tahun 2022 meningkat menjadi 89,61%, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 88,09%, dan di tahun 2024 meningkat kembali menjadi 88,82%. Sedangkan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2020 sebesar 76,71%, pada tahun 2021 meningkat menjadi 76,73%, tahun 2022 meningkat lagi menjadi 76,81%, namun berangsur turun di tahun 2023 dan 2024 menjadi 52,24%.

Kedua hal di atas disebabkan belum terpenuhi guru PNS pada masing-masing satuan pendidikan, dimana hampir setiap tahun terdapat guru pensiun berkisar 200-300 orang, namun belum diimbangi dengan adanya penambahan guru PNS sehingga upaya pemenuhan dilakukan oleh Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun sebagian GTT masih belum memenuhi kualifikasi S1/DIV sebagaimana yang dipersyaratkan, termasuk persyaratan dalam hal mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dalam hal penetapan Guru Profesional (telah mendapatkan sertifikat pendidik). Selain itu, terdapat sebagian Guru PNS (yang usianya melebihi 50 tahun) belum dapat mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dari ijazah terakhirnya (misalnya DII-PGSD), hal ini disebabkan karena faktor usia, dan/atau semangat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2024 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.48

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	16.056	16.056	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	53.498	53.498	100	100
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	230	230	100	100

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Memperhatikan capaian SPM bidang Pendidikan tersebut maka semua jenis pelayanan mencapai target. Penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo sudah maksimal karena peran aktif dari semua entitas pendidikan yang ada di Kulon Progo. Dalam pelaksanaannya penerapan SPM Pendidikan baik pada tingkat Kabupaten maupun satuan pendidikan sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2.49

Rasio Guru terhadap Murid Tahun 2020–2024

No	Indikator	Capaian kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio guru terhadap murid SD/MI	9,2	11,44	9,65	10,32	14,74
2	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	8,38	9,56	7,67	9,79	11,15

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Rasio guru terhadap murid, baik pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs sangat dipengaruhi pemenuhan guru pada satuan pendidikan serta pertumbuhan penduduk pada daerah tersebut. Di Kulon Progo, melalui kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru, kenaikan/penurunan rasio lebih disebabkan pada faktor minat masyarakat untuk memperoleh pendidikan di Kulon Progo. Pada tahun 2024 capaian rasio guru terhadap murid sebesar 14,74 pada SD/MI dan 11,15 pada SMP/MTs, angka menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar yaitu pada setiap rombongan belajar/kelas terdapat 14-15 siswa untuk setiap 1 orang guru di tingkat SD/MI dan 11-12 siswa untuk setiap 1 orang guru di tingkat SMP/MTs. Hal ini berbeda dengan kondisi di daerah perkotaan, dimana setiap kelas memiliki peserta didik yang optimal. Namun kondisi Kabupaten Kulon Progo memiliki daerah pegunungan/perbukitan yang sulit dijangkau. Disana masih terdapat sedikit siswa, karena pertumbuhan penduduk yang kecil dan di sisi lain minat masyarakat untuk bersekolah cenderung ke daerah perkotaan, sehingga rasionya relatif kecil.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Dasar hukum penetapan SPM bidang kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 98 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 2.50
Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Indikator	Uraian	Satuan	2023			2024		
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3.952	3.881	98,20	3.673	3.353	91,29
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3.952	3.937	99,62	3.411	3.406	99,85
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Bayi	4.085	3.891	95,25	3.418	3.374	98,71
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	19.904	19.194	96,43	20.314	19.291	94,96
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	52.918	47.643	90,03	55.453	51.454	92,79
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	69.531	66.964	96,31	276.215	73.939	26,77
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	53.429	50.049	93,67	85.475	60.928	71,28
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	10.491	10.447	99,58	13.666	12.946	94,73
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	3.954	3.934	99,49	4.966	4.870	98,07
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	1.562	1.410	90,27	1.516	1.418	93,54
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4.779	4.078	85,33	4.628	4.318	93,3

No.	Indikator	Uraian	Satuan	2023			2024		
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	5.202	4.877	93,75	6.008	5.671	94,39

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2024 yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil tercapai 91,29 persen, pelayanan kesehatan ibu bersalin 99,62 persen, pelayanan kesehatan bayi baru lahir tercapai 98,71 persen, pelayanan kesehatan balita 94,96 persen, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tercapai 92,79 persen, pelayanan kesehatan pada usia produktif 26,77 persen, pelayanan kesehatan pada usia lanjut 71,28 persen, pelayanan kesehatan penderita hipertensi 94,73 persen, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 98,07 persen, pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 93,54 persen, pelayanan kesehatan TB 93,30 persen dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV tercapai 94,39 persen. Beberapa kendala dalam pencapaian SPM antara lain:

1. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil baru mencapai 3.353 orang dari target 3.673 orang. Ketidak tercapaian target disebabkan karena migrasi masuk dan keluar, kunjungan pada triwulan III, adanya kehamilan tidak diinginkan.
2. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 3.406 orang masih belum mampu mencapai target SPM sebanyak 3.411. Target tidak tercapai akibat kelahiran terjadi saat ibu hamil masih di rumah atau pada saat menuju fasilitas pelayanan kesehatan (brojol).
3. Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar masih belum mampu mencapai target SPM 100 persen. Pelayanan bayi baru lahir mengalami kendala terutama pada bayi dengan berat badan lahir rendah yang dilakukan penundaan pemberian imunisasi dan inisiasi menyusui dini. Kendala utama pada pelayanan kesehatan balita adalah balita yang tidak datang pada posyandu karena tidak ada yang mengantar. Kendala pada pelayanan kesehatan usia dasar adalah banyaknya jumlah anak sekolah dan tersebar lokasi sekolah, sedangkan pelayanan hanya dilakukan oleh petugas puskesmas dan tidak dapat didelegasikan kepada kader.
4. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (usia 15 - 59 tahun) belum mencapai target 100 persen. Hal ini disebabkan jadwal skrining kesehatan dilakukan pada jam aktif puskesmas di mana pada usia produktif, pada jam tersebut masyarakat sedang beraktivitas.
5. Pelayanan Kesehatan pada kelompok usia lanjut baru mencapai 60.928 orang akibat sebagian lansia sudah mengalami kesulitan mobilitas.
6. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standar belum mencapai target 100 persen. Hal ini disebabkan warga yang memiliki tekanan darah tinggi dan tidak mengalami keluhan kesehatan tidak merasa "sakit" dan memerlukan pemeriksaan rutin.
7. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar baru mencapai 4.870 orang dari target 4.966 orang. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran penderita Diabetes Mellitus berobat secara

teratur setiap bulan. Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar minimal dua (2) bulan sekali atau enam kali dalam satu tahun. Selain itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas.

8. Pelayanan pada ODGJ berat sesuai standar baru mencapai 1.418 orang dari target 1.516 orang. Hal ini disebabkan belum semua ODGJ melakukan pengobatan secara teratur setiap bulan serta masih adanya ODGJ yang dipasung karena belum pahamnya masyarakat dalam penanganan pasca pasung.
9. Pelayanan kesehatan TB baru mencapai 4.318 orang dari target 4.628 orang. Hal ini disebabkan masih banyak terduga TB yang tidak terjaring sebagai suspek sehingga tidak dapat didiagnosa sebagai pasien atau bukan.
10. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tercapai 5.671 orang. Hal ini akibat belum optimalnya pencatatan dan pelaporan SIHA di Puskesmas, diperlukan upaya agar semua kunjungan ibu hamil dan populasi kunci dilaporkan ke Puskesmas setempat.
11. Secara umum pencapaian SPM di tahun 2024 belum tercapai namun 6 dari 12 SPM sudah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Solusi dan tindak lanjut:

1. Pendataan dan pendampingan ibu hamil oleh kader, mengoptimalkan WA grup Rindu KIA kapanewon, edukasi ke masyarakat untuk melaporkan jika ada ibu hamil datang dan tinggal di wilayah. Koordinasi dengan lintas sektor terkait penanganan ibu hamil KTD.
2. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tanda-tanda persalinan kepada ibu hamil dan keluarga pada saat kontrol maupun saat pertemuan kelas ibu, mengoptimalkan peran pendamping ibu hamil baik oleh kader maupun masyarakat sehingga jika sudah mendekati HPL segera berkomunikasi lebih intens dengan pendamping masing-masing.
3. Memperkuat pelayanan antenatal care (ANC) yang berkualitas, pendampingan ibu hamil dengan faktor risiko lebih diperkuat, melaksanakan skrining layak hamil dan penguatan kesiapan ibu dari sejak calon pengantin.
4. Pendampingan kader untuk melakukan penjadwalan dan monitoring pelaksanaan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang (SDIDTK) sesuai umur, melakukan edukasi ke ibu balita pentingnya deteksi dini tumbuh kembang.
5. Menyusun strategi bagi Puskesmas dengan jumlah sasaran banyak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dari awal tahun, sehingga di akhir tahun semua sasaran sudah dilakukan pemeriksaan.
6. Mendata dan melakukan kunjungan bersama petugas ke rumah lansia yang terbatas pergerakannya, melakukan sosialisasi pentingnya skrining bagi lansia, melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan lansia.
7. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar kunjungan pasien hipertensi dan DM ke fasyankes swasta dapat dilaporkan ke Puskesmas.
8. Membuat kartu pemantauan minum obat bagi ODGJ, melakukan Perawatan Kesehatan Masyarakat atau Public Health Nursing (PHN), melakukan pendampingan pada ODGJ dan keluarganya serta melatih kader kesehatan jiwa.

Tabel 2.51

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,24	75,17	75,28	75,29	75,49
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	63,61	222,17	194,69	25,30	58,53
	<i>Kematian Ibu</i>	<i>Kasus</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
	<i>Kelahiran hidup</i>	<i>Kali</i>	<i>4.716</i>	<i>4.501</i>	<i>4.901</i>	<i>3.728</i>	<i>3.419</i>
3	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	8,06	10,00	10,71	9,61	10,24
	<i>Kematian Bayi</i>	<i>Kasus</i>	<i>38</i>	<i>45</i>	<i>44</i>	<i>38</i>	<i>35</i>
	<i>Kelahiran hidup</i>	<i>Kali</i>	<i>4.716</i>	<i>4.501</i>	<i>4.901</i>	<i>3.728</i>	<i>3.419</i>

Sumber data : BPS DIY dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat. BPS DIY menyatakan bahwa pada tahun 2020 usia harapan hidup Kulon Progo sebesar 75,24, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 75,17, di tahun 2022 meningkat menjadi 75,28 lalu meningkat menjadi 75,29 tahun di 2023 dan kembali naik di tahun 2024 menjadi 75,49. Tingginya usia harapan hidup tersebut di atas tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain hal tersebut di atas juga didukung oleh stabilitas sosial politik dan keamanan.

Kematian ibu melahirkan pada tahun 2024 naik menjadi 2 orang, dengan seluruh kasus kematian ibu terjadi di fasilitas kesehatan lanjutan dan tidak terjadi di fasilitas kesehatan dasar. Jika dihitung dengan prevalensi maka angka kematian ibu adalah 58.53 per 100.000 kelahiran hidup (2 kematian dari 3.419 kelahiran hidup).

Kematian bayi pada tahun 2024 sebanyak 35 kasus turun 3 kasus dari tahun 2023. Jumlah kasus kematian bayi dalam 5 tahun terakhir masih fluktuatif. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 38 kasus, tahun 2021 sebanyak 45 kasus, tahun 2022 turun menjadi 44 kasus, kemudian pada tahun 2023 turun lagi menjadi 38 kasus. Jika dihitung dengan prevalensi maka kasus kematian bayi mencapai 10.24 per 1.000 kelahiran hidup (35 kematian dari 3.419 kelahiran hidup).

Pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan aplikasi Bumilku yaitu aplikasi yang dapat menyediakan informasi keadaan ibu hamil mulai dari tingkat kesehatan sampai lokasi tempat tinggal ibu hamil dapat diakses oleh tenaga kesehatan dan pejabat yang berwenang. Aplikasi ini mendapatkan penghargaan dari Badan Informasi Geospasial atas pemanfaatan aplikasi berbasis GPS untuk membantu meningkatkan pelayanan pada ibu hamil. Untuk menekan angka kematian ibu, selain dengan meningkatkan kapasitas dan pelayanan di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan, akan dilaksanakan peningkatan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Ibu hamil harus diberikan informasi tentang kesehatan kehamilan, dan harus ada peningkatan kesadaran ibu hamil untuk selalu memonitor sendiri kesehatan dirinya maupun kandungan.

Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan aplikasi Bumilku menjadi Matahatiku yang mengembangkan penyediaan informasi keadaan ibu hamil hingga ke kondisi anak balita pasca

kelahiran. Aplikasi Matahatiku digunakan untuk memantau kondisi kesehatan dan gizi anak balita yang dilahirkan oleh ibu hamil yang belum terpantau dari aplikasi Bumilku.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu provinsi dengan status derajat kesehatan dengan ranking yang tinggi dibandingkan provinsi lain. Hal ini dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang rendah serta usia harapan hidup yang tinggi. Dengan tingginya jumlah lanjut usia, bisa menjadi masalah kesehatan lain apabila para lanjut usia (lansia) tidak dalam kondisi sehat pada masa tuanya. Dengan adanya perbedaan pengertian sakit antara stakeholder kesehatan dan masyarakat, dimana masyarakat baru menganggap “sakit” apabila sudah terganggu aktivitas fisiknya dan baru merasa perlu untuk berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan. Hal ini akan menyebabkan upaya penanganan penyakit tidak menular terlambat. Penyakit tidak menular yang merupakan penyakit kronis dan membutuhkan masa waktu yang panjang sampai dengan munculnya gejala. Penyakit ini juga identik dengan “mahal”, karena untuk penentuan diagnosis memerlukan peralatan medis yang lebih canggih dan pengobatannya memerlukan waktu yang lama. Meskipun penyakit tidak menular merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui perubahan perilaku dan gaya hidup, namun hal tersebut sangat sulit dilakukan oleh masyarakat modern sekarang ini. Karenanya diperlukan upaya keras stakeholder untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mereka mau melakukan deteksi dini. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat diperlukan inovasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun strategi yang efektif dengan penyusunan kebijakan yang tepat untuk upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Di Kabupaten Kulon Progo sudah tidak terdapat desa indigenous malaria. Indikator daerah tereliminasi yaitu daerah yang tidak ditemukan lagi desa dengan kasus malaria yang lebih dari 1‰ penduduk dan tidak ditemukan kasus penularan setempat (indigenous) selama 3 tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan surveilans yang baik.

Kematian ibu dan bayi masih cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 kasus kematian ibu dapat ditekan menjadi hanya 3 kasus, tahun 2021 kasus kematian meningkat menjadi 10 kasus lalu pada tahun 2022 menurun menjadi 8 kasus dan pada tahun 2023 turun menjadi 1 kasus. Kematian bayi dari 36 kasus di tahun 2020 naik ke 45 kasus pada tahun 2021, turun 1 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kematian bayi menurun menjadi 36 kasus dan kembali menurun menjadi 35 kasus di tahun 2024. Berdasar kasus AKI dan AKB yang fluktuatif, maka kematian ibu dan bayi harus terus diupayakan untuk penurunannya.

Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2024, dari 21 Puskesmas yang telah dilakukan survey akreditasi, seluruh puskesmas sudah terakreditasi dengan status akreditasi paripurna. Namun secara umum masih diperlukan perbaikan baik dari sisi fisik maupun dari kualitas pelayanan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar oleh pemerintah pada masyarakat. Selain fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, terdapat 10 klinik swasta sudah terakreditasi paripurna dan 6 klinik yang sedang dalam tahap persiapan survei akreditasi. Terdapat juga 39 tempat praktik mandiri dokter/ dokter gigi (TPMDG) dengan status 26 sudah pada tahap persiapan survei dan sisanya ditargetkan pada bulan Desember 2024 sudah terakreditasi secara keseluruhan.

Terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates, kapasitas rawat inap untuk Kelas utama (VIP) sebanyak 13 tempat tidur, Kelas 1 sebanyak 29 tempat tidur, Kelas

2 sebanyak 28 tempat tidur, dan Kelas 3 sebanyak 83 tempat tidur. Untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit dengan standar Internasional RSUD Wates sudah selesai membangun gedung Medik Terpadu 4 lantai, Gedung Rawat Inap 4 lantai baru beserta fasilitasnya.

Selain RSUD Wates, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki RSUD Nyi Ageng Serang. Sesuai konsep awal pendirian RSUD Nyi Ageng Serang, RSUD Nyi Ageng Serang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan kualitas pelayanan, sehingga didesain menjadi Rumah Sakit tanpa kelas. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang lebih mengutamakan privacy dalam pelayanan, maka dibangunlah ruang perawatan (bangsal) dewasa dengan beberapa tingkatan kelas perawatan.

Tabel 2.52
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2022-2024

No.	Uraian Indikator	Satuan	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah balita Bawah Garis Merah*	Balita	170	222	3.256	2.238	2.574	2.515
2	Jumlah balita Bawah Garis Merah yang ditangani*	Balita	170	222	2.238	2.238	2.574	2.515
3	Persentase balita bawah garis merah yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
4	jumlah balita yang ditimbang	Balita	21.868	20.242	21.868	19.178	21.450	20.737
5	Jumlah balita stunting	Balita	2.842	2.057	2.759	1.828	5.003	2.152
6	Jumlah ibu hamil dengan anemia	Orang	550	635	799	535	797	410
7	Jumlah ibu hamil	Orang	5.592	3.707	5.333	3.984	3.981	3.585
8	Jumlah bayi dengan BBLR	Bayi	330	270	397	308	198	267
9	Jumlah bayi	Bayi	5.110	3.819	4.960	3.844	3.944	3.990
10	Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif	Bayi	3.100	3.655	3.844	3.320	3.156	3.626
11	Jumlah balita kurus	Balita	657	1.105	1.150	1.545	1.502	1.048
12	Jumlah desa siaga yang sudah aktif (mandiri)	Desa	33	85	46	66	35	66
13	Jumlah desa	Desa	88	88	88	88	88	88
14	Jumlah kecamatan sehat	Kec.	12	12	12	12	12	12
15	Jumlah desa STBM semua pilar	desa	50	51	68	64	88	88

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

*) Pergantian definisi operasional

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan status gizi masyarakat yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah balita stunting. Pada tahun 2024, terdapat perubahan definisi operasional balita bawah garis merah yang awalnya hanya balita dengan berat sangat kurang menjadi berat badan kurang berdasarkan berat badan/umur. Hal ini mengakibatkan balita bawah garis merah meningkat dan mencapai sekitar 10% dari balita yang ditimbang.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting dengan intervensi gizi spesifik langsung kepada balita stunting, optimalisasi posyandu dan PAUD, peningkatan cakupan air bersih, penyediaan sanitasi layak, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tersebut diberikan kepada:

- (1). Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui,
- (2). anak usia 0-23 bulan,
- (3). anak usia 24-59 bulan,
- (4). remaja putri,
- (5). calon pengantin, dan
- (6). keluarga dan masyarakat.

Upaya menurunkan jumlah ibu hamil dengan anemia dan meningkatkan capaian bayi dengan ASI eksklusif perlu ditingkatkan pemantauan minum tablet Fe (zat besi) bagi ibu hamil dan menemukan inovasi untuk meningkatkan capaian ASI eksklusif bagi bayi.

Pada tahun 2024 kalurahan siaga aktif mandiri mengalami penurunan hingga mencapai 66 kalurahan. Beberapa desa belum termasuk dalam kategori desa siaga aktif, oleh karena keberadaan forum desa siaga yang kurang aktif serta keberadaan data-data pendukung belum terdokumentasi dengan baik, sehingga pada masa yang akan datang perlu meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo sudah termasuk dalam kategori Kecamatan Sehat. Jumlah kalurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 88 kalurahan (semua kalurahan). Tingkat capaian kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022-2024

No.	Uraian Indikator	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) tertangani <24 jam	15	8	15	23	17	27
2	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB)	15	8	15	23	15	27
3	Jumlah bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	5.082	2.802	4049	3991	100	98.35
4	Jumlah bayi	5.110	4.883	5.100	3.944	4.073	4.006
5	Jumlah Desa mencapai Universal Child Immunization (UCI)	88	88	88	88	88	88
6	Jumlah Desa	88	88	88	88	88	88
7	Jumlah penderita Tuberkulosis yang diobati sembuh dan lengkap	581	234	299	256	245	159
8	Jumlah penderita Tuberculosis	830	262	590	286	321	349

No.	Uraian Indikator	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
9	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	3.500	3.620	4.113	5.119	5.261	5.671
10	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV	16.901	3620	16.901	5.119	5.261	6.008
11	Jumlah Desa tidak memiliki kasus indigenous malaria	88	88	88	88	88	88
12	Jumlah kematian penderita DBD	1	6	1	0	0	0
13	Jumlah penderita DBD	105	213	155	76	263	1.431
14	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.470	4.771	10.492	10.447	10.447	12.946
15	Jumlah penderita hipertensi	40.112	40.112	29.237	31.658	29.366	31.041
16	Jumlah penduduk usia 18+ yang dilakukan pemeriksaan Indeks Massa Tubuh	11.500	86.923	173.027	116.233	116.233	108.217
17	Jumlah penduduk usia 18+	320.456	292.838	314.628	314.628	314.628	269.645
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok	1.335	1.371	1.368	1.368	1.368	1.368
19	Jumlah sekolah	1.352	1.371	1.368	1.368	1.368	1.368
20	Jumlah desa/kelurahan mempunyai posbindu	84	88	88	88	88	88
21	Jumlah penderita ODGJ berat dilayani sesuai standar	1.515	1.207	1.441	1.410	1.411	1.497
22	Jumlah penderita ODGJ berat	2.804	1.207	1.555	1.562	1.555	1.516

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Untuk pencegahan dan pengendalian malaria, pada tahun 2024 terjadi kasus KLB malaria di 2 kalurahan yaitu Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh, dan Kalurahan Hargotirto Kapanewon Kokap. Karena telah mendapatkan status eliminasi malaria, maka kenaikan kasus malaria menjadi kategori KLB. Kalurahan yang mengalami KLB terjadi di wilayah pelayanan 11 puskesmas. Berikut ini Kejadian Luar Biasa yang terjadi pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.54

Kejadian Luar Biasa (KLB) Berdasarkan Waktu, Jenis, Lokasi Kejadian dan Jumlah Kasus Tahun 2020-2024

No.	Waktu Kejadian	Jenis KLB	Puskesmas	Kalurahan/Kelurahan	Kasus
Tahun 2020					
1	Januari	Suspek difteri	Kokap 2	Hargowilis	1

No.	Waktu Kejadian	Jenis KLB	Puskesmas	Kalurahan/Kelurahan	Kasus
2	November	Keracunan Makanan	Sentolo 1	Sukoreno	7
3	November	Keracunan Makanan	Nanggulan	Banyuroto	5
4	Desember	Keracunan Makanan	Temon 2	Karangwuluh	15
Tahun 2021					
1	Februari	Keracunan Makanan	Temon I	Kulur	10
2	Maret	Keracunan Makanan	Kokap II	Hargotirto	7
3	Mei	Keracunan Makanan	Temon II	Jangkar	2
4	Desember	Keracunan Makanan	Lendah II	Gulurejo	2
5	Desember	Keracunan Makanan	Temon II	Sindutan (Temon II)	6
6	Desember	Chikungunya (suspect)	Temon I	Temon Wetan	46
7	Desember	Chikungunya	Sentolo I	Sentolo	33
8	Desember	Keracunan Makanan	Sentolo I	Sentolo	3
Tahun 2022					
1	Januari	Keracunan Makanan	Kokap II	Hargotirto	2
2	April	Keracunan Makanan	Kokap I	Hargorejo	45
3	Mei	Malaria	Samigaluh II	Gerbosari dan Ngargosari	56
4	Juli	Keracunan Makanan	Galur II	Kranggan	28
5	Oktober	Keracunan Makanan	Girimulyo II	Purwosari	81
6	Oktober	Malaria	Samigaluh II	Banjarsari	1
7	November	Malaria	Kokap I	Kalirejo	2
Tahun 2023					
1	Januari	Malaria	Samigaluh II	Pagerharjo	1
2	Februari	Keracunan makanan	Pengasih I	Sidomulyo	34
3	Februari	Malaria	Kokap II	Hargotirto	2
4	Maret	Muntaber/ diare	Lendah I	Jatirejo	11
5	Maret	Keracunan makanan	Samigaluh I	Sidoharjo	6
6	April	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	4
7	Mei	Keracunan makanan	Sentolo I	Sukoreno	54
8	Juni	Diare	Sentolo II	Tuksono	40
9	Juli	Leptospirosis	Nanggulan, Girimulyo I	Pendoworejo, Giripurwo, Tanjungharjo, Donomulyo, Wijimulyo, Jatisarono, Kembang	26
10	Juli	Diare	Wates	Triharjo	23
11	Juli	Pertusis	Wates	Bendungan	1
12	September	Keracunan makanan	Wates	Terbah	49
13	Oktober	Pertusis	Girimulyo I	Pendoworejo	4
14	Oktober	Keracunan makanan	Kokap II	Hargotirto	3
15	Oktober	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
16	November	Keracunan makanan	Samigaluh I	Ngargosari	23
15	Oktober	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
16	November	Keracunan makanan	Samigaluh I	Jatimulyo	
17	November	Keracunan makanan	Lendah II	Jatimulyo	
18	November	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	76
19	November	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	5

No.	Waktu Kejadian	Jenis KLB	Puskesmas	Kalurahan/Kelurahan	Kasus
20	November	Keracunan makanan	Sentolo I	Kaliagung	7
21	Desember	Keracunan makanan	Nanggulan	Wijimulyo	62
22	Desember	Keracunan makanan	Kokap I	Hargorejo	16
23	Desember	Pertusis	Pengasih I	Sendangsari	6
Tahun 2024					
1	Februari	Pertusis	Wates	Triharjo	5
2	Februari	Keracunan Makanan	Wates	SDN 2 Wates	34
3	Februari	Malaria	Samigaluh II	Banjarsari	3
4	Maret	Keracunan Makanan	Wates	Giripeni	116
5	April	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
6	April	Keracunan Makanan	Lendah II	Ngentakrejo	41
7	April	Keracunan Makanan	Nanggulan	Banyuroto	12
8	Mei	Keracunan Makanan	Temon II	Puskesmas	20
9	Mei	Keracunan Makanan	Wates	Triharjo	2
10	Juli	Keracunan Makanan	Samigaluh I	Ngargosari	24
11	Agustus	Keracunan Makanan	Girimulyo II	Purwosari	3
12	Agustus	Parotitis	Temon II	Jangkaran	196
13	Agustus	Keracunan Makanan	Wates	Triharjo	26
14	September	Keracunan Makanan	Kalibawang	Banjarharjo	50
15	September	Varicella	Wates	SDN Karangwuni	22
16	September	Parotitis	Nanggulan	SDN Jatisarono	24
17	Oktober	Keracunan Makanan	Sentolo II	Tuksono	4
18	Oktober	Keracunan Makanan	Kokap I	Hargorejo	4
19	Oktober	Varicella	Nanggulan	SDN Lengkong	6
20	Oktober	Parotitis	Samigaluh I	SDN Samigaluh	28
21	November	Keracunan Makanan	Galur I	SD Muh Wonopeti 2	10
22	November	Parotitis	Nanggulan	SMP N 2 Nanggulan	9
23	November	Keracunan Makanan	Panjatan I	Gotakan	3
24	November	Keracunan Makanan	Sentolo I	Kaliagung	3
25	November	Parotitis	Kokap I	SMP N 2 Kokap	63
26	November	Parotitis	Temon I	Kulur	13
27	Desember	Varicella	Sentolo I	TK Bantar i	10

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa sebagian besar KLB adalah keracunan makanan. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan peran masyarakat melalui pengenalan makanan berisiko baik dari sisi jenis makanan, sumber makanan, cara pengolahan dan penyajian. Untuk mempermudah pemahaman maka perlu diupayakan pemahaman cara penyediaan dan konsumsi makanan yang baik meliputi bagaimana mendeteksi makanan yang baik dan aman, cara pengolahan makanan yang higienis dan aman, cara distribusi, cara penyimpanan, penyajian sampai cara konsumsi yang aman. Sanitasi tempat penyimpanan, pengolahan dan penyajian maupun konsumsi juga memegang peran yang sangat penting untuk antisipasi yang akan datang.

Di sisi lain adanya ancaman KLB penyakit menular baru yang kemungkinan berasal dari luar wilayah terlebih dengan adanya kemajuan wilayah dengan operasionalnya Bandara Internasional

Yogyakarta sangat berpotensi terjadi dan dapat menimbulkan kegawatdaruratan Kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang perlu diwaspadai seperti: EBOLA, Mers-Cov, SARS, Nipah, Hanta virus. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mengatasi KLB melakukan deteksi dini dan respon cepat untuk pencegahan KLB maupun perluasan KLB serta melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan.

Tabel 2.55
Data Prevalensi dan Kasus Penyakit Tahun 2020- 2024

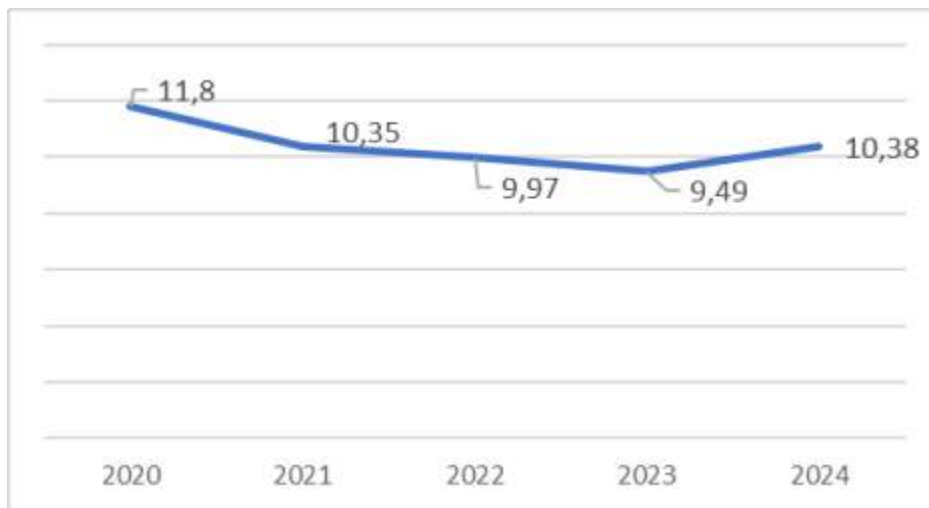
No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka kejadian malaria	Per 100.000 penduduk	1,117	3,613	13,759	2,241	11.523
2	Angka kasus malaria	Kasus	5	16	59	10	8
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	443.003	442.874	443.591	446.192	444.994
4	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	0,0058	0,00248	0,0065	0,0053	0.0064
5	Jumlah pasien HIV/AIDS	Kasus	26	11	28	54	49
6	Jumlah Penderita Demam Berdarah Dengue	Kasus	316	213	231	76	1.431
7	Jumlah Penderita Diare	Kasus	4.768	2028	3.618	4.851	3.676
8	Jumlah Penderita TB	Kasus	247	205	270	282	5.549
9	Jumlah Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut	Kasus	22.351	12.354	1.190	26.308	59.581

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kejadian malaria dari tahun 2020 terjadi sebanyak 1.117 kejadian, namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 meningkat lagi, hal ini terjadi karena kasus impor dari luar daerah. Tahun 2023 kembali menurun tajam hingga mencapai 10 kasus atau dengan prevalensi 2,241 per 100.000 penduduk. Pada Tahun 2020 walaupun masih terdapat kasus tetapi sudah tidak ada lagi desa yang indigenous malaria. Prevalensi HIV maupun absolut kasus HIV/AIDS di Kulon Progo cenderung fluktuatif, sehingga kampanye informasi mengenai HIV/AIDS perlu ditingkatkan. Jumlah penderita TB, DBD, diare dan ISPA juga masih fluktuatif sehingga program pencegahan dan pengendalian penyakit perlu terus melakukan evaluasi.

Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi permasalahan stunting, menurut WHO stunting menjadi permasalahan kesehatan jika prevalensinya 20 persen atau lebih. Stunting adalah kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) dengan Z-score < -2 SD (pendek dan sangat pendek) dan target nasional balita stunting < 20%. Stunting merupakan masalah gizi yang bersifat kronis yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan dan berlangsung lama. Stunting berdampak pada gangguan kognitif dan resiko menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa.

Prevalensi stunting di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2024 menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu dari 12.58% pada tahun 2019 menjadi 10.38% pada tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.28

Persentase Balita Stunting di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk intervensi spesifik dalam upaya penurunan stunting yaitu:

- a) Pelaksanaan Community Feeding Center (CFC) di Puskesmas Kalibawang dan Panjatan II;
- b) Pelaksanaan Therapeutic Feeding Centre (TFC) di Puskesmas Galur II;
- c) Sosialisasi dan Konseling PMBA (Promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak) bagi kader, ibu hamil dan keluarga baduta;
- d) Pemberian Makanan Tambahan Ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis);
- e) Pemberian Makanan Tambahan Balita Wasting;
- f) Pendampingan balita gizi buruk oleh kader dan petugas;
- g) Kunjungan rumah pada ibu hamil, bayi dan balita resiko tinggi (BBLR/PBLR);
- h) Konseling laktasi;
- i) Pelaksanaan ANC (Antenatal Care) Terpadu;
- j) Pelaksanaan kelas ibu hamil;
- k) Pemberian Vitamin A pada bayi, balita dan ibu nifas;
- l) Pemberian obat cacing pada balita;
- m) Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil;
- n) Eliminasi malaria;
- o) Pendampingan balita diare minum Zinc;
- p) Dusun Kabar (Kawasan Bebas Asap Rokok);
- q) KTR (Kawasan Tanpa Rokok);
- r) Pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Deklarasi STBM;
- s) Pemeriksaan kualitas air bersih;
- t) Kesehatan reproduksi remaja;
- u) Konseling catin (calon pengantin);
- v) Penyegaran kader dalam pemantauan pertumbuhan balita;
- w) Pendampingan petugas saat PSG di posyandu;
- x) Dukungan dan kerja sama lintas program dan lintas sektor.

Peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar, khusus maupun rujukan, kesiapsiagaan bencana, pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan laboratorium, serta meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa indikator dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.56
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024

No.	Uraian Indikator	2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan (RS. Puskesmas. Klinik Pratama)	36	36	38	38	43	43
2	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS. Puskesmas. Klinik Pratama)	37	38	38	38	43	43
3	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer	9	18	21	21	21	21
4	Jumlah puskesmas	21	21	21	21	21	21
5	Jumlah Puskesmas yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat di atas 81.26 (Sangat Baik)	21	20	21	21		
6	Jumlah Puskesmas	21	21	21	21	21	21

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dan pengawasan Obat Makanan dan Bahan Adiktif (OMKABA) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut ini data sumber daya kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.57
Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan puskesmas	%	175	175	175	175	175
	<i>Jumlah puskesmas</i>	<i>Unit</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>
	<i>Jumlah kecamatan</i>	<i>kecamatan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
2	Cakupan puskesmas pembantu	%	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6
	<i>Jumlah puskesmas pembantu</i>	<i>Unit</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>
	<i>Jumlah kalurahan/ kelurahan</i>	<i>Kalurahan/ kelurahan</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>88</i>
3	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per satuan balita	39,97	40,82	38,65	45,17	44,06

No.	Indikator Outcome	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Jumlah Posyandu</i>	<i>Unit</i>	960	960	959	957	957
	<i>Jumlah Balita</i>	<i>Jiwa</i>	24.018	23.514	24.808	21.182	21.717
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,0212	0,0225	0,0225	0,0224	0,0231
	<i>Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu</i>	<i>Unit</i>	94	100	100	100	103
	<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Jiwa</i>	443.003	442.874	443.591	446.192	444.994
5	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,0203	0,0203	0,00202	0,00201	0,00202
	<i>Jumlah rumah sakit</i>	<i>Unit</i>	9	9	9	9	9
6	Rasio dokter per satuan penduduk	Per satuan penduduk	0,025	0,030	0,028	0,057	0,062
	<i>Jumlah dokter</i>	<i>Jiwa</i>	114	134	127	254	280
7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per satuan penduduk	2,293	2,190	2,191	1,205	2,910
	<i>Jumlah tenaga medis</i>	<i>Jiwa</i>	1016	970	972	538	1.295

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten tersebut, pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 331/A/2015 tentang Ruas Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Bupati. Nomor 87/C/2024 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten. Ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai Jalan Lokal Primer, dimana Jalan Lokal Primer tersebut terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Jalan Lokal Primer I dan Jalan Lokal Primer II. Jalan Lokal Primer I merupakan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kapanewon, ibukota kabupaten dengan pusat kalurahan, antar ibukota kapanewon, dan ibukota kapanewon dengan kalurahan, sedangkan Jalan Lokal Primer II merupakan jalan yang menghubungkan antar kalurahan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 408/A/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten, panjang total jalan Lokal Primer I di Kabupaten Kulon Progo adalah 636,025 km, sedangkan panjang total Jalan Lokal Primer II adalah 672,620 km. Pada tahun 2024 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No 87/C/2024 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten, dimana dalam SK tersebut panjang dan jumlah ruas jalan Kabupaten berkurang dari yang semula 1.308,645 km yang terdiri dari Lokal Primer I dan Lokal Primer II menjadi 807.758 km tersebar di semua Kapanewon. Dengan adanya perubahan SK tersebut menjadikan banyak ruas jalan yang semula merupakan kewenangan Kabupaten beralih menjadi kewenangan Kalurahan atau Kelurahan dan menjadi jalan Lingkungan. Realisasi penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 408/A/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten adalah sebagai berikut.

Tabel 2.58

Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Status Jalan		Kondisi				Total	
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Tahun 2020	LK I	Km	297.312	147.522	102.378	88.813	636.025
			%	46.75	23.19	16.10	13.96	100.00
		LK II	Km	216.907	243.068	78.681	133.964	672.620
			%	32.25	36.14	11.70	19,92	100.00
		Total LK I dan LK II	Km	514.219	390.59	181.059	222.777	1.308,645
			%	39,294	29,847	13,836	17,023	100.00
2	Tahun 2021	LK I	Km	300.012	152.022	101.178	82.813	636.025
			%	47,17	23,90	15,91	13,02	100
		LK II	Km	240.907	249.368	60.101	122.244	672.620
			%	35,82	37,07	8,94	18,17	100
		Total LK I dan LK II	Km	540.919	401.390	161.279	205.057	1.308.645
			%	41,33	30,67	12,32	15,67	100
3	Tahun 2022	LK I	Km	302.642	150.331	100.235	82.818	636.025
			%	47,58	23,64	15,76	13,02	100
		LK II	Km	248.497	249.898	69.765	104.461	672.620
			%	36,94	37,15	10,37	15,53	100
		Total LK I dan LK II	Km	551.139	400.229	170.000	187.279	1.308.645
			%	42,12	30,58	12,99	14,31	100
4	Tahun 2023	LK I	Km	300.886	155.990	98.453	80.696	636.025
			%	47,31	24,53	15,48	12,69	100
		LK II	Km	256.315	247.291	67.378	101.636	672.620
			%	38,11	36,77	10,02	15,11	100
		Total LK I dan LK II	Km	557.201	403.281	165.831	182.332	1.308.645
			%	42,58	30,82	12,67	13,93	100
5	Tahun 2024	LK I	Km	305.986	157.590	96.053	76.396	636.025
			%	48,11	24,78	15,10	12,01	100
		LK II	Km	260.315	248.491	64.978	98.836	672.620
			%	38,70	36,94	9,66	14,69	99,99
		Total LK I dan LK II	Km	566.301	406.081	161.031	175.232	807.758
			%	43,27	31,03	12,31	13,39	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

Pada Tahun 2020, terjadi penurunan kualitas jalan dikarenakan adanya refocusing kegiatan untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Penurunan ini terjadi khususnya pada jalan Lokal Primer I. Tahun 2021, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I naik dari 69,94% menjadi 71,07 %, dan Lokal Primer II naik menjadi dari 68,39 % menjadi 72,39%. Pada tahun 2022, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I naik dari 71,07 % menjadi 71,22 %, dan Lokal Primer II naik dari 72,39 % menjadi 74,09 %. Pada Tahun 2023, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I mengalami sedikit kenaikan dari 71,22% menjadi 71,82 %, sedangkan untuk ruas jalan Lokal primer II terjadi kenaikan kondisi mantap dari 74,09 % menjadi 74,88%. Sedangkan pada tahun 2024, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I mengalami sedikit kenaikan dari 71,82 % menjadi 72,98 %, sedangkan untuk ruas jalan Lokal Primer II terjadi kenaikan kondisi mantap dari 74,88 menjadi 75,64 %.

Peningkatan kualitas jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Kulon Progo disebabkan beberapa faktor, antara lain : Efektifitas dari program dan kegiatan pada Bidang Bina Marga DPUPKP sehingga dengan dukungan anggaran yang ada baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD dapat meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Kulon Progo. Melihat faktor-faktor tersebut di atas dapat dikatakan bahwa ada laju peningkatan kualitas jalan kabupaten di Kulon Progo.

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait pengembangan wilayah maka untuk peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan kabupaten berupaya meraih dana dari APBD DIY, Dana Keistimewaan dan APBN (Anggaran Dana Alokasi Khusus). Selain Jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer II, di Kabupaten Kulon Progo juga terbentang Jalan Nasional sepanjang 47.180 m dengan kondisi baik 34.761 m (73,68%) kondisi sedang 11.172 m (23,68%) dan kondisi Rusak Ringan 1.247 km (2,64%). Jalan Provinsi sepanjang 154.440 m kondisi baik 79.802 m (51,67%), kondisi sedang 35.773 m (23,16%) kondisi ringan 31.163 m (20,18 %) dan kondisi rusak berat 7.702 m (4,99 %). Kondisi jalan berdasarkan status jalan dapat dilihat di Tabel berikut ini.

Tabel 2.59

Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Status Jalan	Kondisi								Total Jalan
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		km	%	km	%	Km	%	Km	%	
1.	Nasional*	34.761	73,68	11.172	23,68	1.247	2,64	-	-	47.180
2.	Provinsi	79.802	51,67	35.773	23,16	31.163	20,18	7.702	4,99	154.440

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2025

*) Data sementara

Kondisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang ada di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan kualitas pada Tahun 2021. Terjadi penurunan kualitas Jalan Nasional kondisi mantap dari 100 persen pada Tahun 2020 menjadi 98,59 persen pada Tahun 2021. Untuk Jalan Provinsi kondisi mantap: dari 79,47 persen pada Tahun 2020 menjadi 70,31 persen pada Tahun 2021 dan turun lagi menjadi 68,04 persen pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 98,59 % pada tahun 2023. Pada tahun 2024 status jalan Nasional dengan total 47.180 m kondisi baik sepanjang 34.761 m atau 73,68 persen, kondisi sedang 11.172 m atau 23,68%, kondisi rusak ringan sepanjang 1.247 m atau 2,64 % dan rusak berat tidak ada. Sedangkan kondisi jalan Provinsi dengan total panjang 154.440 m dengan

kondisi baik 79.802 m atau 51,67 %, kondisi sedang sepanjang 35.773 m atau 23,16 %, kondisi Rusak Ringan sepanjang 31.163 m atau 20,18 % dan Rusak Berat sepanjang 7.702 m dengan prosesntase 4,99 %.

Jumlah jembatan pada tahun 2024 sebanyak 241 buah, meliputi 7 buah jembatan nasional (dalam keadaan baik), 77 buah Jembatan Propinsi (49 buah keadaan baik, 20 buah keadaan rusak ringan dan 8 buah rusak berat) dan Jembatan kabupaten sebanyak 157 buah (19 buah dalam keadaan baik, 69 buah keadaan rusak ringan, 55 buah keadaan rusak sedang dan 14 buah keadaan rusak berat) Rincian kondisi jembatan secara detail berdasarkan status jembatan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Kondisi Jembatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Status Jembatan	Satuan	Kondisi				Total Jembatan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak berat	
1.	Nasional	unit	7	-	-	-	7
2.	Provinsi	unit	49	20	-	8	77
3.	Kabupaten	unit	19	69	55	14	157

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pengembangan akses jalan dan jembatan merupakan dukungan untuk pengembangan wilayah dan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah. Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Kulon Progo masih perlu untuk terus ditingkatkan terutama untuk akses pada pusat, pusat pertumbuhan seperti di sekitar Bandara YIA, pada kawasan peruntukan industri, kawasan dengan potensi pariwisata, dan juga perlu untuk memperbaiki akses jalan di wilayah pedesaan maupun pegunungan. Berdasarkan data diatas kondisi status jembatan Nasional pada tahun 2025 dalam kondisi baik sebanyak 7 (tujuh). Sedangkan kondisi status jembatan Provinsi pada tahun 2025 Kondisi Baik 49 (empat puluh sembilan), Kondisi Rusak Ringan 20 (dua puluh) dan Kondisi Rusak Berat 8 (delapan) dan Kondisi status jembatan Kabupaten pada tahun 2025 dalam kondisi Baik 90 (sembilan puluh), Kondisi Rusak Ringan 58 (lima puluh delapan), Kondisi Rusak sedang 7 (tujuh) dan Kondisi Rusak Berat 2 (dua)

b. Sarana Irigasi

Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Upaya tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. Untuk mencapai irigasi yang baik diperlukan sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan irigasi berupa saluran, bangunan utama, dan bangunan pelengkap merupakan satu kesatuan yang berfungsi sebagai penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

Prasarana sumberdaya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu dari

prasarana tersebut didalamnya termasuk bangunan irigasi. Secara garis besar jaringan irigasi mencakup 5 macam bangunan irigasi yaitu : (i) Bangunan pengambilan (intake), (ii) Bangunan pembawa (saluran), (iii) Bangunan bagi dan sadap, (iv) Bangunan pengaturan dan pengukuran debit, (v) Bangunan pelindung dan pelengkap.

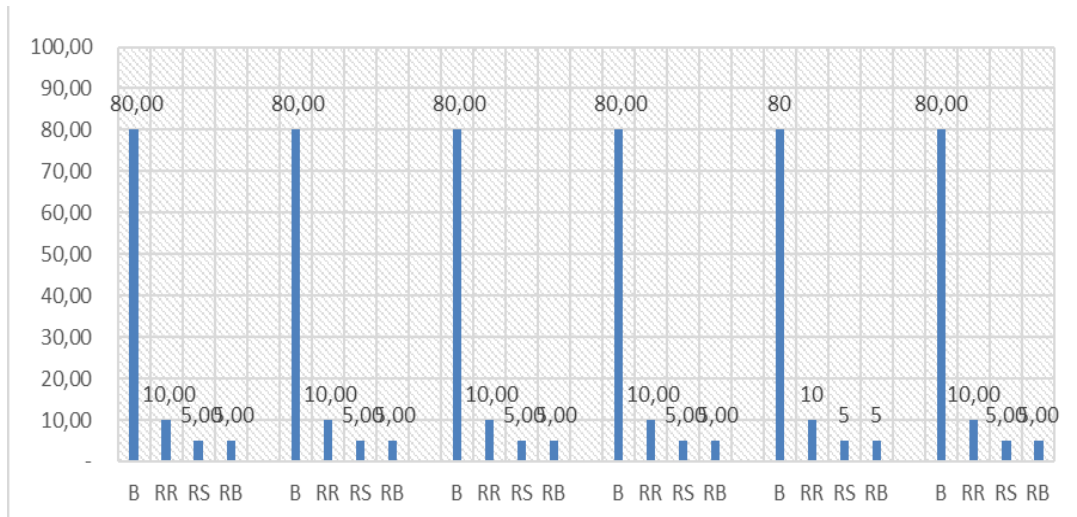
Kondisi saluran irigasi di bawah kewenangan pusat kurun waktu 2019-2023 sebagian besar dalam kondisi baik dengan kondisi pada tahun 2023 sebesar 70% dalam kondisi baik sejak tahun 2019 dan tidak terdapat kondisi rusak berat. Sedangkan pada daerah irigasi kewenangan kabupaten pada tahun 2023 sebanyak 60,72% dalam kondisi baik. Kondisi rusak sedang pada tahun 2023 berada di angka 12,03% mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,03 % dan juga kondisi rusak ringan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,23% dari tahun 2022. Kondisi saluran irigasi di bawah kewenangan pemerintah provinsi kondisinya relatif baik pada angka 80% dengan kondisi baik. Dalam kurun tahun 2019-2023 kondisi rusak sedang 5%, rusak ringan 10% dan rusak berat 5% berlangsung sama. Grafik kondisi masing masing saluran irigasi berdasar wilayah kewenangan dapat dicermati pada Gambar di bawah ini. Bila dibandingkan, nampak bahwa persentase kondisi saluran irigasi kewenangan kabupaten masih berada di bawah provinsi dan pusat terutama keberadaan saluran dengan kondisi rusak berat yang relatif banyak, sehingga perlu ditingkatkan upaya perbaikan dan pengembangannya mengingat pentingnya infrastruktur irigasi dalam menopang pertanian di Kulon Progo. Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan perlu diperhatikan setiap daerah irigasi berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing daerah irigasi sehingga fungsi dari saluran irigasi masih dapat dipergunakan.



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah).

Gambar 2.29

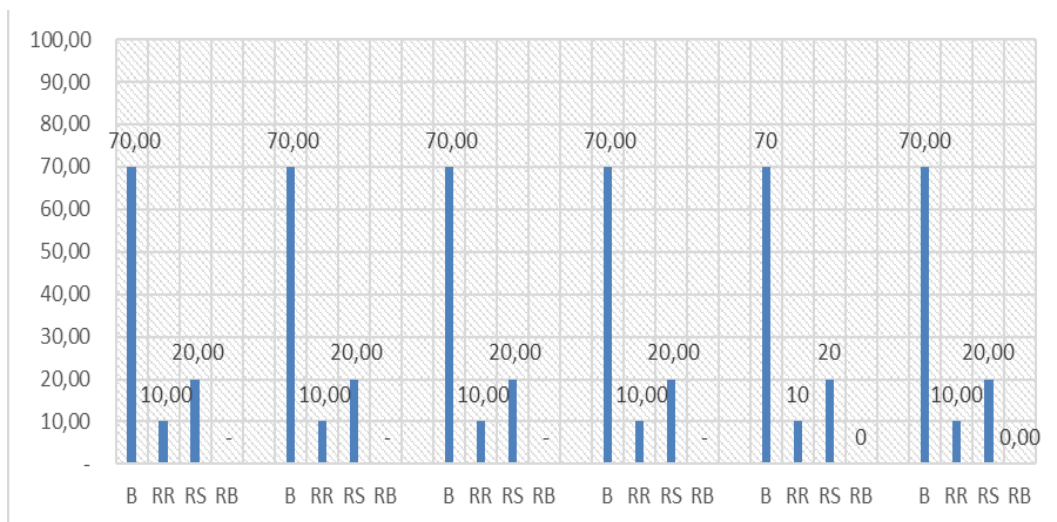
Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah).

Gambar 2.30

Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2018 – 2023



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah).

Gambar 2.31

Kondisi Saluran Irigasi Kewenangan Pusat Tahun 2018 – 2023

Pada pengelolaan irigasi, salah satu unsur penting yang harus terus dilakukan secara kontinyu adalah operasi dan pemeliharaan (O & P) jaringan irigasi agar fungsi irigasi dapat berlangsung dengan baik. Sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kegiatan O & P, diperlukan penunjang infrastruktur irigasi yang mencukupi. Namun demikian, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam hal infrastruktur irigasi antara lain:

1. Data jaringan irigasi pada saat ini kurang up to date dan belum mencakup seluruh wilayah daerah irigasi berdasar kewenangan.
2. Penyebaran penyimpanan data pada umumnya tidak tersimpan dalam satu kesatuan sehingga menyulitkan dalam akses dan updating.
3. Satuan ukuran data baik data kualitatif maupun data peta umumnya berbeda sehingga perlu upaya standarisasi atau pembakuan.
4. Ketersediaan SDM dan dana untuk pengelolaan irigasi yang masih terbatas.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka pengelolaan irigasi dapat menjadi kurang optimal. Selain infrastruktur irigasi yang banyak mengalami kerusakan di Kabupaten Kulon Progo masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain Waduk Sermo tercatat sebanyak 21 embung yang dibangun di Kabupaten Kulon Progo yang dimanfaatkan untuk air baku, irigasi dan konservasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.61

Data Embung di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Nama Embung	Lokasi	Kapasitas (m ³)	Sumber mata air (sungai, mata air, air hujan)	Sumber Pendanaan Pembangunan (APBN, APBD DIY, APBD KP)	Pemanfaatan (pengairan, konservasi, wisata)	Pemeliharaan/perawatan/ penanggungjawab (ada tenaga THL/Kalurahan/ warga)	Keterangan
1.	Embung Blubuk	Dusun Girinyono, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	18.655	Sungai	APBD DIY Th 2015	Konservasi, perikanan, irigasi, pariwisata an air baku	Kalurahan	
2.	Embung Bogor	Dusun Girinyono, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	6.000	Sungai	APBD KP Th 2015	Konservasi, Irigasi an air baku	THL	
3.	Embung Batur	Dusun Batur, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	8.900	Sungai	APBD DIY 2016	Konservasi, perikanan, irigasi, pariwisata an air baku	THL	
4.	Embung Kalibuko I	Kalurahan Kalirejo, Kap. Kokap	6.170	Sungai	APBD DIY Th 2015	Konservasi dan air baku	P3A	
5.	Embung Kayangan	Dusun Paingan, Kalurahan Sendangsari, Kap. Pengasih	6.000	Sungai		Konservasi dan air baku	P3A	
6.	Embung Kedungromo	Kalurahan Giripurwo, Kap. Girimulyo	3.500	Sungai	APBN Th 2008	Konservasi	Kalurahan	
7.	Embung Penggung	Kalurahan Hargorejo, Kap. Kokap	4.000	Air Hujan	APBN Th 2013	Konservasi	Kalurahan	
8.	Embung Tangkisan I	Kalurahan Hargomulyo, Kap. Kokap	35.000	Air Hujan	APBN Th 2004	Konservasi	Kalurahan	
9.	Embung Tangkisan II	Kalurahan Hargomulyo, Kap. Kokap	7.500	Air Hujan	APBN Th 2004	Konservasi	Kalurahan	

No.	Nama Embung	Lokasi	Kapasitas (m ³)	Sumber mata air (sungai, mata air, air hujan)	Sumber Pendanaan Pembangunan (APBN, APBD DIY, APBD KP)	Pemanfaatan (pengairan, konservasi, wisata)	Pemeliharaan/perawatan/ penanggungjawab (ada tenaga THL/Kalurahan/ warga)	Keterangan
10.	Embung Plampang	Kalurahan Kalirejo, Kap. Kokap	1.500	Air Hujan	APBD DIY Th 2015	Konservasi	Kalurahan	
11.	Embung Cikli	Kalurahan Giripurwo, Kap. Girimulyo	3.000	Sungai	APBN Th 2004	Konservasi	P3A	bendung kali penggung
12.	Embung Sambeng	Dusun Anjir, Kalurahan Hargowilis, Kap. Kokap	12.000	Sungai	APBN Th 2004	Konservasi	P3A	
13.	Embung Bibis	Dusun Klepu, Kalurahan Hargowilis, Kap. Kokap	40.000	Sungai	APBN Th 2004	Konservasi	BBWS SO	
14.	Embung Jurug	Kalurahan. Sidorejo, Kap. Lendah	9.000	Sungai	APBD KP Th 2009 ; 2016	Konservasi, Irigasi	P3A	
15.	Embung Samigaluh	Kap. Samigaluh	6.523	Sungai	APBD DIY Th 2011-2012	Konservasi, irigasi dan air baku	P3A	
16.	Embung Krapyak	Kalurahan Banjaroya, Kap. Kalibawang	35.400	Sungai	APBD KP Th 2017	Konservasi, irigasi, air baku dan pariwisata	THL	
17.	Embung Tonogoro	Kalurahan Banjaroyo, Kap. Kalibawang	10.000	Air Hujan	APBD KP Th 2013	Irigasi dan Wisata	Warga	
18.	Embung Kleco	Kec. Girimulyo	8.000	Sungai	APBD KP Th 2015-2016	Wisata	Kalurahan	
19.	Embung Gorolangu	Kalurahan Sidoharjo, Kap. Samigaluh	10.000	Sungai	APBD DIY Th 2018	Konservasi, Wisata	Kalurahan	
20.	Embung Talunombo	Kap. Pengasih	1.800	Air Hujan	APBD KP Th 2018	Pariwisata	THL	
21.	Embung Dlingseng	Ds. Banjaroya, Kap. Kalibawang	10.000	Sungai	APBD DIY Th 2020	Konservasi, irigasi dan air baku	THL	

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Keberadaan embung tersebut, selain dalam jangka pendek dapat dijadikan sumber air baku baik untuk irigasi maupu air minum, pada jangka panjang dapat menunjang keberlangsungan potensi air tanah di kawasan sekitar embung dan bagian hilirnya. Selain itu, dengan berkurangnya laju limpasan permukaan (*run off*) air hujan, maka potensi erosi, banjir dan tanah longsor dapat diminimalisir. Secara ekonomi, embung juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata, bercocok tanam dan budidaya perikanan.

c. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dapat digunakan untuk mengetahui gambaran kinerja sektor irigasi di suatu daerah. Rasio jaringan irigasi merupakan perbandingan antara total seluruh panjang saluran irigasi di kabupaten yang terdiri baik kewenangan pusat, provinsi, kabupaten maupun kewenangan petani terhadap luasan daerah irigasi. Ada penambahan Nama Daerah Irigasi baru dan luasnya, tapi belum masuk di Permen, sudah diusulkan untuk perubahannya, untuk kewenangan Kabupaten ada penambahan panjang jaringan Irigasi Daerah Irigasi kecil sepanjang 212,5 m di Tahun 2024, sehingga menjadi 193.529 m dan panjang Jaringan keseluruhan menjadi 457.941 m dengan luas area 10.869,05 Ha.

Tabel 2.62

Panjang dan Luas Daerah Irigasi berdasar kewenangan Tahun 2024

No	Kewenangan Irigasi	Panjang saluran (m)	Luas area (Ha)
1	Pusat	73.749	7.168,00
2	Provinsi	65.654,00	1.922,05
3	Kabupaten	214.893	1.779,00
4	P3A	125.009,00	0
Total		479.305,00	10.869,05

Sumber data : DPUPKP dan Dinas Pertanian dan Pangan, 2025 diolah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Daerah Irigasi yang luas oncorannya di bawah 1.000 Ha (DI Kecil) dan sebagaimana diatur dalam Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Tabel di atas merupakan kondisi daerah irigasi serta saluran yang melayani daerah irigasi. Berdasarkan aturan tersebut, secara luasan seluruh daerah irigasi terbagi habis dalam 3 kewenangan yang berbeda yaitu pusat, provinsi dan kabupaten sehingga secara kewenangan P3A tidak diklasifikasikan dalam aturan tersebut. Sedangkan terkait saluran irigasi, acuan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, yang memberikan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi tersier kepada P3A.

d. Sarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun, dengan sumber air dari Waduk Sermo, Clereng, Tuk Mudal, dan Sungai Progo. Masyarakat perkotaan yang terlayani tidak hanya terbatas pada pelanggan rumah tangga namun PDAM juga melayani kebutuhan pelanggan instansi pemerintahan, perniagaan serta industri. Jumlah

pelanggan yang dilayani oleh PDAM terus meningkat tiap tahunnya tahun 2020 mencapai 31.727 SR tahun 2021 mencapai 34.935 SR tahun 2022 mencapai 37.732 SR tahun 2023 mencapai 40.220 SR dan tahun 2024 mencapai 41.674 SR. Gambar berikut menunjukkan tren peningkatan jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM.



Sumber data: PDAM Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

Gambar 2.32

Jumlah Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Binangun Tahun 2020-2024

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih dalam rumah tangga, masyarakat menggunakan berbagai sumber air. Sumber air baku tersebut antara lain bersumber dari : Sumur Gali, Mata Air, Waduk dan Sungai dengan kebutuhan air baku bervariasi sesuai karakteristik masyarakat yang digunakan dari sumber-sumber air tersebut. Berdasarkan jumlah KK yang mempunyai akses terhadap air minum maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.63

Pemanfaatan Sumber Air Baku Untuk Akses Air Bersih Masyarakat

No.	Akses Air Baku	Jumlah KK				
		2020	2021	2022	2023	2024
A Perpipaan						
1.	Jumlah KK yang terkoneksi dengan PDAM	32.931	35.711	37.576	40.416	44.034
2.	Jumlah KK yang terkoneksi dengan non PDAM	22.925	22.175	24.921	25.210	26.946
B Non Perpipaan Terlindungi						
3.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Layak	92.835	84.297	74.870	84.914	
4.	Jumlah KK dengan akses air minum terlindungi lainnya	21.579	19.486	17.307	n.a.	
5.	Jumlah KK dengn akses air minum Isi Ulang	n.a	n.a.	n.a.	n.a.	
C Non Perpipaan Tidak Terlindungi						

No.	Akses Air Baku	Jumlah KK				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Tidak Terlindungi	n.a	n.a	n.a	5.429	
7.	Jumlah KK dengan akses air minum ke lainnya:sungai, danau, saluran irigasi, dll	n.a	n.a	n.a	n.a	
Jumlah		170.270	160.073	154.674	155.969	156.824

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo; PDAM; Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2025 (diolah).

Masyarakat di wilayah selatan sebagian besar mendapatkan akses air bersih perpipaan dari PDAM dan Pamsimas. Sedangkan untuk di wilayah utara sebagian besar dilayani oleh Spamdes yang dikelola oleh Pamaskarta. Salah satu kendala jaringan perpipaan PDAM belum dapat menjangkau daerah-daerah yang berada di wilayah utara karena topografi wilayahnya yang merupakan dataran tinggi yang menyebabkan biaya teknis dan operasional untuk pembangunan jaringan perpipaan menjadi cukup mahal. Sampai dengan saat ini, PDAM mengelola enam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu: 1) SPAM Clereng yang melayani sebagian besar Wates kota dan Temon, sebagian Kapanewon Panjatan dan Pengasih serta sebagian kecil Kapanewon Kokap; 2) SPAM Kalibawang yang melayani Kalurahan Banjaroya dan Banjararum, Kapanewon Kalibawang dan Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan; 3) SPAM Lendah melayani seluruh Kapanewon Galur dan Lendah, sebagian besar Kapanewon Panjatan, sebagian Kapanewon Pengasih, Sentolo, Temon, Wates serta sebagian kecil Kapanewon Kokap dan Nanggulan; 4) SPAM Salamrejo melayani Kalurahan Salamrejo, Sentolo, Sukoreno dan Tuksono di Kapanewon Sentolo; 5) SPAM Sentolo melayani seluruh Kapanewon Nanggulan, sebagian Kapanewon Girimulyo, Pengasih dan Sentolo; 6) SPAM Sermo melayani seluruh Kapanewon Kokap, sebagian besar Kapanewon Temon, sebagian Kapanewon Pengasih, Wates, Sentolo serta sebagian kecil Kapanewon Panjatan.

Akses perpipaan terdiri dari dua klasifikasi yaitu yang dilayani oleh PDAM dan yang dilayani oleh non PDAM meliputi jaringan perpipaan Pamsimas dan Spamdes yang dikelola oleh Pamaskarta. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM berasal dari Sungai Progo, Waduk Sermo serta mata air Clereng. Sedangkan sumber air baku yang dimanfaatkan oleh jaringan perpipaan Pamsimas dan Spamdes berasal dari mata air yang tersebar di berbagai wilayah.

Berdasarkan pada tabel di atas, pada tahun 2023 jumlah penduduk yang mengakses air minum melalui jaringan perpipaan adalah sebesar 42,07% mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebesar 40,40%. Sementara itu untuk jaringan non perpipaan yaitu sebesar 54,4 % pada tahun 2023, menurun dari sebesar 59,5% di tahun 2022. Pada tahun 2024 menunjukkan adanya tren kenaikan akses perpipaan dari waktu ke waktu yang dapat diasumsikan bahwa derajat keamanan dan kelayakan air semakin membaik. Peningkatan akses perpipaan ini secara signifikan merupakan kontribusi dari PDAM Tirta Binangun. Akses air bersih melalui jaringan perpipaan terutama di wilayah perkotaan meningkat menjadi 25,91% pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 24,29%. Akses air bersih melalui perpipaan juga dilakukan oleh masyarakat melalui paguyuban Pamaskarta. Pada tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 16,16% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 16,11%. Jumlah pada tabel 2.69 yang melebihi data jumlah Kepala Keluarga menunjukkan bahwa pada beberapa rumah

tangga memiliki lebih dari satu sumber air bersih. Hal ini wajar dilakukan mengingat beberapa sumber air yang ada belum mampu menyediakan air yang memenuhi sepanjang tahun.

Sebagai tambahan, pada tahun 2024 cakupan akses air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 96,52 %. Secara keseluruhan, 12 Kapanewon masih belum memiliki akses air bersih yang layak dan berkelanjutan (persentase dibawah 100%) dengan persentase terendah terdapat di Kapanewon Samigaluh sementara persentase tertinggi ada di kapanewon Wates. Seiring perkembangan kawasan samigaluh, perlu diprioritaskan pengembangan akses layak dan berkelanjutan pada kawasan tersebut.

Tabel 2.64

Cakupan Akses Air Bersih di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

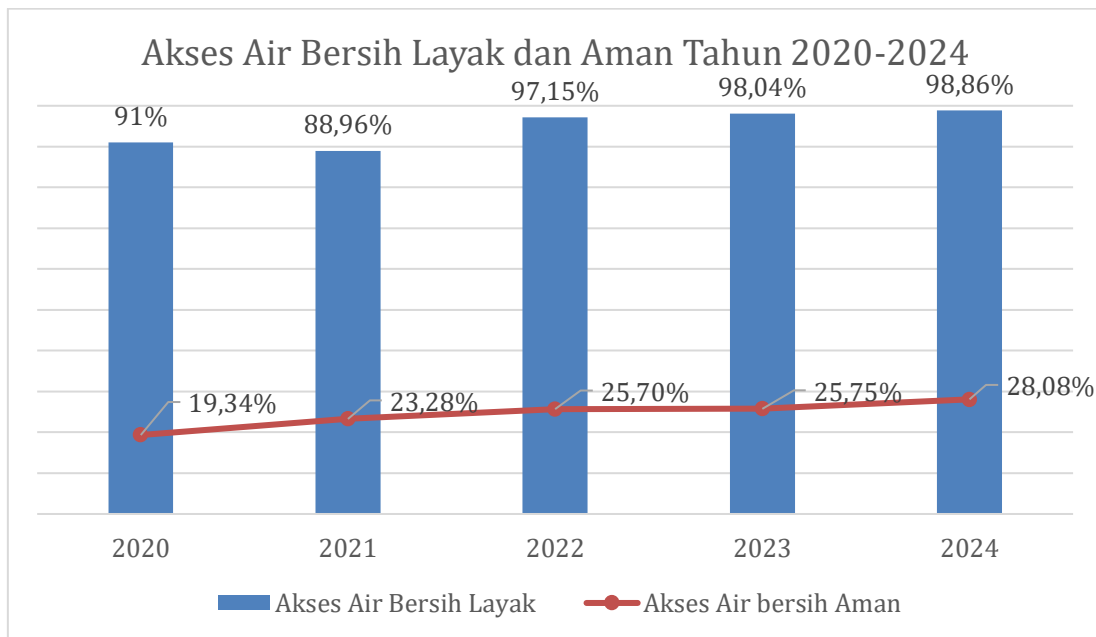
No.	Kapanewon	Jumlah KK	Layanan Sarana Air Bersih		KK yang Memiliki Akses Air Minum Layak Dan Berkelanjutan		
			Non Perpipaan (KK)	Perpipaan (KK)		Jumlah	%
				PDAM	Non PDAM		
1	TEMON	10,421	6,476	1,221	2,553	3,774	36,22%
2	WATES	17,172	8,994	7,498	643	8,141	47,41%
3	PANJATAN	13,919	6,715	5,250	1,833	7,083	50,89%
4	GALUR	11,841	10,066	1,512	176	1,688	14,26%
5	LEDAH	14,579	11,034	3,275	216	3,491	23,95%
6	SENTOLO	17,177	8,709	5,928	2,504	8,432	49,09%
7	PENGASIH	18,419	8,723	8,583	1,028	9,611	52,18%
8	KOKAP	12,829	6,272	3,675	2,226	5,901	46,00%
9	GIRIMULYO	8,876	3,515	367	4,216	4,583	51,63%
10	NANGGULAN	10,885	4,906	3,066	2,684	5,750	52,82%
11	KALIBAWANG	10,715	4,155	3,537	2,658	6,195	57,82%
12	SAMIGALUH	9,991	2,758	122	6,209	6,331	63,37%
JUMLAH		156,824	82,323	44,034	26,946	70,980	45,26%

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun. Masyarakat perkotaan yang terlayani tidak hanya terbatas pada pelanggan rumah tangga namun PDAM juga melayani kebutuhan pelanggan instansi pemerintahan, perniagaan serta industri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dalam kemasan, mulai Tahun 2013 PDAM Tirta Binangun telah mengembangkan usahanya melalui produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) "Air-Ku". Pada Tahun 2013, PDAM Tirta Binangun memulai dengan memproduksi AMDK kemasan gelas/cup ukuran 240 ml, kemudian mulai mengembangkan diversifikasi produk pada tahun 2015 dengan menambah produksi Air-Ku kemasan botol 600 ml. Selanjutnya pada tahun 2016 diproduksi Air-Ku kemasan galon 19 l, tahun 2018 menambah produksi Air-Ku kemasan gelas/cup 120 ml dan pada tahun 2019 mengeluarkan produk Air-Ku kemasan botol 330 ml. Tiap tahun produksi Air-Ku terus meningkat mengikuti permintaan pasar.

e. Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, terutama yang berkaitan dengan pembuangan limbah dan kotoran manusia, serta penyediaan air bersih. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat. Akses sanitasi di Kabupaten Kulon Progo kondisinya sudah cukup baik. Sanitasi layak di sini mengacu pada fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti penggunaan kloset leher angsa dan pengolahan tinja yang aman. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan akses sanitasi melalui berbagai program, seperti jambanisasi dan pendekatan sosial kepada masyarakat. Penyediaan air bersih dan penanganan air limbah yang merupakan kewenangan Dinas PUPKP Berikut kondisi akses sanitasi di Kabupaten Kulon Progo.

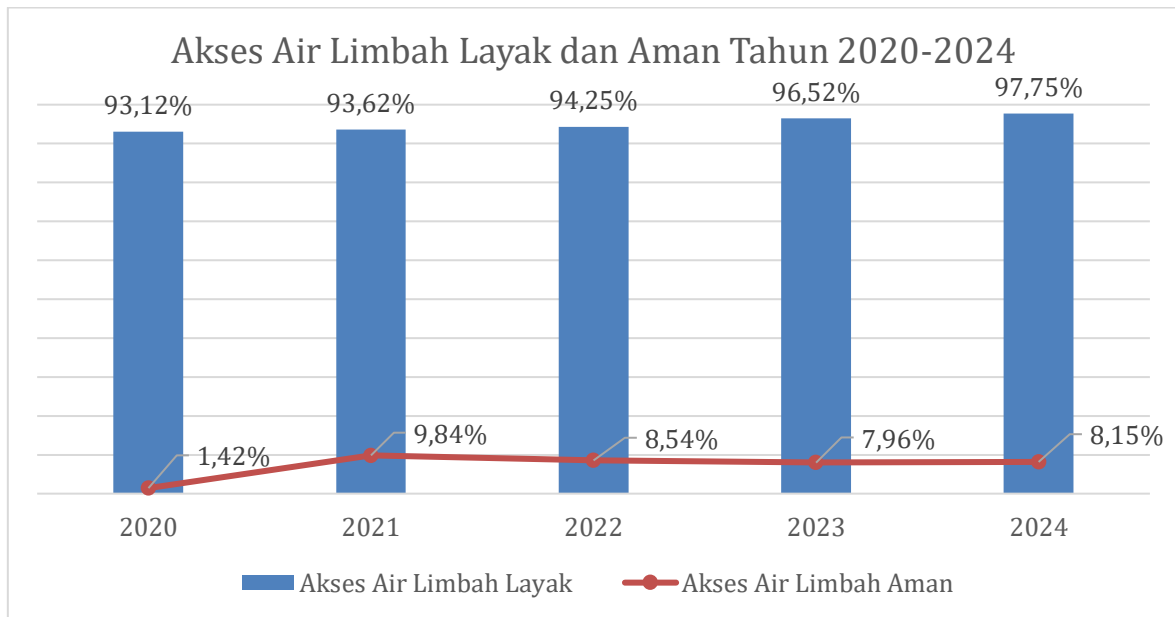


Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 2.33

Akses Air Bersih Layak dan Aman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Air bersih layak adalah air yang bisa diakses oleh masyarakat jika sumber air utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan, namun belum tentu aman untuk dikonsumsi. Air bersih aman adalah air yang memenuhi syarat kesehatan, bebas dari kontaminan dan aman untuk diminum. Penanganan Air limbah yang aman mengacu pada air limbah yang telah diolah sehingga tidak lagi mengandung zat berbahaya atau patogen yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Sementara itu, air limbah yang layak mengacu pada fasilitas dan sistem pembuangan limbah yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan, seperti penggunaan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL).



Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2025

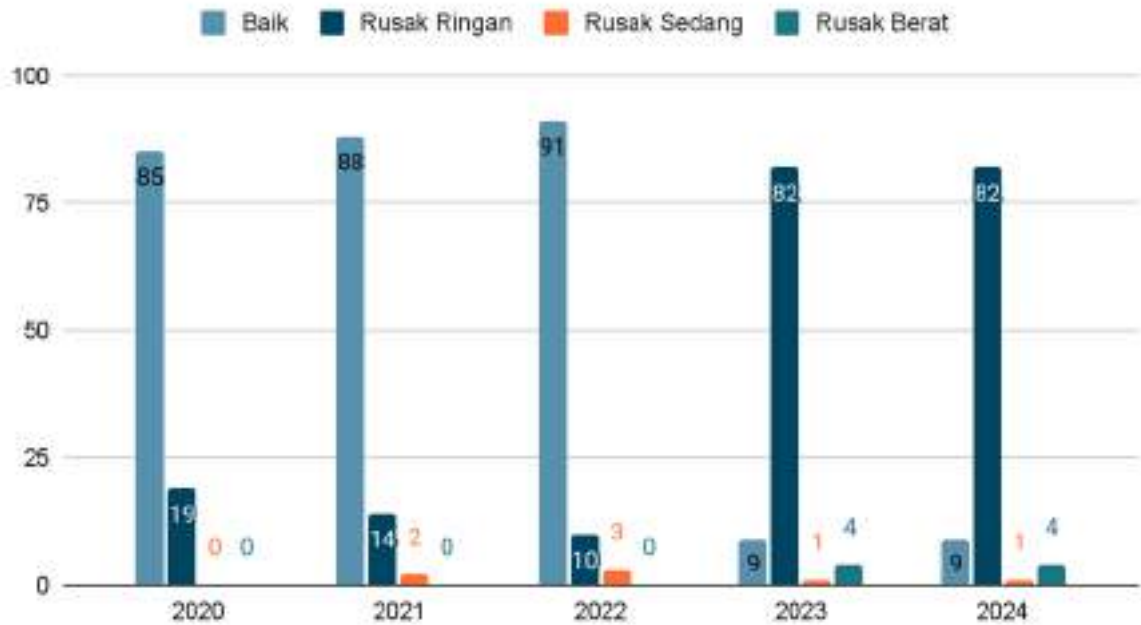
Gambar 2.34

Akses Air Limbah Layak dan Aman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Akses sanitasi di Kabupaten Kulon Progo yang ditunjukkan dengan indikator Akses Air Bersih Layak dan Air Bersih Aman dari tahun 2020 sampai 2024 terus menunjukkan peningkatan dari 91% pada tahun 2020 meningkat menjadi 98,86% pada tahun 2024 untuk Akses Air Bersih Layak, sementara itu Akses Air Bersih Aman meningkat dari 19,34% pada tahun 2020 menjadi 28,08% pada tahun 2024. Untuk Akses Air Limbah Layak juga meningkat dari kondisi tahun 2020 93,12% meningkat menjadi 97,75% pada tahun 2024. Akses Air Limbah Aman meningkat dari tahun 2020 sebesar 1,42% menjadi 8,15% pada tahun 2024.

f. Kondisi Gedung Kantor

Data Kondisi Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024



Sumber data : DPUPKP Kab. Kulon Progo, 2025 (diolah)

Gambar 2.35

Kondisi Gedung Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2024

Data kondisi gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 dalam keadaan baik sebanyak 85, keadaan rusak ringan 19, keadaan rusak sedang 0 dan rusak berat 0. Ditahun 2021 dalam keadaan baik sebanyak 88, rusak ringan 14, rusak sedang 2 dan rusak berat 0. Ditahun 2022 dalam keadaan baik ada 90, keadaan rusak ringan 10, rusak sedang 3, dan rusak berat 0. Pada tahun 2023 kondisi baik berjumlah 9, rusak ringan 82, rusak sedang 1 dan rusak berat 4. Sedangkan di tahun 2024 dalam keadaan baik ada 9, rusak ringan 82, rusak sedang 1, dan rusak berat ada 4.

g. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, pelaksanaan SPM di Kabupaten Kulon Progo untuk Bidang Pekerjaan Umum selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.65

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari				
Presentase Penerima Layanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Total Pencapaian
1. Jumlah yang harus dilayani	2.060	2.060	0	100%

	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Persentase capaian mutu 100%
1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	515	515	0	100%
2	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	515	515	0	100%
3	Jaringan perpipaan	515	515	0	100%
4	Jaringan bukan perpipaan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik

	Presentase Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang harus dilayani	1.892	1.892	0	100%

	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Persentase capaian mutu 100%
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	173	173	0	100%
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	300	300	0	100%
3	Sub-Sistem pengolahan setempat	173	173	0	100%

Sumber: Laporan SPM Bidang PU Tahun 2024, DPUPKP Kulon Progo; 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa semua target yang digunakan dalam penghitungan penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo telah tercapai 100 persen.

2. Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang. Dari keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen perencanaan dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang.

Dokumen perencanaan tata ruang meliputi: rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari 1) RTR Pulau/ Kepulauan,

RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR Kabupaten sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3) RDTR Kota sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait perencanaan tata ruang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 dengan yang diatur dalam peraturan terdahulu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 maka pengaturan untuk kawasan strategis Kabupaten dalam Rencana Rinci Tata Ruang sudah tidak ada lagi. Hal ini juga menjadi salah satu dinamika regulasi yang harus disesuaikan oleh Kabupaten dalam meninjau kembali terhadap rencana penyusunan dokumen tata ruang. Selain itu, lamanya proses dalam penetapan dokumen rencana tata ruang juga menjadi kendala utama yang dihadapi. Target dokumen perencanaan tata ruang yang harus disusun oleh Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66

Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo

NO	JENIS DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG	URAIAN DOKUMEN	JUMLAH (DOKUMEN)
1	RTRW	Revisi RTRW Kabupaten Kulon Progo	1
2	RDTR	Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta 2023-2043	1
3		Perkotaan Wates 2024-2044	1
4		Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur	1
5		Kulon Progo Utara	1
6		Kulon Progo Tengah	1
7		Kulon Progo Selatan	1
Total dokumen			7

Adapun progress penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.67

Capaian Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang hingga Tahun 2025

Dokumen						
No	Rencana Tata Ruang	2021	2022	2023	2024	2025
1	RTRW	- Reviu PK RTRW dan substansi RTRW menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 - Proses Pra Locket Persetujuan Substansi	- Klinik Pra Locket Persetujuan Substansi - Verifikasi Lapangan terkait penyelesaian substansi Lahan Sawah yang Dilindungi sesuai Kepmen ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 - Verifikasi Lapangan terkait penyelesaian Audit Tata Ruang (Indikasi Pelanggaran Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo)	- Klinik ke 5 dengan Kementerian ATR - Penyesuaian substansi revisi RTRW terkait dengan KP2B dan harmonisasi substansi dengan RTRW DIY 2023 – 2043 - Proses perbaikan dokumen sebagai tindaklanjut dari hasil asistensi dengan Kementerian ATR	- Finalisasi luasan KP2B pada substansi revisi RTRW - Proses perbaikan dokumen revisi RTRW	- Update Peta Dasar Kabupaten Kulon Progo - Konfirmasi KLHS RTRW Kulon Progo ke Dinas Lingkungan Hidup DIY terkait KRP validasi KLHS di tahun 2018 dan KRP Pra Linsek - Perbaikan berdasarkan hasil asistensi - Target Rapat Linsek (Lintas Sektor)
2	RDTR	- Reviu substansi RDTR Kawasan Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA, RDTR Perkotaan Kokap dan Kalibawang menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen	- Proses penyiapan pra-validasi KLHS, pengajuan pleno rekomendasi BIG dan persetujuan substansi untuk reviu RDTR Perkotaan Wates - Proses pengajuan validasi KLHS RDTR Kawasan Sekitar	- Penetapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta 2023-2043 - Klinik ke-2 pra-loket RDTR Perkotaan Wates dengan Kementerian ATR dan proses tindaklanjut	- Penetapan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Wates 2024-2044 - Proses lanjutan perbaikan dokumen RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur	- Integrasi RDTR Perkotaan Wates kedalam Sistem OSS - Fasub RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur (Target Rapat Lintas Sektor)

Dokumen						
No	Rencana Tata Ruang	2021	2022	2023	2024	2025
		ATR/BPN No. 14 Tahun 2021	BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA dan persiapan pembahasan lintas sektor di Kemen ATR/BPN	perbaikannya dan pemenuhan kelengkapan menuju proses persetujuan substansi	- Penyusunan dokumen RDTR Kulon Progo Tengah beserta KLHSnya	- Bimbingan Teknis RDTR Kulon Progo Tengah oleh Kementerian ATR
	- Rekomendasi BIG terbit atas peta dasar RDTR Kawasan Sekitar BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA		- Proses penyusunan reviu RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur beserta KLHS-nya (pendetailan delineasi khusus wilayah Kabupaten Kulon Progo)	- Klinik ke-1 pra-loket RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dengan Kementerian ATR dan proses tindaklanjut perbaikannya dan pemenuhan kelengkapan menuju proses persetujuan substansi	- Penyusunan dokumen RDTR Kulon Progo Selatan beserta KLHSnya	- Proses lanjutan perbaikan RDTR Kulon Progo Utara
				- Proses penyusunan RDTR Kulon Progo Utara beserta KLHSnya		- Proses lanjutan perbaikan RDTR Kulon Progo Selatan

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung/ tidak langsung serta penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Perwujudan pemanfaatan ruang yang dijabarkan oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan program-program sektoral akan dipersandingkan dengan rencana pola dan struktur ruang untuk mendapatkan persentase kesesuaiannya. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang diperoleh dari hasil evaluasi dari rata-rata struktur ruang dan pola ruang tersebut. Tabel berikut menunjukkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di Tahun 2020–2024.

Tabel 2.68

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020–2024

No	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Struktur ruang	86,38	87,00	87,22	87,33	87,36
2.	Pola ruang	89,67	89,58	89,88	89,78	89,86
3.	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	88,03	88,29	88,55	88,56	88,61

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan data di atas, perwujudan struktur ruang dan pola ruang semakin meningkat. Program – program yang memiliki tingkat kesesuaian tertinggi dalam mewujudkan rencana struktur ruang meliputi program perwujudan Sistem Pusat Pelayanan, Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Sistem Prasarana Lainnya. Sedangkan program yang masih perlu didorong untuk mewujudkan rencana struktur ruang yaitu program perwujudan Sistem Jaringan Energi. Selanjutnya, program – program yang memiliki tingkat kesesuaian tertinggi dalam mewujudkan rencana pola ruang meliputi program perwujudan Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan serta Kawasan Perikanan. Sedangkan program yang perlu didorong untuk mewujudkan rencana pola ruang yaitu program perwujudan Kawasan Perkebunan dan Kawasan Pertambangan.

Sebagai langkah percepatan, maka yang semula direncanakan akan menyusun 16 dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten) kemudian melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan topografi dan karakteristik wilayah dirangkum menjadi 8 dokumen RDTR. Adapun perubahan penyusunan dokumen Rencana Rinci Tata Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69

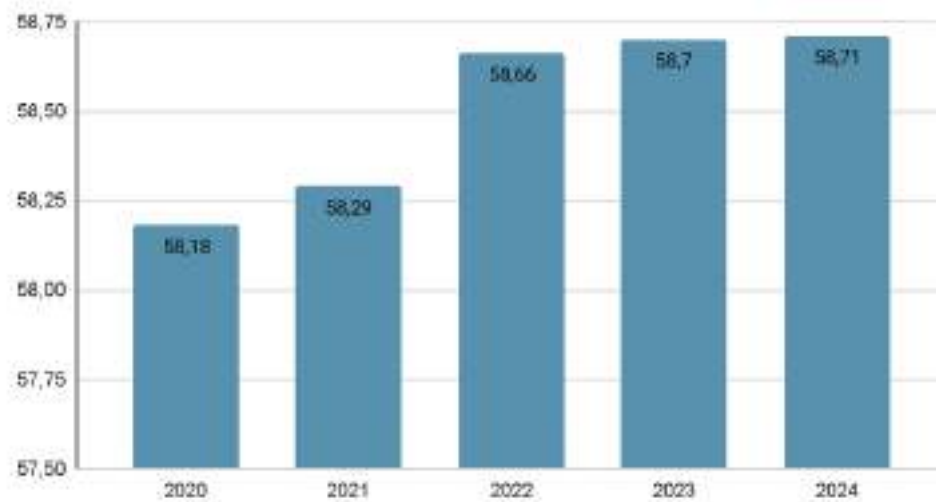
Perubahan Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo

No	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang		Keterangan
	Semula	Menjadi	
1	RDTR Perkotaan Wates	RDTR Perkotaan Wates	Sudah penetapan
2	RDTR Perkotaan Kokap	RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta RDTR Perkotaan Wates	Sebagian masuk kedalam RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta

No	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang		Keterangan
	Semula	Menjadi	
3	RDTR Perkotaan Samigaluh	RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur RDTR Kulon Progo Utara	Sebagian masuk kedalam RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur Sebagian masuk kedalam RDTR Kulon Progo Utara
4	RDTR Dekso	RDTR Kulon Progo Utara	Meliputi Sebagian Kapanewon Kalibawang, Sebagian Kapanewon Samigaluh, Sebagian Kapanewon Girimulyo (yang tidak termasuk delineasi RDTR BOP Borobudur dan RDTR Kulon Progo Tengah)
5	RDTR Kawasan Agropolitan Kalibawang		
6	RDTR Perkotaan Kalibawang		
7	RDTR Perkotaan Girimulyo		
8	RDTR Perkotaan Nanggulan	RDTR Kulon Progo Tengah	Meliputi Sebagian Kapanewon Kokap, Sebagian Kapanewon Pengasih, Kapanewon Nanggulan (tidak termasuk delineasi RDTR Perkotaan Kokap dan RDTR Perkotaan Kalibawang)
9	RDTR Kawasan Minapolitan Nanggulan		
10	RDTR Perkotaan Sentolo	RDTR Kulon Progo Selatan	Meliputi Sebagian Kapanewon Wates, Sebagian Kapanewon Sentolo, Kapanewon Lendah, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Panjatan
11	RDTR Perkotaan Lendah		
12	RDTR Perkotaan Panjatan		
13	RDTR Perkotaan Galur		
14	RDTR Brosot		
15	RDTR Perkotaan Wates		
16	RRTR Kawasan Strategis Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta	RDTR Kawasan Strategis Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta	Sudah penetapan
17	RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur	RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur	Sedang proses Fasub Kementerian ATR
18	RDTR Perkotaan Wates	RDTR Perkotaan Wates	Sudah Penetapan

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan atau RTBL. Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi perseorangan atau badan usaha dalam mendirikan sebuah bangunan gedung adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam rangka mewujudkan tertib pembangunan dan pemanfaatan ruang, maka Pemerintah Kabupaten rutin melakukan pengawasan dan pengendalian IMB terhadap bangunan gedung. Dalam kurun waktu Tahun 2019–2024, rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber data: DPUPKP Kab. Kulon Progo, 2025 (diolah)

Gambar 2.36

Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2024

Rata–rata peningkatan rasio bangunan mempunyai IMB dari tahun ke tahun relatif landai hanya sekitar 0,19%. Pada Tahun 2024, rasio bangunan mempunyai IMB di Kabupaten Kulon Progo mencapai 58,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan memiliki IMB masih rendah. Pengawasan dan pengendalian IMB relatif lebih mudah untuk dilakukan terhadap bangunan yang baru berdiri dibandingkan bangunan yang sudah lama berdiri. Bagi bangunan baru yang belum memiliki IMB, maka Pemerintah Kabupaten mengenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan. Terdapat 3 (tiga) tahapan pemberian Surat Peringatan yaitu Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga. Apabila hingga Surat Peringatan ketiga telah diberikan dan pihak yang bersangkutan tidak menindaklanjutinya maka penertiban akan diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk diambil langkah penindakan yang lebih tegas.

Tabel 2.70

Rasio Bangunan Ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Kapanewon	Penambahan PBG 2024	Jumlah Bangunan IMB/PBG	Monitoring Bangunan Baru 2024	Jumlah Seluruh Bangunan	Rasio
1	Temon	8	5,987	9	8,333	71.85

No	Kapanewon	Penambahan PBG 2024	Jumlah Bangunan IMB/PBG	Monitoring Bangunan Baru 2024	Jumlah Seluruh Bangunan	Rasio
2	Wates	34	9,945	15	13,454	73.92
3	Panjatan	17	7,797	3	10,010	77.89
4	Galur	1	3,943	4	9,336	42.23
5	Lendah	3	7,977	8	11,081	71.99
6	Sentolo	23	8,065	3	13,061	61.75
7	Pengasih	41	8,504	21	13,511	62.94
8	Kokap	4	2,690	0	10,174	26.44
9	Girimulyo	9	2,460	0	7,681	32.03
10	Nanggulan	7	5,715	14	8,557	66.79
11	Kalibawang	0	3,966	2	9,042	43.86
12	Samigaluh	2	4,529	0	7,681	58.96
Kab. Kulon Progo		149	71,578	79	121,921	58.71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, DPMPPT dan 12 Kapanewon Kabupaten Kulon Progo, 2025

Rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Kulon Progo terutama di perdesaan yang terletak di wilayah perbukitan seperti di Kapanewon Kokap, Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terletak di wilayah dataran rendah yang sebagian besar merupakan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, perlu peningkatan sosialisasi dan upaya penertiban terhadap IMB di wilayah-wilayah tersebut.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni pada Tahun 2023 sebanyak 6.818 unit dan pada tahun 2024 sebanyak 6.349 unit, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 2.71

Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024

No	Kapanewon	Jumlah Rumah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Temon	399	396	441	405	345
2	Wates	0	0	282	256	262
3	Panjatan	740	729	349	306	374
4	Galur	130	125	420	381	381
5	Lendah	565	557	586	462	438

No	Kapanewon	Jumlah Rumah				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Sentolo	820	813	928	881	809
7	Pengasih	657	621	1062	887	872
8	Kokap	1.379	1285	1155	796	707
9	Girimulyo	848	838	610	546	517
10	Nanggulan	325	306	527	486	470
11	Kalibawang	684	683	525	478	477
12	Samigaluh	724	658	1223	934	697
TOTAL		7.271	6.840	8.108	6.818	6.349

Sumber data: DPUPKP, 2025

Berdasarkan data tersebut, jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Jumlah RTLH pada tahun 2024 sebanyak 6.349, mengalami penurunan 469 dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan terbesar yaitu di Kapanewon Kokap sebesar 90 dibandingkan dengan tahun 2023.

Upaya penurunan jumlah rumah tidak layak huni telah ditempuh bersama-sama baik oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan bansos RTLH bagi warga miskin, kemudian dari Pemerintah Provinsi melalui skema yang sama dengan target sasaran rumah warga yang berada di Kapanewon yang ditetapkan sebagai wilayah miskin. Selanjutnya Pemerintah Pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan DAK juga ikut andil dalam upaya peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain dari program/ kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan program “Bedah Rumah”. Program bedah rumah merupakan program sosial dan pemberdayaan masyarakat dimana sumber dana yang digunakan sama sekali bukan berasal dari APBD tetapi merupakan sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang memberikan sumbangan dalam rangka program bedah rumah ini antara lain berasal dari : CSR perusahaan yang berlokasi di Kulon Progo maupun di luar Kulon Progo, alokasi dari BAZDA maupun dari Paguyuban Pegawai Kristiani dan lain-lain.

Tabel 2.72

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Sumber Dana tahun 2024

NO	Sumber	Jumlah
1	APBD Provinsi 2024 (PK)	63
2	APBD Provinsi 2024 (PB)	17
3	Habitat 2024	5
4	Kesra (BAZNAS) sd Desember 2024	113
5	APBD Kabupaten	191
6	Pembangunan Rumah Korban Bencana (APBD KP)	3
7	DAIS Provinsi 2024	35
8	Kemensos (Rumah Sejahtera Terpadu/RST)	20
9	BAZDA Provinsi	3
10	Lain-lain UPK/BUMDESMA Girimulyo	4
11	BSPS	173
12	APBKal	1

NO	Sumber	Jumlah
13	RTLH Integrasi Kalurahan Srikayangan	9
14	CSR Integrasi Kalurahan Srikayangan	3
15	CSR Bank BPD DIY	15
Jumlah		655

Sumber data: DPUPKP, 2025

Selain permasalahan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat, timbulnya kekumuhan terutama di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani di bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019 terdapat 293,79 Ha kawasan kumuh yang perlu ditangani. Pada Tahun 2020 ada revisi SK Bupati mengenai penanganan kawasan kumuh yaitu SK Bupati Nomor 416/A/2020. Adapun rincian lokasi kawasan kumuh di perkotaan dan luasan pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.73

Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024
(Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 416/A/2020)

No.	Kapanewon	Kelurahan/ Kalurahan	Luasan Kumuh di SK (Ha)	Sisa Luasan Kumuh tahun 2022 (Ha)	Pengurangan Luasan Kumuh tahun 2023 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh tahun 2023 (Ha)
1	Wates	Wates	19,67	18,44	0	18,44
		Giripeni	37,14	15,77	3,59	12,8
2	Sentolo	Banguncipto	1,81	0	0	0
		Sentolo	11,3	0	0	0
3	Galur	Brosot	4,56	0,72	0,72	0
4	Pengasih	Pengasih	16,74	0	0	0
		Margosari	0,38	0	0	0
		Tawangsari	18,74	18,74	0	18,74
		Sendangsari	24,13	9,21	0	9,21
5	Nanggulan	Wijimulyo	17,3	9,75	0	9,75
Total			151,77	72,63	4,31	68,32

Sumber data: DPUPKP Kab Kulon Progo, 2025

Didalam Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa terdapat pembagian kewenangan dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yaitu untuk kawasan permukiman kumuh dengan luasan 15 (lima belas) hektar atau lebih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan intervensi penanganan kumuh, kemudian untuk luasan di antara 10 – 15 Hektar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan untuk luasan dibawah 10 (sepuluh) Hektar menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka sisa kawasan kumuh yang masih perlu ditangani sebagian besar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu di Kalurahan Giripeni (Pedukuhan Sideman, Kedungpring dan Dobangsan), Kalurahan Sentolo (Pedukuhan Sentolo Lor), Kalurahan Tawangsari, Sendangsari dan Wijimulyo. Sedangkan untuk kawasan kumuh yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu di Kalurahan Brosot (Pedukuhan III Pulo dan Pedukuhan Bantengan Lor) serta Kalurahan Pengasih (Pedukuhan Dayakan) sudah dituntaskan pada tahun 2018-2019.

Selanjutnya untuk kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten beberapa lokasi telah tuntas ditangani yaitu di Kelurahan Wates (Pedukuhan Wonosidi), Kelurahan Giripeni (Pedukuhan Wetan Pasar), serta Kelurahan Banguncipto (Pedukuhan Ploso). Sedangkan dua Kelurahan yang masih perlu penanganan kumuh yaitu di Kelurahan Pengasih (RT 04/ RW 01) dan Margosari (Pedukuhan Kemiri).

Di Tahun 2021, luas permukiman kumuh yang tertangani adalah seluas 74,26 Ha sehingga sampai dengan 2021 kawasan kumuh yang telah tertangani adalah sebesar 48,93%. Program Kotaku menjadi platform pendampingan untuk mempercepat penanganan kekumuhan melalui perbaikan dan pengembangan PSU serta pendampingan sosial untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara sarana prasarana dasar permukiman yang lebih baik, sehat dan nyaman. Penanganan permukiman kumuh harus terus diupayakan untuk pencapaian target 100-0-100 yaitu 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi.

Pada tahun 2022 dilakukan penanganan kawasan kumuh dengan pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, namun demikian intervensi tersebut belum mampu melepaskan kawasan kumuh tersebut dari status kumuh berdasarkan indikator yang ada sehingga tidak terjadi pengurangan luasan kumuh atau pengurangan kumuh sebesar 0 (nol) Ha. Tahun 2023, penanganan kawasan kumuh dilakukan di Kelurahan Giripeni Kapanewon Wates dan Kelurahan Wijimulyo Kapanewon Nanggulan dengan total luas wilayah yang ditangani adalah 4,88 Ha. Pada Tahun 2024, lokasi pengurangan kawasan kumuh Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 (berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 416/A/2020) Pengurangan Luasan Kumuh tahun 2024 di Kelurahan Giripeni sebanyak 3,59 Ha dan Kelurahan Brosot 0,72 Ha dengan total sebanyak 4,31 Ha. Untuk Sisa Luasan Kumuh tahun 2024 dengan total sebanyak 68,32 Ha dengan rincian Kelurahan Wates sebanyak 18,44 Ha, Kelurahan Bendungan sebanyak 12,8 Ha, Kelurahan Tawang Sari sebanyak 18,74 Ha, Kelurahan Sendangsari sebanyak 9,21 Ha dan Kelurahan Wijimulyo sebanyak 9,75 Ha.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, berikut disampaikan Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo:

Tabel 2.74

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota				
Presentase Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
Jumlah yang harus dilayani	3	3	0	100%
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Persentase capaian mutu 100%
1 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%

2	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	3	3	0	100%
3	Pembangunan Baru di Lokasi Baru/ Relokasi bagi Korban Bencana	0	0	0	100%
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	100%

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Presentase Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Jumlah Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
Jumlah yang harus dilayani	1	1	0	100%
Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Persentase capaian mutu 100%
1 Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	100%
2 Subsidi Uang Sewa	0	0	0	100%
3 Penyediaan Rumah Layak Huni	1	1	0	100%

Sumber: Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2025

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan perda dan perbup dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat, sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun Capaian Peningkatan Keamanan dan Lingkungan pada kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.75

Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pelanggaran yang ditegakkan	586	695	613	370	347
2.	Jumlah pelanggaran	586	695	613	370	347
3.	Jumlah Anggota Sat Linmas	3.968	3.968	3.968	3.807	3807

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Jumlah Linmas yang pernah dibina	3.968	3.968	3.968	3.807	3807
5.	Jumlah Patroli	457	447	478	456	461

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, 2025

Jumlah pelanggaran pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Tahun 2020-2024 jumlah linmas yang pernah dibina sudah sama dengan jumlah linmas yang ada. Jumlah Anggota Satlinmas pada tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023 yaitu 3807 personil.

Khusus untuk patroli, intensitas pelaksanaan setiap tahunnya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan partai politik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) memiliki tugas yang sangat penting yaitu :

1. Membantu dalam penanggulangan bencana,
2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
5. Membantu upaya pertahanan negara.

Di Kabupaten Kulon Progo baru ada 3.807 orang personil linmas, sedangkan jumlah Rukun Tetangga ada 4.478, sehingga masih kekurangan sebanyak 424 orang personil linmas, artinya baru tercapai sebesar 95,01%. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kalurahan/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selama periode tahun 2020-2024, jumlah lembaga politik, ormas, LSM dan OKP fluktuatif dari tahun ke tahun, namun pada 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan dari tahun 2023 yakni terdiri dari parpol, ormas, LSM, dan OKP sebanyak 4 lembaga.

Tabel 2.76

Jumlah Kegiatan Politik, Jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	4	5	5
2	Jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP yang telah mendapat pembinaan	Lembaga	89	119	139	145	149
3	Jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP	Lembaga	89	133	139	145	149

Sumber data: Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, 2025

Peraturan teknis terkait sub urusan kebakaran diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun pencapaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.77

Pencapaian Kinerja Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2019-2023

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Nasional					Realisasi Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) (km2)	-		496	496	496	496	496	100	100	200	200	200
	Luas Kabupaten (km2)	586,28	-	586,28	586,28	586,28	586,28	586,28	586,28	586,28	586,28	586,28	586,28
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/Kota	80%		80%	80%	80%	80%	80%	17,06%	17,06%	34,12%	34,12%	34,12%
2	Jumlah kasus kebakaran yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	26	36	39	118	104
	Jumlah kasus kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	26	36	39	118	104
	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	75%	-	75%	75%	75%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Satgas Damkar yang memiliki standar kualifikasi	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	4	4
	Jumlah Satgas Damkar keseluruhan	-	-	-	-	-	-	-	17	16	16	28	27
	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	-	85%	85%	85%	85%	85%	29,41%	31,25%	31,25%	14,29%	14,81%
4	Jumlah WMK yang memiliki mobil dan atau mesin damkar laik pakai (3000-5000 L)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2
	Jumlah WMK dalam lingkungan/kawasan berpotensi kebakaran	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2
	Jumlah Mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	90%	-	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana seluruhnya telah mencapai realisasi 100%.

Tabel 2.78

Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo, 2025.

2.1.3.1.6 Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini belum dilakukan secara optimal, yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan sosial yang belum memadai, SDM yang belum memadai, minimnya sarana dan prasarana pendukung serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial. Di sisi lain permasalahan sosial, terutama penyandang sakit jiwa, orang terlantar, gelandangan, lanjut usia terlantar, korban bencana, membutuhkan penanganan secara serius. Penanganan permasalahan sosial diperlukan agar seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi dan budaya. Data PPKS menurut kapanewon di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Data PPKS menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Kapanewon	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	Penyandang Disabilitas	Anak Balita Terlantar (ABT)	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	Lanjut Usia Terlantar	Anak Terlantar	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
Galur	3	455	15	18	301	112	83	181
Girimulyo	4	271	10	23	124	87	10	44
Kalibawang	11	298	4	19	212	97	53	61
Kokap	7	460	10	19	426	124	19	63
Lendah	4	581	5	25	273	75	12	153
Nanggulan	2	433	4	32	152	130	30	74
Panjatan	5	513	6	25	224	83	68	167
Pengasih	5	537	4	32	355	121	44	155
Samigaluh	1	325	3	14	114	43	10	38
Sentolo	3	678	10	70	408	133	20	148
Temon	3	365	14	24	294	101	11	99
Wates	25	431	8	32	350	96	49	141
Jumlah	73	5.347	93	333	3.233	1.202	409	1.324

Sumber Data : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, di Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial tahun 2024, adapun realisasi pencapaian SPM Tahun 2024 selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.80
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar			Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Jumlah	Warga	Negara	5.347	100	100
	penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.					
2.	Jumlah	anak	telantar	1.202	100	100
	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.					
3.	Jumlah	Warga Negara lanjut usia		3.233	100	100
	terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.					

No	Jenis Pelayanan Dasar			Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)
4.	Jumlah	Warga	Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.	44	100	100
5.	Jumlah	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.		267	100	100

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

2.1.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2024, peran perempuan dan laki laki di bidang ketenagakerjaan secara berurutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan
Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

No.	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani/pekebun	52.866	56.418	51.888	55.141	45.114	48.830	43.619	47.446	41.284	13.751
2	Wiraswasta	33.031	25.755	33.116	25.699	30.560	19.551	31.710	20.042	26.970	3.117
3	Karyawan swasta	28.785	22.639	29.979	23.609	28.556	20.706	24.605	20.042	22.234	1.716
4	Buruh harian lepas	12.485	4.446	13.083	4.526	12.174	4.184	11.387	3.978	11.678	984
5	Pegawai Negeri Sipil	4.633	3.454	4.504	3.488	4.256	3.538	3.793	3.359	3.773	472

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024

Menurut data di atas, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan. Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. IPG di kabupaten/kota se-DIY selama kurun waktu 5 tahun ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di DIY

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kulon Progo	94,77	95,07	95,09	95,54	95,27
2.	Bantul	95,05	95,12	95,19	95,36	95,54
3.	Gunungkidul	95,18	84,73	85,31	85,82	85,93
4.	Sleman	84,62	96,20	96,25	96,36	96,40
5.	Kota Yogyakarta	96,04	98,16	98,32	98,48	98,47
6.	DIY	98,09	94,80	94,88	94,99	94,93

Sumber Data: BPS, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.83
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/ Kota di DIY

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kulon Progo	71,68	71,45	71,41	72,27	71,68
2.	Bantul	65,29	64,78	65,27	65,03	70,35
3.	Gunung Kidul	75,34	75,53	76,7	77,93	77,3
4.	Sleman	80,4	81,25	81,31	81,65	79,94
5.	Kota Yogyakarta	71,06	71,05	73,18	75,5	75,7
6.	DIY	73,59	74,73	76,57	76,87	78,46

Sumber Data: BPS DIY, 2024

Urusan pilah gender di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024, terdapat 7 orang perempuan atau 17.5 persen yang menjadi anggota DPRD, sedangkan untuk jumlah ASN (PNS dan P3K) perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3.936 orang atau 64.2 persen dari total ASN (PNS dan P3K) sebanyak 6.130 orang, untuk ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural terdapat 218 orang atau 50.8 persen dari total 429 orang ASN yang menduduki jabatan struktural, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2024 - 2029
Menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SLTA	17	-	17

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
DI/DII/DIII	-	1	1
S1	15	6	21
S2	1	-	1
Jumlah	33	7	40

Sumber Data: BPS Kulon Progo, 2024

Tabel 2.85
Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

2024			
Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	1.337	3415	4.752
Fungsional Umum	616	333	949
Struktural			
- Eselon IV	126	134	260
- Eselon III	86	51	137
- Eselon II	29	3	32
Jumlah	2.194	3.936	6.130

Sumber Data: BKPP Kulon Progo, 2024

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang Tahun 2024 terdapat kasus 43 kasus kekerasan yang ditangani. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA). Terlayannya kasus kekerasan tersebut didukung adanya P2TP2A dan komitmen dari jejaring PK2PA untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta kerjasama yang baik dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY. Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) selama Tahun 2021-2024 seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring Penanganan
Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2021-2024

Jenis Kasus	Jumlah Korban berdasarkan jenis layanan dari Jejaring PK2PA khusus untuk kasus baru			
	2021	2022	2023	2024
Perempuan	32	27	42	43
Anak	81	62	43	45
Jumlah Korban	113	89	85	88

Jenis Kasus	Jumlah Korban berdasarkan jenis layanan dari Jejaring PK2PA khusus untuk kasus baru			
	2021	2022	2023	2024
KDRT	23	27	33	33

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sedangkan dilihat dari tren kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Korban Kekerasan terhadap Perempuan	54	32	27	42	43
2	Korban Kekerasan terhadap Anak	98	81	62	43	45
3	Jumlah Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	152	113	89	85	88
4	Jumlah Kasus KDRT	26	23	27	33	33
Jumlah Keluarga		152.251	153.404	155.219	156.775	157.726
Persentase kasus KDRT (%)		0,017	0,014	0,017	0,021	0.020

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, 2024 ; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki tren menurun selama tahun 2020 sampai dengan 2023, dan mengalami kenaikan sedikit sebanyak 3 kasus pada tahun 2024. Hal ini berbeda dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengalami kenaikan menjadi terus menerus selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dan tahun 2024 tercatat ada 33 kasus sama dengan tahun sebelumnya.

Jenis kekerasan terhadap perempuan tahun 2024, terjadi sebanyak 43 kasus naik 1 kasus dibandingkan tahun 2023 sebanyak 42 kasus sedangkan jenis kekerasan terhadap anak adalah 45 kasus naik dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 43 kasus. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2024 ada 33 kasus sama dengan tahun 2023. Jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang melapor dan didampingi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus menurun dan sedikit bertambah pada tahun 2024. Jumlah korban tersebut sebenarnya masih lebih besar lagi karena masih ada korban yang tidak melapor, baik karena malu maupun tidak tahu cara melapornya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, perundungan atau bullying, pergaulan bebas, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa. Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan BPS DIY sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Kulon Progo	3,71	3,69	2,80	2,40	2,01
2	Kab. Bantul	4,06	4,04	3,97	3,78	3,62
3	Kab. Gunung Kidul	2,16	2,20	2,08	2,09	2,16
4	Kab. Sleman	5,07	5,17	4,78	4,47	4,13
5	Kota Yogyakarta	9,16	9,13	7,18	6,07	5,80
	DIY	4,57	4,46	4,06	3,69	3,48
	Indonesia	5,23	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: Sakernas BPS DIY, 2024

TPT di Kulon Progo dari tahun 2020-2024 memiliki tren yang menurun dengan nilai TPT tahun 2024 sebesar 2,01 menurun sebesar 0,39 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, TPT Kulon Progo memiliki nilai terkecil dibandingkan nilai TPT Kabupaten/Kota lain di DIY dan berada dibawah nilai rata-rata Nasional. Penurunan nilai TPT didukung oleh pemulihan pasca pandemi, mulai beroperasinya kegiatan disekitar bandara, dan semakin meningkatnya UMKM.

Tabel 2.89

Data Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk usia kerja	345.971	350.568	355.095	355.488	357.960
2	Angkatan kerja	269.426	268.964	279.905	269.268	281.246
3	Penganggur	10.005	9.920	7.824	6.455	5.657

Sumber: BPS Sakernas 2019 – 2024 (diolah)

Tabel 2.90

Persentase Penduduk Bekerja Kabupaten / Kota di DIY Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Kulon Progo	96,28	96,31	97,20	97,60	97,99

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
2	Kab. Bantul	95,93	95,95	96,03	96,22	96,38
3	Kab. Gunungkidul	97,84	97,37	97,92	97,91	97,84
4	Kab. Sleman	94,9	94,83	95,22	95,53	95,87
5	Kota Yogyakarta	90,84	90,87	92,82	99,75	94,20
6	Provinsi DIY	95,42	95,44	95,94	96,31	96,52

Sumber : Sakernas BPS DIY, 2024 (diolah)

Penduduk usia kerja di Kulon Progo pada tahun 2024 berjumlah 357.960 orang yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 281.246 dan pengangguran 5.657. Sedangkan persentase penduduk bekerja di tahun 2024 sebesar 97,99 % dan menjadi nilai tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi DIY.

Tabel 2.91

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Maksimum SD	81.318	70.764	88.355	73.595	71.382
2	SMP	45.639	49.919	57.166	49.229	51.916
3	SMA Umum	36.662	39.719	42.150	42.333	46.632
4	SMA Kejuruan	62.684	69.227	68.124	78.357	81.838
5	Diploma	6.624	8.499	6.262	6.916	7.383
6	Universitas	23.705	30.836	17.848	18.838	22.095
Jumlah		269.426	268.964	279.905	269.268	281.246

Sumber: Sakernas BPS DIY, 2024 (diolah)

Dilihat dari tingkat pendidikannya angkatan kerja di Kulon Progo paling banyak dari lulusan SMA Kejuruan sebesar 81.838 (29,10%) dan paling sedikit dari lulusan Diploma sebesar 7.383 (2,63%). Pada angkatan kerja lulusan SD memiliki tren yang menurun yang dapat menjadi indikator peningkatan pendidikan tenaga kerja di Kulon Progo.

Tabel 2.92

Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Umur	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	15 – 19	10.890	9.736	8.135	8.255	6.497
2	20 – 24	17.294	16.405	17.330	22.955	22.807
3	25 – 29	25.111	25.581	24.489	24.457	28.101
4	30 – 34	25.896	26.884	25.998	26.517	27.665
5	35 – 39	26.387	26.452	28.650	22.604	26.388
6	40 – 44	29.693	30.325	30.597	24.796	28.373
7	45 – 49	29.800	29.969	30.013	26.893	26.344
8	50 – 54	27.479	26.908	28.190	25.582	26.878

No	Umur	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	55 – 59	24.903	24.717	24.868	25,208	25.821
10	60 – 64+	49.581	51.973	61.635	55,546	62.372
Jumlah		256.632	268,964	279.905	262,813	281.246

Sumber : Sakernas BPS DIY, 2024

Berdasar golongan umur 15-64 tahun, angkatan kerja Kulon Progo paling banyak pada rentang usia 60-64 tahun dengan jumlah 62.372 (22,18%), hal tersebut dapat menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usai 60 tahun keatas yang berpartisipasi sebagai pekerja maupun pencari pekerjaan. Sedangkan untuk usia dibawah 60 tahun sebanyak 218.874 (71,82%), jumlah angkatan kerja hampir tersebar merata pada setiap rentan umur dengan angkatan kerja terbanyak pada usia 40-44 tahun sebanyak 28.373 (10,01%) dan 25-29 tahun sebanyak 28.101 (9,99%). Pada rentan umur 15-19 tahun terdapat penurunan jumlah dari tahun 2023 sebesar 8.255 menjadi 6.497 di tahun 2024, penurunan ini dapat menunjukkan bahwa pada rentan usia 15-19 tahun semakin banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak terhitung sebagai angkatan kerja

Tabel 2.93

**Lowongan Kerja, Pencaker dan Penempatan Tenaga Kerja
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024**

Tahun	Lowongan Kerja	Pencaker	Penempatan	Penempatan Berdasarkan Lokasi			Rasio Penempatan terhadap Pencaker
				AKL (Lokal DIY)	AKAD (Antar Daerah)	AKAN (Antar Negara)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4/3
2020	5.583	4.548	3.241	2.893	225	123	0,71
2021	7.348	4.676	3.242	3.065	177	-	0,69
2022	9.261	4.233	3.592	3.321	181	90	0,85
2023	8.823	4.268	3.458	3.115	94	249	0,81
2024	8,622	4,204	3,464	2,957	334	173	0.82

Sumber: Sakernas BPS DIY, 2022 (diolah)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah lowongan kerja belum sepenuhnya bisa terpenuhi karena belum adanya link and match antara pencari kerja dan perusahaan. Salah satu Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mendorong lembaga pendidikan untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dirintis sehingga terwujud link and match antara output lembaga pendidikan dengan kualifikasi/kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan industri/perusahaan.

Tabel 2.94

**Jumlah Perusahaan Menurut Jumlah Tenaga Kerja
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024**

Tahun	Besar	Sedang	Menengah	Kecil		Jumlah
	TK>100	TK 50-99	TK 25-49	<25	<10	
2020	20	14	30	49	48	161
2021	20	14	28	49	48	158

Tahun	Besar	Sedang	Menengah	Kecil		Jumlah
	TK>100	TK 50-99	TK 25-49	<25	<10	
2022	20	18	28	49	48	163
2023	19	21	28	49	48	165
2024	20	21	28	50	49	168

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2025

Hubungan industrial diperlukan agar komunikasi antara pemilik perusahaan dengan tenaga kerja dapat terjalin dengan baik. Bagi tenaga kerja yang sudah memasuki dunia usaha harus mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Salah satu perlindungan tenaga kerja dalam dunia usaha adalah hubungan industrial karena masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan dengan konsekuen. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah:

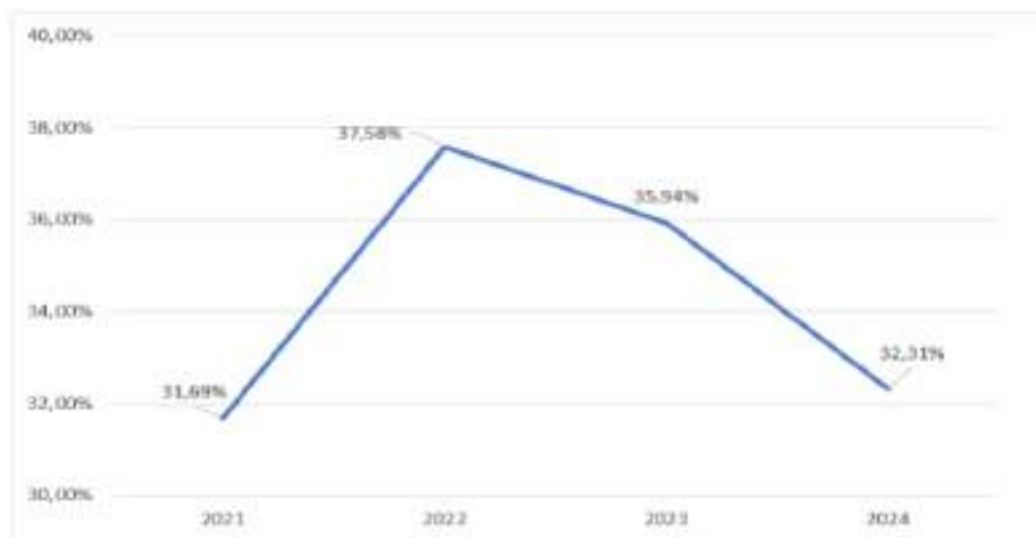
Tabel 2.95

Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT, Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Tahun	PP	PKB	SP/SB	Bia BIPARTIT	PHI/PHK	TK Korban PHK
2020	29	14	18	10	1	6.127
2021	29	14	18	10	1	4
2022	35	16	15	11	1	114
2023	41	16	10	11	-	116
2024	43	16	10	14	5	897

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Tahun 2024 perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) meningkat sebanyak 2 perusahaan menjadi 43. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki PKB, SP/SB, Bipartit tidak berubah dari tahun 2023. Pada permasalahan pemutusan hubungan kerja terdapat pada 5 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak 897 orang.



Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Gambar 2.37

Cakupan Semesta Peserta Aktif BPJS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024

Cakupan semesta peserta aktif BPJS memberikan gambaran penduduk yang sudah mendapat jaminan kesehatan BPJS dalam satu daerah. Cakupan semesta dihitung dari total penduduk yang aktif dalam kepesertaan BPJS Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi dibandingkan dengan potensi peserta BPJS pada satu daerah. Kulon Progo memiliki rata-rata cakupan sebesar 34 % pada empat tahun terakhir dengan tren yang menurun pada tahun 2024. Penurunan ini didorong di pengaruhi oleh semakin bertambahnya potensi kepeserataan serta masih cakupan peserta pada kepesertaan BPJS BPU dan Jasa Konstruksi

Tabel 2.96

Data Produktivitas Tenaga Kerja 2020-2024

Produktivitas	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kulon Progo	45,25	48,80	52,61	60,30	61,37
Kab. Bantul	44,67	49,23	51,85	58,66	62,29
Kab. Gunungkidul	48,62	44,52	50,15	54,39	57,89
Kab. Sleman	68,36	70,46	82,20	94,69	97,01
Kota Yogyakarta	159,15	161,80	171,54	219,71	242,41
DIY	64,96	67,05	73,94	84,45	88,66

Sumber : Sakernas BPS DIY, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Target yang akan dicapai adalah pengurangan angka pengangguran, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kompetensi (sertifikasi) tenaga kerja, dan peningkatan perlindungan ketenagakerjaan. Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan produktivitas dengan mengadakan pelatihan ketrampilan baik yang dilakukan di UPT Balai Latihan Kerja maupun lainnya. Pelatihan dilakukan kepada pencari kerja juga tenaga kerja mandiri untuk melakukan diversifikasi usaha.

2.1.3.2.2 Pangan

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. Kinerja urusan pangan diukur dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, dengan capaian pada Tahun 2020-2024 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.97

Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan dan cadangan pangan	Ketersediaan Energi Per kapita (kkal/kap/hr)	3.407	3.420	3.461	3.361	2.943
		Ketersediaan Protein Per Kapita (gr/kap/hr)	100,80	161,09	102,65	78	92,57
		Cadangan pangan pemerintah (ton)	4,55	4,55	14,55	24,22	32,92

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
		Penguatan Cadangan Pangan masyarakat (ton)	1.780	2.537,50	2.602	2.650	2.658
2.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	91,52	91,45	91,52	91,55	91,60
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan(%)	100,66	99,38	99,43	99,44	99,46
3.	Penganeekaragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,60	92,82	92,1	92,53	93,77
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	100	98	98	98	95,42
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Kalurahan)	36	0	0	0	0

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dari 6 (enam) indikator kinerja urusan pangan di atas, ada 1 (satu) indikator yang belum tercapai yaitu cadangan pangan yang dikelola pemerintah. Cadangan pangan ideal di Kulon Progo adalah sebesar 120 ton (berdasarkan Perda DIY nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Instruksi Gubernur nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota). Saat ini cadangan pangan pemerintah daerah baru mencapai 32,92 ton beras.

Capaian ketersediaan energi sebesar 2.943 kkal/kap/hari, ini sudah jauh melampaui standar yaitu 2.100 kkal/kap/hari. Capaian ketersediaan protein mengalami kenaikan tahun 2024 menjadi 92,57 gr/kapita/hari. Capaian tersebut di atas angka batas minimal ketersediaan protein (56 gr/kapita/hari). Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2023 mencapai 93,77, di atas standar nasional sebesar 90. Indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada Tahun 2024 adalah 95,42. Dari 120 sampel produk sayuran dan pangan segar ada 11 sampel mengandung residu pestisida dan zat kimia.

Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 sampai dengan 2024 dilakukan fasilitasi/pendampingan desa rawan pangan agar tidak menjadi desa rawan pangan sehingga mulai tahun 2021, semua desa di Kulon Progo memiliki ketahanan pangan. Kondisi sampai tahun 2024 tetap, tidak ada desa rawan pangan di Kulon Progo. Perkembangan desa rawan pangan seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.98

Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020–2024

No.	Kapanewon	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1.	Temon	0	0	0	0	0	
2.	Wates	0	0	0	0	0	
3.	Panjatan	0	0	0	0	0	
4.	Galur	0	0	0	0	0	
5.	Lendah	0	0	0	0	0	
6.	Sentolo	0	0	0	0	0	
7.	Pengasih	0	0	0	0	0	
8.	Kokap	1	0	0	0	0	2020 : Kalirejo

No.	Kapanewon	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
9.	Girimulyo	0	0	0	0	0	
10.	Nanggulan	0	0	0	0	0	
11.	Kalibawang	0	0	0	0	0	
12.	Samigaluh	2	0	0	0	0	2020 : Banjarsari, Kebonharjo
Jumlah		3	0	0	0	0	

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pemerintah melakukan intervensi dengan kegiatan pemberdayaan rawan pangan melalui aksi Desa Mandiri Pangan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat menuju ketahanan pangan. Intervensi terutama dilakukan di 10 desa yang merupakan pilot project penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kulon Progo. Desa-desa tersebut adalah Sendangsari, dan Sidomulyo di Kapanewon Pengasih; Desa Demangrejo dan Kaliagung di Sentolo; Desa Kebonharjo, Purwoharjo dan Banjarsari di Samigaluh; serta Desa Kalirejo, Hargotirto dan Hargowilis di Kapanewon Kokap. Mendasar pada surat dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. B-464/34/D-I/KPS.01.00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, bahwa di Kabupaten Kulon Progo masih terdapat sebanyak 9.680 jiwa masyarakat miskin ekstrem atau sebanyak 2,14%. Saat ini posisi kemiskinan ekstrem Kabupaten Kulon Progo berdasarkan SK Bupati No 38/C/2025 tentang Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 adalah sejumlah 7.266 jiwa atau 4.251 KK. Terbitnya SK ini sebagai dasar sasaran intervensi pengentasan kemiskinan eskترم secara lebih komprehensif.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, diantaranya melalui fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat. Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan bantuan kepada 2 kelompok tani/ kelompok lumbung berupa bantuan gabah untuk mengisi lumbung mereka. Masing – masing kelompok mendapatkan 3,62 ton gabah kering giling (GKG). Gabah ini selanjutnya dikelola oleh kelompok agar dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok di saat mereka belum panen padi. Kelompok penerima adalah Gapoktan Mulyo Agung, Kaliagung, Sentolo, dan KT Tunas Makmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap. Selain itu, ada Bantuan Pangan dari Pemerintah Pusat berupa beras masing - masing 10 kg untuk penerima bantuan pangan (PBP) sebanyak 57.642 penerima bantuan. Bantuan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dari Januari - Desember 2024. Selain itu ada fasilitasi pemberdayaan pekarangan untuk KWT (Kelompok Wanita Tani). Tahun 2024, ada alokasi sebanyak 11 kegiatan pemberdayaan pekarangan untuk 11 KWT di Kulon Progo. Fasiilitasi kegiatan ini berasal dari APBD kabupaten, APBD DIY, Dana keistimewaan dan juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) Kementerian Pertanian. KWT penerima fasilitasi Lumbung Mataraman diharapkan mampu menghasilkan panen dari pekarangan dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih, dengan harapan setelah panen cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, kelebihan dari hasil panen dapat di pasarkan melalui pasar tani. Berbagai produk pangan segar maupun pangan olahan dipasarkan di pasar tani yang dilaksanakan di wilayah masing-masing baik secara gabungan beberapa KWT maupun sendiri-sendiri yang umumnya dilaksanakan di akhir pekan.

KWT penerima fasilitasi Lumbung Mataraman juga memperoleh fasilitas pelatihan. Pelatihan dilaksanakan di lokasi masing-masing KWT dengan peserta adalah seluruh anggota KWT. Materi pelatihan diantaranya Kebijakan Pembangunan Pertanian di Kulon Progo, Teknis Persemaian dan Budidaya Tanaman di Pekarangan, Hama dan Penyakit Tanaman serta cara pengendaliannya, Teknik Pemeliharaan Ayam Kampung.

Program penyuluhan pertanian merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian Tahun 2020 - 2024 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.99
Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani

No.	Kondisi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok tani	1.542	1.584	1.590	1.616	1.628
a.	Kelas Pemula	189	177	134	148	151
b.	Kelas Lanjut	490	528	477	493	494
c.	Kelas Madya	735	743	824	820	825
d.	Kelas Utama	128	136	155	155	158
2.a.	Jumlah petani/buruh tani	139.710	139.710	141.919	142.619	143.054
b.	Jumlah keanggotaan dlm kelompok tani	76.516	76.560	78.725	79.425	79.833
c.	Rasio jumlah anggota kelompok tani dibanding jumlah petani/buruh tani (%)	53,4	54,79	55,47	55,69	55,81

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi perubahan jumlah kelompok tani pada tiap kelasnya. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 jumlah kelompok tani mengalami fluktuasi dikarenakan adanya penumbuhan kelompok baru dan kenaikan kelas kelompok. Di sisi lain, banyak penumbuhan kelompok tani baru, terutama kelompok wanita tani (KWT). Sehingga di tahun 2024, jumlah kelompok tani mengalami peningkatan dari 1.616 di 2023 menjadi 1.628 di 2024.

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Selain itu, pangan merupakan salah satu aspek utama dalam kaitannya dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Berikut ini Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.100
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi-padian	21,5	21,6	20,3	21,30	25,0
2.	Umbi-umbian	1,8	1,9	2,5	1,90	2,2
3.	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0	24,00	21,4
4.	Minyak dan Lemak	3,0	3,0	3,0	3,93	3,80
5.	Buah/Biji Berminyak	0,8	0,9	0,9	0,96	1,0
6.	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,00	10,00
7.	Gula	1,5	1,5	1,5	1,44	1,40
8.	Sayur dan Buah	30,0	30,0	30,0	30,00	30,00
9.	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Total		92,6	92,82	92,1	93,53	93,77

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (dietary score)/skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Melihat skor pangan harapan kabupaten Kulon Progo menunjukkan capaian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun belum mencapai angka standar 100. Tahun 2024 ini, skor PPH mencapai 93,77 Faktor pendorong tercapainya PPH adalah: kegiatan sosialisasi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) di setiap pertemuan kelompok wanita tani, dengan harapan anggota KWT (ibu-ibu) bisa mengimplementasikan menu - menu B2SA di keluarga mereka. Sedangkan faktor penghambatnya adalah anak – anak dan remaja kurang menyukai menu - menu sesuai Isi Piringku (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman - B2SA) dan banyak yang menyukai menu siap saji yang nutrisinya kurang lengkap.

2.1.3.2.3 Pertanahan

Sebagaimana tertuang dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pertanahan terutama terkait dengan administrasi pertanahan baik di tingkat nasional, regional dan sektoral sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Capaian kinerja layanan urusan pertanahan dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Jumlah lahan bersertifikat terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan capaian 79,75% menjadi 96,89% di tahun 2023. Selanjutnya, cakupan jumlah aset Pemda yang bersertifikat terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebesar 29,28% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 67,57%. Terdapat penambahan yang signifikan jumlah Aset Pemda dikarenakan terdapat tambahan penerbitan Peta Bidang Tanah. Aset Pemda yang belum bersertifikat sebagian besar berupa jalan dan daerah/saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.

Tabel 2.101
Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lahan bersertifikat	ha	46.755	50.756	53.806	56.806	56.806*
2	Jumlah lahan yang seharusnya bersertifikat	ha	58.628	58.628	58.628	58.628	58.628*
3	Persentase lahan bersertifikat	%	79,75	86,57	91,78	96,89	96,89*
4	Jumlah aset Pemda bersertifikat	bidang	279	299	324	434	992
5	Jumlah aset Pemda yang seharusnya bersertifikat	bidang	953	953	953	953	1.468
6	Persentase lahan Pemda bersertifikat	%	29,28	31,37	34,00	45,54	67,57

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2024

*) Data sementara

Urusan pertanahan merupakan salah satu unsur keistimewaan yang membedakan Pemda DIY dengan provinsi yang lain, yaitu pada status kepemilikan tanahnya. Selain tanah milik masyarakat dan tanah negara, terdapat tiga status kepemilikan tanah lainnya yaitu tanah Kasultanan (*Sultan Ground*), tanah Kadipaten (*Paku Alam Ground*) dan tanah Kalurahan. Menurut Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah Keprabon dan tanah bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Sedangkan tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan disebutkan bahwa Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari kasultanan dan/atau kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan Hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Sebaran dan status kepastian hukum Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Kondisi dan Sebaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Kapanewon	Tanah Kasultanan (bidang)		Tanah Kadipaten (bidang)		Tanah Desa (bidang)	
		SS	BS	SS	BS	SS	BS
1	Temon	-	-	55	39	490	40
2	Wates	-	-	88	42	233	30
3	Pengasih	114	267	-	-	454	56
4	Lendah	12	148	-	-	220	8
5	Nanggulan	76	52	-	-	368	39
6	Kokap	89	28	-	-	196	4
7	Kalibawang	230	188	-	-	320	64
8	Girimulyo	188	194	-	-	129	213
9	Samigaluh	20	163	-	-	229	24
10	Sentolo	116	63	-	-	404	25
11	Panjatan	-	-	40	79	228	17

No	Kapanewon	Tanah Kasultanan (bidang)		Tanah Kadipaten (bidang)		Tanah Desa (bidang)	
		SS	BS	SS	BS	SS	BS
12	Galur	-	-	65	371	329	12
		845	1.103	248	531	3.600	532
Total Kabupaten		1.948		779		4.132	

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2025

Keterangan : SS: Sudah Bersertifikat; BS: Belum Bersertifikat

*) Data sementara

Tanah Kasultanan banyak tersebar di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo, sedangkan tanah Kadipaten tersebar di wilayah selatan antara lain meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan dan Galur. Apabila dilihat berdasarkan status kepastian hukumnya, baik tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta Tanah Desa masih belum semua bidang tanah bersertifikat sampai dengan tahun 2024. Maka, dalam rangka menjamin kepastian hukum dari tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah Kalurahan, Pemerintah DIY melalui Dana Keistimewaan setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk percepatan pendaftaran atau pengurusan sertifikat tanah – tanah tersebut.

2.1.3.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan adanya berbagai pembangunan proyek strategis di Kabupaten Kulon Progo, dimana kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air (Indeks Kualitas Air/IKA), udara (Indeks Kualitas Udara/IKU) dan tutupan lahan (Indeks Kualitas Lahan/IKL). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang secara substantif merupakan indikator status atau mutu lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, komponen kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas air dihitung berdasarkan parameter Derajat keasaman (pH), Oksigen terlarut (DO), Kebutuhan oksigen biologi (BOD), Kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Padatan tersuspensi total (TSS), Nitrat (NO₃-N), Total fosfat (T-Phosphat) dan Fecal coliform (Fecal Coli). Sampel kualitas air diambil pada 9 titik sungai yaitu 1) Sungai Serang, 2) Sungai Papah, 3) Sungai Papak, 4) Sungai Sudu, 5) Sungai Nagung, 6) Sungai Tedunan/Gede, 7) Sungai Tinalah, 8) Sungai Ngrancah, dan 9) Sungai Pening. Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂ yang diambil di kawasan

perkantoran, industri, permukiman, dan transportasi. Sementara indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan.

Perhitungan target dan realisasi IKLH tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai IKA diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air pada 9 sungai dengan 8 parameter, IKU diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara di 13 lokasi. IKL dihitung menggunakan data spasial / peta deliniasi.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (37,6\% \times \text{IKA}) + (40,5\% \times \text{IKU}) + (21,9\% \times \text{IKL})$$

Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo beserta angka indeks dari ketiga parameter IKLH sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.103

IKLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
1.	2020	38,33	92,91	74,10	69,01
2.	2021	38	92,15	73,32	68,69
3.	2022	36	91,30	69,55	66,01
4.	2023	50,61	90,74	53,51	67,50
5.	2024	44,24	91,62	53,51	65,46

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

Sedangkan capaian IKLH Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target RPD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.104

Capaian IKLH Tahun 2024

Indikator	Target	Capaian	Persentase
Indeks Kualitas Air (IKA)	35,50	44,24	124,6
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,30	91,62	104,9
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64,56	53,51	82,9
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,84	65,46	104,2

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

Capaian IKLH Tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKLH sudah memenuhi target yang ditetapkan. Faktor pendorong tercapainya IKLH adalah nilai realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang memenuhi target. Persentase capaian Indeks Kualitas Air tahun 2024 yaitu 44,24 (nilai kategori 'Kurang'). Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan selama 2 (dua) periode pada tahun anggaran 2024. Kondisi pemantauan air sungai yang dilakukan mewakili musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau kondisi polutan di sungai dimungkinkan mengalami pengendapan atau sedimentasi dan kualitas air sungai pada bagian atas dan tengah pada morfologi sungai dimungkinkan akan lebih baik daripada bagian bawah. Sedangkan, pada musim

penghujan polutan di sungai akan mengalami turbulensi dan pencampuran, di mana akan meningkatkan tingkat kekeruhan air sungai. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab dan pengaruh untuk tingkat kualitas air sungai, di mana nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 yang data pemantauannya diambil mewakili musim penghujan dan kemarau, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi lebih rendah daripada tahun 2023 dimana kondisi pada tahun 2023 terjadi kemarau panjang.

Meskipun demikian, penyelidikan lebih lanjut secara holistik dan menyeluruh terhadap berbagai faktor dan variabel yang mempengaruhi kualitas air sungai pada daerah hulu sampai dengan hilir dapat menjadi penjelasan yang lebih memuaskan dan kompleks terkait dengan mekanisme aliran kualitas air sungai terhadap nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Sungai yang telah melebihi baku mutu lingkungan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2024 berada pada:

- 1) Sungai Serang Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Phosphat*;
- 2) Sungai Papah Periode 1 dan 2 pada Parameter Total Suspended Solid (TSS), Total Phosphat, dan Fecal Coliform;
- 3) Sungai Papak Periode 1 dan 2 pada Parameter Total Phosphat dan Fecal Coliform;
- 4) Sungai Sudu Periode 1 dan 2 pada Parameter Total Suspended Solid (TSS), Total Phosphat, dan Fecal Coliform;
- 5) Sungai Nagung Periode 1 dan 2 pada Parameter Total Phosphat, Chemical Oxygen Demand (COD), dan Fecal Coliform;
- 6) Sungai Sumitro Periode 1 dan 2 pada Parameter Total Phosphat, Nitrat, dan Fecal Coliform;
- 7) Sungai Tinalah Periode 1 dan 2 pada Parameter Total Phosphat dan Fecal Coliform;
- 8) Sungai Ngrancah Periode 1 dan 2 pada Parameter Total Suspended Solid (TSS), Total Phosphat, dan Fecal Coliform;
- 9) Sungai Pening Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Phosphat* dan *Fecal Coliform*.

Parameter yang melebihi baku mutu didominasi oleh parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Total Phosphat*, dan *Fecal Coliform*. Sumber pencemar air sungai *Total Suspended Solid* (TSS) adalah erosi tanah atau kikisan tanah yang terbawa ke badan air. Selain itu, sumber pencemar Total Suspended Solid (TSS) pada air sungai lainnya dapat berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, pembuangan sampah, aktivitas transportasi, perubahan alamiah, dan penggunaan bahan kimia.

Sumber pencemar air sungai Total Phosphat bisa berasal dari sumber alami dan buatan manusia. Sumber alami Total Phosphat dapat berasal dari pelapukan batuan fosfat geologis, endapan atmosfer, dan pembusukan tanaman. Sumber buatan manusia Total Phosphat dapat berasal dari pupuk, kotoran hewan peliharaan, limpasan pertanian dan perkotaan, pembuangan limbah industri dan rumah tangga, serta sistem septik yang rusak atau kelebihan muatan.

Sumber pencemar air sungai Fecal Coliform dapat berasal dari limbah domestik, limbah pertanian, dan kotoran hewan.

Limbah domestik dapat berasal dari:

- a) Limbah cair dari buangan manusia, seperti tinja dan urin;

- b) Limbah cair dari kegiatan rumah tangga, seperti mencuci, mandi, dan memasak; dan
- c) Limbah yang dibuang langsung ke sungai tanpa diolah.

Limbah pertanian berasal dari sisa-sisa pupuk organik dari hasil pertanian yang masuk ke sungai irigasi. Kotoran hewan dapat berasal dari: Kotoran hewan yang mencemari air minum yang tidak didisinfeksi dengan baik dan Kotoran hewan yang masuk ke sungai melalui pembuangan limbah langsung.

Realisasi atau capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2024 yaitu 91,62 (kategori “sangat baik”). Lokasi pemantauan kualitas udara berada di 13 lokasi yaitu DLH Kabupaten Kulon Progo, Perumahan Kasatriyan Giripeni, sekitar PT. Aneka Sinendo Sentolo, Kantor Cabang BRI Karangnongko, Perumahan Gondangdia Margosari, Kawasan Peruntukan Industri Tuksono, Perempatan Ngeplang Sentolo, Pertigaan Brosot, Jalan Ngentakrejo Lendah, Jalan Plono, Perempatan Dekso Kalibawang, Perempatan Kenteng Nanggulan, Jalan sekitar Kiskendo Jatimulyo.

Indeks Kualitas Udara merupakan salah satu aspek untuk mengukur nilai kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Perhitungan IKU Kabupaten Kulon Progo menggunakan 2 parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin sedangkan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar dan bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Realisasi IKL (Indeks Kualitas Lahan) belum memenuhi target yang ditetapkan (capaiannya 82,9%). Nilai IKL Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebesar 53.51 dengan predikat “Sedang”. Nilai IKL Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 tidak mengalami perubahan dengan IKL tahun 2023. Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan tutupan vegetasi pada data spasial yang digunakan dalam perhitungan IKL. Data tutupan vegetasi wajib menggunakan data yang sudah didelineasi sehingga perhitungan nilai IKL sangat bergantung pada ketersediaan data spasial yang dapat menunjukkan nilai luas, titik koordinat, dan visual peta pada setiap tutupan lahan sesuai dengan masing-masing kategori. Dibutuhkan kerjasama antar OPD dalam melakukan perhitungan dan pendataan terhadap kondisi tutupan lahan di Kabupaten Kulon Progo agar data yang tersaji dapat up to date, akurat, serta validasi satu data untuk seluruh OPD di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu menyediakan data dalam bentuk spasial membutuhkan tim khusus agar data yang tersaji memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Demikian juga setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo akan menimbulkan masalah lingkungan. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini.

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Untuk meminimalkan dampak yang dimungkinkan terjadi dari suatu usaha/kegiatan tersebut maka diperlukan suatu instrumen untuk menilai kelayakan suatu kegiatan. Instrumen tersebut dapat berupa izin lingkungan yang meliputi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan

Lingkungan), serta SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk kegiatan usaha skala kecil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan instrumen tersebut diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan UKL/UPL juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui sejauh mana ketaatan dari pemilik usaha dan atau kegiatan/ pemrakarsa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam dokumen lingkungannya. Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan / atau kegiatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan pengawasan langsung dilakukan oleh personil DLH yang mendatangi langsung lokasi usaha/ kegiatan, sedangkan kegiatan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan pemeriksaan dokumen maupun pengawasan yang dilakukan bersama dengan OPD lain.

Selain melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan juga dilaksanakan penanganan kasus lingkungan yang merupakan laporan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan tersebut. Pada Tahun 2024 terdapat 19 laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk dan semuanya telah ditindaklanjuti.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya timbulan sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya pengurangan sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan pengurangan sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Kabupaten Kulon Progo terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan sumber daya alam dalam pengelolaan sampah dilaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi pengelolaan sampah dan pelatihan pengolahan sampah dengan budidaya maggot yang didanai oleh Dana Keistimewaan tahun anggaran 2024. Selain itu pemerintah daerah mendorong pembentukan kelompok pengelola sampah di setiap desa, dan kepada pelaku usaha diimbau menerapkan pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan melalui Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor. 510/4022 Tahun 2020. Tabel berikut ini merupakan kelompok masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang melakukan pengelolaan sampah.

Tabel 2.105

Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024

No.	Kapanewon	2022		2023		2024	
		Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
1	Temon	5	-	6	1	7	1
2	Wates	16	5	17	5	18	5
3	Panjatan	21	-	22	-	22	-
4	Galur	3	1	3	1	3	1
5	Lendah	5	-	5	-	6	-
6	Sentolo	13	2	13	3	13	3

No.	Kapanewon	2022		2023		2024	
		Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
7	Pengasih	29	1	29	1	30	1
8	Kokap	7	-	7	-	7	-
9	Girimulyo	5	-	5	-	5	-
10	Nanggulan	7	2	7	2	7	2
11	Kalibawang	6	-	6	-	7	-
12	Samigaluh	6	1	6	1	7	1
JUMLAH		123	12	126	14	132	14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

Jumlah kelompok masyarakat pengolah sampah sebagaimana tabel di atas selama periode 2022-2024 terus mengalami peningkatan, bank sampah yang semula 123 unit pada Tahun 2022 bertambah menjadi 126 pada Tahun 2023 dan bertambah lagi menjadi 132 pada tahun 2024. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari 12 unit pada Tahun 2022 bertambah menjadi 14 pada Tahun 2023 namun pada tahun 2024 tidak ada penambahan. Dengan kondisi tersebut perlu terus dilakukan upaya untuk mendorong agar kelompok-kelompok pengolah sampah dapat aktif dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok pengolah sampah di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi/pelatihan bidang lingkungan hidup kepada bank sampah, sekolah, perumahan, perkantoran, dan puskesmas baik oleh pemerintah maupun diinisiasi oleh masyarakat.

Pelayanan persampahan di Kabupaten Kulon Progo sudah mencakup semua kapanewon dengan luas area pelayanan 238,01 km² atau 40.60 % dari luas area Kabupaten Kulon Progo 586,25 km². Belum semua kalurahan di Kabupaten Kulon Progo terjangkau oleh pelayanan persampahan, pelayanan masih terbatas pada wilayah perkotaan di tiap kapanewon. Dari jumlah Pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo berasal dari berbagai sumber sampah. Sumber sampah yang terlayani meliputi kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan komersial, industri, rumah makan, rumah sakit, sekolah, pasar, terminal, taman publik dan jalan umum.

Berdasarkan hasil evaluasi jakstrada tentang kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 jumlah timbulan sampah sebesar 79.177,19 ton/tahun. Dari jumlah tersebut jumlah sampah yang terkelola sebesar 37.042,47 ton/tahun atau 46,78% yang terdiri dari kegiatan Pengurangan sampah sebesar 25.957,42 ton/tahun atau 32,78% dan Penanganan Sampah sebesar 11.085,05 ton/tahun atau 14%. Data tersebut sesuai Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan sudah tervalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA adalah dengan optimalisasi pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, optimalisasi pemilahan sampah di TPS/TPS3R sehingga sampah yang dikirim ke TPA hanya tinggal residu saja yang berkisar 20% dari

timbulan sampah di sumber sampah. Pengembangan TPS3R agar mampu mengolah sampah hingga residunya juga perlu terus dilakukan.

Pertambahan penduduk yang pesat serta perubahan gaya hidup (lifestyle) masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan volume sampah yang dihasilkan juga semakin meningkat dan beragam jenisnya. Timbulan sampah yang tidak terangkut atau tidak segera ditangani akan menyebabkan bau yang tidak sedap, kotor dan mengganggu pemandangan, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber penyakit. Telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat yakni menghendaki kualitas lingkungan yang sehat, namun di lain pihak tidak mau berkompromi apabila lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan lahan pengolahan sampah. Ini yang sering dikenal sebagai NIMBY (not in my backyard) syndrome. Keadaan ini jika tidak ditangani secara memadai, dapat menimbulkan gangguan dan kerugian pada lingkungan yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat (public health). Selain pertumbuhan alami, adanya berbagai kegiatan strategis di Kulon Progo seperti bandara dan pengembangan kawasan industri akan semakin meningkatkan timbulan sampah yang harus ditangani. Sehingga dipandang perlu untuk mengembangkan pemrosesan sampah pada segmen hulu dengan upaya mengurangi sampah, mengembangkan bank sampah, pembangunan TPS 3R di setiap kawasan serta TPST pada kawasan strategis. Upaya ini akan membantu dalam mengurangi timbulan sampah dan dampaknya secara luas kepada masyarakat. Struktur sarana persampahan sebagaimana tergambar pada gambar di atas.

Pada Tahun 2024 Pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo terbagi di 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Lingkungan Hidup terkait pengurangan sampah, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan mempunyai kewenangan penanganan sampah. Telah terdapat Komitmen bersama antar perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan sampah. Pengelolaan persampahan terintegrasi dari hulu-hilir dilaksanakan secara kolaboratif melalui program/kegiatan pada beberapa perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, meliputi intervensi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, di masyarakat/sekolah, di KSM Pengelola TPS 3R dan di TPA Banyuroto.

Sesuai Peraturan Daerah No 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tahun 2025 terkait pengelolaan sampah baik itu pengurangan maupun penanganan menjadi satu di Dinas Lingkungan Hidup dengan bergabungnya UPT. Persampahan dan Pertamanan. Pada tahun 2024 terdapat 4 lokus TPS 3R di Perkotaan Wates yang menjadi pilot project pengelolaan sampah, harapannya di 4 lokasi TPS 3R ini sampah sudah selesai tertangani dan hanya benar-benar residu yang masuk ke TPA Banyuroto. Sedangkan di TPA Banyuroto pada tahun ini juga dibangun tempat pemrosesan sampah thermal berupa hanggar beserta peralatannya yaitu mesin pilah dan insenerator. Upaya-upaya pengadaan peralatan baik di TPS 3R maupun di TPA Banyuroto dibarengi upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU No. 32 Tahun 2009). Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, perlu adanya pihak-pihak yang saling terkait untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama masyarakat dan dunia usaha/swasta, karena masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan menjaga kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Prestasi yang telah diperoleh dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.106

Prestasi Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Nama	Prestasi	Institusi Pemberi Penghargaan
1	KTH Pasir Kadilangu Jangkaran Temon	Penghargaan Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan	Gubernur DIY
2	Fery Novbrito Harsege	Penghargaan Kalpataru Pengabdian Lingkungan	Gubernur DIY
3	KTH Wanapaksi	Penghargaan Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan	Kementerian LHK RI
4	Pedukuhan Banyunganti Kidul, Kaliagung, Sentolo	Penghargaan Proklam Nasional kategori Proklam Utama	Kementerian LHK RI
5	SMA N 2 Wates	Sekolah Adiwiyata Mandiri Kategori SMA/SMK/MA Sederajat	Kementerian LHK RI
6	SDN Kembang Malang	Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2024 Kategori SD/MI Sederajat	Kementerian LHK RI
7	Kota Wates	Penghargaan Adipura kategori Kota Kecil	Presiden RI

Sumber Data :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap penduduk yang berusia diatas 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP hal ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Untuk meningkatkan akurasi data, mulai tahun 2014 dilakukan perekaman data kependudukan dengan program KTP-el. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda dan pengadministrasian yang lebih akurat. Pada tahun 2021 rasio penduduk ber-KTP mencapai 98,43, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah perekaman tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pada tahun 2022, rasio penduduk ber KTP meningkat menjadi 98,8% seiring menurunnya dampak pandemi Covid-19 kemudian pada tahun 2024 tercatat semakin meningkat menjadi 99,46%. Data jumlah penduduk ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107
Jumlah Penduduk Ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan wajib KTP	99,06	98,43	98,80	99,32	99,46
	a. Jumlah penduduk usia>17 tahun atau telah menikah ber KTP	342.189	337.272	338.560	342.125	346.467
	b. Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	346.076	342.669	342.669	344.474	348.351

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2025

Layanan pencatatan sipil adalah layanan yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, dan pengesahan pengakuan anak. Layanan ini merupakan upaya melakukan tertib administrasi untuk pengakuan kewarganegaraan. Rasio bayi berakte dari tahun 2020 sampai dengan 2023 secara umum menunjukkan peningkatan yaitu dari 98,51% pada tahun 2020 meningkat menjadi 100% pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan yakni pada angka 99,99%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Layanan Catatan Sipil Tahun 2020–2024

Pelayanan Akta Catatan Sipil	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
Rasio bayi berakte	98,51	93,88	100	100	99,99	Persen
a. Jml bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran	4.944	4.539	5.594	5.446	8.255	Orang
b. Jml keseluruhan bayi lahir	5.019	4.835	5.594	5.446	8.256	Orang
Rasio perkawinan berakte nikah	100	100	100	100	100	Persen
a. Jumlah pasangan nikah berakte nikah	125	248	152	110	110	Pasangan
b. Jumlah pasangan nikah bersurat nikah	1.843	2.942	2.503	2.432	2.249	Pasangan
c. Jumlah keseluruhan pasangan nikah	1.968	3.190	2.655	2.542	2.359	Pasangan
d. Akta Perceraian	21	25	18	13	17	Pasangan
e. Akta Kematian	6.633	8.132	5.119	4.476	6.993	Orang
f. Pengakuan dan pengesahan anak	3	2	9	3	4	Orang
g. Pengangkatan Anak	8	12	17	15	13	Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan. Pemerintah Desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos

bantuan keuangan kepada desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.109

Jumlah Bantuan Keuangan Kalurahan (Desa) dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Jenis Bantuan	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Alokasi Dana Desa	67.991.810.496	67.381.014.000	66.905.865.901	68.437.004.702	72.484.397.000
Bagi hasil pajak dan retribusi	7.440.234.929	9.628.009.533	11.778.750.925	10.341.727.086	13.495.225.365
Jumlah	75.432.045.425	77.009.023.533	78.684.616.826	78.778.731.788	85.979.622.365

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bantuan keuangan kepada kalurahan berupa alokasi dana desa pada tahun 2020, mengalami penurunan di tahun 2021 dan tahun 2022 karena refocusing alokasi untuk penanganan Covid-19 dan kembali naik pada tahun 2023 dan tahun 2024. Bagi hasil pajak dan retribusi mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2024, bagi hasil pajak dan retribusi serta Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan.

Sarana prasarana perkantoran kalurahan sangat mendukung dalam kelancaran menjalankan pemerintahan dan pembangunan serta menunjang pelayanan masyarakat. Belum semua kondisi gedung kantor kalurahan dalam kondisi baik. Kondisi gedung kantor kalurahan dapat diketahui dalam tabel berikut.

Tabel 2.110

Kondisi Kantor Kalurahan menurut Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo**Tahun 2024**

No.	Kapanewon	Tahun 2023		
		Baik	Sedang	Rusak ringan
1	Temon	7	8	0
2	Wates	5	1	1
3	Panjatan	9	2	0
4	Galur	6	1	0
5	Lendah	6	0	0
6	Sentolo	6	2	0
7	Pengasih	6	1	0
8	Kokap	2	2	1
9	Girimulyo	4	0	0
10	Nanggulan	3	1	2
11	Samigaluh	4	2	1
12	Kalibawang	3	1	0
Jumlah		61	21	5

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi kantor kalurahan pada tahun 2024 yang baik ada 61, kondisi sedang ada 21 dan kondisi gedung kantor kalurahan rusak ringan ada 5 kalurahan. Ditetapkannya Perda dan Perbup sebagai dasar menjalankan pemerintahan kalurahan belum mampu mengoptimalkan kinerja pemerintahan kalurahan. Hal tersebut terlihat dari hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah kalurahan yang dilakukan oleh aparat pengawasan kabupaten. Hasil pelaksanaan pengawasan tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.111
Realisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kalurahan
Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Jenis Obyek Pemeriksaan	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
1.	2020	Jumlah Rekomendasi	297
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	426
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	105
2.	2021	Jumlah Temuan	122
		Jumlah Rekomendasi	80
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	138
3.	2022	Jumlah Temuan	70
		Jumlah Rekomendasi	126
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87
4.	2023	Jumlah Temuan	87
		Jumlah Rekomendasi	143
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87
5.	2024	Jumlah Temuan	82
		Jumlah Rekomendasi	172
		Hasil (LHP, LHE, LHR)	87

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan Laporan Hasil Review (LHR) masih terdapat banyak temuan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah kalurahan. Jumlah temuan pada tahun 2024 mengalami penurunan akan tetapi terdapat peningkatan jumlah rekomendasi.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dilaksanakan bekerjasama dengan TNI bertujuan untuk melakukan pembangunan desa secara terpadu antara TNI, aparat pemerintah dan masyarakat desa sehingga terwujud kemandirian TNI dengan masyarakat, terpenuhinya sarana prasarana desa serta terjaganya stabilitas keamanan di masyarakat. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (Sengkuyung) tahun 2024 tahap I dilaksanakan di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, tahap II di Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, tahap III di Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, tahap IV di Kalurahan Kaliagung Kapanewon Sentolo. Nilai swadaya masyarakat cenderung fluktuatif namun mengalami penurunan di tahun 2024 baik dari persentase maupun dari nominal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112
Swadaya Masyarakat Pembangunan Kalurahan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Dana (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dana Program					
	TMMD	1.525.000.000	875.000.000	875.000.000	1.835.000.000	1.030.000.000
2.	Swadaya					
	TMMD	957.010.000	514.388.500	331.200.000	880.775.000	382.868.000
3.	Persentase Swadaya Masyarakat	62,75%	58,78%	37,85%	47,99%	37,17%

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa swadaya masyarakat dari tahun ke tahun meningkat, namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan karena pandemi Covid 19.

Lembaga ekonomi kalurahan yang mempunyai peran dalam menggiatkan perekonomian kalurahan adalah pasar desa. Pengelolaan pasar desa ini terus dilakukan pembinaan agar keberadaannya juga mampu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah kalurahan. Pasar desa yang telah mendapat pembinaan dan jumlah lembaga ekonomi kalurahan di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.113
Jumlah Lembaga Ekonomi Kalurahan Tahun 2021-2024

No.	Uraian	2021		2022					
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah BUMDes kondisi baik	52	55	53	52	56	56	56	56
2	Jumlah BUMDes seluruhnya	87	87	87	87	87	87	87	87
3	Pasar desa Kondisi baik	22	23	23	23	22	23	23	23
4	Pasar desa Seluruhnya	32	32	32	31	31	31	31	31

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, data sementara tahun 2024

Tabel 2.114
Pasar Desa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pasar	Luas (m ²)	Jml Pedagang (orang)	Kondisi
1	Temon	1 Temon Kulon	Kaligondang	498	75	kurang

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pasar	Luas (m ²)	Jml Pedagang (orang)	Kondisi
2	Panjatan	2 Kulur	Cikli	1000	68	Baik
		3 Glagah	Glagah	500	80	kurang
		4 Krembangan	Krembangan	3150	25	Baik
3	Lendah	5 Panjatan	Panjatan	323	34	Baik
		6 Gulu rejo	Gegulu	1.500	7	kurang
		7 Tuksono	Nyonyol	2.520	186	Baik
4	Sentolo	8 Srikayangan	Panjul	300	16	Kurang
		9 Salamrejo	Watu ombo	1.400	90	Baik
		10 Sentolo	Sentolo	5000	300	Baik
5	Pengasih	11 Kedungsari	Milir	1.588	90	Baik
		12 Margosari	Gunung Gondang	1306	44	Baik
		13 Sendangsari	Sanur	3.175	12	Baik
6	Kokap	14 Hargorejo	Kokap	1.700	95	Baik
		15 Hargorejo	Sidodadi	700	15	Kurang
		16 Kalirejo	Gunung Ijo	1455	0	off
7	Girimulyo	17 Jatimulyo	Cublak	1.000	57	Baik
		18 Jatimulyo	Jonggrangan	1.000	57	Baik
		19 Jatimulyo	Pringtali	1.000	32	Kurang
8	Nanggulan	20 Donomulyo	Mudal	2894	166	Baik
		21 Kembang	Kembang	2899	28	Baik
		22 Wijimulyo	Krambilan	850	200	Kurang
9	Samigaluh	23 Banyuroto	Gunung Gamping	1.000	82	Baik
		24 Banjarsari	Tuk Bujel	675	22	Baik
		25 Banjarsari	Bendo	1162	25	Baik
10	Kalibawang	26 Sidoharjo	Munggang Rejo	700	23	Baik
		27 Pagerharjo	Plono	1.600	200	Baik
		28 Banjararum	Degan	400	30	Baik
		29 Banjarasri	Boro	1.200	57	Baik
		30 Banjarharjo	Demangan	200	40	Baik
		31 Banjaroyo	Jagalan II	4000	83	Baik

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, data sementara tahun 2024

Pembinaan BUMDes Tahun 2020 dititikberatkan pada penyempurnaan badan hukum BUMDes, kelembagaan/pengurus, pengelolaan keuangannya. Sedangkan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dititik beratkan pada pengelolaan usaha nya dengan mendorong BUMDes membuka usaha baru non jasa keuangan, dengan cara memfasilitasi permohonan proposal ke Kementerian maupun kerjasama dengan pihak lain. Jumlah BUMDes yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.115

BUMDes se-Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

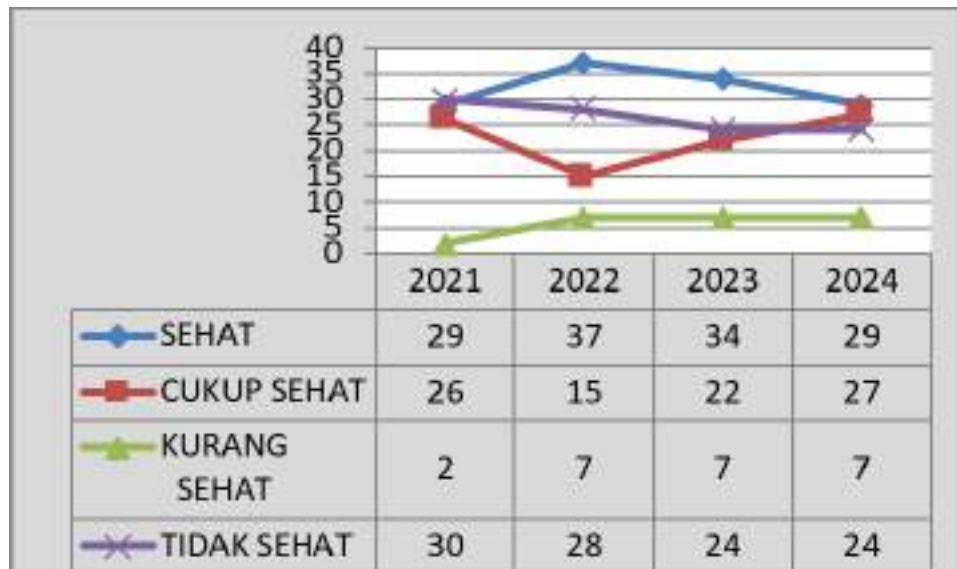
No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama bumdes
1	Temon	Jangkaran	Binangun Sejahtera

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama bumdes
2		Sindutan	Binangun Sindutan
3		Palihan	Binangun Sempulur
4		Glagah	Perumdes Kalurahan Glagah
5		Kalidengen	Binangun Sejahtera
6		Plumbon	Binangun Lancar
7		Kedundang	Binangun Kartika Utama
8		Demen	Perumdes Kalurahan Demen
9		Kulur	Binangun Bangkit Mandiri
10		Kaligintung	Binangun Dina Karya
11		Temon Wetan	Binangun Sejahtera
12		Temon Kulon	Binangun Anugrah
13		Kebonrejo	Binangun Sejahtera
14		Janten	Binangun Sejahtera Utama
15		Karang wuluh	Binangun Manunggal sejahtera
16	Wates	Karangwuni	Binangun Mitra Sejahtera
17		Sogan	Binangun Sumrigah Sogan
18		Kulwaru	Binangun Lestari
19		Ngestiharjo	Binangun Artha Jaya
20		Bendungan	Binangun Mekar Asri
21		Triharjo	Binangun Asri
22		Giripeni	Perumdes Kalurahan Giripeni
23	Panjatan	Garongan	Binangun Barokah
24		Pleret	Binangun Lancar Pleret
25		Bugel	Binangun Karya Murti
26		Kanoman	Binangun Kanoman
27		Depok	Binangun Sejahtera
28		Bojong	Binangun Dana Raharja
29		Tayuban	Binangun Sido Ono
30		Gotakan	Binangun Karya Raharja
31		Panjatan	Binangun Mandiri
32		Cerme	Binangun Sejahtera
33		Krembangan	Binangun Artha Mandiri
34	Galur	Banaran	Binangun migunani
35		Kranggan	Binangun Makaryo
36		Nomporejo	Binangun Ngudi Makmur
37		Karangsewu	Binangun Berdikari
38		Tirto rahayu	Binangun Tirta arta Tirtorahayu
39		Pandowan	Binangun Sejahtera
40		Brosot	Perumdes Binangun Arta Kemuning
41	Lendah	Wahyu harjo	Binangun
42		Bumirejo	Bumi Rahayu
43		Jatirejo	Binangun Jati Unggul
44		Sidorejo	Binangun Dadi Maju

No.	Kapanewon	Kalurahan	Nama bumdes
45		Gulu rejo	Binangun Murakabi
46		Ngentakrejo	Karya Binangun Jaya
47	Sentolo	Demangrejo	Binangun Lancar
48		Srikayangan	Binangun Mujur
49		Tuksono	Binangun Tuksono
50		Salamrejo	Binangun Dana Reja Mandiri
51		Sukoreno	Binangun Artha Guna Mandiri
52		Kaliagung	Binangun Mitra Agung
53		Sentolo	Mandiri Sejahtera Sentolo
54		Banguncto	Binangun Cipta Mandiri
55	Pengasih	Tawangsari	Binangun Tawangsari
56		Karangsari	Binangun Karangsari
57		Kedungsari	Lestari Mandiri
58		Margosari	Binangun Lumintu
59		Pengasih	Binangun Berkah Asih
60		Sendangsari	Binangun Sendang Artha
61		Sidomulyo	Cipta Makmur
62	Kokap	Hargomulyo	Binangun Mulia Abadi
63		Hargorejo	Binangun Makmur Mandiri
64		Hargowilis	Binangun Lestari
65		Kalirejo	Binangun Sejahtera Abadi
66		Hargotirto	Binangun Mulyo
67	Girimulyo	Jatimulyo	Binangun Mulyo Sejati
68		Giripurwo	Binangun Giripurwo
69		Pendoworejo	Binangun Dana Utama
70		Purwosari	Binangun Purwosari
71	Nanggulan	Banyuroto	Binangun Mekar Jaya
72		Donomulyo	Binangun Sejahtera Mulya
73		Wijimulyo	Binangun Mitra Sejahtera
74		Tanjungharjo	Binangun Sejahtera
75		Jatisarono	Binangun Jatimara
76		Kembang	Binangun Kusuma
77	Samigaluh	Kebonharjo	Babar Anyar
78		Banjarsari	Binangun Ajar
79		Purwoharjo	Binangun Maju
80		Sidoharjo	Binangun Mandiri
81		Gerbosari	Binangun Sejahtera
82		Ngargosari	Binangun Sejahtera
83		Pagerharjo	Binangun Pagerharjo
84	Kalibawang	Banjararum	Binangun Arta Arum
85		Banjarasri	Binangun Asri Sejahtera
86		Banjarharjo	Artha Sejahtera
87		Banjaroyo	Binangun Mitra Menoreh

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Lembaga ekonomi desa BUMDes yang telah terbentuk di 87 kalurahan tersebut, pembinaan dari pemerintah daerah berupa peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, pendampingan penyelesaian permasalahan BUMDes dan monitoring dan evaluasi laporan keuangan BUMDes. Dari hasil monitoring dan evaluasi laporan BUMDes dapat diketahui tingkat kesehatan BUMDes, meskipun laporan keuangan ini masih unaudited, namun bisa disajikan sebagai gambaran umum kondisi BUMDes. Kondisi BUMDes tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber data : Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambar 2.38

Kondisi BUMDes Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Menurut Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, rata-rata kalurahan (desa) di Kabupaten Kulon Progo sudah masuk dalam Desa maju menurut indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Indikator dari dimensi sosial yaitu dari kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Dari dimensi ketahanan ekonomi yaitu keragaman produksi masyarakat Kalurahan, ketersediaan pusat perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Sedangkan dari dimensi ekologi yaitu kualitas lingkungan dan potensi/ kerawanan bencana alam.

Indeks Desa Membangun tingkat kabupaten merupakan rata-rata Indeks Desa Membangun tiap kalurahan di Kabupaten Kulon Progo. Indeks Desa Membangun lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa -sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan Kementerian Desa

(Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Berikut perkembangan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 dari 87 kalurahan yang menggambarkan peningkatan kualitas kehidupan desa di Kabupaten Kulon Progo yang semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari jumlah desa kategori mandiri yang makin bertambah dari 4 desa pada Tahun 2020 menjadi 13 desa pada Tahun 2021, di sisi lain desa berkembang menurun dari 26 desa pada Tahun 2021 menjadi 9 desa pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 di Kabupaten Kulon Progo terdapat 9 desa berkembang, 33 desa mandiri dan 45 desa maju dan pada Tahun 2023 terdapat 52 desa Mandiri, 35 desa maju dan tidak ada desa berkategori Berkembang. Pada tahun 2024 terdapat 72 desa Mandiri dan 15 desa Maju, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.116
Perkembangan Jumlah Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Kategori IDM	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	4	13	33	52	72
Maju	40	48	45	35	15
Berkembang	43	26	9	0	0

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Salah satu Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah Indeks Desa sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa serta mendukung perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran. Indeks Desa ini akan menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM). Hasil pengukuran Indeks Desa sebagai Indeks Tunggal berupa status kemajuan dan kemandirian desa diakui secara nasional. Pengukuran menggunakan 6 Dimensi (Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa) dengan 48 Indikator. Berdasarkan 6 dimensi dan 48 indikator tersebut, setiap pertanyaan diinput datanya secara riil sesuai kondisi di lapangan untuk menghasilkan pengukuran Indeks Desa yang akurat. Lima Kategori (Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri). Implementasi Indeks Desa adalah memberikan kepastian status kemandirian desa, penyelarasan dokumen perencanaan pemerintah hingga evaluasi di tingkat pusat sampai ke desa, pemangkasan birokrasi terutama di tingkat desa dan wujud upaya implementasi Satu Data Indonesia, pengambilan kebijakan pembangunan Kalurahan yang berpihak kepada Kelurahan dan sebagai acuan dalam perencanaan bagi Kalurahan. Hasil pendataan Indeks Desa Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo adalah Kategori Mandiri ada 83 Kalurahan, Kategori Maju ada 4 Kalurahan.

Reformasi Kalurahan

Reformasi Kalurahan telah menjadi bagian dari Visi Misi yang tercantum di RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yakni "PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, dan pemanfaatan teknologi informasi". Dasar hukum dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan adalah Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan dan SK Gubernur DIY No. 185/KEP/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan. Progres

pelaksanaan di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu *Assesment* oleh Kapanewon sudah dilaksanakan kemudian Rencana Aksi Kalurahan sudah disusun oleh Kalurahan dan sudah di entri di Aplikasi SINKAL. Kegiatan Monev RB Kalurahan telah dilaksanakan setiap triwulan, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Badan Perwakilan Kalurahan (BPK) untuk penguatan pengawasan oleh masyarakat dan BPK oleh Dinas PMK Dalduk dan KB dibantu Biro Tapem Setda DIY pada bulan November 2024, pelaksanaan penguatan pengelolaan keuangan kalurahan oleh Dinas PMK Dalduk dan KB sebagai kegiatan tahunan, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kalurahan (PPID) oleh Dinas Kominfo. Sementara itu dua kegiatan utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima dan Pengembangan SAKIP belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu proses pengesahan peraturan bupati tentang Standar Pelayanan Publik di Kalurahan dan Peraturan Bupati tentang SAKIP Kalurahan. Untuk kegiatan utama lainnya selain Pelayanan Publik Prima dan Pengembangan SAKIP Kalurahan sudah dilaksanakan karena merupakan kegiatan rutim tahunan yang dilaksanakan oleh OPD Kabupaten, Kapanewon, maupun Kalurahan.

Progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan sampai Triwulan I Tahun 2025 adalah telah diterbitkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 60/C/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025. Dinas PMK Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo mengirimkan hasil assesmen tahunan kapanewon dan ditindaklanjuti oleh 12 Kapanewon untuk diinput ke Aplikasi Sinkal. Kemudian Dinas PMK Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo mengirimkan berkas pencairan BKK Reformasi Kalurahan ada empat Kalurahan yang sudah cair BKK Reformasi Kalurahan. Pelaksanaan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah dilaksanakan Bimtek Asesmen Tahunan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan RPMK selama tahun 2024, menginformasikan kegiatan RPMK selanjutnya, serta memberikan perintah ke kapanewon untuk mengisi hasil asesmen tahunan di Aplikasi Sinkal. Kemudian telah dilaksanakan verifikasi dokumen pencairan BKK Dais Reformasi Kalurahan. Kegiatan selanjutnya adalah monitoring secara daring melalui grup *Whatsapp* Kapanewon dan carik.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada awal tahun 2021 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah melakukan rebranding nama program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Bangga Kencana merupakan program untuk memberdayakan keluarga menjadi keluarga yang berkualitas (tentram, mandiri, dan bahagia) melalui upaya: 1) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), 2) Pengaturan Kelahiran, 3) Pembinaan Ketahanan Keluarga, 4) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, 5) Pengelolaan Kependudukan.

Upaya sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dimana batas minimal wanita 21 tahun dan untuk laki laki minimal 25 tahun masih perlu diintensifkan lagi karena masih banyak terdapat kasus pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo. Angka pernikahan usia dini tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117
Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024

Kapanewon	2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini	Jumlah Pernikahan	Jumlah Pernikahan Dini
Temon	264	11	280	4	296	1	150	9
Wates	176	2	186	3	147	9	287	2
Panjatan	263	7	225	0	212	8	194	4
Galur	195	4	197	1	171	5	158	0
Lendah	232	7	210	3	197	5	199	7
Sentolo	307	4	261	5	297	12	250	11
Pengasih	326	10	308	6	307	9	294	13
Kokap	251	1	208	2	208	5	173	2
Girimulyo	183	3	169	0	138	6	123	1
Nanggulan	132	4	143	4	174	3	146	5
Samigaluh	173	6	172	10	153	4	140	3
Kalibawang	170	6	144	3	130	5	135	5
Jumlah	2.672	65	2.503	41	2.430	72	2.249	62

Sumber data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya pengaturan kelahiran melalui program Keluarga Berencana dari tahun ke tahun semakin dipermudah dalam mendapatkan pelayanan. Kemudahan berupa layanan antar jemput calon akseptor KB, perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana bersama mitra kerja melalui kegiatan Bakti Sosial menjaring akseptor Kulon Progo (BAKSO MENTOR KBKu) dan ketersediaan alat dan obat di fasilitas kesehatan (faskes) terdekat selalu terjaga. Kepesertaan KB Aktif ditunjukkan dengan nilai prevalensi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Prevalensi tahun 2022 mengalami penurunan dari jumlah peserta KB aktif dari tahun 2021 sebanyak 38.068 PUS dari jumlah PUS sebanyak 61.576 atau sebesar 61.82%, dan persentase ini naik menjadi sebesar 69.26% di tahun 2023. Tahun 2024 Prevalensi kembali naik menjadi 68.24% dari PUS peserta KB Aktif sebanyak 43.399 dan Pasangan usia subur 63.599, sebagaimana terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2.118
Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PUS peserta KB Aktif (PA)	44.944	45.329	38.068	43.687	43.399
2	Pasangan usia subur (PUS)	59.893	60.840	61.576	63.079	63.599
Prevalensi		75,04	74,51	61,82	69,26	68,24

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Capaian Peserta KB Aktif (PA) pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 68.24%, di mana sebagian besar masih didominasi oleh KB wanita. Dari gambaran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa minat dan kesadaran kaum pria untuk menjadi peserta KB masih kurang, walaupun sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Apalagi dengan adanya pandemi covid 19 sejak tahun 2020 capaian peserta KB Pria metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) semakin turun, hal ini disebabkan

beberapa faskes tidak melayani KB MKJP dan dialihkan ke metode lain yaitu pil, suntik dan kondom. Selama Pandemi Covid-19 advokasi dan KIE dari rumah ke rumah menjadi andalan para kader untuk mendapatkan peserta KB Baru. Langkah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan reward bagi peserta KB pria metode MOP, masih belum dapat mengoptimalkan capaian target. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi calon peserta KB Pria utamanya berbasis kelompok/komunitas harus terus ditingkatkan.

PUS bukan peserta KB yang belum terlayani (unmet need) merupakan potensi bagi calon peserta KB. Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo terdapat unmet need sebesar 8.90%. Jumlah ini hampir mencapai target nasional sebesar 9%. Penyebab capaian ini antara lain PUS bukan peserta KB (unmet need) usia 45 tahun keatas sudah sulit diajak ber KB karena sudah merasa tidak produktif lagi padahal masih ada kemungkinan hamil. Sementara itu penurunan jumlah peserta KB Aktif tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah pasangan usia subur dan peningkatan bukan peserta KB (unmet need), sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.119

PUS Bukan Peserta KB (Unmet Need) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasangan usia subur (PUS)	Pasangan	59.895	60.840	61.576	63.079	63599
2	PUS bukan peserta KB (Unmet Need)	Orang	4.929	5.409	13.050	7.239	5.622
	- Ingin anak tunda (IAT)	Orang	2.289	2.406	8.934	1.809	1.374
	- Tidak ingin anak lagi (TIAL)	Orang	2.640	3.003	4.575	5.430	4.248
3	Persentase	Persen	8,23	8,89	21,19	11,48	8,90

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) serta Klinik Ketahanan Keluarga. Pembinaan kelompok bina keluarga dan ketahanan keluarga disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.120

Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok UPPKS	Kelompok	449	450	360	330	339
2	Jumlah Anggota UPPKS	Orang	9.395	8.989	3.324	5.129	5.815
3	Kelompok BKB	Kelompok	291	291	290	290	310
4	Kelompok BKR	Kelompok	135	135	139	142	144
5	Kelompok BKL	Kelompok	137	137	149	155	165
6	PIK KRR	Kelompok	62	63	63	64	81

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024

Cakupan kepesertaan keluarga yang mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL) sangat dinamis perkembangan tiap tahunnya menandakan kepesertaan anggota keluarga dalam mengikuti kegiatan tersebut juga dinamis. Selama masa pandemi covid kegiatan di kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS sempat berhenti beberapa kali, menyesuaikan kondisi saat itu, Namun seiring berjalannya waktu kegiatan dapat kembali berjalan dengan menerapkan prokes serta dalam kelompok kecil dan waktu yang singkat.

Dari tabel di atas dapat diketahui adanya penurunan jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok UPPKS. Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan dengan mengeluarkan anggota yang sudah tua dan tidak aktif dalam kegiatan dari kelompok dan juga penurunan minat dari peserta KB aktif dalam mengikuti kelompok UPPKS. Demikian juga untuk data kelompok BKB, BKR, dan BKL. Hasil dari kegiatan PIK Remaja adalah terwujudnya remaja GenRe (Generasi Berencana) yaitu remaja yang dapat mempraktikan pola hidup sehat, seperti: terhindar dari resiko pergaulan bebas, NAPZA, HIV/AIDS, menunda usia perkawinan sampai dengan usia ideal yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, bercita-cita dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, memiliki life skill atau keterampilan hidup dan remaja GenRe harus bisa dalam model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Pemberdayaan ekonomi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kelompok UPPKS. Tujuan dibentuknya kelompok UPPKS adalah upaya peningkatan pendapatan keluarga menuju keluarga sejahtera. Pembinaan kelompok UPPKS dengan melalui pelatihan keterampilan dan manajemen pengelolaan kelompok serta mengupayakan kemudahan dalam pelayanan pemberian kredit kencana dari Bank Pasar Kulon Progo, Kredit Asosiasi Kelompok UPPKS "AKU Sejahtera" dari Perwakilan BKKBN DIY, kemudahan dalam memperoleh SP-IRT, serta mengikuti pameran baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta pendampingan dalam pelatihan keterampilan.

Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS semakin menurun baik jumlah maupun persentasenya. Hal ini dikarenakan sudah semakin banyaknya program dari sektor lain yang turut menyasar keluarga. Namun demikian kualitas anggota UPPKS yang ada adalah yang terbaik, karena anggota kelompok yang sudah tidak aktif lagi akan dikeluarkan. Dengan demikian, yang terdaftar sebagai anggota adalah benar benar aktif sebagai anggota kelompok UPPKS.

Dalam rangka penguatan program Bangga Kencana, sejak tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo telah mengembangkan Kampung KB sebagai basis kegiatan program Bangga Kencana secara lengkap mulai dari PIK Remaja, BKB, BKR, BKL, UPPKS dan sektor pembangunan lainnya di tingkat kampung (Pedukuhan/Desa). Hingga tahun 2018, di Kabupaten Kulon Progo telah terbentuk 23 Kampung KB (10 Kampung KB di antaranya di desa stunting). Di tahun 2019 jumlah Kampung KB bertambah 3 lokasi, yakni Desa Banjararum, Desa Gulurejo dan Desa Sukoreno. Untuk tahun 2020 hingga 2022 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terpaksa dibatasi dan belum ada penambahan kampung KB. Pada tahun 2022 terbit Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang ditindaklanjuti dengan Perbup 77 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas. Amanat dalam peraturan perundangan tersebut adalah setiap Kalurahan/Kelurahan membentuk Kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilaksanakan melalui Program Bangga Kencana

serta pembangunan sektor terkait. Pembentukan Kampung KB diawali dengan pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja.

Tabel 2.121

Jumlah Kampung KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Kapanewon	Jumlah
1	Temon	15
2	Wates	8
3	Panjatan	11
4	Galur	7
5	Lendah	6
6	Sentolo	8
7	Pengasih	7
8	Kokap	5
9	Girimulyo	4
10	Nanggulan	6
11	Samigaluh	7
12	Kalibawang	4
Jumlah		88

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Kampung KB, di setiap Kampung KB telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung KB yang disahkan dengan Keputusan Bupati. Untuk Kampung KB yang pertama (Kampung KB Tegiri 2, Desa Hargowilis) disahkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo No. 102/A/2016. Sementara untuk 2017 Pokja Kampung KB dikuatkan dengan Keputusan Bupati 355/A/2017. Sedangkan untuk 2018 yang menysasar pada Desa Stunting juga dikuatkan dengan Keputusan Bupati No 358/A/2018. Selanjutnya dalam rangka memperkuat penanganan stunting di Kulon Progo, Bupati Kulon Progo telah menerbitkan Peraturan Bupati No 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah.

Pada Tahun 2020 diterbitkan Keputusan Bupati Kulon Progo No. 362/A/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Kulon Progo, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri no 843.4/2879/SJ Tahun 2020 tentang intensifikasi kampung keluarga berkualitas. Sehingga yang semula kampung Keluarga Berencana berganti menjadi Kampung Berkualitas. Adapun tujuan dibentuknya kampung berkualitas adalah untuk penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu hamil/melahirkan dan kematian bayi, menurunkan angka unmet need, meningkatkan kepesertaan keluarga berencana, serta menurunkan angka kemiskinan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui kampung Keluarga Berkualitas (kampung KB).

Di Kampung KB, selain dikembangkan berbagai kegiatan program Bangga Kencana bersama lintas sektor juga dikembangkan Rumah Data Kependudukan. Rumah Data Kependudukan yang berfungsi sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah Kampung KB. Rumah Data Kependudukan yang kemudian dikenalkan pada masyarakat luas sebagai “Rumah Dataku” tersebut dipastikan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di lokasi Kampung KB.

Di Kabupaten Kulon Progo saat ini telah memiliki 10 Rumah Data Kependudukan, yakni di Kampung KB Kalurahan Hargowilis, Kalurahan Kalirejo, Kampung KB Kalurahan Triharjo, Kampung KB Kalurahan Kedungsari, Kampung KB Kalurahan Sendangsari, Kampung KB Kalurahan Gerbosari dan Kampung KB Kalurahan Kaliagung, Kalurahan Donomulyo, Kampung KB Kalurahan Giripurwo dan Kampung KB Kalurahan Bugel.

Selanjutnya dalam rangka mensosialisasikan program Bangga Kencana pada masyarakat khususnya pada siswa di sekolah, telah dibentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Pojok Kependudukan yang berbasis di SMP dan SMA. Di Kabupaten Kulon Progo saat ini baru terbentuk 2 (dua) Sekolah Siaga kependudukan (SSK) yakni di SMPN 1 Galur yang dibentuk pada tahun 2018 dan SMAN 1 Pengasih yang dibentuk pada tahun 2019. Di masing-masing SSK selain telah mengintegrasikan materi Pendidikan kependudukan dalam mata pelajaran, juga telah membentuk pojok kependudukan yang menempati satu ruang tertentu di sekolah yang bersangkutan. Sosialisasi program Bangga Kencana juga dilakukan melalui kelompok Saka Kencana Krida Kependudukan. Di Kulon Progo, pangkalan Saka Kencana tersebut ada di SMAN 1 Pengasih.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat terus mengalami kenaikan dengan pertambahan terbesar terjadi pada kendaraan roda dua. Adapun perkembangan kendaraan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.122

Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Jenis Kendaraan	TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Sepeda Motor Roda 2 dan 3	164.663	166.478	172.974	177.063	182.188	Unit
a.	Sepeda motor roda 2 (plat hitam)	163.081	164.883	171.380	175.527	180.718	Unit
b.	Sepeda motor roda 3 (plat hitam)	366	364	388	340	314	Unit
c.	Sepeda motor roda 2 (plat merah)	1.197	1.202	1.184	1.167	1.127	Unit
d.	Sepeda motor roda 3 (plat merah)	19	29	22	29	29	Unit
2.	Mobil Penumpang Bukan Umum (plat hitam)	15.886	16.695	17.686	18.234	18.987	unit
a.	Sedan	1.804	1.717	1.739	1.652	1.578	unit
b.	Jeep	730	768	780	799	832	unit
c.	Minibus < 8	13.220	14.086	15.038	15.631	16.420	unit
d.	Mikrobus 9 - 10	132	124	129	152	157	unit
e.	Bus > 30	-	-	-	-	-	unit
3.	Mobil Barang Bukan Umum (plat hitam)	5.296	5.427	5.656	5.601	5.644	unit
a.	Pick Up	3.900	4.058	4.267	4.236	4.310	unit
b.	Truck	1.396	1.369	1.389	1.365	1.334	unit
4.	Mobil Penumpang Umum (plat kuning)	196	173	181	189	193	unit

No	Jenis Kendaraan	TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
a.	Sedan	-	-	-	-	-	unit
b.	Jeep	-	-	-	-	-	unit
c.	Minibus < 8	30	31	33	38	39	unit
d.	Mikrobus 9 - 10	158	133	137	137	134	unit
e.	Bus > 30	8	9	11	14	20	unit
5.	Mobil Barang Bukan Umum (plat kuning)	415	394	407	384	403	unit
a.	Pick Up	13	12	12	11	14	unit
b.	Truck	402	382	395	373	389	unit
6.	Mobil Penumpang Umum (plat merah)	273	282	297	288	297	unit
a.	Sedan	1	1	2	2	1	unit
b.	Jeep	6	9	8	4	8	unit
c.	Minibus < 8	259	262	273	269	272	unit
d.	Mikrobus 9 - 10	7	10	9	9	10	unit
e.	Bus > 30	0	0	5	4	6	unit
7.	Mobil Barang Umum (plat merah)	61	67	69	75	66	unit
a.	Pick Up	43	44	43	51	41	unit
b.	Truck	18	23	26	24	25	unit
JUMLAH		186.790	189.516	197.270	201.834	207.778	unit

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas, berdampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Peningkatan kepadatan lalu lintas harian rerata (LHR) juga akan terjadi sebagai akibat beroperasinya Bandara YIA dan fasilitas pendukungnya. Hal ini perlu mendapat perhatian agar potensi ini tidak memperbesar angka kecelakaan lalu lintas di Kulon Progo.

Angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.131 di bawah. Lokasi kecelakaan yang paling sering terjadi di Ruas Jalan Jogja-Wates Km 19 – 20 Sukoreno Kapanewon Sentolo dan Jalan Wates – Purworejo Km 8 – 11 Kapanewon Temon. Penyebab kecelakaan paling banyak didominasi oleh *human error*, minimnya keterampilan, kelelahan, rendahnya etika berkendara serta kurangnya pemahaman akan aturan berlalu lintas.

Tabel 2.123

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumah Kecelakaan	kejadian	592	615	958	877	870
2	Kerugian Materiil	rupiah	106.400.000	196.150.000	273.665.000	559.225.500	825.000.000
3	Jumlah Korban	orang	957	1.064	1.625	1.494	1.543

- Meninggal	orang	34	68	89	62	74
- Luka Berat	orang	1	3	0	1	2
- Luka Ringan	orang	922	993	1.536	1.431	1.467

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dan Polres Kulon Progo, 2025

Sementara itu terdapat titik-titik rawan kecelakaan lalu-lintas di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang harus diwaspadai. Pada lokasi tersebut tercatat sering terjadi kecelakaan. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.124

Titik Rawan Kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo

No	Titik Rawan Kecelakaan
1.	Simpang 3 barat Jalan Bantar
2.	Simpang 3 utara SMPN 2 Sentolo
3.	Simpang 3 arah Perumahan Pongangan s/d S3 Ngeseng, Sentolo
4.	Depan SMPN 1 Sentolo
5.	Simpang 3 Dudukan Sukoreno Sentolo
6.	Simpang 3 Lapangan Sukoreno Sentolo
7.	Wora-wari, Kalimenur, Sentolo
8.	Depan SPBE Sentolo
9.	Depan SPBU Kalimenur, Sentolo
10.	Depan SMPN 2 Pengasih, Kedungsari, Pengasih
11.	SPBU Ngramang Pengasih
12.	BBVet s.d. SAMSAT baru Wates
13.	Simpang 3 Gadingan Wates
14.	SPBU Wates
15.	SMPN 5 Wates s.d. Kantor KPPN Wates
16.	Simpang 3 Dalangan
17.	Pasar Temon, Depan Kantor Kecamatan Temon
18.	Simpang 3 Mlangsen Temon
19.	Simpang 3 Pos PJR Congot
20.	Simpang 3 Sogan Wates (sudah dipasang APILL)
21.	Depan Bandara YIA Temon (sudah dipasang APILL)
22.	Jln Daendeles (Letter S Garongan)
23.	Jln Daendeles (Simpang 3 Ngremang)
24.	Jln Kepek-Kalimanggis
25.	Simpang 4 Boro, Galur

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Jalan Kota, volume lalu-lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas biasa diukur dengan VC Ratio atau Volume Capacity Ratio, yaitu perbandingan antara volume lalu-lintas dengan kapasitas jalan, semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan

tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Dari 30 ruas jalan kabupaten yang diukur VC Rationya rata-ratanya adalah 0,10. Angka VC Ratio semakin kecil berarti semakin tinggi tingkat pelayanan jalannya. 30 ruas jalan kabupaten yang diukur terletak di Kapanewon Wates, Galur, Kokap, Panjatan, Lendah, Temon, dan Pengasih tersebut memiliki tingkat pelayanan jalan rata-rata A. Tingkat pelayanan jalan didasarkan pada faktor-faktor: kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, dan keamanan. Nilai A berarti: arus bebas, volume rendah, dan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki, sedangkan nilai B berarti: arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, volume menggunakan jalur untuk luar kota, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125

VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
I Kapanewon Wates			
1.	Jl. Tunjungan	0,14	A
2.	Jl. Kulwaru-Kuwirun	0,09	A
3.	Jl. Toyan-Granti	0,13	A
II. Kapanewon Galur			
1.	Tegal Buret-Pasar Sewu Galur	0,15	A
2.	Cangakan-Ngreman	0,16	A
3.	Tirtorahayu-Karangsewu	0,10	A
4.	Prembulan-Boro	0,14	A
5.	Karangsewu-Pathuk	0,09	A
III. Kapanewon Kokap			
1.	Hargorejo-Gunung Pentul	0,06	A
2.	Klepu-Anjir	0,07	A
3.	Pripih-Jurangkah	0,12	A
4.	Kokap-Pripih	0,08	A
IV. Kapanewon Panjatan			
1.	Cicikan-Pantai Bugel	0,08	A
2.	Bugel-Karangwuni	0,10	A
3.	Cerme-Demangan	0,09	A
4.	Gotakan-Cerme	0,11	A
V. Kapanewon Lendah			
1.	Botokan-Bangeran	0,09	A
2.	Sidorejo-Sumur Muling	0,08	A
3.	Diran-Karangasem	0,06	A
4.	Sedan-Diran	0,06	A
5.	Sudo-Kasih	0,07	A
VI Kapanewon Temon			
1.	Jangkaran-Pantai Congot	0,12	A
2.	Demen-Girigondo	0,10	A
3.	Palihan-Glaheng	0,09	A
4.	Weton-Dumpoh	0,08	A
5.	Pripih-Sangon	0,08	A
VII Kapanewon Pengasih			
1.	Kalinongko-Cerme	0,13	A

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
2.	Clereng-Girinyono	0,14	A
3.	Milir-Krembangan	0,16	A
4.	Margosari-Kepek	0,15	A

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126

**Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2020-2024**

No.	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada 2024	Satuan	Yang tersedia (%) 2024
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	1.134	1.196	1.270	1.392	1440	4.298	buah	33,50
2	Cermin Tikungan	40	60	72	111	121	110	Unit	110
3	Traffic Light (APILL)	23	23	24	1	26	22	Unit	118,18
4	Warning Light	1	1	15	5	1	15	Unit	6,66
5	Guard Rail (Pagar Pengaman)	3.672	3.872	4.192		4.912	30.988	meter	15,85
6	Lampu Penerangan Jalan Umum	2.840	3.447	3.542	3.687	3.997	19.122	Titik	20,90

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kewenangan provinsi sedangkan jalan kalurahan (desa) yang menjadi kewenangan kalurahan belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di Dinas Perhubungan. Kebutuhan penerangan jalan untuk jalur jalan kewenangan kalurahan juga sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan penerangan Jalan Kalurahan bisa dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, PLN dan masyarakat pengguna penerangan jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada. Beberapa upaya yang dicoba dikembangkan adalah menginisiasi kemungkinan penyelenggaraan pelayanan LPJU dengan mekanisme KPBU. Namun hingga saat ini penyelenggaraan pelayanan LPJU melalui mekanisme KPBU tersebut belum terealisasi karena masih dalam tahap kajian.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo secara topografis merupakan wilayah yang banyak memiliki perbukitan sehingga kontur jalan yang ada juga mengikuti kondisi tersebut sehingga terdapat banyak tanjakan maupun tikungan. Cermin tikungan sangat dibutuhkan pada kondisi jalan yang berkelok untuk dapat membantu pengemudi melihat situasi atau kendaraan dari arah yang berlawanan. Jumlah cermin tikungan yang ada masih sangat terbatas dan perlu untuk ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada wilayah rawan kecelakaan.

Dalam rangka memberikan informasi/panduan bagi pengguna jalan, marka jalan merupakan elemen perlengkapan jalan yang juga penting keberadaannya. Fungsi marka jalan secara umum adalah untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas di jalan, serta memberikan batasan daerah untuk kepentingan lalu lintas tersebut. Gap antara kebutuhan akan marka dan marka yang ada secara eksisting masih sangat tinggi sehingga perlu dilakukan percepatan untuk pemenuhannya.

Dalam lalu lintas jalan, salah satu perlengkapan jalan yang penting dan sangat dibutuhkan terutama persimpangan ruas jalan yang volume kendaraannya sudah tinggi yaitu lampu lalu lintas (APILL). Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. Selain APILL, warning light juga diperlukan untuk memberikan peringatan bagi pengendara kendaraan bermotor agar berhati-hati.

Sebagai konsekuensi dari kontur jalan di Kabupaten Kulon Progo yang sebagian besar berada pada daerah perbukitan, pagar pengaman jalan (*Guardrail*) sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan agar tidak jatuh ke dalam tebing / jurang yang berada di kanan kiri jalan. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pengaman jalan yang ada masih jauh dibawah jumlah ideal yang dibutuhkan karena baru tersedia sekitar 15% dari jumlah kebutuhan.

Selain infrastruktur jalan, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal atau halte. Kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan terminal adalah Terminal Penumpang Tipe C yang saat ini jumlahnya ada lima. Untuk menunjang fungsi terminal dibutuhkan halte sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Untuk menunjang keselamatan lalu lintas jalan terutama pada malam hari dibutuhkan lampu penerang jalan umum (LPJU). Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan kewenangan provinsi sedangkan jalan kalurahan yang menjadi kewenangan kalurahan belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU dari Dinas Perhubungan. Kebutuhan LPJU yang merupakan kewenangan kalurahan (PJU Lingkungan) dilakukan pemenuhannya dengan menggunakan alokasi anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pada Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU).

Secara umum, perlengkapan dan prasarana jalan yang ada di Kabupaten Kulon Progo masih perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut, selain dari alokasi anggaran APBD Kabupaten Kulon Progo juga diharapkan dapat dipenuhi dari sumber pendanaan yang lain seperti Dana Keistimewaan, APBD DIY, juga dari APBN melalui satker Kementerian Perhubungan maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Jumlah penumpang angkutan umum mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun jumlah penumpang angkutan umum dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127

Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Moda	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penumpang AKDP	orang/th	98.591	106.538	12.070	10.107	25.935
2	Penumpang AKAP	orang/th	21.784	14.271	287.878	262.345	184.744
3	Penumpang Angkutan Pedesaan	orang/th	94.738	92.968	82.525	73.560	61.220
Jumlah		orang/th	215.113	213.777	382.473	346.012	271.899

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025, diolah

Dari tabel di atas tampak bahwa terjadi penurunan baik jumlah penumpang baik AKAP, maupun angkutan perdesaan dikarenakan kondisi Pandemi yang menyebabkan turunnya pergerakan masyarakat. Kondisi rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak pada lesunya usaha angkutan umum. Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.128

Trayek dan Jumlah Kendaraan Umum yang Beroperasi

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	A 1	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-Mlangsen- Pangkalan/Cogot-Jangkarana-PP (Kop. Manunggal, Kop. Harapan)	15	20	30	34	32
2	2	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-BendunganPleret-Karangwuni-Glagah-PP (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	-
3	3	Term.Wates-Dikbud-Kulur-Jombokan-Kaligintung-Demen-Glagah-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	-
4	4	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Kulwaru-Jetis-PP	-	-	-	-	-
5	B 1	Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bugel-Siliran-Brosot-PP (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	-
6	2	Term.Wates-Giripeni-Kedung Pring-Bendungan-Nagung-Cangkalan-Trayu- Karangsewu-Tegal Buret-Brosot-Trisik-PP	-	-	-	-	-
7	3	Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng-Nganggrung- Degolan-Lendah-PP	-	-	-	-	-
8	4	Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-Kenteng-Nganggrung- Srikayangan-Gulurejo-Ngentakrejo-PP (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	-

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	2020	2021	2022	2023	2024
9	C 1	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-Kutogiri-Plelen PP (Kop.Adhikarta,) √	-	-	-	-	-
10	2	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-Kalibiru/Kalingiwo-PP (Kop. Adhikarta) √	-	-	-	-	-
11	3	Term.Wates-Karangnongko-Pengasih-Clereng-Kedungrejo-PP (Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh)	-	-	-	-	-
12	D 1	Term.Wates-Tambak-Toyan-Siluwo-Temon-Mlangsen-Pripih-Sangon-PP (Kop. Adhikarta, Kop. Menoreh)	-	-	-	-	-
13	2	Term.Wates-Tambak-Jombakan-Kulur-Girigondo-Kebonrejo-PP (Kop. Menoreh, Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	-
14	3	Term.Wates-Dalangan-Jombakan-Kokap-PP	-	-	-	-	-
15	4	Term.Wates-SGO-Teteg Barat-Beji-Gemulung-Klepu-Kokap-PP (Kop. Mandiri) √	12	6	12	13	-
16	5	Term.Wates-Beji-Gemulung-Sungapan-Hargotirto-PP (Kop. Yosawa) √	-	-	-	-	-
17	6	Term.Wates-Tunjungan-Ringinardi-Gemulung-Sermo-Sidowayah-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	-
18	7	Term.Wates-Sendang-Anjir-Kliripan-Hargorejo-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	-
19	E 1	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-Tanjungharjo-Ngringin- Sribit-Girimulyo-PP (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	-
20	2	Term.Wates-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-PP (Kop. Menoreh)	2	2	-	-	-
21	3	Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-Girimulyo-Gua Kiskendo-PP (Perorangan)	-	-	-	-	-
22	4	Term.Wates-Sentolo-Nanggulan-Dekso-Samigaluh-PP (Kop. Yosawa)	-	-	-	-	-
23	F 1	Sentolo-Ngelo-Tuksono-Ngentakrejo-Brosot-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	-
24	2	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Jagalan-PP (Kop. Adhikarta)	8	6	11	-	-
25	3	Donomulyo-Sentolo-Sudu-Tanjungharjo-Ngringin-Sribit Girimulyo-Kenteng Nanggulan-PP (Kop. Asri)	-	-	-	8	10
26	4	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Keji-Sidoharjo-Gorolangu-PP	-	-	-	-	-
27	5	Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Piton-Boro-Gorolangu-PP (Kop. Menoreh)	-	-	-	-	-
28	6	Kenteng Nanggulan-Pendoworejo-Banjarsari-Plono-PP/Perintis (Kop. Adhikarta)	-	-	-	-	-
29	7	Sentolo-Dudukan-Nyonyol-PP	-	-	-	-	-
30	8	Term.Wates-Ksatrian-Panjatan-Kanoman-PP	-	-	-	-	-
31	9	Term.Wates-Dayakan-Milir-Krembangan-Cerme-Bendungan-PP (Kop. Adhikarta) √	-	-	-	-	-
32	10	Term.wates-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-Mlangsen-Pripih-Tangkisan-PP(Kop. Manunggal)	-	-	-	-	-
33		Sentolo-Brosot-PP (Kop. Tugu Potlot)	-	-	-	-	-
Jumlah			37	34	53	56	54

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Selain trayek di atas, terdapat trayek pendukung Bandara berupa Shuttle Damri. Adapun rute dan pelayan shuttle Damri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129

Rute Layanan Shuttle Damri Pendukung Bandara Internasional Yogyakarta

Layanan Shuttle Bandara	
1	Imogiri – Terminal Palbapang - YIA
2	Stasiun Wojo - YIA
3	Grand Inna Hotel, Jogja - YIA
4	Hotel Sahid Jaya - YIA
5	Terminal Condong Catur - YIA
Pool Damri Yogyakarta - YIA	
1	Ambarketawang – YIA

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah).

Dalam rangka memenuhi prasarana perhubungan maka diperlukan terminal yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping itu juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996).

Tabel 2.130

Data Terminal di Kabupaten Kulon Progo

No.	Terminal	Fungsi	Luas	Kondisi
1	Wates	Tipe B	7.910	Telah menjadi kewenangan DIY
2	Brosot	Tipe C	700	Baik
3	Sentolo	Tipe C	1.000	Cukup baik
4	Kenteng	Tipe C	1.664	Cukup baik
5	Jagalan	Tipe C	1.000	Baik
6	Jangkar			Ditutup

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Mengenai kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 132 Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang yaitu fasilitas utama dan penunjang, prosentase jumlah fasilitas yang ada masih jauh dibawah jumlah fasilitas yang ideal dimana semua Terminal Tipe C memerlukan rehabilitasi sarana dan prasarana ruang tunggu. Untuk terminal Tipe C Kenteng, selain rehabilitasi sarana dan prasarana ruang tunggu juga diperlukan rehabilitasi Pos TPR.

Dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo, khususnya terkait jaringan transportasi darat, nampak jelas bahwa wilayah kabupaten dilintasi oleh jaringan rel kereta api. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, hingga tahun 2024, terdapat 27 perlintasan sebidang antara jaringan jalan dan rel kereta api. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 lokasi telah ditutup, 3 lokasi dijaga dinas perhubungan, 2 lokasi dijaga PT KAI sedangkan sisanya tidak dijaga. Upaya penutupan perlintasan sebidang terus dilakukan, yang terakhir pada tahun 2024 penutupan dilakukan di Hargorejo, Kokap yang merupakan perlintasan jalur kereta api dengan ruas jalan kampung.

Perlintasan sebidang Teteg Wetan telah dilakukan penutupan pada tahun 2022 dan telah dilakukan akses pengganti yaitu Underpass Kemiri. Sedangkan untuk perlintasan Teteg Kulon (Jln Moh

Dawam) akan dilakukan sekaligus dengan perlintasan di Dukuh Karang Sari, setelah selesai pembangunan flyover Triharjo- RSUD Wates yang saat ini sedang dalam proses review DED dan dokumen perencanaan pengadaan tanah telah disusun. Rencana pembiayaannya akan diusulkan untuk dapat didanai dari dana keistimewaan DIY, sebagai perwujudan dari SRS Pusat Kota Wates.

Tabel 2.131

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024

No.	Jenis	Satuan	Jumlah				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkutan Barang	unit	5.965	5.983	5.871	5.413	5.146
2	Angkutan Penumpang	unit	384	370	334	413	343

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Selain faktor sarana dan prasarana jalan, kendaraan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga kelancaran lalu lintas jalan. Dalam rangka meminimalkan resiko kecelakaan lalu lintas, kelaikan kendaraan terutama kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang perlu untuk diuji secara berkala dengan tepat waktu. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan, sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan, saat ini UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan migrasi dari penggunaan buku hasil uji manual menjadi penggunaan smart card yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Kementerian Perhubungan. Mulai tahun 2024 pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak dipungut biaya sesuai yang diamanatkan Undang-undang no 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari Tabel Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024 diketahui bahwa jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 2022, 2023, dan 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya untuk angkutan barang, dan untuk angkutan penumpang. Penurunan jumlah kendaraan yang diuji disebabkan antara lain karena: kesadaran pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang yang masih kurang akan keselamatan angkutan disamping itu kegiatan pemeliharaan gedung pelayanan pada akhir tahun 2024 sehingga menyebabkan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan tutup selama 20 hari, hal ini tentu mengurangi jumlah kendaraan yang akan diuji.

Dampak Pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di sektor perhubungan antara lain penurunan omzet pelaku usaha bidang transportasi. Omzet kendaraan online, ojek pangkalan, dan tukang becak turun 60%-70% paska Pandemi Covid-19. Penurunan aktivitas operasional sektor transportasi penurunan omzet pelaku usaha bidang transportasi. Omzet kendaraan online, ojek pangkalan, dan tukang becak turun 60%-70%. Penurunan aktivitas operasional sektor transportasi, dampak terbesar dirasakan oleh kelompok rentan yaitu pekerja di sektor transportasi darat (tukang parkir, driver kendaraan online, driver ojek pangkalan, tukang becak). Penghasilan yang sangat menurun membuat kelompok ini sangat perlu mendapatkan bantuan pemerintah.

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan dan penguasaan teknologi komunikasi dan informatika, maka pemerintah sebagai regulator maupun aktor dalam pembangunan perlu mengatur dan mengendalikan khususnya tersedianya infrastruktur menara telekomunikasi sebagai pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Cakupan layanan menara telekomunikasi pada tahun 2019–2024 belum memenuhi zona *cell plan*. Hal tersebut diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.132

Cakupan Layanan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah zona terisi dalam <i>cell plan</i> menara telekomunikasi	64	72	98	98	99
Jumlah zona seharusnya dalam <i>cell plan</i> menara telekomunikasi	120	118	140	140	140
Persentase (%)	58,18	61,02	70	70	70,71

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi perijinan berdasarkan verifikasi titik koordinat calon lokasi menara oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan di lapangan dan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau. Tuntutan tersebut terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat. Kecepatan akses informasi masih terkendala dengan keterbatasan ketersediaan bandwidth. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo kapasitas bandwidth terus mengalami peningkatan, Pada Tahun 2019 ketersediaan bandwidth telah meningkat menjadi 250 Mbps, dan pada Tahun 2020 kapasitas bandwidth telah mencapai 2.000 Mbps, pada Tahun 2021 kapasitas bandwidth sama 2.000 Mbps. Pada tahun 2022 berhasil dipertahankan pada 2.000 Mbps. pada tahun 2023 ini kapasitas Bandwidth meningkat menjadi 2.200 Mbps. Dan pada tahun 2024 kapasitas Bandwidth tetap 2.200 Mbps

Tabel 2.133

Kapasitas Bandwidth Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Tahun	Kapasitas Bandwidth (Mbps)
2020	2.200
2021	2.000
2022	2.000
2023	2.200

Tahun	Kapasitas <i>Bandwidth</i> (Mbps)
2024	2.200

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dengan kondisi yang ada dan melihat adanya kebutuhan pelayanan internal maupun kepada masyarakat, maka direncanakan untuk secara bertahap akan dipenuhi dengan pengadaan jaringan Fiber Optik maupun peningkatan kapasitas *Bandwidth*.

Tabel 2.134

Cakupan Jaringan Internet Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Infrastruktur Jaringan	Kepemilikan Aset
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
5	Inspektorat Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
6	Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
	Gedung Arsip	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
10	Dinas Perdagangan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
11	Dinas Pariwisata	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
12	Dinas Lingkungan Hidup	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
14	Satuan Polisi Pamong Praja	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

No	Perangkat Daerah	Infrastruktur Jaringan	Kepemilikan Aset
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
17	Dinas Pertanian dan Pangan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
	UPTD BLK	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
19	Dinas Perhubungan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
	UPTD PKB	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
20	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
22	Dinas Kebudayaan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
24	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
27	Sekretariat Daerah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
28	Sekretariat DPRD	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
29	Rumah Dinas Bupati	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
30	Rumah Dinas Wakil Bupati	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
31	Kapanewon Wates	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
32	Kapanewon Galur	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo

No	Perangkat Daerah	Infrastruktur Jaringan	Kepemilikan Aset
33	Kapanewon Girimulyo	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
34	Kapanewon Kalibawang	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
35	Kapanewon Kokap	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
36	Kapanewon Lendah	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
37	Kapanewon Nanggulan	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
38	Kapanewon Panjatan	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
39	Kapanewon Samigaluh	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
40	Kapanewon Pengasih	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
41	Kapanewon Sentolo	Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
		Metrolink Fiber Optik	ISP
42	Kapanewon Temon	Metrolink Fiber Optik	ISP
		Wireless	Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo
43	RSUD Wates	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
44	RSUD Nyi Ageng Serang	Metrolink Fiber Optik	ISP

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.135

Cakupan Jaringan Internet Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Jumlah Kalurahan	Infrastruktur Jaringan	Kepemilikan Aset
1.	17	Fiber Optik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
2.	71	Wireless	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2024

Untuk infrastruktur jaringan internet sudah terpenuhi di seluruh perangkat daerah meskipun belum maksimal. Jaringan internet di perangkat daerah lingkup kabupaten sudah menggunakan infrastruktur jaringan fiber optik, akan tetapi ada juga yang masih berupa Metrolink Fiber Optik, yaitu di RSUD Nyi Ageng Serang dan di 12 kapanewon. Pada 12 kapanewon, infrastruktur jaringan yang digunakan berupa Metrolink Fiber Optik dan wireless. Metrolink Fiber Optik digunakan untuk akses pelaksanaan kegiatan di sekretariat, sedangkan wireless digunakan untuk jaringan SIAK dan distribusi jaringan internet kalurahan.

Jaringan internet desa di Kabupaten Kulon Progo sudah terjangkau pada 66 kalurahan berupa wireless yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo DIY, 20 kalurahan sewa pihak ketiga, dan ada 1 kalurahan dan 1 kelurahan yang sudah terdapat jaringan internet berupa jaringan fiber optic dan wireless yang terkoneksi dari Dinas Kominfo.

Selain ketersediaan bandwidth, kecepatan dan kelancaran akses informasi pada perangkat daerah juga dipengaruhi oleh perangkat jaringan Local Area Network (LAN) yang digunakan oleh perangkat daerah banyak yang belum memenuhi spesifikasi minimal sehingga masih diperlukan upgrade perangkat jaringan internet.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan mutu pelayanan publik dan informasi yang cepat, tepat dan terpadu, perlu adanya kerangka acuan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (e-Government) untuk menuju implementasi konsep smart city di Kabupaten Kulon Progo. Tahapan implementasi pengembangan komponen TIK menuju smart city dilakukan secara paralel dan fleksibel sesuai kebutuhan dan potensi lokal daerah, meliputi: penataan sumber daya manusia, organisasi, dan teknologi berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Implementasi smart city Kabupaten Kulon Progo harus memperhatikan karakteristik potensi lokal pengembangan kabupaten cerdas. Implementasinya dilakukan secara bertahap, paralel, dan fleksibel sesuai kebutuhan dan prioritas daerah yang mencakup semua urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan pilihan yang masing-masing urusan pemerintahan tersebut didukung oleh unsur penunjang urusan pemerintahan.

Dalam rencana induk (*masterplan*) *smart city*, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terkait pembangunan dan pengembangan Smart City harus sejalan dengan rencana pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara umum. Implementasi Smart City terdiri dari enam komponen yaitu: tata kelola birokrasi (*smart governance*), pemasaran daerah (*smart branding*), perekonomian (*smart economy*), ekosistem permukiman penduduk (*smart living*), lingkungan masyarakat (*smart society*), dan pemeliharaan lingkungan (*smart environment*).

Implementasi gagasan kabupaten cerdas (*smart city*) memerlukan monitoring dan evaluasi berkala agar lebih terarah dan berkelanjutan. Untuk itu Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo mengevaluasi perkembangan implementasi *smart city*. Berikut disampaikan hasil evaluasi Smart City tahun 2022.

Tabel 2.136

Capaian Dimensi dan Sub Dimensi Smart City Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Dimensi dan Sub Dimensi Smart City	Jumlah Program	Jumlah Realisasi	Jumlah belum Realisasi	Realisasi (%)
1	<i>Smart Governance meliputi:</i>	20	19	1	95.00
	- Pelayanan publik (Public Service)				
	- Manajemen birokrasi yang efisien (Bureucracy)				
	- Efisien kebijakan publik (Public Policy)				
2	<i>Smart Branding meliputi:</i>	6	6	0	100.00
	- Tourism Branding				
	- Business Branding				
	- City Appearance Branding				
3	<i>Smart Economy meliputi:</i>	14	12	2	85.71
	- Industri berdaya saing (Industry)				
	- Kesejahteraan rakyat (Welfare)				
	- Transaksi keuangan (Transaction)				
4	<i>Smart Living meliputi:</i>	16	13	3	81.25
	- Harmonisasi tata ruang (Harmony)				
	- Pelayanan kesehatan (Health)				
	- Ketersediaan sarana transportasi (Mobility)				
5	<i>Smart Society meliputi:</i>	8	7	1	87.50
	- Interaksi masyarakat yang efisien (community)				
	- Ekosistem belajar yang efisien (Learning)				
	- Sistem keamanan masyarakat (Security)				
6	<i>Smart Environment meliputi:</i>	2	1.5	0.5	75.00
	- Program proteksi lingkungan (Protection)				
	- Tata kelola sampah dan limbah (Waste)				
	- Tata kelola energi yang bertanggung jawab (Energy)				
Jumlah/Nilai		66	58.5	7.5	75.00

Sumber data : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2024

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam

kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada hasil evaluasi mandiri tingkat kematangan SPBE pada tahun 2024 sebesar 3,91 nilai ini meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,72. Namun demikian jika dibandingkan dengan 5 kabupaten/kota ditambah Provinsi DIY sendiri, Kabupaten Kulon Progo menempati posisi kelima selengkapnnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137

Indeks SPBE Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2024

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Kabupaten Bantul	4,18	Sangat Baik
2	Pemda Daerah Istimwa Yogyakarta	4,53	memuaskan
3	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	3,91	Sangat Baik
4	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik
5	Pemerintah Kabupaten Sleman	4,30	memuaskan
6	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	3,96	Sangat Baik

Tabel 2.138

Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KULON PROGO	3.45	4,08	3,91
	(Baik)	(Sangat Baik)	(Sangat Baik)
Nama Indeks	Nilai	Nilai	Nilai
SPBE	3.45	4,08	3,91
Domain Kebijakan SPBE	3.6	4,20	4,40
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3.6	4,20	4,40
Domain Tata Kelola SPBE	3.9	4,30	3,80
Perencanaan Strategis SPBE	3.25	3,25	3,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.5	5,00	4,00
Penyelenggara SPBE	4	5,00	4,00
Domain Manajemen SPBE	1.45	3,55	3,27
Penerapan Manajemen SPBE	1.13	3,75	3,38
Audit TIK	2.33	3,00	3,00
Domain Layanan SPBE	3.88	4,13	4,06
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.7	4,10	4,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.17	4,17	4,00



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambar 2.39

Hasil Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024

Evaluasi SPBE Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

1. Domain Kebijakan SPBE dengan nilai 4.40
2. Domain Tata Kelola SPBE dengan nilai 3,80 yang terdiri dari 3 aspek :
 - a. Perencanaan Strategis SPBE dengan nilai 3,50
 - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan nilai 4,00
 - c. Penyelenggaraan SPBE dengan nilai 4,00
3. Domain Manajemen SPBE dengan nilai 3,27, terdiri dari 2 aspek :
 - a. Penerapan Manajemen SPBE dengan nilai 3,38
 - b. Audit TIK dengan nilai 3,00
4. Domain Layanan SPBE dengan nilai 4,06 yang terdiri dari 2 aspek :
 - a. Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis elektronik dengan nilai 4,10
 - b. Layanan Publik berbasis elektronik dengan nilai 4,00

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri SPBE sebagaimana tabel diatas, untuk domain Audit TIK masih memiliki nilai yang rendah dibandingkan dengan domain lainnya. Domain Manajemen SPBE terdiri dari 2 aspek penilaian yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK. Adapun indikator yang dinilai masih kurang/ lemah dari aspek Penerapan Manajemen SPBE yaitu masih kurangnya perencanaan dan pengaturan dalam kebijakan internal dalam Penerapan Manajemen Resiko SPBE, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Penerapan Manajemen Perubahan. Sedangkan untuk aspek Audit TIK, indikator yang dinilai masih kurang/ lemah yaitu belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi. Dalam pelaksanaann kegiatan, PPID Kabupaten Kulon Progo selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan serta saran/kritik/usulan dari masyarakat sehingga semakin menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2021 berlangsung lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Layanan PPID dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, via telepon, website PPIDKu, serta program LAPOR dan audiensi dengan Bupati Kulon Progo dalam acara Kamis Pagian Bupati Kulon Progo langsung dilayani sesuai Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Pedoman Standar yang telah ditetapkan melalui Standard Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Kulon Progo, acuan SOP tersebut adalah Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010. Sebagai badan Publik, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk PPID beserta 42 PPID Pembantu yang berada disetiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 243 Tahun 2011 dan telah direvisi dengan SK Bupati Nomor 215 Tahun 2013 dan direvisi kembali dengan SK Bupati Nomor 186 tahun 2017 tentang Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan direvisi kembali dengan SK Bupati Nomor 244/B/2019 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Tahun 2019, dan direvisi kembali dengan SK Bupati Nomor 265/A/2020 tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

Dalam perjalanannya, PPID Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan:

1. Penganugerahan Terbaik I Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh KID DIY Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kualifikasi Badan Publik menuju informatif Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY.

2. Penghargaan Top Digital Award 2021 dalam Kategori Top Digital Implementation 2021 dari Majalah IT-Works Jakarta.
3. Penghargaan menuju Smart City untuk Kategori Dimensi Smart Governance 2021 dari Kementerian Kominfo RI.
4. Penganugerahan Terbaik II Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh KID DIY Tahun 2022 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo kualifikasi Badan Publik menuju informatif Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan koperasi pada tahun 2024 mengalami penambahan dari jumlah koperasi sehingga terdapat 286 koperasi di tahun 2024. Akan tetapi, dilihat dari aspek jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah modal sendiri, jumlah modal luar, volume usaha, SHU dan aset mengalami penurunan yang disebabkan oleh 2 koperasi yang berpindah badan hukum dari kewenangan Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi

Tabel 2.139

Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi	Unit	274	276	282	284	286
2	Jumlah anggota	Orang	78.545	76.984	72.284	75.771	74.856
3	Jumlah simpanan	Rp.000	165.636.467	175.264.813	179.451.455	185,320,806	187.215.525
4	Jumlah modal sendiri	Rp.000	139.834.403	147.979.434	156.278.704	161,022,926	158.017.002
5	Jumlah modal luar	Rp.000	222.321.748	232.937.212	238.505.273	248,402,799	247.156.506
6	Volume usaha	Rp.000	234.276.660	268.172.376	255.777.326	335,433,161	320.299.848
7	Jumlah SHU	Rp.000	5.381.272	5.885.049	6.278.332	6,114,797	5.173.002
8	Jumlah aset	Rp.000	363.858.421	380.768.255	394.253.546	408,610,440	405.173.509

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pada persebaran koperasi berdasarkan Kapanewon, jumlah koperasi terbanyak terdapat di Kapanewon Wates sebanyak 68 koperasi dan jumlah koperasi paling sedikit berada di Kapanewon Girimulyo sebanyak 9 koperasi. Berdasarkan keaktifannya, Kapanewon Kokap memiliki persentase koperasi aktif paling besar yaitu 80,77 % sedangkan Kapanewon Sentolo memiliki persentase koperasi aktif paling rendah sebanyak 61,90 %. Koperasi bisa dikatakan aktif apabila melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2024 persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan sebesar 72,03 atau 206 koperasi aktif dari total 286 koperasi, nilai tersebut lebih kecil dari tahun 2023 dengan persentase koperasi aktif sebesar 74,85 % atau 212 koperasi aktif dari 284 koperasi.

Tabel 2.140

Koperasi Aktif Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Kapanewon	2020			2021			2022			2023			2024		
		Aktif	Jml.	%	Aktif	Jml.	%	Aktif	Jml.	%	Aktif	Jml.	%	Aktif	Jml.	%
1.	Temon	23	27	85,18	23	27	85,18	20	28	71,43	20	28	71,43	20	28	71,43
2.	Wates	61	68	89,70	60	67	89,55	49	66	74,24	50	67	74,63	47	68	69,12
3.	Pangatan	8	11	72,72	8	11	72,73	7	12	58,33	7	12	58,33	7	12	58,33
4.	Gadur	11	16	68,75	12	17	70,59	13	18	72,22	13	18	72,22	12	18	66,67
5.	Lendah	14	15	93,33	14	15	93,33	11	15	73,33	11	15	73,33	12	15	80,00
6.	Gentun	19	22	86,36	20	23	86,96	15	22	68,18	15	22	68,18	13	21	61,90
7.	Pengasih	37	39	94,87	38	40	95,00	32	41	78,05	32	41	78,05	31	42	73,81
8.	Kotap	22	22	100	22	22	100	23	25	92,00	24	26	92,31	21	26	80,77
9.	Gemulyo	7	9	77,78	8	10	80,00	6	9	66,67	6	9	66,67	6	9	66,67
10.	Nanggulon	13	15	86,67	12	14	85,71	12	15	80,00	12	15	80,00	12	15	80,00
11.	Kalitanang	12	13	92,30	12	13	92,31	9	14	64,29	9	14	64,29	10	14	71,43
12.	Satigalih	15	17	88,23	15	17	88,24	13	17	76,46	13	17	76,47	15	18	83,33
	Jumlah	242	274	88,32	244	276	88,41	210	282	74,47	212	284	74,65	206	286	72,03

Sumber data : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Persentase koperasi aktif memiliki tren menurun dari 2020-2024, beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut antara lain lemahnya pemahaman atau minat tentang perkoperasian, faktor usia SDM yang sudah lanjut usia yang berpengaruh dalam hal pengaturan manajemen dan kelembagaan perkoperasian, proses regenerasi pengurus yang lambat, dan ketertarikan generasi muda terhadap koperasi yang semakin menurun.

Tabel 2.141

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Sektor Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan	3.484	3.546	3.591	5.564	6.712
2.	Industri Pengolahan	18.677	17.295	17.611	18.765	16.293
3.	Bangunan	146	127	127	129	154
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran :					
a.	Hotel dan Restoran	641	614	642	648	648
b.	Pedagang Pasar	8.062	7.897	9.097	9.455	9.469
c.	Pedagang di luar pasar	10.436	10.944	11.477	13.369	15.468
d.	Pedagang Kaki Lima	713	1.560	1.560	2.995	3.010
5.	Pengangkutan dan Komunikasi	47	585	606	545	574
6.	Jasa-jasa	288	359	321	535	549
	Jumlah	42.493	42.927	45.032	52.005	52.877

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah UMKM di Kulon Progo pada Tahun 2024 sebesar 52.877 yang meningkat sebesar 1,67 % dari jumlah UMKM tahun 2023 sebesar 52.005. Pertumbuhan jumlah UMKM ini lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,4%. Penurunan persentase pertumbuhan jumlah UMKM ini didorong oleh berkurangnya jumlah UMKM sektor industri pengolahan. Dilihat dari persebaran sektor nya, sektor industri pengolahan masih menjadi sektor UMKM terbanyak diikuti sektor perdagangan luar pasar dan sektor perdagangan pasar.

Tabel 2.142
Data Omzet UMKM yang Mendapat Fasilitas Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas	Pertumbuhan (%)	Jumlah Omzet UMKM yang mendapat fasilitas (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	2.348	29,65	54.950.000.000	9,8
2021	3.223	37,27	64.655.000.000	17,66
2022	5.859	81,79	77.570.000.000	19,97
2023	8.236	40,57	100.552.671.111	29,63
2024	9.985	21,39	117.012.999.696	16,37

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, tahun 2025

Jumlah omzet UMKM yang mendapatkan fasilitas mengalami peningkatan positif sepanjang tahun 2020-2024. Hal tersebut didukung dengan pendampingan terhadap UMKM yang lebih intensif melalui Dana Alokasi Khusus dari APBN disertai oleh adanya daya dorong pemerintah daerah, antara lain dengan penerapan kebijakan yang memihak UMKM, fasilitas penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan dan BUMN, serta pendampingan kelompok UMKM oleh Perguruan Tinggi.

Tabel 2.143
Jumlah Toko Modern Kerjasama Koperasi (TOMIRA)
Menurut Kapanewon Tahun 2020-2024

No.	Kapanewon	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Temon	6	6	6	6	8
2.	Wates	16	16	16	16	16
3.	Panjatan	-	-	-	-	-
4.	Galur	3	3	3	3	3
5.	Lendah	-	-	-	-	-
6.	Sentolo	2	2	2	2	2
7.	Pengasih	2	2	2	2	4
8.	Kokap	-	-	-	-	-
9.	Girimulyo	1	1	1	1	1
10.	Nanggulan	2	2	2	2	2
11.	Kalibawang	-	-	-	-	-
12.	Samigaluh	1	1	1	1	1
Jumlah Total		33	33	33	33	37

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2025

ToMirRa atau Toko Milik Rakyat merupakan kebijakan Pemerintah Kulon Progo dalam mendukung produk-produk UMKM dapat bersaing dengan produk-produk di swalayan. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 37 ToMiRa yang tersebar di 12 Kapanewon dengan persebaran terbanyak berada di Kapanewon Wates sebanyak 16 Toko.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Nilai realisasi investasi sampai dengan Tahun 2024 mencapai Rp 354.783 juta rupiah yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 34.552 juta rupiah (10 %) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 320.231 juta rupiah (90%).

Tabel 2.144**Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2024 (juta Rupiah)**

Nilai investasi PMA/PMDN	2021	2022	2023	2024
Realisasi	441.961	450.842	309.780	354.783
PMA	18.198	21.161	37.405	34.552
PMDN	423.763	429.681	272.375	320.231

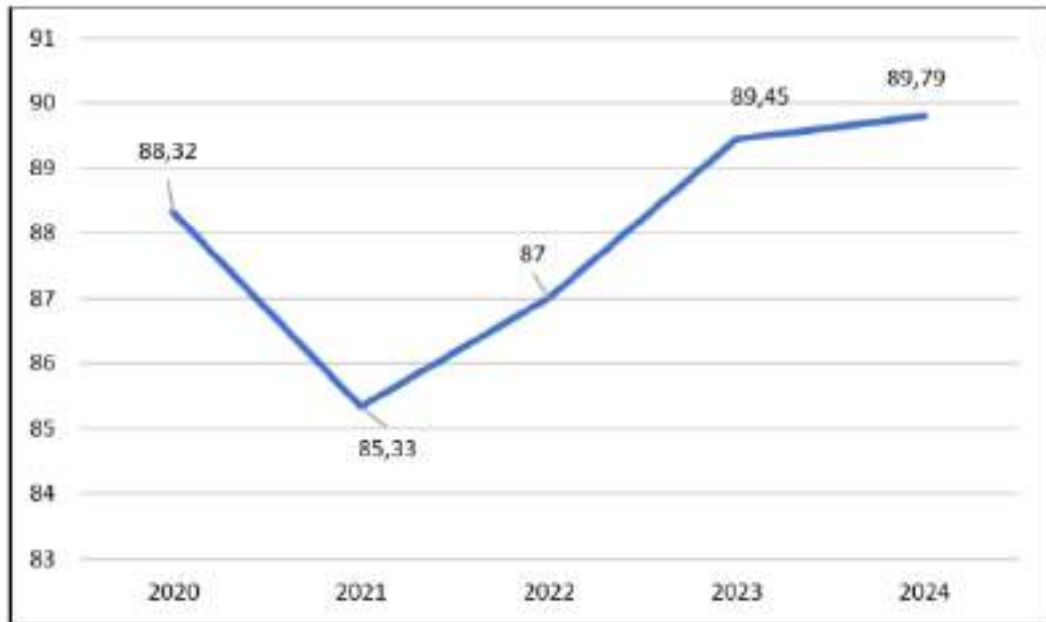
Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2025

Nilai investasi Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Triwulan IV untuk modal dari Penanam Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi tertinggi pada sektor Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Sedangkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi tertinggi pada sektor sektor Jasa lainnya dan kedua dari sektor Perhotelan dan Restoran.

Tabel 2.145**Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Sektor Tahun 2024 (Juta Rupiah)**

Sektor Investasi	Nilai Investasi	Persentase
PMA	34.552	
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	16.993	49,18 %
Transportasi, Gedung dan Komunikasi	8.813	25,51 %
Perdagangan dan Reparasi	7.156	20,71 %
Pertambangan	557	1,61 %
PMDN	320.231	
Jasa Lainnya	140.150	43,77 %
Perhotelan dan Restoran	45.249	14,13 %
Perdagangan dan Reparasi	35.718	11,15 %
Keuangan	27.702	8,65 %
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	25.051	7,82 %
Konstruksi	15.833	4,94 %
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	12.108	3,78 %
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	7.930	2,48 %
Industri Kimia dan farmasi	6.763	2,11 %
	1.375	0,43 %
Pertambangan		
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen, kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	1.358	0,42 %
Industri Lainnya	692	0,22 %
Industri Makanan	295	0,9 %

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2025



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 2.40

**Indeks Kepuasan Masyarakat pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2019-2024 memiliki tren peningkatan yang positif dengan nilai IKM pada tahun 2024 adalah 89,79. Hal tersebut menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan. Hasil IKM menunjukkan bahwa adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Online Single Submission (OSS) dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Tabel 2.146

Pelayanan Perizinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Izin	10.000	10.287
2	Jumlah pengajuan perizinan	Izin	10.000	10.287
3	Jumlah aduan yang terselesaikan	aduan	4	41
4	Jumlah aduan yang masuk	aduan	4	41
5	Jumlah survey yang dilakukan (dalam 1 tahun)	survei	600	1.268
6	Jumlah target izin wajib survey (dalam 1 tahun)	survei	600	1.268
	Capaian	%		100

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah perizinan yang dikeluarkan berdasarkan sektor kegiatan atau proyek adalah 9.019 perizinan berusaha melalui OSS RBA, 1.051 perizinan non berusaha melalui Si Cantik dan 217 perizinan non berusaha melalui SimBG. Sehingga total untuk perizinan yang diterbitkan adalah sebanyak 10.287 izin.

Perizinan berusaha melalui OSS terdiri dari 73 % perizinan resiko rendah, 19 % menengah rendah, 6 % resiko menengah tinggi dan 2 % adalah resiko tinggi. Sedangkan berdasarkan skala usaha

terdiri dari 96 & usaha mikro, 3 % usaha kecil, 0 % usaha menengah dan 1 % usaha besar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sebagian besar izin yang masuk bergerak pada usaha mikro dan hanya beberapa investor dengan skala usaha besar.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Pemuda Pelopor dan Seleksi Potensi Pemuda Daerah, serta pelatihan dan lomba kewirausahaan. Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat provinsi, regional, maupun nasional.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 mengalami perubahan yaitu sebanyak 4 organisasi dari yang semula 42 organisasi menjadi 46 organisasi dan jumlah klub olahraga sebanyak 173 klub. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga.

Tabel 2.147
Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi pemuda	16	16	19	19	19
2	Organisasi Olahraga	42	45	45	46	46
3	Klub Olahraga	280	280	148	173	173
4	Kegiatan Pemuda	4	4	4	2	7
5	Kegiatan Olahraga	5	6	8	10	10

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.148
Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	28	45	45	46	46
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabor	21	21	32	28	28
3	Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten	Cabor	28	28	32	22	22
4	Jumlah kegiatan cabang olahraga non prestasi	Cabor	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada beberapa cabang olahraga pada tingkat regional dan nasional sampai dengan tahun 2024 cukup membanggakan. Sebagai catatan tahun 2020 dan 2021 tidak diadakan Porda DIY karena masih kondisi Pandemi Covid-19. Gambaran prestasi olahraga Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dapat dilihat dari prestasi pada Pekan Olahraga Daerah yang dilaksanakan tiap dua tahun sekali, ditunjukkan pada tabel di bawah ini. PORDA DIY dilaksanakan setiap dua tahun sekali, di tahun gasal. Namun karena pandemi covid, porda tahun 2021 dilaksanakan mundur di tahun 2022. sehingga tahun 2023 tidak dilaksanakan. Selanjutnya PORDA akan diselenggarakan pada tahun 2025.

Tabel 2.149

Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi

No.	PORDA/PORPROV	Perolehan Medali		
		Emas	Perak	Perunggu
1.	PORDA 2005	45	39	63
2.	PORDA 2007	18	42	84
3.	PORPROV 2009	26	37	61
4.	PORPROV 2011	22	25	62
5.	PORDA DIY 2013	20	27	66
6.	PORDA DIY 2015	23	39	74
7.	PORDA DIY 2017	32	28	74
8.	PORDA DIY 2019	40	28	65
9.	PORDA DIY 2022	31	46	91

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Gambaran prestasi pemuda Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dan nasional ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.150

Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional	Orang	16	16	17	9	14
2	Jumlah prestasi yang diraih kepemudaan dalam skala regional dan nasional	Orang	8	8	15	9	14

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2024

Prestasi pemuda Kulon Progo pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mengirim 17 pemuda dan yang berhasil meraih prestasi adalah 15 pemuda. Di tahun 2024 pengiriman pemuda yaitu 14 pemuda dan yang berhasil semuanya meraih prestasi sampai tingkat nasional. Selain pengiriman, pembinaan terhadap pemuda tetap dilaksanakan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan kalurahan melakukan seleksi pemuda berprestasi, melalui Karang Taruna, selanjutnya dilakukan pelatihan di tingkat kabupaten dengan substansi materi yang berjenjang, dari kepemimpinan, hingga kewirausahaan.

2.1.3.2.13 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan $n+2$, sedangkan data yang tersedia adalah $n-1$. Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Permasalahan ini kemudian diantisipasi dengan memroyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, pengelolaan Portal Satu Data Kulon Progo serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS. Pelaksanaan urusan Statistik di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah yang merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam rangka penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Kulon Progo telah disusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024 dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 416/C/2022. Kemudian juga telah dibentuk Tim Forum Satu Data Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 45/C/2024, dengan Bappeda selaku koordinator, BPS Kabupaten Kulon Progo selaku pembina data sektoral, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku pembina data geospasial dan Dinas Kominfo selaku walidata sektoral serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku walidata geospasial.

Sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan data statistik sektoral telah pula disusun Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Surat Edaran Bupati Nomor 050/2269 tanggal 4 Juli 2023 tentang Rekomendasi Kegiatan Statistik. Capaian urusan Statistik sampai dengan akhir tahun 2024 telah tersusun 8 rekomendasi statistik, dan 31 metadata kegiatan terdiri dari 22 instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan 4 instansi vertikal. Rekomendasi Statistik dan metadata kegiatan merupakan salah satu unsur penilaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sosial (EPSS) yang hasilnya adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada tahun 2024 IPS Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai 2,44 dengan predikat Cukup.

Ketugasan Dinas Kominfo selaku walidata pada Aplikasi Ewalidata SIPD telah dilaksanakan tahun 2024 untuk keterisian data tahun 2023, yaitu dimulai dari tahapan perencanaan data yaitu

identifikasi elemen data bersama dengan perangkat daerah produsen data beserta pengampu Bappeda kemudian melakukan pengumpulan data yaitu input data setelah itu dilaksanakan pemeriksaan data oleh walidata Dinas Kominfo dan pembina data yaitu BPS Kabupaten Kulon Progo dan dilanjutkan dengan publikasi data yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 405/C/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023. Selanjutnya pada tahun 2025 ini akan dilanjutkan lagi pengisian data pada Ewalidata SIPD untuk tahapan perencanaan sampai dengan publikasi untuk data tahun 2024.

2.1.3.2.14 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian.

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal Pemkab (JKS), jaringan Telepon, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan koordinasi persandian dalam Forum komunikasi petugas sandi satu kali, pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah. Saat ini isu pengamanan informasi mengarah pada pengamanan sistem informasi manajemen pemerintah, sehingga dilakukan upaya pengamanan terhadap sistem informasi manajemen pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara bertahap

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Keberadaan seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo cukup beragam, jumlah kelompok seni budaya sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1.552 kelompok mencakup kelompok seni tari, seni musik, seni kriya, seni rupa, dan seni teater. Upacara adat masih kental dalam kehidupan masyarakat, antara lain upacara suran, bersih dusun, saparan, sadranan, dll. Peninggalan sejarah dan purbakala juga cukup bervariasi, mulai dari peninggalan prasejarah, peninggalan periode klasik (Hindu, Budha), peninggalan periode Islam, periode kolonial maupun perjuangan.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kulon Progo dilaksanakan untuk bisa memfasilitasi seni budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa kesenian menjadi even tahunan seperti Sendratari Sugriwo Subali, Menoreh Art Festival, Nglarak Blarak dan Jemparingan. Juga dilakukan pendampingan atau pembinaan pada kesenian yang menjadi ciri khas diantaranya Seni Angguk Putri. Seni Angguk Putri dapat memberikan warna sebagai identitas kebanggaan daerah, bahkan dalam rangka memasyarakatkan seni angguk ini telah diciptakan kreasi senam khas Kulon Progo yaitu senam angguk.

Berbagai upacara adat juga dilestarikan keberadaannya melalui fasilitasi di kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi yaitu gelar upacara adat dan tradisi. Setiap tahun juga dilaksanakan upacara Nyadran Agung yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan, upacara ini disamping bertujuan untuk melestarikan tradisi juga sebagai ajang kembalinya warga Kulon Progo di perantauan. Upacara adat dan tradisi yang dilestarikan di Kabupaten Kulon Progo antara lain nyadran, saparan, jamasan, wiwitan, rebo pungkasan, ngguyang jaran, merti bumi, sedekah laut, malam suronan,

baritan, muludan, anggoro kasih, tawu sendang, gumbregi, ruwatan, punden damarwulan dan sebagainya.

Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi warisan budaya fisik (tangible) dan nilai budaya dari masa lalu (intangible) berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Warisan budaya fisik (tangible heritage) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (immovable heritage) dan warisan budaya bergerak (movable heritage). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari atas: situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahlawan. Warisan budaya bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film.

Upaya pelestarian budaya dilakukan juga dengan pengembangan desa budaya dan rintisan desa budaya. Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Desa/Kalurahan Budaya yang di dalamnya terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan dapat berkembang menjadi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya. Berikut data Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang Sampai dengan Tahun 2024:

Tabel 2.151

Data Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang, Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Desa budaya	Kapanewon	Keterangan
1.	Pagerharjo	Samigaluh	Desa / Kalurahan Budaya; Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
2.	Jatimulyo	Girimulyo	Desa / Kalurahan Budaya; Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
3.	Glagah	Temon	Desa / Kalurahan Budaya; Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
4.	Hargomulyo	Kokap	Desa / Kalurahan Budaya; Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
5.	Tuksono	Sentolo	Desa / Kalurahan Budaya; Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
6.	Tanjungharjo	Nanggulan	Desa / Kalurahan Budaya; Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
7.	Banjarharjo	Kalibawang	Desa / Kalurahan Budaya; Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
8.	Sendangsari	Pengasih	Desa / Kalurahan Budaya; Desa / Kalurahan Mandiri Budaya
9.	Sidorejo	Lendah	Desa / Kalurahan Budaya;
10.	Sukoreno	Sentolo	Desa / Kalurahan Budaya
11.	Brosot	Galur	Desa / Kalurahan Budaya
12.	Bugel	Panjatan	Desa / Kalurahan Budaya
13.	Sogan	Wates	Desa / Kalurahan Budaya
14.	Tayuban	Panjatan	Desa/ Kalurahan Budaya
15.	Kalirejo	Kokap	Desa/ Kalurahan Budaya
16.	Kaliagung	Sentolo	Desa / Kalurahan Budaya
17.	Giripeni	Wates	Desa / Kalurahan Budaya

No.	Desa budaya	Kapanewon	Keterangan
18.	Salamrejo	Sentolo	Desa / Kalurahan Budaya
19.	Ngargosari	Samigaluh	Desa / Kalurahan Budaya
20.	Hargorejo	Kokap	Desa / Kalurahan Budaya
21.	Sentolo	Sentolo	Desa / Kalurahan Budaya
22.	Gerbosari	Samigaluh	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
23.	Banjararum	Kalibawang	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
24.	Pendoworejo	Girimulyo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
25.	Jatisarono	Nanggulan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
26.	Purwosari	Girimulyo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
27.	Tirtorahayu	Galur	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
28.	Pengasih	Pengasih	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
29.	Gulurejo	Lendah	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
30.	Kaligintung	Temon	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
31.	Giripurwo	Girimulyo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
32.	Hargotirto	Kokap	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
33.	Hargowilis	Kokap	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
34.	Jatirejo	Lendah	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
35.	Depok	Panjatan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
36.	Tawang Sari	Pengasih	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
37.	Purwoharjo	Samigaluh	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
38.	Banguncipto	Sentolo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
39.	Demangrejo	Sentolo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
40.	Kebonharjo	Samigaluh	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
41.	Ngentakrejo	Lendah	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
42.	Banjarasri	Kalibawang	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
43.	Banjaroya	Kalibawang	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
44.	Wates	Wates	Kelurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
45.	Bumirejo	Lendah	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
46.	Donomulyo	Nanggulan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
47.	Cerme	Panjatan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
48.	Gotakan	Panjatan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
49.	Kedungsari	Pengasih	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
50.	Banjarsari	Samigaluh	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
51.	Srikayangan	Sentolo	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
52.	Margosari	Pengasih	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
53.	Panjatan	Panjatan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
54.	Kulwaru	Wates	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
55.	Karangwuni	Wates	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang

No.	Desa budaya	Kapanewon	Keterangan
56.	Krembangan	Panjatan	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang
57.	Sidoharjo	Samigaluh	Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025.

Dalam pengembangan kebudayaan terhadap desa/ kalurahan, yang semula Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya kategori tumbuh meningkat menjadi di Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang. Selanjutnya dengan pendampingan yang lebih intensif, Desa/ Kalurahan Rintisan Budaya Kategori berkembang meningkat menjadi Desa/ Kalurahan Budaya yang ditetapkan oleh Gubernur DIY. Berikut data perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang dan Desa/ Kalurahan Budaya .

Tabel 2.152

**Perkembangan Desa / Kalurahan Rintisan Budaya Kategori Berkembang,
Desa/ Kalurahan Budaya dan Desa Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020-2024**

Kategori	Kondisi pada tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rintisan Desa/ kalurahan budaya kategori berkembang	26	30	35	31	36
Desa/ kalurahan budaya	15	16	16	21	21
Total	41	46	51	52	57

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2025;

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta terjangkau.

Peningkatan minat baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.153

Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kunjungan perpustakaan	93.191	102.822	299.127	180.902	218.832
2.	Jumlah populasi yang harus dilayani	432.220	442.838	443.361	446.192	444.516
3.	Jumlah buku	56.499	56.649	59.322	60.344	54.331
4.	Jumlah perpustakaan terstandar	38	43	78	217	223
5.	Jumlah perpustakaan seluruhnya	621	621	616	633	633

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah pengunjung perpustakaan secara umum fluktuatif. Peningkatan kunjungan disebabkan kegiatan yang melibatkan masyarakat, makin gencarnya promosi melalui bazar dan penambahan jumlah pengunjung secara daring (melalui internet). Perlu diketahui bahwa jumlah pengunjung perpustakaan juga diperhitungkan melalui layanan perpustakaan keliling. Pada tahun 2024, pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan 20,97%. Kenaikan dikarenakan adanya kegiatan tambahan untuk mengisi waktu liburan sekolah dengan tema “Liburan Seru di Perpustakaan” dan wisata buku dengan mengundang lebih banyak sekolah serta menyelenggarakan kegiatan “September Ceria” dengan mengundang anak-anak TK dan PAUD dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan.

Salah satu faktor yang berperan penting untuk meningkatkan minat baca yaitu tersedianya jumlah buku perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jumlah buku dari tahun 2020 hingga tahun 2022 selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 6.013 eksemplar. Penurunan jumlah buku berdasarkan hasil sensus barang 2023 dan penambahan buku sejumlah 850 eksemplar dan e-book sejumlah 70 copy. Secara rinci jumlah buku perpustakaan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.154
Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Judul/Kelompok	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umum	3.756	3.759	3.695	3.831	3.503
2.	Filsafat	2.865	2.868	2.882	2.903	2.587
3.	Agama	6.951	6.951	6.977	6.996	6.172
4.	Ilmu–ilmu Politik	9.418	9.421	9.627	9.805	8.777
5.	Bahasa	1.845	1.845	1.858	1.858	1.633
6.	Ilmu Murni	3.772	3.772	3.581	3.786	3.352
7.	Ilmu Terapan	10.982	10.991	10.957	11.029	9.720
8.	Kesenian	3.029	3.029	2.988	3.102	2.779
9.	Sastra	11.083	11.213	11.159	11.392	10.354
10.	Sejarah dan Geografi	2.798	2.800	2.915	2.973	2.601
11.	Non Buku (Peta)	75	75	75	75	75
12.	Non Buku (Globe)	3	3	3	3	3
13.	Non Buku (E-Book)	2.380	2.480	2.605	2.705	2.775
Jumlah		58.957	59.207	59.322	60.422	54.331

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2024

Hal yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan minat baca masyarakat adalah keberadaan perpustakaan yang memenuhi standar. Jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 633 perpustakaan. Dari 633 perpustakaan tersebut sebagian besar belum memenuhi standar nasional perpustakaan. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 38 perpustakaan yang memenuhi standar, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 43 perpustakaan dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 78 perpustakaan dan tahun 2023 meningkat menjadi 217 perpustakaan sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 223 perpustakaan.

Jumlah Pustakawan yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023. Seluruh tenaga tersebut tidak hanya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan pada Perpustakaan Daerah

Kulon Progo tetapi juga membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.155

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pustakawan	11	13	12	12	13
2	Jumlah tenaga teknis	6	4	5	5	5
3	Jumlah penilai bersertifikat	2	2	2	2	3

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.3.2.17 Kearsipan

Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip pada unit kerja dan kalurahan. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip.

Pencapaian kegiatan pembinaan kearsipan pada perangkat daerah mengalami peningkatan. Keberhasilan pengelolaan arsip daerah tidak terlepas dari kesadaran masing-masing perangkat daerah tentang pentingnya arsip. Pencapaian kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya khasanah arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah. Capaian Pengelolaan Kearsipan dapat dilihat dari peningkatan unit kerja yang sudah menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan.

Tabel 2.156

Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1.	Volume arsip in aktif yang sudah dibuatkan daftar arsipnya	1.439	2.197	3.020
2.	Jumlah arsip in aktif	9.520	6.621	6.476
3.	Jumlah OPD yang memindahkan arsip dari UP ke UK	38	40	39
4.	Jumlah OPD yang menyerahkan arsipnya ke LKD	39	38	37
5.	Jumlah OPD	42	40	40
6.	Jumlah arsip statis yang dialihmediakan	1.300	2.743	1.539
7.	Jumlah arsip statis yang didapatkan	1.329	5.654	3.030

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.157

SDM Pengelola Arsip Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Arsiparis	15	14	13	13	24

No.	Indikator	Capaian kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan	140	213	132	312	342

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kearsipan jumlahnya meningkat cukup signifikan. Untuk Tenaga Arsiparis (jabatan fungsional) terdapat peningkatan 11 orang dari tahun sebelumnya dari 13 personil menjadi 24 personil, dengan perincian 16 orang di perangkat daerah dan 8 orang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) belum dapat melaksanakan pembinaan maupun pendampingan secara serentak untuk seluruh Perangkat Daerah, sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap perangkat daerah dilaksanakan secara bergantian dan bertahap. Pembinaan dan pendampingan juga dilaksanakan dalam rangka implementasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yaitu digitalisasi dalam pengarsipan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan.

Kegiatan bidang kearsipan lainnya berupa akuisisi arsip statis dari masyarakat dan Perangkat Daerah maupun pendokumentasian even maupun dokumen kearsipan. Sampai saat ini arsip statis yang mengandung nilai historis ini berupa arsip tekstual, foto dan peta. Adapun arsip dimaksud diantaranya:

1. Keberadaan Pabrik Gula Sewugalur Tahun 1917;
2. Arsip keberadaan situs geoheritage bekas tambang Mangaan di Kliripan kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap berupa arsip tekstual, arsip foto, dan peta yang saat ini tengah direstorasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
3. Kunjungan Presiden Soekarno ke Pabrik Garam di Pantai Trisik pada September 1951;
4. Pabrik Nila Bulurejo;
5. Arsip Gempa Jogja;
6. Arsip pendirian Bandara Internasional Yogyakarta berupa tekstual dan foto;
7. Arsip perangkat daerah lainnya.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Realisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.158

Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No.	Kondisi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi ikan budidaya (ton)	16.666,03	16.699	16.714	16.803,44	16.968,63
2.	Produksi ikan tangkap (ton)	2.125,57	2.190,06	2.190,35	2.183,85	2.190,03
	Total produksi (ton)	18.791,61	18.889	18.905	18.987,00	19.158,66

No.	Kondisi	2020	2021	2022	2023	2024
	Target (ton)	16.537	17.154	17.614	18.813,00	18.995,03
	Persentase (%)	113,63	110,11	107,33	100,93	100,86

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Total produksi ikan tahun 2024 tercapai 19.158,66 ton atau 100,86% dari target kinerja daerah yang ditetapkan yaitu 18.995,03 ton dan meningkat 0,44% dibandingkan dengan produksi ikan tahun 2023 sebesar 18.987 ton. Produksi perikanan budidaya tahun 2024 tercapai 16.968,63 ton atau 100,86% terhadap target produksi sebesar 18.995,03 ton dan meningkat 0,98% dibandingkan dengan produksi Tahun 2023 sebesar 16.803,44 ton. Sedangkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 tercapai 2.190,03 ton, meningkat 0,28 ton dari tahun 2023 (2.183,85 ton), namun capaian ini masih lebih rendah dibandingkan capaian di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan turunnya produksi perikanan tangkap di PUD (Perairan Umum Darat) terutama di Waduk Sermo karena banyaknya ikan invasif Red Devil (ikan dengan harga murah dan banyak durinya) menurunkan minat nelayan menangkap ikan di waduk sermo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran ikan invasif, khususnya ikan Red Devil, yang populasinya meningkat di Waduk Sermo dan aliran sungai sekitarnya. Upaya-upaya ini meliputi:

- Edukasi masyarakat untuk tidak melepas benih ikan invasif ke perairan umum.
- Pemberdayaan nelayan dengan memberikan dukungan untuk menangkap dan mengolah ikan invasif menjadi produk bernilai ekonomi.
- Restocking ikan lokal untuk meningkatkan populasi ikan.

Total produksi ikan budidaya sebesar 16.968,63 ton terdiri dari produksi ikan dari kolam sebanyak 15.020,11 ton yang merupakan produksi utama produksi perikanan budidaya, diikuti produksi ikan dari tambak sebanyak 1.948,52 ton udang Vaname. Peningkatan produksi perikanan budidaya didukung oleh penumbuhan pokdakan wanita yang sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk sejumlah 59 kelompok. Disamping itu juga adanya dukungan fasilitasi sarana produksi untuk kelompok pembudidaya ikan diantaranya kolam, pakan, benih, probiotik, dan lain-lain.

Produksi perikanan tangkap tahun 2024 yaitu sebesar 2.190,03 ton. Produksi perikanan tangkap berasal dari produksi tangkap laut sebesar 860,26 ton dan produksi tangkap perairan umum sebesar 1.329,77 ton. Produksi tangkap laut naik 1,14% dari Tahun 2023 yaitu dari 851,53 ton menjadi 860,26 ton, sedangkan untuk tangkap perairan umum turun 0,27% dari 1.333,31 ton menjadi 1.329,77 ton.

Pemanfaatan potensi lahan budidaya perikanan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.159

Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan Tahun 2020-2024

No.	Kondisi	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Potensi Lahan Budidaya Ikan	Hektar	22.759	22.759	22.759	22.759	22.759
2.	Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan	Hektar	140,18	138,19	138,51	137,06	137,18
3.	Persentase Pemanfaatan	Persen	0,62	0,607	0,601	0,601	0,603

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel di atas terjadi penurunan pemanfaatan lahan dari 0,62 persen pada Tahun 2020 hingga berturut-turut mencapai 0,61 persen pada tahun 2024. Hal ini terjadi karena Meskipun demikian capaian pemanfaatan potensi lahan untuk usaha perikanan masih di bawah angka 1 persen. Adanya penurunan luasan pemanfaatan lahan budidaya ikan pada tahun 2023 dan 2024 karena hilangnya budidaya Mina Padi disebabkan ketersediaan air yang tidak kontinyu dan hilangnya budidaya dengan karamba karena terkena banjir bandang. Sehingga dari data tersebut kemungkinan berkontribusi terhadap belum optimalnya produksi perikanan di Kabupaten Kulon Progo.

Pada usaha perikanan tangkap, produksi dari laut belum optimal diantaranya disebabkan:

1. Nelayan Kulon Progo merupakan nelayan kecil yang dengan menggunakan Perahu Motor Tempel (PMT) yang hanya dapat melakukan penangkapan ikan di laut dengan jarak maksimal 1 – 4 mil;
2. Abrasi pantai yang cukup tinggi membuat pantai lebih curam dan menyulitkan nelayan mendaratkan perahunya.

Tabel 2.160

**Kondisi Produksi Ikan, Konsumsi Ikan, Pembinaan Nelayan, dan Proporsi Tangkapan Ikan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Produksi Ikan terhadap target(%)	113,63	110,11	107,33	100,93	100,90
	Jumlah Produksi Ikan(Ton)	18.791,61	18.889,00	18.905	18.987	19.158,66
	Target Daerah(Ton)	16.537	17.154,00	17.614	18.813	18.995,03
2	Capaian Konsumsi Ikan terhadap target(%)	100,86	102,79	102,00	100,00	99,39
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)Kg/Kap/Tahun	27,1	28,78	30,60	31,01	31,44
	Target Daerah (Kg)Kg/Kap/Tahun	26,87	28,00	30,00	31,00	31,2
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	16,13	12,9	35,48	23,68	4,17
	Jumlah kelompok nelayan yg mendapatkan bantuan pemda Tahun n	5	4	11	9	2
	Jumlah kelompok nelayan	31	31	31	38	48
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	5,23	4,89	3,86	4,48	4,53
	Jumlah produksi Ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	983,96	923,87	729,67	850,53	860,26
	Jumlah produksi ikan didaerah	18.791,61	18.889,00	18.905	18987,29	18.995,03
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	0,106	0,099	0,079	0,092	0,093
	Jumlah tangkapan ikan	983,96	923,87	729,67	850,53	860,26
	80% dari tangkapan maksimum lestari (WPP573)	929.330	929.330,00	929.330,00	929.330,00	929.330,00

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Angka konsumsi ikan pada tahun 2024 tercatat mengalami peningkatan yaitu dari 31,01 kg/kap/tahun pada tahun 2023 meningkat menjadi 31,44 kg/kap/tahun pada tahun 2024. Kenaikan konsumsi menunjukkan kinerja pemerintah dan masyarakat serta didukung oleh pemangku kepentingan

terkait terhadap peningkatan gizi masyarakat mulai konsumsi ikan menunjukkan prestasi yang baik. Diharapkan generasi muda khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mencegah stunting dan upaya memperbaiki kualitas kader penerus bangsa.

Dalam rangka pembangunan sektor kelautan dan perikanan, di kabupaten kulon progo juga dikembangkan desa maritim. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Nomor 188/00466 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Maritim, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 10 kelautan Desa/ Kalurahan Maritim yang tersebar di 4 kapanewon, yaitu di Kapanewon Galur (2 kalurahan: Banaran dan Karangsewu), Kapanewon Panjatan (3 kalurahan: Bugel, Pleret, Garongan), Kapanewon Wates (1 Kalurahan: Karangwuni), dan Kapanewon Temon (4 kalurahan: Glagah, Sinduntan, Palihan, dan Jangkaran). Penetapan desa/kalurahan Maritim ini adalah untuk pemberdayaan dan peningkatan potensi desa di wilayah pesisir pantai termasuk masyarakatnya yang bergerak di Bidang Kelautan dan Perikanan melalui dana BKK Dana Keistimewaan DIY.

Prioritas penggunaan BKK Desa/Kalurahan Maritim adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dengan usaha kelautan dan perikanan seperti usaha perikanan tangkap, usaha budidaya perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Melalui pembangunan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat di Kulon Progo yang terintegrasi hulu - hilir dan profesional dengan keunggulan, keunikan dan kearifan lokal mempunyai daya ungkit yang lebih kuat dalam mendorong arus balik Among Tani ke Dagang Layar sehingga akan ada nilai tambah dan peningkatan pendapatan di wilayah perdesaan. Sejalan dengan hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo berusaha menangkap tradisi ini dengan mengupayakan kegiatan Gerakan Membangun Kelautan dan Perikanan dengan Semangat Gotong Royong (GERBANG SEGORO).

Inovasi “Gerbang Segoro” merupakan Gerakan membangun sektor kelautan dan perikanan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir berbasis pemberdayaan masyarakat dengan membangkitkan semangat berbudidaya ikan dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah dan penangkapan ikan di laut, sebagai wujud untuk meningkatkan gizi keluarga, serta mengembangkan ekonomi masyarakat, yang bernafaskan Cecikal, Bebakal dan Tetinggal, dengan maksud produk perikanan dengan skala rumah tangga dihasilkan tidak hanya dijual segar, namun harus bisa diolah dan dikemas untuk dipasarkan dengan nilai jual ekonomis lebih tinggi.

Gerakan Membangun dengan Semangat Gotong Royong dilaksanakan secara bertahap dan atau paralel mulai dari:

1. Tahap Cecikal atau Penumbuhan dalam rangka memperkuat sistem pengembangan usaha perikanan secara utuh hulu – hilir melalui penguatan kelembagaan kelompok perikanan, pengadaan prasarana dan sarana produksi, sekolah lapang dan temu usaha untuk mendukung berfungsinya sistem pengembangan usaha perikanan secara utuh, efektif dan efisien
2. Tahap Bebakal atau Pengembangan dalam rangka memperkuat kelembagaan kelompok perikanan dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran melalui: penguatan kapasitas pelaku / pengelola dan penguatan hilirisasi produk untuk mendukung meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok perikanan serta tersedianya dukungan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

3. Tahap Tetinggal atau Kemandirian dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk komoditas hasil perikanan melalui: MoU dukungan pemerintah dan regulasi kebijakan, penguatan permodalan dan kelembagaan, pengembangan jaringan pemasaran, dan pengembangan pusat ekonomi daerah untuk mendukung meningkatnya produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas perikanan, konsumsi pangan serta teraplikasi-nya teknologi inovatif spesifik perikanan hulu-hilir.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya

Tabel 2.161

**Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Dikelola Pemerintah
(Dinas Pariwisata) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024**

No.	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pantai Glagah	332.360	352.010	606.500	682.322	567.036
2	Pantai Congot	60.577	48.725	78.873	115.075	113.714
3	Pantai Trisik	8.739	6.901	12.234	23.133	3.303
4	Waduk Sermo	91.875	76.034	101.340	75.799	33.753
5	Goa Kiskendo	4.925	4.166	7.474	6.998	2.696
6	Puncak Suroloyo	9.992	7.484	9.461	10.649	8.300
7	WA Nglinggo	30.551	44.568	25.934	200	n.a.
8	WA Tritis	4.407	3.496	2.329	641	2.600
9	Kawasan Menoreh Barat	26.215	7.103	6.698	5.733	461
10	Kawasan Jatimulyo	21.324	28.734	41.793	22.817	1.167
Jumlah		590.965	579.221	892.636	943.367	733.032

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah kunjungan wisata pada destinasi yang dikelola oleh pemerintah daerah tahun 2020 sejumlah 590.965 orang, menurun cukup signifikan sebesar 33,38 persen dibandingkan kondisi 2019, sebagai dampak dari pandemi covid 19 yaitu penutupan obyek wisata untuk membatasi pergerakan manusia (wisatawan). Dengan dibukanya kembali obyek wisata secara terbatas menjadi momentum bagi wisatawan untuk melepas kejenuhan, sehingga pada tahun 2021 kunjungan wisata meningkat menjadi 579.221 orang. Selanjutnya tahun 2022 ada peningkatan jumlah kunjungan wisata sebesar

54,11 persen dari tahun sebelumnya. Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah kunjungan wisata pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 5,68 persen. Namun tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan menurun cukup signifikan, sebesar 22,2%. Penurunan ini disebabkan karena kurangnya daya tarik wisata di Kulon Progo dibandingkan daerah sekitar. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata antara lain berupa perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata termasuk penataan lokasi TPR pada obyek wisata baru, melengkapi sarana prasarana pendukung, promosi, dan peningkatan SDM pelaku wisata.

Selanjutnya perkembangan pendapatan daerah dari retribusi pariwisata tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.162

Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pendapatan Per Tahun (Rp.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Retribusi Pariwisata	3.340.090	3.304.329	5.126.499	5.581.290	7.593.476
2	Lain-lain PAD yang Sah	4.800	4.800	5.000	6.000	6.000
	Total Pendapatan Retribusi Pariwisata	3.344.890	3.304.329	5.131.499	5.587.290	7.599.476
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	161.400.585	103.828.354	308.158.513	324.058.666	358.092.879
	Persentase (%)	2,07	3,18	1,66	1,72	2,12

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada tahun 2021 meskipun secara total PAD menurun dibandingkan tahun sebelumnya namun proporsi pendapatan retribusi dari sektor pariwisata naik menjadi 3,18%. Pendapatan retribusi dari sektor pariwisata tahun 2022 sebesar 5.131.499.000. Penyumbang PAD tersebar di sektor pariwisata adalah retribusi wisata Pantai Glagah yaitu sebesar Rp 3.639.402.000,00 atau 70,92% dari total PAD. Sedangkan pada tahun 2023, PAD sektor pariwisata mengalami kenaikan sebesar 8,88% dengan persentase terhadap Pendapatan Asli Daerah meningkat 0,06% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan tarif retribusi sehingga capaian pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 7.599.476.990,00 atau meningkat 36% dari tahun sebelumnya.

Berikut data kunjungan wisatawan pada 5 kabupaten/kota se DIY pada tahun 2020-2024:

Tabel 2.163

Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata per Kabupaten/Kota Se-DIY
(Jumlah Pengunjung Per Orang) Tahun 2020-2024

No	Kabupaten /Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Kulon Progo	0	966.432	9	906.292	2.014	1.559.424	11.459	1.912.147	7.992	1.918.059
2.	Bantul	252	2.265.171	57	2.819.691	129	5.419.499	2.360	5.772.527	n.a.	n.a.
3.	Gunung Kidul	3.453	1.978.146	42	1.937.627	709	3.106.063	4.680	3.713.142	3.978	3.286.940
4.	Sleman	24.044	4.226.075	41	5.162	65.302	7.105.769	179.543	7.826.400	n.a	n.a
5.	Yogyakarta	37.008	1.329.562	26	827	62.261	2.658.606	n/a	n/a	3555.333	10.583.877
	Total	64.757	10.765.386	175	5.669.599	130.415	19.849.361	198.042	19.224.217	3.567.303	15.788.876

Sumber : BPS Provinsi DIY

Jumlah kunjungan wisata tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Khusus untuk wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tahun 2022 sejumlah 2.014 dan tahun 2023 sejumlah 11.459 atau meningkat 468,96. Sedangkan untuk tahun 2024 kunjungan wisatawan meningkat sejumlah 2.669 orang. Peningkatan jumlah wisatawan disebabkan karena Pemerintah Daerah menyelenggarakan beberapa atraksi wisata budaya di destinasi wisata dan peran serta masyarakat melalui inovasi paket wisata pada desa wisata juga meningkat.

Selain obyek wisata yang berretribusi, di Kabupaten Kulon Progo juga berkembang wisata non retribusi, yaitu desa wisata dan obyek-obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan wisata non retribusi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada potensi alam dan budaya setempat.

Desa wisata di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 26 desa wisata. Berikut data beberapa potensi desa wisata di Kulon Progo:

Tabel 2.164
Data Desa Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Kapanewon	Desa Wisata	Daya Tarik
1	Girimulyo	Jatimulyo	Caving Goa Kiskendo dan Sumitro, Bird Watching, Kuliner Kopi Sulingan, Agro Salak
		Purwosari	Goa Kidang Kencana, Air Terjun, budaya, agro
		Pendoworejo	Pronosutan View, Bendung Kayangan
2	Kalibawang	Banjarasri	Sport Tourism (paralayang wisata), live in Dolan Deso, Wisata Religi Sendangsono
		Banjaroya	Ritual, Ziarah, Makam Kyai Krapyak, Makam Pengikut P. Diponegoro, Kesenian Strek, Embung Banjaroya, Agrowisata Durian
		Banjararum (Dekso)	River Tubbing
3	Kokap	Kalibiru	Hutan Wisata Kalibiru, Alam Perbukitan Menoreh, Outbond
		Sermo-Hargowilis	Waduk Sermo, Alam Perbukitan Menoreh
		Hargomulyo	Sendang Pengilon, kesenian angguk
		Hargotirto (Segajih)	Live In, Tracking, Susur Sungai, Pembuatan Gula Merah
		Hargorejo	Ex Tambang Mangaan Kliripan (geosite)
4	Lendah	Sidorejo	Bendungan Sapon, Budaya, Batik, Blangkon, Kerajinan Kembang Kering, Outbound di Tepi Sungai Progo
		Gulurejo	Sentra Industri Batik
		Jatirejo	Bukit Cubung, Wisata Religi Makam Kyai Landoh
5	Panjatan	Pleret/ Sawah Surjan	Wisata Edukasi Sawah Surjan, Pantai Mlarangan Asri
6	Samigaluh	Nglinggo - Pagerharjo	Treking, Menyadap Nira Aren, Lengger Tapeng, Petilasan Linggo Manik, Gagak Roban, Dalem Tunu, Buto Sinjang/Offroad
		Sidoharjo/ Menoreh	Panorama Menoreh, Grojogan/Curug Sidoharjo, Coffee Tour
		Purwoharjo / Tinalah	Goa, Latar Belakang Sejarah Diponegoro, Budaya, Wisata Edukasi, Camping Ground
		Widosari (Ngargosari)	Puncak Widosari, Pemandangan Alam di Ketinggian, Melihat Sunset dan Sunrise
		Gerbosari	Puncak Suroloyo, Agrowisata Krisan

No	Kapanewon	Desa Wisata	Daya Tarik
7	Sentolo	Sukoreno	Sentra kerajinan serat alam, wisata kuliner
		Tuksono	Sentra kerajinan serat alam, wisata kuliner
8	Temon	Glagah	YIA, Pantai Glagah,
		Jangkar	Mangrove, Pantai Congot
9	Galur	Banaran	Pantai Trisik, Konservasi Penyu, Batik Alam
10	Pengasih	Sendangsari	Wellness tourism, taman herbal

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata adalah dengan menyelenggarakan Lomba Gelar Potensi Desa Wisata. Kegiatan ini salah satunya agar desa wisata memiliki daya saing yang kompetitif, baik dari paket wisata yang dijual maupun pengembangan kelembagaannya. Hal ini terbukti efektif untuk mendorong pengembangan desa wisata menjadi lebih baik dan tentu saja berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di desa/kalurahan. Selain itu dampak diadakannya lomba gelar potensi desa wisata adalah diraihnya penghargaan tiga kali berturut-turut dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, yaitu Desa Wisata Tinalah (2021), Desa Wisata Widosari (2022) , Desa Wisata Hargotirto (2023) dan Desa Wisata Jatimulyo (2024).

Perkembangan jumlah pengunjung pada desa wisata dan obyek-obyek wisata yang dikelola masyarakat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.165

**Perkembangan Wisatawan ke Obyek Wisata Non Beretribusi
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024**

No	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Wisata	-	-	97.746	140.587	381.206
2	Non Desa Wisata	375.467	330.680	571.056	839.652	811.813
Jumlah		375.467	330.680	668.802	980.239	1.193.019

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang dikelola masyarakat pada tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah kunjungan sebesar 21,70% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya masyarakat untuk mempromosikan pariwisata dan meningkatkan daya tarik wisata di Kulon Progo cukup berhasil. Desa wisata dapat menyajikan paket-paket wisata yang menarik minat wisatawan, baik dengan menjual destinasi wisata maupun kearifan lokal, baik seni budaya, serta adat tradisi masyarakat setempat.

Pelayanan terhadap wisatawan merupakan hal yang sangat penting. Pemandu wisata menjadi salah satu ujung tombak pelayanan yang langsung menyentuh kepada kebutuhan wisatawan akan informasi. Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata menjadi prioritas di setiap obyek wisata yang dikelola masyarakat. Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan pemandu melalui sertifikasi pemandu wisata.

Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata menjadi prioritas di setiap obyek wisata yang dikelola masyarakat. Usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan dengan

memberikan pelatihan pemandu melalui sertifikasi pemandu wisata. Berikut data pemandu wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo

Tabel 2.166

Data Pemandu Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Pemandu Wisata	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemandu Wisata Bersertifikat (orang)	72	91	90	90	90
2	Pemandu Wisata Non Sertifikat (orang)	16	39	40	40	40
Total		88	130	130	130	130

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2025

Jumlah pemandu wisata di Kulon Progo tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya., hal ini disebabkan karena kebutuhan pemandu masih terpenuhi dari jumlah yang ada. Selain itu juga tidak dilakukan sertifikasi pemandu oleh pemerintah daerah.

Perkembangan pariwisata di Kulon Progo sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri pariwisata maupun usaha jasa pariwisata.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini telah diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kegiatan berusaha, salah satunya sektor pariwisata, dengan penghapusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Untuk perizinan berbasis risiko tersebut dilakukan penilaian Tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, sehingga dikategorikan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB), dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berikut data Usaha Jasa Pariwisata yang ber-NIB tahun 2024 :

Tabel 2.167

Usaha Jasa Pariwisata ber-NIB Tahun 2024

No.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	2024
1	49425 (Angkutan Darat Wisata)	5
2	55120 (Hotel Melati)	3
3	55130 (Pondok Wisata)	10
4	55191 (Penginapan Remaja/Youth Hostel)	31
5	55193 (Villa)	4
6	55199 (Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya)	6
7	55900 (Penyediaan Akomodasi Lainnya)	59
8	56101 (Restoran)	45
9	56102 (Rumah/Warung Makan)	231
10	56103 (Kedai Makanan)	845
11	56104 (Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap)	20
12	56109 (Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya)	9
13	56210 (Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu)	5
14	56290 (Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu)	46

No.	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	2024
15	56303 (Rumah Minum/ Kafe)	12
16	56304 (Kedai Minuman)	67
17	56306 (Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap)	3
18	74130 (Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis)	7
19	74149 (Aktivitas DesainKonten Kreatif Lainnya)	2
20	74201 (Aktivitas Fotografi)	7
21	79111 (Aktivitas Agen Perjalanan Wisata)	10
22	79119 (Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya)	2
23	79121 (Aktivitas Biro Perjalanan Wisata)	16
24	79129 (Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya)	6
25	79911 (Jasa Informasi Pariwisata)	5
26	79912 (Jasa Informasi Daya Tarik Wisata)	3
27	79921 (Jasa Pramuwisata)	1
28	79990 (Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL)	3
29	82301 (Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice))	2
30	82302 (Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event))	8
31	90011 (Aktivitas Seni Pertunjukan)	2
32	90012 (Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan)	7
33	90022 (Pelaku Kreatif Seni Musik)	1
34	90023 (Pelaku Kreatif Seni Rupa)	1
35	90029 (Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya)	3
36	90030 (Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni)	1
37	90090 (Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya)	4
38	91029 (Wisata Budaya Lainnya)	1
39	93114 (Fasilitas Lapangan)	2
40	93119 (Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya)	3
41	93219 (Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya)	2
42	93229 (Daya Tarik Wisata Alam Lainnya)	3
43	93239 (Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia Lainnya)	2
44	93241 (Arung Jeram)	1
45	93292 (Karaoke)	2
46	96121 (Rumah Pijat)	15
47	96122 (Aktivitas SPA / Sante Par Aqua)	3
Jumlah		1.526

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan Data Usaha Jasa Pariwisata yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kulon Progo, sub sektor ekonomi kreatif yang mendominasi adalah sub sektor kuliner yang meliputi kedai makanan, rumah/warung makan, restoran, dan kedai minuman. Pada tahun 2023 tercatat terdapat 1.507 unit usaha kemudian meningkat menjadi 1.526 unit usaha pada tahun 2024. Penambahan jumlah unit usaha terutama pada usaha pondok wisata, restoran, kedai minuman dan penyediaan jasa boga.

Upaya peningkatan kunjungan wisata didukung dengan peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi wisata, peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui pelatihan serta peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata dengan fasilitasi sertifikasi. Fokus prioritas destinasi wisata yang akan dikembangkan adalah Kawasan Pantai Glagah - Congot mengingat lokasi tersebut berdekatan dengan Yogyakarta Intertional Airport, sehingga diharapkan dapat menarik wisatawan dari penumpang di bandara tersebut.

2.1.3.3.3 Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.168

Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2024

No.	Kondisi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi Padi dan Palawija (ton)	228.635,04	205.435,67	199.904,88	204.988,50	192.674,39
2	Produksi Sayuran dan Buah-buahan semusim (ton)	87.570,94	76.851,69	78.642,78	92.609,80	100.132,40
3	Produksi Buah-buahan dan sayuran tahunan (ton)	98.396,08	101.906,11	103.548,8	99.872,40	169.649,20
4	Produksi Biofarmaka (ton)	13.636,95	13.962,57	15.224,02	14.961,99	15.390,04
5	Produksi Perkebunan (ton)	106.760,06	139.997,02	107.181,32	97.797,80	94.550,54
6.	Populasi ternak besar (ekor)	55.001	55.865	55.106	55.252	56.102
7.	Populasi ternak kecil (ekor)	146.739	151,545	169.112	203.873	194.391
8.	Populasi unggas (ekor)	5.618.986	6.159.278	5.759.630	5.777.612	5.677.597
9.	Produksi daging (kg)	14.412.205	13,315,067	12.765.210	16.041.420	16.866.636
10.	Produksi telur (kg)	16.273.026	11.995.213	11.468.959	15.255.870	17.904.616
11.	Konsumsi protein hewani (gr/kap/hari)	18,8	17,0	17,6	15,6	14,6

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pada tahun 2024, 6 dari 11 indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, sedangkan ada 5 indikator yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Produksi padi dan palawija pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12.314,11 ton dibanding Tahun 2023. Penurunan produksi komoditas tanaman pangan terutama pada komoditas padi. Ada serangan hama wereng batang coklat sehingga mengakibatkan pertanaman padi mengalami puso 41 hektar. Selain itu, adanya perbaikan pada Saluran Irigasi Sapon selama 1 bulan, sehingga mengakibatkan kemunduran tanam padi di wilayah Lendah, Galur dan sebagian Panjatan. Adanya kemunduran tanam seluas 1.100 hektar, mengakibatkan pertanaman padi tidak bisa di panen pada tahun 2024, dan baru akan dipanen di Januari – Februari 2025. Komoditas jagung tidak tercapai produksi karena banyak petani yang memanen muda pertanaman jagung untuk dijadikan pakan ternak, selain itu juga ada peralihan pertanaman dari jagung menjadi bawang merah di Sentolo dan Pengasih. Produksi tanaman buah sayuran semusim juga mengalami peningkatan sebesar 7.522,6 ton.

Peningkatan produksi terutama pada sayuran bawang merah dan cabai merah. Adanya penambahan luas tanam dan panen komoditas bawang merah dan cabai merah sebagai kontributor utama dalam peningkatan produksi di kelompok ini.

Produksi tanaman buah dan sayuran tahunan mengalami peningkatan signifikan untuk produksinya yaitu 69.776,8 ton. Peningkatan produksi signifikan pada komoditas mangga yang bisa panen beberapa kali dalam satu tahun. Komoditas biofarmaka mengalami sedikit peningkatan produksi, yaitu 428,05 ton terutama pada jahe, dan lempuyang.

Komoditas perkebunan juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan sebesar 3.247,26 ton, terutama pada komoditas tebu. Penurunan komoditas tebu, karena penanaman pohon tebu berkurang. Selain itu, komoditas yang berkurang produksinya adalah jambu mete, teh, gebang, pandan, nilam dan gula aren Komoditas perkebunan yang lain cenderung stabil produksinya.

Populasi ternak besar mengalami peningkatan, sedangkan ternak kecil dan unggas mengalami penurunan. Populasi ternak besar mengalami peningkatan sebesar 850 ekor. Kondisi peternakan yang sudah mulai stabil dan penyakit menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD (Lumpy Skin Diseases) sudah terkendali, sehingga peternak kembali bersemangat untuk membudidayakan ternaknya. Adanya penurunan populasi ternak berbanding lurus dengan meningkatnya produksi telur dan daging pada tahun 2024.

Tabel 2.169
Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan per Kapanewon
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024

No.	Kapanewon	Jumlah Penyakit per Kapanewon				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Samigaluh	397	171	531	549	367
2	Kalibawang	580	285	331	378	359
3	Nanggulan	560	130	238	615	267
4	Girimulyo	474	315	291	530	521
5	Sentolo	414	128	357	934	293
6	Pengasih	551	398	900	1.250	474
7	Kokap	533	376	358	364	1.075
8	Lendah	491	204	563	607	370
9	Wates	694	179	246	952	1.555
10	Temon	300	144	236	2.052	236
11	Panjatan	505	193	1.035	4.862	1.413
12	Galur	430	496	894	513	644
Jumlah		5.929	3.019	5.981	13.606	7.248

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Penyakit hewan di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2024 terjadi penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. Pada Tahun 2024 jumlah penyakit hewan sejumlah 7.248 penyakit sedangkan tahun 2023 sejumlah 13.606 atau menurun sebanyak 14.250 penyakit. Sebaran penyakit hewan tertinggi ada di Kapanewon Wates, Kokap dan Panjatan.

Tabel 2.170

Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2022-2024

Keterangan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Produktivitas Padi	67,15 ku/ha	69,22 ku/ha	68,41 ku/ha
Produktivitas Jagung	66,83 ku/ha	67,86 ku/ha	68,65 ku/ha
Produktivitas Kedelai	10,85 ku/ha	16,35 ku/ha	15,78 ku/ha
Produktivitas Ubi Kayu	257,21 ku/ha	211,74 ku/ha	210,69 ku/ha
Produktivitas Kacang Tanah	14,88 ku/ha	15,23 ku/ha	15,21 ku/ha

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan tabel di atas, produktivitas komoditas unggulan tanaman pangan hanya jagung yang mengalami kenaikan produktivitas, sedangkan empat komoditas ini mengalami penurunan produktivitas karena adanya kemarau/musim panas yang panjang. Ditambah lagi dengan adanya wabah wereng batang coklat yang mengakibatkan puso seluas 41 hektar. Pengendalian hama penyakit tanaman dengan gerakan pengendalian yang rutin telah dilaksanakan sehingga hama penyakit tidak berkembang biak yang dapat menurunkan produksi.

Untuk meningkatkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya, Pemerintah daerah memberikan dukungan/ fasilitasi sarana produksi berupa bibit dan pupuk, serta penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Sarana prasarana pertanian berupa rehabilitasi jaringan irigasi untuk komoditas tanaman pangan, alat dan mesin budidaya tanaman pangan. Dengan adanya peningkatan produksi dan produktivitas pangan, maka ketahanan pangan daerah juga akan meningkat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pelestarian pertanian Lahan Surjan yang tersebar di wilayah Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, Pengasih dan Kokap. Pertanian pada Lahan Surjan merupakan sistem pertanian tradisional di mana lahan pertanian dibuat bertingkat, bagian bawah untuk menanam padi dan bagian atas untuk menanam palawija/sayuran. Lahan pertanian yang demikian apabila dilihat dari atas tampak bergaris-garis seperti surjan, pakaian tradisional yang biasa dipakai orang Jawa. Garis-garis tersebut terbentuk dari alur-alur tinggi dan rendah. Alur yang rendah atau bagian bawah yang bersifat aquatic ditanami padi, sedangkan bagian alur yang lebih tinggi yang bersifat kering ditanami palawija atau sayuran. Sistem ini merupakan adaptasi terhadap topografi rendah dan mudah tergenang air. Lahan surjan diharapkan dibuat memanjang ke arah barat-timur dengan tujuan tanaman yang dibudidayakan mendapatkan penyinaran matahari yang cukup.

Untuk mendukung kelestarian Lahan Surjan lewat Dana Keistimewaan, pada tahun 2024 ada 10 kelompok tani lahan surjan di kapanewon Temon, Wates dan Panjatan mendapat fasilitas jaringan irigasi sprinkler dan 10 kelompok tani diantaranya juga mendapat fasilitas saprodi untuk mendukung komoditas hortikultura (bawang merah). Disamping itu juga ada kegiatan SL-GAP (Sekolah Lapang Good Agriculture Practices) bawang merah Lahan Surjan.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Nilai usaha perdagangan adalah jumlah omzet seluruh pelaku usaha dalam waktu 1 tahun. Perkembangan sektor perdagangan sampai dengan tahun 2024 memiliki tren pertumbuhan yang

fluktuatif. Dibandingkan tahun 2023, nilai usaha perdagangan mengalami penurunan dikarenakan kondisi pertumbuhan kembali ke kondisi normal pasca pandemi.

Tabel 2.171

Penerbitan Perizinan Sektor Pasar Rakyat Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jenis Penerbitan			Total
		Kios	Los	Bango	
1.	2020	489	4.025	951	5.445
2.	2021	664	5.043	991	6.878
3.	2022	647	4.882	1.561	7.090
4.	2023	567	3.947	2.682	7.196
5.	2024	559	3.905	2.834	7.298

Sumberdata: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2025

Penerbitan perizinan di pasar rakyat tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,42 % dibandingkan tahun 2023. Untuk jumlah pedagang yang menempati kios dan los mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,41 % dan 1,06 %. Sementara untuk pedagang yang menempati arakan/dasara/ bango mengalami kenaikan sebesar 5,67 %.

Tabel 2.172

Data Ekspor Bersih Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Net Ekspor
2020	218.323.043.176	42.351.274.960	175.971.768.216
2021	177.883.276.496	33.992.938.023	143.890.338.473
2022	374.531.845.396	49.380.832.117	325.151.013.279
2023	236.113.493.009	26.013.900.180	210.099.592.829
2024	247.563.011.770	13.546.541.537	234.016.470.233

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai ekspor tahun 2024 mencapai Rp 247.563.011.770 sedangkan nilai impor sebesar Rp 13.546.541.537 sehingga nilai net ekspor tahun 2024 sebesar Rp 234.016.470.233. Nilai net ekspor pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 11.449.518.761 dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut disebabkan dorong oleh penurunan nilai impor sebesar Rp 12.467.358.643 dan peningkatan nilai ekspor

Tabel 2.173

Jenis Komoditi dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo tahun 2024

No.	Jenis Komoditi	Negara Tujuan
1.	Arang Briket	Saudi Arabia, Korea Selatan, New Zealand, Jerman, Belanda, Uni Emirat Arab, Lebanon
2.	Kerajinan Serat Alam	Amerika Serikat, Kanada, Inggris
3.	<i>Synthetic Wigs</i>	Amerika Serikat
4.	Gula Kristal	Amerika Serikat, Prancis, Australia, New Zealand, Jerman, Belanda, Jepang, Vietnam, Peru, China

No.	Jenis Komoditi	Negara Tujuan
5.	Kerajinan Kayu	Prancis, Belanda
6.	Traktor Tangan	Timor Leste, Brunei Darussalam, Panama, Nigeria, Uganda
7.	Sarung Tangan	Korea Selatan
8.	Kerajinan Bambu	Australia, New Zealand, Polandia, Uni Emirat Arab

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 jumlah nilai ekspor mencapai US\$15.539.563 atau turun sebesar 40% dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar US\$25.933.712. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya perekonomian negara tujuan ekspor produk rambut palsu (wig), terutama sejak Amerika Serikat mengalami resesi sehingga berpengaruh kepada sepihnya permintaan produk. Di antara komoditas yang mengalami kenaikan ekspor cukup signifikan adalah gula kristal karena harga bahan baku gula kristal mengalami kenaikan signifikan pada triwulan ke empat.

Tabel 2.174
Perkembangan Ekspor Komoditas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No	Mata Dagangan	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Volume	USD	Volume	USD	Volume	USD	Volume	USD	Volume	USD
1	Arang Briket	Kg	3.737.506	2.103.142	152.460	151.918	2.431.916	985.845	1.488.516	1.064.580,2	868.576	594.633,5
2	Kerajinan serat alam	Pcs	74.858	418.324	35.250	208.830	142.466	2.403.198	256.756	825.284,2	210.090	1.146.426,2
3	Kerajinan Kayu	Pcs	275	11.447	285	11.933	315	13.190	330	13.018,9	216	25.148,8
4	The Mahkota Dewa	Kg	31.000	25.851	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gula Kristal	Ton	1.981.872	3.951.663	1.565.173	2.617.529	779.960	1.344.759	1.607.032,8	2.893.705,4	1.583.819	2.830.480,1
6	Synthetic wigs	Pcs	811.457	8.235.188	703.368	8.371.919	1.567.601	20.108.220	798.143	9.681.145	638.588	9.011.111
7	Sabut Kelapa	Kg	74.309	18.307	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Traktor Tangan	Unit	2.111	349.842	5.751	316.444	5.851	323.537	111	235.480,4	255	451.390,4
9	Sarung Tangan	Pcs	0	0	1.624.331	620.013	1.532.372	651.035	1.233.558	633.495,7	2.963.232	1.306.744,7
10	Kerajinan Bambu	Pcs	0	0	13.464	96.645	14.964	103.928	21.009	192.853,1	21.375	191.690,5
			15.113.764		12.395.231		25.933.712		15.539.563		15.557.625	

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2025

Tabel 2.175

Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Rakyat dan Jumlah Pedagang Tahun 2022-2024

No	Nama Pasar Rakyat	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang	Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang	Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang
1	Pasar Wates	Baik	1.080	Baik	1.123	Baik	1322
2	Pasar Brosot	Sedang	303	Sedang	303	Sedang	303
3	Pasar Kasihan	Sedang	136	Sedang	136	Baik	136
4	Pasar Dekso	Sedang	474	Baik	474	Baik	427
5	Pasar Bendungan	Baik	753	Baik	753	Baik	753
6	Pasar Kranggan	Sedang	527	Sedang	527	Sedang	527
7	Pasar Pripih	Sedang	206	Sedang	206	Sedang	206
8	Pasar Jombokan	Sedang	306	Sedang	306	Baik	306
9	Pasar Bangeran	Sedang	135	Sedang	135	Sedang	135
10	Pasar Percontohan Sentolo	Baik	231	Baik	231	Baik	231
11	Pasar Kenteng	Sedang	622	Sedang	622	Sedang	572
12	Pasar Samigaluh	Baik	169	Baik	169	Baik	169
13	Pasar Jagalan	Sedang	242	Baik	242	Baik	242
14	Pasar Niten	Sedang	128	Sedang	128	Sedang	128
15	Pasar Glaeng	Sedang	146	Sedang	146	Sedang	146
16	Pasar Temon	Sedang	186	Sedang	186	Sedang	186
17	Pasar Kelapa	Sedang	83	Sedang	83	Sedang	83
18	Pasar Sewugalur	Baik	267	Sedang	267	Sedang	267
19	Pasar Potrogaten	Sedang	261	Sedang	261	Sedang	261
20	Pasar Nanggulan	Baik	179	Baik	179	Baik	179
21	Pasar Ngaglik	Sedang	161	Sedang	161	Sedang	161
22	Pasar Panjatan	Kurang	36	Kurang	36	Kurang	36
23	Pasar Gejlik	Kurang	88	Kurang	88	-	-
24	Pasar Nganggrung	Sedang	99	Sedang	99	Sedang	99
25	Pasar Clereng	Kurang	245	Kurang	245	Kurang	245
26	Pasar Menguri	Kurang	90	Kurang	90	Kurang	90

No	Nama Pasar Rakyat	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang	Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang	Kondisi Sarpras	Jumlah Pedagang
27	Pasar Ngebung	Kurang	86	-	-	-	-

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2024

Tabel 2.176
Rekapitulasi Kondisi Fisik Pasar Rakyat Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Kondisi			Jumlah
		Baik	Sedang	Kurang	
1	2020	18	6	4	28
2	2021	20	4	3	27
3	2022	25	0	2	27
4	2023	25	0	1	26
5	2024				

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo, 2024

Pasar Rakyat pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 26 pasar menjadi 25 pasar. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan status Pasar Gejlik.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah pedagang pasar rakyat yang menggunakan sarana perdagangan berupa kios, los dan bango. Pada tahun 2023 jumlah pedagang pasar rakyat mencapai 7.196 atau mengalami kenaikan sebesar 1,50% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.177
Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Berdasarkan Sarana Perdagangan Yang dipergunakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Pedagang			Jumlah
		Kios	Los	Bango/Pelataran	
1.	2020	739	3.214	3.337	7.330
2.	2021	671	5.005	3.206	8.882
3.	2022	647	4.882	1.561	7.090
4.	2023	567	3.941	2.682	7.196
5.	2024	559	3.905	2.834	7.298

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan sektor perdagangan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.178

Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Rakyat Tahun 2020 – 2024

No.	Rincian Pendapatan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Persampahan / Kebersihan	429.947.200	439.787.800	424.136.200	426.580.000	77.846.100
2	Retribusi Pelayanan Pasar	1.006.795.550	1.021.544.150	1.228.041.600	1.207.037.900	1.609.118.950
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	19.072.000	19.046.500	19.390.000	21.300.000	0
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	98.135.000	106.078.600	123.755.400	139.165.000	22.212.000
5	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0	0	0	0	123.343.000
6	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	32.321.200	26.728.650	24.189.200	22.649.440	9.039.350
	Jumlah	1.586.310.950	1.613.185.700	1.819.512.400	1.816.732.340	1.841.559.400

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Pendapatan sektor perdagangan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,15% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp 2.780.060,00. Penurunan terjadi terutama pada retribusi pelayanan pasar berupa los karena berkurangnya jumlah pedagang yang menempati los. Sementara retribusi pelayanan tera/ tera ulang dan retribusi tempat khusus parkir mengalami peningkatan masing-masing sebesar 9,85% dan 12,45%.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Pencapaian perkembangan industri kecil sampai dengan tahun 2023 diperlihatkan di tabel berikut.

Tabel 2.179

Data Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Kriteria	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sentra	33	34	34	34	34
2.	Unit Usaha	15.481	15.589	15.847	15.962	16.092
3.	Tenaga Kerja (orang)	37.678	37.907	60.071	61.342	61.975
4.	Nilai Investasi (Rp.)	94.721.763.000	105.478.783	193.461.832.000	198.274.678.562	202.315.149.000
5.	Nilai Produksi (Rp.)	874.243.150.000	908.242.475.000	2.542.338.689.000	2.637.962.355.375	2.730.916.038.000
6.	Nilai Bahan baku/ Penolong (Rp.)	481.993.164.000	498.726.007.000	967.556.070.000	970.670.479.201	972.324.264.000
7.	Upah Tenaga Kerja (Rp.)	138.305.031.000	141.660.659.000	410.940.995.000	425.644.825.409	440.544.894.000
8.	Nilai Tambah (Rp.)	255.883.762.000	267.855.956.000	1.368.022.407.000	2.210.785.078.851	2.288.779.851.000

Sumber data: Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor industri di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan terhadap tahun sebelumnya. Terdapat penambahan usaha industri baru di tahun 2024 mengalami

peningkatan menjadi 67 unit usaha, dari 15.962 unit usaha pada tahun 2023 menjadi 16.029 unit usaha pada tahun 2024. Peningkatan jumlah unit usaha ini diikuti dengan peningkatan nilai investasi, nilai produksi, nilai bahan baku/penolong, upah tenaga kerja yang dibayarkan dan peningkatan nilai tambah.

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Program penempatan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

Untuk menyiapkan calon transmigran agar memiliki ketrampilan dan kesiapan menjadi transmigran yang handal dan mandiri di daerah tujuan transmigrasi, sebelum pemberangkatan diberikan pelatihan berupa antara lain pelatihan Intensifikasi Lahan Pertanian (ILP) dan Pertukangan Kayu. Pelatihan kepada calon transmigran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selain itu juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta.

Melalui beberapa pelatihan tersebut diharapkan calon transmigran mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan, sehingga dapat dimanfaatkan dan diterapkan di lokasi transmigrasi, sedangkan untuk menyiapkan calon transmigran sebelum pemberangkatan ke lokasi transmigrasi, telah dilaksanakan pembekalan mental calon transmigran.

Pada tahun 2020, tidak dilaksanakan pemberangkatan transmigrasi sebagai dampak dariantisipasi wabah Pandemi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan kegiatan transmigrasi berupa penjajagan, cek lokasi, pemberangkatan, dan pemodalan calon transmigran tidak dapat direalisasikan yang mengacu pada surat edaran Direktorat Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor B.676/PKT.04.01/IV/2020 tentang penundaan Transmigrasi Tahun 2020. Tahun 2021 Kabupaten Kulon Progo tidak mendapat alokasi peserta transmigrasi sesuai surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Nomor: 595/08025 Tanggal 6 Agustus 2021. Pada Tahun 2023 diberangkatkan 2 kepala keluarga atau 7 jiwa ke UPT Salulisu, Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Realisasi penempatan transmigran pada Tahun 2019 – 2023 terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.180

Penempatan Dan Bantuan Modal Transmigrasi Tahun 2020 – 2024

Tahun	Alokasi		Realisasi		Bantuan Modal
	KK	Lokasi	KK	Lokasi	
2020	10	3	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	2	1	2	1	Rp 16,000,000
2023	2	1	2	1	Rp 20,000,000

Tahun	Alokasi		Realisasi		Bantuan Modal
	KK	Lokasi	KK	Lokasi	
2024	2	1	2	1	Rp 28,000,000

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, 2025

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah

Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, aparat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan sejumlah produk hukum daerah. Berikut ini memperlihatkan produk hukum yang telah dikeluarkan sebagai pedoman bagi masyarakat.

Tabel 2.181

Daftar Inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2020-2024

No.	Produk Hukum	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peraturan Daerah	12	15	14	9	11
2.	Peraturan Bupati	59	84	53	84	63
3.	Keputusan Bupati	406	511	528	518	532
4.	Instruksi Bupati	0	34	29	1	6
Jumlah		477	644	624	612	612

Sumber data: Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo, 2025

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas, pada tahun 2024 terdapat penetapan 11 Peraturan Daerah, 63 Peraturan Bupati, 532 Keputusan Bupati, dan 6 Instruksi Bupati. Adapun target pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2024 adalah 4 Raperda Eksekutif, 3 Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan 2 Raperda inisiatif (legislatif).

Pembentukan Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pada pedoman PD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan.

Salah satu dinamisasi lingkungan adalah adanya peraturan baru yang bersifat khusus seperti halnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Regulasi ini memberikan amanah lima bidang kewenangan pada Pemerintah Daerah DIY yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Dalam implementasinya Pemda DIY mengalirkan urusan keistimewaan khususnya bidang kebudayaan kepada Pemerintah kabupaten/kota. Bertambahnya kewenangan pada hakikatnya menjadikan penambahan fungsi dan beban kerja yang perlu diwadahi dalam sebuah lembaga yang proporsional, tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021, Pemerintah Daerah memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 20 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah, 12 Kapanewon, dan BPBD. Rincian perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.182
Daftar Perangkat Daerah Tahun 2024

NO.	RUMPUN PD	PD / UNIT ORGANISASI
A	SEKRETARIAT DAERAH	Tipe B
B	SEKRETARIAT DPRD	Tipe B
C	INSPEKTORAT DAERAH	Tipe B
D	DINAS DAERAH	1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A 2. Dinas Kesehatan Tipe A 3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A 4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A 6. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A 7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Tipe B 8. Dinas Perdagangan Tipe B 9. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B 10. Dinas Pariwisata Tipe B 11. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe B 13. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B 14. Dinas Tenaga Kerja Tipe B 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B 16. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C 17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C 18. Dinas Perhubungan Tipe C 19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C
E	BADAN DAERAH	1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi A
F	KAPANEWON	1. Kapanewon Temon Tipe A 2. Kapanewon Wates Tipe A 3. Kapanewon Panjatan Tipe A 4. Kapanewon Galur Tipe A 5. Kapanewon Lendah Tipe A 6. Kapanewon Sentolo Tipe A 7. Kapanewon Pengasih Tipe A 8. Kapanewon Kokap Tipe A 9. Kapanewon Girimulyo Tipe A 10. Kapanewon Nanggulan Tipe A 11. Kapanewon Samigaluh Tipe A 12. Kapanewon Kalibawang Tipe A
JUMLAH PERANGKAT DAERAH		40

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kab Kulon Progo, 2025

Penetapan tipe Perangkat Daerah di atas sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu dikategorikan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kapanewon dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80%. Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1.000.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024 mendasar kepada Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,04 dengan komponen penilaian RB General sebesar 78,83 dan RB Tematik sebesar 8,21. Indeks RB tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 (perolehan Indeks RB 83,00). Penilaian Indeks RB tahun 2024 menggunakan 34 komponen, yang terdiri atas 24 komponen RB General dan 10 komponen RB Tematik.

Terkait dengan Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh KPK terkait dengan integritas di Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. Secara umum, pelaksanaan tugas di Kabupaten Kulon Progo ini menghadapi beberapa risiko yang sangat rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor, konflik kepentingan maupun risiko atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian, risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.
2. Instansi Kabupaten Kulon Progo telah dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Meskipun demikian risiko ketiadaan objektivitas tetap perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan.
3. Sistem Pengawasan Internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di Kabupaten Kulon Progo sudah cukup baik, meskipun demikian risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi, terutama pada area-area rawan seperti perizinan, rekrutmen pegawai, penentuan pemenang tender, dan lain sebagainya.
4. Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo dan termasuk di atas rata-rata nasional, akan tetapi sosialisasi antikorupsi tetap perlu dirancang agar lebih efektif.
5. Upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Kulon Progo sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi.
6. Kabupaten Kulon Progo perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberikan kepastian bahwa laporan akan ditindaklanjuti

Perkembangan lembaga keuangan bank dan non bank serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung stabil. Dari sisi jumlah lembaga, terdapat peningkatan jumlah unit bank milik daerah di mana pada Tahun 2021 sejumlah 37 unit menjadi 38 unit pada tahun 2022 yakni dengan dibukanya kantor kas dan atau kantor cabang pembantu Perumda BPR Bank Kulon Progo maupun PT. Bank BPD DIY di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah BPR/BPRS juga menunjukkan peningkatan di akhir tahun 2023.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan unit-unit usahanya di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Perumda BPR Bank Kulon Progo, PT. Selo Adikarto, Perumda “Aneka Usaha” Kulon Progo, dan Perumda Air Minum Tirta Binangun. Sampai dengan Tahun 2024 Perumda BPR Bank Kulon Progo telah mengembangkan pelayanan keuangan melalui 1 kantor pusat, 14 kantor kas dan 1 payment point yang tersebar di 12 Kapanewon.

Tabel 2.183

Data Perkembangan Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2020-2024

No	Keterangan	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Lembaga keuangan, perbankan						
	a. Bank Pemerintah	47	40	38	36	35	PT Bank BRI : 25 unit, Bank Syariah Indonesia : 1 PT Bank BTN : 1 unit PT Bank Mandiri : 5 unit PT BNI 46 : 3 unit
	b. Bank Milik Daerah	34	37	38	37	36	1. PT Bank BPD DIY : -1 unit kantor cabang, -16 unit kantor cabang pembantu, -4 unit kantor fungsional; 2. Perumda BPR Bank Kulon Progo: 1 unit kantor pusat, 14 unit kantor kas, 1 unit payment point
	c. Bank Swasta	6	3	4	4	3	unit
	d. BPR/ BPRS	17	18	18	19	18	unit (di luar Perumda BPR Bank Kulon Progo)
	e. BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan)	14	14	14	14	14	unit (lokasi ada di setiap kapanewon, Kapanewon Pengasih dan Kapanewon

No	Keterangan	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
							kokap masing-masing memiliki 2 unit)
	f. Pegadaian	6	6	6	6	6	unit
2	Jumlah Unit Usaha Daerah						
	a. Jumlah BUMD	4	4	4	4	4	unit (Perumda Air Minum Tirta Binangun, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, PT Selo Adikarto, PT Perumda BPR Bank Kulon Progo
	b. Jumlah Perumda	3	3	3	3	2	unit (Bidang Usaha Perdagangan, Jasa, Industri, Unit PDAM)
	c. Jumlah PT	1	1	1	1	2	Unit (Bidang Usaha Asphalt Mixing Plant)
	d. Jumlah BPR	1	1	1	1	1	unit
	e. Jumlah PDAM	1	1	1	1	1	unit (terdapat 10 unit pelayanan PDAM yang berlokasi di kapanewon)
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (PAD)						
	a. Perumda BPR Bank Kulon Progo	3.290.093.371	1.562.300.300	2.200.759.322	2.400.000.000,00	2.593.388.679	Rp.
	b. Perumda Air Minum Tirta Binangun	-	2.287.779.886	686.853.143	1.264.209.811,00	1.992.807.725	Rp.
	c. BUKP	110.159.416,86	112.877.552,63	86.261.771	61.077.133,08	48.602.920,19	Rp.
	d. PT. Selo Adikarto	-	-	235.147.044	151.811.386,17	-	Rp.
	e. Perumda Aneka Usaha	603.044.076,50	300.000.000	198.588.612	8.569.254,00	72.332.777	Rp.

Sumber data: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Jumlah lembaga keuangan bank dan non bank pada tahun 2024 adalah sebanyak 502 unit, terdiri dari 58 unit Bank Umum Konvensional, 1 unit Bank Umum Syariah, 30 unit Bank Perkreditan Rakyat Konvensional, 3 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 11 Industri Keuangan Non Bank Konvensional,

397 unit lembaga keuangan lainnya. Dilihat dari lokasi sebaran per wilayah kapanewon, Wates merupakan wilayah dengan jumlah lembaga keuangan terbanyak, yaitu 115 lembaga keuangan. Sedangkan Girimulyo merupakan wilayah Kapanewon dengan jumlah lembaga keuangan paling sedikit yaitu 18 lembaga keuangan. Dengan adanya persebaran lembaga keuangan di masing-masing kapanewon maka literasi keuangan masyarakat Kulon Progo akan semakin meningkat. Masyarakat menjadi lebih melek lagi terhadap perbankan dan juga tidak perlu jauh dari masing-masing tempat tinggal karena sudah tersebar di masing-masing kapanewon. Dengan peningkatan literasi perbankan di masyarakat maka akan meningkat kegiatan ekonomi masyarakat karena akses kredit ataupun transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan baik lagi. Pihak perbankan juga akan memperoleh pangsa pasar baru dengan membuka cabang di masing-masing kapanewon. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikutnya dimana setiap tahun posisi simpanan masyarakat dan juga penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah semakin meningkat.

Tabel 2.184

**Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan
Tahun 2023**

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan Non Bank		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
1	Temon	7	0	3	0	1	0	44	55
2	Wates	20	1	10	2	6	0	76	115
3	Panjatan	3	0	1	0	0	0	25	29
4	Galur	3	0	3	0	2	0	27	35
5	Lendah	3	0	1	0	0	0	23	27
6	Sentolo	9	0	2	0	1	0	32	44
7	Pengasih	3	0	3	1	0	0	52	59
8	Kokap	3	0	1	1	0	0	34	38
9	Nanggulan	2	0	3	0	0	0	23	28
10	Girimulyo	2	0	1	0	0	0	15	18
11	Samigaluh	2	0	1	0	0	0	26	29
12	Kalibawang	3	0	3	2	1	0	20	27
JUMLAH		60	1	32	3	11	0	397	504

Tabel 2.185

**Jaringan Kantor Perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Lembaga Pembiayaan
Tahun 2024**

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan Non Bank		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
1	Temon	7		3		1		44	35
2	Wates	19	1	9	2	7		78	18
3	Panjatan	3		1		0		25	27
4	Galur	3		3		2		27	38
5	Lendah	3		1		0		23	27
6	Sentolo	8		2		1		30	27

No	Kapanewon	Bank Umum		Bank Perkreditan Rakyat		Industri Keuangan Non Bank		Lembaga Keuangan Lainnya	Jumlah
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah		
7	Pengasih	3		3	1	0		52	29
8	Kokap	3		1		0		34	59
9	Nanggulan	2		2		0		23	30
10	Girimulyo	2		1		0		15	41
11	Samigaluh	2		1		0		27	55
12	Kalibawang	3		3		1		20	116
JUMLAH		58	1	30	3	12	0	398	502

Tabel 2.186

**Posisi Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020-2024 (juta Rupiah)**

No	Jenis Simpanan	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Giro	238.155	315.375	275.562	256.190	242.310
2	Simpanan Berjangka	961.012	923.480	755.719	974.881	949.594
3	Tabungan	3.017.465	3.240.665	3.152.570	3.528.498	3.541.696
JUMLAH		4.216.631	4.479.519	4.183.850	4.759.569	4.733.592

Sumber data: Bank Indonesia, 2025

Tabel 2.187

**Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (juta Rupiah)**

No.	Kriteria Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mikro	535.594	961.329	1.486.383	1.631.194	1.574.382
2	Kecil	488.756	595.747	569.272	516.014	567.991
3	Menengah	331.456	162.553	85.999	80.181	69.599
JUMLAH		1.355.807	1.719.629	2.141.654	2.227.390	2.184.972

Sumber data: Bank Indonesia, 2025

Tabel 2.188

Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BUMD	Unit	4	4	4	4	4
2	Jumlah Unit Usaha	Unit	7	7	7	7	7
3	Penyertaan Modal (Akumulasi)	Rp.	138.751.570.811	148.145.843.058	166.704.777.590	177.577.969.993	227.075.039.734

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4	Modal Sendiri	Rp.	160.500.384.915	144.542.757.098	163.585.825.912	176.353.156.668	209.750.364.186
5	Volume Usaha (Omzet)	Rp.	149.514.361.911	179.254.276.403	181.674.026.333	208.229.235.894	218.999.322.213
6	Laba Bersih Tahun Berjalan (EAT)	Rp.	1.003.896.466	6.180.892.553	6.905.229.639	9.009.579.124	7.877.528.949
7	Laba yang disetor (PAD)	Rp.	3.893.137.448	4.150.080.186	3.354.371.078	3.824.590.452	4.658.529.181
8	Aset	Rp.	643.960.702.600	660.036.753.422	714.750.445.301	743.528.868.814	817.362.347.750

Sumber data : Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Data di atas merupakan data gabungan dari 4 (empat) BUMD Kabupaten Kulon Progo, yaitu Perumda BPR Bank Kulon Progo yang bergerak di sektor jasa keuangan/perbankan, PT. Selo Adikarto yang bergerak di bidang produksi dan penjualan Asphalt Mixing Plant (AMP), Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang bergerak di sektor usaha perdagangan (SPBU/BBM), industri dan jasa (perbengkelan), dan Perumda Air Minum Tirta Binangun yang bergerak di bidang penyedia air bersih.

Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah ke BUMD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan aset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah tertinggi diberikan kepada Perumda BPR Bank Kulon Progo. Kondisi ini dilatarbelakangi adanya amanah ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana Perumda BPR Bank Kulon Progo merupakan lembaga perbankan yang mengelola dana masyarakat dengan aset lebih dari 300 miliar rupiah sehingga terdapat syarat minimum untuk nilai CAR (Capital Adequacy Ratio)/Rasio Kecukupan Modal yang harus dipenuhi, yaitu 50 miliar rupiah. Sebagai implementasinya telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo, dimana di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang penetapan Modal Dasar Pemerintah Daerah pada PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo sejumlah 50 miliar rupiah, yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dalam bentuk penyertaan modal dan sudah terpenuhi pada tahun 2020.

Modal sendiri pada BUMD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah berupa uang maupun aset serta adanya perubahan pada nilai ekuitas pada masing-masing BUMD. Secara keseluruhan omset pada BUMD mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 terdapat laba bersih akumulasi bernilai negative, hal ini disebabkan adanya kerugian pada PT. Selo Adikarto yang cukup besar sebagai efek adanya pandemi covid yang menyebabkan kegiatan konstruksi tidak dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat kebijakan untuk PT. SAK tidak menyetorkan laba atas laba tahun 2023 yang akan dipergunakan untuk penambahan modal pada Perusahaan (berdasarkan RUPS pada tahun 2024). Perumda Aneka Usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan omzet pada unit (SPBU), perbengkelan dan perdagangan umum. Selain itu juga dikarenakan berkurangnya pendapatan dari penyelenggaraan

event-event yang sudah diprediksi. Pada tahun 2024 dilakukan penutupan unit usaha pertashop yang dinilai menjadi beban Perusahaan yang cukup signifikan. Perumda Air Minum Tirta Binangun mengalami peningkatan laba dari tahun ketahun, dengan semakin bertambahnya jumlah layanan. Pada tahun 2021 Perumda Air Minum Tirta Binangun pertama kali melakukan penyetoran Bagian Laba Yang diberikan kepada Pemerintah daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD atas laba tahun 2019 dan 2020.

Bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya gambaran kinerja BUMD Tahun 2020 - 2024, dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Sumber data : Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 2.41

Perkembangan Laba Disetor oleh BUMD Tahun 2020-2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa laba disetor oleh BUMD paling besar diberikan oleh PD. BPR Bank Kulon Progo meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Selengkapnya perkembangan Lembaga BUMD pada Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.189
Lembaga BUMD Tahun 2024

No	BUMD	Unit Usaha	Penyertaan Moda (Rp.)	Modal Sendiri (Rp.)	Omset (Rp.)	Laba Tahun Berjalan (Rp.)	Laba yang disetor (Rp.)	Aset (Rp.)
1	Bank Kulon Progo	1	65.000.000.000	84.732.546.128	57.700.031.997	5.059.406.940	2.593.388.679	663.008.861.491
2	PT. Selo Adikarto	1	32.156.467.725	(10.003.380.921)	43.578.118.364	1.279.221.709	0	15.609.177.847
3	Perumda Air Minum Tirta Binangun	1	119.918.572.009	126.240.508.936	52.429.292.702	2.704.889.545	1.992.807.725	127.637.660.453

No	BUMD	Unit Usaha	Penyertaan Moda (Rp.)	Modal Sendiri (Rp.)	Omset (Rp.)	Laba Tahun Berjalan (Rp.)	Laba yang disetor (Rp.)	Aset (Rp.)
4	Perumda Aneka Usaha	4	10.000.000.000	10.464.933.784	65.373.719.430	(1.181.120.607)	72.332.777	10.971.165.983
JUMLAH		7	227.075.039.734	211.434.607.927	219.081.162.493	7.862.397.588	4.658.529.181	817.226.865.774

Sumber data : Bagian Perekonomian, Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025
(unaudited)

2.1.3.4.2 Pengawasan

Guna menjamin keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tata peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka fungsi pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Kulon Progo menjadi sangat penting. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 2.190
Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2020-2024

No.	Jenis Obyek Pemeriksaan	2020			2021			2022			2023			2024		
		Jml. Reko mendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
1	Pemeriksaan Berkala / Reguler	40	27	54	40	19	34	28	13	17	35	23	30	42	15	27
2	Pemeriksaan Khusus / Tematik Program / Kegiatan OPD	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pemeriksaan Khusus / Kasus	-	-	-	-	-	-	5	5	5	0	0	0	7	-	-
4	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Khusus / Kasus	19	-	-	-	-	-	5	5	5	15	0	15	12	-	-
5	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	89	111	196	122	80	138	87	70	126	87	87	143	87	82	172
6	Pemeriksaan LKM Binangun	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	5	-	-
7	Reviu Laporan Keuangan OPD	42	-	214	42	-	-	42	42	42	42	0	0	42	-	-
8	Laporan Keuangan Pemda	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	0	0	1	-	-
9	Evaluasi SPIP	20	-	-	42	-	-	42	42	42	42	0	0	42	-	-
10	Evaluasi LkjIP	42	-	-	1	-	-	0	0	0	42	0	0	42	-	-
11	Reviu RKA	42	-	29	48	-	-	84	84	84	84	0	0	84	-	-
12	Reviu RKPD	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	0	0	1	-	-

No.	Jenis Obyek Pemeriksaan	2020			2021			2022			2023			2024		
		Jml. Reko mendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Reko mendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Reko mendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Reko mendasi	Hasil (LHP, LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Reko mendasi
13	Reviu Perubahan RPJMD	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	0	0	1	-	-
13	Reviu Perubahan Renstra OPD	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	0	0	0	0	0
14	Reviu DAK Fisik	27	-	-	27	--	-	27	27	27	27	0	0	96	-	-
15	Pemeriksaan Cash dan Stock Opname	42	-	-	42	-	-	42	42	42	42	0	0	42	-	-
	JUMLAH	251	138	493	251	99	172	408	376	436	461	110	188	485	97	199

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi, ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. Pada tahun 2024, Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) jumlahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sejumlah 485. Akan tetapi jumlah temuan menurun dibandingkan tahun 2023, yaitu sejumlah 97. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dokumen-dokumen yang disusun dan menjadi obyek pemeriksaan sehingga jumlah temuan menurun. Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pemeriksaan reguler karena jumlah objek pemeriksaan yang paling banyak yaitu kalurahan dan perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pendampingan terhadap pemerintah kalurahan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa tahapan penyelenggaran SPIP di Kabupaten Kulon Progo mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di tahun 2024, Kulon Progo mencapai nilai maturitas SPIP sebesar 3,21. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,152. Berikut ini adalah hasil penilaian SPIP dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo yang diwujudkan dalam Indeks Maturitas SPIP.

Tabel 2.191

Nilai SPIP Untuk Perangkat Daerah Se-Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	OPD	Verifikasi Tim	
		Struktur dan Proses	Nilai SPIP
1	Sekretariat Daerah	2,65	2,65

No.	OPD	Verifikasi Tim	
		Struktur dan Proses	Nilai SPIP
2	Sekretariat DPRD	2,65	2,65
3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Perm	2,54	2,54
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2,62	2,62
5	Dinas Perhubungan	2,54	2,54
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,37	2,37
7	Dinas Kesehatan	2,74	2,74
8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	2,71	2,71
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,71	2,71
10	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,71	2,71
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,73	2,73
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,69	2,69
13	Dinas Pertanian dan Pangan	2,68	2,68
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,73	2,73
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2,56	2,56
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2,62	2,62
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2,54	2,54
18	Dinas Kebudayaan	2,71	2,71
19	Dinas Lingkungan Hidup	2,54	2,54
20	Dinas Pariwisata	2,67	2,67
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,89	2,89
22	Inspektorat Daerah	2,76	2,76
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,68	2,68
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2,68	2,68
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2,66	2,66
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,70	2,70
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,69	2,69
28	Satuan Polisi Pamong Praja	2,71	2,71
29	Kapanewon Wates	2,57	2,57
30	Kapanewon Temon	2,77	2,77
31	Kapanewon Panjatan	2,57	2,57
32	Kapanewon Galur	2,68	2,68
33	Kapanewon Sentolo	2,78	2,78
34	Kapanewon Lendah	2,54	2,54
35	Kapanewon Pengasih	2,71	2,71
36	Kapanewon Kokap	2,33	2,33
37	Kapanewon Nanggulan	2,67	2,67
38	Kapanewon Girimulyo	2,57	2,57
39	Kapanewon Samigaluh	2,80	2,80

No.	OPD	Verifikasi Tim	
		Struktur dan Proses	Nilai SPIP
40	Kapanewon Kalibawang	2,54	2,54
41	RSUD Wates -Dinas Kesehatan	2,84	2,84
42	RSUD Nyi Ageng Serang -Dinas Kesehatan	2,82	2,82

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh OPD di Kabupaten Kulon Progo telah mencapai level maturitas “Berkembang” yakni memiliki rentang skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$). Merujuk pada indikator penilaian SPIP pada tahun 2023, terdapat perbedaan dengan penilaian pada tahun 2024, yakni pada komponen penetapan tujuan dan pencapaian tujuan tidak menjadi komponen penilaian Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan dua komponen tersebut berada pada tingkat Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Maka dari itu penilaian maturitas SPIP pada tahun 2024 hanya menggunakan komponen berupa struktur proses.

Pada tingkat ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan praktik pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Tabel 2.192
Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah LKjIP yang nilainya meningkat	PD	31	30	25	34	10
2	Jumlah perangkat daerah	PD	42	42	42	42	42
3	Jumlah obrik yang tidak ada temuan keuangan	Obrik	52	79	56	53	59
4	Jumlah obrik	Obrik	129	162	115	122	129
5	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Rekom	198	134	117	145	168
6	Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan	Rekom	429	250	172	173	208

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2025

Dari hasil evaluasi terhadap LKjIP pada 42 Perangkat Daerah, di tahun 2024 terdapat 10 Perangkat Daerah yang nilainya mengalami peningkatan atau sebanyak 23,8% dari keseluruhan Perangkat Daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah dengan harapan kedepannya capaian dan laporan kinerja perangkat daerah lebih baik dari pelaporan sebelumnya.

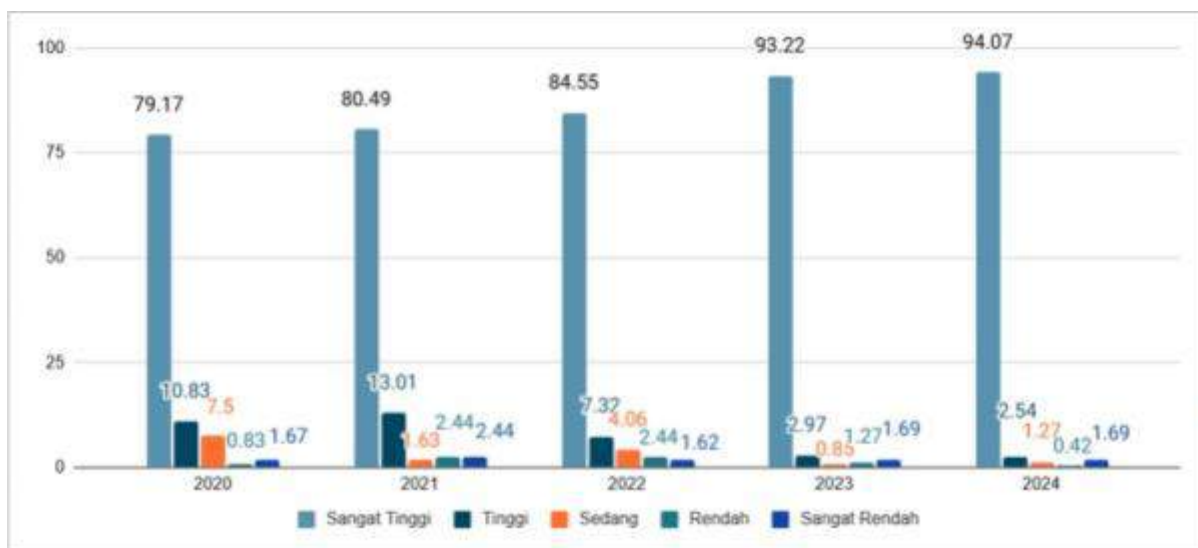
Rasio obrik yang tidak ada temuan keuangan pada tahun 2024 sebesar 45,7%. Sedangkan pada tindak lanjut hasil pengawasan internal, 168 rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dari 208 rekomendasi yang dihasilkan, atau sebesar 80,7%. Peningkatan ini menunjukkan tingkat ketaatan perangkat daerah terhadap ketentuan pengelolaan keuangan sudah semakin membaik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan.

2.1.3.4.3 Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pengukuran pelaksanaan perencanaan pembangunan menggunakan indikator ketercapaian program yang diukur setiap tahunnya, ketercapaian program di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber data: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

*Keterangan: Kriteria Sangat Tinggi: 91%≤100%, Tinggi: 76%≤90%, Sedang: 66%≤75%, Rendah: 51%≤65%, Sangat Rendah: ≤50%. (Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Gambar 2.42

Tingkat Capaian Program RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Tingkat ketercapaian program diukur dengan membandingkan target dengan capaian program, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketercapaian program pada tahun 2020-2024 mengalami

peningkatan pada kriteria sangat tinggi. Hal tersebut berarti kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian outcome semakin bagus di setiap tahunnya.

2.1.3.4.4 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kurun waktu tahun 2020-2024 semakin menurun.

Tabel 2.193
Perkembangan Jumlah ASN Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah ASN	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
1	2020	6.231	9.340	-3.109	66,71%
2	2021	5.870	10.149	-4.279	57,84%
3	2022	5.660	9.591	-3.931	59,01%
4	2023	6.132	9.591	-3.459	63,93%
5	2024	6.130	9.591	-3.461	63,91%

Sumber data : BKPSDM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo, 2024

Rasio kuantitas riil ASN terhadap kebutuhan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 . Hal ini disebabkan jumlah formasi pengadaan CASN tahun 2023 tidak dapat mengimbangi jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2024. Pengurangan personil terjadi secara kontinyu melalui pensiun, mutasi keluar dan meninggal dunia. Sedangkan penambahan personil hanya melalui pengadaan CASN yang sangat dibatasi oleh kuota formasi pemerintah dan mutasi masuk yang tidak menunjukkan penambahan yang signifikan. Meskipun adanya penambahan formasi CASN, rasio kuantitas riil ASN terhadap kebutuhan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja tetap masih besar yaitu sebesar 63,91% dan solusi yang diambil oleh Pemerintah Daerah dengan tetap mengikat kerjasama dengan Tenaga Non ASN yang ada, tanpa melakukan rekrutmen ulang. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang PPPK, bahwa pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat Tenaga Non ASN selain PPPK yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Tabel 2.194
Pelatihan Kepemimpinan ASN Tahun 2020-2024

No.	Tahun	PKN/ Diklatpim II		PKA/ Diklatpim III		PKP/ Diklatpim IV	
		Pejabat Struktural Belum Diklatpim	Jml Peserta Diklatpim	Pejabat Struktural Belum Diklatpim	Jml Peserta Diklatpim	Pejabat Struktural Belum Diklatpim	Jml Peserta Diklatpim
1	2020	15	-	57	7	146	4
2	2021	11	6	48	24	87	60
3	2022	11	4	47	10	74	28
4	2023	13	7	63	23	99	58
5	2024	7	3	21	21	39	19

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Kulon Progo, 2024

Data di atas menunjukkan masih terdapat kesenjangan kompetensi pejabat struktural terutama dalam unsur pemenuhan Diklatpim. Sampai akhir 2024 diperhitungkan sejumlah 4 pejabat eselon II belum melaksanakan Diklatpim II atau yang sekarang disebut Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, pejabat eselon III telah melaksanakan Diklatpim III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) seluruhnya dan 20 pejabat eselon IV belum melaksanakan Diklatpim IV/ Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Jumlah pejabat eselon yang belum melaksanakan Diklatpim semakin menurun di tahun 2024.

Tabel 2.195
Data ASN Menurut Jabatan Tahun 2020-2024

No.	Jabatan	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	33	32	32	30	32
2.	Administrator (Eselon III)	153	155	153	151	137
3.	Pengawas (Eselon IV)	445	277	273	270	260
5.	Eselon V	0	0	0	0	0
4.	Pelaksana (JFU)	1189	1.135	1.117	1.029	947
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	4019	4.168	3.954	4.652	4.754
Jumlah		5.839	5.769	5.529	6.132	6130

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Kulon Progo, 2024

Data di atas menunjukkan jumlah pejabat struktural dari eselon II sampai eselon IV dan jabatan fungsional umum dan tertentu dalam 5 tahun terakhir. Jumlah riil pejabat struktural tersebut masih kurang dari kebutuhan yang seharusnya ada. Untuk eselon II dari kebutuhan 34 pejabat, per 31 desember 2024 sudah terpenuhi seluruhnya sebanyak 32 pejabat. Untuk eselon III dari kebutuhan sebanyak 155 pejabat juga sudah terisi 137 pejabat. Sedangkan untuk eselon IV yang seharusnya sesuai kebutuhan sebanyak 276 pejabat baru terisi 260 pejabat. Untuk Jabatan JFU mengalami tren penurunan hal ini dikarenakan pengadaan CASN tahun 2023 tidak ada formasi CPNS, sehingga di tahun 2024 tidak ada tambahan CPNS sedangkan jumlah pensiun PNS terus bertambah. Pejabat JFT mengalami tren peningkatan mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024, hal ini disebabkan adanya tambahan PPPK hasil rekrutmen tahun 2023. Pada tahun 2024 mendapatkan tambahan JFT dari rekrutmen PPPK dengan rincian, PPPK Tenaga Kesehatan sejumlah 47, PPPK tenaga Guru 245, dan PPPK Tenaga Teknis 71.

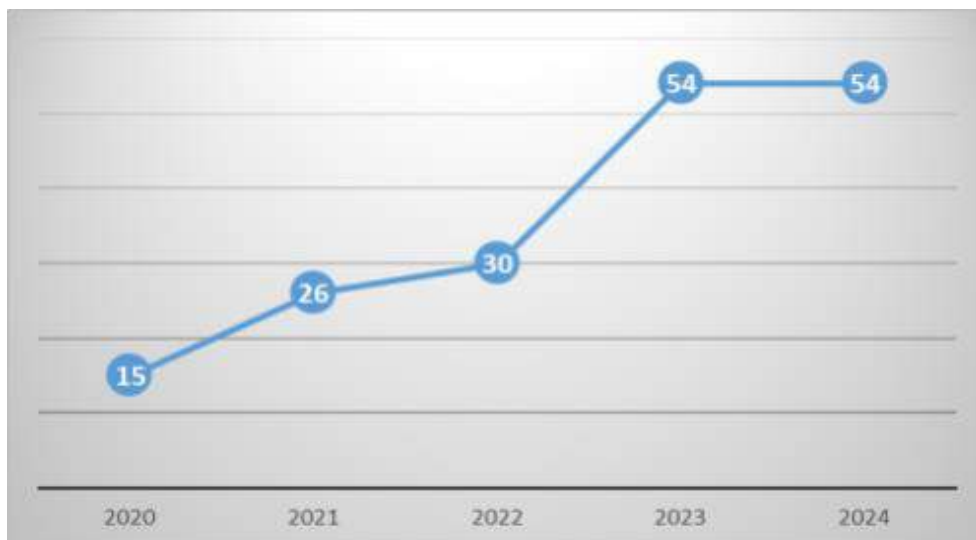
2.1.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas inovasi berkelanjutan merupakan jawaban terhadap tantangan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dapat diatasi hanya dengan investasi dalam sistem pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi berkelanjutan dalam mengembangkan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih hijau, bersih, dan lebih kreatif menjadi salah satu isu utama negara berkembang. Untuk menjawab hal tersebut diperlukan sebuah strategi pembangunan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi yang murah, mudah, dan ramah lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) lahir dari akal, cipta, rasa dan karsa mempunyai peran yang sangat penting dalam

membentuk peradaban manusia. Otonomi daerah memberikan ruang aktualisasi kehidupan berdemokrasi bagi masyarakat dengan diberikan kebebasan bertanggung jawab berupa kebebasan berpikir, kebebasan berkarya, kebebasan berbicara, dan kebebasan berpendapat. Ruang kebebasan ini semestinya bisa dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan sesuai kebutuhan dan keunggulan daerah masing-masing secara berkelanjutan.

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memerlukan dukungan sangat besar untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis riset dan IPTEK. Untuk itu pemerintah sebagai pelaksana kebijakan pembangunan perlu mendorong peningkatan SDM produktif. Sebuah pepatah mengatakan bahwa anda tidak akan pernah menjadi besar kalau anda tidak tahu betapa besar potensi yang anda miliki. Kulon Progo menyimpan banyak potensi yang memiliki nilai ekonomis strategis jika diolah secara baik. Secara umum kualitas keberhasilan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola berbagai potensi lokalnya. Banyak produk unggulan daerah yang mampu menembus pasar global, seperti produk berbasis kreativitas, seni, dan budaya. Pengolahan sumber daya lokal dengan nilai tambah (added chain) menjadi komoditas unggulan daerah dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan. Pemberian nilai tambah produk harus dapat meningkatkan kualitas produk supaya dapat diterima secara berkelanjutan, dan mengikuti tren pasar, sehingga pemerintah harus mampu bersikap responsif terhadap perkembangan dalam masyarakat sehingga menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman serta kondusif untuk berkreasi dan berinovasi.

Sebagai langkah penguatan karakter produk lokal berbasis masyarakat tersebut diwujudkan kegiatan berupa Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh yang dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut seiring dengan tujuan penerapan IPTEK dan Inovasi di Kabupaten Kulon Progo yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM dan produk lokal yang berdaya saing. Animo masyarakat untuk mengikuti Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber data: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 2.43
Perkembangan Jumlah Peserta Anugerah Iptek Kreanova Menoreh
Tahun 2020-2024 (orang)

Selain pelaksanaan Anugerah IPTEK Kreanova Menoreh memotivasi masyarakat dan pelajar mengembangkan inovasinya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mendorong perangkat daerah

untuk berinovasi dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, untuk mendorong inovasi pemerintahan maupun pelayanan publik, telah ditetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengertian inovasi daerah, tujuan inovasi, kriteria inovasi, inisiator, mekanisme pengusulan dan penetapan inovasi daerah.

Salah satu pengukuran kinerja inovasi pemerintahan adalah Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Innovative Government Award (IGA). Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Innovative Government Award pada tahun 2019 merupakan capaian ini paling baik selama 7 tahun terakhir, yaitu menduduki peringkat nasional ke-2 dengan predikat Sangat Inovatif. Akan tetapi mulai tahun 2020, indeks inovasi daerah semakin menurun. Pada tahun 2020, indeks inovasi Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Sangat Inovatif ke-25. Pada tahun 2021, menjadi kabupaten inovatif pada urutan ke-37, pada tahun 2022 menjadi urutan ke-72 dari 415 Kabupaten se-Indonesia, pada tahun 2023 menjadi urutan ke-46, dan di tahun 2024 menjadi urutan ke-126. Penurunan indeks inovasi daerah ini perlu menjadi perhatian bersama dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meluncurkan “Gerakan Bersama Memajukan Inovasi Daerah Kulon Progo “ atau Gema Indahku. Melalui gerakan ini diharapkan dapat mendorong mendorong kolaborasi dan memotivasi perangkat daerah untuk melakukan inovasi. Salah satu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah. Salah satu bentuk perubahannya adalah dengan mewajibkan Perangkat Daerah, Kapanewon, BUMD, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas untuk mengusulkan paling sedikit 1 (satu) satuan inovasi kepada Bupati setiap 2 tahun anggaran. Perubahan Peraturan Bupati ini telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah.

Sampai dengan akhir tahun 2024, satuan inovasi yang berhasil diidentifikasi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah sejumlah 208 satuan inovasi. Satuan inovasi ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 569/C/2024 tentang Satuan Inovasi Daerah Tahun 2024. Adapun Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 mendapatkan nilai 54,68 dengan predikat Kabupaten Inovatif peringkat ke-126 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024.

Adapun data capaian kinerja Kabupaten Kulon Progo dalam Innovative Government Award, dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.196

Capaian Pemkab Kulon Progo dalam Innovative Government Award

No	Tahun	Skor Indeks Inovasi Daerah	Peringkat Nasional	Predikat
1	2020	4,129	25	Sangat Inovatif
2	2021	56,64	37	Inovatif
3	2022	55,87	72	Inovatif
4	2023	58,44	46	Inovatif

No	Tahun	Skor Indeks Inovasi Daerah	Peringkat Nasional	Predikat
5	2024	54,68	126	Inovatif

Sumber data : Bapperida, 2025 (diolah)

2.1.3.4.6 Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada 2007-2012 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun mulai 2013 sampai dengan 2024 Kulon Progo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah. Realisasi kinerja ini telah berimbang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-DIY.

Realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dari target yang telah ditetapkan. Berikut ini capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2020-2024.

Tabel 2.197

Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah realisasi pendapatan (milyar rupiah)	1.582,44	1.533,84	1.530,33	1.695,99	1.755,011
2.	Jumlah target pendapatan (milyar rupiah)	1.641,67	1.570,80	1.503,68	1.699,95	1.761,55
3.	Persentase realisasi pendapatan terhadap target	96,39	97,65	101,77	99,79	99,63
4.	Jumlah realisasi pendapatan asli daerah (milyar rupiah)	254,42	307,15	308,15	324,05	358,09
5.	Jumlah target pendapatan asli daerah (milyar rupiah)	217,55	246,60	265,27	308,44	351,58
6.	Jumlah realisasi belanja (milyar rupiah)	1.500,04	1.404,81	1.532,66	1.694,77	1.778,56
7.	Jumlah anggaran belanja (milyar rupiah)	1.702,95	1.657,35	1.669,93	1.818,99	1.874,71
8.	Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD) tepat waktu	8	8	8	14	14
9.	Jumlah dokumen keuangan daerah	8	8	8	14	14
10.	Jumlah PD tertib administrasi aset	42	42	42	40	40
11.	Jumlah PD	42	42	42	40	40

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Lampiran II.05 PSAP 04 disebutkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui secara kuantitatif berdasarkan tingkat efektivitas yang diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. Dalam konteks pengukuran efektivitas pendapatan, hasil adalah realisasi pendapatan, sedangkan target adalah anggaran pendapatan. Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka/persentase mendekati 100% maka disimpulkan semakin efektif. Dari Tabel 2.28 tampak bahwa Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 mencapai tingkat

efektivitas sebesar 101,85%, Pendapatan Transfer efektivitas sebesar 99,07% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat efektivitas sebesar 100,00%.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ditentukan dari tingkat efektivitas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Untuk Pajak Daerah tingkat efektivitas mencapai 80,81%. Untuk Pendapatan Retribusi Daerah berhasil mencapai tingkat efektivitas sebesar 113,84%. Untuk Retribusi Jasa Umum mencapai 114,92%. Retribusi Jasa Usaha 95,76% dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 114,16%. Untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai tingkat efektivitas 100,74%. Untuk Lain-lain PAD yang Sah tingkat efektivitas mencapai 106,73% yang diantaranya disumbang oleh: Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan mencapai 173,14%, Jasa Giro mencapai 122,08%, Pendapatan Bunga mencapai 139,81%, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain mencapai 119,88%, dan Pendapatan dari Pengembalian mencapai 233,69%.

Tabel 2.198
Jumlah SILPA Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) (Rp)	141.788.201.409,49	216.357.696.129,17	163.810.144.445,24	120.467.732.132,50	89.601.683.220,35
2	Jumlah Total APBD (Rp)	1.532.691.349.747,55	1.657.347.485.069,21	1.669.930.685.519,17	1.818.996.970.903	1.874.718.088.900
3	Persentase SILPA terhadap APBD	9,25	13,05	9,81	6,62	4,78

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari data di atas menunjukkan persentase SILPA setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 2.199
Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Belanja Urusan Pendidikan (Rp)	382.979.334.074	331.449.330.514	510.387.915.163	524.157.265.965
2	Jumlah Belanja Pembagi (Rp)	1.712.529.104.848	1.214.553.641.788	1.818.996.970.903	1.874.718.088.900
3	Persentase Belanja Urusan Pendidikan terhadap APBD	31,46	27,29	28,06	27,96

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran terkait dengan pendidikan adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Alokasi belanja pendidikan di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi

ketentuan tersebut bahkan lebih. Hal ini didukung oleh adanya belanja yang bersumber dari DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik. Khususnya DAK Non Fisik terdapat belanja BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, dimana alokasi dana BOS tersebut ditentukan berdasarkan jumlah siswa di setiap Satuan Pendidikan Negeri.

Tabel 2.200
Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Belanja Urusan Kesehatan (Rp)	241.612.935.618	246.402.011.584	414.475.092.824	436.448.506.340
2	Jumlah Belanja Pembagi (Rp)	541.382.970.040	630.712.895.176	1.378.289.032.677	1.412.314.431.374
3	Persentase Belanja Urusan Kesehatan terhadap APBD	44,63	39,07	30,07	30,90

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji. Alokasi belanja kesehatan di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi ketentuan tersebut bahkan lebih. Hal ini didukung oleh adanya belanja yang bersumber dari DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik

Tabel 2.201
Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2021-2024

No.	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (Rp)	115.109.449.264	123.150.854.639	404.783.645.177	379.048.616.991
2	Persentase Belanja Infrastruktur Daerah	25,03	20,45	24,80	22,52

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pemerintah mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum minimal sebesar 40% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat tersedianya layanan publik di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan data Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah tahun 2020-2024 di atas dapat dilihat bahwa persentase Belanja Infrastruktur Daerah belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.202
Perbandingan Kelompok Belanja Tahun 2020-2024 (Rp)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	BELANJA	1.424.664.917.806,15	1.499.994.321.770,05	1.532.665.350.605,25	1.694.770.096.247,73	1.778.569.823.070,68

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Operasi	1.046.975.947.135,15	1.115.704.992.163,05	1.215.554.395.271,25	1.290.493.325.958,73	1.399.220.075.937,45
2	Belanja Modal	323.349.537.374,00	202.257.018.228,00	147.226.457.660,00	219.397.654.552,00	188.155.116.808,23
3	Belanja Tak Terduga	54.339.433.297,00	3.432.978.345,00	3.047.005.849,00	1.092.325.768,00	2.536.789.038
II	TRANSFER	75.375.023.929,00	178.599.333.034,00	166.837.491.825,00	183.786.789.969,00	188.657.841.287
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	7.440.234.929,00	11.402.009.234,00	11.778.750.925,00	10.289.880.760,00	10.938.793.287
2	Transfer Bantuan Keuangan	67.934.789.000,00	167.197.323.800,00	155.058.740.900,00	173.496.909.200,00	177.719.048.000

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 2.203
Jumlah Belanja Bagi Hasil ke Kalurahan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil ke Kalurahan (Rp)	6.668.613.511,00	11.402.009.234	11.778.950.925	10.289.880.769	10.938.793.287
2	Jumlah Total APBD (Rp)	1.532.691.349.747,55	1.657.347.485.069,21	1.669.930.685.519,17	1.818.996.970.903	1.874.718.088.900
3	Persentase belanja bagi hasil ke Kalurahan terhadap APBD	0,44	0,66	0,66	0,57	0,58

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah untuk menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah telah mengkoordinasikan semua perangkat daerah yang mengampu pajak dan retribusi terdiri dari :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Nyi Ageng Serang
4. RSUD Wates
5. DPUPKP
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Kominfo
8. Dinas Pariwisata
9. Dinas Kebudayaan
10. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
11. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah
12. Dinas Pertanian dan Pangan

13. Dinas Kelautan dan Perikanan

14. Dinas Perdagangan

Dalam penyusunannya selain mencermati amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, relevansi muatan materi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ada (*existing*), juga mencermati Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, terdapat arahan presiden tentang transformasi digital, antara lain:

- a) Perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital
- b) Peta jalan pelaksanaan transformasi digital
- c) Mempersiapkan SDM yang mampu menerapkan percepatan transformasi digital
- d) Mempersiapkan regulasi transformasi digital

Selanjutnya, pemerintah melalui Kemendagri menerbitkan SE Mendagri nomor 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Regulasi ini diikuti dengan diterbitkannya Keppres nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Kabupaten Kulon menindaklanjutinya dengan membuat peta jalan rencana aksi.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah yang semakin kompleks, dinamis, dan menuntut efisiensi berbasis data, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara progresif mengintegrasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mendasar dan strategis. Implementasi ETPD dimaksudkan untuk mengubah paradigma pengelolaan keuangan konvensional menuju sistem yang berbasis teknologi digital, menciptakan ekosistem fiskal yang transparan, akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.

ETPD bukan sekadar digitalisasi administratif, tetapi sebuah kerangka transformasional yang mengintervensi secara sistemik terhadap seluruh siklus anggaran—baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Transformasi ini diwujudkan melalui pemanfaatan kanal transaksi nontunai yang aman, cepat, dan terdokumentasi secara real-time, mencakup: QRIS, virtual account, e-wallet, e-SPTPD, SP2D Online, Cash Management System (CMS), serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Sejak pendirian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada tahun 2020, Kabupaten Kulon Progo secara bertahap menunjukkan tren peningkatan integrasi kanal digital dalam sistem keuangan publik.

Per akhir tahun 2024, tercatat lebih dari 70% transaksi penerimaan daerah telah terekam secara nontunai, menandai capaian substansial dalam kerangka efisiensi fiskal, pencegahan kebocoran PAD, serta percepatan akses terhadap data kas daerah secara langsung. Hal ini menegaskan peran ETPD sebagai tulang punggung dalam realisasi prinsip *value for money* dan integritas fiskal daerah.

2.1.3.5 Fokus Keistimewaan

Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp101.077.205.874,00. Pelaksanaan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sesuai dengan

amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program/kegiatan pada 4 (empat) urusan yaitu Urusan Kelembagaan, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang.

Total pagu Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp101.077.205.874,00 dan pagu sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp100.885.549.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31

Desember 2024 adalah sebesar Rp98.833.629.775,00 (Fungsional) setara 97,78% terhadap capaian satu tahun, dan capaian fisik sebesar 99,53%.

Tabel 2.204

Alokasi Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

No.	Program	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Kelembagaan	1.289.277.500	2.022.107.300	3.438.368.500	3.088.691.400	4.721.781.160
2.	Kebudayaan	93.604.771.950	39.232.907.187	53.537.121.889	78.148.581.431	70.053.652.777
3.	Pertanahan	3.170.804.000	2.283.952.800	3.071.831.000	2.389.841.700	2.339.490.100
4.	Tata Ruang	4,387,908.950	545.590.500	2.572.796.375	15.206.257.238	23.962.281.837
Jumlah		102.452.762.400	44.084.557.787	62.620.117.764	98.833.371.769	101.077.205.874

2.1.3.5.1 Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah diampu oleh 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu dan Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, Dinas Komunikasi dan Informatika dan 12 Kapanewon. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 (satu) program, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dan terperinci menjadi 7 (tujuh) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp4.721.781.160,00 dengan pagu tahap III sebesar Rp4.709.886.259,00 dan terealisasi sebesar Rp4.591.431.393,00 (Fungsional) atau sebesar 97,24% terhadap target satu tahun. Capaian fisik sebesar 100% terhadap target satu tahun.

Tabel 2.205
URUSAN KELEMBAGAAN

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
URUSAN KELEMBAGAAN							75.83	4,721,781,160.00	3,517,127,793.00	74.49	3,504,798,541.00	74.226
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN							75.83	4,721,781,160.00	3,517,127,793.00	74.49	3,504,798,541.00	74.226
1	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. KULON PROGO						100.00	324,748,000.00	300,045,550.00	92.39	299,280,550.00	92.16
A	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN						100.00	184,000,000.00	176,675,850.00	96.02	176,306,050.00	95.82
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota						100.00	184,000,000.00	176,675,850.00	96.02	176,306,050.00	95.82
		1. Dokumen evaluasi perangkat daerah pengampu urusan keistimewaan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Jumlah ASN yang memahami kelembagaan asli = 200 orang	200	orang	200	orang	100.00					
		3. Publikasi kelembagaan asli = 4 tema	4	tema	4	tema	100.00					
B	PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN						100.00	140,748,000.00	123,369,700.00	87.65	122,974,500.00	87.37
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						100.00	140,748,000.00	123,369,700.00	87.65	122,974,500.00	87.37
		1. Jumlah PD dengan tingkat implementasi Budaya Pemerintahan berkategori baik = 32 PD (dari 68 PD)	32	PD	32	PD	100.00					
		2. ASN yang memahami tentang Budaya Pemerintahan = 200 orang (P3K)	200	orang (P3K)	200	orang (P3K)	100.00					
2	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. KULON PROGO						100.00	31,492,100.00	31,492,100.00	100.00	30,247,726.00	96.05

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
A	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN						100.00	31,492,100.00	31,492,100.00	100.00	30,247,726.00	96.05
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						100.00	31,492,100.00	31,492,100.00	100.00	30,247,726.00	96.05
		1. Jumlah Kapanewon yang berkinerja baik = 12 Kapanewon (dari 12 Kapanewon)	12	Kapanewon	12	Kapanewon	100.00					
3	BAPPEDA KULON PROGO						100.00	234,880,000.00	227,736,898.00	96.96	227,736,898.00	96.959
A	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN						100.00	234,880,000.00	227,736,898.00	96.96	227,736,898.00	96.959
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						100.00	165,260,000.00	160,613,353.00	97.19	160,613,353.00	97.188
		1. Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2024 = 2 dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00					
		2. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2025 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		4. Dokumentasi hasil perencanaan program dan kegiatan keistimewaan tahun 2024 = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00					
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan						100.00	69,620,000.00	67,123,545.00	96.41	67,123,545.00	96.41
		1. Laporan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK	1	laporan	1	laporan	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		Keistimewaan Tahun 2023 Tahap Akhir = 1 laporan										
		2. Laporan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Keistimewaan Tahun 2024 per tahapan = 2 laporan	2	laporan	2	laporan	100.00					
		3. Bimtek Kenes = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALDUK KB KAB. KULON PROGO						100.00	1,285,222,860.00	1,281,988,655.00	99.75	1,276,854,916.00	99.35
A	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN						100.00	1,285,222,860.00	1,281,988,655.00	99.75	1,276,854,916.00	99.35
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan						100.00	1,285,222,860	1,281,988,655	99.75	1,276,854,916.00	99.35
		1. Peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan keistimewaan di Tingkat Kalurahan 1 tematik = 87 Kalurahan	87	Kalurahan	87	Kalurahan	100.00					
		2. Tambahan penghasilan sebagai pengganti pelungguh Kalurahan Karangkopek = 12 bulan	12	bulan	12	bulan	100.00					
		3. Laporan hasil monev pelaksanaan reformasi Kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		4. Penyusunan Raperbup (pedoman SAKip Kalurahan dan pedoman penyelenggaraan publik di kalurahan) = 2 Raperbup	2	raperbup	2	raperbup	100.00					
		0	2	sosialisasi	2	sosialisasi	100.00					
5	BKPP KAB. KULON PROGO						100.00	410,805,100.00	410,804,300.00	100,00	407,961,125.00	99.308

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
A	PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN						100.00	410,805,100.00	410,804,300.00	100,00	407,961,125.00	99.308
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota						100.00	410,805,100.00	410,804,300.00	100.00	407,961,125.00	99.308
		1. Jumlah ASN Eselon III Kabupaten Kulon Progo yang mengikuti internalisasi keistimewaan = 30 orang	30	orang	30	orang	100.00					
		2. Jumlah Asn Eselon IV Kabupaten Kulon Progo yang mengikuti internalisasi Keistimewaan = 30 orang	30	orang	30	orang	100.00					
6	KAPANEWON KAB. KULON PROGO (12 Kapanewon)						100.00	477,620,000.00	473,902,697.00	99.22	472,478,500.00	98.92
A	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN						100.00	477,620,000.00	473,902,697.00	99.22	472,478,500.00	98.92
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						100.00	437,620,000.00	473,902,697.00	108.29	472,478,500.00	107.97
	Kapanewon Temon						100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	39,773,432.00	99.43
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Laporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan Kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Wates						100.00	40,000,000.00	39,000,000.00	97.50	38,824,009.00	97.06
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		3. Fasilitas koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Panjatan						100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	39,687,780.00	99.22
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Fasilitas koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Galur						100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	39,909,159.00	99.77
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Fasilitas koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Lendah						100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	39,774,060.00	99.44
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Fasilitas koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Sentolo						100.00	37,620,000.00	37,477,030.00	99.62	37,477,030.00	99.62

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Pengasih						100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	39,777,147.00	99.44
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Kokap						100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	39,841,699.00	99.60
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Fasilitasi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Girimulyo						100.00	40,000,000.00	39,311,869.00	98.28	39,308,539.00	98.27
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Fasilitas koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Nanggulan						100.00	40,000,000.00	39,913,798.00	99.78	39,913,798.00	99.78
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Fasilitas koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Kalibawang						100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	40,000,000.00	100.00
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		3. Fasilitas koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
	Kapanewon Samigaluh						100.00	40,000,000.00	38,200,000.00	95.50	38,191,847.00	95.48
		1. Usulan rencana program dan kegiatan Keistimewaan tahun 2026 = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		2. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan = 1 dokumen per Kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		3. Fasilitas koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB kalurahan = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
7	DINAS KESEHATAN						100.00	715,672,000	692,007,593.00	96.69	691,798,285.00	97
A	PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN						100.00	715,672,000	692,007,593.00	96.69	691,798,285.00	97
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						100.00	715,672,000	692,007,593.00	96.69	691,798,285.00	97
		1. Pengembangan Posbindu Disabilitas Sentosa = 1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00					
		2. Mobil Layanan Posbindu Disabilitas Sentosa = 1 unit	1	unit	1	unit	100.00					
8	DPMPTSP						100.00	100,000,000	99,150,000.00	99.15	98,440,541.00	98
A	PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN						100.00	100,000,000	99,150,000.00	99.15	98,440,541.00	98
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota						100.00	100,000,000	99,150,000.00	99.15	98,440,541.00	98
		Inovasi Pelayanan Publik Si Peri Manis Kapanewon = 1 inovasi	1	inovasi	1	inovasi	100.00					
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						100.00	1,141,341,100	1,141,307,500	100.00	1,086,632,852.00	95.207
A	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN						100.00	1,141,341,100	1,141,307,500	100.00	1,086,632,852.00	95.207
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan						100.00	1,141,341,100	1,141,307,500	100.00	1,086,632,852.00	95.207
	0	Database Sosial Ekonomi Kapanewon = 2 Kapanewon	2	kapanewon	2	kapanewon	100.00					

2.1.3.5.1 Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan diampu oleh 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kabupaten Kulon Progo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta 12 Kapanewon. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 (satu) program, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dan terperinci menjadi 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp70.053.652.777,00, alokasi tahap III sebesar Rp69.882.427.193,00 dan terealisasi sebesar Rp68.847.361.630,00 (Fungsional) atau sebesar 98,28% terhadap target satu tahun. Capaian fisik sebesar 100% terhadap target satu tahun.

Tabel 2.206
URUSAN KEBUDAYAAN

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
URUSAN KEBUDAYAAN							100.00	70,053,652,777.00	69,125,808,539.00	98.68	68,847,361,630.00	98.28
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.00	70,053,652,777.00	69,125,808,539.00	98.68	68,847,361,630.00	98.28
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						100.00	200,000,000.00	199,265,000.00	99.63	190,475,236.00	95.24
A	PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA						100.00	200,000,000.00	199,265,000.00	99.63	190,475,236.00	95.24
i	Pembinaan Muatan Lokal						100.00	200,000,000.00	199,265,000.00	99.63	190,475,236.00	95.24
		Pengembangan Pendidikan karakter Khas Yogyakarta = 2 Jenjang	2	jenjang	2	jenjang	100.00					
2	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				0	0	100.00	175,000,000.00	174,957,600.00	99.98	172,292,781.00	98.45
A	ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	175,000,000.00	174,957,600.00	99.98	172,292,781.00	98.45
	Pengembangan Ekonomi Perempuan				0	0	100.00	175,000,000.00	174,957,600.00	99.98	172,292,781.00	98.45
		Pembinaan Desa Prima = 3 Kalurahan/Kelurahan	3	Kalurahan/ kelurahan	3	Kalurahan/ kelurahan	100.00					
3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO				0	0	100.00	3,465,955,800.00	3,162,509,585.00	91.24	3,146,550,435.00	90.78
A	PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA				0	0	100.00	2,293,345,500.00	1,989,899,285.00	86.77	1,979,482,833.00	86.31
	Pengembangan Lumbung Mataraman				0	0	100.00	635,345,500.00	612,937,912.00	96.47	607,654,808.00	95.64
		Fasilitasi Penumbuhan Kegiatan Lumbung Mataraman = 5 KWT	5	KWT	5	KWT	100.00					
		Grebeg Lumbung Mataraman = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
		Kontes Ternak Kambing PE = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional				0	0	100.00	1,658,000,000.00	1,376,961,373.00	83.05	1,371,828,025.00	82.74

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		1. Fasilitasi saprodi budidaya Padi Lokal Menor = 50 Ha	50	Ha	50	Ha	100.00					
		2. Fasilitasi Pengembangan Bawang Merah Sri Kayang = 1 kelompok	1	kelompok	1	kelompok	100.00					
		3. Pembangunan Retaining Wall/Talud di Kawasan Pengembangan Jamur = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00					
B	PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA				0	0	100.00	1,172,610,300.00	1,172,610,300.00	100.00	1,167,067,602.00	99.53
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia				0	0	100.00	1,172,610,300.00	1,172,610,300.00	100.00	1,167,067,602.00	99.53
		1. Terselenggaranya tradisi upacara Wiwitan = 5 lokasi	5	lokasi	5	lokasi	100.00					
		2. Fasilitasi saprodi untuk kelompok tani lahan surjan = 10 kelompok	10	kelompok	10	kelompok	100.00					
		3. Sekolah Lapang GAP-GHP Bawang Merah = 10 kelompok	10	kelompok	10	kelompok	100.00					
		4. Fasilitasi sarana tradisi Gumbregi = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00					
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO				0	0	100.00	1,936,573,600.00	1,930,244,641.00	99.67	1,929,544,641.00	99.64
A	ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	1,936,573,600.00	1,930,244,641.00	99.67	1,929,544,641.00	99.64
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				0	0	100.00	1,936,573,600.00	1,930,244,641.00	99.67	1,929,544,641.00	99.64
		1. Pengadaan sarana prasarana TPS3R = 2 KSM	2	KSM	2	KSM	100.00					
		2. Sarana Prasarana Bank Sampah = 18 Bank Sampah	18	Bank Sampah	18	Bank Sampah	100.00					
		3. Sosialisasi Pengelolaan Sampah = 650 orang	650	orang	650	orang	100.00					
		4. Pelatihan Pengelolaan Sampah = 50 orang	50	orang	50	orang	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		5. Bimtek bank Sampah = 60 orang	60	orang	60	orang	100.00					
		6. Bimtek TPS3R = 30 orang	30	orang	30	orang	100.00					
		7. Pembuatan Video Edukasi Pengelolaan Sampah = 1 video	1	video	1	video	100.00					
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				0	0	100.00	800,000,000.00	797,021,202.00	99.63	797,021,202.00	99.63
A	SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN				0	0	100.00	800,000,000.00	797,021,202.00	99.63	797,021,202.00	99.63
i	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital				0	0	100.00	800,000,000.00	797,021,202.00	99.63	797,021,202.00	99.63
		Jaringan Internet untuk Pedukuhan = 10 titik	10	titik	10	titik	100.00					
6	DINAS KOPERASI DAN UKM				0	0	100.00	219,452,200.00	219,452,200.00	100.00	215,528,547.00	98.21
A	PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA				0	0	100.00	219,452,200.00	219,452,200.00	100.00	215,528,547.00	98.21
i	Pengembangan Industri Kreatif				0	0	100.00	219,452,200.00	219,452,200.00	100.00	215,528,547.00	98.21
		Gebyar UMKM = 1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00					
7	DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO				0	0	100.00	22,379,825,008.00	22,247,527,067.00	99.41	22,210,234,956.00	99.24
A	KEGIATAN SEJARAH BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN				0	0	100.00	2,031,020,800.00	2,005,377,189.00	98.74	1,995,336,590.00	98.24
i	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				0	0	100.00	617,739,100.00	615,766,591.00	99.68	615,757,992.00	99.68
		1. LCC Sejarah = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		2. Peringatan Hari Besar Sejarah = 4 kali	4	kali	4	kali	100.00					
		3. Lawatan Sejarah = 3 kali	3	kali	3	kali	100.00					
		4. Penulisan Buku Sejarah Lokal = 2 dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00					
ii	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra				0	0	100.00	1,021,564,000.00	999,743,275.00	97.86	999,483,275.00	97.84

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		1. Kompetisi Bahasa dan Sastra = 1 event 7 jenis lomba: - Alih Aksara - Macapat - Geguritan - Maca Cerkak - Mendongeng - Sesorah - Pranata Adicara	1	event	1	event	100.00					
		2. Macapat = 12 kali	12	kali	12	kali	100.00					
		3. Apresiasi Sastra = 3 kali	3	kali	3	kali	100.00					
		4. Pawiyatan Pranata Adicara = 30 orang	30	orang	30	orang	100.00					
iii	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				0	0	100.00	391,717,700.00	389,867,323.00	99.53	380,095,323.00	97.03
		1. LCC Museum = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		2. Wajib Kunjung Museum = 150 orang	150	orang	150	orang	100.00					
		3. Pameran Koleksi Museum = 1 event	1	event	1	event	100.00					
B	PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA				0	0	100.00	635,934,016.00	631,946,434.00	99.37	631,946,434.00	99.37
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				0	0	100.00	635,934,016.00	631,946,434.00	99.37	631,946,434.00	99.37
		1. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo = 20 naskah	20	naskah	20	naskah	100.00					
		2. Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya SD N Butuh = 1 lokasi	1	lokasi	1	lokasi	100.00					
		3. Rehabilitasi bangunan Cagar Budaya Puskesmas Sentolo 1 = 1 lokasi	1	lokasi	1	lokasi	100.00					
		4. Penyusunan Rekomendasi Teknis Talud Jembatan Duwet = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
C	PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA				0	0	100.00	3,690,526,072.00	3,637,703,722.00	98.57	3,637,703,722.00	98.57

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota				0	0	100.00	3,690,526,072.00	3,637,703,722.00	98.57	3,637,703,722.00	98.57
		1. Pemeliharaan Gedung dan Taman Budaya = 12 bulan	12	bulan	12	bulan	100.00					
		2. Pentas Band = 0 kali	0	kali	0	kali	#DIV/0!					
		3. Pentas Seni Tradisi = 36 kali	36	kali	36	kali	100.00					
		4. Art For Children = 24 kali	24	kali	24	kali	100.00					
		5. Pentas Kethoprak = 3 kali	3	kali	3	kali	100.00					
		6. Pentas Sendratari = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
		7. Pentas Teater = 0 kali	0	kali	0	kali	#DIV/0!					
		8. Pentas Musik Kolaborasi = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
		9. Kulon Progo Manekawarna = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
		10. Pentas Wayang Kulit/Golek = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
		11. Pentas Wayang Wong = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
D	SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN				0	0	100.00	1,202,540,000.00	1,187,554,647.00	98.75	1,178,092,047.00	97.97
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				0	0	100.00	1,202,540,000.00	1,187,554,647.00	98.75	1,178,092,047.00	97.97
		1. Pengadaan Kostum Karawitan = 2 set	2	set	2	set	100.00					
		2. Pengadaan Gamelan = 5 set	5	set	5	set	100.00					
		3. Alat Musik Religi = 2 set	2	set	2	set	100.00					
		4. Alat Musik Jathilan = 3 set	2	set	2	set	100.00					
		5. Kostum Jathilan = 5 set	24	set	24	set	100.00					
E	ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	14,819,804,120.00	14,784,945,075.00	99.76	14,767,156,163.00	99.64
i	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya				0	0	100.00	1,287,476,000.00	1,286,030,329.00	99.89	1,286,030,329.00	99.89

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		1. Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh = 36 Kalurahan	36	Kalurahan	36	Kalurahan	100.00					
		2. Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang = 31 Kalurahan	31	Kalurahan	31	Kalurahan	100.00					
ii	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				0	0	100.00	600,000,000.00	599,800,000.00	99.97	599,633,265.00	99.94
		1. Pameran Seni Rupa = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		2. Fasilitasi Karya Film = 1 event	1	event	1	event	100.00					
iii	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				0	0	100.00	907,615,600.00	892,135,841.00	98.29	883,808,107.00	97.38
		1. Misi Kebudayaan Jakarta (GSBY) = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		2. Misi Kebudayaan Jakarta (Citra Budaya) = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		3. Misi Kebudayaan ke Jawa Timur = 1 event	1	event	1	event	100.00					
iv	Penghargaan Seniman dan Budayawan				0	0	100.00	300,000,000.00	294,182,004.00	98.06	290,658,694.00	96.89
		1. Penerimaan Penghargaan Seniman dan Budayawan = 5 kategori	5	kategori	5	kategori	100.00					
v	Festival Kebudayaan Yogyakarta				0	0	100.00	496,494,000.00	496,289,102.00	99.96	496,289,102.00	99.96
		1. Pentas Seni = 2 event	2	event	2	event	100.00					
		2. Pawai Seni = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		3. Pasar Seni = 1 event	1	event	1	event	100.00					
vi	Gelar Budaya Jogja				0	0	100.00	4,364,675,000.00	4,363,593,400.00	99.98	4,359,338,023.00	99.88
		1. Festival Kethoprak Tk Kabupaten dan Pengiriman ke DIY = 2 event	2	event	2	event	100.00					
		2. Festival Langen Carita Tk Kabupaten dan Pengiriman ke DIY = 2 event	2	event	2	event	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		3. Pembinaan Sendratari dan Pengiriman ke DIY = 2 event	2	event	2	event	100.00					
		4. Pembinaan Teater dan Pengiriman ke DIY = 2 event	2	event	2	event	100.00					
		5. Pembinaan Karawitan = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		6. Menoreh Art Festival = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		7. Lomba Lukis DIY-Kyoto = 1 kali	1	kali	1	kali	100.00					
		8. Pengiriman Langen Sekar ke DIY = 1 event	1	event	1	event	100.00					
vii	Publikasi Seni dan Budaya Daerah				0	0	100.00	225,000,000.00	224,560,393.00	99.80	224,560,393.00	99.80
		1. Siaran Media Elektronik (Siaran TV Indoor) = 2 Kali	2	kali	2	kali	100.00					
		2. Kaleidoskop = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
viii	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi				0	0	100.00	833,960,000.00	833,119,863.00	99.90	833,119,863.00	99.90
		1. Nyadran Agung = 1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00					
		2. Fasilitasi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI) Kulon Progo = 2 kali	2	kali	2	kali	100.00					
		3. Festival Musik Religi = 1 event	1	event	1	event	100.00					
ix	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				0	0	100.00	1,719,396,000.00	1,717,690,623.00	99.90	1,717,679,733.00	99.90
		1. Pembinaan Dhalang Anak dan Remaja Wayang Kulit (Bimtek, Festival Kabupaten dan Festival DIY) = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		2. Pembinaan Dhalang Anak dan Remaja Wayang	1	event	1	event	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		Golek (Bimtek dan Festival DIY) = 1 event										
		3. Festival Wayang Wong Tingkat DIY = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		4. Perayaan Gelar Potensi Warisan Budaya Tak Benda = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		5. Pergelaran Wayang Kulit = 3 event	3	event	3	event	100.00					
		6. Pergelaran Wayang Golek = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		7. Kajian Warisan Budaya Tak Benda = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
		8. Fasilitasi Dewan Kebudayaan Kulon Progo = 12 bulan	12	bulan	12	bulan	100.00					
		9. Permainan Tradisional = 1 event	1	event	1	event	100.00					
x	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni				0	0	100.00	2,450,432,800.00	2,447,386,303.00	99.88	2,446,999,852.00	99.86
		1. Pentas Fasilitasi Seni Budaya = 60 kelompok	46	kelompok	46	kelompok	100.00					
		2. Parade Budaya Perbatasan = 4 kali	3	kali	3	kali	100.00					
		3. Nggugah Budaya Menoreh = 2 event	2	event	2	event	100.00					
xi	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				0	0	100.00	1,634,754,720.00	1,630,157,217.00	99.72	1,629,038,802.00	99.65
		1. Festival Upacara Adat = 1event	1	event	1	event	100.00					
		2. Workshop Upacara Adat Daur Hidup = 2 hari	2	hari	2	hari	100.00					
		3. Fasilitasi Upacara Adat = 60 kali	60	kali	60	kali	100.00					
		4. Bimtek Ubo Rampe Upacara Adat = 2 hari	2	hari	2	hari	100.00					
		5. Pentas Gadon = 6 kali	6	kali	6	kali	100.00					
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				0	0	100.00	5,694,825,969.00	5,662,609,178.00	99.43	5,647,618,271.00	99.17
A	KEGIATAN PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA				0	0	100.00	5,694,825,969.00	5,662,609,178.00	99.43	5,647,618,271.00	99.17

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
i	Pengembangan Budaya Bahari				0	0	100.00	5,694,825,969.00	5,662,609,178.00	99.43	5,647,618,271.00	99.17
		1. Pembangunan TPI Trisik = 1 unit	1	unit	1	unit	100.00					
		2. Sarana Produksi Budidaya Ikan untuk Pokdakan Wanita dengan BlumbangKu = 26 kelompok	16	kelompok	16	kelompok	100.00					
		3. Sarana Prasarana untuk Poklahsar Wanita = 12 kelompok	6	kelompok	6	kelompok	100.00					
		4. Pengembangan Pasar Ikan Sarwo Laris = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00					
		5. Lomba Gerbang Segoro = 12 kapanewon	12	kapanewon	12	kapanewon	100.00					
		6. Bantuan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan untuk Nelayan = 2 kelompok	2	kelompok	2	kelompok	100.00					
		7. Pengembangan Kampung Lele Asap = 1 unit	1	unit	1	unit	100.00					
		8. Jaga KaliKu = 12 Kapanewon	12	kapanewon	12	kapanewon	100.00					
		9. Rehab UPI = 1 unit	1	unit	1	unit	100.00					
		10. Pengkayaan Ikan Endemik Lokal = 114.444 ekor	114444	ekor	114444	ekor	100.00					
		11. Sarana Pengawasan SDI = 12 kelompok	12	kelompok	12	kelompok	100.00					
9	DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO				0	0	100.00	32,520,173,700.00	32,084,759,288.00	98.66	31,899,604,128.00	98.09
A	PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA				0	0	100.00	16,220,243,000.00	15,952,683,780.00	98.35	15,926,440,758.00	98.19
i	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya				0	0	100.00	16,220,243,000.00	24,881,862,160.00	153.40	28,837,598,778.00	177.79
		1. Kiskendha Mrahaswara = 15 event	15	event	15	event	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		2. Pentas Atraksi Wisata Budaya = 67 kali	46	kali	46	kali	100.00					
		3. Gerakan Sambanggo = 10 kali	10	kali	10	kali	100.00					
		4. Glagah Lagoon Festival = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		5. Romansa Pansela = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		6. Sepekan Bendung Khayangan = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		7. Menoleh ke Menoreh = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		8. Festival Paralayang Wisata = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		9. Jelajah Wisata = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		10. Jemparing Wisata = 1 event	1	event	1	event	100.00					
B	SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN				0	0	100.00	5,005,660,000.00	4,894,855,730.00	97.79	4,887,965,130.00	97.65
i	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya				0	0	100.00	5,005,660,000.00	4,894,855,730.00	97.79	4,887,965,130.00	97.65
		1. Pembangunan Kawasan Paralayang Banjarasri = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00					
		2. DED Pembangunan Tempat parkir dan Pintu Masuk Glagah = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00					
		3. DED Pendopo Joglo Glagah = - paket	1	paket	1	paket	100.00					
C	ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	11,294,270,700.00	11,237,219,778.00	99.49	11,085,198,240.00	98.15
i	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				0	0	100.00	3,248,981,900.00	3,248,381,478.00	99.98	3,217,915,354.00	99.04
		1. Lomba Gelar Potensi Desa Wisata = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		2. Pameran Wisata Budaya = 4 event	4	event	4	event	100.00					
		3. Pameran Ekonomi Kreatif = 1 event	1	event	1	event	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		4. Menoreh Food Festival = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		5. Festival Pacak Sepuran = 0 titik	0	titik	0	titik	#DIV/0!					
ii	Publikasi Seni dan Budaya Daerah				0		100.00	8,045,288,800.00	12,203,704,500.00	151.69	13,209,643,686.00	164.19
		1. Cetak bahan promosi Pariwisata = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00					
		2. Promosi melalui Media Luar Ruang = 4 paket	4	paket	4	paket	100.00					
		3. Promosi melalui media elektronik = 12 kali	12	kali	12	kali	100.00					
		4. Rally Foto Konservasi = 1 event	1	event	1	event	100.00					
		5. Fam trip Difabel = 1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00					
		6. Pembekalan Dimas Diajeng Kulon Progo = 1 kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100.00					
		7. Karya Seni Instalasi Wisata = 6 paket	6	paket	6	paket	100.00					
		8. Pembuatan Film Pariwisata = 3 film	3	film	3	film	100.00					
		9. Wayang Wisata Istimewa = 12 kali	12	kali	12	kali	100.00					
		10. Misi Pariwisata = 3 event	3	event	3	event	100.00					
		11. Tour de Menoreh = 1 event	1	event	1	event	100.00					
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KULON PROGO				0	0	100.00	331,000,000.00	330,845,351.00	99.95	326,420,960.00	98.62
A	PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA				0	0	100.00	331,000,000.00	330,845,351.00	99.95	326,420,960.00	98.62
i	Pengembangan Industri Kreatif	Bimbingan Teknis Pengembangan Produk (Keris, Gendewo (Busur) dan Mata Panah Jemparingan) = 100 orang	100	orang	100	orang	100.00	331,000,000.00	330,845,351.00	99.95	326,420,960.00	98.62

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
	0	Pameran Produk IKM Berbasis Budaya = 1 event	1	event	1	event	100.00					
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				0	0	100.00	247,846,500.00	239,473,391.00	96.62	239,473,391.00	96.62
A	PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA				0	0	100.00	247,846,500.00	239,473,391.00	96.62	239,473,391.00	96.62
i	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia				0	0	100.00	247,846,500.00	239,473,391.00	96.62	239,473,391.00	96.62
		1. Verifikasi Pengusulan Geopark Jogja Menjadi Geopark Nasional = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00					
		2. Deliniasi Geodiversity Site Kabupaten Kulon Progo = 0 situs	15	situs	15	situs	100.00					
		3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi di Kabupaten Kulon Progo = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00					
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						100.00	889,000,000.00	885,288,000.00	99.58	884,986,997.00	99.55
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA						100.00	889,000,000.00	885,288,000.00	99.58	884,986,997.00	99.55
0	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Pengadaan Tangki Air = 1 unit	1	unit	1	unit	100.00	889,000,000.00	885,288,000.00	99.58	884,986,997.00	99.55
12	KAPANEWON TEMON				0	0	100.00	98,000,000.00	98,000,000.00	100.00	97,858,528.00	99.86
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	98,000,000.00	98,000,000.00	100.00	97,858,528.00	99.86
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	98,000,000.00	98,000,000.00	100.00	97,858,528.00	99.86
13	KAPANEWON WATES				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,996,451.00	100.00
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,996,451.00	100.00
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,996,451.00	100.00
14	KAPANEWON PANJATAN				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,485,500.00	99.49

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,485,500.00	99.49
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,485,500.00	99.49
15	KAPANEWON GALUR				0	0	100.00	98,000,000.00	98,000,000.00	100.00	97,930,725.00	99.93
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	98,000,000.00	98,000,000.00	100.00	97,930,725.00	99.93
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	98,000,000.00	98,000,000.00	100.00	97,930,725.00	99.93
16	KAPANEWON LENDAH				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,856,870.00	99.86
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,856,870.00	99.86
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,856,870.00	99.86
17	KAPANEWON SENTOLO				0	0	100.00	100,000,000.00	99,920,388.00	99.92	99,919,601.00	99.92
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	100,000,000.00	99,920,388.00	99.92	99,919,601.00	99.92
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	100,000,000.00	99,920,388.00	99.92	99,919,601.00	99.92
18	KAPANEWON PENGASIH				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	96,722,340.00	96.72
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	96,722,340.00	96.72
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	96,722,340.00	96.72
19	KAPANEWON KOKAP				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,990,983.00	99.99
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,990,983.00	99.99
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,990,983.00	99.99
20	KAPANEWON GIRIMULYO				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,913,439.00	99.91
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,913,439.00	99.91

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	99,913,439.00	99.91
21	KAPANEWON NANGGULAN				0	0	100.00	98,000,000.00	97,935,648.00	99.93	97,935,648.00	99.93
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	98,000,000.00	97,935,648.00	99.93	97,935,648.00	99.93
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	98,000,000.00	97,935,648.00	99.93	97,935,648.00	99.93
22	KAPANEWON KALIBAWANG				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00	100.00
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00	100.00
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00	100.00
23	KAPANEWON SAMIGALUH				0	0	100.00	100,000,000.00	98,000,000.00	98.00	98,000,000.00	98.00
A	ADAT SENI TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA				0	0	100.00	100,000,000.00	98,000,000.00	98.00	98,000,000.00	98.00
i	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY = 1 laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	100,000,000.00	98,000,000.00	98.00	98,000,000.00	98.00

2.1.3.5.1 Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan diampu oleh 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 (satu) program, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dan terperinci menjadi 4 (empat) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp2.339.490.100,00, alokasi tahap III sebesar Rp2.338.430.070,00 dan terealisasi sebesar Rp1.740.077.347,00 (Fungsional) atau sebesar 74,38%. Capaian fisik sebesar 79,89% terhadap target satu tahun.

Realisasi fisik untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tidak sesuai target disebabkan target sasaran obyek pendaftaran kegiatan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sampai tahun 2025 adalah tanah wedi kengser, sedangkan tanah wedi kengser dari tahun 2023 masih dalam pembahasan dengan kanwil Pertanahan dan kementerian Agraria, sehingga obyek pendaftaran dari tahun 2024 ini mengidentifikasi tanah tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang bukan Wedi Kengser. Sedangkan obyek pendaftaran di luar Wedi Kengser sudah habis dan tinggal menyisakan yang masih ada permasalahan. Selain itu untuk TUK pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertifikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan belum ada realisasi disebabkan masih menunggu kesiapan menu pada aplikasi dari Kantah.

Tabel 2.207

**Kondisi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2021-2022**

No	Status Tanah	2021			2022		
		Total Bidang	Proses Di Daftarkan	Sudah Terbit Sertifikat	Total Bidang	Proses Di Daftarkan	Sudah Terbit Sertifikat
1	Kasultanan	1.399	1.399	366	1.399	1.399	366
2	Kadipaten	488	488	179	488	488	179
	JUMLAH	1.887	1.887	545	1.887	1.887	545

Sumber data: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, 2023

Tabel 2.208
URUSAN PERTANAHAN

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
URUSAN PERTANAHAN							79.89	2,339,490,100.00	1,751,230,170.00	74.86	1,740,077,347.00	74.38
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN							79.89	2,339,490,100.00	1,751,230,170.00	74.86	1,740,077,347.00	74.38
1	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO						75.96	1,956,766,900.00	1,373,138,203.00	70.17	1,362,068,333.00	69.61
A	PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN						71.88	1,673,067,400.00	1,097,552,045.00	65.60	1,086,602,175.00	64.95
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						70.00	1,568,067,400.00	996,990,596.00	63.58	986,174,796.00	62.89
		1. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo = 100 Bidang	100	bidang	30	bidang	30.00					
		2. Pemberkasan, Pembuatan dan Pemasangan Patok Tanah Kasultanan / Tanah Kadipaten = 100 bidang	100	bidang	79	bidang	79.00					
		3. Pendaftaran Sertipikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo = 150 bidang	150	bidang	67	bidang	44.67					
		4. Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertifikat Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo = 1.000 sertifikat	1000	sertifikat	0	sertifikat	0.00					
		5. Identifikasi Tanah Kasultanan / Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan = 3 Kapanewon	3	Kapanewon	3	Kapanewon	100.00					
		6. Verifikasi Tanah Kalurahan belum bersertipikat = 69 bidang	69	bidang	69	bidang	100.00					
		7. Pemberkasan, Pembuatan dan Pemasangan Patok Tanah Kalurahan = 69 bidang	69	bidang	69	bidang	100.00					

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		8. Pendaftaran Pengukuran Tanah Kalurahan = 69 bidang	69	bidang	6	bidang	100.00					
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Kulon Progo = 30 Dokumen	30	Dokumen	30	Dokumen	100.00	105,000,000.00	100,561,449.00	95.77	100,427,379.00	95.65
B	PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN						100.00	283,699,500.00	275,586,158.00	97.14	275,466,158.00	97.10
	Penyiapan Bahan Petimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						100.00	85,000,000.00	84,467,124.00	99.37	84,467,124.00	99.37
		Fasilitasi Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Kulon Progo = 20 rekomendasi	20	rekomendasi	20	rekomendasi	100.00	0.00				
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						100.00	198,699,500.00	191,119,034.00	96.18	190,999,034.00	96.12
		Fasilitasi rekomendasi Bupati/Kepala DPTR untuk penanganan permasalahan Tanah kalurahan = 3 Kalurahan (Kebonharjo, Hargowilis, Jatisarono)	3	Kalurahan (Kebonharjo, Hargowilis, Jatisarono)	3	Kalurahan (Kebonharjo, Hargowilis, Jatisarono)	100.00	0.00				
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN KULON PROGO						100.00	382,723,200.00	378,091,967.00	98.79	378,009,014.00	98.77
A	PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN						100.00	382,723,200.00	378,091,967.00	98.79	378,009,014.00	98.77
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						100.00	382,723,200.00	378,091,967.00	98.79	378,009,014.00	98.77

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		Berita Acara Penegasan Batas kalurahan: a. Pembuatan peta batas kalurahan = 11 Kalurahan b. Berita acara kesepakatan = 11 Kalurahan c. Pembuatan pilar batas kalurahan = 11 Kalurahan d. Pemasangan pilar batas kalurahan = 11 Kalurahan	11	Kalurahan	11	Kalurahan	100.00					
		Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Penegasan Batas Wilayah di 1 Kapanewon = 1 Rancangan Peraturan Bupati	1	Rancangan Peraturan Bupati	1	Rancangan Peraturan Bupati	100.00					

2.1.3.5.2 Urusan Tata Ruang

Urusan Tata Ruang diampu oleh 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pekerjaan Umum dan PKP, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 (satu) program, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dan terperinci menjadi 3 (tiga) sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp23.962.281.837,00, alokasi tahap III sebesar Rp23.954.805.478,00 dan terealisasi sebesar Rp23.654.759.405,00 (Fungsional) atau sebesar 98,72% terhadap target satu tahun. Capaian fisik sebesar 100% terhadap target satu tahun.

Berikut ini progres penyusunan Dokumen Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis (SRS) kasultanan/kadipaten:

Tabel 2.209
Progres Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang
Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan

No	Jenis Dokumen Rencana Tata Ruang	Uraian	Alasan/Urgensi	Keterangan
1	Rencana Induk	SRS Kota Wates	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Belum disusun
		SRS Perbukitan Menoreh	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Disusun tahun 2020
		SRS Pantai Selatan	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Belum disusun
		SRS Makam Girigondo	Pendetailan RTR, berfungsi sebagai perangkat operasional pelaksanaan/implementasi	Disusun tahun 2021
2	RTBL Kawasan SRS Kota Wates	Kawasan Bulu Pengasih	Penataan kawasan cagar budaya	Disusun tahun 2015
3	RTBL Kawasan SRS Perbukitan Menoreh	Banjaroya	Kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi perbatasan	Belum disusun
		Tonogoro	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Disusun tahun 2015
		Nglinggo-Tritis	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Disusun tahun 2018
		Jatimulyo	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun

No	Jenis Dokumen Rencana Tata Ruang	Uraian	Alasan/Urgensi	Keterangan
4	RTBL Kawasan SRS Pantai Selatan	Hargorejo	Kawasan inti SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Sermo	Kawasan penyangga SRS Perbukitan Menoreh, strategis ekonomi/pariwisata	Disusun tahun 2017
		Karangwuni	Kawasan strategis ekonomi pelabuhan	Belum disusun
		Glagah	Kawasan strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Jangkaran	Kawasan strategis ekonomi	Belum disusun
5	RTBL Kawasan SRS Makam Girigondo	Banaran (Sekitar Trisik)	Kawasan strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Bugel	Kawasan strategis ekonomi/pariwisata	Belum disusun
		Girigondo	Penataan kawasan cagar budaya	Disusun tahun 2017

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang(Kundha Niti Mandhala lan Niti Sasana) Kab. Kulon Progo, 2021.

Tabel 2.210
URUSAN TATA RUANG

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
URUSAN TATA RUANG							100.00	23,962,281,837.00	23,682,569,534.00	98.83	23,654,759,405.00	98.72
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG							100.00	23,962,281,837.00	23,682,569,534.00	98.83	23,654,759,405.00	98.72
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PKP KABUPATEN KULON PROGO						100.00	19,072,656,413.00	18,985,190,920.00	99.54	18,985,190,920.00	99.54
A	PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN						100.00	19,072,656,413.00	18,985,190,920.00	99.54	18,985,190,920.00	99.54
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						100.00	12,699,721,031.00	12,692,122,469.00	99.94	12,692,122,469.00	99.94
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat di Kalurahan Banjarsari, Samigaluh = 70 SR	70	SR	70	SR	100.00	525,000,000.00	-		-	
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat di Kalurahan Hargomulyo. Kokap = 100 SR	100	SR	100	SR	100.00	750,000,000.00	-		-	
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat di Kalurahan Giripurwo, Girimulyo = 80 SR	80	SR	80	SR	100.00	600,000,000.00	-		-	
		Peningkatan dan pengembangan layanan air bersih masyarakat di Kalurahan Kalirejo, Kokap = 180 SR	180	SR	180	SR	100.00	825,000,000.00	-		-	
		Instalasi Sampah Termal: - Mesin Pengolah Sampah Termal = 1 unit - Hanggar = 1 unit - Conveyor = 1 unit - Shredder = 1 unit	1	unit	1	unit	100.00	9,999,721,031.00	-		-	

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo						100.00	6,372,935,382.00	6,293,068,451.00	98.75	6,293,068,451.00	98.75
		Drainase Lingkungan Girigondo = 600 m	600	m	600	m	100.00	822,852,112.00	-		-	
		Pembangunan Penerangan Lingkungan Girigondo = 18 unit	25	unit	25	unit	100.00	320,465,270.00	-		-	
		Pembangunan Jalan Makam Girigondo (Lanjutan) = 117 meter	117	m	117	m	100.00	722,000,000.00	-		-	
		Pembangunan Jalan Makam Girigondo (Segmen II) = 884 meter	884	m	884	m	100.00	3,128,000,000.00	-		-	
		Pembangunan Jalan Makam Girigondo (Segmen III) = 398 meter	398	m	398	m	100.00	1,189,514,000.00	-		-	
		Kajian Action Plan dan DED Mitigasi Bencana Longsor SRS Girigondo = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00	190,104,000.00	-		-	
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO						100.00	2,904,347,520.00	2,730,046,920.00	94.00	2,702,607,311.00	93.05
A	PEMANFAATAN RUANG SATUAN STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN						100.00	2,904,347,520.00	2,730,046,920.00	94.00	2,702,607,311.00	93.05
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh						100.00	2,904,347,520.00	2,730,046,920.00	94.00	2,702,607,311.00	93.05
		1. Pengembangan Kawasan Embung Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang:						574,274,000.00	-		-	
		a. Pendampingan pada 3 kawasan embung dan penyangga Embung Tonogoro = 24 kali peningkatan kapasitas	24	kali	24	kali	100.00	180,000,000.00	-		-	
		b. Bantuan Saprodi (Pupuk Organik, NPK dan MKP) = 2 kelompok (KT Sido Maju dan KT Sedyo Makmur)	2	kelompok	2	kelompok	100.00	381,674,000.00	-		-	

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
		c. Gerakan Perawatan Tanaman Durian di KT Sido Maju dan KT Sedyo Makmur = 5 kali	5	kali	5	kali	100.00	12,600,000.00	-		-	
		2. <i>Pengembangan Kawasan Agrowisata Embung Kleco:</i>						581,968,920.00	-		-	
		a. Gerakan Perawatan tanaman Durian di Kawasan Embung Mini Kleco, Giripurwo, Girimulyo = 5 kali	5	kali	5	kali	100.00	12,600,000.00	-		-	
		b. Bantuan Saprodi (Pupuk Organik, NPK dan Booster) = 3 kelompok (Mardi Lestari, Banjar Mulyo, Marsudi Mulyo)	3	kelompok	3	kelompok	100.00	252,000,000.00	-		-	
		c. Pembangunan area kebun = 1 paket	1	paket	1	paket	100.00	317,368,920.00	-		-	
		3. <i>Pengembangan Kawasan Agro Eduwisata Embung Canggal, Sidoharjo Samigaluh:</i>						1,748,104,600.00	-		-	
		a. Gerakan Perawatan tanaman Durian di Kawasan Embung Canggal, Sidoharjo, Samigaluh = 5 kali	5	kali	5	kali	100.00	12,600,000.00	-		-	
		b. Bantuan Saprodi = 1 gapoktan	1	gapoktan	1	gapoktan	100.00	113,750,000.00	-		-	
		c. Pembangunan saluran irigasi di kawasan embung canggal = 1 unit	1	unit	1	unit	100.00	204,000,000.00	-		-	
		d. Pengembangan ternak domba di Samigaluh = 1 kawasan	1	kawasan	1	kawasan	100.00	771,454,600.00	-		-	
		e. Pengembangan kambing PE = 3 kelompok	3	kelompok	3	kelompok	100.00	306,300,000.00	-		-	
		f. 1200 Kelapa genjah dan pupuk organik (hargowilis) = 1 kelompok	1200	kelapa genjah & pupuk organik	1200	kelapa genjah & pupuk organik	100.00	180,000,000.00	-		-	
		g. Festival buah = 1 event	2	event	2	event	100.00	160,000,000.00	-		-	

NO	NOMENKLATUR SUBKEGIATAN	TUK	CAPAIAN KELUARAN					PENYERAPAN ANGGARAN S.D. 31 DES 2024				
			TARGET		CAPAIAN			PAGU	REALISASI SP2D S.D. TAHAP III	%	REALISASI FUNGSIONAL	%
			VOL	SATUAN	VOL	SATUAN	%					
3	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO						100.00	1,254,334,510.00	1,247,564,614.00	99.46	1,247,224,614.00	99.43
A	PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN						100.00	1,254,334,510.00	1,247,564,614.00	99.46	1,247,224,614.00	99.43
	Perencanaan Program / Kegiatan Urusan Tata Ruang						100.00	1,084,334,510.00	1,083,448,390.00	99.92	1,083,448,390.00	99.92
	0	Penyusunan Materi Teknis RDTR Kulon Progo Wilayah Selatan dan RDTR Kulon Progo Wilayah Tengah = 2 Dokumen Raperkada/Pra loket	2	dokumen raperkada/ praloket	2	dokumen raperkada/ praloket	100.00	1,092,596,500.00	-		-	
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruangf Strategis Kasultanan dan Kadipaten				0	0	100.00	170,000,000.00	164,116,224.00	96.54	163,776,224.00	96.34
		Penyusunan RTBL Kawasan Goa Kiskendo = 1 dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00	170,000,000.00	-		-	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO						100.00	730,943,394.00	719,767,080.00	98.47	719,736,560.00	98.47
A	PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN						100.00	730,943,394.00	719,767,080.00	98.47	719,736,560.00	98.47
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan						100.00	235,000,000.00	229,535,591.00	97.67	229,505,071.00	97.66
		Konservasi Pesisir Pantai Trisik Banaran Galur Kulon Progo = 2 hektar	2	hektar	2	hektar	100.00	-	-		-	
	Perencanaan Program / Kegiatan Urusan Tata Ruang						100.00	495,943,394.00	490,231,489.00	98.85	490,231,489.00	98.85
		Penyusunan KLHS RDTR Kulon Progo Wilayah Tengah dan Selatan = 2 dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00	-	-		-	

Pelaksanaan Dana Keistimewaan (Danais) pada Kabupaten Kulon Progo terdiri 4 urusan keistimewaan, yaitu urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, dan urusan tata ruang. Pelaksanaan kegiatan Danais telah memberikan dampak positif dalam berbagai aspek pembangunan yaitu:

- **Pembangunan Infrastruktur**

Danais digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti Rehabilitasi jalan menuju Kawasan obyek wisata Bendung Kayangan, rekonstruksi jalan Pasar Bendo – Beku (Kawasan makro Tonogoro), rekonstruksi jalan menuju Makam Girigondo Tahap I, Peningkatan dan Pengembangan layanan air bersih bagi masyarakat Desa Hargotirto Kokap, Ngargosari Samigaluh, Purwosari Girimulyo, Pendoworejo Girimulyo, Banjararum kalibawang serta pembangunan prasarana penunjang di Kawasan Embung Mini Kleco

- **Pelestarian dan Pengembangan Budaya**

Danais mendukung pelestarian warisan budaya, pengembangan seni dan budaya serta pendidikan

- **Peningkatan Kualitas Layanan Publik**

Digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk Implementasi Budaya Pemerintahan pada Pelayanan Publik Posbindu Disabilitas Sentosa pada Puskesmas Sentolo I dan Pelayanan Si Peri Manis Kapanewon pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- **Penguatan Sektor Ekonomi**

Dana Keistimewaan berperan dalam mendukung sektor ekonomi terutama di bidang pariwisata dan budaya. Dengan terlaksananya event – event tersebut terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pada sector usaha terjadi peningkatan omzet bagi UMKM dan pedagang kaki lima (PKL), lonjakan pendapatan dari sector parkir dan jasa transportasi local, usaha kuliner serta jasa lainnya sehingga terjadi perputaran ekonomi. Selain itu juga terjadi penyerapan tenaga kerja yang terdiri dari petugas kebersihan, keamanan, vendor, EO dan Pemandu.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, fasilitas wilayah dan iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum *Engel/Engel Law* bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2024 untuk bahan makanan sebesar 46,47 persen, angka tersebut lebih rendah dari Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan non makanan, namun persentasenya naik dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 43,66 persen. Adapun komposisi tingkat pengeluaran per kapita sebulan menurut Kelompok Makanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211

**Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (persen)**

No	Kelompok Makanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	6,08	6,74	5,54	5,91	6,60
2	Umbi-umbian	0,52	0,70	0,57	0,56	0,41
3	Ikan/udang/cumi/kerang	1,70	1,69	1,83	1,30	1,29
4	Daging	1,74	2,16	2,48	2,42	2,34
5	Telur dan Susu	3,09	3,11	2,88	2,95	2,66
6	Sayur-sayuran	3,64	4,50	3,69	3,66	3,93
7	Kacang-kacangan	1,14	1,42	1,28	1,60	1,51
8	Buah-buahan	2,37	2,23	2,87	2,28	2,73
9	Minyak dan kelapa	1,32	1,52	1,75	1,34	1,41
10	Bahan Minuman	1,80	2,14	1,84	1,72	1,92
11	Bumbu-bumbuan	0,73	0,91	0,93	0,79	0,89
12	Bahan makanan lainnya	0,86	0,96	1,00	0,96	0,89
13	Makanan dan Minuman Jadi	16,73	15,66	14,76	13,75	14,84
14	Rokok dan Tembakau	3,50	4,26	4,71	4,42	5,05
Jumlah / Total		45,22	48,01	46,13	43,66	46,47

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi diikuti oleh kelompok padi-padian, kelompok rokok dan tembakau, kelompok sayuran, dan kelompok telur dan susu. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Kulon Progo pola konsumsinya menginginkan yang lebih praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi.

Untuk konsumsi tembakau dan sirih walaupun sudah ada perda masalah rokok tingkat konsumsinya masih tergolong tinggi yaitu 4,42 persen walaupun terus menurun dari tahun ke tahun. Sementara

itu untuk konsumsi ikan masih sangat rendah, hanya berkisar 1,30 persen mengalami penurunan dibandingkan konsumsi ikan di tahun 2022.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan).

Pengeluaran konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 56,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi bahan makanan. Adapun komposisi tingkat pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.212

**Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (persen)**

No	Kelompok Bukan Makanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	22,68	25,45	24,61	25,99	26,93
2	Aneka Barang dan Jasa	12,98	12,12	13,18	11,65	12,66
3	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	2,77	2,18	2,04	2,11	2,24
4	Barang Tahan Lama	8,03	7,08	7,04	9,67	4,42
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	3,45	4,05	4,99	4,54	4,86
6	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	4,86	1,11	2,01	2,38	2,41
Jumlah		54,78	51,99	53,87	56,34	53,53

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tingkat pengeluaran tertinggi tahun 2024 pada Kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga 26,93 persen dan diikuti oleh Kelompok Aneka Barang dan Jasa sebesar 11,65 persen, sedangkan pengeluaran terendah pada Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala. Pada Tahun 2024 secara umum pengeluaran per kapita pada Kelompok Bukan Makanan mengalami penurunan signifikan pada kelompok Barang Tahan Lama.

Apabila dilihat rasio pengeluaran non pangan terhadap pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kabupaten Kulon Progo nilainya berfluktuatif, pada periode 2020-2024 rasio tertinggi dicapai pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,563. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.213

**Rasio Pengeluaran Non Pangan terhadap Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan
di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran non pangan rata-rata per kapita sebulan	515.169	458.427	575.926	705.666	616.794
2	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan	940.502	881.689	1.069.000	1.252.450	1.152.288
3	Rasio	0,548	0,520	0,538	0,563	0,535

Sumber data: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan tahun 2023 kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebesar 88,56%. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang. Nilai kesesuaian ruang merupakan perpaduan keterwujudan dan keselarasan pemanfaatan ruang yang setidaknya terdiri atas aspek struktur ruang dan pola ruang. Nilai tersebut merupakan hasil pemantauan dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara periodik setiap tahun.

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang pada Lampiran II, nilai kesesuaian tata ruang Kabupaten Kulon Progo berada pada klasifikasi I yang merupakan tingkatan tertinggi dengan klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW. Rekomendasi berupa saran kebijakan dan Strategi mempertahankan dan/atau meningkatkan kesesuaian program dan lokasi program pemanfaatan ruang dan/atau saran revisi sebagian RTRW.

Adapun penggunaan/pemanfaatan lahan di Kabupaten Kulon Progo dalam hal kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tercantum dalam Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 bisa dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.214

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024

No	Jenis rencana tata ruang	Kesesuaian tata ruang (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Struktur ruang	86,38	87,00	87,22	87,33	87,36
2.	Pola ruang	89,67	89,58	89,88	89,78	89,86
3.	Rata-rata struktur ruang dan pola ruang	88,03	88,29	88,55	88,56	88,61

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala sarta Tata Sasana)

Kabupaten Kulon Progo, 2024

Dengan adanya beberapa proyek strategis nasional berupa pembangunan bandara, kereta bandara, jalan bebas hambatan serta penetapan kawasan strategis pariwisata nasional, konstelasi penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo sudah semestinya dilakukan penyesuaian. Proses perubahan Perda 1/2012 telah dilakukan sejak Tahun 2017 dan telah dilakukan peninjauan kembali. Pada Tahun 2024 ini RTRW masih dalam proses pra loket dalam rangka persiapan untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. Revisi RTRW beserta penataan ruang turunannya sangat diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kulon Progo yang dengan adanya beberapa kegiatan strategis menjadi sangat pesat dan dinamis.

b. Kawasan peruntukan industri.

Kawasan industri merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri dengan harapan adanya badan usaha pengelola kawasan yang menaungi dan menyediakan berbagai fasilitas bagi kegiatan usaha yang akan melakukan usaha nya pada kawasan tersebut. Kawasan peruntukan industri telah direncanakan kurang lebih 10 tahun. Beberapa instrumen pendukungnya seperti peningkatan akses jalan dan regulasi kemudahan serta insentif penanaman modal telah dikeluarkan.

Beberapa kegiatan industri dari berbagai sektor telah mulai berdiri namun hingga kini belum ada badan hukum yang menjadi pengelola kawasan. Kawasan peruntukan industri tersebut adalah:

- a) Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 4.796 Ha di Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Lendah.
- b) Kawasan Industri Temon di Kapanewon Temon berupa industri bahari dengan luas kurang lebih 500 Ha.
- c) Kawasan peruntukan industri yang berada di Kapanewon Nanggulan dengan luas 700 Ha
- d) Industri Kecil dan Mikro, tersebar diseluruh kapanewon.

c. Luas wilayah produktif

Penentuan wilayah produktif dilakukan melalui pendekatan pada lahan pertanian produktif karena penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo masih didominasi oleh lahan pertanian. Hal ini memiliki relevansi dengan mata pencaharian penduduk Kulon Progo yang mayoritas berada pada sektor pertanian. Luas lahan pertanian produktif yang dimaksud meliputi lahan sawah, hutan rakyat dan perikanan budidaya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, persentase luas wilayah produktif Tahun 2018-2019 tidak dapat diperbandingkan secara linear dengan persentase luas wilayah produktif pada tahun-tahun sebelumnya karena mulai Tahun 2018 terjadi perubahan cara perhitungan dan penggunaan *baseline* data untuk menentukan luas kawasan sawah, hutan rakyat dan perikanan budidaya.

Tabel 2.215

Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Luas Wilayah produktif (Ha)	31.375,30	31.375,30	31.375,30	31.431,76	31.529,30
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	37.658,23	37.658,23	37.658,23	37.658,23	37.658,23
3.	Rasio (1./2.)	83,26	83,26	83,26	83,47	83,72

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada Tahun 2023, persentase wilayah produktif di Kabupaten Kulon Progo mencapai 83,72 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa 83,72 persen dari wilayah budidaya diusahakan menjadi wilayah produktif yang bernilai ekonomis. Lahan sawah dimanfaatkan sepanjang tahun dengan ditanami padi, palawija serta terkadang diselingi dengan tanaman hortikultura dan buah-buahan. Kawasan hutan rakyat dimanfaatkan oleh penduduk dengan ditanami tanaman kayu jati, sengon dan akasia. Selanjutnya, kawasan perikanan budidaya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan seperti udang vaname, ikan lele, ikan gurami dan ikan nila. Komoditas udang vaname merupakan komoditas utama usaha perikanan tambak serta menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Kulon Progo di bidang perikanan. Sedangkan untuk usaha perikanan kolam masih didominasi oleh ikan lele sebagai komoditas ikan konsumsi.

d. Jumlah orang yang terangkut di terminal

Jumlah kendaraan yang masuk dalam terminal bus AKAP sangat fluktuatif demikian pula untuk AKDP. Pada Tahun 2020, dengan kondisi Pandemi Covid-19 terlihat penurunan yang sangat signifikan baik mobilitas angkutan umum AKAP maupun AKDP serta pengguna layanan. Penurunan ini juga erat kaitannya dengan adanya upaya pembatasan pergerakan guna pencegahan penyebaran Virus Covid-19

terutama pada saat lonjakan mudik lebaran maupun saat liburan. Adapun data mengenai jumlah angkutan dan orang yang terangkut di terminal tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.216

Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal Tahun 2020-2024

TAHUN	Bus (unit)		Penumpang Bus (orang)	
	AKAP	AKDP	AKAP	AKDP
2020	29.620	14.883	110.506	15.966
2021	9.775	19.146	72.074	107.168
2022	31.400	10.846	287.878	12.070
2023	33.093	11.888	262.346	10.107
2024	31.958	11.090	184.744	25.935

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2025

e. Kondisi Jalan

Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2024 untuk kondisi baik 43,27% sedangkan untuk kondisi sedang 31,03%. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan jalan kondisi baik dalam rangka percepatan pertumbuhan pengembangan wilayah maupun pengembangan kawasan strategis, sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi jalan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.217

Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Status Jalan	Kondisi								Total Jalan
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		km	%	Km	%	km	%	Km	%	
1.	Nasional*	34.761	73,68	11.172	23,68	1.247	2,64	-	-	47.180
2.	Provinsi	79.802	51,67	35.773	23,16	31.163	20,18	7.702	4,99	154.440
3.	Kabupaten	566.301	43,27	406.081	31,03	161.031	12,31	175.232	13,39	807.758

*) Angka sementara

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2025

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jalan dan jembatan guna meningkatkan perekonomian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan secara rutin jalan dan jembatan. Dalam rangka untuk mendukung keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Kulon Progo yaitu Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) serta untuk menangkap peluang dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengusulkan pembangunan jalan yang menghubungkan BIY dengan KSPN Borobudur (Jalur Bedah Menoreh). Jalur ini juga diharapkan bisa menurunkan ketimpangan wilayah di Kabupaten Kulon Progo dan membuka akses menuju potensi wisata serta kawasan produk unggulan Kulon Progo. Terbangunnya Jalan Bedah Menoreh diharapkan akan meningkatkan akses jalan menuju kawasan dengan potensi wisata yang terdapat di sepanjang jalur Bedah Menoreh. Selain itu dengan terbukanya akses jalan di Perbukitan Menoreh diharapkan dapat memperlancar distribusi produk-produk unggulan yang ada di wilayah Kulon Progo.

f. Infrastruktur Strategis di Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa infrastruktur strategis yang diharapkan mampu mengembangkan wilayah secara signifikan. Bendung Kamijoro merupakan infrastruktur penyediaan air baku yang telah diresmikan pada Desember 2019 untukantisipasi kebutuhan air baku bagi Kulon Progo khususnya kawasan Bandara Internasional Yogyakarta yang juga telah diresmikan pada Agustus 2020. Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta selanjutnya didukung dengan peningkatan Rumah Sakit Wates bertaraf internasional, integrasi kereta bandara yang saat ini sedang dibangun dan rencana jalan tol Yogyakarta-BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA-Cilacap. Sebagai penunjang pariwisata, Badan Otorita Borobudur mengembangkan wisata di perbatasan Kulon Progo dengan basis wisata alam dengan pintu masuk utama dari Kulon Progo dan telah dibangun gerbang masuk di kawasan Klamong dengan nama Samudra Raksa. Sebagai penunjang mobilitas masyarakat dari berbagai kawasan tersebut telah dirintis trayek armada angkutan dari DAMRI. Rencana pengembangan selanjutnya adalah pembangunan asrama haji serta penyelesaian jalur jalan lintas selatan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Angka kriminalitas

Kejadian kejahatan dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Data menunjukkan kejadian tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023, walaupun demikian kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian kejahatan justru meningkat. Meningkatnya kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang.

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan kurang tertibnya masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbandung. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal kekerasan secara kualitas maupun kuantitas.

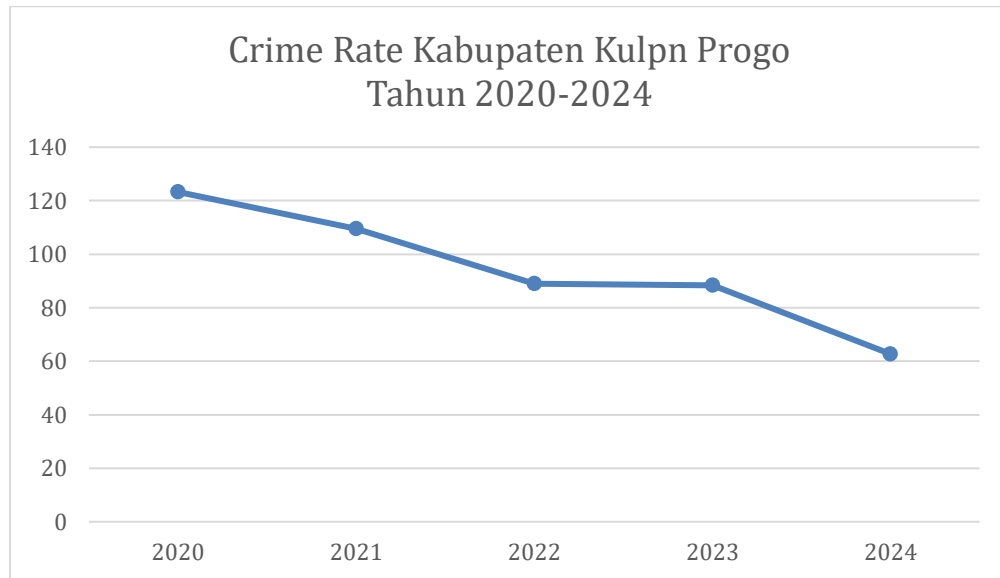
Tabel 2.218

Jumlah Kejadian Kejahatan Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

No.	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pencurian biasa	58	26	41	31	26
2.	Jumlah pencurian hewan	1	10	n.a.	1	2
3.	Jumlah pencurian dengan kekerasan	6	-	n.a.	1	-
4.	Jumlah lainnya	468	79	n.a.	312	251
Jumlah kejadian total		533	115	n.a.	345	279
Jumlah kerugian (Rp)		13.384.861	1.815.025.000	n.a.	8.632.794,99	26.743.406.329

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2025

Apabila menggunakan angka Crime Rate, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, dari 123,25 pada tahun 2020 menurun menjadi 62,70 pada tahun 2024, hal ini menunjukkan kondisi keamanan di Kabupaten Kulon Progo yang semakin kondusif. Crime Rate diukur jumlah kejahatan yang terjadi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun) yang dihitung per 100.000 penduduk.



Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025. *Diolah.*

Gambar 2.44

Crime Rate di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Terkait dengan kejadian kejahatan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 selain kasus pencurian (pencurian biasa, pencurian hewan, dan pencurian dengan kekerasan), juga terdapat juga kejadian kejahatan lainnya. Berdasarkan data BPS, adapun kejadian kejahatan lain yang dimaksud meliputi kasus perjudian, kasus penipuan, kasus penadahan, kasus penggelapan, kasus kesusilaan, kasus narkoba, kasus perampokan, kasus penganiayaan, kasus penculikan dan lain-lain.

b. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Demonstrasi di Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Salah satu permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan pembangunan bandara di Kapanewon Temon. Demonstrasi pada tahun 2021 terjadi pada kategori demonstrasi politik yaitu tentang penegakan HAM Kasus Munir, dan demonstrasi ekonomi yaitu terkait penambangan pasir besi. Pada tahun 2022 kejadian

demo hanya terjadi sekali, namun naik menjadi 9 kali di tahun 2023 dan didominasi oleh kejadian demo tentang ekonomi. Kejadian demo di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.219
Jumlah Demo Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Demonstrasi politik	0	1	0	2	0
2	Demonstrasi ekonomi	1	1	1	5	0
3	Demonstrasi mogok kerja	0	0	0	0	0
4	Demonstrasi agama	0	0	0	2	0
Jumlah		1	2	1	9	0

Sumber data : Bakesbangpol Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya demonstrasi adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kulon Progo diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

Tabel 2.220
Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 14 tahun	94.537	89.212	89.988	88.117	83.304
15 - 64 tahun	278.793	297.076	302.018	296.615	302.719
65 +	53.090	56.995	59.336	58.321	58.971
Angka Beban Ketergantungan (%)	52,96	49,21	49,44	49,37	46,99

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025 (diolah)

Besarnya angka ketergantungan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun, nilai dibawah 50 menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo telah mencapai bonus demografi. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Pada Tahun 2023, angka

ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 49,37% menurun dari tahun 2022 yang sebesar 49,44%. Sedangkan kondisi tahun 2024 angka ketergantungan turun lagi menjadi 46,99%. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk usia tidak produktif. Hal ini dengan asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat produktif. Namun demikian besarnya jumlah usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif di Kabupaten Kulon Progo ini belum dibarengi dengan peningkatan tingkat konsumsi yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap Tujuan Daerah dengan 8 indikator dan Sasaran Daerah dengan 16 indikator yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.221

Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2024		% realisasi RKPD	Keterangan
			Target RKPD Target RKPD P	Realisasi		
	<u>INDIKATOR TUJUAN</u>					
1	Gini ratio	nilai	0,359-0,399	0,373	100	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS KP Rilis 28 Feb 2025
2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,19-5,75	4,77	91,91	Sumber data: BPS DIY Laju Pertumbuhan (y-on-y) PDRB Triwulanan Kab/Kota D.I.Y, TW III 2024
3	Angka kemiskinan	%	16,34-16,56 P 14,38-15,38	15,62	104,61 98,44	Sumber data: BPS - Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kab. Kulon Progo rilis 14 Oktober 2024.
4	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	75,68 P 75,91-76,14	76,18	100,66 100,05	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY rilis 2 Desember 2024
5	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	%	58,96	59,67	100,82	Sumber data: Dinas Kebudayaan Realisasi Triwulan IV 2024
6	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	nilai	74,98 P 75,25	76,19	101,61 101,25	Sumber data: DPUPKP, DLH, Dishub, BPBD, DPTR Realisasi Triwulan IV 2024
7	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	77,00 P 83,20	87,04	113,08 104,61	Sumber data: Bagian Organisasi Hasil evaluasi tahun 2024
8	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	nilai	83,59	83,85	100,31	Sumber data: Satpol PP dan Badan Kesbangpol Realisasi Triwulan IV 2024
	<u>INDIKATOR SASARAN</u>					

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2024		% realisasi RKPD	Keterangan
			Target RKPD Target RKPD P	Realisasi		
9	Pendapatan perkapita penduduk (ADHB)	Juta rupiah	32,27 P 38,50-43,50	37,98	110,85	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS KP rilis 28 Feb 2024 (masih realisasi 2023)
10	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,13-3,17	2,01	105,63	Sumber data: Publikasi Ringkasan Eksekutif Ketenagakerjaan KP oleh BPS KP rilis 16 Des 2024
11	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,25	9,20	99,46	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY rilis 2 Desember 2024
12	Harapan lama sekolah	tahun	14,30 P 14,55-15,64	14,49	101,33 99,59	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY rilis 2 Desember 2024
13	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	78,85 P 81,40	81,87	103,83 100,58	Sumber data: Dinas Dikpora Realisasi TW IV 2024
14	Angka Harapan Hidup	tahun	75,35 P 75,36	75,49	100,19 100,17	Sumber data: Berita Resmi Statistik BPS DIY rilis 2 Desember 2024
15	Indeks Keluarga Sehat	nilai	0,31 P 0,32	0,33	106,45 103,13	Sumber data: Dinas Kesehatan Realisasi 2024
16	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya	%	58,96	59,67	101,20	Sumber data: Dinas Kebudayaan Realisasi Triwulan IV 2024
17	Indeks Pembangunan Infrastruktur	nilai	50,46 P 51,54	52,66	104,36 102,17	Sumber data: DPUPKP, Dinas Perhubungan Realisasi TW IV 2024
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	nilai	62,84	65,46	104,17	Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Realisasi IKA : 44,24 (tw4) Realisasi IKU : 91,62 (tw4) (Pengukuran setiap semester) Realisasi IKTL : 53,51 (2024)
19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,60	88,61	100,01	Sumber data: DPTR Realisasi 2024
20	Persentase Penanggulangan Bencana	%	98,01	98,01	100	Sumber data: BPBD Realisasi 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2024		% realisasi RKPD	Keterangan
			Target RKPD Target RKPD P	Realisasi		
			P 97,16		100,87	
21	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	nilai	A	A	100	<i>Sumber data: LHE AKIP 2024 (3 September 2024-83,75)</i> Hasil evaluasi kinerja tahun 2023
22	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	opini	WTP	WTP	100	<i>Sumber data: BPK</i> Opini atas laporan keuangan 2023
23	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	84,50 P 85,64	86,797	102,72 101,35	<i>Sumber data: Bagian Organisasi</i> Realisasi 2024
24	Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial	%	100	100	100	<i>Sumber data: Satpol PP dan Badan Kesbangpol</i> Realisasi Triwulan IV 2024 (Pengukuran setiap triwulan)

Capaian Kinerja RKPD sampai dengan tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024.

Hasil rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 adalah 99,56% dengan predikat sangat tinggi. Pada indikator tujuan daerah, 8 indikator memiliki predikat sangat tinggi. Pada indikator sasaran daerah, 16 indikator memiliki predikat sangat tinggi. Berdasarkan target-target yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kulon Progo Tahun 2024, terdapat 2 dari 8 indikator Tujuan Daerah yang tidak tercapai yaitu Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan untuk indikator sasaran daerah terdapat 2 dari 16 indikator yang tidak tercapai yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Penjabaran predikat kinerja atas tujuan dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.222

Predikat Kinerja Tujuan & Sasaran Daerah Berdasarkan Target RKPD Tahun 2024

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	Tujuan daerah	%	Sasaran daerah	%	Total indikator	%
1	91% - 100%	Sangat tinggi	8	100	16	100	24	100
2	76% -90%	Tinggi	-	-	-	-	-	-
3	66% - 75%	Sedang	-	-	-	-	-	-
4	51%- 65%	Rendah	-	-	-	-	-	-
5	≤ 50%	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-
Jumlah			8	100	16	100	24	100

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

2.2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan sebanyak **63 Indikator Kinerja Utama (IKU)** untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam rangka mendukung visi dan misi pembangunan daerah. IKU ini dirancang untuk mengukur capaian strategis, efektivitas program, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh masing-masing OPD.

Tabel 2.223

Rekap Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target	Capaian Kinerja
1	Jumlah indikator sasaran perangkat daerah yang mencapai target	43	50
2	Jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah	63	63
	Jumlah indikator sasaran perangkat daerah yang mencapai target	68,25	79,36

Sumber: Bapperida, 2025. *Diolah.*

Dari total 63 IKU yang ditetapkan, sebanyak **50 IKU (79,37%) berhasil mencapai target** yang telah direncanakan, menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan strategis sepanjang tahun. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Namun demikian, terdapat **13 IKU (20,63%) yang tidak mencapai target**. Kinerja yang belum optimal ini menunjukkan adanya tantangan atau hambatan yang perlu menjadi perhatian serius, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian program. 13 IKU perangkat daerah yang tidak tercapai tahun 2024 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.224

IKU Perangkat Daerah yang Tidak Mencapai Target Tahun 2024

No	OPD	IKU OPD	Target	Realisasi	% Capaian
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Indeks Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	17,47	14,27	81,68
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	93,88	91,64	97,62
3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	95,57	86,02	90,01
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan	Persentase pemuda berprestasi dan atlet	87,18	81,87	93,91

No	OPD	IKU OPD	Target	Realisasi	% Capaian
	Olahraga	berprestasi			
5	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Bayi	7,33	10,24	60,30
6	Dinas Pertanian dan Pangan	Produksi Tanaman Biofarmaka	2,00	0,98	48,97
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,31	96,13	98,79
8	Dinas Kominfo	Indeks SPBE	4,08	3,91	95,83
9	Dinas Kominfo	Persentase layanan data dan informasi kinerja daerah	100	94,44	94,44
10	Dinas Koperasi & UKM	Nilai rata rata volume usaha Koperasi	1.162.005.542	1.119.929.540	96,38
11	Dinas Pariwisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	2.621.067	1.926.051	73,48
12	Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,40	84,81	99,31
13	Inspektorat Daerah	Persentase peningkatan hasil pengawasan	96,80	93,89	96,99

Sumber: Bapperida, Tahun 2025. *Diolah.*

Apabila dilihat dari sudut pandang rata-rata persentase capaian IKU OPD, pada tahun 2024 rata-ratanya adalah 97,27% dengan predikat sangat tinggi dengan distribusi predikat sebagaimana tercantum pada table berikut ini:

Tabel 2.225
Predikat Kinerja IKU Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah IKU	%
1	91% - 100%	Sangat tinggi	59	93,65
2	76% -90%	Tinggi	1	1,59
3	66% - 75%	Sedang	1	1,59
4	51%- 65%	Rendah	1	1,59
5	≤ 50%	Sangat Rendah	1	1,59
	Jumlah		63	100

Sumber: Bapperida, Tahun 2025. *Diolah.*

2.2.2. Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2024

Capaian Kinerja RKPD Triwulan IV Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024. Jumlah/ besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, sedangkan jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2024:

- a. Jumlah Program : 248 program (247 di TW 3)
- b. Jumlah Kegiatan : 557 kegiatan (556 di TW 3)
- c. Jumlah Subkegiatan : 1.178 subkegiatan (1.177 di TW 3)
- d. Jumlah OPD : 40 OPD
- e. Pagu Belanja Daerah : Rp1.874.718.088.900,00 (APBD Pergeseran III setelah APBD Perubahan)
Rp1.854.806.049.290,00 (APBD Perubahan)
Rp1.790.968.984.097,00 (APBD Pergeseran II)
Rp1.775.945.264.405,00 (APBD Murni)

Tabel 2.226

Tingkat Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Akhir Tahun 2024

Triwulan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja RKPD		Predikat ^{*)}	
	Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	Fisik (%)	Anggaran (%)	Kinerja	Anggaran
Triwulan I	29,37	25,29	28,97	16,91	98,64	66,87	ST	S
Triwulan II	55,82	52,43	54,66	43,86	97,92	83,64	ST	T
Triwulan III	81,08	78,38	80,20	66,26	98,91	84,54	ST	T
Triwulan IV	100	100	99,87	95,18	99,87	95,18	ST	ST

^{*)} Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja Nilai (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Sumber: Bapperida, Tahun 2025. *Diolah*.

Tingkat capaian rata-rata kinerja program sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 97,52%. Adapun kinerja program dalam RKPD triwulan IV tahun 2024, dari 248 program hanya 236 program yang memiliki Indikator Kinerja, sisanya ada 12 program yang baru muncul di tahun 2024 sehingga belum memiliki indikator. Selain itu ada 2 program yang telah direncanakan pada dokumen RPD 2023-2026 namun tidak terlaksana pada tahun 2024. Dari 236 Indikator Kinerja Program terdapat 222 program dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 6 program dengan predikat kinerja Tinggi (T), 3 program dengan predikat Sedang (S), 1 program dengan predikat Rendah (R), dan ada 4 program dengan predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Predikat kinerja program RKPD Triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.227

Predikat Kinerja Program RKPD Triwulan IV Tahun 2024

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Indikator Program RKPD	Persentase
1	91% - 100%	Sangat tinggi	222	94,07%
2	76% -90%	Tinggi	6	2,54%
3	66% - 75%	Sedang	3	1,27%
4	51%- 65%	Rendah	1	0,42%
5	≤ 50%	Sangat Rendah	4	1,69%
	Jumlah		236	100,00

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Realisasi keuangan dari anggaran belanja daerah triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp1.784.430.426.661,95 atau sebesar 95,18% dimana secara lengkap anggaran dan realisasi keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.228

Realisasi Keuangan Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV Tahun 2024

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target 2024 (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
s.d. 31 Des 2024	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai	780.232.886.155,00	780.232.886.155,00	100	749.270.869.613,81	96,03	Sisa Belanja gaji dan tunjangan PNS dan belanja TPG di Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Belanja Pegawai BLUD di RSUD Wates, RS NAS dan Puskesmas.
	Belanja Barang dan Jasa	539.785.383.371,00	539.785.383.371,00	100	519.967.182.561,64	96,33	- Belanja barang jasa BLUD - sisa belanja Dana Keistimewaan DIY - Rasionalisasi dan Efisiensi Belanja ATK dan Perjalanan Dinas pada OPD.
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	1.716.942.000,00	1.716.942.000,00	100	1.615.328.250,00	94,08	Subsidi bunga program Kerisku ke Bank Kulon Progo sesuai dengan pengajuan pinjaman
	Belanja Hibah	125.781.517.251,00	125.781.517.251,00	100	111.386.580.761,00	88,56	- sisa belanja hibah yang tersalurkan tidak - sisa lelang

Bulan	Jenis Belanja	Keuangan					Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi
		Target 2024 (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
	Belanja Bantuan Sosial	17.329.700.000,00	17.329.700.000,00	100	16.980.114.751,00	97,98	Sisa Bansos yang tidak tersalur karena sudah mendapatkan bantuan yang lainnya atau pindah alamat (BPNT, RTLH, Panti Asuhan, dll)
	BELANJA MODAL	215.171.842.808,00	215.171.842.808,00	100	188.155.116.808,23	87,44	- Belanja modal BLUD RSUD Wates dan RS NAS - Belanja Modal IF yang dilaksanakan di 2025 (11,3 M)
	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.485.543.950,00	3.485.543.950,00	100	2.536.789.038,00	72,78	Disesuaikan dengan kebutuhan darurat dan mendesak
	BELANJA TRANSFER	191.214.273.365,00	191.214.273.365,00	100	188.657.841.287,00	98,66	Dana Desa dan ADD sudah tersalurkan semua sesuai transfer dari Pusat. Belanja bagi hasil disesuaikan dengan realisasi pendapatan
	TOTAL	1.874.718.008.900,00	1.874.718.008.900,00	100	1.778.569.823.070,68	94,87	gap (5,13)

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2025

Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian kinerja Triwulan IV tahun 2024 antara lain:

1. Beberapa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah tidak tercapai sesuai dengan target.
2. Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pada pekerjaan konstruksi
3. Pengendalian internal PD belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai target
4. Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya;
4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain:

1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawasan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan

identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal;

2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Perlunya koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta program untuk mendukung pencapaian target di tahun 2025;
4. Perangkat Daerah perlu melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/ subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat.

2.2.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024

Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.229
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KULON PROGO
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
									I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15	
				K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Pendidikan																							
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	1.051.760,10	100	335.197,13	100	368.798,56	104,43	34,65	94.998,28	61,56	62.510,63	91,67	81.143,53	100	117.884,19	100	356.536,63	100	691.733,76	100,00	65,77	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																		-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	155,00	2	17,43	2	15,49		0	5,66	0	3,97	2	0,38	0	2,84	2	12,85	4	30,28			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	2.426,27	21	516,94	21	572,12	7	64,16	4	93,57	5	302,28	5	72,79	21	532,79	42	1.049,73				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																		-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3414	1.029.553,26	12	331.455,56	12	364.502,51	3	94.467,78	3	61.411,08	3	79.951,27	4	116.595,34	13	352.425,47	25	683.881,03				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	6.132,54	1	1.428,04	1	1.464,67	0	11,39	0	359,95	0	354,50	1	709,91	1	1.435,75	2	2.863,80				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	332,45	14	54,61	14	75,00	2	17,66	2	7,59	4	19,83	6	22,40	14	67,48	28	122,09				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																		-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	220,12	1	12,02	1	6,34	0	-	0	-	0	-	1	1,98	1	1,98	2	14,00				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28	165,10	7	14,70	7	14,43	0	-	0	-	7	14,27	0	0,00	7	14,27	14	28,97				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																		-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	428,51	4	129,82	1	59,82	0	14,29	0	19,56	0	13,91	1	9,64	1	57,41	5	187,23				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	431,66	12	86,08	12	106,06	3	14,50	3	21,49	3	44,80	3	22,85	12	103,63	24	189,71				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																0	-				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	495,00	10	102,05	1	190,11	0	-	0	140,66	1	15,84	0	2,26	1	158,76	11	260,81				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																0	-				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	1.216,14	12	238,08	12	337,20	3	83,81	3	69,75	3	76,59	3	86,59	12	316,74	24	554,82				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	5.777,04	11	957,45	12	1.082,51	3	277,88	2	249,67	3	270,49	4	265,89	12	1.063,92	23	2.021,37				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah														0	-	0	-				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	1.121,57	39	184,34	39	220,68	23	20,78	2	77,58	0	41,61	14	62,35	39	202,32	78	386,66				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	144,85	0	0,00	1	9,86	0	-	0	-	1	9,62	0	0,00	1	9,62	1	9,62				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	237	1.473,39	0	0,00	239	141,77	0	20,37	0	55,76	0	28,14	239	29,37	239	133,64	239	133,64				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
						67,95		71,01							74,50										
		Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase PNF terakreditasi dan PAUD terakreditasi	35,63	939.143,46	55,84	111.988,52	60,33	118.661,39	49,80	55,84	4.070,90	63,58	6.371,00	63,58	12.225,49	74,92	82.203,12	63,58	104.863,64	63,58	216.852,16	178,45	23,09	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
			Presentase SDI MI terakreditasi A	66,03		60,76		65,49		#DIV/0!	60,76		60,76		60,76		64,85		60,76		60,76				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Presentase SMP/ MTs terakreditasi A	73,75		67,47		71,25		#DIV/0!	67,47		67,47		67,47		71,08		67,47		67,47				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	87,31		87,71		86,98		#DIV/0!	87,71		87,72		89,61		87,16		87,72		87,72				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD/ MI/ Terakreditasi A																			-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	73.901,50	1	7.519,04	1	8.440,29	0	16,02	0	142,01	0	1.080,55	1	5.639,08	1	6.877,66	2	14.396,69				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	0,00	1	52,02	0	-	0	-	0	12,38	1	28,89	1	41,27	1	41,27				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	151,61	1	110,00	0	-	0	-	0	21,21	1	49,48	1	70,69	2	222,30				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Mebel Sekolah Dasar	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6	310,50	2	88,83	7	348,42	0	-	0	2,44	7	0,00	0	334,66	7	337,10	9	425,93				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	140250	21.020,96	35250	3.224,83	35200	3.210,35	0	265,36	0	1.657,86	0	352,47	35200	892,48	35200	3.168,18	70450	6.393,00				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				10	636,60	6	614,45	0	-	0	1,52	6	609,76	0	0,90	6	612,18	16	1.248,78				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12000	3.200,50	3000	409,97	3000	415,40	0	49,64	0	69,46	0	116,57	3000	176,87	3000	412,54	6000	822,51				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1485	42.552,62	3076	7.052,09	455	6.464,68	0	1.859,61	0	1.327,54	0	1.371,66	0	1.308,37	0	5.867,18	3076	12.919,26				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	796	3.549,10	3076	362,37	1199	173,80	0	23,90	0	94,85	0	23,60	0	12,59	0	154,94	3076	517,31				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	377	1.635,50	337	112,75	335	91,96	0	22,07	0	2,65	0	26,94	335	30,36	335	82,02	672	194,77				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	337	293.201,00	337	33.659,63	337	32.668,80	0	-	0	0,00	0	-	337	32.580,28	337	32.580,28	674	66.239,91				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350	1.350,60	350	118,83	2449	124,74	0	25,35	0	16,20	0	21,42	2449	53,27	2449	116,24	2799	235,07				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			1	340,58	3	788,80	0	-	0	40,88	0	166,05	3	441,37	3	648,29	4	988,88				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0,00	0	0,00	50	20,00	0	-	0	-	0	19,87	50	0,00	50	19,87	50	19,87				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0	0,00	1	20,00	0	-	1	16,57	0	2,88	0	0,00	1	19,45	1	19,45				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan Yang Dilaksanakan	30	66,00	0	0,00	1	11,76	0	-	0	-	0	-	1	8,99	1	8,99	1	8,99				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	48	21.748,00	3	938,70	13	4.610,18	0	7,44	0	160,45	0	919,57	13	2.635,73	13	3.723,18	16	4.661,89				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas bidang pendidikan					450	455,23	0	141,13	0	73,45	0	183,33	0	36,38	0	434,29	0	434,29				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menyenggarakan Proses Belajar	337	4.047,36	337	1.189,96	335	397,14	0	20,73	0	250,56	0	72,32	335	24,25	335	367,87	672	1.557,83				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	1.311,00	13	1.438,90	12	1.902,23	0	-	0	189,62	0	338,19	12	1.032,86		1.560,67	13	2.999,58				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	525	1.579,50	0	0,00					0				0				0	-				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP/MTs terakreditasi A																	0	-				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun			1	501,25	1	627,48	0	-	0	54,35	0	117,39	1	345,55	1	517,29	2	1.018,54				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah telah dibangun	7	95.072,00	3	5.761,00	1	9.082,27	0	35,11	0	8,08	0	2.192,94	1	131,90	1	2.368,03	4	8.129,03				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			13	1.438,90	12	1.902,23	0	-	0	-	0	132,78	12	309,83	12	442,61	25	1.881,52				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	30,31	2	108,39	0	-	0	-	0	43,03	2	41,78	2	84,81	3	115,12				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	151,61	1	355,50	0	-	0	-	0	70,69	1	218,57	1	289,26	2	440,87			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3	726,29	3	354,65	0	-	0	-	0	85,15	3	198,68	3	283,83	6	1.010,12			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	33.120,00	3	938,70	13	1.677,68	0	0,50	0	108,09	0	328,90	13	905,91	13	1.343,40	16	2.282,10			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Mebel yang tersedia			4	416,56	7	460,79	0	1,00	0	14,24	4	47,50	3	373,53	7	436,26	11	852,83			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	72992	29.641,05	18248	2.601,92	18248	2.640,62	0	313,19	0	167,08	0	1.391,92	18248	734,36	18248	2.606,55	36496	5.208,46			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			10	636,60	6	332,02	0	1,00	0	14,24	5	102,20	1	167,45	6	284,89	16	921,48			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16000	2.818,40	3000	409,97	3000	534,75	0	2,02	0	195,44	0	215,08	3000	71,29	3000	483,83	6000	893,80			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	96	20.724,18	15	1.126,82	780	1.009,05	0	303,35	0	220,87	0	216,09	780	222,67	780	962,98	795	2.089,80			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan kompetensi dan Kualifikasi	872	3.118,74	10	354,16	872	110,62	0	0,44	0	51,80	0	37,19	872	16,56	872	105,99	882	460,16			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	260	2.336,48	337	112,75	335	47,66	0	34,49	0	2,12	67	5,56	268	2,59	335	44,76	672	157,51			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	65	183.607,20	65	19.309,40	65	19.419,20	0	-	0	0,00	0	-	65	19.177,47	65	19.177,47	130	38.486,87			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	520	1.398,66	130	56,60	160	57,28	0	3,26	0	5,67	0	17,61	160	16,29	160	42,83	290	99,43			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan	240	36,00	0	0,00	50	12,00	0	10,88	50	-	0	0,00	0	0,00	50	10,88	50	10,88			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan			0	0,00	1	20,00	0	-	0	5,60	1	5,19	0	3,50	1	14,28	1	14,28			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	270	61,29	0	0,00	1	18,99	0	-	0	5,46	0	3,53	1	7,05	1	16,04	1	16,04			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	60964	2.539,14	337	1.189,96	335	293,09	0	3,12	0	24,44	0	219,08	335	20,48	335	267,12	672	1.457,08			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0	0,00	450	223,32	0	-	0	35,81	0	126,87	0	40,90	0	203,58	0	203,58			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	0,00	1	1.053,18	0	1,50	0	10,29	0	29,48	1	899,51	1	940,78	1	940,78			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	909	1.281,60	0	0,00								6,87				0	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD Terakreditasi																0	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			0	0,00	1	221,18	0	-	0	-	1	148,07	0	40,11	1	188,18	1	188,18			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	0,00	1	548,41	0	0,60	0	0,60	0	107,27	1	357,34	1	465,81	1	465,81			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	28.339,64	13	2.029,54	1	344,46	0	6,33	0	41,17	1	-	0	256,22	1	303,72	14	2.333,26			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1458	287,90	390	50,33	376	50,35	0	1,74	0	34,86	0	-	376	12,22	376	48,82	766	99,15			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			5	265,68	2	275,70	0	3,01	2	7,66	0	253,75	0	0,00	2	264,42	7	530,11			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	68427	1.504,02	16056	328,71	17457	366,76	0	45,63	0	62,66	0	-	17457	255,82	17457	364,11	33513	692,82			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2750	9.053,90	2750	2.482,06	182	3.336,31	0	729,45	0	742,46	0	726,86	182	925,10	182	3.123,87	2932	5.605,93			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3319	1.356,30	814	286,79	330	77,80	0	24,73	0	34,05	0	-	330	0,00	330	58,78	1144	345,57			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	830	569,00	830	132,15	830	135,92	0	8,63	0	15,84	0	95,94	830	0,00	830	120,41	1660	252,55			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP PAUD	829	12.588,67	0	11.128,20	829	10.491,69	0	-	0	-	0	-	829	10.483,00	829	10.483,00	829	21.611,19			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	3305	384,31	829	121,98	829	182,89	0	41,62	0	74,24	0	15,52	829	46,39	829	177,77	1658	299,74			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0	0,00	1	50,35	0	14,08	0	5,37	0	0,00	1	29,74	1	49,19	1	49,19			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150	25,14	0	0,00	1	21,84	0	3,84	0	-	0	5,15	1	12,79	1	21,78	1	21,78			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0	0,00	450	358,07	0	-	0	144,92	0	86,85	0	96,80	0	328,57	0	328,57			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	0	-			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	920	878,00	230	209,96	230	210,30	0	1,00	0	154,59	0	4,18	230	2,73	230	162,51	460	372,46			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	353	363,80	353	71,11	23	75,13	0	21,88	0	16,26	0	16,26	23	17,34	23	71,74	376	142,86			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20	120,47	20	9,40	10	10,76	0	-	0	-	0	7,29	10	2,80	10	10,09	30	19,49			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35	558,00	15	82,71	12	86,88	0	13,20	0	12,01	0	16,18	12	41,72	12	83,10	27	165,82			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	35	12.517,67	30	472,81	30	474,22	0	-	0	0,00	0	-	30	428,86	30	428,86	60	901,67			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	120	135,45	30	17,78	10	18,37	0	10,69	0	-	0	5,27	10	0,58	10	16,54	40	34,32			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	240	728,48	337	1.189,96	335	63,01	0	3,36	0	54,67	0	3,08	335	0,89	335	62,00	672	1.251,96			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	24.503,82	2	101,85												2	101,85			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dan pemuda berprestasi	80,21	5.112,57	100	808,92	100	905,00	49,35	0	200,00	100	130,51	100	222,43	100,00	345,29	100	898,23	100	1.707,15	124,67	33,39	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional																-					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	87,45	5	9,70	5	9,85	0	-	5	9,81	0	-	0	0,00	5	9,81	10	19,51			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (80 orang)	320	245,92	80	48,50	80	50,32	0	-	80	48,35	0	0,00	0	1,21	80	49,56	160	98,06			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	44,70	5	9,71	35	37,25	0	-	0	4,39	0	12,16	35	20,27	35	36,82	40	46,53			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif																0	-				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	28	4.734,80	7	741,01	7	807,58		0	200,00	0	67,96	0	210,27	7	323,81	7	802,04	14	1.543,04			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase organisasi olahraga yang aktif dan atlet berprestasi	88,16	16.597,92	81,28	5.109,22	87,18	5.420,55	115,56		3.249,52	77,21	434,93	77,54	451,90	81,87	1.018,15	77,21	5.154,50	77,21	10.263,73	87,58	61,84	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pembinaan dan pengembangan olahraga																		-				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3	4.106,42	3	1.544,93	4	1.419,78		0	118,77	0	183,54	0	273,04	4	651,26	4	1.226,61	7	2.771,53			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi atau nasional																0	-					Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	744	12.491,50	744	3.564,294	744	4.000,77		0	3.130,75	0	251,39	0	178,87	788	366,89	788	3.927,90	1532	7.492,19			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	100	2.070,24	100	-	100	200,00	-	-	-	-	-	-	190,48	100	-	100	190,48	100	190,48			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pendidikan Berbasis Budaya	Pendidikan berbasis budaya yang berkualitas																		-				Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan Mustan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Mustan Lokal	12	2.070,24	0	0,00	1	200,00		0	-	0	-	0	190,48	1	0,00	1	190,48	1	190,48			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	367.359,03	100	530.809,77	100	61.975,79	70,15	34,65	26.256,20	61,56	39.489,57	91,67	24.010,00	100	28.298,82	100	118.027,39	100	648.837,16	100,00	176,62	Dinas Kesehatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah yang dibuat dan disampaikan tepat waktu																		-				Dinas Kesehatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	340,00	5	3.655,00	1	55,19		0	8,34	0	6,96	0	4,69	1	4,90	1	24,88	6	3.679,88			Dinas Kesehatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	260,00	1	4.475,00	1	39,90		0	5,56	0	2,87	0	11,13	1	4,66	1	24,22	2	4.499,22			Dinas Kesehatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu												0			-			0	-			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	3020	192.000,00	12	47.626,90	12	29.658,27		3	14.474,59	3	14.828,56	3	-	4	0,00	13	29.303,15	25	76.930,05			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	1.176,00	12	25.604,00	1	265,50		0	-	0	63,38	0	63,37	1	126,75	1	253,50	13	25.857,50			Dinas Kesehatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	60,00	1	14,45	1	17,77		0	4,59	0	3,96	0	3,63	1	4,64	1	16,82	2	31,27			Dinas Kesehatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	0	-				Dinas Kesehatan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	600,00	1	40.595,00	1	95,56		0	20,56	1	14,31	0	19,76	0	9,34	1	54,63	2	40.649,63			Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	200,00	1	7.939,00	1	156,63		0	44,66	0	15,43	0	32,06	1	17,85	1	92,15	2	8.031,15			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		0	-				Dinas Kesehatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0	0,00	1	416,15		0	96,48	0	124,99	0	96,01	1	96,01	1	413,50	1	413,50			Dinas Kesehatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																	0	-				Dinas Kesehatan
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	1.300,00	0	0,00											0	-	0	-				Dinas Kesehatan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	1.300,00	1	30.384,00											0	-	1	30.384,00				Dinas Kesehatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																	0	-				Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9	29.715,00	37	354,52	10	60,85	3	90,28	4	75,63	20	109,77	37	336,53	46	30.051,53			Dinas Kesehatan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	2.100,00	1	36.344,00	1	498,27	1	107,38	0	98,79	0	85,37	0	131,62	1	423,16	2	36.767,16			Dinas Kesehatan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																0	-			Dinas Kesehatan		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	0,03	0	0,00												0	-			Dinas Kesehatan		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai mengikuti diklat, seminar dan workshop	12	0,40	0	0,00												0	-			Dinas Kesehatan		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan																0	-			Dinas Kesehatan		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.108,68	1	1.312,00			0	493,96	0	820,69	0	805,09	1	970	1	3.089,45	13	4.198,13			Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.048,15	1	979,77			0	356,58	0	846,02	0	796,81	1	1.082	1	3.081,24	13	4.129,39			Dinas Kesehatan (Puskesmas Galur II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.039,43	1	961,58			0	257,23	0	677,92	0	671,38	1	1.030	1	2.636,53	13	3.675,96			Dinas Kesehatan (Puskesmas Girmulyo I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	99.369,00	1	1.394,52			0	282,43	0	928,23	0	882,67	1	1.079	1	3.172,19	13	102.541,19			Dinas Kesehatan (Puskesmas Girmulyo II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.952,56	1	1.825,32			0	759,42	0	1.451,20	0	1.577,99	1	2.116	1	5.904,48	13	7.857,04			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kalayaman)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.492,00	1	1.395,60			0	463,07	0	1.164,97	0	1.180,04	1	1.307	1	4.115,09	13	5.607,09			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	86.292,00	1	861,45			0	340,74	0	677,71	0	631,00	1	753	1	2.402,51	13	88.694,51			Dinas Kesehatan (Puskesmas Kokap II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.148,74	1	1.077,40			0	651,78	0	851,19	0	895,08	1	988	1	3.386,16	13	4.534,90			Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.380,97	1	1.331,95			0	720,49	0	1.166,87	0	1.026,08	1	1.398	1	4.311,70	13	5.692,67			Dinas Kesehatan (Puskesmas Lendah II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.872,12	1	2.213,11			0	628,72	0	1.799,78	0	1.211,23	1	1.558	1	5.197,39	13	7.069,51			Dinas Kesehatan (Puskesmas Nampulan)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.490,48	1	1.373,80			0	445,79	0	1.133,16	0	1.262,32	1	1.463	1	4.304,53	13	5.795,01			Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.403,54	1	1.464,96			0	456,97	0	1.097,10	0	1.098,53	1	1.267	1	3.919,52	13	5.323,06			Dinas Kesehatan (Puskesmas Panjatan II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.678,87	1	1.689,21			0	428,65	0	1.014,10	0	1.107,72	1	1.559	1	4.109,88	13	5.788,75			Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.679,67	1	1.384,80			0	568,80	0	1.448,39	0	1.157,07	1	1.316	1	4.490,76	13	6.170,43			Dinas Kesehatan (Puskesmas Pengasih II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.437,29	1	1.500,24			0	527,69	0	1.179,83	0	1.211,53	1	1.384	1	4.303,01	13	5.740,30			Dinas Kesehatan (Puskesmas Samudrah I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.033,24	1	1.063,96			0	330,52	0	851,35	0	805,36	1	976	1	2.963,23	13	3.996,47			Dinas Kesehatan (Puskesmas Samudrah II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	2.378,58	1	1.987,97			0	776,83	0	1.749,51	0	1.743,43	1	1.854	1	6.123,53	13	8.502,11			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sertolo I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.514,13	1	1.371,88			0	581,92	0	1.148,14	0	1.163,91	1	1.133	1	4.026,85	13	5.540,98			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sertolo II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	1.900,32	1	1.732,13			0	696,49	0	1.606,92	0	1.699,05	1	1.718	1	5.720,83	13	7.621,15			Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon I)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	90.591,00	1	863,37			0	336,53	0	707,90	0	763,08	1	790	1	2.597,13	13	93.188,13			Dinas Kesehatan (Puskesmas Temon II)	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	12	2.646,65	1	2.633,00			0	1.328,58	0	1.919,09	0	1.928,95	1	2.052	1	7.228,83	13	9.875,48			Dinas Kesehatan (Puskesmas Wiyaga)	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Pemenuhan UKP UKM	88,46	560.020,57	8209	49.497,78	83,83	73.994,04	44,80	60,02	5.977,63	79,04	7.210,17	0,693	15.103,98	85,47	40.718,36	79,04	51.137,24	79,04	826.029,76	89,35	147,50	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar																	-				Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	14.000,00	0	0,00	1	14.013,95	0	-	0	3,73	0	8.703,88	1	4.309,82	1	13.017,44	1	13.017,44			Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	40.000,00	4	86.918,00	1	272,41	0	-	0	1,86	0	38,60	1	223,36	1	263,81	5	87.181,81			Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	10.000,00	1	1.031,82	3	4.478,81	0	-	0	84,45	0	879,70	3	2.872,23	3	3.836,38	4	4.868,20			Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan KesehatanJumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			2	6.496,80	2	780,27	0	101,40	0	0,57	1	506,37	1	136,47	2	744,80	4	7.241,60			Dinas Kesehatan	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	0,00	1	53,83	0	-	1	-	0	0,23	0	36,06	1	36,30	1	36,30			Dinas Kesehatan	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			1	1.712,28	1	4.899,06	0	8,91	0	1.090,25	0	1.320,83	1	1.845,34	1	4.265,33	2	5.977,61			Dinas Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4	300,00	1	144,91	1	192,54	0	37,71	0	40,62	0	53,41	1	28,19	1	159,94	2	304,85			Dinas Kesehatan
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	40,00	0	0,00												0	-			Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			1	5.922,00												1	5.922,00			Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4	136,76	0	0,00												0	-			Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4	60.000,00	0	0,00												0	-			Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Puskesmas	Dokumen perencanaan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan (DAK fisik) 3 dokumen	4	60.000,00	0	0,00												0	-			Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	40.000,00	4	86.918,00	1	272,41						1	263,81			4	86.918,00			Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4	4.000,00	0	0,00												0	-			Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4	40.000,00	2	6.496,80	2	780,27						2	744,80			2	6.496,80			Dinas Kesehatan	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	4	6.000,00	1	2.974,43												1	2.974,43			Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	14.000,00	0	0,00	1	14.013,95						1	13.017,44			0	-			Dinas Kesehatan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	10.000,00	1	1.031,82	3	4.478,81						3	3.836,38			1	1.031,82			Dinas Kesehatan	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% fasyankes pemerintah yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar																0	-			Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21540	160,00	3984	16.204,00	5360	74,35	540	58,14	1051	8,74	921	5,67	901	0,45	3413	64,26	7397	16.268,26			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20750	160,00	3956	3.705,00	5150	37,45	562	4,37	1058	8,75	892	7,00	901	2,14	3413	22,26	7369	3.727,26			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20750	160,00	3952	5.853,00	5150	55,46	531	3,57	1042	1,78	919	35,45	2658	0,00	5150	40,80	9102	5.893,80			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84864	160,00	19974	7.773,00	21216	6,83	2873	0,45	5261	2,18	5018	3,48	6202	0,00	19354	6,11	39328	7.779,11			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135,148	140,00	32976	5.456,00	33517	210,33	0	-	0	152,54	0	0,75	51459	1,50	51459	154,79	84435	5.610,79			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	253867	140,00	59725	4.347,00	61218	21,03	15304	14,43	15304	0,12	15304	2,06	15306	1,95	61218	18,56	120943	4.365,56			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	200805	140,00	51932	7.233,00	47950	148,69	7161	43,94	15756	3,74	18679	77,25	19232	0,45	60828	125,38	112760	7.358,38			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	20012	140,00	4883	3.017,00	4963	17,44	1240	0,22	1240	11,08	1240	3,01	1243	0,97	4963	15,28	9846	3.032,28			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	10500	140,00	2562	48.267,00	2604	653,52	651	1,12	651	0,37	651	628,37	651	0,75	2604	630,60	5166	48.897,60			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	5853	140,00	1410	3.517,00	1455	10,78	365	0,37	365	1,12	363	3,00	362	4,57	1455	9,06	2865	3.526,06			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	120,00	3350	16.422,00	3350	1.909,19	797	10,40	797	123,90	878	1.736,50	878	11,88	3350	1.882,68	6700	18.304,68			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	400,00	4113	21.727,00	4181	242,23	1046	90,96	1045	13,05	1105	111,07	985	12,44	4181	227,51	8294	21.954,51			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	4	0,12	0	0,00											0	-	0	-			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	0,12	1	2.883,00											0	-	1	2.883,00			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4	0,12	1	27,30	1	5,49	0	4,44	0	0,98	0	0,00	1	0,00	1	5,42	2	32,72			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	0,12	1	4.367,11	1	1.477,56	0	448,09	0	57,28	0	16,22	1	927,30	1	1.448,89	2	5.816,00			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	120,00	1	6.981,00	1	29,42	0	19,18	0	4,80	0	2,70	1	0,90	1	27,58	2	7.008,58			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	120,00	1	94.801,00	1	1.265,79	0	-	0	0,00	0	-	1	1.265,79	1	1.265,79	2	96.066,79			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	120,00	1	4.786,00	1	307,87	0	121,58	0	70,52	0	109,53	1	0,00	1	301,63	2	5.087,63			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	120,00	1	7.137,00	1	74,50	0	5,75	0	22,88	0	-	1	30,47	1	59,10	2	7.196,10			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan khusus	4	120,00	1	2.477,00												1	2.477,00			Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0	0,00	1	24,45	0	-	0	-	0	5,42	1	19,02	1	24,44	1	24,44			Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	120,00	1	99.148,00	1	1.149,98	0	21,24	0	93,65	0	406,70	1	470,74	1	992,33	2	100.140,33			Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	920,00	1	23.251,44	1	19.459,65	0	4.708,17	0	4.830,30	0	-	0	9.726,36	0	19.264,83	1	42.516,27			Dinas Kesehatan
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			0	0,00	1	15,97	0	-	0	1,62	0	1,19	1	0,58	1	3,38	1	3,38			Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4	120,00	1	4.927,00	1	40,95	0	3,00	0	12,15	0	5,71	1	4,50	1	25,35	2	4.952,35			Dinas Kesehatan
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	4	120,00	3	3.109,00	1	20,85	0	7,04	0	4,48	0	1,47	1	3,71	1	16,70	4	3.125,70			Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen operasional pelayanan puskesmas	4	2.200,00	1	2.279,41	1	637,52	0	8,10	0	21,27	0	25,63	1	334,64	1	389,63	2	2.669,04			Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	120,00	1	44.089,00	1	286,58	0	70,89	0	71,75	0	18,03	1	120,21		280,88	1	44.369,88			Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas Kesehatan yang ter Akreditasi di kab/Kota	4	1.400,00	0	68.449,00	1	32,22	0	-	0	-	0	-	1	23,17	1	23,17	1	68.472,17			Dinas Kesehatan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	120,00	1	2.759,00	1	324,16	0	0,37	0	3,30	0	140,13	1	170,17	1	313,97	2	3.072,97			Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4	120,00	1	335,40	1	394,64	0	91,47	0	118,24	0	97,25	1	87,17	1	394,13	2	729,53			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar			0	856,00	336	103,93		0	3,34	0	6,67	0	5,00	336	73,57	336	88,58			Dinas Kesehatan		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4	400,00	0	537,00	141	10,30		0	0,45	0	3,18	0	3,44	141	1,72	141	7,07			Dinas Kesehatan		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4	120,00	4564	54.717,00	20	546,86		0	74,31	0	255,44	0	112,67	20	84,14	20	526,56	4584	55.243,56		Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak			0	0,00	1	117,61		0	4,40	0	74,05	0	22,08	1	16,62	1	117,15	1	117,15		Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah KK yang dikunjungi	4	120,00	0	35,30												0	35,30			Dinas Kesehatan		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0	10,50												0	10,50			Dinas Kesehatan		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																	0	-			Dinas Kesehatan		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan			0	0,00	1	11,10		0	1,49	0	0,45	0	4,71	1	1,79	1	8,44	1	8,44		Dinas Kesehatan	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														23			0	-			Dinas Kesehatan		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	4	120,00	1	261,20	5150	19,77		0	7,45	0	6,79	0	1,20	2928	2,96	2928	18,40	2929	279,60		Dinas Kesehatan	
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4	120,00	1	3.501,00	1	13,23		0	0,88	0	2	0	8	1	1,84	1	12,51	2	3.513,51		Dinas Kesehatan	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	4	120,00	0	0,00												0	-			Dinas Kesehatan		
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4	120,00	0	0,00												0	-			Dinas Kesehatan		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Peningkatan kapasitas SDMk	69,96	709,70	9032	1.187,41	90,32	1.358,93		91,36	350,43	97,88	432,37	0,9824	400,00	98,56	124,13	97,88	1.270,21	97,88	26.711,21	139,91	3.763,73	Dinas Kesehatan
			Presentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	100		97,81		97,81		91,64		96,68		0,9762		98,13		96,68		96,68	-	96,68		Dinas Kesehatan	
			Presentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	81,82		100		100		100		100		1		100		100		100	-	122,22		Dinas Kesehatan	
			Presentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyanken yang dilakukan kredensialing	28,05		73,16		73,16		82,44		96,96		0,971		97,53		96,96		96,96	-	345,67		Dinas Kesehatan	
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota																	0	-			Dinas Kesehatan		
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	4	113,92	1	3.108,00	1	35,01		0	6,26	0	9,79	0	12,01	1	4,33	1	28,06	2	3.136,06		Dinas Kesehatan	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	108,00	1	3.108,00	1	35,01		0	-				1	32,39	1	-	2	3.108,00			Dinas Kesehatan	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	% nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu																0	-			Dinas Kesehatan		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4	108,00	2100	3.321,00	21	39,43		0	2,92	0	15,17	0	13,48	21	1,65	21	33,22	2121	3.354,22		Dinas Kesehatan	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	108,00	1	15.904,00	1	188,08		0	5	0	110,55	0	44,29	1	25,14	1	184,86	2	16.088,86		Dinas Kesehatan	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	108,00	0	0,00											0	-				Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% nakes (Dokter, Drg, bidan, perawat) di fasyankes pemerintah yg dilakukan kredsensialing															0	-				Dinas Kesehatan	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan kompetensinya	4	120,00	0	0,00	21	1.061,39	0	336,37	0	296,86	0	330,22	0	60,61	0	1.024,07	0	1.024,07			Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Sediaan Farmasi, alkes, makmin, sesuai standar	91,72	157.094,94	75	46.433,00	88,33	471,33	59,72	36,86	72,22	124,20	0,7222	202,38	95,38	102,48	72,22	465,92	72,22	31.356,92	78,74	19,96	Dinas Kesehatan
			Presentase Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi	100		100		100		88,89		88,89		0,8889		96,67		88,89		88,89	-	88,89		Dinas Kesehatan
			Presentase PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT	100		100		100		100		100		1		100		100		100	-	100,00		Dinas Kesehatan
			Presentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	70		100		70		50		100		1		100		100		100	-	142,86		Dinas Kesehatan
			Persentase produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yg memenuhi syarat	96,88		85,71		83,33		0				0,8214		84,85		85,6714		85,6714	-	88,43		Dinas Kesehatan
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		-			Dinas Kesehatan	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	4	25,13	0	0,00	1	62,01	0	2,47	0	2,10	0	36,95	1	20,47	1	62,00	1	62,00			Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	24.000,00	1	6.332,00											1	6.332,00				Dinas Kesehatan	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																0	-				Dinas Kesehatan	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		4	24.000,00	1	24.402,00		254,83	0	33,54	0	83,01		75,09		62,51	0	254,16	1	24.656,16			Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																0	-				Dinas Kesehatan	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	4	24.000,00	1	157,00	24	154,49	0	0,85	0	39,09	0	90,33	24	19,50	24	149,77	25	306,77			Dinas Kesehatan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg mendapatkan Sertifikat penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi														0	-			Dinas Kesehatan			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4	24.000,00	0	0,00										0	-			Dinas Kesehatan			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	50,41	484,58	6765	62.276,00	67,65	840,93	48,8	9,77	67,65	34,76	0,7029		67,03	1.429,70	67,65	1.503,77	67,65	82.625,77	134,20	17.051,01	Dinas Kesehatan
			Presentase Desa Siaga Kategori mandiri	46,59		75		75		75		75		0,75		68,18	75		75			160,98	Dinas Kesehatan	
			Presentase RT yang ber PHBS	23		27,95		27,95		35,88		27,95		0,3588		32,9	27,95		27,95			121,52	Dinas Kesehatan	
			Presentase posyandu strata purnama mandiri	81,65		100		100		35,53		100		1		100		100		100			122,47	Dinas Kesehatan
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Desa Siaga kategori mandiri														0						Dinas Kesehatan	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	160.000,00	1	12.343,00	1	56,68	0	2,74	0	0,78	0	6,51	1	45,28	1	55,31	2	12.398,31			Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% posyandu strata purnama mandiri															0	-				Dinas Kesehatan	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	160,00	1	49.933,00	1	68,58	0	7,03	0	33,98	0	23,02	1	0,82	0	64,86	1	49.997,86			Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promoti/ Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Rumah Tangga yang ber PHBS															0	-				Dinas Kesehatan	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	134,68	0	0,00											0	-				Dinas Kesehatan	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100		100	9.423,00	100	715,67	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	691,80	100	691,80	100	10.114,80	100,00	15,84	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan																	-			Dinas Kesehatan	
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1	9.423,00	-		0	-	0	-	0	-	1	691,80	1	691,80	2	10.114,80			Dinas Kesehatan (Puskesmas Sentro II)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	95.132,92	100	129.409,47	100	29.658,27	34,65	7.916,27	61,56	8.708,07	91,67	6.266,31	100	6.412,50	100	29.303,15	100	158.712,62	100,00	166,83	RSUD Wates
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		-			RSUD Wates	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3020	192.000,00	12	129.409,47	13	29.658,27	3	7.916,27	3	8.708,07	3	6.266,31	4	6.412,50	13	29.303,15	25	158.712,62			RSUD Wates
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP UKM	88,46	560.020,57	82,09	165.170,86	83,83	150.006,74		38.850,45		33.076,26			85,47	0	71.926,71	0	237.097,57	0,00	42,34	RSUD Wates	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		-			RSUD Wates	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		40.000,00	12	35.761,39	8	9.523,93	1	-	0	-	0	1.019,55	0	-	1	1.019,55	13	36.780,94			RSUD Wates
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		-			RSUD Wates	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	3.000,00	12	129.409,47	1	140.482,81	0	38.850,45	0	33.076,26	0	42.136,09	1	-	1	114.062,80	13	243.472,27			RSUD Wates
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	25.228,74	100	9.264,46	100	12.449,57	34,65	3.646,74	61,56	2.545,17	91,67	2.397,17	100	2.463,65	100	11.052,73	100	20.317,19	100,00	80,53	RSUD Nyi Ageng Serang

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
										I		II		III		IV								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	-			RSUD Nyi Ageng Serang		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3020	192,00	12	9.264,46	13	12.449,57	3	3.646,74	3	2.545,17	3	2.397,17	4	2.463,65	13	11.052,73	25	20.317,19		RSUD Nyi Ageng Serang	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP UKM	88,46	560.020,57	82,09	9.264,46	83,83	46.619,84		7.176,73		8.672,52		11.181,73	85,47	-	0	27.030,98	0	36.295,44	0,00	6,48	RSUD Nyi Ageng Serang
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	-				RSUD Nyi Ageng Serang	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			0	0,00	2	9.076,62	0	-	0	-	0	6.364,32	2	-	2	6.364,32	2	6.364,32			RSUD Nyi Ageng Serang
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	-				RSUD Nyi Ageng Serang	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	3,00	12	9.264,46	1	37.543,23	0	7.176,73	0	8.672,52	1	11.181,73		-	1	27.030,98	13	36.295,44			RSUD Nyi Ageng Serang
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																	-					
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	35.916,52	100	206.233,68	100	8.446,69	34,65	2.092,51	61,56	2.016,46	91,67	1.793,40	100	1.936,01	100	7.838,37	100	214.072,05	100,00	596,03	Dinas PUP & KP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja																-				Dinas PUP & KP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9	55,85	2	3.168,00	2	39,16	1	7,16	0	7,96	1	12,56	0	11,11	2	38,79	4	3.206,79			Dinas PUP & KP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	85	26,86	21	1.944,00	21	23,00	3	0,62	6	8,61	6	8,21	6	5,16	21	22,61	42	1.966,61			Dinas PUP & KP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														0	-	0	-			Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	14.205,61	12	5.647,92	13	6.503,47	3	1.752,16	3	1.542,37	3	1.228,47	4	1.406,68	13	5.929,68	25	11.577,60			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	222,81	12	11.806,00	12	122,40	2	20,05	4	40,79	2	20,46	4	40,55	12	121,85	24	11.927,85			Dinas PUP & KP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	28,00	14	18,96	14	22,11	3	2,85	4	5,95	3	6,73	4	5,85	14	21,39	28	40,35			Dinas PUP & KP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																0	-			Dinas PUP & KP	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	330,51	12	12.068,00	24	97,43	6	1,09	6	39,74	6	43,91	6	12,66	24	97,40	36	12.165,40			Dinas PUP & KP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																0	-			Dinas PUP & KP	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	117,50	88	15.269,00	2	20,06	0	-	2	20,06	0	-	0	0,00	2	20,06	90	15.289,06			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																0	-			Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	1.806,55	12	376,80	12	379,93	3	94,80	3	93,57	3	102,44	3	87,70	12	378,51	24	755,31			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	112,84	4	5.624,00	12	59,22	3	11,98	3	16,90	3	18,09	3	12,19	12	59,16	16	5.683,16			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92	496,16	12	37.789,00	12	409,33	3	105,68	3	99,53	3	96,74	3	96,63	12	398,58	24	38.187,58			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															-	0	-			Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	168	3.546,29	42	61.923,00	42	713,66	11	91,46	10	123,87	10	238,76	11	239,38	42	693,47	84	62.616,47			Dinas PUP & KP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	668,31	34	3.082,00	34	56,92		4	4,66	9	17,11	12	17,02	9	18,10	34	56,89	68	3.138,89			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1.085,40	3	47.517,00													3	47.517,00			Dinas PUP & KP	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	87,28	29.894,61	86,97	13.033,64	86,87	13.810,88		86,97	2.101,32	87,02	4.379,12	87,09	4.377,60	87,06	2.133,95	87,02	12.991,98	87,02	26.025,62	99,70	87,06	Dinas PUP & KP
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perlunya Konservasi Sumber Daya Air agar Kelestariannya tetap terjaga																		-			Dinas PUP & KP	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	126	1.422,98	12	553,19	302	364,93		0	128,77	0	115,06	0	60,85	302	20,55	302	325,23	314	878,42			Dinas PUP & KP
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan dipelihara	20	1.016,06	12	422,24	5	405,16		0	27,87	0	54,18	0	221,72	5	65,95	5	369,73	17	791,97			Dinas PUP & KP
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik																	0	-			Dinas PUP & KP	
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun/Ditingkatkan	3,1	11.913,00	20	4.223,57	1,2	4.758,40		0	1.072,58	0	814,12	0	1.600,07	1,2	1.159,36	1,2	4.646,14	21,2	8.869,70			Dinas PUP & KP
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	5,2	3.980,00	42	7.834,64	1,2	8.282,39		0	872,10	0	3.395,76	0	2.494,95	1,2	888,08	1,2	7.650,89	43,2	15.485,54			Dinas PUP & KP
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	19	65.156,34	0	0,00													0	-			Dinas PUP & KP	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	94,35	10.397,33	96,52	4.607,16	97,08	3.489,51		96,52	1,12	96,52	625,29	96,52	36,81	97,75	123,90	96,52	3.487,11	96,52	8.094,27	102,30	77,85	Dinas PUP & KP
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-																		-			Dinas PUP & KP	
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			0	0,00	1,2	789,51		0	1,12	0	625,29	0	36,81	1,2	123,90	1,2	787,11	1,2	787,11			Dinas PUP & KP
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	842	63.973,29	1280	4.607,16													1280	4.607,16			Dinas PUP & KP	
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan	2000	4.000,00	0	0,00													-	0	-		Dinas PUP & KP	
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan (DAK)	5461	11.115,11	0	0,00													-	0	-		Dinas PUP & KP	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Pedesaan SPAM (DAK)	24	7.119,00	0	0,00													-	0	-		Dinas PUP & KP	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dana Keistimewaan	877	6.540,19	0	0,00		2.700,00											2.700,00	0	2.700,00			Dinas PUP & KP
			Perluasan Jaringan Perpipaan di Kaligugung, Sentolo 1 Paket			0	0,00													-	0	-		Dinas PUP & KP	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	23,22	13.629,18	26,09	11.903,04	26,8	3.850,70		6,31	816,53	12,23	1.008,42	17,75	981,46	24,24	1.018,55	12,23	3.824,96	12,23	15.728,01	52,67	115,40	Dinas PUP & KP
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-																					Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan			3	3.850,70				0	816,53	0	1.008,42	0	981,46	3	1.018,55	3	3.824,96	3	3.824,96			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	4	13.629,18	30	11.903,04															11.903,04			Dinas PUP & KP
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (DAK Fisik)	3000	7.254,00	0	0,00														-			Dinas PUP & KP	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	88,92	8.031,73	88,73	390,70	88,92	2.073,23		88,71	66,89	88,71	1.793,15	88,72	126,72	89,00	85,52	88,71	2.072,28	88,71	2.462,98	99,76	30,67	Dinas PUP & KP
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																		-			Dinas PUP & KP	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	4	680,00	1	390,70	1	234,28	0	64,05	0	53,32	0	71,28	1	44,90	1	233,55	2	624,25			Dinas PUP & KP
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	704	4.833,31	0	0,00	173	1.838,95	0	2,84	0	1.739,83	0	55,44	173	40,63	173	1.838,74	173	1.838,74			Dinas PUP & KP
		Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase sarana prasarana perkantoran pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik dan tertib administrasi	75	10.283,11	73,58	3.579,44	73,96	4.982,12	73,59	33,54	73,59	134,59	73,6	1.071,97	73,59	3.062,84	73,59	4.302,94	73,59	7.882,38	98,12	76,65	Dinas PUP & KP
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-																					Dinas PUP & KP
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			0	0,00	3	4.833,22	0	19,42	0	92,62	1	1.023,72	2	3.018,36	3	4.154,12	3	4.154,12			Dinas PUP & KP
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	800	2.923,58	0	0,00	180	148,90	20	14,12	27	41,97	75	48,24	27	44,49	149	148,82	149	148,82			Dinas PUP & KP
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9	8.800,00	8	3.579,44		-									-		3.579,44			Dinas PUP & KP	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Presentase penataan bangunan dan lingkungannya	73,08	5.105,22	73,47	1.703,67	69,23	1.694,66	18,37	299,62	36,73	274,68	73,47	758,96	73,47	359,31	36,73	1.692,58	36,73	3.396,25	50,26	66,53	Dinas PUP & KP
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-																					Dinas PUP & KP
		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sitem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya yang dilata			0	0,00	52	1.694,66	11	299,62	15	274,68	14	758,96	12	359,31	52	1.692,58	52	1.692,58			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya/Pertamanan	8	5.105,22	52	1.703,67													1.703,67			Dinas PUP & KP	
		Program Penyelenggaraan Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	75,69	246.925,64	73,39	78.084,29	74,16	73.704,61	73,39	1.772,71	73,39	16.879,75	74,08	34.338,57	74,25	14.125,90	73,39	65.868,48	73,39	143.952,78	96,96	58,30	Dinas PUP & KP
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-																	-				Dinas PUP & KP
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3	860,00	0	0,00	7	2.470,61	0	0,47	0	384,84	0	748,56	7	1.248,45	7	1.133,87	7	1.133,87			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2	10.300,00	20	4.457,73	1,3	6.500,00	0	5,38	0	550,61	0	2.294,48	1,3	3.554,92	1,3	6.405,40	21,3	10.863,13			Dinas PUP & KP
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	40	158.314,63	9010	29.329,50	7,9	25.270,65	0	38,41	0	6.720,85	0	14.315,46	7,9	25,79	7,9	21.100,50	9017,9	50.430,01			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	12	25.100,00	975	34.699,87	14,98	21.467,78	0	22,33	0	5.708,52	0	12.818,97	14,98	2.830,43	14,98	21.380,24	989,98	56.080,11			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	200	4.350,00	3	1.232,98	40	1.193,50	0	367,18	0	17,71	0	344,58	40	460,76	40	1.190,23	43	2.423,21			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	60	10.300,00	1	101,00	2	8.408,22	0	2,33	0	839,66	0	2.343,89	2	3.162,32	2	6.348,19	3	6.449,19			Dinas PUP & KP
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	8	2.200,00	2	557,82	800	528,92	0	0,44	0	-	0	250,88	800	271,93	800	523,25	802	1.081,07			Dinas PUP & KP
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	360	30.951,01	2	7.705,39	40	7.864,93	0	1.336,17	0	2.657,56	0	1.221,76	40	2.571,30	40	7.786,79	42	15.492,19			Dinas PUP & KP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase Uji Laboratorium, Layanan Alat Berat dan Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi	93,23	1.511,12	89,01	399,39	87,78	494,02		83,13	101,41	83,79	218,89	89,67	94,36	90,38	74,01	90,38	488,67	90,38	888,06	96,94	58,77	Dinas PUP & KP
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-																		-			Dinas PUP & KP	
		Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	839	170.000,00	0	0,00	35	142,50		0	66,29	35	25,54	0	28,43	0	17,68	35	137,94	35	137,94			Dinas PUP & KP
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-																		-			Dinas PUP & KP	
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pelayanan Uji Laboratorium dan alat berat	100	225.743,35	0	0,00	28	351,52		2	35,12	8	193,35	9	65,93	9	56,33	28	350,74	28	350,74			Dinas PUP & KP
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-																		-			Dinas PUP & KP	
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	370	861,32	12	399,39														399,39			Dinas PUP & KP	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	2.000,00	25	8.729,76	50	19.072,66		86,36		3.900,01		4.295,01	50	10.703,81	50	18.985,19	50	27.714,95	50,00	1.385,75	Dinas PUP & KP	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-																		-			Dinas PUP & KP	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	-	-	1	8.729,76	5	12.699,72		0	5,41	0	2.613,90	0	3.069,54	5	7.003,28	5	12.692,12	6	21.421,88			Dinas PUP & KP
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo			0	0,00	5	6.372,94		0	80,95	0	1.286,11	0	1.225,48	5	3.700,53	5	6.293,07	5	6.293,07			Dinas PUP & KP
		Program Pengembangan Perumahan	Presentase pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat	84,22	2.343,30	73,82	1.176,65	78,5	1.403,18		74,7	113,13	74,81	341,41	74,81	442,91	75,12	499,92	74,81	1.397,37	74,81	2.574,02	88,83	109,85	Dinas PUP & KP
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-																		-			Dinas PUP & KP	
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			0	0,00	1	65,10		0	1,49	1	62,45	0	0,01	0	0,00	1	63,95	1	63,95			Dinas PUP & KP
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	293,37	1	204,81														204,81			Dinas PUP & KP	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-																		-			Dinas PUP & KP	
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terpapar	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terpapar			0	0,00	3	109,44		0	0,40	0	105,46	3	3,57	0	0,00	3	109,43	3	109,43			Dinas PUP & KP
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-																		-			Dinas PUP & KP	
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12	2.050,00	5	971,84	2	1.228,64		0	111,24	0	173,50	0	439,34	2	499,92	2	1.224,00	7	2.195,84			Dinas PUP & KP
		Program Kawasan Permukiman	Presentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	8,26	17.422,67	10,57	4.743,67	7,09	4.279,60		0	38,79	3,51	3.917,13	3,51	84,90	10,40	58,69	3,51	4.099,51	3,51	8.843,18	42,49	50,76	Dinas PUP & KP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-																		-			Dinas PUP & KP	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1600	13.422,67	300	4.743,67	200	4.279,60		0	38,79	0	3.917,13	0	84,90	200	58,69	200	4.099,51	500	8.843,18			Dinas PUP & KP
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	400	4.000,00	0	0,00														-			Dinas PUP & KP	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-																		-			Dinas PUP & KP	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	46,1	11.203,03	44,28	9.845,43	44,54	14.670,30		44,28	15,59	44,28	3.984,81	44,34	10.586,18	45,28	38,92	44,28	14.586,58	44,28	24.432,01	96,05	218,08	Dinas PUP & KP
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																			-			Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	60	10.070,52	34	9.748,70	80	14.570,75		0	13,41	0	3.981,02	0	10.532,99	80	0,00	80	14.527,42	114	24.276,12			Dinas PUP & KP
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengebang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengebang	-	-	1	96,73	5	99,55		0	2,18	0	3,79	0	53,19	50	38,92	50	59,16	51	155,90			Dinas PUP & KP
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengebang	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	4	302,50	0	0,00														-			Dinas PUP & KP	
		Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Bantuan SR Listrik bagi Rumah Tangga Miskin	290	820,00	0	0,00														-			Dinas PUP & KP	
		Kesatuan Bangsa Dan Politik							-																
	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.076,50	100	22.359,19	100	1.920,78		34,65	423,10	61,56	489,64	91,67	351,36	100	432,28	100	1.696,39	100	24.055,58	100,00	339,94	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																		-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	17,00	2	661,00	2	6,29		0	2,08	1	2,74	1	0,61	0	0,61	2	6,04	4	667,04			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	11,25	21	386,00	21	3,74		4	1,28	5	0,98	5	0,36	7	0,80	21	3,43	42	389,43			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80	605.137,84	12	1.250,06	13	1.579,27		3	360,07	3	401,56	3	296,98	4	316,68	13	1.375,29	25	2.625,35			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	162,00	12	3.725,00	12	45,90		3	8,10	3	14,40	3	8,10	3	15,30	12	45,90	24	3.770,90			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	56	7,25	14	3,13	14	3,95		3	-	3	-	4	2,13	4	1,82	14	3,95	28	7,08			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum																		-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (4,1 Paket)	16	45,39	4	1.349,00	4	15,50		1	3,11	1	3,72	1	3,08	1	4,11	4	14,03	8	1.363,03			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	59,80	12	13,20	12	28,94		3	4,80	3	1,83	3	9,09	3	12,80	12	28,52	24	41,72			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																		-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	140,79	12	28,80	12	47,31		3	10,99	3	6,00	3	3,82	3	9,89	9	30,71	21	59,51			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	157,05	12	6.083,00	12	67,30		3	10,15	3	25,53	3	9,60	3	22,02	12	67,30	24	6.150,30			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jml laporan pemeliharaan barang milik daerah																		-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	36	221,41	9	6.571,00	7	85,11		2	17,35	2	22,70	1	10,95	2	33,27	7	84,27	16	6.655,27			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	136	86,95	34	2.289,00	28	37,46		9	5,17	6	10,18	9	6,63	4	14,97	28	36,96	62	2.325,96			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jml gedung kantor dan bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1	8,94	0	0,00														-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jml unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4	72,20	0	0,00														-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pengadaan mebel	Jml paket mebel yang disediakan	3	13,65	0	0,00													-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jml unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	5,32	0	0,00													-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2	14,00	0	0,00													-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	80	1.399,36	80	910,41	80	2.402,11	80	210,98	80	184,57	93,02	1.879,82	93,02	96,76	80	2.372,13	80	3.282,55	100,00	234,57	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																		-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	2000	686,73	220	910,41	150	2.402,11	30	210,98	30	184,57	60	1.879,82	30	96,76	150	2.372,13	370	3.282,55			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jml org yg mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakterbangsa ,pembaurankebangsaan, BhinnekaTunggal Ika dan sejarahkebangsaan	400	429,29	0	-													-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jml kelig yg mengikuti Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalamsemuaaspekke hidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara	200	283,33	0	-													-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80	3.727,13	80	18.794,18	80	27.877,67	0	26.786,47	80	546,68	90	41,69	90,00	471,82	80	27.846,66	80	46.640,85	100,00	1.251,39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																		-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan politik dan partai politik	2000	3.687,13	200	18.794,18	275	27.877,67	0	26.786,47	275	546,68	0	41,69	0	471,82	275	27.846,66	475	46.640,85			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71,33	163,44	54,48	115,80	57,55	142,51	13,79	12,04	41,38	49,93	51,68	34,74	75,17	35,62	41,38	132,33	41,38	248,13	58,01	151,82	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																		-			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, Pengawasan ormas dan ormas asing di daerah 2 Laporan	1440	40,06	2	115,80	2	142,51	0	12,04	1	49,93	1	34,74	0	35,62	2	132,33	4	248,13			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	29,55	2.390,12	12,5	211,44	18,18	177,63		12,5	44,01	12,5	59,76	12,5	18,14	26,14	52,29	12,5	174,20	12,5	385,65	42,30	16,14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																			-				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	600	1.624,35	385	211,44	150	177,63		30	44,01	30	59,76	60	18,14	30	52,29	150	174,20	535	385,65			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jml kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	4	765,77	0	0,00														-				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	2.807,11	100	408,56	100	3.426,17		0	788,59	0	2.395,85	100	21,28	100,00	193,36	0	3.399,08	0	3.807,64	0,00	135,64	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																			-				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	1440	875,00	150	171,77	112	199,17		28	28,65	28	62,53	28	21,28	38	63,18	122	175,64	272	347,41			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	520	875,00	130	127,89	70	3.089,78		17	733,62	18	2.299,99	18		17	53,26	70	3.086,87	200	3.214,76			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	48	528,56	12	108,90	12	137,23		3	26,32	3	33,33	3	-	3	76,91	12	136,56	24	245,46			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							-												-				
	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	16.207,48	100	314.356,77	100	3.899,12		34,65	1.125,91	61,56	977,56	91,67	858,98	100	829,18	100	3.791,63	100	318.148,40	100,00	1.962,97	Satpol PP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah																		-				Satpol PP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	24,80	2	679,00	2	7,00		0	1,36	0	2,07	2	0,88	0	1,50	2	5,81	4	684,81			Satpol PP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	14,70	21	391,00	21	4,00		9	0,98	4	0,24	4	0,53	4	1,61	21	3,36	42	394,36			Satpol PP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan laporan keuangan																	0	-				Satpol PP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediarnya Gaji dan tunjangan ASN	192	13.041,75	12	287.552,00	13	3.060,92		3	961,16	3	763,77	3	635,12	4	636,10	13	2.996,14	25	290.548,14			Satpol PP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	193,49	12	5.576,00	12	55,89		3	10,24	3	18,10	3	13,69	3	13,50	12	55,53	24	5.631,53			Satpol PP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	10,65	14	3,93	14	4,00	4	0,64	3	1,54	4	-	3	1,42	14	3,60	28	7,53			Satpol PP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian, movev pegawai, diklat, dan sosialisasi cukai																	0	-			Satpol PP
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	24,57	2	717,00	2	3,76	1	1,85	1	0,49	0	-	0	1,33	2	3,67	4	720,67			Satpol PP
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	30,17	25	867,00	20	9,02	0	1,25	0	3,77	0	2,00	20	0,68	20	7,69	45	874,69			Satpol PP
		Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya pengadaan pakaian	96	57,60	0	0,00														-			Satpol PP
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240	269,12	0	0,00														-			Satpol PP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan rapat, koordinasi dan konsultasi																	0	-			Satpol PP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	58,00	5	1.379,00	5	15,50	1	3,53	1	5,58	1	3,27	2	2,47	5	14,85	10	1.393,85			Satpol PP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	55,24	3	1.993,00	4	26,61	1	0,73	1	4,15	1	6,22	1	1,47	4	12,57	7	2.005,57			Satpol PP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																	0	-			Satpol PP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	58,00	0	0,00	18	22,73	0	3,53	0	5,58	0	3,27	18	8,93	18	21,31	18	21,31			Satpol PP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																	0	-			Satpol PP
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa PTTD, Satpam, Pramu kantor, Pengemudi) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	16,00	1.636,75	0	0,00														-			Satpol PP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	136,00	12	49,40	12	68,20	3	15,40	3	10,73	3	16,93	3	13,78	12	56,83	24	106,23			Satpol PP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	626,00	12	388,90	12	419,08	3	94,14	3	99,40	3	127,71	3	97,06	12	418,30	24	807,20			Satpol PP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya																	0	-			Satpol PP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	64	525,00	16	14.745,00	16	178,92	6	31,10	2	54,94	4	43,18	4	42,27	16	171,49	32	14.916,49			Satpol PP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi	128	703,63	41	15,54	79	23,50	6	-	36	7,20	33	6,18	4	7,07	79	20,46	120	36,00			Satpol PP
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum	100	6.293,67	95,01	1.949,87	97,87	2.527,65	95,01	358,43	95,01	661,07	94,95	528,54	94,95	866,51	95,01	2.414,55	95,01	4.364,42	95,01	69,35	Satpol PP
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencegahan gangguan transibum dan dokumen hasil pemberdayaan lomas																		-			Satpol PP
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	56	3.777,44	14	1.246,02	14	1.694,13	3	211,73	4	444,48	3	330,77	4	671,90	14	1.658,88	28	2.904,91			Satpol PP
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	670	1.112,58	200	254,30	12	325,06	3	74,47	3	86,78	3	78,28	3	74,76	12	314,29	212	568,60			Satpol PP
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan perda dan penanganan perda sesuai SOP																		-			Satpol PP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	48	659,96	12	254,28	12	310,49	3	56,92	3	66,72	3	56,57	3	90,71	12	270,93	24	525,21			Satpol PP
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	52	785,96	13	186,52	13	197,97	4	15,31	3	63,09	3	62,92	3	29,13	13	170,45	26	356,97			Satpol PP
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walkota	-	9,30	120	8,75													8,75			Satpol PP	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pembentukan kelompok jaga warga	100	1.551,72	26,77	651,71	75,05	0,00	0	0,00		0,00		0,00	26,77	0,00	26,77	0,00	26,77	651,71	26,77	42,00	Satpol PP
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah pembentukan jaga warga																	-			Satpol PP	
		Pembinaan Jagawarga	Pembentukan jaga warga	630	1.551,72	6250	651,71	-	-	0	-		-		-		0	-	6250	651,71			Satpol PP	
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							-											-				
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	10.383,46	100	89.956,51	100	2.045,78	34,65	416,59	61,56	469,61	91,67	391,11	100	693,07	100	1.970,38	100	91.926,89	100,00	885,32	BPBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan tingkat daerah																				BPBD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	54,57	2	681,00	2	5,30	0	1,01	0	1,90	2	1,40	0	0,69	2	5,00	4	686,00			BPBD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	15,35	21	348,00	21	2,73	6	-	4	0,90	5	1,11	6	0,51	21	2,52	42	350,52			BPBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN																	-			BPBD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	4.731,94	12	1.010,03	13	1.252,41	3	302,51	3	369,41	3	264,26	4	262,14	13	1.198,31	25	2208,338959			BPBD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	156,97	12	4.069,00	12	40,81	3	9,44	3	10,70	3	10,68	3	9,50	12	40,32	24	4.109,32			BPBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	105	13,85	14	3,48	14	2,49	3	0,62	4	0,36	3	0,54	4	0,82	14	2,34	28	5,82			BPBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																	-			BPBD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	120,96	1	4.192,00	1	38,46	0	3,06	0	1,93	0	9,17	1	22,67	1	36,83	2	4.228,83			BPBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya																	-			BPBD	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	3.874,17	24	39.793,00	2	199,70	0	0,21	0	0,23	0	0,01	2	198,61	2	199,05	26	39.992,05			BPBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																	-			BPBD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0,00	0	0,00	12	55,33	3	12,02	6	12,89	0	11,19	3	17,93	12	54,03	12	54,03			BPBD
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	29,74	1	578,00	1	7,96	0	1,86	0	0,71	0	4,71	1	0,32	1	7,61	2	585,61			BPBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	519,50	1	14.083,00	1	135,30	0	45,87	0	25,93	0	32,72	1	28,04	1	132,56	2	14.215,56			BPBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik																	-			BPBD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dbayarkan pajak dan perizinannya			0	0,00	21	242,42	21	39,34	0	41,27	0	44,66	0	104,37	21	229,64	21	229,64			BPBD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	174	866,42	42	25.199,00	20	62,86	5	0,65	4	3,38	8	10,67	30	47,48	47	62,18	89	25.261,18			BPBD
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana	100	4.222,45	68,73	1.072,58	78,41	1.000,44	68,73	168,69	70,85	133,60	75,58	372,77	78,41	320,71	70,85	995,77	70,85	2.068,35	70,85	48,98	BPBD
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																					BPBD	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1200	161,29	300	37,73	300	37,01	0	1,00	100	12,00	150	11,55	50	11,79	300	36,34	600	74,07			BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase warga yang mendapat pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan																0					BPBD
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Diselaisasi	10	775,42	2	206,84	2	204,05	0	0,14	0	0,15	0	99,96	2	102,83	2	203,07	4	409,91			BPBD
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	800	170,18	200	39,82	200	54,00	0	0,29	0	-	0	0,70	200	52,87	200	53,86	400	93,68			BPBD
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	76	63,82	14	14,97	20	14,10	0	0,15	0	-	20	13,48	0	0,45	20	14,08	34	29,05			BPBD
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	470	276,54	110	64,91	110	56,01	0	-	60	24,92	50	24,11	0	6,43	110	55,46	220	120,37			BPBD
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4	127,63	1	29,99													29,99				BPBD
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1	103,00	1	102,73													102,73				BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase warga yang mendapat penyelamatan dan edukasi															-						BPBD
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4	2.089,78	1	478,60	1	536,90	0	159,83	0	88,72	0	163,33	1	124,79	1	536,67	2	1.015,27			BPBD
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	320	127,63	1	29,88	100	29,17	0	-	0	0,74	0	27,70	100	0,67	100	29,11	101	58,99			BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prosentase regulasi pendukung penanganan bencana																					BPBD
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4	93,17	1	27,41	1	23,55	1	4,23	0	2,78	0	4,53	0	11,10	1	22,64	2	50,05			BPBD
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	4	170,18	1	39,69	1	37,00	0	1,62	0	2,17	0	27,06	1	5,37	1	36,23	2	75,92			BPBD
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			0	0,00	1	8,65	0	1,43	0	2,12	0	0,35	1	4,41	1	8,32	1	8,32			BPBD
		Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA), Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana(R3P)	4	63,82	0	0,00													-				BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase pencegahan penanggulangan penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	60,42	1.810,55	38,54	2.806,01	44,79	747,52	38,54	226,82	43,23	115,57	44,79	190,52	44,79	212,63	43,23	745,55	43,23	3.551,56	71,55	196,16	BPBD
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran																	-				BPBD
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	1.448,93	1	671,12	1	648,08	0	226,41	0	98,02		183,47	1	139,99	1	647,88	2	1.319,00			BPBD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV								
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4	21,27	1	4,99	1	6,90	0	0,19	0	3,52	0	0,20	1	2,70	1	6,62	2	11,61			BPBD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4	21,27	1	2.060,22	41	26,30	0	-	0	0,38	0	5,35	41	20,33	41	26,06	42	2.086,28			BPBD
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																		-			BPBD	
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana dan prasarana proteksi kebakaran	4	106,36	1	24,88	1	24,40	0	-	0	-	0	0,54	1	23,60	1	24,13	2	49,01			BPBD
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase warga yang mengikuti sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran																	-			BPBD	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	800	127,63	200	29,85	200	28,17	0	-	150	13,65	50	0,54	0	13,54	200	27,73	400	57,57			BPBD
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20	63,82	5	14,96	5	13,66	0	0,22	0	-	5	0,43	0	12,48	5	13,13	10	28,09			BPBD
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71,33	163,44	84,48	0,00	57,55	889,00	13,79	0,00	41,38	0,00	51,68	0,00	75,17	884,99	41,38	884,99	41,38	884,99	58,01	541,48	BPBD
		Adat Seni Tradisi Lembaga Budaya																		-			BPBD	
		Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Tangki Air	1440	40,06	0	0,00	1	889,00	0	-	0	0,00	0	-	1	884,99	1	884,99	1	884,99			BPBD
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		0	-				-		-									-				
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	13.472,04	100	64.536,94	100	3.542,60	34,65	1.024,67	61,56	858,52	91,67	737,06	100	776,01	100	3.396,26	100	67.933,20	100,00	504,25	DinsosPPPA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	-			DinsosPPPA	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	60,38	2	921,00	2	11,20	0	2,88	0	2,14	2	1,84	0	3,46	2	10,31	4	931,31			DinsosPPPA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	74,19	11	783,00	21	8,77	7	1,96	4	1,96	5	1,52	5	2,52	21	7,96	32	790,96			DinsosPPPA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN																	-			DinsosPPPA	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		9.877,17	12	2.381,56	13	2.788,96	3	868,99	3	641,08	3	572,52	4	594,47	13	2.677,06	25	5058,624725			DinsosPPPA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	209,62	14	4.899,00	14	49,23	3	12,01	4	11,71	3	10,42	4	11,91	14	46,05	28	4.945,05			DinsosPPPA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14	49,67	14	9,38	14	10,80	3	2,38	4	3,82	3	1,22	4	3,12	14	10,54	28	19,92			DinsosPPPA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	-			DinsosPPPA	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	288,90	12	2.456,00	12	52,80	3	9,69	3	12,98	3	8,22	3	6,19	12	37,09	24	2.493,09			DinsosPPPA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																	-			DinsosPPPA	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	28	670,80	0	0,00	10	35,58	1	-	9	33,74	0	0,00	0	0,00	10	33,74	10	33,74			DinsosPPPA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														0	-	0	-			DinsosPPPA	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	1.473,28	12	35.718,00	12	386,81	3	91,81	3	109,97	3	91,42	3	91,12	12	384,33	24	36.102,33			DinsosPPPA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah															0	-	0	-			DinsosPPPA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperilhara/direhabilitasi	29	768,03	14	17.369,00	29	198,45	7	34,95	7	41,12	8	49,90	7	63,21	29	189,18	43	17.558,18			DinsosPPPA
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	69,44	340,36	54,79	109,15	57,78	83,76	8,39	3,64	29,81	39,55	59,02		61,48	23,21	29,81	75,78	29,81	184,93	42,93	54,33	DinsosPPPA
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial																		-			DinsosPPPA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	35,80	1	6,62	1	13,92	0	0,34	0	-	1	-	0	13,30	1	13,64	2	20,26			DinsosPPPA
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial																0	-				DinsosPPPA
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	45	43,00	45	12,74	45	8,04	15	1,10	15	2,85	15	2,11	0	1,93	45	7,98	90	20,72			DinsosPPPA
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	57,86	12	77,44	12	12,40	12	0,88	0	5,44	0	2,91	0	3,11	12	12,34	24	89,78			DinsosPPPA
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8	203,69	8	12,36	7	49,40	2	1,32	3	31,26	0	4,37	2	4,87	7	41,82	15	54,18			DinsosPPPA
		Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial	100	58.366,50	100	1.381,82	100	653,68	26,86	5,34	42,24	82,80	42,24	376,40	100,00	109,65	42,24	574,19	42,24	1.956,01	42,24	3,35	DinsosPPPA
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosia																	-				DinsosPPPA
		Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	462	2.109,82	462	333,80	462	429,14	0	-	462	2,04	0	331,44	0	18,60	462	352,08	924	685,88			DinsosPPPA
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	200,53	30	23,81	30	25,70	0	-	0	-	0	-	30	25,20	30	25,20	60	49,02			DinsosPPPA
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250	311,66	250	867,49	250	79,76	20	-	170	46,53	20	12,35	40	20,20	250	79,08	500	946,57			DinsosPPPA
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250	212,17	250	26,30	250	26,60	45	1,05	75	8,85	85	7,84	45	8,81	250	26,55	500	52,85			DinsosPPPA
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	24	112,21	24	11,27	24	12,34	0	-	24	0,33	0	12,00	0	0,00	24	12,33	48	23,60			DinsosPPPA
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	98,72	24	15,75	24	15,86	6	1,57	6	5,50	6	3,15	6	5,09	24	15,31	48	31,06			DinsosPPPA
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	438,30	120	87,08	120	58,30	30	2,72	30	19,55	30	9,40	30	26,09	120	57,76	240	144,84			DinsosPPPA
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial																0	-				DinsosPPPA

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	93,01	5	16,31	1	6,00	0	-	0	-	1	0,21	0	5,66	1	5,88	6	22,19			DinsosPPPA
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial	27,78	5.103,83	31,13	13.386,01	31,3	13.526,56	33,01	3.321,97	32,63	3.156,90	32,63	3.218,52	32,82	3.697,69	32,63	13.395,08	32,63	26.781,09	117,46	524,73	DinsosPPPA
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial																		-			DinsosPPPA
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata	18400	2.842,00	18400	199,38	13400	169,63	0	10,91	0	44,20	0	28,74	13400	52,14	13400	135,99	31800	335,37			DinsosPPPA
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Program Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40000	2.261,83	40000	155,21	40000	159,81	0	19,47	0	22,69	0	57,02	42949	26,94	42949	126,12	82949	281,33			DinsosPPPA
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (5.104 Keluarga.) Bansos BPNT APBD 4.400 KPM + Bansos Cukai Rokok 704 orang	-	-	12	13.031,42	12	13.197,12	3	3.291,59	3	3.090,01	3	3.132,76	3	3.618,61	12	13.132,97	24	26.164,39			DinsosPPPA
		Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Dasar urusan wajib bidang sosial	100	184,93	100	134,94	100	170,54	100	29,46	100	56,65	100	29,49	100,00	53,11	100	168,71	100	303,65	100,00	164,20	DinsosPPPA
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial																		-			DinsosPPPA
		Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian kewenangan Kab/Kota)	760	127,45	160	30,04	160	30,04	80	-	0	12,91	0	-	80	16,67	160	29,58	320	59,62			DinsosPPPA
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Dasar Urusan Wajib Bidang Sosial																		-			DinsosPPPA
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12	57,48	12	13,21	14	13,74	0	-	13	10,23	1	1,35	0	2,10	14	13,69	26	26,90			DinsosPPPA
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	296,39	140	91,69	40	126,76	0	29,46	40	33,51	0	28,13	0	34,34	40	125,45	180	217,13			DinsosPPPA
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100	85,26	100	40,65	100	41,34	100	0,00	100	0,00	100	16,37	100,00	20,27	100	36,64	100	77,29	100,00	90,65	DinsosPPPA
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																			-			DinsosPPPA
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	85,27	1	40,65	1	41,34	0	-	0	-	1	16,37	0	20,27	1	36,64	2	77,29			DinsosPPPA
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																			-			DinsosPPPA
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	73,14	167,37	58,37	160,19	63,9	112,81	22,37	16,56	43,49	24,76	58,17	16,62	73,98	50,70	43,49	108,65	43,49	268,83	59,46	160,62	DinsosPPPA
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																			-			DinsosPPPA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0,00	7	50,66	12,55	3	13,62	1	8,41	3	14,91	7	49,49	7	49,49				DinsosPPPA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender																0	-				DinsosPPPA
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90	51,58	90	21,58	90	21,25	0	-	0	-	0	0,45	90	19,23	90	19,68	180	41,27			DinsosPPPA

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	4	115,78	4	138,60	4	40,90		0	4,01	1	11,14	1	7,77	2	16,56	4	39,48	8	178,08			DinsosPPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Presentase perlindungan perempuan	99,99	551,44	99,99	286,89	99,99	629,82		100	113,21	100	110,79	99,99	175,30	99,99	165,89	100	565,19	100	852,08	100,01	154,52	DinsosPPPA
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Perempuan																		-			DinsosPPPA	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	551,45	3	37,78	3	227,35		1	73,43	0	55,42	1	58,02	1	37,37	3	224,24	6	262,02			DinsosPPPA
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-																		-			DinsosPPPA	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	367,61	2	249,11	2	332,70		2	39,78	0	55,37	0	79,78	0	96,71	2	271,64	4	520,75			DinsosPPPA
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			-			DinsosPPPA	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas			0	0,00	5	69,77		0	-	0	-	5	37,50	0	31,82	5	69,32	5	69,32			DinsosPPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Presentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	56,9	830,07	15,52	172,72	31,03	176,48		15,52	37,53	15,52	14,48	15,52	13,05	31,03	104,42	15,52	169,47	15,52	342,19	27,28	41,22	DinsosPPPA
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																			-			DinsosPPPA	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9	830,07	9	172,72	7	176,48		3	37,53	2	14,48	2	13,05	0	104,42	7	169,47	16	342,19			DinsosPPPA
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	58,26	49,74	-	49,16	0	0,00			0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	49,16	0,00	98,83	DinsosPPPA
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender																		-			DinsosPPPA	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	5,27	1	5,18													1	5,18			DinsosPPPA	
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	6	44,47	6	43,97													6	43,97			DinsosPPPA	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100	17.213,46	100	0,00	100	175,00			0,00		1,35		170,12	100	0,82	100	172,29	100	172,29	100,00	1,00	DinsosPPPA
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																			-			DinsosPPPA	
		Pengembangan Ekonomi Perempuan				0	0,00		175,00			-	35	1,35	70	170,12		0,82	105	172,29	105	172,29			DinsosPPPA
		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																			-				
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penguatng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	17.213,46	100	84.327,98	100	4.491,85		34,65	1.420,96	61,56	826,19	91,67	923,35	100	1.028,52	100	4.199,02	100	88.527,00	100,00	514,29	Disnakertrans
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja																		-			Disnakertrans	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	34,04	2	793,00	2	5,99		0	1,70	0	1,16	1	1,48	1	1,59	2	5,93	4	798,93			Disnakertrans
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	29,78	21	7,00	21	5,42		7	1,84	4	0,90	5	1,92	5	0,76	21	5,42	42	12,42			Disnakertrans
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% capaian administrasi keuangan Daerah																-		-				Disnakertrans
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	14.009,04	12	3.085,32	13	3.143,55			1.117,64	3	572,34	3	599,84	4	604,14	10	2.893,96	22	5.979,28			Disnakertrans
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokmen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	236,97	12	55,70	12	56,33		3	11,98	3	16,25	3	12,68	3	13,78	12	54,68	24	110,38			Disnakertrans
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	34,04	14	7,96	14	4,83		4	1,57	3	0,78	3	0,18	4	2,28	14	4,81	28	12,77			Disnakertrans
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai																		-				Disnakertrans
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	28,78	1	691,00	1	3,99		0	-	0	-	0	2,03	1	1,90	1	3,93	2	694,93			Disnakertrans
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	75,00	0	0,00	7	52,95		0	-	7	-	0	25,44	0	26,51	7	51,95	7	51,95			Disnakertrans
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah																		-				Disnakertrans
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	110,62	6	2.597,00	6	28,75		1	4,27	2	7,71	1	7,66	2	9,10	6	28,74	12	2.625,74			Disnakertrans
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12	340,31	12	7.606,00	12	92,44		3	15,59	3	5,77	3	10,41	3	37,52	12	69,29	24	7.675,29			Disnakertrans
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																		-				Disnakertrans
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	696,58	9	15.835,00	12	179,61		3	39,22	3	36,99	3	38,45	3	49,62	12	164,29	21	15.999,29			Disnakertrans
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	648,72	12	15.119,00	12	694,62		3	181,94	3	126,52	3	170,90	3	215,26	12	694,62	24	15.813,62			Disnakertrans
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																	0	-				Disnakertrans
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80	559,63	20	14.378,00	20	192,10		5	37,75	6	51,14	6	45,92	3	55,41	20	190,22	40	14.568,22			Disnakertrans
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	2.781,00	26	31,28				6	7,46	7	6,63	7	6,44	6	10,65	26	31,18	52	2.812,18			Disnakertrans
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	112,00	1	21.372,00				0										21.372,00			Disnakertrans	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1	213,17	1	130,02	1	109,94		0	18,52	0	34,67	-	39,85	1	12,54	0	105,58	0	235,60	0,00	110,52	Disnakertrans
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun																		-				Disnakertrans
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	213,17	1	94,27	1	73,60		0	17,93	0	11,76	0	36,72	1	3,40	1	69,81	2	164,08			Disnakertrans
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	18	-	3	35,75	5	36,35		0	0,59	0	22,91	0	3,13	5	9,15	5	35,77	8	71,53			Disnakertrans
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	presentase peserta pelatihan bersertifikasi	83,59	4.989,01	94,1	964,65	95	1.070,76		0	221,34	64,58	384,94	64,58	317,16	92,86	84,96	64,58	1.008,40	64,58	1.973,04	77,26	39,55	Disnakertrans
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	prosentase peserta pelatihan yang kompeten																		-				Disnakertrans
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192	3.879,17	128	627,64	176	898,21		32	205,95	80	348,44	48	213,54	16	71,69	176	839,62	304	1.467,26			Disnakertrans
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12	175,38	8	34,27	3	30,70		0	-	3	28,29	0	0,89	0	1,04	3	30,22	11	64,49			Disnakertrans
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		-				Disnakertrans
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Di Bina	8	635,23	2	149,07	1	141,85		0	15,39	0	8,21	1	102,72	0	12,23	1	138,55	3	287,62			Disnakertrans
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah																		-				Disnakertrans

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di tingkat Daerah	4	299,23	1	153,67												153,67			Disnakertrans			
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja yang ditempatkan	64,86	31.143,87	81,02	12.888,72	81,02	14.900,31		85,31	188,34	73,11	4.103,74	78,84	5.102,59	82,40	5.065,97	73,11	14.460,65	73,11	27.349,37	112,72	87,82	Disnakertrans
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan																	-			Disnakertrans		
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	72	578,80	631	126,89	1200	111,09	283	29,57	421	22,72	296	30,67	522	26,44	1522	109,40	2153	236,30			Disnakertrans	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	2520	30.266,20	2213	12.674,89	3600	14.700,18	0	148,22	0	4.073,32	3636	5.021,87	2	5.019,38	3638	14.262,78	5851	26.937,67			Disnakertrans	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)																	-			Disnakertrans		
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	14880	542,60	4414	86,94	3600	89,04	514	10,55	1037	7,70	980	50,06	1673	20,15	4204	88,46	8618	175,40			Disnakertrans	
		Program Hubungan Industrial	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	50,79	542,60	34,55	131,79	48,25	108,09	33,12	24,35	36,88	26,67	36,09	20,75	35,12	33,01	36,88	104,77	36,88	236,56	72,61	43,60	Disnakertrans	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan																	-			Disnakertrans		
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta Pengupahan	6	331,20	6	89,58	6	69,29	2	12,87	2	14,27	2	12,03	0	28,73	6	67,90	12	157,48			Disnakertrans	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah															0	-				Disnakertrans		
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	20	179,83	2	32,29	2	38,80	0	11,48	1	12,40	0	8,71	1	4,28	2	36,87	4	69,16			Disnakertrans	
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	19	31,46	18	9,92													9,92			Disnakertrans		
		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																		-			Disnakertrans		
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Presentase transmigrasi yang ditempatkan	100	942,69	100	183,07	100	151,96	0	11,54	0	10,66	0	12,20	100,00	106,99	0	141,38	0	324,45	0,00	34,42	Disnakertrans	
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase transmigran yang ditempatkan																	-			Disnakertrans		
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	15	736,55	2	143,57	2	151,96	0	11,54	0	10,66	0	12,20	2	106,99	2	141,38	4	284,95			Disnakertrans	
		Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapat Penyuluhan	100	206,14	100	39,50												100	39,50			Disnakertrans		
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya	100	2.719,17	0	0	0	-						0		0	-	0	-			Disnakertrans		
		Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-																	-			Disnakertrans		
		Pengadaan Sarana Prasarana Budaya	Jumlah Sarana Prasarana Budaya	3	2.719,17	0	0,00												0	-			Disnakertrans		
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-		2.977,10															-			Disnakertrans		
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan	12	2.977,10	0	0,00												0	-			Disnakertrans		
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																							
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																							

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											I	II	III	IV											
			Persentase perencanaan penataan ruang	90,74	3.757,46	57,01	1.719,75	68,96	1.766,54		14,29	148,32	14,29	250,91	14,29	474,87	71,43	834,02	14,29	1.708,13	14,29	3.427,88	15,75	91,23	Dispartu
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	97,18		78,39		84,65	-		53,39	-	56,02				84,65		56,02	-	56,02	-	57,65		Dispartu
			Persentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang																		-				Dispartu
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			1	135,93	1	278,25		0	11,88	0	41,37	1	143,63	0	76,89	1	273,78	2	409,71			Dispartu
			Persentase ketersediaan dokumen RTBL	100	1.174,87	0	0,00															-			Dispartu
			Peraturan Bupati RTBL Cangkring-Nagung (1 dokumen)	0	0,00	0	0,00														-			Dispartu	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kab/Kota			2	348,85	3	373,98		0	26,39	0	30,28	0	164,61	3	145,59	3	366,87	5	715,72			Dispartu
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang	72	214,40	0	0,00														-			Dispartu	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Disusun	-	-	0	0,00														-			Dispartu	
			Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	4	-	0	0,00														-			Dispartu	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi			1	53,12	144	192,47		0	-	0	4,20	0	4,70	144	181,25	144	190,15	145	243,27			Dispartu
			Perentase ketersediaan dokumen RTBL	100	230,40	0	0,00														-			Dispartu	
			Video Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang (1 paket)	-		0	0,00														-			Dispartu	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang															0	-	0	-			Dispartu	
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			2	348,85	333	348,12		66	67,74	86	86,41	494	63,44	640	112,30	1286	329,89	1288	678,73			Dispartu
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	97,18	1.705,20	3	317,10	3	257,29		0	24,22	0	43,12	0	27,89	3	154,74	3	249,98	6	567,08			Dispartu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan	1352	789,20	327	268,89														268,89			Dispartu	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang															0	-	0	-			Dispartu	
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			1	44,68	5	56,20		0	4,50	0	14,60	0	9,46	5	26,05	5	54,61	6	99,28			Dispartu
			Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	100	223,80	0	0,00														-			Dispartu	
		Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan			0	0,00	370	110,22		42	13,59	93	28,00	58	21,44	113	37,13	306	100,16	306	100,16			Dispartu
		Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR			0	0,00	1	150,00		0	-	0	2,93	0	39,70	1	100,08	1	142,71	1	142,71			Dispartu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1490	515,70	457	103,91														103,91			Dispartu	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4	425,50	1	98,43														98,43			Dispartu	
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	2.000,00	25	725,72	50	1.254,33		0	0,00	0	215,46		21,25	50,00	1.010,51	50,00	1.247,22	50,00	1.972,95	50,00	98,65	Dispartu
		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati																		-			Dispartu	
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang			1	568,39	2	1.084,33		0	-	0	215,46	0	13,10	2	854,89	2	1.083,45	3	1.651,84			Dispartu
			Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	2.553,00	0	0,00														-			Dispartu	
		Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Ular	Penyusunan RDTR Kulon Progo Wilayah Ular	-	-	0	0,00														-			Dispartu	
		Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase dokumen perencanaan SRS Kasultanan dan Kadipaten yang menjadi Keputusan Bupati	100	741,00	1	157,33		170,00							8,16		155,62		163,78	1	321,11			Dispartu

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
			Peraturan Bupati RTBL Harorejo	-	-	0	0,00													-			Dispartu	
		Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	27	5.795,46	0	0,00													-			Dispartu	
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	17.450,48	100	137.037,83	100	3.230,69	34,65	811,50	61,56	790,74	91,67	749,60	100	713,71	100	3.065,56	100	140.103,39	100,00	802,86	Dispartu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	-			Dispartu	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	24,80	2	1.339,00	2	18,00	0	1,24	0	7,38	1	9,06	1	0,00	2	17,68	4	1.356,68			Dispartu
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	26,20	21	1.037,00	21	11,28	6	3,45	4	3,11	5	2,90	6	1,42	21	10,88	42	1.047,88			Dispartu
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu															-		-			Dispartu	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116	13.165,26	12	1.941,85	13	2.404,56	3	682,42	3	577,42	3	491,39	4	502,73	13	2.253,96	25	4.195,81			Dispartu
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	245,50	12	9.163,00	12	88,28	3	23,89	3	20,63	3	20,62	3	22,88	12	88,02	24	9.251,02			Dispartu
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	27,70	14	19,98	14	35,06	3	-	3	22	4	13,50	4	0,00	14	35,01	28	54,99			Dispartu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum																-				Dispartu	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			4	1.822,00	1	47,68	0	16,45	0	7,26	0	14,08	1	9,83	1	47,62	5	1.869,62			Dispartu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	297,80	1	8.654,00	1	55,33	0	5,27	0	21,03	0	10,45	1	18,00	1	54,75	2	8.708,75			Dispartu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																0	-			Dispartu	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	48	165,10	0	0,00	1	18,57					0			18,10	0	18,10	0	18,10			Dispartu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																0	-			Dispartu	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	48	165,10	12	4.937,00	12	93,37	3	14,94	3	15,00	3	16,55	3	38,10	12	84,60	24	5.021,60			Dispartu
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	408,40	12	11.902,00	1	132,23	0	31,00	0	39,83	0	30,69	1	30,69	1	132,21	13	12.034,21			Dispartu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																0	-			Dispartu	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara/dibayarkan pajak dan perizinan			12	8.145,00	15	181,86	4	23,96	5	59,62	3	33,12	3	63,15	15	179,86	27	8.324,86			Dispartu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	411,00	1	10.473,00	2	119,65	0	-	0	14,43	2	103,63	0	0,00	2	118,06	3	10.591,06			Dispartu
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	112	425,50	11	22.921,00	14	24,81	3	8,88	6	3,52	3	3,59	2	8,81	14	24,80	25	22.945,80			Dispartu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan aset																	-			Dispartu	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	1.548,20	2	42.762,00													42.762,00			Dispartu	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48	449,70	4	11.861,00								-					11.861,00			Dispartu	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																	-			Dispartu	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24	255,30	6	60,00													60,00			Dispartu	
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100	230,20	100	65,67	100	66,17	0	15,12	20	24,21	20	0,00	100,00	25,96	20	65,29	20	130,96	20,00	56,89	Dispartu
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota									-									-			Dispartu	
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	65,67	10	66,17	0	15,12	0	24,21	0		10	25,96	10	65,29	10	130,96			Dispartu

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
			Persentase penyelesaian permasalahan percontohan	100	230,20	0	0,00													-			Dispartu		
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan	100	40.917,03	100	1.660,65	100	1.838,16		0	20,93	0	515,82	0	13,15	100,00	1.149,05	0	1.698,95	0	3.359,60	0,00	8,21	Dispartu
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan																	-			Dispartu		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	40.917,03	100	1.660,65	398	1.838,16		0	20,93	100	515,82	0	13,15	296	1.149,05	396	1.698,95	496	3.359,60			Dispartu
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	100	745,80	100	383,50	100	72,59		0	4,86		25,91	0	12,26	100,00	10,59	0	53,62	0	437,12	0,00	58,61	Dispartu
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda																	-			Dispartu		
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			0	383,50	3	72,59		0	4,86	0	25,91	0	12,26	3	10,59	3	53,62	3	437,12			Dispartu
			ketersediaan dokumen inventarisasi tanah Pemda	100	745,80	0	0,00													-			Dispartu		
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	16,97	924,02	35,54	487,37	35,74	803,07		0	20,56	50,17	93,96	64,81	220,90	74,23	269,35	50,17	604,77	50,17	1.092,14	295,64	118,19	Dispartu
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN																	-			Dispartu		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	1.221,50	0	153,06	100	272,03		0	20,56	0	69,49	0	10,51	27	11,17	27	111,73	27	264,79			Dispartu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			0	334,31	837	531,04		0	-	0	24,47	0	210,39	837	258,18	837	493,04	837	827,35			Dispartu
			Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	16,97	2.584,20	0	0,00													-			Dispartu		
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase bidang tanah kasutanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftar di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya	74,43	9.800,00	66,48	1.635,35	69,7	1.956,77		0	200,45	66,48	403,75	66,76	415,86	71,35	342,01	71,35	1.362,07	71,35	2.997,42	95,86	30,59	Dispartu
		Pengelolaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten	Persentase bidang tanah Kasutanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN																	-			Dispartu		
		Penatausahaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat			1	1.230,73	8	1.568,07		0	98,50	0	281,79	0	328,30	8	277,58	8	986,17	9	2.216,91			Dispartu
			Persentase bidang tanah Kasutanan dan tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	48,86	8.062,40	0	0,00													-			Dispartu		
			Pendaftaran Tanah Kasutanan dan Tanah kadipaten di BPN			0	0,00													-			Dispartu		
			Terlaksananya pembuatan dan pemasangan patok batas bidang Tanah Desa			0	0,00													-			Dispartu		
			Pendaftaran sertifikat tanah desa di BPN			0	0,00													-			Dispartu		
			Pendaftaran ukur tanah desa			0	0,00													-			Dispartu		
			Identifikasi dan verifikasi tanah kasutanan/ kadipaten/ tanah desa			0	0,00													-			Dispartu		
			Pendaftaran Pencatatan perubahan sertifikat tanah desa di BPN			0	0,00													-			Dispartu		
		Pengawasan Tanah Kasutanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasutanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	4	461,20	1	91,25	30	105,00		0	9,86	0	39,31	0	21,79	30	29,47	30	100,43	31	191,68			Dispartu

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pemanfaatan Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten	Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasutanan, tanah kadipaten dan tanah desa																-			Dispartu		
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasutanan dan kadipaten			0	86,85	20	85,00	5	7,47	5	35,85	5	27,45	5	13,70	20	84,47	20	171,32		Dispartu	
			Persentase penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasutanan, tanah kadipaten dan tanah desa	100	400,00	0	0,00													-		Dispartu		
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasutanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasutanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	12	757,60	3	226,52	3	198,70	0	84,62	1	46,80	1	38,32	1	21,26	3	191,00	6	417,52		Dispartu	
		Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)																	-		Dispartu		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	12	121,00	0	0,00													-		Dispartu		
		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																		-				
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.982,31	100	89.983,77	100	2.526,00	34,65	754,30	61,56	582,88	91,67	555,67	100	603,43	100	2.496,28	100	92.480,05	100,00	1.158,56	Dinas Lingkungan Hidup
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	-		Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	130,00	2	3.516,00	2	37,24	0	8,69	0	10,56	2	10,53	0	6,96	2	36,74	4	3.552,74		Dinas Lingkungan Hidup	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	84	22,00	21	1.162,00	21	7,94	8	1,04	4	2,31	5	3,58	4	0,90	21	7,83	42	1.169,83		Dinas Lingkungan Hidup	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																	-		Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	96	6.044,00	12	1.540,70	13	1.866,41	3	637,45	3	387,60	3	407,71	4	416,59	13	1.849,35	25	3.390,05		Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	54,00	12	4.103,00	1	48,00	0	8,00	0	16,00	0	12,00	1	12,00	1	48,00	13	4.151,00		Dinas Lingkungan Hidup	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	22,00	19	4,37	14	5,30	3	1,60	3	1,03	4	1,85	4	0,36	14	4,84	33	9,21		Dinas Lingkungan Hidup	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen administrasi kepegawaian															-		-		Dinas Lingkungan Hidup		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	24,00	0	0,00	30	12,30	15	2,00	15	10,30	0	-	0	0,00	30	12,30	30	12,30		Dinas Lingkungan Hidup	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90	8,00	0	0,00													-		Dinas Lingkungan Hidup		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum																	-		Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	28,00	4	1.822,00	1	19,65	0	6,40	0	3,32	1	6,80	0	1,63	1	18,14	5	1.840,14		Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	52,00	12	4.684,00	12	80,18	3	5,53	3	18,71	3	19,44	3	36,35	12	80,03	24	4.764,03		Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-		Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	53,00	12	4.937,00	12	112,33	3	21,42	3	54,75	3	15,96	3	17,33	12	109,46	24	5.046,46		Dinas Lingkungan Hidup	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	138,00	1	13.002,00	12	141,13	3	36,73	3	39,88	3	22,73	3	41,05	12	140,39	13	13.142,39		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan barang milik daerah																	-		Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	97,00	12	8.145,00	13	122,83	1	21,11	1	28,66	11	40,61	0	27,15	13	117,54	25	8.262,54		Dinas Lingkungan Hidup	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	426,00	2	47.043,00	1	47,90	0	0,38	1	3,61	0	-	0	43,12	1	47,11	3	47.090,11		Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	275	823,00	50	24,70	67	24,79	26	3,95	24	6,15	10	14,45	7	0,00	67	24,55	117	49,25			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase peningkatan kajian lingkungan hidup	100	1.461,95	50	478,66	64,29	467,86	50	16,79	56,25	61,61	56,25	53,32	64,29	329,45	56,25	461,17	56,25	939,83	56,25	64,29	Dinas Lingkungan Hidup
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab./Kota yang disusun																	-				Dinas Lingkungan Hidup
		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	10	1.461,95	4	478,66	2	42,88	0	0,95	0	13,04	1	23,12	1	5,11	2	42,22	6	520,87			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota																		-				Dinas Lingkungan Hidup
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ kota yang disusun			0	0,00	2	424,98	0	15,84	0	48,57	1	30,20	1	324,34	2	418,95	2	418,95			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																						
			Presentase penigkatan pelayanan perijinan lingkungan hidup	100	1.799,16	100	2.126,78	100	1.408,14	100	174,80	100	290,12	100	663,56	100,00	273,58	100	1.402,05	100	3.528,83	100,00	196,14	Dinas Lingkungan Hidup
			presentase peningkatan Baku Mutu Lingkungan	66,67		35,29		59,57		14,18		38,22		38,22		54,33	38,22	38,22		38,22	-	57,33		Dinas Lingkungan Hidup
			Prosentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan	44,68		27,66		40,43		27,66		27,66		27,66		44,68	27,66	27,66		27,66	-	61,91		Dinas Lingkungan Hidup
			presentase penghapusan penggunaan merkuri pada kegiatan PESK	100		60		80		60		80		80		80	80,00	80		80	-	80,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut																	-				Dinas Lingkungan Hidup
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	421	1.015,80	7	1.769,96	92	305,11	0	71,56	6	97,32	0	31,51	86	103,47	92	303,86	99	2.073,82			Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	18	108,00	0	0,00													-				Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	56	519,00	2	356,82	18	629,76	0	101,05	6	134,13	0	223,69	12	167,87	18	626,74	20	983,55			Dinas Lingkungan Hidup
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan																	-				Dinas Lingkungan Hidup
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	6	20,00	0	0,00	6	375,32	0	2,06	0	58,42	0	311,17	6	2,24	6	373,89	6	373,89			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Propinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan																	-				Dinas Lingkungan Hidup
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	31,12	0	0,00	1	97,95	0	0,13	0	0,25	0	97,19	1	0,00	1	97,57	1	97,57			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup	1,4	1.322,69	2,8	514,00	2,8	160,69	0	0,50	1,36				3,40	139,95	0	152,70	0	666,70	0,00	50,40	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola																	-				Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	700	379,34	1675	514,00	700	160,69	0	0,50	0	1,36	0	10,89	700	139,95	700	152,70	2375	666,70			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan	52,13	131,47	53,38	42,28	53,03	36,99	14,98	2,39	33,08	10,10	43,13	12,67	56,84	10,67	33,08	35,84	33,08	78,12	63,46	59,42	Dinas Lingkungan Hidup
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			-			Dinas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	30	131,47	60	42,28	71	36,99	0	2,39		10,10	62	12,67	9	10,67	71	35,84	131	78,12			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	99,3	571,91	90,94	210,24	95,67	119,94	91,28	42,30	91,61	45,06	119,05	21,64	94,63	9,98	91,61	118,98	91,61	329,22	92,26	57,56	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			-			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	1,5	217,12	375	66,82	100	29,20	100	19,72	0	6,52	0	1,98	0	0,25	100	28,47	475	95,28			Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10	88,09	10	143,42	10	90,74	0	22,58	0	38,54	0	19,66	10	9,73	10	90,51	20	233,93			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	69,08	100	0,00	100	25,78	100	2,86	100	8,37	100	9,07	100,00	5,20	100	25,49	100	25,49	100,00	36,91	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani																		-			Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	24	69,08	0	0,00	18	25,78	4	2,86	4	8,37	5	9,07	5	5,20	18	25,49	18	25,49			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan Pengelolaan Persampahan	31,05	1.438,71	31,04	146,28	31,11	2.608,70	31,04	1,99	31,04	766,34	31,04	1.687,94	31,07	125,54	31,04	2.581,81	31,04	2.728,09	99,97	189,62	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali																		-			Dinas Lingkungan Hidup
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	76	651,71	0	0,00	9	2.519,21	0	1,99	0	766,34	0	1.686,03	9	38,58	9	2.492,95	9	2.492,95			Dinas Lingkungan Hidup
		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	5	529,00	0	0,00	1	89,50	0	-	0	-	0	1,91	1	86,95	1	88,86	1	88,86			Dinas Lingkungan Hidup
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	0	0,00	15	146,28												15	146,28			Dinas Lingkungan Hidup	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	96	82,00	0	0,00												0	-			Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	100	9.800,00	100	1.015,21	100	1.936,57	0	0,45	100	963,47	100	563,53	100	402,10	100	1.929,54	100	2.944,75	100,00	30,05	Dinas Lingkungan Hidup
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Grebeg samah																		-			Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai nilai luhur dalam masyarakat	12	561,56	5	1.015,21	1	1.936,57	0	0,45	0	963,47	0	563,53		402,10	0	1.929,54	5	2.944,75			Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	100	68,29	100	568,39	100	730,94		3,53		13,69		0,00	100	702,52	100	719,74	100	1.288,13	100,00	1.886,26	Dinas Lingkungan Hidup
		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kegiatan penyusunan KLHS																		-			Dinas Lingkungan Hidup
		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan Urusan Tata Ruang	0	0,00	0	568,39	2	495,94	0	3,53	0	10,15	0			476,55	0	490,23	0	1.058,62			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Kegiatan konservasi																		-			Dinas Lingkungan Hidup
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	1	68,29	0	0,00	1	235,00	0	-	0	3,54	0			225,97	0	229,51	0	229,51			Dinas Lingkungan Hidup
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																			-			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	16.686,51	100	119.495,09	100	4.342,09	34,65	1.308,72	61,56	734,02	91,67	808,42	100	1.011,22	100	3.803,36	100	123.298,45	100,00	738,91	Dinas Dukcapil
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-			Dinas Dukcapil
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	88,00	2	846,00	2	9,00	0	4,45	0	0,79	2	2,78	0	0,00	2	8,02	4	854,02			Dinas Dukcapil
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	44,00	21	644,00	21	7,00	8	3,28	4	2,98	5	0,30	4	0,00	21	6,56	42	650,56			Dinas Dukcapil
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																-		-			Dinas Dukcapil
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	48	13.193,60	12	2.728,21	13	3.296,85	3	1.177,51	3	435,87	3	617,50	4	609,45	13	2.840,33	25	5.568,54			Dinas Dukcapil
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	298,80	12	5.317,00	12	43,70	3	11,23	3	9,60	3	10,75	3	10,18	12	41,75	24	5.358,75			Dinas Dukcapil
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	48,00	14	7,38	14	8,00	4	0,86	3	4,83	4	1,84	3	0,00	14	7,53	28	14,91			Dinas Dukcapil
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		-			Dinas Dukcapil
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	196	190,00	5	4,50	5	4,50	0	-	5	-	0	4,50	0	0,00	5	4,50	10	9,00			Dinas Dukcapil
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																		-			Dinas Dukcapil
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	48	144,98	12	3.343,00	12	29,99	3	0,49	3	8,04	3	5,15	3	15,39	12	29,07	24	3.372,07			Dinas Dukcapil
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															0	-		-				Dinas Dukcapil
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			8	15.452,00	4	60,86	4	0,15	0	58,15	0	0,72	0	0,00	4	59,02	12	15.511,02			Dinas Dukcapil
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya			0	0,00	1						0			0,00	0		-				Dinas Dukcapil
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Dinas Dukcapil
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	-	36	10.114,00	12	133,53	3	27,60	3	35,13	3	33,35	3	28,02	12	124,10	48	10.238,10			Dinas Dukcapil

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	1.442,85	13	25.544,00	13	17,80	4	4,34	3	3,39	3	4,16	3	3,18	13	15,07	26	25.559,07			Dinas Dukcapil
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0	0,00	12	404,48	2	66,09	0	152,07	7	90,11	3	95,79	12	404,06	12	404,06			Dinas Dukcapil
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-				Dinas Dukcapil
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	12	45,00	9	6.519,00	7	64,38	2	7,63	1	17,33	3	22,10	1	16,80	7	63,87	16	6.582,87			Dinas Dukcapil
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	168,00	17	19.234,00	17	178,65	1	0,96	6	1,85	6	6,54	4	167,64	17	176,99	34	19.410,99			Dinas Dukcapil
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/rehabilitasi	340	7.033,92	5	3.828,00	5	22,50	8	4,13	10	3,99	6	8,62	0	5,75	24	22,49	29	3.850,49			Dinas Dukcapil
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (Rak)	17	208,00	0	0,00													-				Dinas Dukcapil
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-				Dinas Dukcapil
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	72,00	8	15.452,00	4	60,86							4	59,02			8	15.452,00			Dinas Dukcapil
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Prasarana Kerja	16	527,76	11	10.462,00													11	10.462,00			Dinas Dukcapil
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang disediakan (Tower SIAK)	1	248,00	0	0,00													0	-			Dinas Dukcapil
		Program Pendaftaran Penduduk	Presentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100	2.547,87	99,66	679,97	100	725,46	99,66	32,24	99,11	363,22	99,4	28,03	99,73	149,73	99,11	573,21	99,11	1.253,19	99,11	49,19	Dinas Dukcapil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		-			Dinas Dukcapil
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pedataan penduduk non permanen	4	118,87	1	23,86	7	24,00	1	-	2	11,36	1	12,39	3	0,00	7	23,75	8	47,61			Dinas Dukcapil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		3.663,61	72534	615,82	48000	686,46	19040	27,52	19559	347,98	19610	10,67	18528	148,92	76737	535,09	149271	1.150,91			Dinas Dukcapil
		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4,86	251,00	8206	40,29	2303	15,00	1895	4,72	2223	3,88	2332	4,97	1988	0,81	8438	14,38	16644	54,67			Dinas Dukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Presentase peningkatan pelayanan pencatatan sipil	97,21	972,44	99,58	225,20	99,75	185,21	99,58	35,47	99,63	16,21	99,7	40,06	99,74	74,15	99,63	165,89	99,63	391,09	102,49	40,22	Dinas Dukcapil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil																		-			Dinas Dukcapil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20000	460,00	6276	70,15	5000	69,21	1329	13,37	1598	3,25	1519	14,48	1278	27,16	5724	58,26	12000	128,41			Dinas Dukcapil
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditindaklanjuti	24000	430,00	5688	53,27	6000	66,01	1452	12,64	1795	2,70	2132	4,40	1758	39,59	7137	59,33	12825	112,60			Dinas Dukcapil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																	-	-			Dinas Dukcapil
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	600	832,00	161	101,78	135	50,00	27	9,46	44	10,26	39	21,19	36	7,39	146	48,30	307	150,08			Dinas Dukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	2.632,77	100	112,33	100	129,01	100	17,05	45,59	33,11	63,24	28,91	100,00	46,49	45,59	112,00	45,59	224,33	45,59	8,52	Dinas Dukcapil
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																	-				Dinas Dukcapil
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cetak Data Agregat Kependudukan	12	336,00	182	39,70	2	40,00	0	7,74	0	14,58	1	9,25	1	8,26	2	39,84	184	79,53			Dinas Dukcapil
			Jilid Dokumen Kependudukan	350		0	0,00														-			Dinas Dukcapil
			Entri Data Kependudukan	22200		0	0,00														-			Dinas Dukcapil
			Scan register akta kelahiran	24000		0	0,00														-			Dinas Dukcapil
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		-			Dinas Dukcapil

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan			281	14,92	3	14,00		0	4,07	0	0,98	2	3,29	1	5,21	3	13,56	284	28,48			Dinas Dukcapil
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan			4	23,41	3	27,00		1	2,56	1	8,12	0	8,24	1	7,52	3	26,44	7	49,85			Dinas Dukcapil
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media luar ruang/elektronik	12	370,00	0	0,00														-			Dinas Dukcapil	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui media pertemuan	20		0	0,00														-			Dinas Dukcapil	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi PIAK melalui pameran	4		0	0,00														-			Dinas Dukcapil	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	3	27,00	281	14,92	3	14,00			0	-			3	13,56			281	14,92			Dinas Dukcapil	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Lembaga Lain	1		0	0,00														-			Dinas Dukcapil	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		-			Dinas Dukcapil	
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	12	195,00	2	19,38	2	34,01		0	2,68	1	9,43	0	8,12	1	11,94	2	32,17	4	51,55			Dinas Dukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi Profil Kependudukan	100	310,73	100	34,28	100	32,00			0,59		2,30	66,67	23,33	100,00	4,66	0	30,88	0	65,16	0,00	20,97	Dinas Dukcapil
		Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan																		-			Dinas Dukcapil	
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			1	34,28	1	32,00		0	0,59	1	2,30	0	23,33	0	4,66	1	30,88	2	65,16			Dinas Dukcapil
			Laporan Perkembangan Kependudukan semester dan tahunan	12	310,73	0	0,00														-			Dinas Dukcapil	
			Laporan Profil Perkembangan Penduduk	4		0	0,00														-			Dinas Dukcapil	
						0	0,00																		
		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																							
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	13.395,89	100	304.855,36	100	3.390,14		34,65	1.139,11	61,56	661,94	91,67	688,93	100	788,33	100	3.266,17	100	308.121,53	100,00	2.300,12	DPMD Dalduk & KB
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-			DPMD Dalduk & KB	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	26,97	2	499,00	2	3,31		0	0,97	0	-	2	0,60	0	1,48	2	3,06	4	502,06			DPMD Dalduk & KB
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	47,47	12	1.081,00	12	6,70		3	0,41	3	0,30	3	2,93	3	2,66	12	6,30	24	1.087,30			DPMD Dalduk & KB
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			-			DPMD Dalduk & KB	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	149	13.180,24	12	250.135,00	13	2.787,22		3	1.055,73	3	532,89	3	548,58	4	570,10	13	2.707,30	25	252.842,30			DPMD Dalduk & KB
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	320,79	12	5.928,00	12	55,45		3	1,60	3	13,43	3	12,97	3	24,83	12	52,83	24	5.980,83			DPMD Dalduk & KB
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	23,42	2	8,36	2	9,88		0	1,16	1	-	0	1,16	1	5,42	2	7,75	4	16,11			DPMD Dalduk & KB
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			-			DPMD Dalduk & KB	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	129,41	12	2.774,00	12	27,98		3	0,17	3	6,49	3	8,53	3	7,21	12	22,39	24	2.796,39			DPMD Dalduk & KB
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			DPMD Dalduk & KB	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-	-	12	10.035,00	12	122,05		3	29,12	3	17,44	3	31,60	3	31,93	12	110,08	24	10.145,08			DPMD Dalduk & KB
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48	952,75	12	1.749,00	12	20,61		3	5,54	3	0,30	3	0,55	3	11,74	12	18,13	24	1.767,13			DPMD Dalduk & KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	12	17.557,00	12	188,35	3	29,48	3	55,34	3	44,07	3	58,62	12	187,51	24	17.744,51			DPMD Daiduk & KB
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-				DPMD Daiduk & KB
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	282	664,98	72	13.958,00	69	134,54	4	9,28	36	33,80	10	35,03	19	53,05	69	131,16	141	14.089,16			DPMD Daiduk & KB
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			0	0,00	1	14,00	0	-	0		0	-		12,14	0		-				DPMD Daiduk & KB
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	148	-	57	1.131,00	12	20,06	5	5,65	1	1,95	3	2,91	3	9,16	12	19,66	69	1.150,66			DPMD Daiduk & KB
		Program Administrasi Pemerintahan Desa																						
			Presentase penguatan kelembagaan desa	76,43	9.144,95	74,67	2.024,89	75,02	2.319,14	47,09	454,96	55,87	704,09	0,6736	355,28	75,13	513,62	55,87	2.027,95	55,87	4.052,84	73,10	44,32	DPMD Daiduk & KB
			Presentase peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	89,62		87,26		89,89		49,76		62,02				89,27	62,02		62,02	-	69,20			DPMD Daiduk & KB
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																						DPMD Daiduk & KB
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	348	285,20	87	51,89	87	34,12	0	1,65	0	10,16	0	0,00	87	21,01	87	32,82	174	84,72			DPMD Daiduk & KB
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	348	219,60	87	19,71	87	19,55	0	2,28	0	1,35	0	2,78	87	12,53	87	18,94	174	38,65			DPMD Daiduk & KB
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	348	6.732,40	87	1.590,74	87	1.945,08	0	418,45	0	598,27	0	275,22	87	416,65	87	1.708,59	174	3.299,33			DPMD Daiduk & KB
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	348	411,80	87	68,05	87	55,05	28	9,99	14	6,07	28	13,44	17	7,74	87	37,24	174	105,29			DPMD Daiduk & KB
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	160	324,60	40	51,90	4	32,89	1	4,64	1	11,61	1	11,28	1	1,27	4	28,80	44	80,70			DPMD Daiduk & KB
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	8	571,90	2	121,47	1	108,66	0	9,28	0	19,30	0	9,09	1	53,23	1	90,89	3	212,36			DPMD Daiduk & KB
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	348	179,80	87	40,99	87	35,11	0	2,81	0	-	87	22,84	0	0,00	87	25,65	174	66,64			DPMD Daiduk & KB
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	52	367,90	13	80,13	13	88,68	0	5,86	13	57,33	0	20,64	0	1,18	13	85,01	26	165,15			DPMD Daiduk & KB
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	74,71	4.528,59	100	2.940,97	100	1.156,62	100	391,37	100	235,64	100	267,12	100	249,00	100	1.143,13	100	4.084,11	133,85	90,18	DPMD Daiduk & KB
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																		-				DPMD Daiduk & KB
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	396,37	3	1.247,19	3	298,59	1	205,36	0	3,94	2	76,39	0	8,06	3	293,75	6	1.540,94			DPMD Daiduk & KB
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	64	3.210,82	16	1.693,78	16	858,03	1	186,01	13	231,70	1	190,73	1	240,94	16	849,38	32	2.543,16			DPMD Daiduk & KB
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaann Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0	910,00	0	0,00	-	-		-						0	-	0	-				DPMD Daiduk & KB
		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		0				-	-		-									-				DPMD Daiduk & KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Program Pengendalian Penduduk																							
			Indeks laju pertumbuhan penduduk	1	212,32	0,61	290,81	0,9	288,73		0,61	20,33	0,7	100,75	0,7	58,91	0,7	103,15	0,7	283,14	0,7	573,95	70,00	270,32	DPMD Daiduk & KB
			Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate(TFR)	2,1		1,48		1,9		1,48		1,27		1,27	1,27	1,27	1,27		1,27		-	60,48		DPMD Daiduk & KB	
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate(ASFR)	3,29		4,53		3,65		4,53		2,97		2,97		2,97	2,97		2,97		-	90,27		DPMD Daiduk & KB	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			-			DPMD Daiduk & KB	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	4	73,50	2	118,63	1	134,85		0	4,70	0	51,06	0	25,37	1	50,03	1	131,16	3	249,79			DPMD Daiduk & KB
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	-	-	1	71,99	1	115,20		0	9,60	0	38,38	0	25,19	1	41,98	1	115,15	2	187,15			DPMD Daiduk & KB
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan program Bangsa Kencana	-	-	12	36,24	12	38,68		3	6,03	3	11,31	3	8,35	3	11,14	12	36,83	24	73,06			DPMD Daiduk & KB
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lapoan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	1	63,95														63,95			DPMD Daiduk & KB	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)																							
			Persentase Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	51,18	20.713,72	55,96	3.582,93	56,25	3.512,87		56,59	406,06	54,05	1.036,69	0,5482	1.141,99	56,47	893,72	54,05	3.478,46	54,05	7.061,39	105,61	34,09	DPMD Daiduk & KB
			Persentase Advokasi dan IKE Program KKBPK	51,4		55,9		68,89		57,24		46,41		0,5882		69,32	5882,00%	46,41		46,41	-	90,29		DPMD Daiduk & KB	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal																			-			DPMD Daiduk & KB	
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-	1	79,72	1	140,00		0	15,85	0	38,26	0	50,87	1	34,67	1	139,65	2	219,36			DPMD Daiduk & KB
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	-	1	576,49	1	509,80		0	68,80	0	137,63	0	112,47	1	188,83	1	507,74	2	1.084,23			DPMD Daiduk & KB
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	1	155,88	1	177,60		0	-	0	-	0	106,52	1	70,99	1	177,51	2	333,39			DPMD Daiduk & KB
		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	-	1	149,43	1	150,00		0	-	0	-	0	62,90	1	85,50	1	148,40	2	297,83			DPMD Daiduk & KB
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	6	161,89	1	449,44		0	27,92	0	96,56	0	237,73	1	78,15	1	440,36	7	602,25			DPMD Daiduk & KB
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Avokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	24	4.669,42	0	0,00														-			DPMD Daiduk & KB	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKP/PPL KB)																			-			DPMD Daiduk & KB	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	-	-	88	176,00	176	264,00		51	52,80	53	79,20	54	52,80	18	79,20	176	264,00	264	440,00			DPMD Daiduk & KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan Kader IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	6	161,89													161,89				DPMD Daiduk & KB
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																		-				DPMD Daiduk & KB
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	1	37,80	1	42,33	0	4,17	0	11,65	0	4,77	1	17,27	1	37,86	2	75,66			DPMD Daiduk & KB
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	3379	1.528,22	3394	1.206,74	1137	186,55	947	453,60	1186	357,12	124	199,41	3394	1.196,68	6773	2.724,90			DPMD Daiduk & KB
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	48	218,08	12	44,55	1	41,75	0	8,75	0	10,25	0	10,85	1	11,53	1	41,39	13	85,94			DPMD Daiduk & KB
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	15.780,05	1	81,91	1	112,87	0	8,78	0	22,46	0	48,13	1	28,01	1	107,38	2	189,28			DPMD Daiduk & KB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		-				DPMD Daiduk & KB
		Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	8	46,08	2	18,39	1	6,40	1	-	0	-	0	3,48	0	2,85	1	6,33	3	24,72			DPMD Daiduk & KB
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	-	-	1	8,96	1	3,77	0	-	0	-	0	3,77	1	0,00	1	3,77	2	12,71			DPMD Daiduk & KB
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	-	-	26	401,82	88	408,17	0	32,44	0	187,08	0	90,57	88	97,31	88	407,41	114	809,23			DPMD Daiduk & KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	28,73	439,10	23,73	1.792,53	28,23	1.874,12	24,08	146,38	24,05	576,57	0,2466	403,01	30,36	747,37	24,05	1.873,33	24,05	3.665,87	83,71	834,86	DPMD Daiduk & KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																		-				DPMD Daiduk & KB
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia serta pengelolaan keuangan keluarga)	4	703,49	1	41,84	1	80,55	0	-	1	-	0	80,21	0	0,00	1	80,21	2	122,05			DPMD Daiduk & KB
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	703,49	1	56,30	4	50,87	1	4,86	3	10,48	0	25,73	0	9,72	4	50,79	5	107,10			DPMD Daiduk & KB

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	-	20	251,69	25	300,00	0	-	0	-	25	0,45	0	299,51	25	299,96	45	551,65			DPMD Daiduk & KB
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS sebanyak 16 orang	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Lesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS sebanyak 16 orang			10	1.442,70														1.442,70			DPMD Daiduk & KB
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																		0	-			DPMD Daiduk & KB
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0	0,00	0	0,00	88	687,00	27	65,95	27	263,81	26	145,48	8	211,43	88	686,67	88	686,67			DPMD Daiduk & KB
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	0	0,00	0	0,00	88	755,70	27	75,57	27	302,28	26	151,14	8	226,71	88	755,70	88	755,70			DPMD Daiduk & KB
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase penatausahaan tanah kasutanan dan tanah kadipaten	65,52	1.875,00	25,29	296,54	42,53	382,72	25,29	0,00	25,29	0,00	0,2529	91,42	37,93	286,59	37,93	378,01	37,93	674,55	57,89	35,98	DPMD Daiduk & KB
		Pengelolaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten																		-				DPMD Daiduk & KB
		Penatausahaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasutanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	0	0,00	0	296,54	1	382,72	0	-	0	-	0	91,42	1	286,59	1	378,01	1	674,55			DPMD Daiduk & KB
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kalurahan yang menerapkan kelembagaan asli	91,67	4.984,41	66,67	1.117,58	59,48	1.285,22	50	254,27	50	252,84	0,5833	485,63	58,33	284,12	58,33	1.276,85	58,33	2.394,43	63,63	48,04	DPMD Daiduk & KB
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																		-				DPMD Daiduk & KB
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	54	0,00	18	1.117,58	2	1.285,22	0	254,27	0	252,84	0	485,63	2	284,12	2	1.276,85	20	2.394,43			DPMD Daiduk & KB
		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							-		-							0	-	0	-			
	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	32.798,26	100	11.039,43	100	10.341,76	34,65	2.718,57	61,56	2.149,99	91,67	2.305,45	100	2.457,92	100	9.605,87	100	20.645,30	100,00	62,95	Dinas Perhubungan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		-				Dinas Perhubungan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024	8	55,69	2	11,87	2	8,85	0	2,91	0	1,19	1	4,71	1	0,00	2	8,81	4	20,68			Dinas Perhubungan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja, LKJP, Laporan Tahunan	72	94,49	16	20,16	18	12,21	6	5,72	4	2,54	4	1,69	4	2,12	18	12,07	34	32,23			Dinas Perhubungan
			LKJP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja , penerapan SPIP Perangkat Daerah	-	-															-				Dinas Perhubungan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		-				Dinas Perhubungan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	48	13.876,66	12	3.237,17	13	3.515,06	3	1.240,88	3	542,52	3	663,24	4	667,88	13	3.114,51	25	6.351,68			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	324,17	1	1.428,04	2	70,00	0	18,35	1	17,43	0	16,75	1	16,75	2	69,29	3	1.497,33			Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	77,37	2	69,71	14	15,13	3	4,02	4	3,07	7	2,47	0	4,35	14	13,91	16	83,62			Dinas Perhubungan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						Dinas Perhubungan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	20	9,28	5	1,99	5	1,98	5	-	0	-	0	1,05	0	0,86	5	1,91	10	3,90			Dinas Perhubungan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						Dinas Perhubungan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	4	129,82	1	30,35	0	11,65	0	9,88	0	-	0,00	0	21,53	4	151,35				Dinas Perhubungan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	221,72	12	50,74	12	49,62	3	7,03	3	13,37	3	15,02	3	12,24	12	47,67	24	98,41			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0,00	0	0,00	4	5.798,16	0	1.318,11	0	1.369,92	0	1.415,99	4	1.395,18	4	5.499,20	4	5.499,20			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	602,44	2	146,26	2	155,01	0	45,26	0	36,24	0	36,24	2	36,24	2	153,98	4	300,24			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	123,28	1	27,13						-		26,05						27,13			Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	48	17.317,18	0	0,00	36	363,34	4	51,23	11	147,46	7	54,32	14	92,12	36	345,13	36	345,13			Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi	0	0,00	77	5.916,53	30	322,04	7	13,41	8	6,37	9	67,91	6	230,17	30	317,86	107	6.234,39			Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA)																						
			Presentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	81,67	13.757,70	80,42	22.385,69	86,75	6.474,34	85,08	556,06	88,08	1.542,59	89,42	3.488,68	89,42	690,36	88,08	6.277,69	88,08	28.663,38	107,85	208,34	Dinas Perhubungan
			Presentase Tertib Lalu Lintas Jalan	69,77		50,46		54,48		22,33		34,75		49,65		61,89	49,65	34,75		34,75	-	49,81		Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin tikungan																		-			Dinas Perhubungan
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	0	0,00	116	1.755,86	201	3.122,29	0	5,30	0	96,79	201	3.013,36	0	0,66	201	3.116,11	317	4.871,97			Dinas Perhubungan
			Terbangunnya LPJU (titik)	-	2.102,60	0	0,00														-			Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/ Kota yang Tersedia	0	0,00	0	0,00	59	529,77	0	35,22	45	334,80	0	7,86	14	25,76	59	403,64	59	403,64			Dinas Perhubungan
			Tersediarnya Rambu Petunjuk Parkir	-	1.992,00	0	0,00													0	-			Dinas Perhubungan
			Tersediarnya Cermin Tikungan	-		0	0,00														-			Dinas Perhubungan
			Tersediarnya Rambu Lalu Lintas	-		0	0,00														-			Dinas Perhubungan
			Guardrail			0	0,00														-			Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	0	0,00	1	336,13	3548	358,61	934	36,00	820	232,56	993	39,69	997	43,72	3744	351,97	3745	688,10			Dinas Perhubungan
			Bahan/material LPJU	4	1.388,26	0	0,00														-			Dinas Perhubungan
			Lampu LED 90 watt 14 unit	40		0	0,00														-			Dinas Perhubungan
			Pengantian box KWH meter	28		0	0,00														-			Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	0,00	0	529,79	212	217,90	60	18,94	82	161,42	50	15,97	20	17,32	212	213,65	212	743,44			Dinas Perhubungan
			Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	4	865,00	0	0,00														-			Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya APIL	-		0	0,00														-			Dinas Perhubungan
			Warning Lamp	-		0	0,00														-			Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rambu	-		0	0,00														-			Dinas Perhubungan
			Terehabilitasi dan Terpeliharanya Cermin Tikungan	-		0	0,00														-			Dinas Perhubungan
		Pengelolaan Terminal Penunjang Tipe C																		0	-			Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20	1.255,00	1	471,25	4	327,48	0	98,01	4	84,56	0	74,68	0	69,90	4	327,15	5	798,40			Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV											
			Rehab Ruang Tunggu dan Pos TPR Terminal Kenteng, Nagonulan	-	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																		-				Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1.242,00	4	304,01	4	429,96	0	98,05	0	75,16	1	75,25	3	178,11	4	426,57	8	730,58			Dinas Perhubungan
			Papan Informasi tarif parkir 5 buah	20		0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Kendaraan parkir	-		0	0,00													-				Dinas Perhubungan
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		-				Dinas Perhubungan
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (4.265 Unit)= 8530 kwhu diuji	-	1.225,00	8525	185,86	8530	250,74	1740	69,77	725	133,19	2078	17,36	937	22,15	5480	242,47	14005	428,33			Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4	334,19	12	123,89	21	82,59	2	-	0	7,65	0	0,00	19	73,76	21	81,41	33	205,30			Dinas Perhubungan
			Kalibrasi Alat PKB	4	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	0	-				Dinas Perhubungan
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Kegiatan Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas	-	1.039,75	0	0,00	5	301,75	0	41,51	0	113,22	0	32,84	5	107,46	5	295,03	5	295,03			Dinas Perhubungan
			Sosialisasi Etika Bertalu Lintas	96	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Pengawasan Angkutan Tambang dan Patroli Kewilayahan	120	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Pengendalian Hari Besar	12	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	1.414,48	6	657,81	5	487,18	0	109,37	0	179,12	0	90,26	5	104,85	5	483,59	11	1.141,41			Dinas Perhubungan
			Koordinasi permasalahan LLAJ	4	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	4	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Sosialisasi Etika Bertalu Lintas	320	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Pengaturan persimpangan sebidang	48	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Survey lalu lintas	4	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Kajian studi evaluasi kinerja jalan dan simpang	4	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota																	0	-				Dinas Perhubungan
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-	-	0	0,00	2	21,40	0	3,59	0	6,72	0	5,47	2	5,50	2	21,28	2	21,28			Dinas Perhubungan
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola A	Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	4	72,15	1	16,12														16,12			Dinas Perhubungan
			Rekomendasi Andalalin	4	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Andalalin	4	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Survey Lalu Lintas	4	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	0	-				Dinas Perhubungan
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	827,17	3	545,45	3	344,68	0	40,30	1	117,40	0	115,93	2	41,18	3	314,81	6	860,26			Dinas Perhubungan
			Data load factor angkutan darat	4	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
			Operasional bus sekolah	8	-	0	0,00													-				Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		0	7.306,03	100	8.729,76	0	-	-					0		0	-	0	8.729,76				Dinas Perhubungan
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																		-				Dinas Perhubungan
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Cermin Lalu Lintas	114	7.306,03	1	8.729,76												1	8.729,76				Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
										I	II	III	IV											
			Rambu Pendahulu Perunjuk Jurusan	43		0	0,00												-			Dinas Perhubungan		
			Rambu Lalu Lintas	250		0	0,00												-			Dinas Perhubungan		
			Pagar Pengaman Jalan/Guardrail	2076		0	0,00												-			Dinas Perhubungan		
		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika																	-					
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	16.371,97	100	3.280,69	100	3.234,04	34,65	839,07	61,56	796,65	91,67	756,42	100	678,63	100	3.070,77	100	6.351,46	100,00	38,79	Diskominfo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	-				Diskominfo	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2	7,70	2	6,21	0	1,45	1	1,54	0	1,42	1	1,58	2	6,00	2	13,70			Diskominfo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			21	6,93	21	5,83	6	1,30	5	2,01	4	1,66	6	0,72	21	5,70	21	12,63			Diskominfo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																-				Diskominfo	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	56	14.205,61	12	2.480,92	13	2.803,14	3	780,06	3	714,90	3	599,03	4	571,73	13	2.665,72	13	5.146,64			Diskominfo
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	222,81	12	52,22	12	48,07	3	11,40	3	12,96	3	12,24	3	10,13	12	46,72	12	98,94			Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	28,00	14	7,79	14	7,00	4	1,87	3	1,85	3	0,53	4	2,46	14	6,70	14	14,49			Diskominfo
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																-				Diskominfo	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4	9,54	1	2,17	1	2,25	0	1,18	0	0,16	0	0,20	1	0,53	1	2,06	1	4,23			Diskominfo
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	97,97	7	23,05	7	21,30	0	-	7	0,21	0	21,09	0	0,00	7	21,30	7	44,35			Diskominfo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																0	-				Diskominfo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0	0,00	0	0,00	1	26,02	0	6,66	0	4,23	0	7,58	1	6,25	1	24,72	1	24,72			Diskominfo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	330,51	10	61,62	1	53,22	0	9,56	0	5,32	0	10,84	1	16,48	1	42,20	1	103,82			Diskominfo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																-				Diskominfo	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0	0,00	12	238,08	12	24,72	3		3	4,39	3	8,52	3	4,86	12	17,77	12	255,85			Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	92	496,16	1	94,37	1	98,99	0	4,51	0	22,86	0	48,31	1	22,65	1	98,33	1	192,70			Diskominfo
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	112,84	1	25,84										0	-	0	25,84			Diskominfo	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang																-				Diskominfo	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	0	0,00	0	0,00	16	100,82	5	17,21	3	22,96	4	26,96	4	32,53	16	99,66	16	99,66			Diskominfo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0,00	0	0,00	1	10,99	0	-	0	-	1	10,98	0	0,00	1	10,98	1	10,98			Diskominfo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12	668,31	36	271,23	32	25,48	6	3,87	10	3	9	7,06	7	8,71	32	22,90	32	294,13			Diskominfo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																-				Diskominfo	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor aau bangunan lainya yang disediakan	16	117,50	4	8,77				-	-							8,77				Diskominfo	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KNERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi	90,84	2.497,15	98,81	668,07	100	694,40		98,81	188,40	98,81	93,51	98,81	184,10	91,67	199,47	98,81	665,48	98,81	1.333,55	108,77	53,40	Diskominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyebarluasan informasi daerah																		-			Diskominfo	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	24	916,03	18	215,76	7	252,59		0	20,44	1	45,18	2	86,18	4	84,93	7	236,73	7	452,49			Diskominfo
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam medesiminasikan informasi program atau kebijakan	96	1.581,13	18	452,31	24	441,81		6	167,96	6	48,33	6	97,91	6	114,54	18	428,75	18	881,06			Diskominfo
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase layanan TIK dan integrasi layanan secara elektronik	90,18	14.376,25	70	6.499,66	74,82	5.224,20		70	1.304,18	70,33	1.100,13	70,33	1.700,95	71,97	1.008,24	70,33	5.113,50	70,33	11.613,16	77,99	80,78	Diskominfo
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Infrastruktur TIK																		-			Diskominfo	
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4	12.340,47	1	5.926,66	4	4.990,37		0	1.284,33	0	1.089,90	0	1.616,70	4	924,98	4	4.915,91	4	10.842,57			Diskominfo
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	16	1.551,64	5	443,34	2	205,22		0	17,97	0	9,72	1	75,04	1	71,40	2	174,12	2	617,46			Diskominfo
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8	483,14	2	129,66	1	28,61		0	1,88	0	0,51	0	9,22	1	11,86	1	23,47	1	153,13			Diskominfo
		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	-						-			-									-			Diskominfo	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase data sektoral yang dipublikasikan	100	1.274,18	100	296,12	100	232,82		33,72	37,81	52,89	31,82	83,14	97,22	100,00	58,35	52,89	225,21	52,89	521,33	52,89	40,91	Diskominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang dipublikasi																		-			Diskominfo	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	24	1.274,18	4	296,12	3	232,82		0	37,81	0	31,82	1	97,22	2	58,35	3	225,21	3	521,33			Diskominfo
		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	-																		-			Diskominfo	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase SIM dan ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan	64,36	91,12	49,17	342,96	50,84	275,70		50,84	32,09	51,09	24,69	52,73	167,33	54,71	46,66	51,09	270,77	51,09	613,73	79,38	673,54	Diskominfo
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-																		-			Diskominfo	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	-	2	318,93	2	253,24		0	29,82	0	22,74	0	157,25	2	40,09	2	249,90	2	568,83			Diskominfo
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ruangan Pemerintah Daerah yang diamankan																		-			Diskominfo	
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	168	38,46	42	24,03	42	22,46		10	2,27	10	1,95	10	10,07	12	6,58	42	20,87	42	44,90			Diskominfo
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100	9.098,96	0	-	100	800,00		-			-		2,63	100	794,39	100	797,02	100	797,02	100,00	8,76	Diskominfo
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																			-			Diskominfo	
		Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital		-	-	0	0,00	1	800,00		-	0		-		2,63	1	794,39	1	797,02	1	797,02			Diskominfo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I				II		III									IV
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan		100	9.098,96	0	-	100	1.141,34			-	-		-	100	1.086,63	100	1.086,63	100	1.086,63	100,00	11,94	Diskominfo	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																		-				Diskominfo	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Database Sosial Ekonomi Kanawewon	-	-	0	0,00	2	1.141,34			-	0	-		-	2	1.086,63	2	1.086,63	2	1.086,63			Diskominfo
		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							-			-								-					
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	9.098,96	100	2.448,31	100	12.804,81	34,65	642,45	61,56	628,31	91,67	2.296,01	100	6.894,27	100	10.461,04	100	12.909,35	100,00	141,88	DiskopUMKM	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	-				DiskopUMKM	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	152,00	2	37,86	2	15,98	0	11,11	0	1,84	2	1,78	0	1,00	2	15,73	2	53,59			DiskopUMKM	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	51,72	21	12,34	21	7,45	8	2,05	4	2,11	5	1,43	4	1,58	21	7,17	21	19,51			DiskopUMKM	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																	-				DiskopUMKM	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1296	7.464,71	12	1.769,27	13	2.296,03	3	558,12	3	548,81	3	425,97	4	441,68	13	1.974,57	13	3.743,84			DiskopUMKM	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	155,30	12	37,42	12	36,90	3	8,78	3	9,23	3	9,22	3	9,23	12	36,45	12	73,87			DiskopUMKM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	76	52,81	19	12,62	19	9,35	3	2,30	4	2,25	5	2,07	7	2,40	19	9,02	19	21,64			DiskopUMKM	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	-				DiskopUMKM	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	67,06	5	16,03	5	16,16	0	3,70	0	3,07	0	3,38	5	3,76	5	13,91	5	29,94			DiskopUMKM	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	156,18	12	47,87	12	34,13	3	6,84	3	7,67	3	2,36	3	15,67	12	32,54	12	80,41			DiskopUMKM	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																	-				DiskopUMKM	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	157,51	12	38,26	12	59,90	3	12,26	3	10,12	3	10,14	3	11,01	12	43,53	12	81,79			DiskopUMKM	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	-	12	86,19	12	93,48	3	28,35	3	21,70	3	21,50	3	21,50	12	93,05	12	179,24			DiskopUMKM	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																	-				DiskopUMKM	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	64	235,09	16	56,05	16	61,32	4	7,50	4	10,90	4	17,27	4	23,87	16	59,54	16	115,59			DiskopUMKM	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	123	155,12	21	222,40	33	17,22	2	1,44	18	5,37	6	4,24	7	5,88	33	16,94	33	239,3352			DiskopUMKM	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25,76	0	0,00													-				DiskopUMKM	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																	-				DiskopUMKM	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0,00	1	6.725,57	0	-	0	2,57	0	1.395,10	1	3.426,26	1	4.823,93	1	4.823,93			DiskopUMKM	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	55,26	9	112,00	1045	3.431,31	0	-	0	2,67	122	401,56	923	2.930,44	1045	3.334,67	1045	3446,66972			DiskopUMKM	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67,52	1.512,75	60,35	75,57	63,93	20,00	56,03	2,38	55,07	3,79	56,12	7,04	54,76	5,84	55,07	19,06	55,07	94,62	81,56	6,26	DiskopUMKM	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi																-			DiskopUMKM		
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				0	0,00	108	12,00	0	1,03	54	3,13	54	4,50	0	2,62	108	11,28	108	11,28		DiskopUMKM	
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				0	0,00	5	8,00	2	1,35	0	0,66	1	2,54	2	3,23	5	7,78	5	7,78		DiskopUMKM	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan PengawasanKekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	463	903,87	136	40,91												40,91			DiskopUMKM		
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	52	608,88	13	34,65												34,65			DiskopUMKM		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan pendidikan dan latihan koperasi	98,46	800,00	93,15	552,88	96,19	354,35	0	15,96	0	129,87	98,78	41,47	95,54	160,65	0	347,95	0	900,83	0,00	112,60	DiskopUMKM
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi																-			DiskopUMKM		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		2260	1.634,75	585	325,32	212	354,35	0	15,96	52	129,87	130	41,47	30	160,65	212	347,95	212	673,27		DiskopUMKM	
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi																-			DiskopUMKM		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami UKM	540	782,05	135	227,56											0	227,56			DiskopUMKM		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	5,67	457,27	30,84	1.364,01	5,94	2.115,87	0	38,88	0,94	784,08	0,94	670,50	9,23	614,24	0,94	2.107,69	0,94	3.421,67	16,58	748,28	DiskopUMKM
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kewenangan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)																-			DiskopUMKM		
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	480	109,33	170	870,24	1176	1.778,81	239	15,91	198	738,80	159	522,80	580	500,10	1176	1.777,60	1176	2.647,84		DiskopUMKM	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	672	258,60	186	216,18	15	25,00	0	-	0		0	0,63	15	24,09	15	24,72	15	240,90		DiskopUMKM	
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	-	-	0	0,00	100	14,83	20	10,81	32	2,59	24	0,56	24	0,22	100	14,19	100	14,19		DiskopUMKM	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	-	-	135	227,56	110	297,23	0	12,16	50	42,69	30	146,51	30	89,83	110	291,19	110	518,75		DiskopUMKM	
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39	89,34	39000	50,03															DiskopUMKM		
			Profil KUMKM	35	-	0	0,00												-			DiskopUMKM		
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	2,39	801,13	1,67	417,66	1,79	76,38	0,33	1,90	0,33	5,72	0,33	61,04	2	0,33	0,33	68,99	0,33	486,65	13,81	60,74	DiskopUMKM
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan UMKM																-			DiskopUMKM		
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang	1000	801,13	0	0,00	150	76,38	50	1,90	75	5,72	25	61,04	0	0,00	150	68,66	150	68,66		DiskopUMKM	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1000	801.13	446	417.66												417,66				DiskopUMKM	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya	100	886,37	100	220,58	100	219,45		3,57		54,62		157,03	100		100	215,22	100	435,80	100,00	49,17	DiskopUMKM
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																-				DiskopUMKM	
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Industri Kreatif	460	886,36	115	220,58	225	219,45	0	3,57	25	54,62	200	157,03	0	1,40	225	216,62	225	437,20			DiskopUMKM
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	-					
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	10.960,42	100	702.785,63	100	2.785,29	34,65	674,93	61,56	729,06	91,67	634,09	100	617,02	100	2.655,10	100	705.440,73	100,00	6.436,26	DPMTSP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat waktu																-				DPMTSP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	149,34	2	36,36	2	15,05	0	11,38	1	1,88	1	1,23	0	0,45	2	14,94	2	51,30			DPMTSP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	23,83	21	5,61	21	4,60	6	1,48	4	0,90	5	1,43	6	0,75	21	4,56	21	10,17			DPMTSP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																-				DPMTSP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	116	7.922,12	12	1.774,21	13	1.966,53	3	480,77	3	562,36	3	394,75	4	410,32	13	1.848,20	13	3.622,41			DPMTSP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	205,92	12	48,34	12	47,70	3	11,70	3	11,25	3	11,25	3	11,93	12	46,13	12	94,47			DPMTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	16,69	19	3,86	14	4,52	3	1,39	4	1,35	4	-	3	1,69	14	4,43	14	8,29			DPMTSP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																-				DPMTSP	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	105,94	5	24,05	5	25,89	2	10,55	2	6,26	1	7,08	0	0,00	5	23,89	5	47,94			DPMTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	267,61	12	68,06	12	80,50	3	18,31	3	10,18	3	52,01	3	0,00	12	80,50	12	148,56			DPMTSP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																-				DPMTSP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	367,60	12	105,57	12	145,06	3	35,14	3	31,37	3	33,71	3	39,89	12	140,11	12	245,68			DPMTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	960,26	12	228,28	12	244,74	3	74,55	3	56,41	3	56,41	3	56,41	12	243,77	12	472,05			DPMTSP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																-				DPMTSP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	64	336,64	16	99,62	16	99,40	6	20,68	4	27,62	3	33,85	3	16,58	16	98,73	16	198,35			DPMTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	364	149,76	35	40,20	91	60,60	16	8,98	30	19,48	20	-	25	31,30	91	59,76	91	99,96			DPMTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di pelihara	4	210,18	1	700.000,00	1	52,90					0	42,37		10,00	0	52,38		700.052,38			DPMTSP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																-				DPMTSP	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	29	180,82	47	351,47	1	37,79					0			37,70	0			351,47			DPMTSP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																-				DPMTSP	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	63,82	0	0,00												-				DPMTSP	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										I		II		III		IV										
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	1.679,57	100	319,72	100	127,44	16,67	8,18	41,67	14,15	100		100,00	100,00	41,67	122,33	41,67	442,05	41,67	26,32	DPMPTSP		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-																	-				DPMPTSP		
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4	1.076,16	1	159,86	1	127,44	0	8,18	0	14,15	1	103,17	0	0,66	1	126,16	1	286,02				DPMPTSP	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4	1.076,16	1	159,86												0	159,86					DPMPTSP	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	221,41	0	0,00												0	-					DPMPTSP	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																	-					DPMPTSP	
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	200,00	0	0,00												0	-					DPMPTSP	
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1	182,01	0	0,00												0	-					DPMPTSP	
		Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	40	627,80	24	304,31	30	204,77	5	39,52	15	108,61	27,78		33,33	27,78	15	175,91	15	480,22	37,50	76,49		DPMPTSP	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																	-					DPMPTSP	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	12	627,80	5	304,31	3	204,77	0	39,52	0	108,61	2	27,86	1	28,55	3	204,54	3	508,85					DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase pelayanan Penanaman Modal	87,88	1.328,62	100	687,46	100	336,40	100	101,24	100	66,91	100		100,00	100,00	100	268,15	100	955,61	113,79	71,92		DPMPTSP	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-																	-					DPMPTSP	
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	0,00	2	70,95	2550	297,53	2331	90,46	2752	59,07	3163	77,95	2041	68,47	10287	295,95	10287	366,90				DPMPTSP	
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	0,00	0	0,00	10	8,81	3	1,80	10	2,93	7	2,40	21	1,60	41	8,73	41	8,73				DPMPTSP	
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0	0,00	0	0,00	600	30,06	227	8,98	219	4,91	526	9,34	296	6,33	1268	29,56	1268	29,56				DPMPTSP	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha	10300	1.057,57	12524	554,36												0	554,36					DPMPTSP	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2700	228,05	1064	52,37												0	52,37					DPMPTSP	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40	43,00	12	9,77												0	9,77					DPMPTSP	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasidan Sinkronisasi PenetapanPemberian Fasilitas/InsentifDaerah bagi Kegiatan/Usaha dari Pelaku Usaha	40			0,00											0	-			DPMPTSP			
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	88,33	70,67	92	447,16	93,14	838,32		100	39,05	100	285,86	100		100,00	100,00	100	424,91	100	872,07	113,21	1.234,00	DPMPTSP
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-																-					DPMPTSP	
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	0,00	0	0,00	15	18,30		4	1,50	7	8,97	4	4,19	0	3,59	15	18,25	15	18,25			DPMPTSP
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0	0,00	0	0,00	300	738,15		0	9,72	150	254,00	150	336,04	0	131,29	300	731,05	300	731,05			DPMPTSP
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	0	0,00	0	0,00	30	81,87		9	27,83	9	22,89	9	15,37	3	15,51	30	81,60	30	81,60			DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	150	70,68	30	14,42													14,42				DPMPTSP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	480	0,00	120	367,98													367,98				DPMPTSP	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	200	0,00	50	64,76													64,76				DPMPTSP	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	152,81	100	70,95	100	37,78		0	15,14	65	8,11	100		100,00	100,00	65	123,25	65	194,20	65,00	127,09	DPMPTSP
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		-				DPMPTSP	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah , Dikaji, dan Dimanfaatkan	8	152,81	2	70,95	2	37,78		0	15,14	1	8,11	0	7,55	1	6,96	2	37,76	2	108,71			DPMPTSP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan			100	99,47	100	100,00			38,34		50,03		10,07	100	0,00	100	98,44	100	197,91			DPMPTSP
		Peningkatan Budaya Pemerintahan																			-			DPMPTSP	
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			1	99,47	1	100,00		0	38,34	0	50,03		10,07	1	0,00	1	98,44	1	197,91			DPMPTSP
		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																		-					
	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	14.244,14	100	3.308,99	100	3.778,91		34,65	946,43	61,56	872,25	91,67	710,89	100	964,00	100	3.493,57	100	6.802,56	100,00	47,76	Dinas Kebudayaan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		-				Dinas Kebudayaan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	45,95	2	9,43	3	124,28		0	1,68	0	10,10	2	8,02	0	98,15	2	117,94	2	127,37			Dinas Kebudayaan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	27,30	21	5,87	21	13,87		7	-	4	1,65	5	6,50	5	2,77	21	10,92	21	16,79			Dinas Kebudayaan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																	-				Dinas Kebudayaan	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144	10.382,48	12	2.507,20	13	2.779,67	3	772,03	3	699,70	3	551,06	4	578,55	13	2.601,34	13	5.108,54			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	299,67	12	66,95	1	74,47	0	17,48	0	3,05	0	31,95	1	17,70	1	70,18	1	137,13			Dinas Kebudayaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56	27,51	14	5,91	14	8,14	3	-	4	2,97	3	0,00	4	4,07	14	7,04	14	12,95			Dinas Kebudayaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			-			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	63,96	12	14,20	2	20,00	0	6,45	0	4,96	0	2,98	2	5,38	2	19,77	2	33,97			Dinas Kebudayaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	132,51	12	29,97	12	49,98	3	6,71	3	2,54	2	20,83	4	13,04	12	43,11	12	73,08			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																		-			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	260,42	12	60,08	12	117,58	3	37,18	3	12,86	3	20,26	3	18,96	12	89,26	12	149,34			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	473,04	12	133,70	12	140,48	3	27,50	3	35,48	3	20,22	3	56,20	12	139,40	12	273,10			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																		-			Dinas Kebudayaan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Peiznannya	53	320,27	17	69,91	17	87,50	4	5,19	4	14,09	5	-	4	47,89	17	67,17	17	137,08			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	1	7,44	1	39,44	0	2,79	0	28,57	0	4,57	1	2,48	1	38,41	1	45,85			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	32,85	15	6,91	15	8,42	4	1,10	4	0,80	6	0,40	1	4,58	15	6,88	15	13,79			Dinas Kebudayaan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	75	1.383,89	1	296,87	1	315,07	0	68,32	0	55,48	0	44,12	1	114,24	1	282,15	1	579,02			Dinas Kebudayaan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																		-			Dinas Kebudayaan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	190	840,01	6	94,55														94,55			Dinas Kebudayaan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																		0,00			Dinas Kebudayaan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61	22,26	0	0,00														0,00			Dinas Kebudayaan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	156	31,08	0	0,00														0,00			Dinas Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan		100	80.673,76		0,00		1.290,70		0,00		157,09			100		0	157,09	0	157,09			Dinas Kebudayaan
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																			-			Dinas Kebudayaan
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0	0,00	0	0,00	1	1.290,70	0	-	0	157,09	0	685,59	1	385,37	1	1.228,05	1	1.228,05			Dinas Kebudayaan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																						
		Cakupan Pelestariansejarah, bahasa,sastra dan permuseuman	Cakupan Pelestariansejarah, bahasa,sastra dan permuseuman	100	80.673,76	100	33.295,09	100	22.379,83	100	1.752,58	39,22	3.499,41	90,2	8.479,12	100,00	8.479,12	39,22	22.210,23	39,22	55.505,32	39,22	68,80	Dinas Kebudayaan
		Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya	Presentase Pelestarian Cagar Budaya dan warisan budaya	69,17		63,18		65,14	-	63,18		63,75		64,47		65,86	64,47	63,75		63,75	-	92,16		Dinas Kebudayaan
		Cakupan pengelolaan taman Budaya	Cakupan pengelolaan taman Budaya	100		96,93		98,25	-	57,51		95,97		96,93		98,25	96,93	95,97		95,97	-	95,97		Dinas Kebudayaan
		Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya	Cakupan kemandirian grup kesenian dan rintisan desa budaya	39,27		31,09		33,37	-	31,07		31,05		31,01		34	31,01	31,05		31,05	-	79,07		Dinas Kebudayaan
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah Dokumen Hasil Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman																		-			Dinas Kebudayaan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	156	4,00	20	1.216,67	17	1.021,56	1	35,69	3	148,74	4	259,54	9	555,51	17	999,48	17	2.216,15			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	32	1.621,00	9	769,33	10	617,74	1	67,88	0	-	9	547,88	0	0,00	10	615,76	10	1.385,08			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang dibuka dan dikelola	20	1.172,00	1	421,02	5	391,72	0	-	3	232,11	0	0,00	2	147,99	5	380,10	5	801,11			Dinas Kebudayaan
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																		-			Dinas Kebudayaan
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	120	11.884,00	30	575,59	22	635,93	0	109,83	2	112,18	0	229,28	20	180,66	22	631,95	22	1.207,53			Dinas Kebudayaan
		Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan																		-			Dinas Kebudayaan
		Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	4	18.279,00	1	4.012,15	1	3.690,53	0	283,74	0	1.090,32	0	727,11	1	1.536,53	1	3.637,70	1	7.649,86			Dinas Kebudayaan
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya																		-			Dinas Kebudayaan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	24	2.102,00	60	838,59	15	1.202,54	0	-	0	-	0	2,68	15	1.175,41	15	1.178,09	15	2.016,68			Dinas Kebudayaan
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																			-			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	8	7.165,00	2	1.561,30	2	1.287,48	0	71,50	1	559,20	1	653,83	0	1,50	2	1.286,03	2	2.847,33			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah lembaga penggiat seni yang dibuka	4	2.258,00	1	665,71	1	600,00	0	2,89	0	28,57	0	-	1	568,17	1	599,63	1	1.265,35			Dinas Kebudayaan
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	12	3.400,00	4	1.268,09	3	907,62	0	-	1	276,59	2	296,96	0	310,26	3	883,81	3	2.151,90			Dinas Kebudayaan
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan	20	800,00	8	308,25	5	300,00	0	-	0	-	0	-	5	290,66	5	290,66	5	598,91			Dinas Kebudayaan
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	20	2.152,00	3	495,95	3	496,49	0	-	0	-	0	-	3	496,29	3	496,29	3	992,24			Dinas Kebudayaan
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	35	8.138,00	8	4.467,00	7	4.364,68	0	78,80	3	88,00	3	1.866,03	2	2.326,51	8	4.359,34	8	8.826,34			Dinas Kebudayaan
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	12	7,20	9	293,59	2	225,00	1	17,00	0	61,01	0	0,00	1	146,55	2	224,56	2	518,15			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina	300	1,85	75	885,51	75	833,96	0	125,00	0	337,58	0	79,28	75	291,26	75	833,12	75	1.718,63			Dinas Kebudayaan
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	20	6,08	8	1.643,40	9	1.719,40	0	651,47	2	11,00	4	648,56	3	406,65	9	1.717,68	9	3.361,08			Dinas Kebudayaan
		Penyelenggaraan Evert Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	24	7,76	3	2.965,03	3	2.450,43	0	173,40	0	333,05	1	207,38	2	1.733,17	3	2.447,00	3	5.412,03			Dinas Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	324	1.939,00	5	10.907,90	5	1.634,75	0	135,38	2	221,06	2	1.231,30	1	41,30	5	1.629,04	5	12.536,94			Dinas Kebudayaan
		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																			-			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	13.824,98	100	3.868,53	100	3.698,66	34,65	953,91	61,56	986,56	91,67	866,83	100	785,94	100	3.593,24	100	7.461,77	100,00	53,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian disampaikan tepat waktu																		-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	23,00	2	4,88	2	5,00	0	1,85	0	0,65	2	1,74	0	0,71	2	4,95	2	9,83			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	24,66	21	5,04	21	5,16	8	1,59	6	1,36	4	0,67	3	1,08	21	4,70	21	9,74			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																		-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148	11.477,99	12	2.530,76	13	2.822,75	3	782,46	3	756,98	2	593,88	4	598,33	12	2.731,66	12	5.262,42			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	143,20	12	36,38	1	36,90	0	9,58	0	9,06	0	9,00	1	9,25	1	36,89	1	73,27			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	21,20	14	4,58	14	4,70	3	1,13	3	0,00	4	1,78	4	1,32	14	4,23	14	8,81			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase realisasi pegawai mengikuti diklat																	-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	20,57	6	3,44	1	3,57	0	1,06	0	0,49	0	0,83	1	0,16	1	2,54	1	5,98			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	25,00	2	10,00	2	10,00	0	-	2	10,00	0	-	0	0,00	2	10,00	2	20,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jayanan koordinasi dan perjalanan dinas																	-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	104,00	5	21,86	5	22,30	1	8,71	2	4,09	1	4,79	1	3,31	5	20,90	5	42,76			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	126,36	2	25,00	12	46,99	3	3,53	3	22,72	3	15,09	3	5,46	12	46,80	12	71,80			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset															0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39	183,45	47	578,02	3	100,49	0	-	0	2,55	3	94,23	0	0,03	3	96,82	3	674,84			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jayanan administrasi perkantoran																	-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	374,09	3	98,08	12	106,99	3	24,10	3	26,21	3	26,61	3	28,75	12	105,67	12	203,75			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	520,00	2	143,73	12	251,36	3	75,83	3	56,13	3	60,76	3	58,33	12	251,05	12	394,78			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang dipelihara															0	-					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	44	599,00	11	136,33	12	138,30	3	28,31	3	22,48	3	44,09	2	40,58	11	135,46	11	271,79			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	78,36	1	236,27	2	98,59	0	3,53	1	65,84	0	0,00	1	26,83	2	96,21	2	332,48			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101	104,11	212	34,16	38	45,55	8	12,23	12	8,00	10	13,35	8	11,78	38	45,36	38	79,52			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Peningkatan Layanan Perpustakaan	49,65	787,13	57,13	380,45	57,32	279,15	42,78	48,96	48,26	54,37	57,26	61,66	57,26	48,26	160,59	48,26	541,04	97,20	68,74		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan perpustakaan																	-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4	440,96	1	126,74	1	127,13	1	28,28	0	29,37	0	35,08	0	33,60	1	126,33	1	253,08			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	16	54,75	4	17,07	4	18,00	0	10,25	0	4,42	0	0,65	4	1,40	4	16,72	4	33,79			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	1200	125,60	1036	101,66	850	87,52	0	4,37	0	11,26	800	61,42	50	8,14	850	85,19	850	186,84			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4800	59,58	1036	101,66	1250	20,50	50	3,07	250	0,90	700	5,70	250	9,58	1250	19,26	1250	120,92			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial																	-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	4	106,23	1	33,32	1	26,00	0	2,99	0	8,42	1	12,10	0	1,17	1	24,68	1	58,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																		-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan pengelolaan kearsipan	81,94	1.542,56	69,17	306,54	70,46	354,33	56,75	88,84	44,17	55,83	54,75		71,86	54,75	44,17	199,42	44,17	505,96	53,91	32,90	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis																	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	73500	863,00	18000	171,37	14000	178,50	3600	60,77	3600	10,33	3600	88,48	3200	16,20	14000	175,79	14000	347,16			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20	298,07	5	51,46	5	52,22	0	11,10	0	9,19	5	21,77	0	9,30	5	51,36	5	102,82			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis																	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	56400	381,51	13400	83,71	14000	123,62	2000	16,97	5400	36,31	3600	55,16	3000	9,98	14000	118,42	14000	202,13			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan							-		-									-				
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	12.553,65	100	2.605,15	100	3.002,00	34,65	633,47	61,56	881,29	91,67	679,07	100	673,22	100	2.867,05	100	5.472,20	100,00	43,59	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		-			Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2	3,39	2	4,34	0	1,90	0	0,57	2	0,94	0	0,27	2	3,68	2	7,07			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22	24,90	21	6,34	7	3,21	4	0,25	6	1,97	4	0,49	21	5,93	21	30,83			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	0	-			Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12	2.141,36	13	2.515,86	3	539,01	3	797,40	3	528,96	4	550,13	13	2.415,50	13	4.556,86			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	59,32	1	63,30	0	9,95	0	0,84	0	33,61	1	15,83	1	60,23	1	119,55			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD			19	3,92	22	3,29	5	1,72	4	1,03	13	-	0	0,00	22	2,75	22	6,67			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		-			Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai			0	0,00	1	3,07	0	-	0	2,13	0	0,37	1	0,00	1	2,50	1	2,50			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			0	0,00	3	10,00	0	-	0	-	2	4,00	0	0,00	2	4,00	2	4,00			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		-			Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			4	10,58	1	10,11	0	3,69	0	1,79	0	2,06	1	1,75	1	9,28	1	19,86			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	58,18	1	60,15	0	6,19	0	9,66	0	27,01	1	12,47	1	55,33	1	113,51			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			1	41,46	1	48,70	0	14,62	0	8,38	0	9,55	1	10,42	1	42,97	1	84,43			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			2	132,37	1	141,80	0	19,48	0	33,50	0	34,62	1	53,88	1	141,49	1	273,86			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara dengan baik dan dibayarkan pajak dan asuransi			47	122,29	49	119,54	4	28,59	3	23,43	6	33,60	36	25,00	49	110,61	49	232,90			Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		7,38	28	15,49	4	5,11	15	2,31	2	2,39	3	2,98	24	12,79	24	20,17			Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	2125	778,85	2183,85	688,00	2183,85	194,25	495,72	38,79	913,15	40,23	1454,6	2.190,03	1.454,62	913,15	1.533,64	913,15	2.221,64	42,97	285,25	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarana prasarana TPI kondisi baik (%) diganti pencatatan produksi perikanan tangkap PUD - dokumen																-			Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	80	159,11	59	58,78	60	33,23	0	2,04	0	3,08	60	22,97	0	0,00	60	28,09	60	86,87		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kelompok nelayan yang aktif (%)																-			Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	200	267,74	50	540,51	20	45,00	20	10,40	0	28,11	0	3,67	0	0,90	20	43,08	20	583,59		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																-			Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4	325,00	1	88,71	1	116,02	0	26,35	0	9,04	0	32,77	1	28,06	1	96,22	1	184,93		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	16910	3.495,42	16803,44	1.699,22	16805	286,77	4418,7	35,98	8653,61	126,73	12904	16968,6	12.904,49	8653,61	13.067,20	8653,61	14.766,42	51,17	422,45	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kawasan sentra produksi perikanan (KSPPI)																-			Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			34	1.433,19	3	133,34	0	14,81	3	94,73	0	7,37	0	0,43	3	117,34	3	1.550,53		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Realisasi kesehatan lingkungan budidaya (kondisi baik/da)																	-		Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			59	58,78	59	71,43	0	14,41	0	16,10	0	23,35	59	16,63	59	70,49	59	129,28		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			0	207,24	1	82,00	0	6,76	0	15,90	0	40,05	1	11,03	1	73,75	1	280,99		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	92,59	421,10	71,77	52,11	94,44	27,38	96,67	0,58	96,88	22,34	96,88	96,97	96,88	96,88	119,80	96,88	171,91	104,63	40,82	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum (%)																	-		Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4	421,00	1	52,11	1	27,38	0	0,58	0	22,34	0	1,29	1	0,88	1	25,10	1	77,21		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan																						
			Presentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar	70,42	943,43	44,37	438,94	52,82	205,11	49,3	40,75	56,34	10,66	55,84	59,09	55,84	56,34	107,25	56,34	546,19	80,01	57,89	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Produksi pengolahan ikan (kg)	145000		166420		145000		36068		75399		122492	182571	122.492	75399	122.492,00	75399	122.492,00	52,00		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Presentase Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang																	-		Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100	376,63	70	83,57	70	75,38	35	21,49	0	2,95	35	13,32	0	36,43	70	74,19	70	157,76		Dinas Kelautan dan Perikanan	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengolahan ikan per tahun (kg)																-			Dinas Kelautan dan Perikanan			
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	80	571,80	24	355,37	3	129,73		0	19,26	0	7,71	0	95,25	3	2,45	3	124,67	3	480,04		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pengembangan budaya bahari	100	7.279,00	101,9	5.110,59	100	5.694,83		79,13	5,06	85,05	641,06	90,6	2.500,75	101,28	2.500,75	85,05	5.647,62	85,05	10.758,20	85,05	147,80	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang dikembangkan																	-				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah obyek budaya bahari yang dikembangkan	108	7.279,00	63	5.110,59	15	5.694,83		0	5,06	2	641,06	7		6	5.001,50	15	5.647,62	15	10.758,20			Dinas Kelautan dan Perikanan
		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																		-					
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	11.368,27	100	2.505,91	100	3.035,91		34,65	939,87	61,56	520,51	91,67	602,73	100	818,96	100	2.882,08	100	5.387,99	100,00	47,39	Dinas Pariwisata
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-				Dinas Pariwisata
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	3,26	2	5,00		0	0,37	0	1,76	1	2,01	1	0,60	2	4,74	2	8,00			Dinas Pariwisata
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	4,42	21	4,52		8	0,46	4	2,64	5	0,83	4	0,30	21	4,23	21	8,65			Dinas Pariwisata
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			-				Dinas Pariwisata
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12	2.095,89	13	2.460,89		3	793,25	3	424,64	3	462,30	4	659,21	13	2.339,40	13	4.435,29			Dinas Pariwisata
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	63,83	1	60,30		0	15,08	0	15,08	0	15,07	1	15,08	1	60,30	1	124,13			Dinas Pariwisata
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18	2,81	22	2,98		3	0,14	3	1,19	4	0,74	12	0,72	22	2,79	22	5,60			Dinas Pariwisata
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			-				Dinas Pariwisata
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	26,88	1	34,21		0	7,59	0	10,27	0	7,27	1	6,01	1	31,15	1	58,03			Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	58,37	1	101,25		0	4,53	0	1,58	0	36,14	1	55,27	1	97,52	1	155,89			Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	0		-				Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	76,61	1	112,45		0	39,30	0	23,09	0	24,72	1	22,80	1	109,91	1	186,52			Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	62,09	1	107,55		0	59,30	0	15,88	0	15,89	1	16,28	1	107,35	1	169,44			Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-				Dinas Pariwisata
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya			15	81,30	49	109,09		3	14,68	3	18,88	5	25,60	38	29,80	49	88,96	49	170,26			Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			4	3,63	4	5,41						4	4,83	0	0,00	4			3,63			Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			57	26,82	28	32,26		9	5,17	12	5,50	3	7,34	4	12,90	28	30,91	28	57,73			Dinas Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100	9.386,92	87,5	2.299,63	87,5	6.239,92		87,5	702,44	87,5	850,62	87,5		87,50	87,50	87,5	1.640,56	87,5	3.940,19	87,50	41,98	Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan daya tarik wisata																		-				Dinas Pariwisata
		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	10	4.693,46	0	0,00	10	3.431,27		0	689,74		794,85	0		10	1.437,52	10	2.922,11	10	2.922,11			Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata																		-				Dinas Pariwisata

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8	4.693,46	8,1	2.299,63	8	2.808,64	2	12,70	3	55,77	3	911,36	0	1.356,74	8	2.336,57	8	4.636,20			Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata	100	1.946,97	79,91	213,77	100	241,05	6,63	99,03	19,09	100,09	39,99		73,48	39,99	19,09	239,11	19,09	452,88	19,09	23,26	Dinas Pariwisata
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pemasaran Pariwisata																		-			Dinas Pariwisata
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3	973,49	3	137,12	2	155,86	0	33,85	0	80,38	0	3,45	2	37,40	2	155,09	2	292,21			Dinas Pariwisata
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	973,49	3	76,65	2	85,19	0	65,17	0	19,71	0	-	2	0,00	2	84,88	2	161,54			Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	23,47	3.864,65	18,69	158,28	20,43	1.395,79	19,55	72,16	19,62	583,35	20,22		20,95	20,22	19,62	675,73	19,62	834,01	83,60	21,58	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar																		-			Dinas Pariwisata
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	140	1.932,33	35	158,28	60	151,45	2	2,96	26	53,38	24	62,28	8	31,51	60	150,13	60	308,41			Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200	1.932,33	0	0,00	30	1.244,34	30	69,20	0	529,97	0	569,52	0	39,08	30	1.207,77	30	1.207,77			Dinas Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																						
			Cakupan Publikasi seni dan budaya daerah	100	8.066,06	120	12.453,94	100	32.520,17	40	373,88	80	2.084,84	80	14.720,44	120,00	14.720,44	120,00	31.899,60	120,00	44.353,54	120,00	549,88	Dinas Pariwisata
			cakupan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	100	100.983,98	142,86		100	21.225,90	0	870,49	28,57	3.994,65	100		314,29	100,00	28,57	4.965,14	28,57	4.965,14	28,57	4,92	Dinas Pariwisata
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																			-			Dinas Pariwisata
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya			0	0,00	3	5.005,66	0	1,50	0	518,21	0	668,00	2	3.700,26	2	4.887,97	2	4.887,97			Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah even pariwisata																		-			Dinas Pariwisata
		Pengembangan Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	30	4.033,03	30	19.360,54	11	16.220,24	3	868,99	4	3.476,44	1	4.328,06	3	7.252,95	11	15.926,44	11	35.286,98			Dinas Pariwisata
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah laporan even penggiat seni	12	4.033,03	0	0,00														-			Dinas Pariwisata
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah media promosi pariwisata																		-			Dinas Pariwisata
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	10	50.491,99	10	7.340,64	11	8.045,29	1	373,10	2	1.123,34	4	3.000,57	4	3.370,27	11	7.867,28	11	15.207,92			Dinas Pariwisata
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	6	50.491,99	6	5.113,30	5	3.248,98	0	0,78	2	961,50	3	1.940,24	0	315,39	5	3.217,92	5	8.331,22			Dinas Pariwisata
		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							-		-										-			
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	61.176,73	100	12.360,16	100	13.342,13	34,65	3.705,47	61,56	3.555,20	91,67	2.839,85	100	2.870,64	100	12.971,16	100	25.331,32	100,00	41,41	Dinas Pertanian dan Pangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja SKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 (2 dokumen)			2	15,54	2	14,43	0	3,41	0	1,27	2	3,64	0	3,55	2	11,86	2	27,40			Dinas Pertanian dan Pangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKJP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, SPIP dan Laporan Statistik Pertanian			22	85,51	22	51,83	9	12,99	4	9,20	5	14,03	4	14,74	22	50,96	22	136,47			Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	0		-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	10.702,61		10.702,61	13	11.857,41	3	3.379,74	3	3.247,94	3	2.480,05	4	2.515,58	13	11.623,31	13	22.325,92			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	85,43	1	85,50	0	21,38	0	21,38	0	21,37	1	20,70	1	84,83	1	170,26			Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			13	13,51	13	13,49	2	2,15	3	4,75	3	0,44	5	4,93	13	12,27	13	25,78			Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																0	-					Dinas Pertanian dan Pangan
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			12	3,50	1	4,00	0	1,36	0	0,68	0	0,30	1	1,44	1	3,77	1	7,27			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			10	5,00	10	7,00				10	6,96	0	0,00	10			5,00				Dinas Pertanian dan Pangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																0	-					Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	35,29	1	40,00	1	7,09	0	13,63	0	8,65	0	6,14	1	35,52	1	70,81			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	84,08	12	54,52	3	13,39	3	3,35	3	21,11	3	10,46	12	48,31	12	132,39			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																0	-					Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	174,35	12	197,79	3	44,19	3	45,10	3	45,39	3	55,97	12	190,66	12	365,01			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	572,44	12	618,84	3	187,42	3	141,13	3	145,13	3	142,95	12	616,63	12	1.189,07			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-					Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			141	277,00	138	302,92	9	22,22	33	55,39	20	68,75	76	80,14	138	226,50	138	503,50			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5	248,41	3	17,50	0	-	1	0,38	2	15,88	0	1,13	3	17,39	3	265,80			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2	57,49	20	76,90	14	10,13	6	11,00	0	8,15	0	12,92	20	42,19	20	99,68			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase peningkatan kecukupan protein dan konsumsi energi	99,7	2.687,67	102,28	761,47	102,28	435,76	52,28	6,14	102,28	250,08	102,28		99,91	102,28	102,28	358,50	102,28	1.119,97	102,59	41,67	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																	-					Dinas Pertanian dan Pangan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	16	568,00	4	138,74	4	148,26	0	1,43	0	1,97	0	19,24	4	117,07	4	139,71	4	278,45			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																	-					Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16	2.119,67	1	622,73	3	287,50	0	4,71	0	248,11	0	23,43	3	6,15	3	282,40	3	905,13			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan																						
			Persentase peningkatan penanganan kerawanan pangan	96,59	390,00	100	-	100	30,50	100	1,52	100	2,08	100		100,00	100,00	100	103,60	100	103,60	103,53	26,56	Dinas Pertanian dan Pangan
			persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	47,43		36,91		33,42		36,91		38,51		38,51		41,68	38,51	38,51		38,51	-	81,19		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-																-					Dinas Pertanian dan Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	16	390,00	0	0,00	4	30,50	0	1,52	0	2,08	0	8,45	4	8,20	4	20,26	4	20,26			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan	95	225,60	94,33	89,40	94,33	39,75	96	3,65	95,28	10,14	95,28	13,22	95,42	4,51	95,28	31,52	95,28	120,92	100,29	53,60	Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-																	-			Dinas Pertanian dan Pangan	
		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			1	44,70	1	39,75	0	3,65	0	10,14	0	13,22	1	4,51	1	31,52	1	76,22			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina	4	225,60	1	44,70		-									0	-	0	44,70			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian																						
			Populasi ternak	214105	10.222,00	170191	4.063,80	192.833	2.179,49	170191	195,56	160141	170,17	160141	1.175,94	167.789	286,40	160141	1.828,07	160141	5.891,86	74,80	57,64	Dinas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman pangan	53,51		50,71		51,52		50,71		45,2		45,2		51,67	45,20	45,2		45,2	-	84,47		Dinas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman perkebunan	54,91		56,22		54,36		0		26,53		26,53		59,77	26,53	26,53		26,53	-	48,32		Dinas Pertanian dan Pangan
			produktivitas tanaman hortikultura	131,17		139,12		130,77		0		61,11		61,11		130,42	61,11	61,11		61,11	-	46,59		Dinas Pertanian dan Pangan
			persentase alat mesin pertanian yang berfungsi dengan baik	100		100		100		100		100		100		100	100,00	100		100	-	100,00		Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-																	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8	0,00	2	781,96	2	183,80	0	8,56	0	68,23	0	83,34	2	5,28	2	165,41	2	947,37			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi Dan Spesifik Lokasi	0	0,00	1	129,71											0	-	0	129,71			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota																		-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0	0,00	1	1.153,44	1	1.099,46	0	66,74	0	50,98	0	483,02	1	214,56	1	815,30	1	1.968,74			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	0,00	4	665,71	4	274,64	0	41,82	0	34,34	0	134,93	4	54,23	4	265,32	4	931,03			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-																	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain (Keluaran sesuai SIPD)	1750	0,00	321	1.332,98	106	621,60	0	78,44	106	16,62	0	474,64	0	12,33	106	582,04	106	1.915,02			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	14	10.221,72	13,85	6.295,13	13,97	8.440,55	13,85	39,94	13,85	1.289,66	13,85	5.565,85	14,93	1.000,27	13,85	7.895,72	13,85	14.190,85	98,93	138,83	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Prasarana Pertanian	-																	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pembangunan unit olahan pakan ternak ruminansia			0	0,00	1	428,11	0	-	0	13,68	0	406,17	1	0,97	1	420,82	1	420,82			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	8	2.505,00	2	738,39	1	683,37	0	37,86	0	528,44	1	30,79	0	66,75	1	663,84	1	1.402,23			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan Prasarana Pertanian	-																	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24	0,00	7	2.248,38	17	3.644,73	0	2,08	0	107,82	17	3.240,32	0	245,84	17	3.596,07	17	5.844,45			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12		0	0,00	4	513,37	0	-	0	508,82	4	-	0	0,14	4	508,96	4	508,96			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	10		2	1.031,00	2	1.597,81	0	-	0	107,82	0	359,78	2	684,02	2	1.151,62	2	2.182,62			Dinas Pertanian dan Pangan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	10	0,00	5	1.138,68	10	1.573,17	0	-	0	23,08	10	1.528,78	0	2,56	10	1.554,42	10	2.693,10			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16	0,00	5	1.138,68	0								0			0	1.138,68			Dinas Pertanian dan Pangan	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	0,00	0	0,00											0	-				Dinas Pertanian dan Pangan	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV											
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	0,00	0	0,00													0	-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																						
			Presentase kesehatan ternak dan kesmavet	5,22	1.645,89	0,19	3.154,93	0,19	3.163,84	0,19	105,84	0,38	419,19	0,38	1.125,40	0,71	1.227,56	0,38	2.877,99	0,38	6.032,92	7,28	366,54	Dinas Pertanian dan Pangan
			Presentase peningkatan olahan pangan asal hewan berkualitas baik	73,11		92,19		92,19		87,23		90,83		90,83		90,02		90,83		90,83	-	124,24		Dinas Pertanian dan Pangan
			Transaksi ternak besar dan ternak kecil	5040		9730		9730		1171		2495		2495		5155		2495		2495	-	49,50		Dinas Pertanian dan Pangan
			Presentase peningkatan jumlah pelaku usaha olahan pangan peternakan	100		84,72		88,65		84,72		87,34		87,34		87,34		87,34		87,34	-	87,34		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																		-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4	0,00	1	74,21	1	99,70	0	4,82	0	59,52	0	5,72	1	1,29	1	71,35	1	145,56			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis			4	489,53	4	247,57	1	43,32	1	76,01	1	70,82	1	48,05	4	238,21	4	727,74			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		16	0,00	4	489,53												0	489,53				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-																	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	16	0,00	4	130,42	4	163,44	0	28,10	1	34,65	1	34,11	2	61,28	4	158,14	4	288,56			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM			0	0,00	1	96,70	0	2,34	0	59,86	0	3,23	1	2,29	1	67,73	1	67,73			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	0,00	1	66,52													66,52				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-																	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	48	0,00	12	1.696,78	4	2.299,99	1	4,30	1	127,98	1	985,42	1	972,35	4	2.090,05	4	3.786,83			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-																	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran hewan dan Produk Hewan	12	0,00	3	57,92	3	75,00	0	11,14	1	51,11	1	9,26	1	2,61	3	74,12	3	132,04			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah Produk Hewan Segar Berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan			0	0,00	1	181,44	0	11,82	0	10,06	0	16,84	1	139,67	1	178,40	1	178,40			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	16	0,00	3	150,02												0	150,02				Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan serangan OPT Tan Pangan dan hortikultura	0,24	1.590,50	0	248,12	0,36	643,03	0	19,84		489,74		62,70	1,97	23,33	0	595,61	0	843,73	0,00	53,06	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-																	-				Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	939	1.590,50	355	248,12	48	643,03	8	19,84	14	489,74	12	62,70	14	23,33	48	595,61	48	843,73			Dinas Pertanian dan Pangan
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan penyuluhan pertanian	45,87	4.629,22	45,33	664,26	45,33	864,02	45,33	93,44		193,54		437,13	45,74	96,48	0	820,59	0	1.484,85	0,00	32,08	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-																	-				Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	48	2.139,20	12	297,14	12	329,58	0	69,16	0	41,70	0	138,12	12	77,08	12	326,06	12	623,20			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1542	2.490,00	94	367,12	98	380,44	0	24,28	0	151,84	0	163,52	98	19,41	98	359,05	98	726,17			Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana Data dan Informasi BPP yang diadakan			0	0,00	3	154,00	0	-	0	-	3	135,48	0	0,00	3	135,48	3	135,48			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																						
			Presentase pemberdayaan kelompok wanita tani	32	9.002,64	30	3.485,99	40	3.465,96	0	13,28	0	264,81	0	0,00	0	2.868,46	0	3.146,55	0	6.632,54	0,00	73,67	Dinas Pertanian dan Pangan
			Presentase pelestarian lahan surian	9,43		5,66		5,66		0		7,55		7,55		7,55	22,65		22,65		-	240,19		Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																			-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi			1	1.931,57	1	1.172,61	0	7,45	0	72,00	0		1	1.087,62	1	1.167,07	1	3.098,64			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-																		-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	4	1.200,00	3	786,85	1	635,35	0	5,83	0	136,47	0		1	465,35	1	607,65	1	1.394,51			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	0	0,00	1	767,57	1	1.658,00	0		0	56,34	0		1	1.315,49	1	1.371,83	1	2.139,40			Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		10,19	7.115,76	100	3.886,60	100	2.904,35	150,45			514,87		1.799,38	100	237,91	100	2.702,61	100	6.589,21	981,35	92,60	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-																		-			Dinas Pertanian dan Pangan
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	4	7.115,76	1	3.886,60	1	2.904,35	0	150,45	0	514,87	0	1.799,38	1	237,91	1	2.702,61	1	6.589,21			Dinas Pertanian dan Pangan
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																			-			
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Program Penguji Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penguji Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	24.834,99	100	4.529,95	100	5.411,81	34,65	1.393,65	61,56	1.060,84	91,67	1.158,90	100	997,37	100	4.610,76	100	9.140,71	100,00	36,81	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																		-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30,63	2	6,15	2	6,11	0	1,60	0	1,09	2	1,99	0	0,68	2	5,96	2	12,11			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	37,13	17	7,56	21	6,48	8	2,54	4	0,97	5	1,11	4	1,64	21	6,27	21	13,83			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		720	18.462,35	12	3.781,62	13	4.514,30	3	1.249,57	3	854,45	3	804,05	4	818,69	13	3.726,75	13	7.508,37			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	393,10	12	78,02	12	76,50	3	18,90	3	18,68	3	19,12	3	19,13	12	75,83	12	153,85			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	51,05	19	14,48	14	17,50	3	4,50	3	3,11	4	3,68	4	5,41	14	16,70	14	31,18			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	232,05	10	32,31	4	30,00	0	-	0	-	4	28,00	0	0,00	4	28,00	4	60,31			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pegawai yang dinilai angka kreditnya	0	0,00	0	0,00														-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																		-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	16	106,74	5	22,34	5	23,00	2	9,13	1	3,96	1	5,96	1	3,28	5	22,33	5	44,67			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	324,87	2	57,49	2	52,35	0	1,93	0	14,10	0	24,64	2	10,82	2	51,48	2	108,97			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	742,56	4	154,42	4	166,32	0	39,67	0	38,76	0	40,12	4	41,62		160,17		314,59			Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	835,38	2	152,49	2	164,75	0	27,23	0	49,47	0	38,41	2	49,46	2	164,58	2	317,07			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																	-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	649,74	25	146,81	25	154,62	5	30,48	4	48,19	9	36,17	7	39,28	25	154,12	25	300,93			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	371,28	2	50,54	1	170,53	0	-	0	21,03	1	148,20	0	0,00	1	169,23	1	219,77			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	116,03	24	25,72	18	29,34	6	8,10	5	6,43	6	7,45	1	7,35	18	29,34	18	55,06			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	41,67	11.359,59	26,92	3.522,13	32	6.006,20	26,92	317,13	26,92	507,64	0,2692	1.519,35	36	2.982,39	26,92	5.326,51	26,92	8.848,64	64,60	77,90	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	12	5.876,15	5	2.126,95	4	3.406,57	0	11,06	0	30,44	2	1.165,94	2	1.594,24	4	2.801,68	4	4.928,63			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	4.530,00	10	1.101,00	26	2.207,64	4	199,34	8	376,05	7	273,17	7	1.286,44	26	2.135,60	26	3.236,60			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0	0,00													-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																		-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10802	404,00	2588	142,41	2688	194,38	525	71,65	695	38,32	1468	47,25	0	36,33	2688	193,55	2688	335,97			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdaganganansi	15904	549,45	4608	151,76	3926	197,60	900	35,08	900	62,23	900	32,98	1910	65,39	4610	195,68	4610	347,44			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting																						
			Presentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	15,2	1.995,53	7,79	1.411,34	7,75	523,66	6,02	30,80	6,38	261,24	6,21	105,41	4,89	114,92	6,38	512,38	6,38	1.923,71	41,97	96,40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu bahan pokok Gula Pasir	32,198571		8,34		22,34		2,33		2,46		2,08		1,8	2,08	2,46		2,46	-	7,64		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu bahan pokok Minyak Goreng	7,5664286		3,24		5,25		1,12		1,37		1,32		3,29	1,32	1,37		1,37	-	18,11		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																		-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	1.531,53	3	500,74	4	270,36	0	17,50	0	52,40	0	93,56	4	100,98	4	264,44	4	765,18			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota																		-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	144	464,10	26	910,60	12	253,30	3	13,30	3	208,84	3	11,85	3	13,94	12	247,93	12	1.158,53			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai perdagangan luar daerah tahun ke n (miliar rupiah)	352,83	2.052,93	236,11349	510,74	236,11	599,88	50786,57	109,54	105989,37	126,99	141099	81,18	247,56	258,64	105989,37	576,36	105989,3697	1.087,09	30.039,78	52,95	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor kabupaten kulon progo 12 kec (perusahaan)																	-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Peningkatan Citra Produk Ekspor Daerah	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi			0	0,00	100	599,88	25	109,54	0	126,99	25	81,18	50	258,64	100	576,36	100	576,36			Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									I		II		III		IV										
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha Ekspor Produk Ekspor Unggulan Yang Dibina	120	2.052,94	90	510,74											0	510,74			Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Presentase standarisasi dan perlindungan konsumen	95,11	389,77	56,51	102,74	74,86	187,12		15,04	37,23	25,69	64,49	42,3	36,41	78,71	47,35	25,69	185,48	25,69	288,22	27,01	73,95	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																			-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perencanaan Ditera Ulang	10700	389,77	6094	102,74	8160	187,12		1618	37,23	1161	64,49	1721	36,41	1639	47,35	6139	185,48	6139	288,22			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																			-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri																							
			jumlah industri baru tahun ke	175	13.281,68	115	4.231,45	130	1.733,87		36	98,96	67	209,86	130	683,89	130	682,18	67	1.674,88	67	5.906,33	38,29	44,47	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			persentase sentra industri aktif	52,94		47,06		41,18			47,06		47,06		50		50	50	47,06		47,06	-	88,89		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																			-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	24	928,20	6	340,93	5	247,97		0	43,65	2	63,69	3	84,23	0	53,06	5	244,63	5	585,56			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Industri	76	951,41	18	194,61	4	179,73		0	23,61	0	71,82	0	41,79	4	15,02	4	152,24	4	346,85			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	96	11.402,09	24	3.695,91	5	1.306,16		0	31,70	1	74,35	1	557,87	3	614,09	5	1.278,01	5	4.973,93			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kreatif berbasis budaya	100	250,00	71,43	102,64	71,43	331,00		35,71	42,84	71,43	0,00	71,43	129,55	142,86	154,03	142,86	326,42	142,86	429,06			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																			-			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan	70	250,00	50	102,64	100	331,00		25	42,84	25	-	50	129,55	0	154,03	100	326,42	100	429,06			Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	68.464,45	115,4	18.815,69	100	26.171,14		39,91	5.901,11	48,28	5.895,94	91,67	5.585,69	106,34	7.520,06	106,34	24.902,80	106,34	43.718,48	106,34	63,86	Sekretariat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-			Sekretariat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	58,41	2	13,71	2	10,43		0	3,16	0	3,89	2	1,54	0	0,24	2	8,83	2	22,54			Sekretariat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	144,41	21	37,12	21	17,81		6	13,24	6	1,57	4	0,66	5	0,25	21	15,72	21	52,84			Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			-			Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		544	38.278,31	12	8.024,15	13	17.991,94		3	4.844,40	3	4.081,81	3	3.865,99	4	4.525,31	13	17.317,51	13	25.341,66			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tugas ASN	48	663,84	12	166,08	12	219,00		3	46,38	3	53,38	3	52,34	3	60,23	12	212,33	12	378,41			Sekretariat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	42,29	14	10,79	14	12,23		3	2,56	4	0,00	4	4,54	3	4,80	14	11,90	14	22,69			Sekretariat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			-			Sekretariat Daerah	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	21,15	2	7,10	2	4,93		0	1,46	0	1,15	0	0,22	2	0,00	2	2,83	2	9,93			Sekretariat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	25,47	2	6,40	2	6,00		0	-	0	-	2	6,00	0	0,00	2	6,00	2	12,40			Sekretariat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			-			Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	1.190,50	9	342,84	9	415,25		0	95,47	0	70,60	0	105,96	9	93,37	9	365,40	9	708,24			Sekretariat Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	2.860,20	12	795,38	12	801,48		3	110,58	3	171,29	3	211,90	3	220,28	12	714,05	12	1.509,43			Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Sekretariat Daerah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	198	700,68	78	2.899,23	17	424,26	3	0,52	0	24,08	3	-	11	385,53	17	410,13	17	3.309,36			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	2.706,71	12	578,99	12	685,58	3	166,15	3	150,06	3	159,57	3	179,12	12	654,90	12	1.233,89			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	5.286,55	11	1.345,50	12	1.416,58	3	181,15	3	373,69	3	371,94	3	467,19	12	1.393,97	12	2.739,47			Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	336	3.383,39	84	798,79	84	978,14	21	129,23	21	152,18	42	243,54	0	324,29	84	849,24	84	1.648,03			Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	260	4.703,76	65	1.340,33	65	564,25	15	14,72	15	9,15	35	30,03	0	501,39	65	555,30	65	1.895,63			Sekretariat Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1761	845,85	411	257,46	425	266,54	105	48,31	105	38,13	215	83,52	0	56,98	425	226,94	425	484,40			Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional																0	-			Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	472,77	3	52,92	13	53,15	3	18,90	3	11,34	3		4	22,91	13	53,15	13	106,07			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	35	249,16	8	50,72	8	57,18	0	-	8	1,36	0	53,14	0	0,00	8	54,50	8	105,22			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	25,77	4	5,28	4	6,00	0	-	2	2,64	0	-	0	0,00	2	2,64	2	7,92			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160	2.400,00	3	599,90	12	600,00				268,71	9		3	330,84	12	599,54	12	1.199,44			Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan																0	-			Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	592,09	3	130,45	3	190,20	0	38,07	1	39,15	0	38,07	2	68,54	3	183,83	3	314,27			Sekretariat Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	152,63	0	0,00										0	-	0	-			Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	42,29	2	13,81	2	13,98	0	0,23	2	0,58	0	-	0	12,85	2	13,66	2	27,47			Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi																0	-			Sekretariat Daerah	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8	329,98	2	55,00	2	71,51	0	18,57	0	11,13	0	20,39	2	12,32	2	62,41	2	117,41			Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	347,50	5	86,65	5	90,86	0	8,67	0	13,35	0	17,61	5	28,03	5	67,66	5	154,31			Sekretariat Daerah
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	28	398,03	7	104,17	7	98,17	0	9,37	2	23,75	2	25,11	3	21,86	7	80,09	7	184,26			Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi																0	-			Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48	2.542,71	12	1.092,93	12	1.175,70	3	149,97	3	392,95	3	293,61	3	203,72	12	1.040,25	12	2.133,18			Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase peningkatan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	16.875,85	105,82	4.508,85	94,91	5.265,58	25,89	482,24	44,79	1.755,12	58,85	806,00	113,74	1.924,53	44,79	4.967,89	44,79	9.476,74	44,79	56,16	Sekretariat Daerah
		Administrasi Tata Pemerintahan																		-			Sekretariat Daerah	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			3	271,79	3	280,55	0	-	0	5,56	0	8,37	3	247,52	3	261,45	3	533,24			Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			5	195,15	3	169,49	0	5,03	0	28,78	1	2,42	2	127,79	3	164,01	3	359,17			Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5	232,30	5	271,75	4	47,87	1	135,28	0	20,95	0	55,40	5	259,50	5	491,80			Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									I		II		III		IV									
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																	-			Sekretariat Daerah		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			11	1.206,45	12	1.610,34	0	319,25	2	494,50	1	268,29	9	449,79	12	1.531,83	12	2.738,28		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			10	1.331,32	10	1.441,10	1	14,71	1	682,85	4	302,64	4	403,02	10	1.403,21	10	2.734,53		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			1	116,97	5	126,94	0	33,08	1	17,74	0	30,83	4	39,22	5	120,87	5	237,83		Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitas Hukum																	-		Sekretariat Daerah		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1890	516,33	642	126,14	470	133,70	144	20,39	210	23,35	158	33,16	154	24,22	666	101,12	666	227,26		Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	20	2.167,95	11	795,43	12	1.043,52	0	27,49	1	304,14	0	54,63	12	567,98	13	954,24	13	1.749,67		Sekretariat Daerah	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1910	600,34	681	168,88	470	144,57	144	11,05	87	30,90	284	81,79	151	7,78	666	131,52	666	300,40		Sekretariat Daerah	
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama																	-		Sekretariat Daerah		
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	16	173,64	4	64,43	4	43,63	3	3,37	0	32,02	1	2,93	0	1,82	4	40,14	4	104,57		Sekretariat Daerah	
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase peningkatan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	7.189,53	108,33	1.503,63	100	1.051,25	8,97	170,02	13,39	195,19	25,99	272,13	111,83	233,65	13,39	870,99	13,39	2.374,62	13,39	33,03	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																	-		Sekretariat Daerah		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20	620,48	5	133,48	5	147,60	0	11,34	0	3,55	2	18,69	10	89,57	12	123,15	12	256,63		Sekretariat Daerah	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	48	596,25	12	164,93	12	148,29	0	32,10	2	31,16	3	44,09	7	16,22	12	123,57	12	288,50		Sekretariat Daerah	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																	-		Sekretariat Daerah		
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	425,27	3	49,75	3	51,09	0	13,94	0	5,31	0	14,57	3	11,48	3	45,29	3	95,05		Sekretariat Daerah	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24	450,84	6	84,47	6	73,01	0	9,62	1	31,28	1	15,82	4	8,11	6	64,83	6	149,30		Sekretariat Daerah	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	430,74	4	62,26	4	56,42	0	3,57	0	10,25	0	8,36	4	4,23	4	26,41	4	88,67		Sekretariat Daerah	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa																	-		Sekretariat Daerah		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	590	2.688,31	133	603,98	150	261,96	38	46,03	14	44,02	9	85,07	0	53,39	61	228,52	61	832,50		Sekretariat Daerah	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	16	318,98	5	104,94	4	52,00	0	6,35	0	17,04	2	19,34	2	5,44	4	48,17	4	153,11		Sekretariat Daerah	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	960	382,75	240	85,68	240	63,92	130	24,57	0	6,63	60	10,41	50	14,20	240	55,81	240	141,49		Sekretariat Daerah	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam															0	-			Sekretariat Daerah		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja	20	425,31	6	76,88	6	94,25	0	5,05	0	33,95	0	18,58	6	22,83	6	80,41	6	157,29		Sekretariat Daerah	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	8	425,31	2	28,13	2	27,89	0	2,69	0	2,06	0	3,38	2	2,88	2	11,01	2	39,14			Sekretariat Daerah
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8	425,31	2	109,14	2	74,82	0	14,76	0	9,94	0	33,81	2	5,30	2	63,82	2	172,96			Sekretariat Daerah
		Keistimewaan Yogyakarta																			-			Sekretariat Daerah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	92	4.793,13	92,68	694,15	91,83	356,24	0	48,57	33,33	22,88	33,33	104,15	92,85	153,93	33,33	329,53	33,33	1.023,68	36,23	21,36	Sekretariat Daerah
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota																		-			Sekretariat Daerah
		Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	56	1.661,60	14	235,18	7	184,00	0	13,50	0	22,88	0	88,05	7	51,88	7	176,31	7	411,48			Sekretariat Daerah
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kaparewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	4	1.200,00	1	100,22	1	31,49	0	-	0	-	0	5,75	1	24,50	1	30,25	1	130,47			Sekretariat Daerah
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	8	731,53	2	147,86											0	147,86					Sekretariat Daerah
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan																		-			Sekretariat Daerah
		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	20	1.200,00	1	210,90	2	140,75	0	35,07	1	-	0	10,35	1	77,55	2	122,97	2	333,87			Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD																			-			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	95.488,51	100	24.394,70	100	24.484,43	34,65	6.389,38	61,56	5.762,02	91,67	1.098,11	100	10.656,00	100	23.905,51	100	48.300,21	100,00	50,58	Sekretariat DPRD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			-			Sekretariat DPRD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	58,01	2	8,91	2	9,61	0	-	1	3,74	1	0,00	0	5,79	2	9,53	2	18,44			Sekretariat DPRD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	32,49	21	6,94	21	7,64	6	-	6	2,91	4	0,00	5	4,63	21	7,54	21	14,48			Sekretariat DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			0	-		Sekretariat DPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		120	8.817,90	12	1.898,81	13	2.062,00	3	792,01	3	352,44	3	434,52	4	414,60	13	1.993,57	13	3.892,38			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	278,46	4	50,90	12	50,95	3	12,23	3	12,23	3	12,22	3	13,01	12	49,68	12	100,58			Sekretariat DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	37,13	14	7,95	14	8,39	4	-	3	3,30	4	-	3	4,98	14	8,28	14	16,23			Sekretariat DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			0	-		Sekretariat DPRD
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	32,49	1	2,94	2	3,05	1	-	0	2,20	1	0,00	0	0,79	2	2,99	2	5,93			Sekretariat DPRD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	243,67	12	2,10	8	12,72	2	0,17	4	0,68	2	11,87	0	0,00	8	12,72	8	14,82			Sekretariat DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			0	-		Sekretariat DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	48	371,28	0	0,00	12	110,56	3	12,38	3	10,61	3	35,58	3	42,50	12	101,07	12	101,07			Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
								I		II		III		IV										
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	116,03	12	78,00	12	79,98	3	15,13	3	17,42	3	39,78	3	6,06	12	78,39	12	156,39			Sekretariat DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	0	-			Sekretariat DPRD	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20200	3.712,80	748	445,79	501	132,82	500	124,85	0	-	0	-	1	6,37	501	131,22	501	577,01			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	0	-			Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	167,85	12	200,75	3	42,65	3	42,11	3	43,21	3	47,83	12	175,80	12	343,65			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	333,29	12	349,81	3	103,19	3	75,95	3	81,32	3	79,79	12	340,25	12	673,54			Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	0	-			Sekretariat DPRD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	116,03	25	882,14	25	719,69	9	168,62	5	156,85	5	157,43	6	165,80	25	648,70	25	1.530,84			Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	139,23	1	809,38	2	684,04	1	167,07	0	145,66	1	187,13	0	178,89	2	678,75	2	1.488,13			Sekretariat DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	280	2.784,60	77	114,34	90	94,69	23	9,73	23	16,26	44	23,21	0	27,52	90	76,72	90	191,06			Sekretariat DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																	0	-			Sekretariat DPRD	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	160	85.858,50	9	19.187,67	12	19.236,42		4.925,66		4.496,65	9		3	9.649,67	12	19.071,98	12	38.259,65			Sekretariat DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	-	80	142,73	200	553,91	0	0,85	200	403,00	0	-	0	2,31	200	406,16	200	548,89			Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	160	185,64	40	3,29	40	37,00	0	-	0	-	0	-	24	0,00	24	-	24	3,29			Sekretariat DPRD
		Layanan Administrasi DPRD																	0	-			Sekretariat DPRD	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40	2.181,27	6	251,67	6	130,40	3	14,84	1	20,01	1	71,83	1	5,47	6	112,15	6	363,82			Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Presentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	79.462,63	100	21.687,23	100	24.701,99	0	7.156,99	48,75	6.941,02	92,22	4.043,50	100,00	3.876,80	48,75	22.018,32	48,75	43.705,55	48,75	55,00	Sekretariat DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																		-				Sekretariat DPRD
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	32	8.811,52	3	360,19	2	291,68	0	258,12	0	1,77	1	2,03	1	1,94	2	263,86	2	624,04			Sekretariat DPRD
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40	11.059,37	6	1.490,49	8	2.843,68	2	718,02	2	782,06	2	606,33	2	373,42	8	2.479,83	8	3.970,32			Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	32	6.961,50	11	3.907,42	1	290,24	0	-	1	266,34	0	0,00	0	11,04	1	277,39	1	4.184,81			Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	2.306,58	5	982,12	3	539,05	1	390,43	1	2,56	0	60,69	1	60,03	3	513,72	3	1.495,84			Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran																		-				Sekretariat DPRD
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	24	11.208,34	6	1.891,77	6	3.615,01	0	1.301,03	1	1.080,84	4	634,98	1	302,83	6	3.319,68	6	5.211,46			Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																		-				Sekretariat DPRD
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	8	2.997,67	1	198,29	1	623,91	0	-	1	334,97	0		0	279,17	1	614,14	1	812,43			Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	32	9.492,08	12	2.269,43	12	3.746,53	0	1.218,08	4	1.101,03	4	397,16	4	478,17	12	3.194,44	12	5.463,87			Sekretariat DPRD
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4	1.740,00	1	202,36	1	386,50	0	-	1	337,37	0	-	0	0,00	1	337,37	1	539,73			Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD																		-				Sekretariat DPRD
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0,00	0	0,00	1	356,31	0	-	0	-	0	0,68	1	342,83	1	343,51	1	343,51			Sekretariat DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24	8.311,12	6	2.135,64	3	1.521,83	1	-	1	535,63	0		1	839,15	3	1.374,78	3	3.510,42			Sekretariat DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	208	3.399,77	398	1.447,43	206	1.013,80	65	405,75	79	329,39	9	193,27	53	70,25	206	998,66	206	2.446,09			Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																		-				Sekretariat DPRD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	20	3.786,35	5	814,83	4	581,41	2	254,12	0	5,39	1	2,75	1	264,91	4	527,17	4	1.341,99		Sekretariat DPRD	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD																		-		Sekretariat DPRD		
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	16	1.150,73	5	104,88	4	159,79	0	147,97	0	1,87	3	-	1	1,33	4	151,17	4	256,05		Sekretariat DPRD	
		Pembahasan Kerja Sama Daerah																		-		Sekretariat DPRD		
		Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	16	3.773,20	8	1.026,92	8	2.506,11	0	892,52	4	666,88	4	847,38	0	0,08	8	2.406,85	8	3.433,77		Sekretariat DPRD	
		Facilitasi Tugas DPRD																		-		Sekretariat DPRD		
		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	52	2.312,13	14	420,74	13	315,19	3	122,53	3	165,49	3	-	4	4,72	13	292,75	13	713,49		Sekretariat DPRD	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84	8.679,22	28	1.743,77	39	2.058,81	10	932,49	12	458,19	9	-	8	218,89	39	1.609,57	39	3.353,34		Sekretariat DPRD	
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	220	4.391,13	104	1.504,23	91	1.898,30	14	279,03	19	5,58	36	1.283,17	22	188,02	91	1.755,81	91	3.260,04		Sekretariat DPRD	
		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	20	8.261,00	10	1.186,73	6	1.953,83	1	236,90	2	865,65	0	15,05	3	440,02	6	1.557,62	6	2.744,35		Sekretariat DPRD	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	6.869,03	100	1.642,81	100	1.726,04	34,65	493,24	61,56	458,43	91,67	369,78	100	358,96	100	1.680,40	100	3.323,21	100,00	48,38	Kapanewon Temon
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	-		Kapanewon Temon		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	22,64	5	4,81	2	3,71	0	1,37	0	1,00	2	0,82	0	0,50	2	3,69	2	8,50		Kapanewon Temon	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	17,53	21	2,73	21	1,48	6	0,86	6	0,18	5	0,18	4	0,18	21	1,40	21	4,13		Kapanewon Temon	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu																	-		Kapanewon Temon		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	5.338,68	12	1.344,68	13	1.445,76	3	424,17	3	392,41	3	297,41	4	287,53	13	1.401,51	13	2.746,19		Kapanewon Temon	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	155,35	4	36,75	12	39,00	3	9,75	3	9,75	3	9,75	3	9,75	12	39,00	12	75,75		Kapanewon Temon	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	18,58	14	3,96	14	3,55	3	1,21	3	0,68	4	0,94	4	0,67	14	3,50	14	7,46		Kapanewon Temon	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum																	-		Kapanewon Temon		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	81,14	5	18,72	4	10,48	1	2,73	1	2,68	1	3,16	1	1,76	4	10,33	4	29,05		Kapanewon Temon	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	116,48	12	21,05	12	19,44	3	4,86	3	4,86	3	4,85	3	4,85	12	19,42	12	40,47		Kapanewon Temon	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																	-		Kapanewon Temon		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	127,83	12	30,23	12	43,41	3	9,25	3	5,67	3	11,96	3	16,08	12	42,96	12	73,19		Kapanewon Temon	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	467,99	11	83,58	12	89,80	3	20,79	3	27,42	3	20,80	3	20,79	12	89,80	12	173,38		Kapanewon Temon	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penambahan Aset																	-		Kapanewon Temon		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	13	110,87	4	28,92													28,92		Kapanewon Temon		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																	-		Kapanewon Temon		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	362,98	10	52,63	9	49,58	3	12,47	3	10,77	3	13,57	0	12,14	9	48,94	9	101,57			Kapanewon Temon
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	49,89	1	2,35	2	2,22	0	-	0	-	2	2,22	0	0,00	2	2,22	2	4,57			Kapanewon Temon
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92	55,13	26	12,40	23	17,62	4	5,78	7	3,01	8	4,11	4	4,71	23	17,61	23	30,01			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	205,20	65,09	41,67	100	49,97	14,19	15,18	28,55	11,84	68,28	15,87	92,21	6,59	28,55	49,48	28,55	91,15	28,55	44,42	Kapanewon Temon
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	-			Kapanewon Temon	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28	70,55	8	20,18	7	17,22	2	4,98	2	6,86	2	4,95	1	0,36	7	17,15	7	37,33			Kapanewon Temon
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	97,75	8	13,48	6	24,92	2	8,47	2	3,35	0	7,19	2	5,51	6	24,52	6	38,00			Kapanewon Temon
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha yang Dilaksanakan kepada Camat																	-			Kapanewon Temon	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	36,90	12	8,01	12	7,82	3	1,73	3	1,63	3	3,73	3	0,72	12	7,81	12	15,82			Kapanewon Temon
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	118,43	100	13,48	100	28,90	50	13,08	50	5,87	50	3,88	100,00	5,54	50	28,37	50	41,85	50,00	35,34	Kapanewon Temon
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	-			Kapanewon Temon	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32	118,43	8	13,48	8	28,90	3	13,08	2	5,87	2	3,88	1	5,54	8	28,37	8	41,85			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	246,61	92,11	58,42	94,74	95,13	92,11	26,12	92,11	15,99	92,11	23,12	94,74	29,45	92,11	94,68	92,11	153,10	92,11	62,08	Kapanewon Temon
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																	-			Kapanewon Temon	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	69,05	30	16,15	200	20,41	40	-	40	2,20	100	11,37	20	6,51	200	20,08	200	36,23			Kapanewon Temon
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	177,56	12	42,27	4	74,72	1	26,12	1	13,79	1	11,75	1	22,94	4	74,60	4	116,87			Kapanewon Temon
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	82,72	100	19,45	100	17,90	40	3,82	40	3,01	60	3,54	100,00	7,32	40	17,69	40	37,14	40,00	44,90	Kapanewon Temon
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	-			Kapanewon Temon	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22	82,72	6	19,45	8	17,90	0	3,82	1	3,01	4	3,54	3	7,32	8	17,69	8	37,14			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	34,75	100	40,00		3,01	13,18			15,46	100,00	8,12	100,00	39,77	100,00	74,52	100,00	31,21	Kapanewon Temon
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun																	-			Kapanewon Temon	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	-	8	238,74	2	34,75	3	40,00	0	3,01	1	13,18	2	15,46	0	8,12	3	39,77	3	74,52			Kapanewon Temon
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	99,90	100	98,00		0,00		0,00		97,86	100,00	0,00	100,00	97,86	99,90	0,00	23,79	Kapanewon Temon	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																		-			Kapanewon Temon	
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	99,90	1	98,00					1	97,86	0	0,00	1		1	99,90			Kapanewon Temon
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	10.628,32	100	2.226,24	100	2.519,52	34,65	910,69	61,56	459,53	91,67	513,44	100	516,79	100	2.400,44	100	4.626,68	100,00	43,53	Kapanewon Wates
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Disampaikan Tepat Waktu																	-			Kapanewon Wates	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30,00	2	5,27	2	5,17	0	2,25	0	2,65	2	-	0	0,00	2	4,90	2	10,17			Kapanewon Wates
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16,68	21	4,00	21	3,92	3	0,55	4	0,27	4	1,07	10	2,02	21	3,91	21	7,91			Kapanewon Wates
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		-			Kapanewon Wates	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1736	8.183,66	12	1.771,84	13	2.073,73	3	787,06	3	351,73	3	414,97	4	406,80	13	1.960,56	13	3.732,40			Kapanewon Wates
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	211,60	12	64,45	12	64,87	3	16,37	3	16,19	3	15,66	3	15,19	12	63,42	12	127,87			Kapanewon Wates
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	17,60	14	4,00	2	3,92	0	1,42	0	1,14	1	0,49	1	0,87	2	3,91	2	7,91			Kapanewon Wates
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum																	-			Kapanewon Wates	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	70,00	4	15,20	5	14,00	0	6,18	0	1,91	0	3,93	5	1,64	5	13,66	5	28,86			Kapanewon Wates
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	152,08	12	36,70	12	33,47	3	8,39	3	9,33	3	8,58	3	7,10	12	33,40	12	70,10			Kapanewon Wates
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																	-			Kapanewon Wates	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	338,00	13	82,83	12	75,23	3	17,13	3	15,82	3	15,87	3	24,31	12	73,13	12	155,96			Kapanewon Wates
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	656,15	12	139,51	12	149,67	3	45,70	3	34,66	3	34,65	3	34,66	12	149,67	12	289,18			Kapanewon Wates
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																	-			Kapanewon Wates	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	87	534,46	0	0,00													-			Kapanewon Wates	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																	-			Kapanewon Wates	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	247,80	14	57,02	14	58,97	4	13,33	2	18,53	3	11,08	5	14,44	14	57,38	14	114,40			Kapanewon Wates
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	244	115,30	61	24,83	41	36,58	16	12,31	9	7,30	7	7,13	9	9,76	41	36,51	41	61,34			Kapanewon Wates
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	55,00	2	20,59													20,59			Kapanewon Wates	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	176,16	61,57	45,64	100	44,10	14,08	9,45	33,5	15,45	49,19	5,70	88,31	10,49	33,5	41,10	33,5	86,74	33,50	49,24	Kapanewon Wates
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan																	-			Kapanewon Wates	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16	44,31	4	10,56	4	10,43	0	0,79	0	2,25	1	1,19	3	4,99	4	9,22	4	19,78			Kapanewon Wates
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan	20	97,92	8	27,01	7	29,70	1	7,96	1	11,55	1	4,07	4	4,35	7	27,93	7	54,94			Kapanewon Wates

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan																-			Kapanewon Wates		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	33,93	12	8,07	12	3,97	3	0,70	3	1,65	3	0,44	3	1,16	12	3,95	12	12,02		Kapanewon Wates	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	4.376,60	100	1.031,12	100	1.388,65	50	106,47	50	297,15	50	854,94	100,00	124,65	50	1.383,20	50	2.414,32	50,00	55,16	Kapanewon Wates
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	-			Kapanewon Wates	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	151,06	10	35,60	10	35,23	2	12,37	2	9,99	1	5,17	5	7,30	10	34,83	10	70,43			Kapanewon Wates
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah LembagaKemasyarakatan yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	-			Kapanewon Wates	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68	2.797,97	17	675,70	17	904,23	0	5,50	0	160,36	17	731,20	0	6,50	17	903,56	17	1.579,26			Kapanewon Wates
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas/Ormas	48	1.267,55	11	281,20	11	410,58	3	78,73	3	114,44	3	111,43	2	105,18	11	409,78	11	690,98			Kapanewon Wates
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	48	160,01	12	38,63	12	38,61	3	9,87	3	12,36	3	7,13	3	5,67	12	35,03	12	73,66			Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	2.820,36	100	663,38	94,74	694,45	92,11	175,57	92,11	145,57	92,11	188,83	100,00	169,93	92,11	679,90	92,11	1.343,28	92,11	47,63	Kapanewon Wates
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	-			Kapanewon Wates	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (324)	2261	2.564,32	324	600,14	405	602,11	238	150,50	117	138,24	50	150,10	0	151,88	405	590,72	405	1.190,86			Kapanewon Wates
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	540	117,38	70	27,63	70	37,42	0	-	0	0,73	70	30,39	0	4,50	70	35,62	70	63,25			Kapanewon Wates
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11	138,66	6	35,61	6	54,92	0	25,07	2	6,60	1	8,34	3	13,55	6	53,56	6	89,17			Kapanewon Wates
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	72,82	100	24,53	100	24,50	40	7,41	40	5,03	80	5,19	100,00	6,70	40	24,33	40	48,86	40,00	67,09	Kapanewon Wates
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	-			Kapanewon Wates	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	32	72,82	11	24,53	7	24,50	2	7,41	0	5,03	4	5,19	1	6,70	7	24,33	7	48,86			Kapanewon Wates
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	34,42	100	40,00	4,99		1,73		21,81	100,00	10,29	100,00	38,82	100,00	73,24	100,00	30,68	Kapanewon Wates	
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																	-			Kapanewon Wates	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun																	-			Kapanewon Wates	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	238,74	2	34,42	3	40,00	0	4,99	0	1,73	0	21,81	3	10,29	3	38,82	3	73,24			Kapanewon Wates

II - 358

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48	52,40	12	1.663,00	12	17,09	3	2,79	3	3,89	3	4,65	3	5,68	12	17,01	12	1.680,01			Kapanewon Panjatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	82,89	6	2.329,00	6	22,38	1	6,80	2	8,00	1	3,66	2	3,85	6	22,31	6	2.351,31			Kapanewon Panjatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan																		-			Kapanewon Panjatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	33,12	12	795,00	12	8,02	3	1,00	3	4,33	3	1,30	3	0,99	12	7,62	12	802,62			Kapanewon Panjatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	94,57	100	4.299,00	100	43,03	50	16,91	50	7,25	50	8,58	100,00	9,43	50	42,17	50	4.341,17	50,00	4.590,60	Kapanewon Panjatan
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan																		-			Kapanewon Panjatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	94,57	6	4.299,00	7	43,03	2	16,91	1	7,25	0	8,58	4	9,43	7	42,17	7	4.341,17			Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	384	230,52	9211	73,40	94,74	92,25	92,11	17,36	92,11	11,33	92,11	24,10	94,74	33,24	92,11	86,02	92,11	2.457,21	23,99	1.065,96	Kapanewon Panjatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Daerah																			-			Kapanewon Panjatan
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	368	100,98	128	2.321,00	181	29,23	0	0,11	15	2,93	166	18,55	0	6,73	181	28,32	181	2.349,32			Kapanewon Panjatan
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	129,54	4	50,19	4	63,01	1	17,25	0	8,40	0	5,55	3	26,51	4	57,71	4	107,90			Kapanewon Panjatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	79,80	100	2.458,00	100	24,68	40	3,42	40	6,86	40	2,41	100,00	11,66	40	24,36	40	2.482,36	40,00	3.110,81	Kapanewon Panjatan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			-			Kapanewon Panjatan
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	79,80	6	2.458,00	6	24,68	1	3,42	2	6,86		2,41	3	11,66	6	24,36	6	2.482,36			Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	3.481,00	100	40,00		8,06		14,57		14,40	100,00	2,85	100,00	39,88	100,00	74,69	100,00	31,28	Kapanewon Panjatan
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	8	238,74				-		-						0	-	0	-				Kapanewon Panjatan
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																		-			Kapanewon Panjatan
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	0	0,00	1	34,81	3	40,00	0	8,06	0	14,57	3	14,40	0	2,85	3	39,88	3	74,69			Kapanewon Panjatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	100	420,00	100	9.991,00	100	100,00		0,00		1,91		97,58	100,00	0,00	100,00	99,49	100,00	10.090,49	100,00	2.402,50	Kapanewon Panjatan
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																			-			Kapanewon Panjatan
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	12	464,10	1	9.991,00	0	100,00	0	-	0	1,91	1	97,58	0	0,00	1	99,49	1	10.090,49			Kapanewon Panjatan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penujng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penujng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.360,96	100	23.133,88	100	1.673,50	34,65	560,84	61,56	333,62	91,67	355,82	100	360,67	100	1.610,95	100	24.744,83	100,00	336,16	Kapanewon Galur
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																		-			Kapanewon Galur
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	17,07	2	421,00	2	5,97	0	2,04	0	2,04	2	1,09	0	0,65	2	5,83	2	426,83			Kapanewon Galur

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	12,66	21	225,00	21	3,06	5	-	5	-	5	-	6	3,00	21	3,00	21	228,00			Kapanewon Galur	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																	-			Kapanewon Galur		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1148	6.260,01	12	1.239,43	13	1.387,45	3	488,78	3	262,82	3	284,74	4	297,93	13	1.334,26	13	2.573,69			Kapanewon Galur	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	158,88	12	3.831,00	12	39,15	3	9,60	3	10,34	3	9,60	3	9,60	12	39,14	12	3.870,14			Kapanewon Galur	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	13,18	14	2,65	14	3,43	3	0,82	3	1,51	4	0,26	4	0,78	14	3,38	14	6,03			Kapanewon Galur	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	-			Kapanewon Galur		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	51,69	5	1.177,00	4	15,77	0	3,39	0	4,25	0	3,02	4	4,70	4	15,36	4	1.192,36			Kapanewon Galur	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	103,43	12	2.303,00	12	21,36	3	5,41	3	5,41	3	4,41	3	2,46	12	17,69	12	2.320,69			Kapanewon Galur	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																	-			Kapanewon Galur		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa , Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	48	123,40	12	2.896,00	12	35,27	3	8,59	3	8,79	3	9,01	3	8,71	12	35,10	12	2.931,10			Kapanewon Galur	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	247,01	12	55,80	12	59,87	3	18,28	3	13,86	3	13,87	3	13,86	12	59,87	12	115,67			Kapanewon Galur	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																	-			Kapanewon Galur		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	71	45,60	10	3.855,00													3.855,00			Kapanewon Galur		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																	-			Kapanewon Galur		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	248,46	8	5.684,00	8	73,64	1	19,58	3	21,52	3	14,36	1	13,73	8	69,19	8	5.753,19			Kapanewon Galur	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	29	34,15	2	358,00	2	9,08	0	-	0	-	2	8,88	0	0,00	2	8,88	2	366,88			Kapanewon Galur	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	168	45,41	30	1.086,00	30	19,45	4	4,35	0	3,08	25	6,59	1	5,24	30	19,26	30	1.105,26			Kapanewon Galur	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	130,92	11921	3.016,00	100	29,22	22,98	7,39	44,91	10,54	74,51	7,14	100,11	3,14	44,91	7,39	28,21	44,91	3.043,21	44,91	2.324,57	Kapanewon Galur
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TK kecamatan																	-			Kapanewon Galur		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	28	33,20	10	746,00	5	5,19	2	1,45	0	0,76	3	2,36	0	0,36	5	4,93	5	750,93			Kapanewon Galur	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32	66,66	11	1.576,00	5	17,68	0	3,83	4	6,90	0	3,86	1	2,39	5	16,99	5	1.592,99			Kapanewon Galur	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																		-			Kapanewon Galur		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	31,06	12	693,00	12	6,35	3	2,11	3	2,88	3	0,92	3	0,38	12	6,29	12	699,29			Kapanewon Galur	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	81,67	100	2.037,00	100	20,06	50	8,78	50	3,95	50	2,65	100,00	3,36	50	18,74	50	2.055,74	50,00	2.517,11	Kapanewon Galur	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																	-			Kapanewon Galur		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	89,33	7	2.037,00	7	20,06	2	8,78	1	3,95	1	2,65	3	3,36	7	18,74	7	2.055,74			Kapanewon Galur	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	213,85	9211	47,90	94,74	98,87	92,11	28,96	92,11	10,02	92,11	31,30	94,74	25,63	92,11	95,90	92,11	1.376,35	92,11	643,61	Kapanewon Galur	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	-																	-			Kapanewon Galur		

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	630	73,71	85	1.245,00	85	30,40	0	0,16	0	0,17	85	23,28	0	6,60	85	30,21	85	1.275,21			Kapanewon Galur
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	24	140,14	6	35,45	7	68,46	1	28,80	2	9,85	1	8,02	3	19,03	7	65,70	7	101,15			Kapanewon Galur
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	70,66	100	1.793,00	100	13,94	40	3,30	40	1,28	60	3,95	100,00	2,07	40	10,60	40	1.803,60	40,00	2.552,53	Kapanewon Galur
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																		-			Kapanewon Galur	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	70,66	10	1.793,00	6	13,94	0	3,30	0	1,28	0	3,95	6	2,07	6	10,60	6	1.803,60			Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	3.491,00	100	40,00		4,03		12,72		14,61	100,00	8,55	100,00	39,91	100,00	3.530,91	100,00	1.478,97	Kapanewon Galur
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																	-			Kapanewon Galur	
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil PenerapanKeistimewaan di Kapanewon/Kemantren danKalurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	238,74	0	0,00		-		-						0	-	0	-			Kapanewon Galur	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																	-			Kapanewon Galur	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	0	0,00	2	3.491,00	3	40,00	0	4,03	0	12,72	0	14,61	3	8,55	3	39,91	3	3.530,91			Kapanewon Galur
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	9.831,00	100	98,00		0,00	0	0,00		97,93	100,00	0,00	100,00	97,93	100,00	9.928,93			Kapanewon Galur
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																	-			Kapanewon Galur	
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	9.831,00	0	98,00	0	-	0	-	1	97,93	0	0,00	1	97,93	1	9.928,93			Kapanewon Galur
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.434,92	100	165.850,88	100	1.739,85	34,65	568,02	61,56	384,47	91,67	381,64	100	365,63	100	1.699,76	100	167.550,64	100,00	2.253,56	Kapanewon Lendah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		-			Kapanewon Lendah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	24,50	2	612,00	2	4,50	0	1,08	0	0,75	2	1,65	0	0,93	2	4,40	2	616,40			Kapanewon Lendah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	18,98	21	391,00	21	3,64	3	0,58	4	0,41	4	0,51	10	1,91	21	3,41	21	394,41			Kapanewon Lendah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		-			Kapanewon Lendah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1064	5.778,49	12	130.008,00	13	1.401,23	3	474,23	3	308,24	3	297,75	4	287,72	13	1.367,94	13	131.375,94			Kapanewon Lendah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	168,15	12	3.825,00	12	39,25	3	9,80	3	9,30	3	10,05	3	9,15	12	38,31	12	3.863,31			Kapanewon Lendah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48	168,15	14	3,88	12	3,65	3	0,56	3	0,18	3	1,36	3	1,47	12	3,57	12	7,45			Kapanewon Lendah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		-			Kapanewon Lendah	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan (3 Paket)	16	87,82	3	1.939,00	3	16,46	1	4,82	0	2,76	1	6,19	1	2,50	3	16,28	3	1.955,28			Kapanewon Lendah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	126,08	12	2.597,00	12	23,40	3	5,82	3	5,72	3	4,94	3	3,06	12	19,54	12	2.616,54			Kapanewon Lendah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Kapanewon Lendah	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik Yang disediakan			12	2.904,00	12	35,34	3	14,43	3	6,59	3	6,94	3	7,34	12	35,30	12	2.939,30			Kapanewon Lendah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	11.161,00	12	119,74	3	36,56	3	27,72	3	27,73	3	27,72	12	119,74	12	11.280,74			Kapanewon Lendah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		-			Kapanewon Lendah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	120,00	4	1.886,00													1.886,00			Kapanewon Lendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Kapanewon Lendah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (9 Unit)	36	392,88	9	8.357,00	9	72,38	3	16,33	2	20,00	4	15,70	0	19,02	9	71,06	9	8.428,06			Kapanewon Lendah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dijaga/direhabilitasi	7	54,00	2	901,00	1	5,45	0	-	0		1	5,43	0	0,00	1	5,43	1	906,43			Kapanewon Lendah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92	59,67	23	1.266,00	12	14,81	2	3,81	4	2,80	3	3,37	3	4,81	12	14,80	12	1.280,80			Kapanewon Lendah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	226,59	133,1	5.151,00	100	48,13	21,81	12,74	50,03	16,30	79,35	12,57	102,95	4,35	50,03	45,96	50,03	4.215,86	50,03	1.860,57	Kapanewon Lendah
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																	-			Kapanewon Lendah	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	40	67,22	6	1.612,00	6	14,79	2	3,62	2	3,78	1	6,36	1	0,76	6	14,52	6	1.626,52			Kapanewon Lendah
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88	118,64	6	2.548,00	6	24,24	3	6,55	1	9,55	1	4,96	1	2,77	6	23,83	6	2.571,83			Kapanewon Lendah
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																	-			Kapanewon Lendah	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48	40,73	12	9,90	12	9,10	3	2,57	3	2,97	3	1,26	3	0,82	12	7,61	12	17,51			Kapanewon Lendah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	102,80	100	2.742,00	100	25,53	50	8,36	50	6,51	50	1,71	100,00	7,38	50	23,95	50	2.765,95	50,00	2.690,63	Kapanewon Lendah
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																	-			Kapanewon Lendah	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	112,89	6	2.742,00	6	25,53	2	8,36	2	6,51	0	1,71	2	7,38	6	23,95	6	2.765,95			Kapanewon Lendah
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	247,87	9211	6.022,00	94,74	95,76	92,11	22,77	92,11	15,76	92,11	26,39	94,74	27,59	92,11	92,52	92,11	2.407,96	92,11	971,44	Kapanewon Lendah
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Rencana Kerja Daerah	-																	-			Kapanewon Lendah	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	101,08	70	2.278,00	70	26,93	0	-	0	4,61	70	14,64	0	7,40	70	26,65	70	2.304,65			Kapanewon Lendah
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	16	146,77	4	37,44	4	68,83	2	22,77	1	11,15	0	11,75	1	20,19	4	65,87	4	103,31			Kapanewon Lendah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	68,52	100	1.875,00	100	25,90	40	4,68	40	7,40	40	6,82	100,00	6,07	40	24,97	40	1.899,97	40,00	2.772,75	Kapanewon Lendah
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																	-			Kapanewon Lendah	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22	68,52	3	1.875,00	3	25,90	0	4,68	0	7,40	0	6,82	3	6,07	3	24,97	3	1.899,97			Kapanewon Lendah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	34,80	100	40,00		4,89		7,97		13,95	100,00	12,96	100,00	39,77	100,00	74,57	100,00	31,23	Kapanewon Lendah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																-			Kapanewon Lendah		
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	8	238,74	0	0,00	-		-						0	-	0	-			Kapanewon Lendah		
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																-			Kapanewon Lendah		
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	0	0,00	2	34,80	3	40,00	0	4,89	0	7,97	0	13,95	3	12,96	3	39,77	3	74,57		Kapanewon Lendah	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	9.962,00	100	100,00	0,00		0,00			99,86	100,00	0,00	100,00	99,86	100,00	10.061,86		Kapanewon Lendah	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																-			Kapanewon Lendah		
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0,00	1	9.962,00	0	100,00	0	-	0	-	1	99,86	0	0,00	1	99,86	1	10.061,86		Kapanewon Lendah	
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan/Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradis	12	400,00	0	0,00											0	-			Kapanewon Lendah		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.803,38	100	38.815,99	100	1.772,93	34,65	603,79	61,56	234,43	91,67	367,25	100	321,30	100	1.526,77	100	40.342,76	100,00	516,99	Kapanewon Sentolo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	-			Kapanewon Sentolo		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	27,52	2	672,00	2	4,58	0	2,83	0	0,33	0	0,92	2	0,39	2	4,47	2	676,47		Kapanewon Sentolo	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	17,60	21	428,00	21	2,96	6	1,63	4	0,18	4	0,38	7	0,71	21	2,89	21	430,89		Kapanewon Sentolo	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	-			Kapanewon Sentolo		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260	5.669,00	12	1.224,53	13	1.466,15	3	524,28	3	173,25	3	268,66	4	258,13	13	1.224,32	13	2.448,85		Kapanewon Sentolo	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	157,07	12	3.968,00	12	40,87	3	10,66	3	10,05	3	10,05	3	9,20	12	39,96	12	4.007,96		Kapanewon Sentolo	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	18,40	14	4,46	14	3,23	3	0,72	4	0,37	4	0,61	3	1,31	14	3,01	14	7,47		Kapanewon Sentolo	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	-			Kapanewon Sentolo		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	121,92	6	1.478,00	3	14,93	0	3,91	0	5,32	3	3,77	0	0,84	3	13,84	3	1.491,84		Kapanewon Sentolo	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	59,97	12	2.739,00	12	25,62	3	6,52	3	6,23	3	5,72	3	6,50	12	24,97	12	2.763,97		Kapanewon Sentolo	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-			Kapanewon Sentolo		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	87,20	12	2.169,00	12	24,22	3	6,35	3	4,91	3	5,90	3	6,59	12	23,74	12	2.192,74		Kapanewon Sentolo	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	213,90	12	558,00	12	59,87	3	18,28	3	13,86	3	13,87	3	13,86	12	59,87	12	617,87		Kapanewon Sentolo	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-			Kapanewon Sentolo		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	299,28	10	7.245,00	9	77,13	3	23,67	1	16,80	3	18,45	2	18,00	9	76,92	9	7.321,92		Kapanewon Sentolo	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	148,52	1	5.752,00	1	34,09	0	-	0		1	33,56	0	0,00	1	33,56	1	5.785,56		Kapanewon Sentolo	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172	51,91	43	1.589,00	12	19,30	3	4,94	3	3,13	3	5,36	3	5,77	12	19,20	12	1.608,20		Kapanewon Sentolo	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	-			Kapanewon Sentolo		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (9 unit)	44	169,08	9	10.989,00			0					-				10.989,00			Kapanewon Sentolo		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	100	220,77	10583	4.788,00	100	45,01	27,1	11,32	58,26	16,51	84,08	7,77	104,84	8,54	58,26	44,14	58,26	2.601,14	58,26	1.178,21	Kapanewon Sentolo
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																	-			Kapanewon Sentolo	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32	57,51	8	1.253,00	6	11,58	2	2,73	2	3,19	1	2,35	1	3,00	6	11,27	6	1.264,27			Kapanewon Sentolo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40	107,10	10	248,00	6	24,98	1	6,25	3	11,61	1	3,30	1	3,45	6	24,61	6	272,61			Kapanewon Sentolo
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																	-			Kapanewon Sentolo	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	56,16	1	1.056,00	12	8,46	3	2,34	3	1,71	3	2,13	3	2,09	12	8,26	12	1.064,26			Kapanewon Sentolo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	92,63	100	2.304,00	100	23,58	50	10,39	50	0,81	50	8,26	100,00	3,44	50	22,90	50	2.326,90	50,00	2.512,07	Kapanewon Sentolo
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																	-			Kapanewon Sentolo	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	92,63	7	2.304,00	6	23,58	0	10,39	0	0,81	0	8,26	6	3,44	6	22,90	6	2.326,90			Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	264,46	9211	6.888,00	94,74	112,39	92,11	31,24	92,11	16,95	92,11	25,35	94,74	38,35	92,11	111,89	92,11	2.346,88	92,11	887,43	Kapanewon Sentolo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	-																	-			Kapanewon Sentolo	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300	87,95	75	2.188,00	70	30,11	0	2,12	0	1,28	70	15,04	0	11,57	70	30,01	70	2.218,01			Kapanewon Sentolo
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	176,51	5	46,99	4	82,29	1	29,12	0	15,67	3	10,32	0	26,77	4	81,88	4	128,87			Kapanewon Sentolo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	122,17	100	2.821,00	100	28,10	40	4,80	40	5,13	40	6,97	100,00	10,87	40	27,77	40	2.848,77	40,00	2.331,84	Kapanewon Sentolo
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																	-			Kapanewon Sentolo	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	122,17	6	2.821,00	6	28,10	0	4,80	0	5,13	0	6,97	6	10,87	6	27,77	6	2.848,77			Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	3.163,00	100	37,62		1,17		13,71		16,76	100,00	5,84	100,00	37,48	100,00	69,11	100,00	28,95	Kapanewon Sentolo
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																	-			Kapanewon Sentolo	
		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/ dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren/ dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	238,74	0	0,00	-	-		-						0	-	0	-			Kapanewon Sentolo	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																	-			Kapanewon Sentolo	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan keistimewaan yang disusun	0	0,00	2	31,63	3	37,62	0	1,17	0	13,71	0	16,76	3	5,84	3	37,48	3	69,11			Kapanewon Sentolo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	9.987,00	100	100,00		0,00		0,00		99,92	100,00	0,00	100,00	99,92	100,00	10.086,92	100,00	2.401,65	Kapanewon Sentolo
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																	-			Kapanewon Sentolo	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0,00	1	9.987,00	0	100,00		0	-	0	-	1	99,92	0	0,00	1	99,92	1	10.086,92			Kapanewon Sentolo
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00	0	0,00											0	-					Kapanewon Sentolo	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	6.969,62	100	137.147,45	100	1.592,08	34,65	525,26	61,56	317,81	91,67	350,30	100	354,96	100	1.548,33	100	138.695,78	100,00	1.990,01	Kapanewon Pengasih	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	-					Kapanewon Pengasih	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	27,70	2	678,00	2	5,70	0	1,31	0	1,62	2	1,33	0	1,33	2	5,59	2	683,59			Kapanewon Pengasih	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	10,10	21	302,00	21	2,73	5	0,10	5	1,22	5	0,39	6	0,96	21	2,67	21	304,67			Kapanewon Pengasih	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	-					Kapanewon Pengasih	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	80	5.518,62	12	119.402,00	13	1.288,81	3	446,30	3	243,00	3	268,60	4	284,53	13	1.242,43	13	120.644,43			Kapanewon Pengasih	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	152,00	12	378,00	12	44,56	3	10,78	3	11,24	3	10,82	3	11,10	12	43,94	12	421,94			Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	16,00	14	3,35	14	2,39	3	-	4	1,39	3	0,15	4	0,73	14	2,27	14	5,62			Kapanewon Pengasih	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	-					Kapanewon Pengasih	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (3 paket)	48	119,80	6	1.414,00	3	10,97	0	2,75	1	3,37	1	2,92	1	1,23	3	10,27	3	1.424,27			Kapanewon Pengasih	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	62,00	12	3.015,00	12	30,06	3	7,51	3	7,51	3	6,45	3	4,38	12	25,86	12	3.040,86			Kapanewon Pengasih	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-					Kapanewon Pengasih	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	83,86	9	2.263,00	12	24,90	3	6,96	3	3,85	3	7,16	3	6,89	12	24,86	12	2.287,86			Kapanewon Pengasih	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	48	31,99	12	8.431,00	12	89,80	3	26,63	3	19,38	3	23,00	3	20,79	12	89,80	12	8.520,80			Kapanewon Pengasih	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	-					Kapanewon Pengasih	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	300,57	10	78,10	10	78,83	4	20,02	2	22,67	3	17,26	1	18,30	10	78,25	10	156,35			Kapanewon Pengasih	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	20	206,00	9	1.183,00	8	13,33	2	2,90	3	2,56	3	3,13	0	4,72	8	13,31	8	1.196,31			Kapanewon Pengasih	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara : 1 (satu) unit Gedung Bangunan Kantor	32	53,16	0	0,00								9,09		0	9,09		9,09				Kapanewon Pengasih	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	182,76	107,3	3.638,00	100	39,61	19,59	13,17	56,59	13,66	79,97	5,64	100,11	4,13	56,59	36,61	56,59	3.675,61	56,59	2.011,17	Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																-					Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (8 laporan)	36	53,54	7	1.055,00	8	10,03	2	4,01	3	3,78	2	1,30	1	0,94	8	10,03	8	1.065,03			Kapanewon Pengasih	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (5 Laporan)	52	77,22	5	1.569,00	5	20,56	0	6,81	2	6,06	1	3,08	2	1,92	5	17,87	5	1.586,87			Kapanewon Pengasih	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																-					Kapanewon Pengasih	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			12	1.015,00	12	9,02	3	2,35	3	3,82	3	1,27	3	1,28	12	8,71	12	1.023,71			Kapanewon Pengasih	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	94,06	100	21,30	100	21,46	50	10,03	50	3,53	50	2,54	100,00	3,91	50	20,01	50	233,01	50,00	247,72	Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																		-			Kapanewon Pengasih	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	94,06	9	213,00	8	21,46	2	10,03	2	3,53	4	2,54	0	3,91	8	20,01	8	233,01				Kapanewon Pengasih
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	238,46	9211	5.616,00	94,74	95,14	92,11	28,08	92,11	8,96	92,11	26,92	94,74	30,78	92,11	94,74	92,11	1.238,91	92,11	519,55	Kapanewon Pengasih	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Daerah	-																		-			Kapanewon Pengasih	
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520	44,66	75	1.099,00	130	24,29	5	0,45	30	1,65	73	15,14	22	6,90	130	24,14	130	1.123,14				Kapanewon Pengasih
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	120	193,80	7	45,17	30	70,85	5	27,63	11	7,31	9	11,78	5	23,88	30	70,60	30	115,77				Kapanewon Pengasih
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	111,00	100	2.659,00	100	25,46	40	3,24	40	10,02	60	4,91	100,00	2,19	40	20,36	40	2.679,36	40,00	2.413,94	Kapanewon Pengasih	
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																		-			Kapanewon Pengasih	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	44	113,01	6	2.659,00	6	25,46	1	3,24	2	10,02	2	4,91	1	2,19	6	20,36	6	2.679,36				Kapanewon Pengasih
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	3.429,00	100	40,00		2,18		18,52		7,07	100,00	12,01	100,00	39,78	100,00	74,07	100,00	31,03	Kapanewon Pengasih	
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-																		-			Kapanewon Pengasih	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																		-			Kapanewon Pengasih	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	0	0,00	1	34,29	2	40,00	0	2,18	0	18,52	2	7,07	0	12,01	2	39,78	2	74,07				Kapanewon Pengasih
		Penerapan dan Pendampingan keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	Jumlah Dukungan Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan	8	238,74	0	0,00	-	-		-						0	-	0	-	-				Kapanewon Pengasih
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	99,80	100	100,00		0,00		0,00		96,72	100,00	0,00	100,00	96,72	100,00	1.094,72	100,00	260,65	Kapanewon Pengasih	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																		-			Kapanewon Pengasih	
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (1 laporan)	0	0,00	1	998,00	0	100,00	0	-	0	-	1	96,72	0	0,00	1	96,72	1	1.094,72				Kapanewon Pengasih
		Pembinaan kelembagaan Adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	12	400,00	0	0,00												0	-				Kapanewon Pengasih	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.608,69	100	143.564,95	100	1.668,54	34,65	414,37	61,56	436,12	91,67	344,53	100	364,52	100	1.559,55	100	145.124,50	100,00	1.907,35	Kapanewon Kokap	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																		-			Kapanewon Kokap	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2	28,00	2	688,00	2	7,00	2	1,99	0	1,66	0	2,49	0	0,83	2	6,96	2	694,96				Kapanewon Kokap
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	16,00	14	398,00	21	4,00	2	1,66	5	0,85	7	0,89	7	0,58	21	3,98	21	401,98				Kapanewon Kokap
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-																		-			Kapanewon Kokap	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	5.923,59	12	116.158,00	13	1.382,61	3	348,94	3	356,38	3	275,79	4	294,79	13	1.275,91	13	117.433,91				Kapanewon Kokap
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	154,20	12	3.631,00	12	37,74	3	5,90	3	12,28	3	9,28	3	9,53	12	36,99	12	3.667,99				Kapanewon Kokap

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65	18,00	14	3,95	12	4,30	3	1,28	3	0,93	3	1,18	3	0,90	12	4,28	12	8,23			Kapanewon Kokap
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			-			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang di sediakan	16	38,00	12	1.231,00	3	11,03	0	1,05	0	5,04	1	2,77	2	1,89	3	10,75	3	1.241,75			Kapanewon Kokap
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	93,38	12	2.537,00	12	21,60	3	5,39	3	5,39	3	5,40	3	5,40	12	21,57	12	2.558,57			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	48	104,00	12	236,00	12	26,72	3	6,70	3	6,33	3	5,73	3	7,15	12	25,91	12	261,91			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	347,42	12	8.369,00	12	89,80	3	20,79	3	27,42	3	20,80	3	20,79	12	89,80	12	8.458,80			Kapanewon Kokap
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																		-			Kapanewon Kokap
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	13	106,00	4	3.458,00														3.458,00			Kapanewon Kokap
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			-			Kapanewon Kokap
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dinayarkan pajak dan perizinannya	36	187,08	9	5.779,00	9	72,44	2	18,39	3	18,19	2	17,02	2	18,60	9	72,20	9	5.851,20			Kapanewon Kokap
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	92	26,00	10	682,00	9	11,29	3	2,28	5	1,65	2	3,19	0	4,06	10	11,18	10	693,18			Kapanewon Kokap
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7	44,00	2	394,00			0											394,00			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan kapanewon	100	153,24	6528	4.583,00	100	46,41	14,64	9,70	29,77	19,06	63,77	10,94	103,45	6,44	29,77	46,14	29,77	2.318,02	29,77	1.512,63	Kapanewon Kokap
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																		-			Kapanewon Kokap
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi Vertikal Terkait	40	63,41	6	159,00	6	15,92	2	4,54	2	6,16	2	4,62	0	0,59	6	15,92	6	174,92			Kapanewon Kokap
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	88	82,66	8	2.104,00	12	23,12	2	3,81	4	11,00	3	4,45	3	3,85	12	23,12	12	2.127,12			Kapanewon Kokap
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																			-			Kapanewon Kokap
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	48	31,99	12	8,88	12	7,36	0	1,35	6	1,90	3	1,87	3	1,99	12	7,11	12	15,99			Kapanewon Kokap
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	77,74	100	2.193,00	100	25,30	50	8,85	50	7,11	50	2,51	100,00	6,77	50	25,24	50	2.218,24	50,00	2.853,56	Kapanewon Kokap
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																		-			Kapanewon Kokap
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44	77,74	6	2.193,00	11	25,30	3	8,85	4	7,11	2	2,51	2	6,77	11	25,24	11	2.218,24			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	198,53	9211	5.888,00	94,74	81,51	92,11	19,97	92,11	8,98	92,11	25,72	100,00	26,71	92,11	81,38	92,11	1.917,31	92,11	965,75	Kapanewon Kokap
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Kepala Daerah	-																		-			Kapanewon Kokap
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	800	62,00	40	1.795,00	5	23,83	0	-	0	-	200	17,82	0	6,00	200	23,82	200	1.818,82			Kapanewon Kokap
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang di tangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	16	139,26	5	40,93	4	57,68	0	19,97	0	8,98	0	7,90	4	20,71	4	57,57	4	98,50			Kapanewon Kokap
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	46,73	100	1.511,00	100	15,19	40	1,64	40	2,66	40	6,91	100,00	3,82	40	15,02	40	1.526,02	40,00	3.265,32	Kapanewon Kokap

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																	-			Kapanewon Kokap	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	22	59,51	5	1.511,00	5	15,19	1	1,64	1	2,66	1	6,91	2	3,82	5	15,02	5	1.526,02			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	3.482,00	100	40,00		1,35		16,26		16,48	100,00	5,75	100,00	39,84	100,00	74,66	100,00	31,27	Kapanewon Kokap
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	0	0,00				-	0	-	0					0	-	0		-			Kapanewon Kokap
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																	-				Kapanewon Kokap
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang di susun	0	238,74	2	34,82	3	40,00	0	1,35	0	16,26	0	16,48	3	5,75	3	39,84	3	74,66			Kapanewon Kokap
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	9.991,00	100	100,00		0,00		0,00		99,99	100,00	0,00	100,00	99,99	100,00	10.090,99	100,00	2.402,62	Kapanewon Kokap
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																	-				Kapanewon Kokap
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0,00	1	9.991,00	0	100,00	0	-	0	-	1	99,99	0	0,00	1	99,99	1	10.090,99			Kapanewon Kokap
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	6.569,96	100	144.567,11	100	1.687,34	34,65	558,04	61,56	296,76	91,67	342,52	100	359,94	100	1.550,75	100	146.117,86	100,00	2.224,03	Kapanewon Girmulyo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		-				Kapanewon Girmulyo
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	26,43	2	567,00	2	6,70	0	2,92	0	0,82	2	1,93	0	0,12	2	5,79	2	572,79			Kapanewon Girmulyo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	15,45	21	326,00	21	3,33	4	1,16	6	0,55	5	0,92	6	0,57	21	3,20	21	329,20			Kapanewon Girmulyo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		-				Kapanewon Girmulyo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1232	5.270,42	12	123.236,00	13	1.398,64	3	490,26	3	228,32	3	274,90	4	282,78	13	1.276,26	13	124.512,26			Kapanewon Girmulyo
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	129,00	12	3.826,00	12	37,65	3	8,97	4	9,03	2	9,00	3	9,07	12	36,07	12	3.862,07			Kapanewon Girmulyo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56	16,18	14	3,47	14	3,49	3	0,86	3	0,38	4	1,49	4	0,75	14	3,48	14	6,95			Kapanewon Girmulyo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		-				Kapanewon Girmulyo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	48	113,31	9	1.048,00	5	9,01	1	3,08	6	0,86	1	2,96	4	1,55	12	8,45	12	1.056,45			Kapanewon Girmulyo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	47,55	12	2.782,00	12	27,90	3	-	3	14,37	3	6,66	3	6,81	12	27,84	12	2.809,84			Kapanewon Girmulyo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		-				Kapanewon Girmulyo
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dihasilkan	12	90,00	1	759,00	1	6,57					0			6,52	0	6,52	0	765,52			Kapanewon Girmulyo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-				Kapanewon Girmulyo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	90,00	12	2.407,00	12	25,17	3	5,89	3	4,63	3	5,00	3	5,59	12	21,11	12	2.428,11			Kapanewon Girmulyo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	318,57	12	8.371,00	12	89,80	3	27,42	3	20,79	3	20,80	3	20,79	12	89,80	12	8.460,80			Kapanewon Girmulyo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																	-				Kapanewon Girmulyo
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	265,78	1	759,00	1	6,57							1	6,52			759,00				Kapanewon Girmulyo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-				Kapanewon Girmulyo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	239,69	10	66,64	12	63,12	3	15,47	3	15,52	3	16,87	3	15,10	12	62,96	12	129,60			Kapanewon Girimulyo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	36,59	9	416,00	12	9,39	3	2,01	3	1,49	3	1,99	3	3,78	12	9,27	12	425,27			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan Publik	100	145,05	8412	3.585,00	100	40,70	18,03	12,03	36,06	12,61	56,59	9,76	102,78	4,46	36,06	38,86	36,06	2.851,66	36,06	1.966,04	Kapanewon Girimulyo
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																		-			Kapanewon Girimulyo
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	55,83	10	1.406,00	1	14,16	0	3,25	0	5,37	0	4,07	1	0,99	1	13,68	1	1.419,68			Kapanewon Girimulyo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20	56,76	5	1.399,00	1	18,56	0	5,86	0	5,91	0	3,19	1	2,53	1	17,49	1	1.416,49			Kapanewon Girimulyo
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																		0,00			Kapanewon Girimulyo
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	32,46	12	7,80	12	7,98	3	2,92	3	1,33	3	2,50	3	0,94	12	7,69	12	15,49			Kapanewon Girimulyo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	102,93	100	2.084,00	100	23,02	50	6,02	50	8,26	50	5,27	100,00	1,78	50	21,33	50	2.105,33	50,00	2.045,36	Kapanewon Girimulyo
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-																		-			Kapanewon Girimulyo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	102,93	6	2.084,00	6	23,02	1	6,02	2	8,26	0	5,27	3	1,78	6	21,33	6	2.105,33			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	273,86	9211	4.652,00	94,74	111,17	92,11	25,70	92,11	9,59	92,11	53,77	92,11	21,00	92,11	110,06	92,11	1.494,06	92,11	545,55	Kapanewon Girimulyo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Keputusan Kepala Daerah	-																		-			Kapanewon Girimulyo
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	148	71,33	37	1.351,00	37	44,85	0	-	0	-	37	38,73	0	5,68	37	44,41	37	1.395,41			Kapanewon Girimulyo
		Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	12	178,43	4	33,00	4	66,32	1	25,70	0	9,59	2	15,04	1	15,32	4	65,65	4	98,65			Kapanewon Girimulyo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	106,75	100	1.556,00	100	15,73	40	10,03	40	0,82	60	1,21	100	1,19	40	13,25	40	1.569,25	40,00	1.470,06	Kapanewon Girimulyo
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																		-			Kapanewon Girimulyo
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20	106,75	1	1.556,00	5	15,73	1	10,03	0	0,82	0	1,21	4	1,19	5	13,25	5	1.569,25			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	3.395,00	100	40,00	1,91		22,59		6,95	100,00	7,86	100,00	39,31	100,00	73,26	100,00	30,69		Kapanewon Girimulyo
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	0	0,00				-												-			Kapanewon Girimulyo
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-																		-			Kapanewon Girimulyo
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	238,74	2	33,95	3	40,00	0	1,91	0	22,59	0	6,95	3	7,86	3	39,31	3	73,26			Kapanewon Girimulyo
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	9.721,00	100	100,00	0,00		0,00		99,91	100,00	0,00	100,00	99,91	100,00	9.820,91	100,00	2.338,31	Kapanewon Girimulyo	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-																		-			Kapanewon Girimulyo
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0	0,00	1	97,21	0	100,00	0	-	0	-	0	99,91	0	0,00	0	99,91	0	197,12			Kapanewon Girimulyo

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemertihan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.599,38	100	1.696,83	100	1.814,00	34,65	605,47	61,56	396,89	91,67	363,76	100	367,50	100	1.733,63	100	30.812,39	100,00	405,46	Kapanewon Nanggulan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	-			Kapanewon Nanggulan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	29,00	2	599,00	2	5,20	0	2,20	0	2,19	2	0,75	0	0,00	2	5,14	2	604,14			Kapanewon Nanggulan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	16,00	21	399,00	2	4,00	0	0,68	0	1,05	1	1,29	0	0,96	1	3,98	1	402,98			Kapanewon Nanggulan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		-			Kapanewon Nanggulan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	84	6.220,13	12	1.367,77	13	1.536,57	3	526,71	3	330,08	3	297,46	4	302,98	13	1.457,24	13	2.825,01			Kapanewon Nanggulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	149,50	12	3.527,00	12	41,91	3	10,63	3	10,43	3	10,42	2	10,43	11	41,91	11	3.568,91			Kapanewon Nanggulan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	16,00	14	3,99	14	3,23	3	0,67	4	1,32	3	1,08	2	0,15	12	3,22	12	7,21			Kapanewon Nanggulan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	-			Kapanewon Nanggulan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	59,05	9	1.313,00	12	14,44	3	3,39	3	3,60	3	4,16	3	3,19	12	14,34	12	1.327,34			Kapanewon Nanggulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	91,80	12	2.073,00	12	22,14	3	5,29	3	5,59	3	5,59	3	5,59	12	22,06	12	2.095,06			Kapanewon Nanggulan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Kapanewon Nanggulan	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	101,10	9	2.248,00	12	16,51	3	5,01	3	3,94	3	3,58	3	3,96	12	16,49	12	2.264,49			Kapanewon Nanggulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	350,84	9	8.371,00	12	89,80	3	27,42	3	20,79	3	20,80	3	20,79	12	89,80	12	8.460,80			Kapanewon Nanggulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Kapanewon Nanggulan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	195,50	9	4.648,00	11	64,39	3	19,56	3	13,88	3	15,64	2	14,58	11	63,66	11	4.711,66			Kapanewon Nanggulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	164	60,00	12	12,00	25	15,82	8	3,91	7	4,02	10	2,99	0	4,87	25	15,79	25	27,79			Kapanewon Nanggulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	16,45	19	4.517,00			0										4.517,00			Kapanewon Nanggulan	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	210,36	11769	5.166,00	100	52,00	25,43	20,70	50,86	12,11	75,9	12,77	101,17	5,83	50,86	51,41	50,86	5.218,41	50,86	2.480,70	Kapanewon Nanggulan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-																	-			Kapanewon Nanggulan	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13	72,52	4	1.772,00	4	16,50	1	7,49	1	2,24	2	6,73	0	0,00	4	16,46	4	1.788,46			Kapanewon Nanggulan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	94,00	8	2.346,00	8	25,00	2	7,75	3	8,67	1	5,12	2	3,41	8	24,96	8	2.370,96			Kapanewon Nanggulan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-																	-			Kapanewon Nanggulan	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	49	43,85	11	1.049,00	12	10,50	3	5,46	3	1,20	3	0,92	3	2,42	12	10,00	12	1.059,00			Kapanewon Nanggulan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	89,83	100	2.395,00	100	24,17	50	9,48	50	5,38	50	6,15	100,00	3,09	50	24,10	50	2.419,10	50,00	2.693,02	Kapanewon Nanggulan

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	14	96,12	11	2.395,00	11	24,17		3	9,48	3	5,38	3	6,15	2	3,09	11	24,10	11	2.419,10			Kapanewon Nanggulan
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																					Kapanewon Nanggulan	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	383,14	9211	5.124,00	94,74	71,66		92,11	20,88	92,11	6,90	92,11	14,47	92,11	28,94	92,11	71,19	92,11	1.048,08	92,11	273,55	Kapanewon Nanggulan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-																			-			Kapanewon Nanggulan
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	420	82,00	50	935,00	91	15,78		0	-	0	-	91	8,02	0	7,34	91	15,36	91	950,36			Kapanewon Nanggulan
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	48	262,13	6	41,89	4	55,88		1	20,88	1	6,90	1	6,45	1	21,60	4	55,82	4	97,71			Kapanewon Nanggulan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	81,35	100	2.095,00	100	19,53		40	8,10	40	2,96	40	4,89	100,00	3,61	40	19,46	40	2.114,46	40,00	2.599,35	Kapanewon Nanggulan
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-																			-			Kapanewon Nanggulan
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24	81,35	6	2.095,00	6	19,53		2	8,10	2	2,86	2	4,89	0	3,61	6	19,46	6	2.114,46			Kapanewon Nanggulan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	3.487,00	100	40,00			3,24		11,99		10,33	100,00	14,35	100,00	39,91	100,00	74,77	100,00	31,32	Kapanewon Nanggulan
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan																				-			Kapanewon Nanggulan
		Penyelenggaraan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi	8	238,77				-			-						0	-	0	-				Kapanewon Nanggulan
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																				-			Kapanewon Nanggulan
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun			2	34,86	3	40,00		0	3,24	0	11,99	0	10,33	3	14,35	3	39,91	3	74,77			Kapanewon Nanggulan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	100,00	100	98,00			0,00		0,00		97,94	100,00	0,00	100,00	97,94	100,00	197,94	100,00	47,13	Kapanewon Nanggulan
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																				-			Kapanewon Nanggulan
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	12	100,00	1	100,00	0	98,00		0	-	0	-	1	97,94	0	0,00	1	97,94	1	197,94			Kapanewon Nanggulan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.797,17	100	34.905,36	100	1.736,33		34,65	471,01	61,56	474,39	91,67	363,95	100	361,34	100	1.670,70	100	36.576,06	100,00	469,09	Kapanewon Samigaluh
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				-			Kapanewon Samigaluh
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja 2025 dan tersusunnya Perubahan Renja 2024	100	28,00	2	699,00	2	6,00		0	0,73	0	1,90	2	2,60	0	0,76	2	5,99	2	704,99			Kapanewon Samigaluh
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	12,00	21	394,00	21	3,00		5	1,32	4	0,48	5	0,54	7	0,62	21	2,96	21	396,96			Kapanewon Samigaluh
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																			-			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	5.338,09	12	1.270,31	13	1.437,48		3	396,16	3	395,65	3	294,41	4	292,08	13	1.378,30	13	2.648,61			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	152,00	12	3.963,00	12	39,63		3	10,22	3	9,75	3	9,63	3	9,13	12	38,73	12	4.001,73			Kapanewon Samigaluh
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	16,00	14	3,95	14	4,00		3	1,60	3	0,77	3	0,77	5	0,85	14	3,99	14	7,94			Kapanewon Samigaluh
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																			-			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	1	54,69	1	1.369,00	1	13,70		1	6,94	0	1,07	0	4,55	0	1,07	1	13,63	1	1.382,63			Kapanewon Samigaluh

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	110,46	12	2.756,00	12	27,62	3	7,05	3	6,89	3	5,84	3	6,89	12	26,67	12	2.782,67			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa peninjang																	-			Kapanewon Samigaluh	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya iar dan listrik yang disediakan	48	79,08	12	18,30	12	16,18	3	3,83	3	3,78	3	3,89	3	4,11	12	15,61	12	33,91			Kapanewon Samigaluh
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	166,52	12	55,80	12	59,87	3	13,86	3	18,28	3	13,86	3	13,86	12	59,87	12	115,67			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Kapanewon Samigaluh	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangun lainnya yang di sediakan	129	661,00	50	10.352,00													10.352,00			Kapanewon Samigaluh	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		-			Kapanewon Samigaluh	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31	385,82	7	7.219,00	8	92,95	4	25,87	1	24,86	1	18,67	2	22,12	8	91,52	8	7.310,52			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	11	682,51	2	4.681,00	5	16,38	0	-	5	7,55	0	0,00	0	8,25	5	15,80	5	4.696,80			Kapanewon Samigaluh
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	48	65,13	38	2.124,00	12	19,53	0	3,43	4	3,41	8	9,18	0	1,61	12	17,63	12	2.141,63			Kapanewon Samigaluh
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	194,14	10349	4.794,00	100	45,99	34,95	12,25	50,19	11,96	66,78	11,32	92,82	6,26	50,19	41,79	50,19	4.835,79	50,19	2.490,90	Kapanewon Samigaluh
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		-			Kapanewon Samigaluh	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40	80,04	10	1.996,00	6	13,37	1	4,71	0	0,90	3	3,37	2	2,89	6	11,87	6	2.007,87			Kapanewon Samigaluh
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28	82,21	7	1.976,00	7	27,00	2	5,44	3	10,15	1	5,59	1	3,20	7	24,39	7	2.000,39			Kapanewon Samigaluh
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																		-			Kapanewon Samigaluh	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	16	31,88	12	822,00	12	5,62	3	2,10	3	0,91	3	2,36	3	0,16	12	5,53	12	827,53			Kapanewon Samigaluh
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	129,62	100	3.237,00	100	31,07	50	12,34	50	6,89	50	5,39	100,00	5,42	50	30,04	50	3.267,04	50,00	2.520,49	Kapanewon Samigaluh
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																		-			Kapanewon Samigaluh	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	129,62	10	3.237,00	5	31,07	3	12,34	1	6,89	1	5,39	0	5,42	5	30,04	5	3.267,04			Kapanewon Samigaluh
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	270,45	9211	6.038,00	94,74	100,30	92,11	26,72	92,11	17,57	92,11	24,53	92,11	24,48	92,11	93,30	92,11	2.355,45	92,11	870,94	Kapanewon Samigaluh
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Keputusan Kepala Daerah																		-			Kapanewon Samigaluh	
		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	240	82,53	60	2.224,00	45	29,24	0	-	0	7,19	45	16,04	0	6,00	45	29,23	45	2.253,23			Kapanewon Samigaluh
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	20	187,92	5	38,15	5	71,07	1	26,72	1	10,38	3	8,49	0	18,48	5	64,07	5	102,22			Kapanewon Samigaluh
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	119,81	100	3.045,00	100	25,71	40	6,61	40	5,54	60	3,20	100,00	7,74	40	23,09	40	3.068,09	40,00	2.560,88	Kapanewon Samigaluh
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																		-			Kapanewon Samigaluh	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8	119,81	5	3.045,00	7	25,71	2	6,61	1	5,54	2	3,20	2	7,74	7	23,09	7	3.068,09			Kapanewon Samigaluh

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	35,00	100	40,00			12,49		7,60		7,65	100,00	12,17	100,00	39,91	100,00	74,91	100,00	31,38	Kapanewon Samigaluh
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																			-			Kapanewon Samigaluh	
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	204,00	2	35,00	3	40,00	0	12,49	0	7,60	0	7,65	3	12,17	3	39,91	3	74,91				Kapanewon Samigaluh
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	98,70	100	100,00		0,00		0,00		98,00	100,00	0,00	100,00	98,00	100,00	1.085,00	100,00	258,33	Kapanewon Samigaluh	
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																			-			Kapanewon Samigaluh	
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	987,00	0	100,00	0	-	0	-	1	98,00	0	0,00	1	98,00	1	1.085,00				Kapanewon Samigaluh
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	7.323,58	100	34.457,99	100	1.715,49	34,65	579,96	61,56	350,72	91,67	344,58	100	363,49	100	1.624,73	100	36.082,72	100,00	492,69	Kapanewon Kalibawang	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																		-			Kapanewon Kalibawang	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	27,84	2	699,00	2	7,00	0	1,79	0	1,84	2	3,24	0	0,00	2	6,87	2	705,87				Kapanewon Kalibawang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	15,91	21	4,00	21	4,00	4	1,16	5	0,83	4	0,94	8	1,05	21	3,98	21	7,98				Kapanewon Kalibawang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																		-			Kapanewon Kalibawang	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1316	6.061,05	12	1.314,00	13	1.411,12	3	503,97	3	271,58	3	271,46	4	290,74	13	1.337,75	13	2.651,75				Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	136,33	12	4.042,00	12	40,43	3	10,27	3	10,05	3	10,05	3	10,05	12	40,42	12	4.082,42				Kapanewon Kalibawang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	15,91	14	3,99	14	4,00	3	1,11	4	1,11	3	1,34	4	0,41	14	3,97	14	7,96				Kapanewon Kalibawang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																		-			Kapanewon Kalibawang	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	65,30	4	1.541,00	4	18,63	1	5,83	1	3,70	1	6,19	1	2,89	4	18,61	4	1.559,61				Kapanewon Kalibawang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	85,24	12	2.109,00	12	21,90	3	5,47	3	5,47	3	5,48	3	5,47	12	21,88	12	2.130,88				Kapanewon Kalibawang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-																		-			Kapanewon Kalibawang	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	48	101,21	3	3.192,00	1	2,24					0			2,24	0	2,24	0	3.194,24				Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																		-			Kapanewon Kalibawang	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	101,21	12	2.643,00	12	31,31	3	7,55	3	7,38	3	7,19	3	6,61	12	28,73	12	2.671,73				Kapanewon Kalibawang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	235,83	12	5.779,00	12	59,87	3	18,28	3	13,86	3	13,87	3	13,86	12	59,87	12	5.838,87				Kapanewon Kalibawang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																		-			Kapanewon Kalibawang	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	215,38	3	3.192,00	1	2,24						-	1	2,24				3.192,00				Kapanewon Kalibawang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																		-			Kapanewon Kalibawang	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	307,42	8	7.601,00	8	80,38	2	20,86	2	19,12	2	19,67	2	20,18	8	79,83	8	7.680,83				Kapanewon Kalibawang

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	26,29	1	609,00	1	11,79	0	-	1	11,79	0	-	-	-	1		609,00				Kapanewon Kalibawang
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	144	64,76	20	1.729,00	21	20,59	5	3,67	4	3,99	6	5,16	6	7,76	21	20,58	21	1.749,58			Kapanewon Kalibawang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100	180,77	13158	42,30	100	39,87	17,42	8,10	39,45	11,42	64,44	11,61	83,97	8,70	39,45	39,82	39,45	3.422,38	39,45	1.893,27	Kapanewon Kalibawang
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		-				Kapanewon Kalibawang
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	114	64,42	12	1.492,00	27	11,68	6	1,77	6	2,78	7	4,39	8	2,73	27	11,67	27	1.503,67			Kapanewon Kalibawang
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80	78,20	9	1.882,00	20	19,38	4	3,69	6	6,80	5	5,38	5	3,49	20	19,35	20	1.901,35			Kapanewon Kalibawang
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																		-				Kapanewon Kalibawang
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	48	38,14	12	8,56	12	8,81	0	2,64	6	1,84	3	1,84	3	2,48	12	8,80	12	17,36			Kapanewon Kalibawang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	81,51	100	2.303,00	100	24,90	50	9,82	50	3,60	50	2,89	100,00	8,57	50	24,88	50	2.327,88	50,00	2.855,95	Kapanewon Kalibawang
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									-									-				Kapanewon Kalibawang
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	47	81,51	8	2.303,00	12	24,90	3	9,82	4	3,60	1	2,89	4	8,57	12	24,88	12	2.327,88			Kapanewon Kalibawang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	215,62	9211	6.931,00	94,74	95,18	92,11	23,28	92,11	7,97	92,11	35,45	94,74	27,83	92,11	94,53	92,11	2.891,28	92,11	1.340,94	Kapanewon Kalibawang
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																		-				Kapanewon Kalibawang
		Penyusunan, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	440	83,98	65	2.755,00	70	37,42	10	0,72	0	1,06	40	28,90	20	6,71	70	37,39	70	2.792,39			Kapanewon Kalibawang
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	92	131,64	6	41,75	6	57,76	2	22,56	1	6,91	1	6,55	2	21,11	6	57,14	6	98,89			Kapanewon Kalibawang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	103,62	100	25,20	100	25,47	40	4,11	40	8,34	60		100,00	60,00	40	72,45	40	97,65	40,00	94,24	Kapanewon Kalibawang
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																		-				Kapanewon Kalibawang
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	48	103,62	12	25,20	45	25,47	3	4,11	3	8,34	3	6,03		6,36	9	24,84	9	50,04			Kapanewon Kalibawang
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	238,74	100	2.837,00	100	40,00		5,90		8,02		10,67	100,00	13,60	100,00	38,19	100,00	66,56	100,00	27,88	Kapanewon Kalibawang
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan																		-				Kapanewon Kalibawang
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Yang Disusun	8	238,74	2	28,37	3	40,00	0	5,90	0	8,02	1	10,67	2	13,60	3	38,19	3	66,56			Kapanewon Kalibawang
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	420,00	100	9.998,00	100	100,00		0,00		0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	10.098,00	100,00	2.404,29	Kapanewon Kalibawang
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																		-				Kapanewon Kalibawang
		Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	4	400,00	1	9.998,00	0	100,00	0	-	0	-	1	100,00	0	0,00	1	100,00	1	10.098,00			Kapanewon Kalibawang
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	18.230,96	100	4.734,29	100	11.003,85	34,65	2.872,53	61,56	2.522,03	91,67	2.472,73	100	2.979,90	100	10.762,48	100	15.496,77	100,00	85,00	Inspektorat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	-			Inspektorat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	138,30	2	33,25	2	35,14	0	8,80	0	9,73	2	7,33	0	8,64	2	34,51	2	67,76			Inspektorat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	144,45	21	34,87	21	15,08	9	8,43	4	3,01	4	1,50	4	1,65	21	14,59	21	49,46			Inspektorat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																		-			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4	15.196,15	12	3.900,98	13	9.957,28	3	2.737,94	3	2.208,08	3	2.291,93	4	2.592,08	13	9.830,03	13	13.731,01			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	243,00	12	57,00	12	55,50	3	13,88	3	13,88	3	13,87	3	12,53	12	54,15	12	111,15			Inspektorat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	48	15,50	14	3,45	14	4,24	3	0,48	4	1,56	3	0,72	4	1,44	14	4,20	14	7,65			Inspektorat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																		-			Inspektorat Daerah
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8	80,00	1	9,86	2	10,00	1	0,72	0	3,12	1	0,51	0	5,37	2	9,72	2	19,58			Inspektorat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	118,00	3	23,26	15	86,88	3	-	5	5,42	7	9,35		69,94	15			23,26			Inspektorat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																		-			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	89,00	5	19,87	5	18,68	1	7,29	2	5,82	1	3,89	1	1,39	5	18,39	5	38,26			Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	284,00	12	61,13	12	80,79	3	7,50	3	7,86	3	25,64	3	39,71	12	80,71	12	141,84			Inspektorat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-																		-			Inspektorat Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	239,00	15	99,00	41	146,08	0		0		41			141,82	41	141,82	41	240,82			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																		-			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	239,00	12	56,98	12	76,68	3	12,52	3	14,36	3	21,99	3	17,54	12	66,41	12	123,39			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	485,00	11	114,03	12	124,72	3	28,57	3	37,98	3	28,64	3	28,64	12	123,83	12	237,86			Inspektorat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan aset																		-			Inspektorat Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77	380,00	15	99,00	41	146,08		-		141,82		-	41	0,00	41	141,82	41	240,82			Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																		-			Inspektorat Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76	669,00	19	187,42	19	166,11	4	24,80	5	44,09	6	44,10	4	49,14	19	162,13	19	349,55			Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	98,46	3	22,25	3	57,00	0	18,93	2	18,98	1	18,91	0	0,00	3	56,82	3	79,07			Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	712	59,60	178	11,94	178	23,60	33	2,67	40	6,32	79	4,36	26	10,00	178	23,35	178	35,29			Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase peningkatan penyelenggaraan pengawasan	99,05	3.081,81	94,54	889,56	89,19	329,08	73,81	22,04	98,61	24,06	96,05	36,55	89,81	229,32	98,61	311,97	98,61	1.201,53	99,56	38,99	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan pengawasan internal																		-			Inspektorat Daerah
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	168	580,22	42	163,75	42	17,53	9	2,23	7	1,90	26	2,95	0	10,03	42	17,11	42	180,86			Inspektorat Daerah
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1223	871,04	345	236,37	376	46,77	86	6,10	93	5,68	137	10,40	60	11,36	376	33,54	376	269,91			Inspektorat Daerah
		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	412	1.091,72	87	338,21	106	23,89	28	4,57	14	5,11	46	9,14	18	4,75	106	23,57	106	361,78			Inspektorat Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20	313,92	5	76,86	5	79,15	0	6,82	2	10,19	0	10,46	3	49,49	5	76,96	5	153,82			Inspektorat Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu																	-			Inspektorat Daerah	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	47	230,62	15	74,37	15	161,74	2	2,32	2	1,18	3	3,59	8	153,69	15	160,79	15	235,16			Inspektorat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentasen peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	100	807,07	100	202,22	100	163,47	0	9,41	14,29	48,98	95,24	25,46	100	76,97	14,29	160,83	14,29	363,05	14,29	44,98	Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi																	-			Inspektorat Daerah	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	344	95,23	1	58,16	86	31,50	0	4,48	42	0,00	2	-	42	26,22	86	30,70	86	88,86			Inspektorat Daerah
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20	619,02	4	138,05	5	125,51	1	3,56	1	46,55	1	23,85	2	50,75	5	124,71	5	262,76			Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	168	92,01	42	6,01	42	6,46	42	1,37	0	2,43	0	1,61	0	0,00	42	5,42	42	11,43			Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Cakupan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	95,83	562,54	98,15	125,21	80,09	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	125,21	0,00	22,26			Inspektorat Daerah
		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan																		-			Inspektorat Daerah	
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	72	562,54	15	125,21		-									0	125,21				Inspektorat Daerah	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	16.680,31	100	4.077,67	100	4.540,93	34,65	1.087,35	61,56	1.242,37	91,67	955,57	100	1.083,52	100	4.367,27	100	8.444,94	100,00	50,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja di sampaikan tepat waktu																	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	173,95	2	42,86	2	42,20	0	12,61	0	9,62	1	9,60	1	2,49	2	34,32	2	77,18			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapoean Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	48,91	21	12,10	21	11,00	7	4,54	5	2,53	4	1,42	5	1,39	21	9,88	21	21,98			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188	13.550,13	12	3.143,59	13	3.617,46	3	922,42	3	1.035,74	3	768,39	4	796,06	13	3.522,61	13	6.666,20			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	256,09	1	56,47	1	56,72	0	14,64	0	13,60	0	13,60	1	13,38	1	55,21	1	111,68			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56	170,16	14	41,27	14	41,95	4	12,09	3	9,04	4	9,71	3	11,05	14	41,89	14	83,16			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Moritoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	4	8,51	1	1,75	1	2,00	0	-	0	0,84	0	0,24	1	0,67	1	1,76	1	3,51			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	140	125,55	35	25,25	35	32,21	0	-	0	-	0	-	35	31,72	35	31,72	35	56,97			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16	124,67	4	26,46	4	29,23	1	3,60	1	9,01	1	4,11	1	10,16	4	26,87	4	53,33			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	297,81	12	159,11	12	175,39	3	22,02	3	24,24	3	42,37	3	70,12	12	158,75	12	317,86			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	251,01	12	59,40	12	94,52	3	27,62	3	19,01		19,07	6	21,75	12	87,44	12	146,84			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	641,32	12	187,57	12	211,89	3	31,70	3	66,16		38,40	6	66,72	12	202,98	12	390,55			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																		-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27	170,17	14	128,14		2,30						-		1,55				128,14			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																0		-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	108	595,61	39	142,10	27	180,86	2	31,81	3	32,21	13	43,91	9	47,83	27	155,77	27	297,87			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi	4	40,42	1	16,14	1	7,73	0	-	1	7,73	0	0,00	0	0,00	1	7,73	1	23,87			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	226,01	12	35,46	50	35,49	13	4,30	15	12,64	15	4,75	7	8,63	50	30,32	50	65,78			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah																						
			Capaian perencanaan pembangunan daerah	100	4.421,38	100	1.158,55	100	1.250,32	0	226,86	0	260,82	40	424,39	100,00	251,70	0	1.163,77	0	2.322,32	0,00	52,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Presentase konsistensi perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah	99,75		99,91		99,73		29,37		0				99,86		99,86		99,86	-	100,11		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																		-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12	178,45	3	39,60	3	47,80	0	1,97	0	8,67	0	13,10	3	17,09	3	40,83	3	80,43			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	14	2.429,43	3	709,31	4	878,11	0	165,82	1	210,09	0	337,64	3	129,64	4	843,19	4	1.552,50			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah																		-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	17	565,60	3	36,90	4	51,33	0	5,83	1	10,45	2	13,59	1	12,95	4	42,82	4	79,72			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi daerah																		-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	41	959,06	9	307,61	10	218,46	4	47,12	2	20,13	2	48,28	2	81,94	10	197,47	10	505,09			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	48	289,22	12	65,13	12	54,62	3	6,12	3	11,48	3	11,78	3	10,07	12	39,45	12	104,58			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah																						
			Presentase perencanaan dan pengendalian bidang Pemerintahan dan PM tepat waktu	100	2.834,09	100	1.129,70	100	762,65	15	195,83	25	131,19	35	119,05	100,00	271,15	25	717,22	25	1.846,92	25,00	65,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase perencanaan dan pengendalian bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu	100		100		100		16,67	-	16,67		50		100,00		16,67		16,67	-	16,67		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Presentase perencanaan dan pengendalian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tepat waktu	100		100		100		16,67		16,67		50		100,00		16,67		16,67	-	16,67		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																		-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	460,87	6	111,03	6	79,31	1	25,71	1	24,59	3	13,30	1	10,36	6	73,96	6	184,99			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	32	601,81	8	142,83	9	247,58	1	33,61	3	24,49	2	23,12	3	157,73	9	238,95	9	381,78			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	411,45	6	88,90	6	92,35	1	26,58	1	20,77	3	17,77	1	22,87	6	88,00	6	176,90			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA																	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	303,23	9	307,61	6	44,33	1	14,99	1	11,01	3	4,18	1	2,49	6	32,68	6	340,29			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	324,34	6	76,00	6	79,10	1	29,04	1	16,57	3	11,16	1	15,75	6	72,52	6	148,52			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																	-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	26	375,51	7	252,95	6	117,29	1	38,24	1	13,49	3	20,47	1	41,30	6	113,49	6	366,44			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26	356,88	7	150,39	6	102,69	1	27,66	1	20,27	3	29,05	1	20,64	6	97,62	6	248,01			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase perencanaan keistimewaan	100	1.403,74	100	227,44	100	234,88	0	61,38	0	37,04	0	249,39	100	358,86	100	227,73	100	934,12	100,00	66,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase pengendalian kegiatan keistimewaan	100		100		100		25		25		50		100	50,00	25		25	-	25,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan																		-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Rencana Proram dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	16	661,28	4	162,31	4	165,26	0	-	0	6,63	0	37,23	4	116,75	4	160,61	4	322,92			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	16	742,46	12	65,13	4	69,62	1	13,19	1	6,03	0	7,86	2	40,05	4	67,12	4	132,25			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				100	0,00	100	247,85		24,10		12,19		101,59	100	101,59	100	239,47	100	239,47			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya																			-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia				0	0,00	5	247,85	0	24,10		12,19	0	102,71		100,48	0	239,47	0	239,47			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian inovasi daerah	138	1.231,48	195	233,60	129	268,61	195	17,55		37,84	195	42,08	208	132,34	0	229,81	0	463,41	0,00	37,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian Penelitian Dan Pengembangan	7		6		7		1				1		8	1	0		0	-	0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah yang masih eksis																		-			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	19	961,28	4	177,37	5	209,94	1	14,28	0	34,53	1	30,30	3	97,24	5	176,35	5	353,72			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	72	270,20	18	56,23	18	58,67	5	3,27	2	3,31	5	11,78	6	35,10	18	53,46	18	109,69			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV									
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	129.691,53	100	25.641,29	100	32.325,27		34,65	9.825,15	61,56	2.522,59	91,67	6.383,55	100	8.727,20	100	27.441,69	100	53.082,98	100,00	40,93	BKAD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																		-			BKAD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	66,87	2	15,21	2	11,38		0	1,18	0	2,07	2	4,57	0	0,00	2	7,82	2	23,03			BKAD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84	62,84	21	14,38	21	15,48		6	2,01	6	3,73	4	3,11	5	4,31	21	13,16	21	27,54			BKAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu																		-			BKAD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	280	123.808,37	12	23.276,69	13	31.016,78		3	9.650,03	3	2.271,57	3	6.129,81	4	8.436,83	13	26.488,24	13	49.764,93			BKAD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	419,62	12	103,22	1	108,88		0	17,15	0	25,05	0	25,05	1	33,40	1	100,65	1	203,87			BKAD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20	94,43	12	22,18	12	20,77		3	6,10	3	1,57	3	6,14		3				22,18			BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56	135,18	12	33,88	14	36,31		3	9,72	3	11,66	4	7,38	4	6,63	14	35,39	14	69,27			BKAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian																		-			BKAD	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0,00	0	0,00	1	1,79		0	-	0	-	0	-		0,00	0	-	0	-			BKAD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	72,00	3	45,00	2	12,00		0	-	0	-	1	6,00	1	0,00	2	6,00	2	51,00			BKAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	0	-			BKAD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	48	552,03	12	57,95	6	54,56		2	12,22	2	13,87	1	10,44	1	11,55	6	48,08	6	106,03			BKAD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	259,54	12	234,74	12	122,60		3	9,88	3	32,79	3	34,46	3	20,89	12	98,02	12	332,76			BKAD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang																		-			BKAD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	403,30	12	63,32	12	97,85		3	17,19	3	15,04	3	14,67	3	16,81	12	63,71	12	127,03			BKAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	144	836,92	11	242,29	12	269,24		3	63,42	3	74,91	3	65,80	3	64,08	12	268,21	12	510,50			BKAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan aset																		-			BKAD	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	287	1.666,18	94	686,33	0	190,85						0		0	n/a				686,33			BKAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah																		-			BKAD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156	581,04	46	175,12	39	238,04		9	24,78	9	53,34	9	52,57	12	59,94	39	190,63	39	365,75			BKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	418,58	2	604,61	2	10,00		0	-	2	1,48	0	6,20	0	0,00	2	7,68	2	612,29			BKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	428	299,63	30	66,37	107	118,75		30	11,47	30	15,51	30	17,36	17	69,77	107	114,12	107	180,49			BKAD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah																							
		Cakupan pengelolaan anggaran		100	804.462,39	100	185.901,99	100	195.993,29		100	29.318,87	100	124.343,80	100	33.047,17	100,00	5.457,05	100	192.166,89	100	378.068,87	100,00	47,00	BKAD
		Cakupan pengelolaan expenditure		95,68		97,72		95,17			81,33		91,71		89,11		98,5		91,71		91,71	-	95,85		BKAD
		Capaian penerapan akuntansi dan pelaporan		100		100		100			0		100		100		100		100		100	-	100,00		BKAD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah penerbitan dokumen penganggaran daerah (%)																-				BKAD	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	16	426,17	4	98,59	4	93,77	0	3,86	0	7,24	4	23,12	0	20,00	4	54,22	4	152,81			BKAD
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA- SKPD yang Diverifikasi	340	313,82	85	62,42	85	63,96	42	8,53	1	13,97	0	13,30	42	13,41	85	49,20	85	111,62			BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	48	1.261,12	12	277,83	12	304,40	0	55,41	0	13,30	3	44,80	9	168,47	12	281,97	12	559,80			BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8	497,03	2	111,88	1	106,17	0	-	0	1,46	1	100,11	0	0,00	1	101,57	1	213,45			BKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan															0	-				BKAD	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	448	386,92	16	84,69	110	92,43	27	9,23	26	20,47	27	11,77	30	17,57	110	59,03	110	143,73			BKAD
		Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	13840	103,44	12	22,96	12	221,85	3	22,35	3	13,97	3	11,83	3	48,75	12	96,90	12	119,86			BKAD
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	8	50,44	2	11,55	2	13,07	1	-	0	5,46	1	0,45	0	1,92	2	7,83	2	19,38			BKAD
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	504	723,44	126	162,21	42	184,08	42	21,77	0	41,66	0	34,47	0	37,32	42	135,22	42	297,43			BKAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan																-				BKAD	
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	672	107,06	168	23,89	168	30,00	42	5,98	42	4,42	42	8,05	42	2,88	168	21,34	168	45,23			BKAD
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	68	87,20	17	17,86	17	25,00	4	2,30	3	4,41	4	7,17	6	8,22	17	22,10	17	39,97			BKAD
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2016	321,09	126	68,85	504	58,99	126	6,28	126	3,24	126	18,95	126	15,44	504	43,91	504	112,76			BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	349,12	2	80,14	12	99,76	0	19,73	2	79,23	0	0,00	10	0,00	12	98,96	12	179,10			BKAD
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan yang terselesaikan																-				BKAD	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis	48	672.958,07	6	173.496,91	6	177.719,05	0	27.522,44	0	118.355,81	0	31.840,80	6	0,00	6	177.719,05	6	351.215,96			BKAD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	8	79.362,37	6	1.092,33		3.485,54	0	397,35		917,88				1.221,56			1.092,33			BKAD	
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	aporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8	47.515,09	0	10.289,88	2	13.495,23	0	1.243,64	0	4.861,28		932,36	2	3.901,52	2	10.938,79	2	21.228,67			BKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100	1.082,90	100	1.086,22	100	387,95	0	14,41	70,83	49,38	72,22	31,43	100,00	252,31	70,83	347,53	70,83	1.433,75	70,83	132,40	BKAD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah																-				BKAD	
		Penyusunan Standar Harga	Standar Harga yang Disusun	8	410,50	2	115,77	2	102,45	1	0,71	0	17,20	1	1,44	0	78,19	2	97,63	2	213,40			BKAD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12	72,77	3	95,96	3	15,06	1	5,20	0	0,69	1	1,35	1	4,50	3	11,74	3	107,70			BKAD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	218,87	2	688,13	2	56,54	0	2,43	0	16,77	1	8,35	1	7,01	2	34,56	2	722,69			BKAD
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	240,94	6	130,83	6	141,46	1	4,34	1	7,86	2	14,11	2	110,49	6	136,80	6	267,63			BKAD
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16	139,88	2	55,53	4	72,43	0	1,73	0	6,77	2	6,18	2	52,12	4	66,80	4	122,33			BKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																						
			Presentase penerimaan pajak daerah	100	17.176,43	84,28	5.281,92	100	6.025,82	14,85	747,51	36,63	1.192,90	62,02	1.357,24	80,81	2.354,65	36,63	5.652,30	36,63	10.934,22	36,63	63,66	BKAD

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
			Presentase capaian pendapatan daerah	86,22		104,2		75,02		40,35		50,93		59,81		71,93		50,93		50,93	-			BKAD
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah																	-				BKAD
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8	363,55	2	51,15	2	161,05	0	11,98	0	12,88	1	10,67	1	108,54	2	144,07	2	195,23			BKAD
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	16	412,65	4	158,36	4	87,53	3	15,15	0	18,67	1	10,88	0	25,04	4	69,75	4	228,10			BKAD
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	32	10.436,25	8	2.501,22	8	2.688,50	2	413,70	1	647,02	0	925,77	5	637,21	8	2.623,70	8	5.124,92			BKAD
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1412508	3.968,23	353127	1.948,79	12	2.237,99	3	190,10	3	347,06	3	298,78	3	1.215,16	12	2.051,10	12	3.999,89			BKAD
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	65	677,17	29	236,20	29	344,21	7	20,88	8	45,40	7	32,81	7	208,08	29	307,18	29	543,38			BKAD
		Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	848	579,00	212	231,81	212	230,00	0	63,06	0	64,32	0	36,99	212	44,33	212	208,70	212	440,50			BKAD
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8	400,23	1	80,85	2	190,24	0	14,73	0	32,27	1	21,94	1	99,52	2	168,46	2	249,31			BKAD
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi	7	339,02	1	73,55	2	86,30	0	17,91	0	25,28	1	19,39	1	16,76	2	79,34	2	152,89			BKAD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	391.496,78	100	99.972,07	100	122.533,99	34,65	18.782,44	61,56	38.980,45	91,67	27.891,07	100	36.142,05	100	121.796,01	100	221.768,08	100,00	56,65	BKPP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu																	-				BKPP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	72,51	12	8,59	2	9,12	0	1,44	0	2,97	2	1,90	0	0,00	2	6,31	2	14,90			BKPP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	21,59	21	3,54	21	9,67	8	2,29	4	2,59	5	1,13		1,03	17	7,04	17	10,58			BKPP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu																	-				BKPP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	388.764,83	12	99.278,14	13	121.999,25	3	18.667,82	3	38.879,69	3	27.783,05	4	35.993,41	13	121.323,98	13	220.602,12			BKPP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	262,35	13	52,13	12	54,78	3	13,65	3	12,70	3	14,10	3	14,10	12	54,55	12	106,68			BKPP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	39,50	14	9,72	14	9,03	3	2,36	4	1,93	3	0,70	4	2,36	14	7,35	14	17,07			BKPP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian																	-				BKPP
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Eva	1	13,00	0	0,00													-				BKPP
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	53,00	4	6,00	3	6,00	0	-	0	-	3	6,00	0	0,00	3	6,00	3	12,00			BKPP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum																	-				BKPP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	290,00	9	16,59	5	18,89	1	4,50	1	4,03	2	4,96	1	1,91	5	15,40	5	31,99			BKPP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	63,00	12	61,21	12	96,44	3	19,68	3	15,40	3	22,59	3	33,05	12	90,72	12	151,93			BKPP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang																0	-				BKPP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	430,00	1	58,89	12	70,22	3	17,96	3	14,65	3	14,08	3	17,15	12	63,84	12	122,73			BKPP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	260,00	1	111,91	12	120,34	3	36,69	3	27,82	3	27,82	3	27,89	12	120,21	12	232,12			BKPP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset																	-				BKPP

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28	718,00	12	75,82	3		0				0	-		-			75,82				BKPP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah															0	-					BKPP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	14	365,00	15	75,61	12	88,77	6	10,44	0	14,93	4	11,30	2	17,82	12	54,49	12	130,10			BKPP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60,00	1	194,39	1	29,92	0	-	0	-	0	-	1	29,40	1	29,40	1	223,79			BKPP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	84,00	20	19,53	18	19,58	6	5,61	2	3,74	6	3,44	4	3,93	18	16,72	18	36,25			BKPP
		Program Kepegawaian Daerah																						
			Cakupan Pengembangan Aparatur	45,41	20.971,08	64,38	4.080,69	65,35	4.581,94	47,14	545,10	59,25	1.447,86	60,46	678,36	62,64	1.272,11	59,25	3.943,43	59,25	8.024,12	130,48	38,26	BKPP
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur	85,44		79,47		82,81		78,77		80,22		79,12		79,11		80,22		80,22		93,89		BKPP
			Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur	99,98		99,41		99,98		99,99		99,97		99,97		99,93		99,97		99,97		99,99		BKPP
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																					BKPP
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	3.267,50	2	317,31	2	973,74	0	44,23	0	7,96	1	76,75	1	488,56	2	617,50	2	934,81			BKPP
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1.075,60	1	122,10	1	114,71	0	8,53	0	49,59	0	22,84	1	19,61	1	100,56	1	222,66			BKPP
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	395,00	1	78,40	1	96,51	0	20,32	0	1,20	0	16,48	1	36,55	1	74,54	1	152,94			BKPP
		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat															0	-					BKPP
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	300	285,00	248	41,30	230	46,21	26	12,49	27	14,39	40	3,41	139	11,24	232	41,53	232	82,83			BKPP
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700	310,00	1122	54,46	700	55,77	232	9,76	76	13,84	461	6,71	207	8,08	976	38,39	976	92,85			BKPP
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	26	2.000,00	7	494,28	5	447,75	1	25,49	0	111,13	1	160,94	2	99,32	4	396,88	4	891,16			BKPP
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Kompetensi ASN															0	-					BKPP
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	70	138,00	68	12,99	70	18,01	0	-	68	8,66	0	5,74		2,45	68	16,85	68	29,84			BKPP
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	110,00	97	62,46	52	292,30	0	1,91	0	0,74	0	2,31	52	261,11	52	266,07	52	328,52			BKPP
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3	12.508,47	3	2.734,15	3	2.368,15	0	397,04	0	1.193,72	0	365,79	3	301,40	3	2.257,95	3	4.992,10			BKPP
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	100	202,00	374	48,89	100	48,69	16	6,35	19	11,40	106	8,26	10	15,83	151	41,84	151	90,73			BKPP
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															0	-					BKPP
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27	97,00	27	11,22	27	15,82	0	-	0	-	0	-	27	13,41	27	13,41	27	24,62			BKPP
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5	582,50	5	103,14	5	104,28	2	18,98	1	35,23	1	9,14	1	14,56	5	77,91	5	181,05			BKPP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	100	994,29	100		100	410,81		-		-	100	203,98	100	100,00	100	303,98	100	303,98	100,00	30,57	BKPP
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan diklat keistimewaan																	-				BKPP
		Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	210	994,29	1	201,24	2	410,81	0	-	0	-	2	407,96	0	0,00	2	407,96	2	609,20			BKPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		99,87	95,18					
Predikat kinerja																		ST	ST					

NO.	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPD PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D RKPD TAHUN N-1	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RPD S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024 (%)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III				
I.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala; 2. Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; 3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN, Pemda DIY dan sumber dana lainnya seperti CSR, Perguruan Tinggi, dan sebagainya; 4. Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD.														
II.	Faktor penghambat keberhasilan kinerja : 1. Beberapa Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah tidak tercapai sesuai dengan target. 2. Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pada pekerjaan konstruksi 3. Pengendalian internal PD belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai target 4. Belum optimalnya pemanfaatan output kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat														
III.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawasan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal; 2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambataan dalam pelaksanaan pekerjaan; 3. Perlunya koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta program RPD 2023-2026 untuk mendukung pencapaian target RPD di tahun 2025; 4. Perangkat Daerah perlu melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat.														
IV.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawasan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal; 2. Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghindari keterlambataan dalam pelaksanaan pekerjaan; 3. Perlunya koordinasi dan optimalisasi capaian kinerja tujuan, sasaran daerah, IKU Perangkat Daerah, serta program RPD 2023-2026 untuk mendukung pencapaian target RPD di tahun 2025; 4. Perangkat Daerah perlu melakukan evaluasi hasil (outcome) dari kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta bisa berkolaborasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan output kegiatan/sub kegiatan untuk meningkatkan dampak manfaatnya bagi masyarakat.														

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Isu Strategis

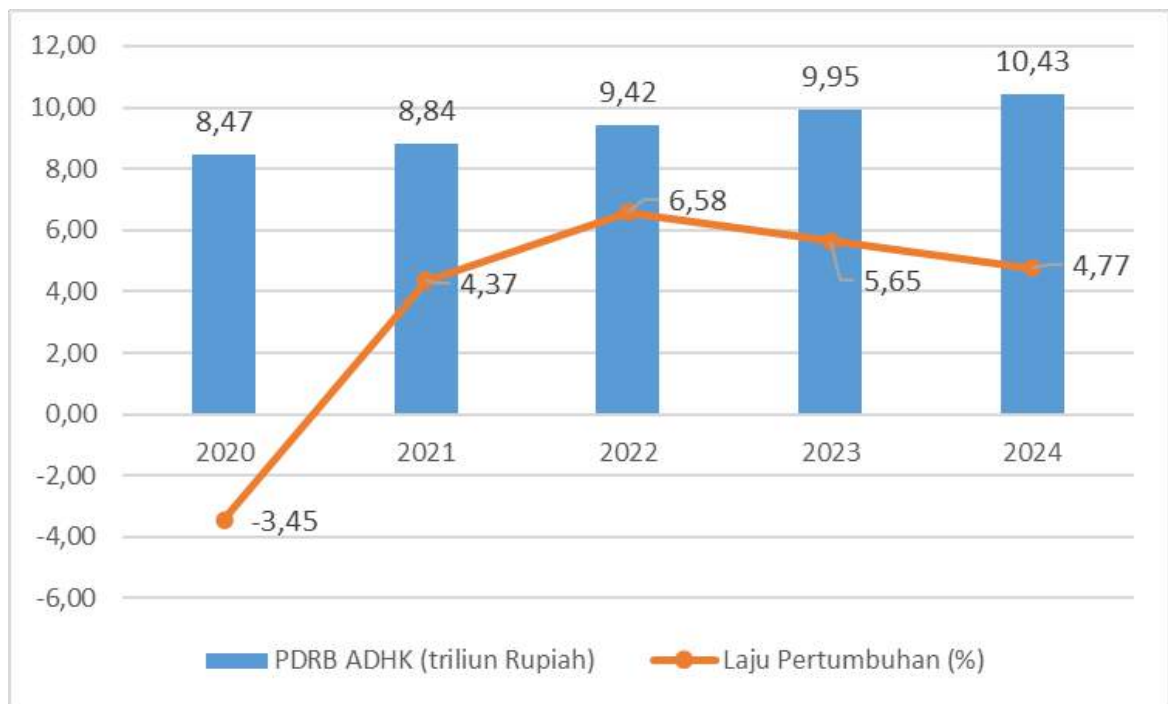
Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, terdapat beberapa komponen yang diperhatikan untuk mendapatkan inti permasalahan yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah. Berdasarkan analisis terhadap evaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan serta mempertimbangan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta konstelasi/dinamika regional dan nasional, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo dan dijadikan isu strategis yang menjadi fokus penanganan pada kegiatan pembangunan di tahun 2026. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah memerlukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu, masa kini, dan sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB digunakan sebagai salah satu indikator pengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, yang dihitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas harga berlaku memperhitungkan unsur perubahan harga (inflasi), sedangkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan faktor inflasi. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan keadaan perekonomian dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada suatu tahun dengan tahun sebelumnya akan menunjukkan indikator laju pertumbuhan ekonomi.

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010) pada tahun 2024 mencapai 10.426,23 miliar Rupiah naik 474,28 miliar dari tahun 2023 yang sebesar 9.951,95 miliar rupiah. Untuk melihat lebih jelas perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.45
Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 merupakan capaian yang tertinggi dengan nilai 6,58 persen. Pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan ini diantaranya dipengaruhi oleh pembangunan bandara baru. Sehingga hal ini berimplikasi pada tingginya pertumbuhan Sektor Konstruksi dan Sektor Transportasi dan Pergudangan. Pada tahun 2021 kinerja perekonomian Kulon Progo yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen, tahun 2022, kinerja perekonomian semakin meningkat di angka 6,57 persen. Namun pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,65 persen. Kemudian pada Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Kulon Progo kembali mengalami perlambatan sehingga menurun menjadi 4,77%.

Pemerataan ekonomi juga tidak terlepas dampaknya terhadap kemiskinan serta ketimpangan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 secara umum semakin kecil, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 18,01% dan kembali meningkat menjadi 18,38% pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 16,39% di tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 15,64% di tahun 2023. Sementara itu tingkat kemiskinan tahun 2024 menurun tipis menjadi 15,62%.

Menurut analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo, fluktuasi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan perubahan perekonomian di Kabupaten Kulon Progo antara lain: pandemi global Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku aktivitas ekonomi dan pendapatan penduduk. Masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (hampir miskin) jika pendapatannya tetap atau hanya meningkat sedikit sehingga akhirnya menjadi miskin. Secara umum kemiskinan tinggi berada di kawasan terisolir yaitu di kawasan lereng pegunungan dan pantai yang mempunyai sumberdaya rendah. Angka kemiskinan di Kabupaten

Kulon Progo masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan DIY yang pada tahun 2024 berada pada 10,83% dan persentase nasional pada 9,03%.

Fluktuasi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo juga banyak dipengaruhi oleh inflasi yang mengakibatkan meningkatnya garis kemiskinan secara signifikan pada tahun 2023 sebesar Rp416.870,00 naik dari tahun 2022 yang sebesar Rp381.666,00. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan per kapita per bulan. Garis kemiskinan untuk tahun 2024 sebesar Rp438.007 naik 21.137 dibandingkan dengan tahun 2023.

Gini Rasio merupakan salah satu metode untuk menunjukkan adanya ketimpangan atau tidak meratanya distribusi pendapatan/ pemerataan ekonomi. Angka Gini Rasio Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021 sebesar 0,367, pada tahun 2022 adalah 0,380 dan meningkat menjadi 0,402 pada tahun 2023. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan DIY yang pada tahun 2023 mencapai 0,449. Tahun 2023 pemerataan pendapatan di Kulon Progo mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 terlihat dari meningkatnya indeks gini. Sedangkan pada tahun 2024 nilai Gini Rasio membaik menjadi 0.373. Dengan kondisi masyarakat yang semakin sejahteranya/ terangkatnya maka akan mengurangi perbedaan/ gap pendapatan antar penduduk sehingga diharapkan pengentasan kemiskinan juga akan turut menurunkan gini rasio di daerah.

2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif

Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 adalah sebesar 76,18, angka ini meningkat 0,36 dari tahun 2023 dengan angka 75,82. Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo berada di bawah DIY yang pada tahun 2024 mencapai angka 81,62. Meskipun demikian Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada pada nilai 75,02.

Dimensi pembentuk IPM yakni dimensi pengetahuan, dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi standar hidup layak. Menurut analisis BPS, indikator usia harapan hidup pada dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Kulon Progo merupakan yang tertinggi di DIY, sedangkan pada dimensi pengetahuan capaian Kabupaten Kulon Progo masih tertinggal dibandingkan Kabupaten/Kota di DIY.

Disamping itu perlu juga dilakukan penguatan nilai budaya untuk memperkuat karakter dan identitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan peraturan daerah tentang Pendidikan Karakter dengan mengembangkan nilai-nilai pembentuk karakter bangsa berdasar nilai keagamaan, kebangsaan, kemartabatan dan kepramukaan. Pembangunan SDM masyarakat yang berbudaya ini diperlukan juga untuk menyiasati adanya dampak global beroperasinya BIY agar SDM di Kabupaten Kulon Progo tetap memegang teguh budaya lokal yang ada bahkan menjadikan budaya lokal sebagai daya tarik bagi siapa saja yang berkunjung di Kabupaten Kulon Progo. Dengan peningkatan kualitas SDM yang berkualitas dan berbudaya maka akan memperkuat modal kerja dan kesempatan warga masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Di sisi lain aparatur pemerintah di Kabupaten Kulon Progo perlu ditingkatkan kompetensi, kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya aparatur perlu ditambah dari sisi kuantitas untuk mencapai jumlah ideal, sedangkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perlu dilakukan untuk menjamin kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pelayanan publik.

3. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Setiap aktivitas masyarakat sedapat mungkin dilakukan menggunakan teknologi agar mempercepat dan mempermudah dalam mendapatkan pelayanan. Tata kelola pelayanan publik sebagai salah satu entitas output kegiatan pemerintahan sudah selangkahnya menjadi yang terdepan dalam melakukan inovasi agar jangkauan pelayanan maupun kualitas pelayanan menjadi semakin lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan berbasis teknologi informasi diharapkan akan muncul kemudahan, efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat luas. Penyederhanaan tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi ini harus menjadi fokus yang utama, mengingat keberadaan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo tentu akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, efektif, dan efisien. Tata kelola pelayanan publik dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah

4. Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Pelayanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kulon Progo menjadi perhatian serius sejak dibangunnya BIY dan juga persiapan pembangunan jalan tol. Pembangunan BIY dan aerotropolis ditingkatkan dari sisi pelayanan kesehatan dengan pembangunan RSUD Wates berstandar internasional. Kesenambungan antar moda transportasi umum di BIY juga menjadi perhatian serius dengan diaktifkan ulang nya stasiun Kedundang di Kapanewon Temon. Kesenambungan antar moda transportasi ini akan menunjang semakin berkembangnya transportasi massal yang saling terkoneksi atau *Transit Oriented Development (TOD)* di sekitar kawasan stasiun Wates dan Stasiun Kedundang.

Selain infrastruktur jalan, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal atau halte. Kewenangan Kabupaten untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini jumlahnya ada lima. Untuk menunjang fungsi terminal dibutuhkan halte sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pada pengelolaan irigasi, salah satu unsur penting yang harus terus dilakukan secara kontinyu adalah operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi agar fungsi irigasi dapat berlangsung dengan baik. Sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kegiatan tersebut, diperlukan penunjang infrastruktur irigasi yang mencukupi. Permasalahan dalam hal infrastruktur irigasi mulai dari data yang kurang update dan kurang tertata dengan baik, hingga ketersediaan SDM dan pembiayaan untuk pengelolaan irigasi yang masih terbatas.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air (Indeks Kualitas Air-IKA), udara (Indeks Kualitas Udara-IKU) dan tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang secara substantif merupakan indikator status atau mutu lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas.

Komponen kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas air

dihitung berdasarkan parameter Derajat keasaman (pH), Oksigen terlarut (DO), Kebutuhan oksigen biologi (BOD), Kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Padatan tersuspensi total (TSS), Nitrat (NO₃-N), Total fosfat (T-Phosphat) dan Fecal coliform (Fecal Coli). Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂. Sementara indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan luas tutupan lahan.

Nilai IKLH tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan dengan komponen IKA menurun dari 50,61 menjadi 44,24, IKU meningkat dari 90,74 menjadi 91,62, dan IKL sebesar 53,51. Penurunan nilai IKLH ini disebabkan karena turunnya nilai IKA dimana nilai IKA tahun 2024 dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan selama 2 (dua) periode yang mewakili musim penghujan dan musim kemarau, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi lebih rendah daripada tahun 2023 yang data pemantauannya diambil mewakili musim kemarau saja sepanjang tahun dimana pada tahun 2023 terjadinya *el nino* sehingga musim kemarau semakin panjang dan air sungai yang diambil sample nya belum menyerap limbah yang ada di dalam tanah karena curah hujan belum banyak.

5. Masih Tingginya Potensi Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum merupakan isu strategis yang muncul akibat perubahan sosial ekonomi yang cukup signifikan di masyarakat, terutama akibat dari pembangunan BIY dan rencana pembangunan jalan tol. Penanganan potensi kerawanan di masyarakat dapat dilakukan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Fokus dari pelaksanaan SPM ini adalah kegiatan pembinaan kegiatan politik daerah yang dilaksanakan 4 kali pada tahun 2022. Jumlah partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang telah dibina mencapai 139 organisasi atau seluruh organisasi yang ada di Kulon Progo telah menerima pembinaan. Dengan dibinanya seluruh organisasi tersebut, maka diharapkan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang tentram dan tertib dapat tercipta.

Potensi kerawanan dan gangguan ketertiban umum juga dapat terjadi dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Peraturan daerah yang langsung berpengaruh terhadap masyarakat dengan tujuan meningkatkan ketertiban justru dapat menjadi potensi pelanggaran dan kerawanan. Untuk meminimalisir hal ini, maka dilakukan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam SPM.

2.3.2 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2023-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun

permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendasak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2026 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas **Pengembangan Kawasan Aerotropolis** dengan sasaran daerah:

- a. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - a) Kualitas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih terbatas.
 - b) Sistem transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat belum optimal
 - c) Belum optimalnya infrastruktur pendukung Bandara Internasional Yogyakarta
 - d) Masih terbatasnya akses sarana air bersih, pengolahan limbah domestik dan pengelolaan sampah rumah tangga.
 - e) Infrastruktur saluran irigasi masih belum optimal
 - f) Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan seperti APILL, rambu, marka, *guardrail*, dan LPJU masih belum optimal
 - g) Belum optimalnya fasilitas prasarana, sarana, dan utilitas
 - h) Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal
- b. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - a) Dinamika pembangunan yang belum semuanya terwadahi dalam RTRW
 - b) Dinamika perubahan regulasi dan panjangnya proses penetapan RTRW
 - c) Masih berprosesnya penyusunan RDTR Kulon Progo Tengah dan RDTR Kulon Progo Selatan

2. Prioritas **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan sasaran daerah:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - (1) Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
 - (2) Kualitas pendidik dan tenaga pendidikan masih kurang.
 - (3) Masih adanya masyarakat yang belum melek huruf
 - (4) Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Kulon Progo
 - (5) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai SPM
- b. Meningkatnya prestasi generasi muda, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - (1) Masih rendahnya prestasi generasi muda dan olahraga
 - (2) Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan
 - (3) Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo
- c. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - (1) Derajat kesehatan masyarakat belum optimal
 - (2) Masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi;
 - (3) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - (4) Budaya makan ikan oleh masyarakat masih rendah
- d. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah, permasalahan yang dihadapi meliputi:

- (1) Belum optimalnya pengembangan/ pelestarian seni dan budaya serta pengembangan nilai-nilai luhur budaya.
- (2) Lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya
- (3) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan keragaman seni dan budaya

3. **Penanggulangan Kemiskinan**, Untuk melanjutkan penurunan kemiskinan ekstrem, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memprioritaskan hal tersebut, namun di dalamnya terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Data penerima bansos perlu perbaikan secara mandiri
- b. Diperlukan pembayaran Premi BPJS bagi warga miskin,
- c. Masih terbatasnya penerima beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin,
- d. Masih terdapat cukup banyak Rumah Tidak Layak Huni.

4. **Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah**, prioritas ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha, membina dan mengembangkan ekonomi dan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri namun demikian masih menghadapi permasalahan sebagai berikut:

- a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, pengetahuan, dan motivasi berwirausaha
- b. Akses dan kemampuan pemasaran UMKM masih terbatas
- c. Belum optimalnya kegiatan ekspor kerajinan
- d. Usaha pemberdayaan ekonomi perempuan belum optimal
- e. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pada kegiatan industri ekspor
- f. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMD dan lembaga keuangan
- g. Kurangnya daya tarik objek wisata yang mampu menarik wisatawan secara signifikan
- h. Pemasaran pariwisata yang belum optimal
- i. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata
- j. Masih kurangnya usaha jasa pariwisata yang bersertifikat
- k. Kemampuan pengelolaan BUMDes masih di bawah standar
- l. Belum optimalnya daya saing produk industri
- m. Masih banyaknya petani yang belum menjadi anggota kelompok tani
- n. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
- o. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani

5. Prioritas **Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- b. Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan-undangan di daerah;
- c. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- d. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur;
- e. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika kurang memadai;

- f. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing masing Perangkat Daerah belum merata;
 - g. Peran lembaga kemasyarakatan desa masih belum optimal dalam pembangunan
 - h. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - 1. Masih rendahnya kondisi sarana prasarana kebencanaan dalam rangka pemenuhan SPM
 - 2. Dampak reformasi birokrasi belum signifikan dalam mengungkit kinerja daerah
 - 3. Belum optimalnya upaya pengelolaan keuangan daerah
 - i. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, permasalahan yang dihadapi yaitu keberadaan PKL masih menempati lokasi fasilitas umum seperti trotoar, dan kawasan pedestrian alun-alun wates, sehingga dapat mengganggu ketertiban aktivitas umum.
6. Prioritas **Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berkelanjutan**, dengan sasaran meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Memiliki permasalahan sebagai berikut:
- a. Menurunnya kualitas dan kuantitas air
 - b. Menurunnya kualitas udara
 - c. Pengelolaan sampah belum optimal

2.3.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan pemerintah daerah yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2025 serta solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

1. Pendidikan

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan antara lain:

- a. Pemenuhan layanan pendidikan dasar terkait peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan belum optimal termasuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, fasilitasi pendidikan serta peningkatan literasi dan numerasi.
- b. kapasitas, kemampuan dan ketrampilan guru masih perlu ditingkatkan. Akan tetapi kompetensi pendidik juga belum memberikan daya dukung secara langsung pada IPM.

Sampai dengan tahun 2024, persentase guru yang bersertifikat pendidik baru mencapai 56,43%. Sedangkan guru yang memenuhi kualifikasi S1/ DIV mencapai 88,82%. Berdasarkan capaian tersebut maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas pendidik. Kendala yang dihadapi selama ini dari sisi motivasi tenaga pendidik yang memasuki/menjelang purna tugas, pada kondisi itu untuk meningkatkan kapasitasnya sangatlah sulit. Di sisi yang lain, selaras dengan kebijakan nasional, bahwa sertifikasi profesi dilakukan bertahap, tidak secara bersama atau dengan kuota tertentu, sehingga ada jeda juga ada jarak waktu yang membuat seluruh pendidik mengantri melakukan sertifikasi profesinya

- c. Penyediaan media pembelajaran dengan pemanfaatan TIK atau digitalisasi pembelajaran yang masih belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat
- d. Lunturnya pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang diakibatkan perkembangan global, kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum dan pembelajaran, serta perubahan nilai budaya dan tradisi

2. Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih dihadapi hingga tahun 2023 dapat diukur dengan tiga indikator yang merupakan gambaran dari keadaan derajat kesehatan masyarakat, yakni:

- a. angka kematian ibu,
- b. angka kematian bayi, dan
- c. angka harapan hidup.

Dari tiga indikator tersebut, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo merupakan angka tertinggi ke dua di DIY di bawah Kota Yogyakarta, akan tetapi masih terdapat kematian ibu dan kematian bayi yang membuat derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, kendala yang dihadapi adalah:

- Masih adanya keterlambatan pihak keluarga dalam mengambil keputusan untuk mencari pertolongan
- Belum optimalnya penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di rumah sakit
- Masih kurangnya kepedulian ibu dan pihak keluarga tentang bahaya ibu hamil risiko tinggi yang menyebabkan kematian ibu dan bayi.

Di samping hal di atas ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di sektor kesehatan yakni:

- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan baik di sektor primer, sekunder maupun tersier sehingga pelayanan kesehatan tidak optimal
- Masih minimnya sarana dan prasarana kesehatan dalam menangani berbagai penyakit baik menular maupun tidak menular
- Perlunya peningkatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama internal, lintas sektor maupun lintas wilayah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi:

- a. Meningkatkan edukasi pada ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi.
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran jejaring komunikasi petugas kesehatan dan lintas sektor melalui “Rindu KIA” dalam upaya meningkatkan pemantauan kesehatan bagi ibu dan bayi.
- c. Mengintegrasikan aplikasi pemantauan “BumilKu” dan “Matahatiku” supaya lebih komprehensif dalam melakukan pemantauannya.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil dengan cara melakukan perbaikan Manual Rujukan Maternal Neonatal guna meningkatkan pelayanan di Puskesmas, Puskesmas mampu PONED, Rumah Sakit non PONEK, maupun Rumah Sakit.
- e. Meningkatkan koordinasi intensif dengan Dokter Spesialis lainnya guna memantau kesehatan ibu selama kehamilan, saat persalinan sampai masa nifas

- f. Meningkatkan kemampuan pelayanan PONEK penanganan ibu hamil risiko tinggi.
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan dana Jampersal meliputi pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan pembiayaan persalinan bagi penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- h. Meningkatkan sinergitas tenaga kesehatan terutama tenaga bidan baik di pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta dalam penanganan ibu hamil berisiko tinggi.
- i. Meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam mendukung penanganan ibu hamil terutama bumil yang berisiko tinggi.

3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kulon Progo secara topografis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kawasan yaitu perbukitan, dataran, dan pesisir. Kondisi topografi tersebut berpengaruh pada perbedaan aksesibilitas wilayah. Secara umum, perkembangan dan aksesibilitas wilayah masih didominasi pada wilayah daratan (Wates, Pengasih, Sentolo, dan Lendah) dan pesisir (Temon, Panjatan, dan Galur). Daerah perbukitan yang kurang berkembang, selain disebabkan oleh faktor alam yang menyebabkan tingginya nilai infrastruktur juga disebabkan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai subyek pembangunan di daerah tersebut yang terbatas. Kawasan perbukitan yaitu di Kapanewon Samigaluh (Kalurahan Banjarsari, Purwoharjo dan Kebonharjo), dan Kapanewon Kokap (Kalurahan Kalirejo, Hargowilis, dan Hargotirto) merupakan kantong-kantong kemiskinan yang harus dibedah dengan infrastruktur yang bisa meningkatkan aksesibilitas untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian wilayah. Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan yang diperlukan kualitas pelayanan pada prasarana transportasi, jaringan irigasi, perumahan, air bersih, listrik dan teknologi telekomunikasi.

Kualitas jalan di Kabupaten Kulon Progo masih terbatas. Hal ini ditunjukkan pada Tahun 2020, terjadi penurunan kualitas jalan yang cukup signifikan dikarenakan adanya refocusing kegiatan untuk penganggulangan Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap secara keseluruhan menjadi 69,14%. Penurunan ini terjadi khususnya pada jalan Lokal Primer I yang mengalami penurunan lebih besar daripada jalan Lokal Primer II. Tahun 2021 seiring dengan peningkatan alokasi untuk pemeliharaan jalan, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I dan Lokal Primer II naik menjadi 72,01%. Pada tahun 2022 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I dan Lokal Primer II naik lagi menjadi 72,7%. Selain Jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer II, di Kabupaten Kulon Progo juga terbentang Jalan Nasional sepanjang 28,32 km dengan kondisi baik 16,38 km (57,84%) dan kondisi sedang 11,54 km (40,75%). Jalan Provinsi sepanjang 175,140 km kondisi baik 81,89 km (46,76%), kondisi sedang 37,27 km (21,28%).

Pada tahun 2023, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap untuk Lokal Primer I mengalami sedikit kenaikan dari 71,22% menjadi 71,82 %, sedangkan untuk ruas jalan Lokal primer II terjadi kenaikan kondisi mantap dari 74,09 % menjadi 74,88%.

Selain penyediaan jalan, diperlukan sistem transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah.

Selanjutnya dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang berlokasi di Kulon Progo, diperlukan sarana transportasi yang dapat mempercepat perjalanan manusia dan barang dari wilayah penumpang atau barang yang akan melalui BIY, maupun sebaliknya dari BIY ke wilayah di sekitar Yogyakarta. Selain dengan dibangun dan dioperasikannya Kereta Bandara, upaya meningkatkan aksesibilitas BIY juga direncanakan dengan membangun jalur Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo. Meskipun banyak manfaat yang akan diperoleh dengan rencana pembangunan tol tersebut, ada beberapa konsekuensi yang perlu diantisipasi. Pembangunan tol akan berpengaruh terhadap infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo, terutama infrastruktur jalan dan sumber daya air. Beberapa kemungkinan yang akan muncul sebagai dampak dari pembangunan jalan tol yaitu: tertutupnya akses masyarakat pada titik persinggungan antara Jalan Provinsi / Jalan Kabupaten/ Jalan Lingkungan dengan trase tol, terhambatnya saluran irigasi dan drainase pada titik persinggungannya dengan trase tol, peningkatan kerusakan jalan yang meliputi jalan di sekitar lokasi proyek maupun jalan yang dilalui oleh armada pengangkut bahan material, serta dampak sosial di masyarakat. Sebagai langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait mengenai rencana pengendalian dan penanganan dampak pembangunan Jalan Tol.

Selain itu, aspek infrastruktur lainnya yang masih terdapat permasalahan adalah penyediaan prasarana sarana utilitas (akses penyediaan sarana air bersih, pengolahan limbah domestik, pengelolaan sampah rumah tangga) yang masih terbatas jumlahnya. Pada Tahun 2023 cakupan layanan akses air bersih di Kabupaten Kulon Progo mencapai 100%. sebagian besar masyarakat Kulon Progo masih mengakses air bersih melalui jaringan non perpipaan yaitu sebesar 57,92% sedangkan untuk akses air bersih melalui jaringan perpipaan sebesar 42,08%. Masyarakat di wilayah selatan sebagian besar mendapatkan akses air bersih perpipaan dari PDAM dan Pamsimas. Sedangkan untuk di wilayah utara sebagian besar dilayani oleh SPAM Perdesaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat, yang juga tergabung dalam Pamaskarta. Salah satu kendala jaringan perpipaan PDAM belum dapat menjangkau permukiman yang berada di wilayah utara karena topografi kawasan yang ekstrim menyebabkan biaya teknis dan operasional untuk pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumahnya menjadi besar, sehingga perlu dukungan dari segi pendanaan diluar APBD Kabupaten, baik APBD Provinsi, Danais, APBN, hibah, maupun pendanaan lainnya.

Untuk peningkatan layanan air minum di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, Pemda DIY telah menginisiasi pembangunan SPAM Kamijoro dengan menggunakan skema KPBU. SPAM Kamijoro yang mengambil air baku dari Sungai Progo akan melayani kebutuhan air minum untuk wilayah Bantul dan Kulon Progo. Rencana penggunaan air minum di Kulon Progo yang berasal dari Bendung Kamijoro yaitu untuk melayani YIA dan Kawasan Peruntukan Industri Sentolo. Terkait

dengan pemanfaatan air dari SPAM Kamijoro tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi permasalahan yaitu besarnya kebutuhan anggaran untuk pembiayaan pembangunan jaringan distribusi utama menuju area layanan.

Kondisi saluran irigasi kewenangan kabupaten pada tahun 2023 sebesar 61,17% dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan 8,23%, rusak sedang 12% dan rusak berat 22,91%. Bila dibandingkan dengan kondisi saluran irigasi dibawah kewenangan provinsi dan pusat, saluran irigasi kewenangan kabupaten masih berada di bawahnya, terutama keberadaan saluran dengan kondisi rusak berat yang relatif banyak, saluran Irigasi yang masih berupa saluran tanah, sehingga perlu ditingkatkan upaya perbaikan, peningkatan menjadi saluran permanen dan pengembangannya, mengingat pentingnya infrastruktur irigasi dalam menopang pertanian dan swasembada pangan di Kulon Progo. Sektor pertanian yang merupakan soko guru perekonomian masyarakat secara luas harus diprioritaskan dengan membangun sinergi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan di sektor irigasi yaitu masih minimnya pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani pemakai air tentang fisik bangunan jaringan irigasi, adanya kompetisi pemanfaatan air antar sektor, penurunan ketahanan fisik dari prasarana pengendali banjir serta penurunan keberlanjutan dari prasarana jaringan irigasi. Dalam upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, komisi irigasi terkait, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Adapun tugas dari Komisi Irigasi antara lain merumuskan rencana kebijakan, rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi, memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi, ikut merumuskan rencana tata tanam, merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, memberi masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi, memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini masih mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kewenangan Provinsi, sedangkan jalan desa yang menjadi kewenangan Kalurahan dapat menjadi sasaran program Prasarana Sarana Utilitas.

Pada Sub Urusan Penataan Ruang, diketahui bahwa penataan ruang memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa wilayah yang baik. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengelolaan tata ruang yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang.

Berdasarkan pada keenam aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut, permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo saat ini adalah belum optimalnya aspek perencanaan tata ruang sehingga menyebabkan aspek – aspek yang lain juga belum bisa berjalan dengan optimal. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 – 2032 sebagaimana ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2012. Namun, dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo belum semuanya terwadahi dalam Perda tersebut dan saat ini Kabupaten Kulon Progo sedang dalam proses revisi RTRW. Beberapa permasalahan yang menyebabkan aspek perencanaan tata ruang belum berjalan dengan optimal adalah

a. Dinamika pembangunan yang belum semuanya terwadahi dalam RTRW

Dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo dalam 5 (lima) tahun belakangan ini cukup signifikan merubah arah pembangunan Kulon Progo antara lain keberadaan BIY, Kawasan Penyangga KSPN Borobudur, rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang merupakan rangkaian dari rencana pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo, pengembangan kawasan Aerotropolis, pembangunan SPAM Regional Kamijoro, rencana pembangunan Bendung Bener sebagai salah satu alternatif sumber air baku untuk Kabupaten Kulon Progo, rencana pembangunan TPST dan SPALDT Kawasan Aerotropolis, pembangunan jalur Temon – Borobudur (Jalur Bedah Menoreh), pembangunan jalur kereta api pendukung BIY serta pengembangan kawasan strategis budaya sosial Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten;

b. Dinamika perubahan regulasi dan panjangnya proses penetapan RTRW

Proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK) RTRW telah dimulai sejak Tahun 2016 dan dalam perjalanannya telah melewati dua kali pergantian regulasi yang terkait PK (penyesuaian terhadap Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2017 dan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021) dan dua kali pergantian regulasi terkait substansi dalam rangka penetapan RTRW (penyesuaian terhadap Permen ATR/BPN No.16 Tahun 2018 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021) sehingga Kabupaten Kulon Progo harus menyesuaikan kembali dokumen PK dan substansi RTRW. Hingga 2025 awal, capaian penyelesaian untuk proses penetapan revisi RTRW sedang dalam proses *updating* kelengkapan dokumen untuk keterangan kesesuaian substansi dan finalisasi substansi RTRW sebagai syarat untuk dapat masuk ke tahapan pembahasan lintas sektor di Kementerian ATR/BPN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi revisi RTRW;

c. Masih berprosesnya penyusunan beberapa RDTR

Sebagai langkah pendetailan terhadap rencana umum tata ruang kabupaten atau RTRW, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR ini nantinya merupakan dokumen tata ruang yang operasional terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) pada perijinan sehingga informasi terkait ruang untuk berinvestasi bisa langsung diperoleh melalui dokumen RDTR ini dan menjadi landasan bagi dikeluarkannya ijin berinvestasi di daerah. Dalam revisi RTRW Kulon Progo, terdapat 6 (enam) RDTR. Sampai dengan tahun 2025, sudah ada 2 (dua) RDTR yang telah ditetapkan, yaitu RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta melalui Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2023 dan RDTR Perkotaan Wates melalui Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2024. Empat RDTR lainnya masih dalam proses. Untuk RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur sedang proses Fasub Kementerian ATR,

sedangkan RDTR Kulon Progo Tengah sedang masuk Bimbingan Teknis Kementerian ATR. Untuk 2 (dua) RDTR lainnya yaitu RDTR KP Utara dan RDTR KP Selatan sedang dalam proses perbaikan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR No. 11 tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR No. 14 Tahun 2021.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Belum optimalnya fasilitas PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas) di perumahan dan kawasan permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada perumahan dan kawasan permukiman antara lain:

- (1) Terjadinya genangan air maupun banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, kondisi bangunan yang tidak memadai dan tidak terpelihara dengan baik;
- (2) Kemacetan lalu lintas disebabkan penanganan jaringan jalan yang tidak terpadu dengan kawasan sekitarnya;
- (3) Masih terbatasnya prasarana dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air bersih yang belum memadai dan merata, penyediaan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah yang belum ditangani secara terpadu, fasilitas PJU yang masih terbatas serta perlunya perbaikan kualitas jalan lingkungan dalam rangka memperlancar mobilitas penduduk.

Rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya dapat melaksanakan kegiatannya dengan nyaman. Berdasarkan hasil pendataan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, baseline jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 6.349 unit tersebar di 12 kapanewon (tabel 2.8) pada tahun 2024. Dengan intervensi dari berbagai pihak, jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan tiap tahunnya.

- b. Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal

Keberadaan kawasan permukiman kumuh terutama di wilayah perkotaan masih belum tertangani secara optimal. Selain permasalahan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat, timbulnya kekumuhan terutama di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani di bidang perumahan dan permukiman. Berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019 terdapat 293, 79 Ha kawasan kumuh yang tersebar di kecamatan Wates, Sentolo, Galur, Pengasih, dan Nanggulan yang perlu ditangani dan telah dilakukan penanganan. Pada Tahun 2020 terbit SK Bupati Nomor 416/A/2020 Tanggal 15 Desember 2020 yang menyatakan bahwa luas kawasan Kumuh di Kabupaten Kulon Progo adalah 151,78 Ha. Pada Tahun 2022 tidak terdapat pengurangan luasan kumuh sehingga sisa luasan kumuh adalah 77,51 Ha. Pada tahun 2023, dilakukan intervensi di 2 kalurahan yaitu Kalurahan Giripeni seluas 3,38 Ha dan di Kalurahan Wijimulyo seluas 1,5 Ha sehingga di tahun 2023 luasan kawasan kumuh yang tersisa adalah 72,63 Ha. Pada Tahun 2024, lokasi pengurangan kawasan kumuh Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 (berdasarkan SK Bupati Kulon Progo Nomor 416/A/2020) Pengurangan Luasan Kumuh tahun 2024 di Kalurahan Giripeni sebanyak 3,59 Ha dan Kalurahan Brosot 0,72 Ha dengan total sebanyak 4,31 Ha. Untuk Sisa Luasan Kumuh tahun 2024 dengan total sebanyak 68,32 Ha dengan rincian

Kelurahan Wates sebanyak 18,44 Ha, Kelurahan Bendungan sebanyak 12,8 Ha, Kelurahan Tawangsari sebanyak 18,74 Ha, Kelurahan Sendangsari sebanyak 9,21 Ha dan Kelurahan Wijimulyo sebanyak 9,75 Ha

5. Perhubungan

Beberapa permasalahan yang terjadi pada urusan perhubungan yaitu:

- 1) Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kulon Progo masih tinggi. Kecelakaan didominasi oleh kalangan produktif dan terpelajar. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang cara dan disiplin berlalu lintas.
- 2) Pembangunan di wilayah Kulon Progo saat ini semakin pesat, namun banyak pelaku usaha belum melengkapi usahanya dengan dokumen analisis dampak lalu lintas.
- 3) Penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal. Pemenuhan perlengkapan jalan berupa APILL, rambu lalu lintas, marka jalan, cermin tikungan, delineator, pagar pengaman jalan (guardrail) dan LPJU belum sesuai dengan yang seharusnya ada.
- 4) Keterbatasan infrastruktur informatika dalam mendukung sektor transportasi. Untuk itu diperlukan infrastruktur yang memiliki kemampuan lebih baik dan memiliki manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat umumnya dan terutama dalam mendukung kelancaran pergerakan internal dan eksternal penduduk/masyarakat baik barang, jasa, maupun data. Untuk menyelesaikan hal tersebut perlu dicari solusi untuk menyelesaikan hal tersebut dalam jangka panjang. Solusi bukan hanya menambah kapasitas jalan akan tetapi harus di dorong untuk mengimplementasikan *Intelligent Transportation System* (ITS) yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ATCS (*Area Traffic Control System*) dengan memanfaatkan teknologi *Traffic Light* terkini yang didukung dengan teknologi komunikasi dan informatika
- 5) Pemenuhan penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Fasilitas utama berupa Fasilitas tempat parkir kendaraan di Terminal Ngeplang, Sentolo kurang optimal, sehingga dipandang perlu untuk diperbaiki.
- 6) Melihat dari latar belakang tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Kulon Progo yg didominasi oleh kalangan remaja dan pelajar. Hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo. Diperlukan solusi yaitu penyediaan transportasi angkutan bagi pelajar di kalangan Kabupaten Kulon Progo yaitu keberadaan Bus Sekolah untuk menekan penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Selain penyediaan bus sekolah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mengajukan usulan angkutan rintisan dan angkutan KSPN yang diajukan kepada Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan. Adapun rintisan yang diusulkan saat ini ada 2 rute trayek angkutan rintisan dan 2 rute trayek KSPN. Untuk tahun 2027 juga mengusulkan melalui DanaIS untuk pemberdayaan operator angkutan wilayah Kalibawang dengan menggandeng koperasi angkutan PANDAWA yang terbentuk utk memberdayakan operator angkutan dengan skema pemberian subsidi angkutan kepada operator untuk melayani anak sekolah mulai dari rute terminal Ngeplang – Sentolo – Nanggulan – Kalibawang – Samigaluh, nantinya akan melewati 17 sekolah.
- 7) Setelah Pandemi Covid kepadatan transportasi mulai meningkat, seiring dengan banyaknya kendaraan bermotor yang memadati jalan raya. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor

sendiri tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana jalan raya sehingga terjadilah kemacetan lalu lintas. Kemacetan terutama terjadi berada di kawasan perkotaan Wates yang menjadi pusat perekonomian. Dimana area ruas jalan Wates terdapat kawasan pertokoan, tempat kuliner yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mendatangi ruas jalan Wates tersebut. Di depan kawasan pertokoan maupun kuliner digunakan untuk area parkir kendaraan bermotor yang berdekatan dengan tepi jalan raya sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kurangnya lahan parkir menjadikan perlunya solusi untuk menentukan lokasi kantong parkir di kawasan perkotaan wates. Sempitnya ruas jalan perkotaan wates menjadikan parkir tepi jalan umum menjadi tidak ideal lagi. Semestinya untuk area parkir dibuatkan kantong-kantong parkir.

- 8) Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat termasuk dikalangan terpelajar. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang cara dan disiplin berlalu lintas sehingga dibutuhkan contoh atau figur sebagai agen disiplin berlalu lintas dikalangan pelajar
- 9) Status jalan kabupaten di Kulon Progo adalah kelas III dimana konstruksinya hanya dapat menopang beban kendaraan dengan tonase tidak lebih dari 6 ton. Masih banyak kegiatan angkutan barang/ material yang melintas di jalan kabupaten dengan tonase melebihi yang sudah ditentukan sesuai kelas jalannya, dimana selain melanggar aturan juga memicu tingginya laju kerusakan jalan. Diperlukan peningkatan pengawasan dan penindakan (yustisi) terhadap kendaraan angkutan barang/ material yang melebihi tonase yang diperbolehkan.
- 10) Semakin banyaknya angkutan tambang yang beroperasi di beberapa kapanewon di Kabupaten Kulon Progo (8 kapanewon), serta adanya proyek rencana pembangunan jalan tol yang melewati Kabupaten Kulon Progo, dan juga rencana mulainya pengoperasian Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini tentunya menambah resiko keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya yang dapat berujung pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi
- 11) Masih banyaknya kendaraan angkutan barang/ umum yang menghindar dari pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan dan penindakan (yustisi) di lapangan. Banyak kendaraan angkutan barang/umum menghindar dari kegiatan operasi yustisi dengan cara mencari jalan lain yang tidak terawasi, selain itu juga banyak kendaraan angkutan barang/umum yang berhenti pada 500m - 1km sebelum lokasi operasi yustisi dan menunggu hingga operasi yustisi selesai beroperasi. Kondisi ini tentunya menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan angkutan barang/ umum menjadi tidak efektif karena masih banyak kendaraan angkutan barang/ umum
- 12) Dinas Perhubungan tidak memiliki gedung khusus untuk menyimpan alat-alat perlengkapan jalan maupun prasarana jalan (LPJU) baik yang kondisi masih baik maupun sudah rusak, sehingga penempatannya disekitar gedung kantor Dinas Perhubungan cukup mengganggu kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan kantor. Perlu kiranya dibangun gudang khusus penyimpanan alat/material perlengkapan dan prasarana jalan.

6. Lingkungan hidup

- a. Kualitas dan kuantitas air masih fluktuatif

Berdasarkan hasil uji kualitas air, capaian IKA Tahun 2024 berada dalam kategori “kurang” dan menurun dari tahun 2023. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2023 kondisi yang ada pada saat dilakukan pemantauan kualitas air sungai pada 2 (dua) periode tersebut semuanya pada kondisi musim kemarau sepanjang tahun. Sedangkan, pada tahun 2024 kondisi pemantauan air sungai yang dilakukan mewakili musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau kondisi polutan di sungai dimungkinkan mengalami pengendapan atau sedimentasi dan kualitas air sungai pada bagian atas dan tengah pada morfologi sungai dimungkinkan akan lebih baik daripada bagian bawah. Sedangkan, pada musim penghujan polutan di sungai akan mengalami turbulensi dan pencampuran, di mana akan meningkatkan tingkat kekeruhan air sungai. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab dan pengaruh untuk tingkat kualitas air sungai, di mana nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 yang data pemantauannya diambil mewakili musim penghujan dan kemarau, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi lebih rendah daripada tahun 2023 yang data pemantauannya diambil mewakili musim kemarau saja sepanjang tahun. Meskipun demikian, penyelidikan lebih lanjut secara holistik dan menyeluruh terhadap berbagai faktor dan variabel yang mempengaruhi kualitas air sungai pada daerah hulu sampai dengan hilir dapat menjadi penjelasan yang lebih memuaskan dan kompleks terkait dengan mekanisme aliran kualitas air sungai terhadap nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Sungai yang telah melebihi baku mutu lingkungan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2024 berada pada:

- A. Sungai Serang Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Phosphat*;
- B. Sungai Papah Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Total Phosphat*, dan *Fecal Coliform*;
- C. Sungai Papak Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Phosphat* dan *Fecal Coliform*;
- D. Sungai Sudu Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Total Phosphat*, dan *Fecal Coliform*;
- E. Sungai Nagung Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Phosphat*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, dan *Fecal Coliform*;
- F. Sungai Sumitro Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Phosphat*, Nitrat, dan *Fecal Coliform*;
- G. Sungai Tinalah Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Phosphat* dan *Fecal Coliform*;
- H. Sungai Ngrancah Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Total Phosphat*, dan *Fecal Coliform*;
- I. Sungai Pening Periode 1 dan 2 pada Parameter *Total Phosphat* dan *Fecal Coliform*.

Parameter yang melebihi baku mutu didominasi oleh parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Total Phosphat*, dan *Fecal Coliform*.

Sumber pencemar air sungai *Total Suspended Solid (TSS)* adalah erosi tanah atau kikisan tanah yang terbawa ke badan air. Selain itu, sumber pencemar *Total Suspended Solid (TSS)* pada air sungai lainnya dapat berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, pembuangan sampah, aktivitas transportasi, perubahan alamiah, dan penggunaan bahan kimia.

Sumber pencemar air sungai *Total Phosphat* bisa berasal dari sumber alami dan buatan manusia. Sumber alami *Total Phosphat* dapat berasal dari pelapukan batuan fosfat geologis, endapan atmosfer, dan pembusukan tanaman. Sumber buatan manusia *Total Phosphat* dapat berasal dari pupuk, kotoran hewan peliharaan, limpasan pertanian dan perkotaan, pembuangan limbah industri dan rumah tangga, serta sistem septik yang rusak atau kelebihan muatan.

Sumber pencemar air sungai *Fecal Coliform* dapat berasal dari limbah domestik, limbah pertanian, dan kotoran hewan. **Limbah domestik** dapat berasal dari: a) Limbah cair dari buangan manusia, seperti tinja dan urin; b) Limbah cair dari kegiatan rumah tangga, seperti mencuci, mandi, dan memasak; dan c) Limbah yang dibuang langsung ke sungai tanpa diolah. **Limbah pertanian** berasal dari sisa-sisa pupuk organik dari hasil pertanian yang masuk ke sungai irigasi. **Kotoran hewan** dapat berasal dari: a) Kotoran hewan yang mencemari air minum yang tidak didisinfeksi dengan baik; dan b) Kotoran hewan yang masuk ke sungai melalui pembuangan limbah langsung.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yaitu : (1) Membangun SPALDT kawasan dan menambah jumlah IPAL Comunal; (2) Pendampingan tata kelola SPALDT dan IPAL Comunal; (3) membangun embung di wilayah genangan banjir atau di perbukitan; (3) Penanaman pohon disekitar mata air; (5) Melakukan kajian penyebab menurunnya kualitas air; dan (6) Mendorong terbentuknya komunitas peduli lingkungan, dan melakukan pendampingan atau pembinaan terhadap komunitas yang sudah ada.

b. Pengelolaan sampah belum optimal

Berdasarkan hasil evaluasi jakstrada tentang kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 jumlah timbunan sampah sebesar 79,177.19 ton/tahun. Dari jumlah tersebut jumlah sampah yang terkelola sebesar 37,042.47 ton/tahun atau 46.78% yang terdiri dari kegiatan Pengurangan sampah sebesar 25,957.42 ton/tahun atau 32.78 % dan Penanganan Sampah sebesar 11,085.05 ton/tahun atau 14 %. Data tersebut sesuai dengan Neraca Pengelolaan Sampah tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo yang telah divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan data Neraca Pengelolaan Sampah tersebut pengelolaan sampah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Upaya Pengelolaan Sampah di hulu melalui kegiatan Pengurangan Sampah, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA. Pengurangan Sampah sudah melebihi target yang ditetapkan, namun untuk kegiatan Penanganan sampah belum memenuhi target yang ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan sampah yaitu: (1) Pembentukan atau penguatan KSM ditingkat Kalurahan minimal 1 (satu); (2) Pembentukan atau penguatan Bank Sampah & TPS3R ditingkat Kalurahan minimal 1 (satu) dengan dimulai dari Kalurahan yang paling ramai; (3) Penguatan kelembagaan atau manajemen sarana prasarana berupa sosialisasi, pendampingan, bimtek, dan penguatan sarpras di tingkat kalurahan; (4) Penguatan peran Pemerintah Kalurahan dari APBKAL; dan (5) Mendorong terbentuknya komunitas peduli lingkungan, dan melakukan pendampingan atau pembinaan terhadap komunitas yang sudah ada. (6) Terlaksananya Piloting Project Pengurangan Sampah Terintegrasi di 4 (empat) KSM. Piloting Project ini bagian dari pelaksanaan inovasi daerah “GEBER MERIAH” Gerakan

Bersama Sinergi Kolaborasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terintegrasi di Kabupaten Kulon Progo. Suatu gerakan bersama yang melibatkan semua stakeholder terkait dalam rangka mengelola sampah yg terintegrasi, terkonvergensi dari hulu sampai ke hilir.

7. Pertanahan

- a. Belum optimalnya data base tentang pemanfaatan lahan/ tanah.

Ketersediaan database pertanahan terkait objek dan subjek tanah, kelas, status dan titik koordinat lahan/tanah belum seluruhnya terinventarisir dan terkelola secara menyeluruh dan terpadu sehingga tak jarang memicu terjadinya sengketa tanah.

- b. Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pensertifikatan (proses penerbitan sertifikat) tanah warga.

Peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pensertifikatan tanah warga masih belum optimal. Selama ini berbagai program sertifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat lewat BPN (program Prona).

8. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan. Pada tahun 2023 rasio penduduk ber-KTP per satuan wajib KTP baru mencapai 99,32%, atau sejumlah 342.125 jiwa dari total penduduk wajib KTP 344.474 jiwa. Mengingat pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil diperlukan peran serta aktif masyarakat untuk kegiatan jemput bola agar kepemilikan dokumen kependudukan lebih meningkat.

- b. Masih kurangnya perangkat PC komputer untuk pengoperasian SIAK & Rekam Cetak KTP-el, diperlukan penggantian perangkat untuk Rekam & Cetak KTP el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Kapanewon se Kabupaten Kulon Progo. Dukungan terhadap sarana prasarana SIAK yang terus menerus dan berkelanjutan sangat dibutuhkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo sudah menerapkan SIAK Terpusat.

- c. Keterbatasan SDM untuk operasional pelayanan Adminduk. Penambahan personil untuk petugas pelayanan yang mempunyai kompetensi dan keahlian di Bidang Pencatatan Sipil, Kependudukan, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sangat diperlukan.

- d. Belum optimalnya pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil. Diperlukan tempat arsip dokumen hasil pelayanan Adminduk yang memadai. Kemampuan dalam pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil masih terbatas. Upaya yang dilakukan dengan melakukan digitalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara komprehensif tahun 2024 terdapat sebanyak 88 korban kekerasan. Telah dilakukan penanganan, pendampingan dan penjangkauan dan juga pencegahan perkawinan anak.

- b. Sulitnya mendeteksi kasus KDRT dan penelantaran anak kecuali yang dilaporkan. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

- c. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan. Ditambah dengan masih adanya kejahatan jalanan yang dilakukan anak, dan munculnya kerentanan TPPO baik sebagai lokasi asal, transit, maupun tujuan.
- d. Perlunya optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak dari pencegahan maupun penanganan KtPA dan dibutuhkan optimalisasi koordinasi lintas daerah terkait perlindungan perempuan dan anak khususnya penanganan KtPA maupun TPPO.
- e. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pasal 76 mengamanatkan bahwa kabupaten atau kota diwajibkan memiliki unit perlindungan perempuan dan anak. Untuk menindaklanjuti UU tersebut, maka Kabupaten Kulon Progo akan membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. Implementasi pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di OPD maupun kalurahan belum optimal. Dari 87 kalurahan baru 14 kalurahan yang diinisiasi sebagai kalurahan sadar gender. Belum semua OPD menyusun anggaran yang dilampiri dengan analisa Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
- g. Usaha pemberdayaan ekonomi perempuan seperti Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera), dan Perempuan Pelaku Industri Rumahan belum optimal dari segi kualitas produk, pengemasan, legalitas usaha, maupun promosi pemasaran.

10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adanya persepsi di kalangan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya usia 45 tahun keatas merasa sudah tidak produktif lagi sehingga enggan menggunakan alat kontrasepsi modern. Kecenderungannya Pasangan Usia Subur menggunakan kontrasepsi tradisional (KB alamiah) yang menyebabkan prevalensi KB aktif menurun. Hal ini terbukti dengan *total fertility rate* (TFR) yang angkanya 1,48 pada tahun 2023 menurun menjadi 1,27 pada tahun 2024

11. Sosial

- a. Angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 masih tergolong tinggi dengan capaian 15,62%, turun sedikit dari tahun 2023 yakni 15,64%.
- b. Data penerima bansos perlu perbaikan secara mandiri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemeringkatan warga miskin yang menjadi sasaran bantuan sosial. Perbaikan yang mungkin dilakukan adalah dengan meningkatkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kapanewon dan tingkat kalurahan/ kelurahan. Peran TKPK Kapanewon dan Kalurahan dalam pendataan adalah dengan mengoptimalkan musyawarah kalurahan dan kalurahan dalam pembahasan data penerima bantuan sosial.
- c. Pembiayaan urusan sosial baik logistik kebencanaan, konsumsi piket tagana, dan sarana prasarana pendukung layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) belum terbiayai sepenuhnya dari APBD.

12. Tenaga Kerja

- a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia diantaranya minimnya ketrampilan/keahlian, penguasaan teknologi dan masih rendahnya tingkat pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah dengan melaksanakan program unggulan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja.

b. Rendahnya daya juang tenaga kerja terhadap kesempatan kerja

Daya juang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya tenaga kerja yang sudah bekerja namun lebih memilih untuk tidak meneruskan pekerjaannya dengan alasan yang kurang tepat seperti jam kerja yang dianggap terlalu lama, harus mengikuti aturan perusahaan, dan lainnya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya juang tenaga kerja adalah dengan melaksanakan kegiatan pelatihan AMT (*Achievement Motivation Training*) bagi para pencari kerja

c. Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen.

Sebagian perusahaan masih kurang tertib dalam melaksanakan norma ketenagakerjaan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan intensifikasi pengawasan terhadap perusahaan dalam rangka meminimalkan pelanggaran norma ketenagakerjaan.

d. Masih kurangnya kesesuaian antara kebutuhan (kesempatan kerja) dengan ketersediaan tenaga kerja.

Peluang kerja / kesempatan kerja yang ada dengan kualifikasi tertentu belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Solusi pemecahan masalah ini adalah dengan mendorong kepada lembaga pendidikan untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dirintis sehingga terwujud *link and match* antara output lembaga pendidikan dengan kualifikasi/kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan industri/perusahaan.

13. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Semangat jiwa wirausaha masih rendah

Semangat jiwa wirausaha yang masih rendah dapat dilihat dari menurunnya jumlah wirausaha baru pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah UMKM pada tahun 2024 sebanyak 52.877 unit usaha, atau bertambah sebanyak 872 unit usaha jika dibandingkan dengan jumlah UMKM pada tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah UMKM sebanyak 52.005 unit usaha, jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka bertambah sebesar 6.973 unit usaha. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah UMKM tahun 2024 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah UMKM tahun 2023. Penyebab menurunnya peningkatan jumlah UMKM ini salah satunya adalah kurang tertariknya generasi muda terhadap sektor pertanian. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB di Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil pertanian dapat diolah menjadi beraneka ragam olahan baik berupa kuliner maupun non kuliner.

Hampir semua produk UMKM Kulon Progo adalah olahan dari hasil pertanian. Sampai dengan saat ini, keanekaragaman terhadap hasil pertanian di Kabupaten Kulon Progo dirasa sudah cukup tinggi, namun masih kurang optimal karena belum memiliki ciri khas yang pasti yang menjadi daya tarik tersendiri dan produk yang dihasilkan sebagian besar bukan merupakan produk kebutuhan sehari-hari yang sangat dibutuhkan. Setiap wilayah di Kulon Progo menghasilkan hasil pertanian yang berbeda beda, dimana setiap hasil pertanian dapat diolah menjadi berbagai olahan yang memiliki daya jual dan permintaan yang tinggi. Belum optimalnya produk di Kulon Progo dibalik potensi yang sebenarnya besar ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kreatifitas dan inovasi oleh UMKM yang ada di Kulon Progo, dimana generasi muda diharapkan mampu membaca peluang dengan berbagai kekreatifan dan inovasi yang dimiliki.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada ini dapat dilakukan berbagai pelatihan terhadap UMKM sesuai dengan sektor potensial yang dihasilkan oleh setiap wilayah masing-masing. Dengan keberadaan PLUT dan telah beroperasionalnya PLUT, pelatihan dapat dilaksanakan di PLUT dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan. Disamping itu, PLUT juga memfasilitasi pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya..

- b. Belum optimalnya kualitas dan legalitas produk UMKM serta masih terbatasnya akses dan kemampuan pemasaran UMKM baik offline maupun online

Berdasarkan data UMKM SIDT tahun 2022, dimana dari jumlah UMKM yang ada sebanyak 42.267 terdapat 40.428 usaha yang belum memiliki legalitas usaha berupa NIB. Artinya, terdapat 95,65% UMKM di Kulon Progo yang belum berlegalitas. Hal ini menunjukkan betapa sangat rendahnya legalitas UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Bukan hanya legalitas, kualitas produk lokal UMKM Kulon Progo sampai dengan saat ini masih banyak yang belum memenuhi standar pengemasan maupun kesesuaian produk dengan harga. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan kurasi produk UMKM yang dilaksanakan pada tahun 2024. Kegiatan kurasi merupakan proses menilai dan mengolah produk sesuai dengan standar tertentu. Pada tahun 2024 kurasi produk lokal UMKM Kulon Progo dilakukan terhadap 150 UMKM, dari 150 UMKM yang dikurasi tersebut terdapat 86 UMKM yang belum lolos kurasi dan 64 UMKM telah lolos kurasi. Lebih dari 50% UMKM yang mengikuti kurasi belum memenuhi standar baik secara legalitas, pengemasan maupun kesesuaian produk dengan harga.

Disisi lain, semakin berkembangnya teknologi menuntut ataupun mengharuskan pelaku usaha untuk lebih menguasai digitalisasi. Pengetahuan mengenai digital

marketing atau pemasaran secara online pada era digitalisasi ini sangat dibutuhkan. Digital marketing merupakan salah satu model pemasaran yang efektif dan efisien di tengah perubahan teknologi yang cepat dan semakin masif. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak berkembang secara bersamaan, dimana masih banyak UMKM Kulon Progo yang belum menguasai teknologi digital. Tidak hanya pada digital marketing, UMKM Kulon Progo juga masih kesulitan dalam memasarkan produknya secara offline.

Oleh karena itu diperlukan pendampingan yang lebih oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM dalam fasilitasi terhadap kualitas, legalitas maupun pemasaran kepada UMKM baik secara offline maupun online.

c. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap akses permodalan

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap akses permodalan ini dapat dilihat dari program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu berupa subsidi bunga pinjaman terhadap pelaku usaha mikro. Dari anggaran yang disiapkan sebanyak 1.155.164.000 dengan target 725 pelaku usaha mikro terealisasi sebesar 703.252.500 dengan jumlah pelaku usaha mikro yang mengakses sebanyak 946 pelaku usaha. Lebih banyaknya pelaku usaha mikro yang mengakses pinjaman dari target yang telah ditentukan menunjukkan perlunya dilakukan fasilitasi berupa sosialisasi secara terus menerus setiap tahunnya terhadap UMKM terkait pengetahuan akses permodalan dari berbagai lembaga pemberi pinjaman baik dari perbankan/BUMN/BUMD.

d. Lemahnya manajemen kelembagaan koperasi

Masih lemahnya manajemen kelembagaan koperasi ditandai dengan menurunnya jumlah koperasi aktif pada tahun 2024 sebanyak 6 koperasi. Selain itu koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2025 atas tutup buku tahun 2024 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2024 atas tutup buku tahun 2023. Dimana koperasi yang RAT pada tahun 2025 sejumlah 151 dan tahun 2024 sejumlah 158 koperasi. Jumlah koperasi sehat juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlah koperasi sehat sebanyak 48 koperasi dari 128 koperasi yang dinilai, sedangkan pada tahun 2024 jumlah koperasi sehat hanya sebanyak 15 koperasi dari 120 koperasi yang dinilai. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemahaman atau minat tentang perkoperasian. Selain itu, faktor usia SDM yang sudah lanjut usia juga berpengaruh dalam hal pengaturan manajemen dan kelembagaan perkoperasian.

Solusi untuk mengatasi permasalahan adalah peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, peningkatan pengawasan kepada koperasi, dan peningkatan kapasitas SDM koperasi dengan melakukan sosialisasi maupun pendampingan terhadap koperasi terutama koperasi sektor riil

14. Penanaman Modal

a. Kulon Progo tidak menarik di mata investor

Kabupaten Kulon Progo seringkali dianggap tidak menarik di mata investor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan investor kurang tertarik untuk berinvestasi di Kulon Progo, antara lain: harga tanah yang terlalu tinggi dibanding daerah sekitarnya, sulit mencari lahan yang luas atau lahan dalam bentuk hamparan, seringkali lokasi yang diminati oleh investor terbentur dengan peraturan (LSD dan LP2B), topografi yang masih berbukit mengakibatkan biaya land clearing tinggi, masyarakat di kawasan investasi tidak ramah dengan investor, serta sarana dan prasarana di kawasan peruntukan investasi masih belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk melihat potensi investasi yang sesuai serta meningkatkan sarana prasarana pendukung. Solusi jangka panjang yang dapat diterapkan adalah bank tanah milik pemda

b. Belum optimalnya promosi investasi

Media promosi sebagai langkah awal meningkatkan kepeminatan investor. Dirasa masih belum optimal. Promosi yang dilakukan saat ini masih terbatas pada penyediaan booklet dan leaflet serta masih minimnya jumlah promosi melalui media luar ruang. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi melalui berbagai media, tidak hanya terbatas pada media offline namun juga media online seperti media sosial.

c. Kajian IPRO yang masih terbatas

Dengan telah disepakatinya proses RDTR kawasan bandara pada lintas sektor yang pada saat ini dalam proses pengesahan oleh Pemerintah Pusat, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian terhadap potensi dan peluang investasi kawasan aerotropolis untuk menarik calon investor. Pada saat ini kajian investasi yang ready to offer atau IPRO sebagai media informasi investasi yang informatif dan implementatif masih sangat terbatas. Sehingga Pemerintah Daerah DIY tidak dapat membantu mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ada, karena syarat untuk dapat dipromosikan merupakan kajian investasi yang sudah IPRO.

Disisi lain, dengan adanya kajian IPRO akan memberikan kemudahan kepada calon investor untuk menentukan pilihan investasi, hal ini disebabkan investor menginginkan kepastian proyek investasi. Solusi yang diberikan adalah pelaksanaan kajian

pengembangan investasi baik di Kawasan Aerotropolis maupun kawasan potensial investasi lainnya.

d. Belum solidnya kelembagaan asosiasi pelaku usaha

Belum solidnya kelembagaan asosiasi pelaku usaha mengakibatkan kontribusi dalam membantu percepatan investasi belum optimal. Solusi yang diberikan adalah perlunya forum investasi sebagai media optimalisasi peran asosiasi sebagai wadah dan motor penggerak bagi seluruh anggota profesi serta diharapkan mampu memperkuat kolaborasi asosiasi dan pemerintah. Selain itu perlu dilaksanakan pengawalan percepatan realisasi investasi. Dalam rangka percepatan realisasi investasi telah dibentuk Tim Percepatan Investasi Daerah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 285/A/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 3 Agustus 2020. Tugas Tim Percepatan Investasi Daerah antara lain adalah: merumuskan kebijakan investasi di Kabupaten Kulon Progo, memberikan pertimbangan atau masukan tentang investasi yang masuk ke Kabupaten Kulon Progo kepada bupati, mengoordinasikan petunjuk dan arahan bupati serta menginisiasi dan menyusun terobosan percepatan realisasi investasi, melakukan kajian dan analisis permasalahan/ kendala yang dihadapi investor, mengoordinasikan penyelesaian permasalahan/ kendala untuk percepatan investasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

15. Kebudayaan

Untuk mendukung terbentuknya karakter Sumber Daya Manusia yang berbudaya maka diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya pengembangan/ pelestarian seni dan budaya termasuk kebudayaan lokal
Permasalahan tersebut terjadi karena dengan berbagai macam jenis dan kelompok kesenian yang ada, baru beberapa yang bisa menjadi unggulan dan kelompok yang aktif sangat tergantung pada dukungan pemerintah. Implementasi nilai-nilai luhur budaya belum sepenuhnya menjadi perhatian dari masyarakat. Diperlukan dukungan dari lintas sektor untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut. Dukungan dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan digunakan untuk pelestarian seni dan tradisi, pertunjukan seni khas Kulon Progo, dan pengelolaan Taman Budaya Kulon Progo. Diharapkan ke depan terdapat pengembangan wisata berbasis budaya.
- b. Lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya menjadi permasalahan tersendiri.
Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, masih kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi terhadap pelestarian dan perlindungan cagar budaya akan mempersulit tercapainya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya. Dari dua permasalahan tersebut diatas maka perlu diambil langkah-langkah ke depan agar peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya,

adat istiadat dan tradisi semakin terwujud dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi manusia yang profesional, berkarakter dan berbudaya.

Jumlah desa/ kelurahan/ kalurahan budaya dan rintisan desa/ kelurahan/ kalurahan budaya sampai dengan tahun 2024 ada 21 desa/ kelurahan/ kalurahan budaya dan 36 rintisan desa/ kelurahan/ kalurahan budaya kategori berkembang dan 31 rintisan desa/ kelurahan/ kalurahan budaya kategori tumbuh dari 87 kalurahan. Dari rintisan kalurahan budaya kategori tumbuh menjadi rintisan kalurahan budaya kategori berkembang perlu adanya kriteria penilaian yang harus dipenuhi, begitupun dari rintisan kalurahan budaya kategori berkembang menjadi kalurahan budaya. Sehingga perlu pendampingan yang cukup baik guna meningkatkan status budaya pada suatu kalurahan, termasuk pendampingan terhadap grup grup kesenian. Masih banyak grup kesenian yang belum melaksanakan kegiatan secara rutin dan memiliki kelengkapan administratif. Belum optimalnya perawatan peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) dan kelestariannya.

Dari jumlah warisan budaya benda di Kabupaten Kulon Progo yang terinventarisir sebanyak 397 buah, pada tahun 2024 ada 206 buah yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati. Untuk itu perlu dilakukan upaya pelestarian cagar budaya. Belum dimilikinya museum sebagai wahana pengamanan peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*).

- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan keragaman seni dan budaya. Kedepan akan lebih diprioritaskan pada pendampingan agar bisa ada kemandirian di masyarakat dalam mengembangkan keragaman seni dan budaya. Sampai dengan tahun 2024 ada 1.553 grup kesenian.

16. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Upaya peningkatan peran serta dan kapasitas pemuda dalam pembangunan bangsa masih belum optimal.

Organisasi pemuda yang aktif ada 19 organisasi. Kegiatan kepemudaan yang selama ini dilakukan melalui Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), maupun kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda Indonesia, maupun kegiatan lainnya seperti: kegiatan anti narkoba, kewirausahaan, ataupun kepemimpinan.

- b. Peningkatan prestasi dan penambahan talent pool / data base bagi atlet berprestasi masih belum optimal.

Pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Tahun 2022, perolehan medali emas sebanyak 31 medali, medali perak sebanyak 46 medali, dan medali perunggu 91 medali. PORDA selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Sedangkan perolehan semua medali dalam event olahraga pelajar dan umum pada tahun 2024 sebanyak 129 medali.

- c. Pemenuhan Sarana dan prasarana olahraga belum optimal dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Gedung olahraga yang dimiliki sebanyak 92 unit, dan sarana olahraga sebanyak 1.193 unit, jumlah klub olahraga 173 klub. Jumlah gedung dan sarana olahraga ini belum sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo, sehingga diperlukan sebuah kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhannya

17. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Makin tingginya kuantitas maupun kualitas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perkada dengan variasi pelanggaran yang makin beragam.
Ke depan akan ditingkatkan kerjasama lintas sektor, antara pemerintah dan masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan. Belum optimalnya pemenuhan SPM layanan dasar yang berkaitan dengan warga yang terdampak akibat penegakan perda/ perkada
- b. Belum optimalnya kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Hal ini dapat dilihat pada kesertaan masyarakat dalam Linmas yang dari tahun ke tahun belum ada kenaikan yang signifikan. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya fungsi linmas. serta pengadaan seragam linmas.
- c. Masih adanya aktivitas yang meresahkan masyarakat (kejahatan jalanan, begal, dan tawuran pelajar)
Maka diperlukan upaya koordinasi lintas sektor (Polres, Kodim, tokoh masyarakat) dan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai antisipasi dini. Sinergitas lintas sektor dalam cipta kondisi wilayah sangat diperlukan guna menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- d. Secara umum, permasalahan pada substansi kebencanaan adalah pada masih rendahnya kondisi sarana dan prasarana mulai dari bangunan kantor, kebutuhan pemenuhan SPM pos pemadam kebakaran yang seharusnya ada di 12 kapanewon namun baru ada di Wates dan Nanggulan, kebutuhan peningkatan sistem informasi kebencanaan, dan kebutuhan peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan pusdalops yang masih rendah.
- e. Selain sarana prasarana, dalam mitigasi bencana dibutuhkan juga kajian penyusunan dokumen rencana kontinjensi seperti kebutuhan pasca bencana (jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) untuk setiap jenis bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Kulon Progo.

18. Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan pelayanan publik belum bisa sepenuhnya optimal disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- (1) Faktor SDM pelaksana. SDM adalah faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari sisi kuantitas, adanya kebijakan moratorium menyebabkan jumlah SDM saat ini jauh dari jumlah ideal pastinya akan berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, dari sisi kualitas bahwa belum semua SDM yang ada memahami sepenuhnya tentang konsep pelayanan publik yang seharusnya diaplikasikan.
- (2) Perubahan kebijakan yang dinamis berdampak terhadap penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh kategori BB dengan nilai 78,05. Perolehan nilai ini meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yaitu 75,24. Pada tahun 2023, Pemkab Kulon Progo berhasil mencapai nilai indeks 83,00 atau kategori A. Perolehan nilai ini merupakan penjumlahan antara nilai RB General sebesar 72,58 dengan nilai RB Tematik sebesar 10,42. Nilai tahun 2023 ini tidak dapat diperbandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya tidak ada penilaian RB Tematik. Pada tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,04 dengan komponen penilaian RB General sebesar 78,83 dan RB Tematik sebesar 8,21. Indeks RB tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 (perolehan Indeks RB 83,00). Penilaian Indeks RB tahun 2024 menggunakan 34 komponen, yang terdiri atas 24 komponen RB General dan 10 komponen RB Tematik.

Secara umum, penilaian ini menunjukkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik, namun masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- (4) Dampak reformasi birokrasi belum signifikan dalam menyelesaikan isu strategis dan mengungkit kinerja daerah, perlunya updating secara berkala mengenai kebijakan-kebijakan yang menghambat kinerja organisasi, dan penguatan atas sistem manajemen SDM yang belum sepenuhnya optimal.

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal.

- a. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya serta masih rendah kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu instrumen dalam mengukur tingkat/indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Hasil survei menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai IKM. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey dari Tahun 2019 dengan nilai IKM sebesar 82,96 dan untuk capaian IKM Tahun 2020 sebesar 84,12. Pada Tahun 2021 capaian IKM mengalami penurunan menjadi 82,49 hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 menggunakan 12 indikator penilaian sedangkan pada Tahun 2021 menggunakan 9 indikator penilaian (sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017), selain itu pelayanan di masa pandemi bisa mempengaruhi persepsi penilaian dari masyarakat. Pada tahun 2022, capaian IKM kembali mengalami peningkatan yaitu pada nilai 83,268 dan pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 85,634, kemudian tahun 2024 naik lagi menjadi 86,797.

- (5) Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Indikasi permasalahan ini adalah adanya tren temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dimungkinkan karena faktor implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum optimal. Keterbatasan pemahaman SDM atas urgensi SPIP dan implementasinya menjadi faktor penyebab permasalahan ini. Hal ini ditunjang dengan kondisi SDM terbatas dengan beban tugas *multitasking* yang dialami oleh sebagian besar OPD.

Dari permasalahan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah maupun belum optimalnya kualitas pelayanan publik, apabila tidak direncanakan dan ditindaklanjuti dengan baik akan berdampak pada buruknya tata kelola pemerintah daerah.

- b. Untuk melakukan transformasi sebagaimana mandat presiden tentang reformasi birokrasi, ada tiga poin yang perlu diperhatikan untuk melaksanakan arahan tersebut, yaitu penyetaraan jabatan, perubahan struktur organisasi, dan transformasi sistem kerja yang didukung oleh SPBE. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yaitu:

(1) Kelengkapan jabatan fungsional masih dalam proses penyesuaian, hal ini akibat dari ketentuan yang mengaturnya, yaitu Permen PAN & RB no 1 tahun 2023 yang baru saja terbit.

(2) Peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat yang masih tumpang tindih.

- (6) Belum optimalnya upaya pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu *memperoleh* WTP berturut-turut mulai tahun 2013. Hal ini perlu dipertahankan melalui upaya tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan aset daerah. Meskipun demikian belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah (sebagaimana tabel 2.220) akan menimbulkan keterbatasan dalam kemampuan keuangan daerah untuk mampu membiayai belanja pembangunan.

Selain itu dinamika kebijakan pemerintah seperti ketentuan pengelolaan BUMD, Dana transfer, dan Aset serta dinamika implementasi penganggaran dari OPD turut menjadi penyumbang permasalahan ini. Peluang peningkatan pendapatan daerah masih terbuka melalui beberapa sumber seperti pajak dan retribusi serta hasil Perusahaan Milik Daerah dan *Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sehingga strategi untuk menggali potensi potensi baru pendapatan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah, meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan BUMD serta meningkatkan investasi daerah, perlu untuk dikedepankan melalui upaya-upaya yang inovatif.*

Telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah daerah diminta untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah untuk menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam penyusunannya selain mencermati amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, relevansi muatan materi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ada (*existing*), juga mencermati Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan dinamika kebutuhan daerah. Ditargetkan pada tahun 2022 masuk Propemperda 2022 dan diundangkan pada akhir tahun 2023.

- (7) Keterbatasan dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dikarenakan belum lengkapnya aturan turunannya.

Beberapa peraturan perundang-undangan belum bisa dilaksanakan karena aturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis belum ada sehingga belum dapat *diimplementasikan*.

Keterlambatan terbitnya regulasi teknis perencanaan tahunan sehingga menghambat proses perencanaan tahunan.

- c. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMD dan Lembaga Keuangan baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Kurangnya kapasitas bisa dilihat dari kurangnya ketaatan dan ketertiban pengelola terhadap *peraturan* yang berlaku. Solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola Badan Usaha Daerah dan Lembaga Keuangan Desa.

- d. Belum optimalnya pengendalian dan pemantauan harga kebutuhan pokok strategis. Solusi yang ditempuh pengendalian dan pemantauan harga kebutuhan pokok strategis. Hal ini masih dapat dilihat dari fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan.

- e. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas produk kebijakan bidang perekonomian.

Produk-produk kebijakan bidang perekonomian masih sangat sederhana dan kurang komprehensif dalam menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan di bidang perekonomian. Hal tersebut disebabkan belum terlibatnya seluruh pihak pemangku kepentingan, antara lain akademisi/pakar yang relevan dan kapabel di bidang perekonomian. *Langkah* yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan bidang perekonomian. Misalnya regulasi/kebijakan pemanfaatan dan pengembangan bahan pangan lokal dari aspek budidaya (*on-farm*), pengolahan pasca panen dan pemasaran (*off-farm*). Perlunya regulasi penggunaan produk lokal.

19. Pangan

- a. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

Pada tahun 2024 panganekaragaman dan keamanan pangan dengan indikator pencapaian skor pola pangan harapan sebesar 93,77. Angka ini masih di bawah standar konsumsi pangan yang beragam bergizi dan seimbang dan aman yaitu 100. Untuk mencapai angka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di tingkat kabupaten untuk ibu – ibu anggota KWT (Kelompok Wanita Tani).
- Peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan dengan fasilitasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan ini merupakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dengan menanam berbagai macam komoditas pangan. Fasilitasi sebanyak 11 KWT untuk optimalisasi lahan pekarangan beserta bimbingan teknis optimalisasi lahan pekarangan di tahun 2024
- Capaian ketersediaan energi pada tahun 2024 sebesar 2.949 kkal/kap/hari. Sedangkan capaian ketersediaan protein adalah 92,57 gr/kap/hr dan capaian ketersediaan energi dan protein 2020 – 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 2.108 Bab II
- Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Kulon Progo 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.108 Bab II.

- b. Belum terpenuhinya cadangan pangan pemerintah.

Cadangan pangan pemerintah ideal di Kulon Progo berdasarkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota), serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo no 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah sebesar 120 ton. Namun sampai dengan Tahun 2024 cadangan pangan pemerintah daerah baru mencapai 32,92 ton. Pada Tahun 2023 telah dianggarkan untuk cadangan pangan sebesar 9 ton beras dan ke depan terus akan dianggarkan untuk pemenuhan stok cadangan pangan

- c. Masih banyaknya petani yang belum menjadi anggota kelompok tani.

Pada tahun 2024 persentase petani yang sudah menjadi anggota kelompok tani meningkat dari 55,58% menjadi 55,81%, dengan ini penyuluh memiliki peran penting untuk mendorong petani untuk menjadi anggota kelompok tani. Keberhasilan penyuluh dalam meningkatkan jumlah petani yang masuk menjadi anggota kelompok tani/ kelompok wanita tani karena optimalisasi SDM penyuluh lapangan, termasuk penyuluh swadaya di masyarakat..

20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Peran bumdes dan lembaga kemasyarakatan desa masih belum optimal terhadap pembangunan.
- b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintah kalurahan.

21. Statistik

- a. Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan

Pengelolaan data di perangkat daerah dan provinsi menuju Satu Data Indonesia harus dilakukan pemetaan dan pengisian data. Data sektoral yang dikelola belum mampu dikelompokkan berdasarkan wilayah kapanewon. Integrasi dengan aplikasi "Dataku" DIY telah berhasil dilaksanakan namun ke depan harus dilanjutkan integrasi dengan aplikasi portal Satu Data Indonesia pada web data.go.id. serta aplikasi SIPD Ewalidata.

- b. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan $n+2$, sedangkan data yang tersedia adalah $n-1$ sehingga menjadi masalah. Hal ini kemudian diantisipasi dengan menyusun analisis ekonomi makro dan analisis PDRB untuk acuan perencanaan pembangunan.

22. Kearsipan

- a. Belum Terwujudnya Tertib Arsip Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Tertib arsip adalah proses pengelolaan arsip sehingga tertata sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) yang dilakukan pada 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hanya 4 OPD (14,2%) yang meraih nilai AA (Sangat Memuaskan) yang mencerminkan proses pengarsipan paripurna. Sebanyak 13 OPD (46,4%) mendapatkan

nilai A (Memuaskan), sementara 11 OPD (39,3%) memperoleh nilai BB (Sangat Baik). Tidak ada OPD yang mencapai nilai B (Baik) atau lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak OPD yang belum mengelola arsip secara optimal dan kesadaran tentang pentingnya arsip masih rendah.

b. Kurangnya Tenaga Profesional atau Arsiparis

Pengelolaan arsip memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Namun, saat ini terdapat kekurangan arsiparis terlatih di lingkungan pemerintah daerah, sehingga pengelolaan arsip tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menjadi hambatan besar dalam menciptakan tertib arsip. Sampai dengan tahun 2024 jumlah tenaga arsiparis ada sebanyak 24 orang.

c. Keterbatasan sarana prasarana kearsipan

Fasilitas penyimpanan arsip di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) belum memenuhi standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Misalnya, LKD belum dilengkapi pintu darurat, ruang simpan arsip elektronik, kunci pintu elektronik, serta ruangan *record centre* yang sesuai standar. Depo arsip juga masih berada pada dua lokasi yang terpisah.

d. Pengelolaan Arsip yang belum optimal

Pengelolaan Arsip yang belum optimal bisa disebabkan dari berbagai faktor seperti sistem penyimpanan, media penyimpanan digital seperti hard disk dan CD bisa mengalami degradasi, serta faktor lingkungan berupa kelembaban, suhu panas dan serangan serangga dapat menyebabkan kerusakan arsip. Koleksi Arsip statis juga masih minim, bahkan belum ada arsip dari Kabupaten Kulon Progo yang terdaftar sebagai Arsip Memori Kolektif Bangsa (MKB).

e. Transformasi Digital Kearsipan yang Belum Optimal

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) belum optimal diimplementasikan sehingga pemanfaatannya masih terbatas. Arsip digital yang tersimpan juga belum terkelola optimal, sedangkan penerapan aplikasi SRIKANDI baru dimulai pada 2025, sehingga arsip digital sebelumnya masih belum terintegrasi dengan sistem yang lebih baik

23. Komunikasi dan Informatika

- a. Infrastruktur Sistem Komunikasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika masih perlu ditingkatkan. Masih terbatasnya cakupan jaringan intranet berbasis fiber optik yang dapat dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Untuk Perangkat Daerah induk belum mencapai 100%, masih tersisa 70,71% yang belum terfasilitasi jaringan intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berbasis fiber optik, sedangkan untuk kantor kalurahan, baru tersambung kisaran 62,5%. Kantor UPTD dan Puskesmas masih belum dapat terlayani jaringan intra pemerintah. Untuk meningkatkan layanan koneksi internet diperlukan biaya investasi yang tidak sedikit, terutama pada pengembangan infrastruktur jaringan intranet berbasis fiber optik. Infrastruktur jaringan *Local Area Network* (LAN) Perangkat Daerah juga belum sepenuhnya dilakukan *upgrade* perangkat aktif sesuai standar, sehingga perlu dilakukan desain ulang topolog jaringan LAN tersebut, serta *upgrade* perangkat aktif untuk mengatasi masalah *bottleneck* koneksi yang

selama ini dirasakan. Selain itu, dari sisi keamanan informasi, belum tersedianya *Firewall* pada sisi *network* (saat ini baru tersedia *firewall* khusus ke arah *server farm* dengan kapasitas kecil), menimbulkan masalah baru. Kondisi perangkat *enduser existing* yang masih banyak menggunakan perangkat dengan *Operating System* (OS) yang sudah usang maupun OS bajakan/cracking/tidak *original*, mengakibatkan *IP gateway* terdeteksi melakukan *abuse* oleh beberapa server yang dituju. Hal ini mengakibatkan *IP gateway* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akhirnya terblokir oleh beberapa aplikasi Pemerintah Pusat. Sebagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan penggantian perangkat *enduser* dengan OS yang terbaru, serta memasang *firewall* pada sisi *network*.

b. Perlunya peningkatan kualitas pengelolaan informasi daerah

Pengelola informasi daerah berperan bagi pembentukan citra positif Pemerintah Kabupaten serta diseminasi informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik, media internet/ cyber, maupun media luar ruang. Pengelolaan informasi daerah salah satunya dilakukan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang merupakan pengelola informasi di setiap Perangkat Daerah.

24. Perpustakaan

a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan nilai 96,23, namun Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) termasuk dalam kategori sedang dengan nilai 74,55. Angka IPLM tersebut merupakan nilai tertinggi di DIY, namun TGM nya paling rendah. Rendahnya nilai TGM dikarenakan kurangnya promosi perpustakaan yang efektif, Persepsi masyarakat yang masih menganggap perpustakaan sebagai tempat membosankan atau hanya untuk pelajar, serta Keterbatasan akses dan koleksi perpustakaan, baik fisik maupun digital.

b. Jumlah Kunjungan Perpustakaan yang Belum Stabil

Pasca pandemi covid-19, jumlah kunjungan ke perpustakaan meningkat pesat pada tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan pada 2023 dan naik kembali pada tahun 2024. Realisasi kunjungan mencapai 218.832 pengunjung, akan tetapi angka tersebut tetap menunjukkan tren penurunan dibanding tahun 2022 yang mencapai 299.127 pengunjung.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan seperti:

- minimnya atau tidak tersedianya Ruang anak dengan Alat Permainan Edukatif (APE), ruang diskusi, gazebo, dan ruang laktasi, rak buku khas Kulon Progo, kamar mandi pengunjung ramah disabilitas dan desain interior yang menarik.
- Keterbatasan armada dan Layanan Perpustakaan Keliling.
- Koleksi buku perpustakaan, baik fisik maupun digital, belum bisa memenuhi kebutuhan pemustaka. Kunjungan ke perpustakaan digital di Kulon Progo masih rendah karena konten lokal dan koleksi yang terbatas, sementara platform lain seperti e-Perpusnas memiliki koleksi lebih lengkap. Pada tahun 2024 jumlah buku mengalami penurunan berdasarkan hasil sensus barang tahun 2023. Banyak buku mengalami kerusakan, selain itu juga adanya risiko buku tidak dikembalikan.

d. Pembinaan Perpustakaan yang Belum Optimal

Dari 633 perpustakaan di Kabupaten Kulon Progo, baru 223 perpustakaan yang terakreditasi. Selain itu, dari sisi pemanfaatan juga belum maksimal terutama perpustakaan kalurahan

25. Pertanian

- a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Usaha Dinas Pertanian dan Pangan dalam menghadapi luas lahan pertanian yang semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan dan untuk mempertahankan kecukupan pangan terutama beras, antara lain dengan:

- Meningkatkan produktivitas lahan eksisting, agar produksi masih dapat terjaga untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras di Kabupaten Kulon Progo meskipun luas lahan berkurang.
- Melindungi dan mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 120/A/2025 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 510/A/2021 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 16.036,97 ha.
- Melaksanakan kegiatan cetak sawah baru, sampai dengan Tahun 2024 telah tercapai cetak sawah seluas 365 hektar. Sedangkan di 2025 akan ada cetak sawah sebesar 10 ha di Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan.

- b. Sarana dan prasarana produksi, pasca panen dan pemasaran pertanian belum memadai.

Masih belum meratanya sarana prasarana menjadikan inefisiensi waktu, biaya serta tenaga dalam berusaha tani baik *on-farm* maupun *off-farm*. Dalam usaha tani tingginya biaya tenaga kerja, ketersediaan sarana produksi, pengolahan pasca panen belum memadai, panjangnya rantai pemasaran dari produsen ke konsumen menyebabkan keuntungan yang didapat oleh petani minim.

Upaya yang dilakukan adalah dengan fasilitasi sarana produksi, peralatan panen dan pasca panen, bimbingan teknis serta pendampingan dan pemberdayaan kelompok, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan.

- c. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani.

Petani di Kabupaten Kulon Progo sebagian besar sudah berusia lanjut sehingga adopsi teknologi menjadi sulit dilakukan. Solusinya adalah perekrutan petani milenial melalui kegiatan pelatihan, fasilitasi demplot dan pengolahan. Saat ini sudah terbentuk asosiasi petani milenial di Kulon Progo. Harapan dengan adanya asosiasi ini penggunaan teknologi dan mekanisasi pertanian segera dapat terwujud dengan merata. Sehingga efisiensi waktu, biaya dan tenaga dapat tercapai dan memberikan hasil pertanian yang optimal bagi petani.

- d. Masih adanya penyakit hewan menular.

Dibutuhkan peran serta dari petugas dan penyuluh peternakan dalam memberikan pemahaman kepada peternak akan pentingnya sanitasi dan kebersihan lokasi peternakan serta akan terus diupayakan peningkatan pelayanan kesehatan hewan. peningkatan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat tentang peningkatan kesehatan hewan. Pengawasan Kesehatan hewan yang dilakukan antara lain:

- Pemantauan penyakit hewan menular.

- Pengawasan lalu lintas ternak bersinergi dengan Dinas Perhubungan, TNI dan POLRI.
- Pemantauan peredaran obat hewan.
- Pengendalian penyakit antraks.
- Sosialisasi penyakit hewan strategis.
- Pengadaan obat-obatan.
- Pelayanan Kesehatan hewan.

26. Pariwisata

- a. Kurangnya daya tarik obyek wisata yang mampu menarik wisatawan secara signifikan.

Untuk meningkatkan daya tarik dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan sarana prasarana pendukung di obyek wisata secara bertahap dengan mengedepankan inovasi dan melakukan kerjasama dengan stakeholder yang terkait. Selain itu dilakukan pemetaan obyek-obyek wisata untuk menggali dan menentukan keunggulan masing-masing obyek sebagai daya tarik wisata. Upaya yang dilakukan pada Tahun 2025 adalah melakukan promosi secara lebih intensif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan media di tempat-tempat strategis.

Fokus prioritas destinasi wisata yang akan dikembangkan adalah pantai Glagah-Congot mengingat lokasi tersebut termasuk dalam rencana pengembangan kawasan Aerotropolis – *Smart Tourism*.

- b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran wisata belum optimal.

Pemasaran pariwisata melalui teknologi informasi masih belum optimal, sehingga jangkauan dan kualitas penyebaran informasinya masih terbatas. Diperlukan adanya inovasi dalam kegiatan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang pesat di era digital dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan penyedia jasa pariwisata secara lebih intens.

- c. Penyelenggaraan atraksi wisata yang belum mampu menarik kunjungan wisata secara signifikan. Permasalahan ini diatasi dengan melakukan inovasi dan diversifikasi atraksi wisata, baik yang dilaksanakan pemerintah, dikerjasamakan maupun yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Atraksi wisata yang direncanakan diantaranya di destinasi wisata Goa Kiskendo, Waduk Sermo dan Pantai Glagah - Congot dengan menampilkan kesenian unggulan. Atraksi Unggulan di Goa Kiskendo adalah sendratari Sugriwo Subali. Atraksi Unggulan di Waduk Sermo adalah Krumpyung dan Angguk, sedangkan atraksi unggulan di Pantai Glagah - Congot adalah *Sport tourism* (Glagah Lagoon Festival). Selain itu melalui anggaran Dana Keistimewaan diselenggarakan berbagai atraksi diantaranya Kiskenda Mraheswara, Menoleh ke Menoreh, Romansa Pansela, dan Pentas Atraksi Wisata Budaya.

- d. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata.

Solusi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk pelaku wisata dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

27. Kelautan dan Perikanan

a. Keterbatasan air

Ketersediaan air sebagai media utama budidaya ikan merupakan faktor utama dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Kondisi topografi dan geografi Kabupaten Kulon Progo menyebabkan adanya beberapa ancaman bencana alam antara lain ancaman kekeringan terutama di kawasan Pegunungan Menoreh yaitu di Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Kapanewon Pengasih. Ketersediaan air pada musim kemarau sangat kurang untuk usaha budidaya perikanan terlebih pengaturan air irigasi saat ini diutamakan untuk mendukung pola tanam, khususnya kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi di sawah irigasi teknis. Solusinya yaitu mengedukasi pembudidaya ikan untuk menghemat air, mencari sumber-sumber air alternatif, dan penerapan teknologi tepat guna (kolam terpal, *recycle aqua system*, pemanenan air hujan, dan lain-lain).

b. Pembudidayaan ikan di Kabupaten Kulon Progo ini masih berskala kecil, yang letaknya tersebar dengan belum ada manajemen tersentra. Solusinya yaitu penguatan kelembagaan kelompok perikanan dalam mendukung budidaya dan hilirisasi komoditas perikanan.

c. Keterbatasan kemampuan produksi benih ikan

Pola perbenihan ikan di Kulon Progo masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan pemijahan alami. Pemijahan alami dilaksanakan tanpa menggunakan hormon dan sebagian besar kolamnya masih terbuka (tidak menggunakan kolam hatchery) sehingga tidak ada pengkondisian suhu, pH, cahaya, dan lain-lain. Dalam pengembangan ketersediaan benih ikan yang berkualitas dan kontinyu proses pembenihan dilaksanakan di UPT Perbenihan Perikanan dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR). Produksi benih ikan dari UPT Perbenihan Perikanan dan UPR baru mencapai kurang lebih 30% dari total kebutuhan benih ikan sebesar 150 juta ekor di Kulon Progo. Solusi dari permasalahan ini diantaranya pelatihan perbenihan, peningkatan sarana prasana UPR dan UPT Perbenihan Perikanan

d. Tingginya harga pakan ikan tidak seimbang dengan harga jual ikan

Besarnya ketergantungan petani pada pakan ikan pabrikan menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, di sisi lain ketersediaan bahan baku pakan ikan sulit di dapatkan. Solusinya adalah penggunaan pakan alami dan penerapan SOP budidaya ikan.

e. Angka konsumsi makan ikan masih relatif rendah

Tingkat konsumsi makan ikan Kulon Progo Tahun 2023 sebesar 31,01 kg/kap/tahun meningkat menjadi 31,44 kg/kap/tahun pada tahun 2024, masih jauh dari realisasi konsumsi makan ikan nasional sebesar 58,48kg/kap/tahun (53,03%). Perlu dilakukan gerakan memasyarakatkan makan ikan kepada masyarakat Kulon Progo, himbauan menu ikan pada acara/event kedinasan, dan pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan baik segar maupun olahan. Dalam rangka pemenuhan protein hewani maka pokdakan berkontribusi terhadap penyediaan ikan lele untuk kebutuhan BPNT Lokal (APBD) . Selain itu kegiatan lainnya untuk meningkatkan konsumsi makan ikan yaitu Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan) yang dilaksanakan di sekolah sekolah.

f. Banyak kelompok perikanan budidaya yang kurang aktif

Jumlah kelompok perikanan budidaya yang ada saat ini adalah 489 kelompok, namun hanya 312 kelompok yang aktif dan berkembang. Terhadap hal tersebut salah satu solusi yang akan

dilaksanakan adalah dengan melaksanakan revitalisasi kepengurusan kelompok perikanan budidaya, penguatan kelembagaan dan pelatihan SDM serta fasilitasi sarana produksi.

- g. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian sumber daya ikan di perairan umum masih relatif rendah

Masih adanya oknum masyarakat yang menangkap ikan dengan alat dan bahan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: penggunaan alat setrum, penggunaan racun dan jaring pukat. Solusi dari masalah ini adalah dengan inisiasi pembentukan pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas), sosialisasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi sarana pengawasan, dan pembinaan/pendampingan terhadap masyarakat.

- h. Kesadaran nelayan dalam perlindungan dan keselamatan kerja relative rendah.

Nelayan masih banyak yang melaksanakan penangkapan ikan di laut tanpa menggunakan sarana pengamanan seperti pelampung dan tidak ikut serta dalam program penjaminan perlindungan keselamatan kerja (BPJS ketenagakerjaan). Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pelatihan/sosialisasi/bimtek keselamatan kerja dan mengikutsertakan nelayan dalam program jaminan pekerja rentan.

28. Perdagangan

- a. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan tera.

Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melakukan tera terhadap alat timbangannya masih cukup rendah. Walaupun terdapat peningkatan terhadap alat UTTP yang bertanda tera sah namun masih banyak potensi UTTP yang belum dilakukan tera ulang. Maka perlu dilakukan penyuluhan kepada pelaku usaha khususnya pedagang di luar pasar tentang kemetrolagian.

- b. Pasar Rakyat masih kurang representatif.

Keberadaan pasar rakyat masih kurang representatif dibandingkan pusat perbelanjaan atau toko swalayan. Masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pusat perbelanjaan atau toko swalayan dibanding di pasar rakyat karena berbagai faktor. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Perda Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perda tersebut bertujuan untuk perlindungan kepada pasar rakyat, koperasi dan UMKM, mengatur keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, koperasi, dan UMKM dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan. Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas yakni dengan penguatan database dan peningkatan manajemen pengelolaan pasar rakyat agar sesuai standar kenyamanan dan meningkatkan daya saing dibandingkan toko-toko modern melalui kerjasama kemitraan dan pembinaan pasar rakyat

- c. Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang belum tertata

Jumlah PKL di Kulon Progo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun adanya PKL ini dapat menggerakkan perekonomian di Kulon Progo namun

keberadaannya yang seringkali menempati lokasi yang bukan peruntukannya menjadikan masalah tersendiri. Keberadaan PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan terjadinya kesemrawutan bagi wajah Kulon Progo serta berdampak pada arus lalu lintas karena adanya parkir kendaraan di badan jalan. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan PKL pada lokasi yang representatif guna menjamin ketertiban umum, menjaga estetika kawasan, serta dapat melindungi hak-hak PKL itu sendiri.

- d. Mayoritas pelaku usaha berorientasi ekspor belum melakukan ekspor mandiri.

Beberapa diantara pelaku usaha produk potensi ekspor Kulon Progo saat ini sudah merasa nyaman dengan kerjasama menjadi supplier kepada eksportir yang ada di luar daerah. Hal ini terjadi karena mereka menjalin kerjasama sudah sekian lama sehingga kemudian tidak ada motivasi untuk berkembang lebih besar lagi. Dinas terus mendorong pelaku usaha produk ekspor untuk mampu melakukan ekspor mandiri dengan meningkatkan motivasi dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan, temu usaha, dan memfasilitasi keikutsertaan di berbagai kegiatan pameran

29. Perindustrian

- a. Terbatasnya bahan baku di dalam daerah

Industri di Kulon Progo didominasi oleh industri pengolahan pangan dan kerajinan umum. Bahan baku industri tersebut sangat tergantung pada hasil pertanian maupun ketersediaan di alam apabila ketersediaannya terbatas maka bisa mempengaruhi kondisi usaha para pengrajin. Solusinya adalah diversifikasi industri serta peningkatan kerjasama bahan baku dengan daerah lain baik regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya diperlukan adanya identifikasi dan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat lokal untuk memenuhi permintaan bahan baku industri.

- b. Belum optimalnya daya saing produk industri

Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kulon Progo cukup besar, dengan jumlah IKM pada Tahun 2024 sebanyak 16.092 unit, sedangkan jumlah sentra sama dengan tahun sebelumnya yakni sejumlah 34 sentra. Daya saing produk industri yang dihasilkan IKM maupun sentra IKM masih kurang kompetitif dibanding daerah lain, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan) pelaku usaha industri, pola pikir (mindset) dalam mengembangkan usaha, lemahnya penguasaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan diversifikasi produk, dan kondisi infrastruktur (misalnya kondisi jalan, pasokan listrik dan air).

Untuk meningkatkan daya saing produk, dilakukan pemberdayaan IKM dari hulu ke hilir berupa pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM dan Sentra IKM, mulai

dari peningkatan kualitas produk, kemasan, sampai dengan pemasarannya, serta melakukan upaya digitalisasi

30. Transmigrasi

Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran. Solusi yang ditempuh adalah dengan memberikan informasi kepada pendaftar calon transmigran mengenai potensi lokasi transmigrasi di luar Sumatera melalui penyuluhan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan pelayanan ketransmigrasian, serta mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah DIY dan pemerintah daerah tujuan transmigrasi dalam penyelesaian masalah transmigrasi.

31. Persandian

- a. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) belum dilaksanakan secara maksimal
 Sistem Kendala terbesar penerapan SMKI adalah pada spesifikasi infrastruktur TI yang tidak sesuai standar (Kriteria Data Center) Penerapan keamanan informasi menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara sistem elektronik, namun OPD belum memiliki kesadaran untuk menerapkan Sistem Keamanan Informasi secara baik dan benar. Hal ini menyebabkan berkurangnya nilai indeks keamanan informasi atau Indek KAMI. Nilai indeks KAMI 2024 dinas Komunikasi dan Informatika masuk pada kategori sistem elektronik Tinggi berada pada skor 439 dari total nilai maksimal 645 atau sebesar 68,06 % dengan tingkat kematangan II (pemenuhan kerangka kerja dasar).
- b. Proses pengamanan Informasi belum bisa dilaksanakan dari tahap awal perancangan sistem informasi. Penanganan keamanan informasi seringkali dilaksanakan pada saat ada insiden keamanan informasi (respon terhadap insiden). Penerapan keamanan belum bersifat preventif karena keterbatasan SDM dan peralatan/ tools untuk melakukan identifikasi kerawanan keamanan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2026, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2024, perkiraan tahun 2025, proyeksi tahun 2026, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Untuk lebih lengkapnya akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi 2020-2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 mengalami fluktuasi selama periode 2019-2024. Pada tahun 2020 PDRB ADHK pada posisi 8.468,29 miliar Rupiah, kemudian pada tahun 2021, nilai PDRB ADHK Kabupaten Kulon Progo mulai meningkat seiring dengan mulai meningkatnya aktivitas masyarakat menjadi sebesar 8.838,14 miliar Rupiah, selanjutnya pada tahun 2023 PDRB ADHK mengalami peningkatan lagi menjadi 9.951,95 miliar Rupiah. Pada tahun 2024, angka dari BPS menunjukkan peningkatan namun melemah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada 10.426,23 miliar Rupiah.

Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHB Kabupaten Kulon Progo sebesar 11.738,12 miliar Rupiah di tahun 2020. Penurunan nilai PDRB ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh masa pandemi sebagai dampak meluasnya wabah Covid-19. Pada tahun 2021, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat, nilai PDRB ADHB meningkat menjadi sebesar 12.642,56 miliar Rupiah. Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi masyarakat mulai normal dan PDRB meningkat menjadi 14.325,95 miliar Rupiah dan kembali meningkat signifikan menjadi 15.841,40 miliar Rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024, seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, PDRB ADHB juga mengalami perlambatan peningkatan yaitu pada 16.911,59 miliar Rupiah. Kenaikan PDRB Kabupaten

Kulon Progo di masa mendatang diproyeksikan banyak disumbang dari sektor Transportasi dan Pergudangan, seiring makin meningkatnya aktivitas Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga diprediksi akan meningkat dengan mulai beroperasinya beberapa hotel berbintang terutama yang berada di sekitar BIY. Di samping itu, diproyeksikan juga sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga akan mengalami peningkatan seiring dengan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengarah ke hilirisasi industri. Berdasarkan hal tersebut maka PDRB ADHB diproyeksikan akan menjadi sebesar 10.924,60 miliar Rupiah pada tahun 2025 dan 11.448,98 miliar Rupiah pada Tahun 2026.

Selengkapnya nilai proyeksi PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Kulon Progo disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

Gambar 3.1

**PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kulon Progo
Tahun 2019-2024, Proyeksi 2025 dan 2026 (miliar rupiah)**

Selama periode 2019-2020 struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo selalu didominasi oleh 5 sektor lapangan usaha, yaitu Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Namun mulai tahun 2021 terjadi pergeseran kategori penyokong perekonomian Kabupaten Kulon Progo yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menggeser lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menempati posisi kelima. Kondisi demikian ini tetap berlanjut pada Tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi perubahan di mana pada 5 posisi teratas adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, disusul Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Perdagangan Besar

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan. Tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan di mana distribusi tertinggi masih dipegang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan namun sudah mengalami penurunan yang stabil selama 4 tahun terakhir.

Terdapat 2 sektor yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Tahun 2024 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Keduanya memberikan kontribusi masing-masing sebesar 15,17% dan 15,06%. Berikut perkembangan kontribusi 6 terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020 sampai dengan 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 3.2

**Kontribusi Enam Sektor Terbesar pada Struktur Perekonomian Kulon Progo
Tahun 2020-2024 (%)**

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 10,43 triliun Rupiah, atau mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2023 dari sebesar 9,95 triliun Rupiah. Pada tahun 2024, sektor yang tumbuh cukup tinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas (10,41%), Jasa Keuangan dan Asuransi (7,28%), kemudian berikutnya sektor Akomodasi dan Makan Minum (6,72%), disusul sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (7,47%). Distribusi masing-masing sektor usaha ditampilkan pada Gambar 3.3.



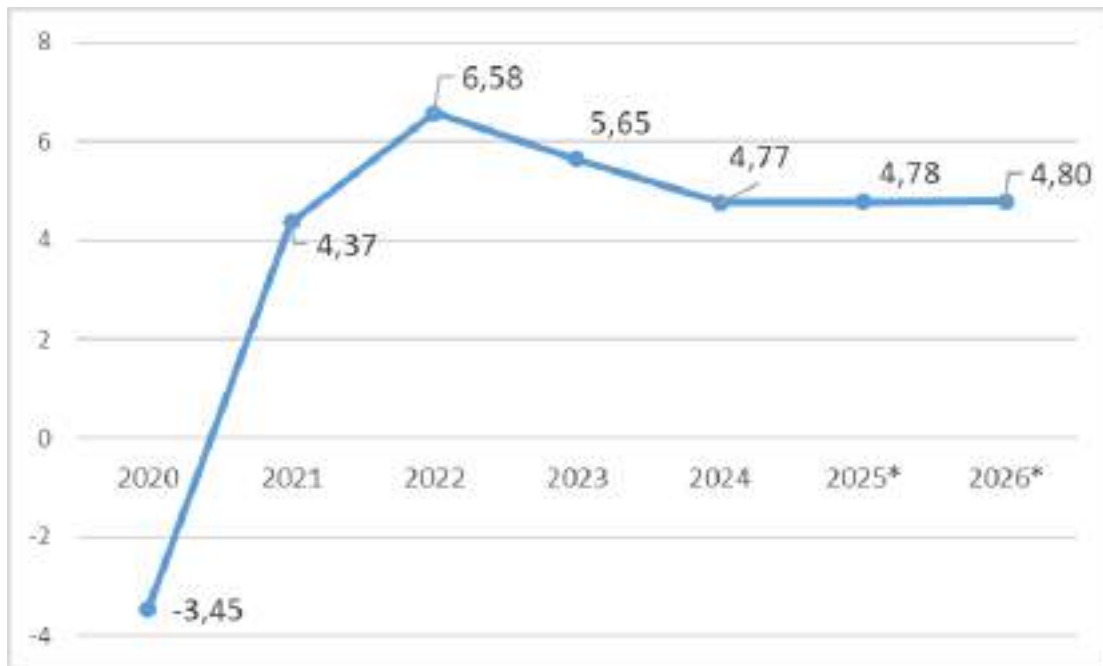
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 3.3

**Distribusi Pertumbuhan Per Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Tahun 2024
Menurut Lapangan Usaha (%)**

Tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang mengalami rebound dari posisi -3,45% menjadi 4,37%, dan meningkat lagi menjadi 6,58% pada tahun 2022 namun kembali mengalami perlambatan menjadi 5,65% pada tahun 2023.

Nilai pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa sektor konstruksi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo mulai mengalami perlambatan akibat telah selesainya pembangunan BIY dan infrastruktur pendukungnya. Sektor lain yang mulai mengambil alih peran sebagai pemilik laju pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan, terutama selama 3 tahun terakhir. Namun sektor Konstruksi diprediksi masih akan tumbuh seiring dengan akan dibangunnya trase Tol Solo-Yogya-BIY di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2025, Pemkab Kulon Progo memproyeksikan nilai pertumbuhan ekonomi akan sedikit mengalami penguatan pada 4,78% , kemudian pada tahun 2026 diproyeksikan akan kembali naik menjadi 4,80%.



Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

Gambar 3.4

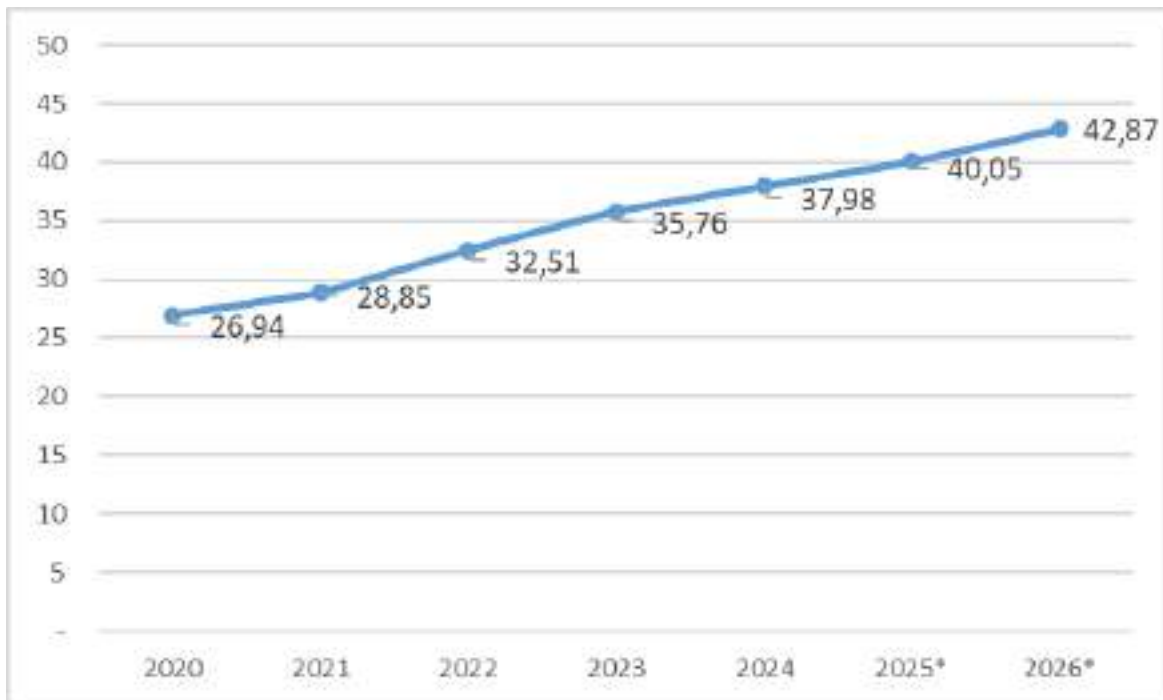
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2020-2024 dan Proyeksi 2025-2026

3.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2020-2024, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.5). Pada tahun 2019, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 27,88 juta Rupiah, sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 26,94 juta Rupiah akibat Pandemi Covid-19. Nilai PDRB per kapita pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 28,85 juta Rupiah. Kemudian berturut-turut mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi 32,51 juta Rupiah di tahun 2022, kemudian 35,76 juta Rupiah di tahun 2023 dan 37,98 juta Rupiah di tahun 2024. Pemkab Kulon Progo memproyeksikan pada tahun 2025 nilai PDRB per kapita ADHB akan mencapai 40,05 juta Rupiah dan tahun 2026 sebesar 42,87 juta Rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sepanjang 2020-2024 dan proyeksi 2025-2026 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

Gambar 3.5

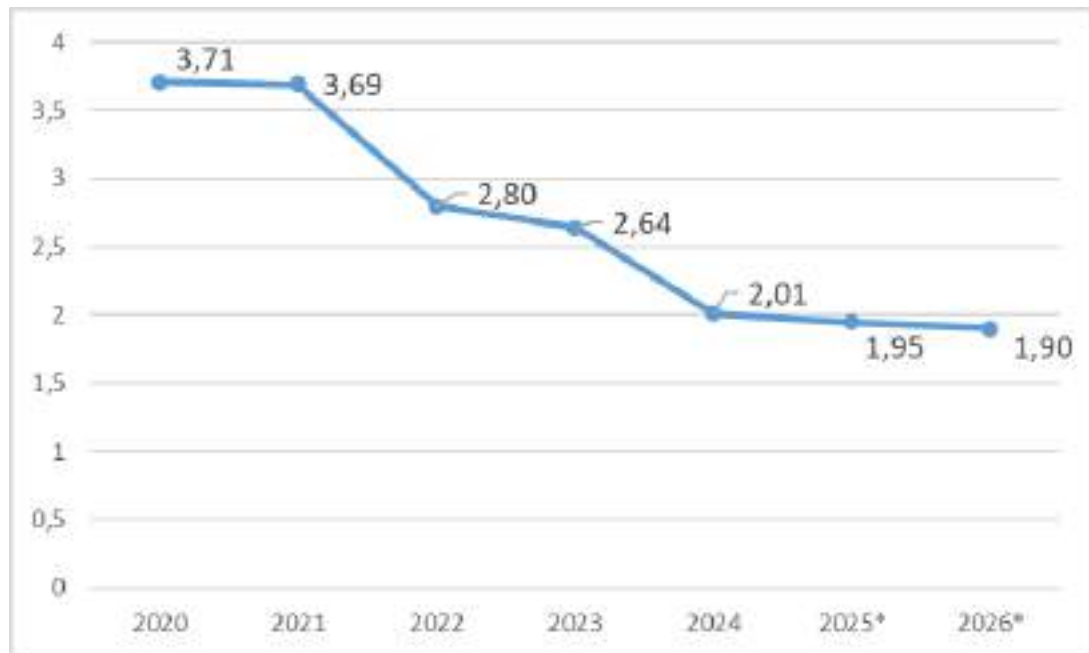
PDRB Per Kapita ADHB tahun 2020-2024 dan Proyeksi 2025-2026 (juta Rupiah)

3.1.4 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo periode 2020-2024 selalu berada di bawah TPT DIY maupun Nasional.

Tahun 2020 dan 2021 angka TPT Kulon Progo meningkat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan Pandemi Covid-19, yaitu pada 3,71% dan 3,69%. Selanjutnya TPT Kulon Progo mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3,00%, kemudian menjadi 2,64% pada tahun 2023, dan terus menurun menjadi 2,01% pada tahun 2024.

Penurunan TPT Kulon Progo pada tahun 2023 bersamaan dengan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Penguatan ekonomi menyebabkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka di Kulon Progo dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendorong semakin banyak orang untuk bekerja. Hal ini terlihat dengan peningkatan sebesar 13 ribu penduduk yang bekerja pada tahun 2022. Kesempatan kerja di Kulon Progo juga mengalami peningkatan dan berdampak langsung terhadap penurunan TPT. Melihat tren dan kondisi yang mulai membaik, TPT Kulon Progo diharapkan terus mengalami penurunan. Hal ini mendasari proyeksi TPT Kabupaten Kulon Progo yang menurun menjadi 1,95% pada tahun 2025 dan kemudian menurun lagi menjadi 1,90% pada tahun 2026.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

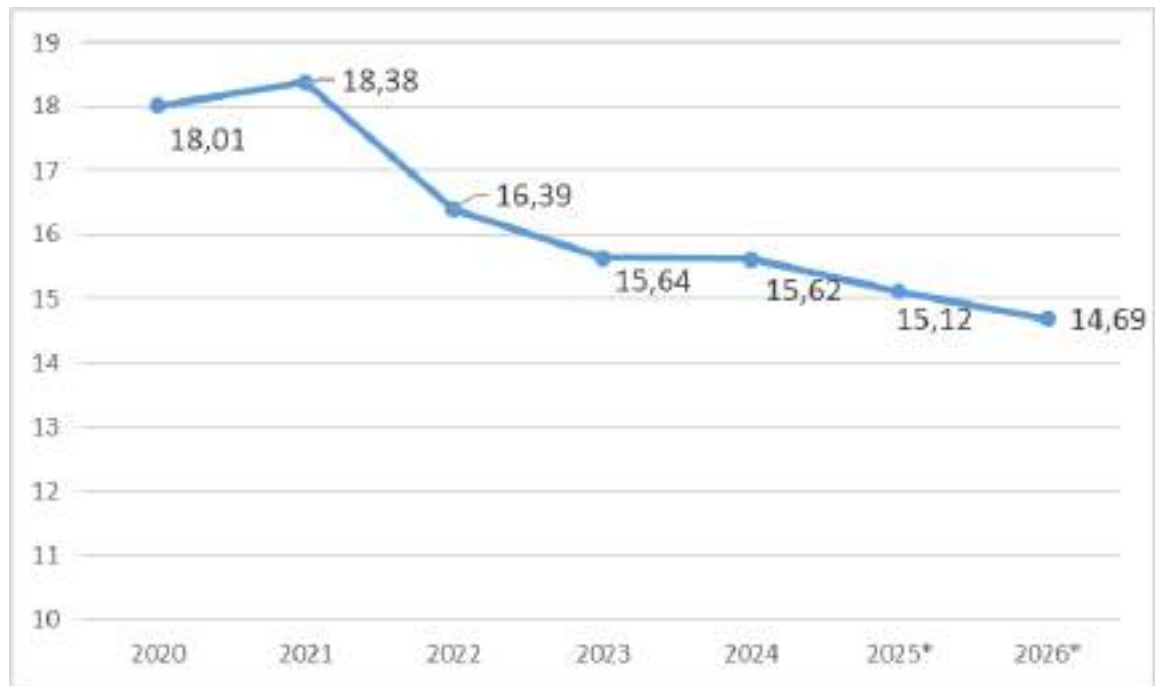
*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

Gambar 3.6

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kulon Progo (%) 2020-2024 dan Proyeksi 2025-2026

3.1.5 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020-2024 cenderung menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin Kulon Progo pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan dengan dari 18,01% menjadi 18,38%. Namun setelah itu terjadi penurunan tajam di tahun 2022 yakni menjadi 16,39%. Penurunan ini didorong oleh tumbuhnya perekonomian dari tahun sebelumnya sehingga dapat mengangkat banyak penduduk dari garis kemiskinan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha pasca Covid-19, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo semakin menurun hingga menjadi 15,64% pada tahun 2023 dan 15,62% di tahun 2024. Proyeksi oleh Pemkab Kulon Progo, pada tahun 2025 angka kemiskinan akan mengalami penurunan menjadi 15,12% pada tahun 2025 dan 14,69% pada tahun 2026.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2024

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo

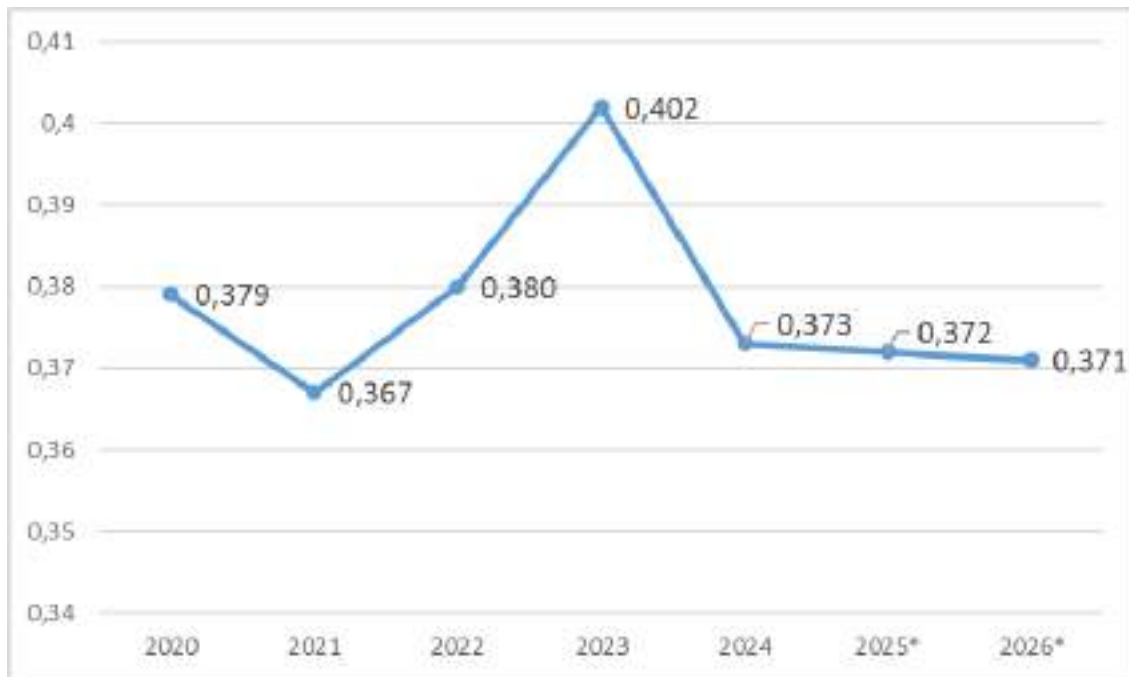
Gambar 3.7

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo (%) 2020-2024 dan Proyeksi 2025 dan 2026

3.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo periode 2021-2023 memiliki trend meningkat, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,373 dan diproyeksikan akan terus menurun menjadi 0,357 di tahun 2025. Beberapa proyek konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2018 khususnya proyek BIY dan infrastruktur pelengkap mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak langsung akibat dari proses ganti rugi, serta masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan belanja pada sebagian masyarakat baik yang terdampak langsung dan tidak langsung. Di sisi lain, masyarakat yang berdomisili di lokasi yang jauh dari proyek konstruksi mempunyai tingkat pengeluaran yang relatif sama dari periode sebelumnya. Akibatnya nilai Rasio Gini sedikit meningkat yang berarti kesenjangan sedikit melebar.

Secara umum, terjadinya penguatan pada sisi ekonomi yang terindikasi dengan tingkat pertumbuhan positif pada semua sektor perekonomian, diharapkan pada semua pelaku ekonomi dapat meningkatkan pengeluarannya sehingga pada tingkat ketimpangan antar kelompok yang terindikasi pada nilai Rasio Gini dapat menurun secara bertahap. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo yang terus tumbuh positif, serta adanya upaya pemerintah meningkatkan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, maka diproyeksikan nilai Rasio Gini juga mengalami penurunan sehingga pada tahun 2025 Rasio Gini diproyeksikan akan menurun menjadi 0,372 dan tahun 2026 menjadi 0,371.



Sumber: BPS Kulon Progo, 2025;

*) Proyeksi Pemkab Kulon Progo.

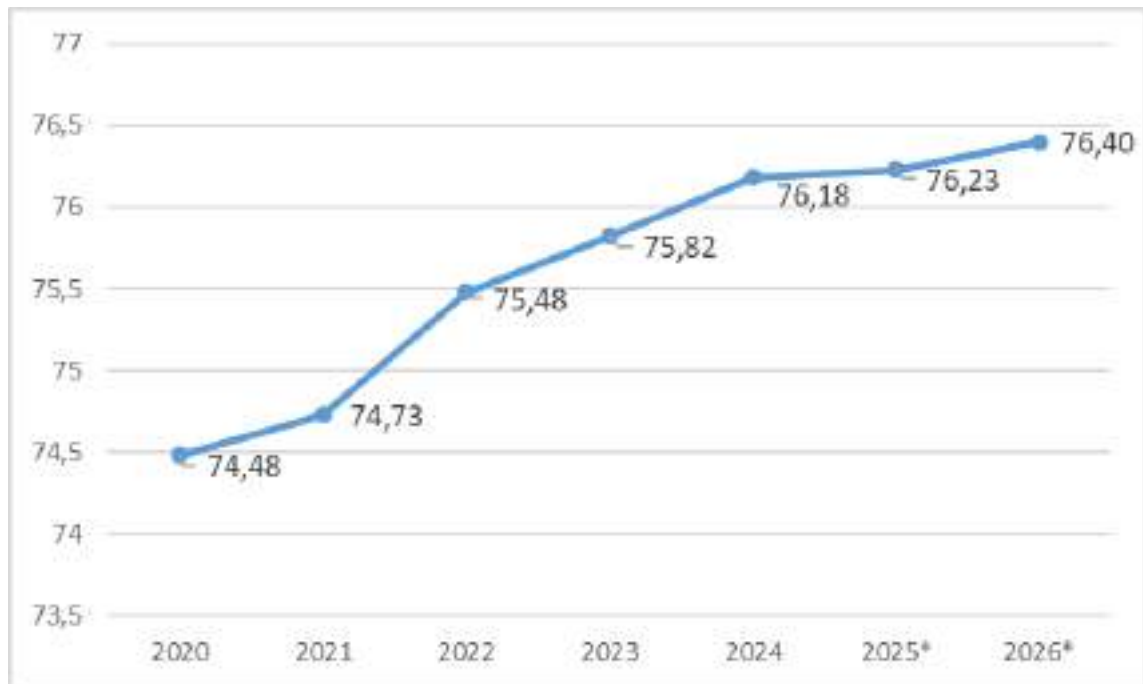
Gambar 3.8

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2025 dan 2026

3.1.7 Sumber Daya Manusia

Indikator yang mampu merangkum berbagai aspek dan dimensi dalam pembangunan manusia secara berkelanjutan diperlukan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan, khususnya pembangunan manusia antarwilayah dan antarnegara maupun perkembangan antarwaktu. United Nation Development Programme (UNDP) merilis Human Development Index (HDI) sebagai ukuran untuk menilai dan menganalisis keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia dalam suatu wilayah sejak tahun 1990 (Human Development Reports, 1990). Selanjutnya secara berkala, indeks tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia antarwilayah di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), HDI diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah Dimensi Kesehatan atau peluang hidup (*longevity*), Dimensi Pendidikan/Pengetahuan (*knowledge*) serta Dimensi Ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).

Perkembangan nilai IPM Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2020 IPM Kabupaten Kulon Progo sebesar 74,48 menjadi 76,18 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 diproyeksikan akan kembali meningkat menjadi 76,23, dan pada tahun 2026 diproyeksikan menjadi 76,40.



Gambar 3.9

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 dan
Proyeksi Tahun 2025 dan 2026**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

*Proyeksi Pemkab Kulon Progo, 2025.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang merupakan perwujudan siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa hal yaitu: 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) relevansi program dan kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Potensi pajak daerah yang rendah dipengaruhi masih kecilnya lapangan usaha sektor tersier.
- b. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kewajiban pajak daerah.
- c. Masih terbatasnya amenities di obyek wisata.
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi.
- e. Belum optimalnya pembaharuan data wajib pajak dan obyek pajak sesuai kondisi sebenarnya.
- f. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan penyetorannya;
2. Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi/Digitalisasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif;
3. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan terhadap wajib pajak;
4. Peningkatan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi;
5. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja pada BUMD;
7. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan menginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat;
9. Optimalisasi kinerja perangkat daerah dan tertib administrasi sebagai upaya peningkatan pendapatan transfer daerah.

Dengan strategi tersebut maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi.
3. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi.
5. Peningkatan pemanfaatan aset daerah
6. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2024 ini terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD.

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.
2. **Pendapatan Transfer**, terdiri dari:
- 1) **Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana desa. Dana transfer pemerintah pusat yang tertuang di pendapatan Kabupaten Kulon Progo adalah:

 - a. **DAU**

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. **DAK**

DAK adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini digunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - c. **Dana Insentif Fiskal**

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu.
 - d. **DBH**

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
 - e. **Dana Desa**

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) **Transfer antar daerah**

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

 - a. **Pendapatan bagi hasil** merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

- b. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, Gubernur sesuai kewenangannya dapat menugaskan urusan keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Bupati/Walikota melalui mekanisme BKK Dana Keistimewaan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Tahun 2022 s.d. 2026 Kabupaten Kulon Progo

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Pendapatan Asli Daerah	308.159.760.929,32	324.053.666.353,00	358.092.879.847,53	381.422.361.688,00	454.698.270.469,00
4.1.01	Pajak daerah	106.215.334.889,95	96.627.182.570,00	91.693.644.130,00	145.820.896.290,00	158.698.953.700,00
4.1.02	Retribusi daerah	11.115.781.343,00	12.060.319.478	215.272.262.235,09	210.732.864.508,00	270.874.406.258,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.652.122.473,42	18.348.267.703	19.879.182.059,23	17.819.305.307,00	18.569.986.393,00

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	175.176.522.222,95	197.017.896.601,93	31.247.791.423,21	7.049.295.583,00	6.554.924.118,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.215.582.521.346,00	1.363.943.255.399,00	1.395.982.702.035,00	1.297.270.275.134,00	1.044.838.205.806,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.045.394.295.432,00	1.148.566.329.471,00	1.177.030.159.444,00	1.141.034.610.800,00	871.198.623.000,00
4.2.01.01	Dana Desa	88.152.875.000,00	104.694.668.000,00	105.234.651.000,00	97.403.860.000,00	97.403.860.000,00
4.2.01.02	Intensif Fiskal	42.707.212.000,00	54.259.365.000,00	36.800.569.000,00	14.827.618.000,00	14.827.618.000,00
4.2.01.03	Dana Perimbangan	914.534.208.432,00	989.612.296.071,00			
4.2.01.03	Dana Bagi Hasil (DBH)			19.358.558.000,00	25.615.730.000,00	25.615.730.000,00
4.2.01.04	Dana Alokasi Umum (DAU)			729.450.461.000,00	733.351.415.000,00	733.351.415.000,00
4.2.01.05	Dana Alokasi Khusus (DAK)			286.185.920.444,00	269.835.987.800,00	0,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	170.188.225.914,00	215.376.925.928,00	218.952.542.591,00	156.235.664.334,00	173.639.582.806,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.494.000.000,00	8.000.000.000,00	936.000.000,00	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.494.000.000,00	8.000.000.000,00	936.000.000,00	0	0
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.530.236.282.275,32	1.695.996.921.752,01	1.755.011.581.882,53	1.678.692.636.822,00	1.499.536.476.275,00

*) Proyeksi 2026 belum memasukkan DAK

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait

langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang sangat cepat khususnya di beberapa kawasan strategis menuntut adanya percepatan di berbagai bidang baik penyiapan SDM, infrastruktur pendukung hingga antisipasi dampak pembangunan, diantaranya: telah beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Pembangunan lanjutan Jalur Temon-Borobudur, dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur di Kulon Progo harus diantisipasi agar masyarakat dapat berperan serta, menyiapkan produk-produk lokal yang berkualitas sehingga masyarakat pada kawasan tersebut dapat berkembang dan terangkat bersamaan dengan pengembangan infrastruktur.

Berdasarkan dinamika dan konstelasi wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana tahun anggaran 2026 adalah pengembangan kawasan aerotropolis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Penggunaan Dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya dan belanja modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai masing-masing belanja sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai, yang meliputi:

Gaji pokok, tunjangan ASN struktural/ fungsional, THR dan gaji ketigabelas ASN, serta penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai tersebut juga meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah dan DPRD, serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran jaminan kesehatan baik bagi ASN, Kepala Daerah, maupun DPRD.

Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/ anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan untuk membiayai subsidi bunga pinjaman produktif masyarakat kepada Bank Kulon Progo. Program ini sudah dimulai dari tahun 2022, dan masih akan berlanjut hingga tahun 2026.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada tahun 2026 kebijakan belanja hibah diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, organisasi yang memiliki surat keterangan terdaftar, atau institusi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan daerah, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/ anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ditujukan untuk belanja prioritas program/ kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2026.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa

Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Tahun 2022 s.d. 2026 dituangkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Tahun 2022 s.d. 2026 Kabupaten Kulon Progo

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Belanja Operasi	1.215.304.344.269,25	1.290.493.325.958,73	1.399.220.075.937,45	1.349.469.933.512,00	1.191.176.634.144,00
5.1.01	Belanja Pegawai	672.476.780.974,00	678.460.423.981,00	749.270.869.613,81	773.472.002.554,00	662.049.971.510,00
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	445.206.662.652,25	488.475.760.197,73	519.967.182.561,64	473.424.811.962,00	457.390.616.829,00
5.1.03	Belanja Bunga	-	0,00	-	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	548.800.000,00	1.556.758.500,00	1.615.328.250,00	1.746.484.500,00	828.225.509,00

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBD 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
5.1.05	Belanja Hibah	80.132.735.643,00	102.941.294.780,00	111.386.580.761,00	82.407.996.096,00	58.423.280.696,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.939.365.000,00	19.059.088.500,00	16.980.114.751,00	18.418.638.400,00	12.484.539.600,00
5.2	Belanja Modal	146.013.665.289,02	219.397.654.552,00	188.155.116.808,23	176.645.118.985,00	120.945.374.687,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.353.324.616,00	2.136.746.385,00	1.276.605.632,00	9.020.050.000,00	195.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.976.972.359,00	78.671.552.586,00	50.602.165.775,00	33.038.339.461,00	22.406.421.522,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.094.683.751,54	52.912.285.113,00	56.268.253.301,23	53.435.422.554,00	51.078.168.165,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.532.991.571,48	81.049.816.657,00	75.499.283.698,00	78.920.594.570,00	46.941.961.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.055.692.991,00	4.375.553.811,00	3.878.075.484,00	2.169.512.400,00	125.150.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	251.700.000,00	630.732.918,00	61.200.000,00	198.673.500,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.047.005.849,00	1.092.325.768,00	2.536.789.038,00	21.950.602.527,00	5.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	166.837.491.825,00	183.786.789.969,00	188.657.841.287,00	189.290.148.844,00	187.914.467.444,00
TOTAL JUMLAH BELANJA		1.531.202.507.232,275	1.694.770.096.247,73	1.778.569.823.070,68	1.737.355.803.868,00	1.505.036.476.275,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; penerimaan pinjaman daerah; dan penerimaan piutang daerah. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah meliputi: penyertaan modal daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merencanakan penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp5.000.000.000,00, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Kulon Progo sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Kulon Progo, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun sebesar Rp4.500.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun.

Tabel 3.3
Realisasi dan Target/ Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 s.d. 2026

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Penerimaan pembiayaan					
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	216.356.832.129,17	165.114.099.031,22	120.467.732.132,50	63.163.167.046,00	20.000.000.000,00
6.1.02	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	4.800.000.000	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.356.832.129,17	165.114.099.031,22	125.267.732.132,50	63.163.167.046,00	20.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran pembiayaan					
6.2.01	Penyertaan modal (Investasi) daerah	50.116.372.343,00	45.873.192.403,00	7.307.807.724,00	4.500.000.000,00	14.500.000.000,00
6.2.02	Pembayaran cicilan utang jatuh tempo	-	-	4.800.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.116.372.343,00	45.873.192.403,00	12.107.807.724,00	4.500.000.000,00	14.500.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	166.240.459.786,17	119.240.906.628,22	113.159.924.408,50	58.663.167.046,00	5.500.000.000,00

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

Secara lengkap, Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Struktur Keuangan Tahun 2026

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	454.698.270.469,00
4.1.01	Pajak daerah	158.698.953.700,00
4.1.02	Retribusi daerah	270.874.406.258,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	18.569.986.393,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	6.554.924.118,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.044.838.205.806,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	871.198.623.000,00
4.2.01.01	Dana Desa	97.403.860.000,00
4.2.01.02	Intensif Fiskal	14.827.618.000,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
4.2.01.03	Dana Bagi Hasil (DBH)	25.615.730.000,00
4.2.01.04	Dana Alokasi Umum (DAU)	733.351.415.000,00
4.2.01.05	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	173.639.582.806,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	60.152.584.306,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	113.486.998.500,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang- Undangan	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.499.536.476.275,00
5.1	Belanja Operasi	1.191.176.634.144,00
5.1.01	Belanja Pegawai	662.049.971.510,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.390.616.829,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	828.225.509,00
5.1.05	Belanja Hibah	58.423.280.696,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.484.539.600,00
5.2	Belanja Modal	120.945.374.687,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	195.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.406.421.522,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.078.168.165,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.941.961.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.150.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	198.673.500,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	187.914.467.444,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	16.296.852.044,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	171.617.615.400,00
JUMLAH BELANJA		1.505.036.476.275,00
TOTAL SURPLUS/DEFISIT		(5.500.000.000,00)
6.1	Penerimaan pembiayaan	20.000.000.000,00
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	20.000.000.000,00
6.1.02	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	14.500.000.000,00
6.2.01	Penyertaan modal (Investasi) daerah	14.500.000.000,00
6.2.02	Pembayaran cicilan utang jatuh tempo	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		5.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		0,00
TOTAL APBD		1.519.536.476.275,00

Sumber data: SIPD RI, 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen RPJMD 2025-2029 disusun berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2045 dan Visi Misi Bupati Kulon Progo masa jabatan 2025-2029.

Rumusan tujuan dan sasaran daerah beserta indikator dan target pada RKPD tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	
					Realisasi	Tahun ke-1	Tahun ke-2
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,18	76,00 - 76,23	76,40 - 76,69
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,49	75,50 - 79,75	75,58 - 79,83
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,49	14,63 - 15,72	14,7 - 15,79
2	Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo		Tingkat Kemiskinan	%	15,62	14,12 - 15,12	13,69 - 14,69
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	10.990,00	11.232,40	11.487,60
3	Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	63,31	64,00-66,00	65,00-67,00
		Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	58,91	60,00-61,00	60,00-61,50
4	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	4,78-5,38	4,80-5,40
		Meningkatnya Kemandirian Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,98	41,02 - 42,22	41,03 - 42,23
			PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	37.976,26	40.043-40.272	42.865-43.357
			Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Miliar rupiah	655,55	684,46-1.228,98	766,86-1.360,34

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	
					Realisasi	Tahun ke-1	Tahun ke-2
					2024	2025	2026
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	1.709,15	1.892,11-1.984,03	2.048,17-2.159,39
5	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah		Rasio Gini	Nilai	0,37	0,372 - 0,402	0,371 - 0,401
		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,01	1,95 - 2,55	1,90 - 2,50
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	87,04	87,50	87,90
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)*	Nilai	3,91	4,11 - 4,61	1,41-1,50
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)
			Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,80	86,85	86,90
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,22	3,23
7	Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis		Crime Rate	Nilai	62,70	62,00	61,00
		Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHAi)	Nilai	7,32	7,38	7,42
			Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	%	100,00	100,00	100,00
8	Meningkatnya		Persentase Kesesuaian	%	88,61	88,70	88,75

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	
					Realisasi	Tahun ke-1	Tahun ke-2
					2024	2025	2026
	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur		Pemanfaatan Ruang				
		Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,86	89,90	89,95
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	48,40	49,28	50,15
			Tingkat Pelayanan Jalan (<i>level of service</i>)	Nilai	A (0,10)	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)
9	Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana		Indeks Risiko Bencana	Nilai	152,65	136,71 - 141,71	135,07 - 140,07
		Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	65,46	69,75	69,84
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,64	0,65	0,66

*) Transisi Indikator Baru. Target 2025 adalah Indeks SPBE, target 2026-2030 adalah Indeks Pemdi

Sumber data: Bapperida Kulon Progo, 2025

4.2 Tema Pembangunan Tahun 2026

Tema Pembangunan pada Rancangan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Tema Pembangunan Rancangan RKP tahun 2026, Tema Pembangunan Rancangan RKPD DIY 2026, dan visi misi Bupati periode 2025-2030.

4.2.1 Tema RKPD Tahun 2026

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam Rancangan RKPD Kulon Progo tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan DIY, dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160, dan rancangan awal RPJMD 2025-2029 Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

Sampai dengan tahap penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 ini disusun, Tema Pembangunan Rancangan RKP Tahun 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**.

Selain merujuk pada Tema Pembangunan RKP tahun 2026, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 juga memperhatikan tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY tahun 2026, yaitu **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”**. *Mainstreaming* dari tema tersebut yaitu sektor unggulan: pariwisata, pertanian, industri dan manufaktur. Di samping itu penggunaan teknologi informasi juga menjadi prioritas *mainstreaming*.

Berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di wilayah Kabupaten Kulon Progo ke depan serta memperhatikan Tema Pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2026 dan tema pembangunan DIY Tahun 2026 sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD DIY Tahun 2026, maka disepakati untuk Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 adalah:

“Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan”

Fondasi Pembangunan, berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sumber daya manusia dan infrastruktur adalah fondasi perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2024). Mendasar pada hal tersebut, maka prioritas dari fondasi pembangunan adalah **peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan**.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, Pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas telah merilis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan guna mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama:

1. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
3. Perluasan akses dan kesempatan

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka prioritas pembangunan dirumuskan **pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah**. Terkait pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut, ditetapkan juga prioritas **penanggulangan kemiskinan**. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dibutuhkan pusat pertumbuhan baru dengan **pengembangan kawasan aerotropolis**. Peningkatan penatakelolaan untuk mencapai tujuan tersebut akan dilakukan dengan **optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**.

Tema Pembangunan tahun 2026 tersebut juga berpedoman pada visi bupati terpilih yaitu **“terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya yang berkelanjutan”** yang dijabarkan dalam 4 misi pembangunan Kulon Progo 2025-2029 yakni:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius;
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang *good governance*, aspiratif serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

4.2.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Pada Bab II, telah dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu strategis yang selanjutnya dianalisis untuk menentukan fokus pembangunan pada tahun 2026. Beberapa permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Permasalahan daerah terkait kualitas sumber daya manusia berupa belum tercapainya target rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, selain itu derajat kesehatan masyarakat juga masih belum optimal. Di sisi lain prestasi generasi muda di Kabupaten Kulon Progo masih di rendah akibat sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh wilayah kabupaten Kulon Progo.
2. Permasalahan daerah terkait kemiskinan adalah dengan masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang disertai dengan masih lebarnya ketimpangan pendapatan antar warga yang ditandai dengan semakin tingginya rasio gini. Hal tersebut seiring dengan kualitas penanganan kemiskinan yang belum akurat seperti tata kelola data kemiskinan baik dari pusat maupun daerah yang perlu diperbaiki.
3. Permasalahan pada urusan perekonomian adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang berada pada 4,77%. Pertumbuhan ekonomi Kulon Progo merupakan yang terendah di DIY.
4. Permasalahan daerah terkait kebencanaan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan ditandai rendahnya kondisi sarana prasarana kebencanaan dalam rangka pemenuhan SPM serta penataan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang belum terkelola dengan baik sehingga sering menimbulkan ketidakdisiplinan dan ketidaktertiban dalam aktivitas kesehariannya. Kulon Progo juga merupakan wilayah risiko tinggi terhadap bencana;
5. Permasalahan daerah terkait daya dukung lingkungan hidup terutama dalam hal belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan meningkatnya beban pencemaran lingkungan
 - a. Menurunnya kualitas dan kuantitas air

- b. Menurunnya kualitas udara
 - c. Pengelolaan sampah belum optimal
6. Permasalahan daerah terkait pembangunan sarana prasarana infrastruktur daerah yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo yakni kualitas jalan yang masih terbatas, sistem transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat belum optimal serta belum optimalnya infrastruktur pendukung Bandara Internasional Yogyakarta.
7. Permasalahan daerah terkait tata kelola pelayanan publik yang berindikator belum optimalnya kualitas pelayanan publik serta belum optimalnya pengelolaan penunjang administrasi pemerintahan meliputi pengawasan, kapasitas aparatur negara, serta manajemen keuangan.

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dan memedomani isu strategis dalam Rancangan Akhir RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Kulon Progo, maka isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia
2. Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan pelestarian nilai budaya
4. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah
6. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah
7. Perwujudan wilayah yang aman dan nyaman
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan
9. Optimalisasi kecukupan pangan dan air bersih
10. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Selanjutnya untuk menjawab mewujudkan tema tersebut ditetapkan 6 prioritas pembangunan yaitu:

1. **Pengembangan Kawasan Aerotropolis**

Prioritas ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan kawasan di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta sebagai pusat kegiatan baru yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya dan pengembangan ekonomi kawasan sekitarnya terutama perkotaan Wates. Prioritas ini juga upaya untuk meningkatkan akses wilayah di Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Prioritas ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan daerah yakni masih rendahnya angka melek huruf; belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat; serta menjawab isu strategis daerah yakni sumber daya manusia yang belum kompetitif apabila dibandingkan dengan daerah lain baik di dalam DIY ataupun dengan sebagian kecil wilayah lain di Indonesia. Fokus prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia lebih ditekankan pada upaya-upaya pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan serta berbagai kebijakan manajemen SDM dan berbagai pelatihan keterampilan yang diperlukan masyarakat Kulon Progo dan disesuaikan dengan kemajuan jaman.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas ini bertujuan untuk menjawab permasalahan daerah masih tingginya angka kemiskinan. Fokus dari prioritas ini spesifik pada intervensi penduduk miskin melalui klaster pertama penanggulangan kemiskinan yaitu pemberian bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan perlindungan terhadap keterlantaran.

Perlindungan sosial dilakukan dengan tujuan pengurangan kemiskinan dengan fokus pemberian Bantuan Pangan Non Tunai Lokal, fasilitasi terhadap penerima bantuan sosial disertai dengan edukasi, pembayaran Premi BPJS bagi warga miskin, pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, pemberian bantuan sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni, penanganan kawasan kumuh, bantuan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan.

4. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah

Prioritas ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha, membina dan mengembangkan ekonomi dan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sesuai dengan tema pembangunan, pemberdayaan ekonomi di sini juga diartikan sebagai pembangunan ekonomi inklusif di mana selain fokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, juga perluasan akses dan kesempatan untuk seluruh golongan masyarakat.

Tujuan prioritas ini adalah untuk mengakselerasi peningkatan daya saing daerah dan kemandirian daerah yang diwujudkan dalam sasaran daerah meningkatnya kemandirian daerah dan meningkatnya daya saing daerah dengan tujuan utama meningkatkan indikator-indikator ekonomi makro.

5. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Prioritas ini ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah serta optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;
- c. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*;
- d. Mewujudkan *good governance* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- e. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

6. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan

Prioritas ini merupakan upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dengan memadukan aspek kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup dengan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Fokus pada prioritas ini antara lain melalui program

Pengendalian Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Persampahan; Peningkatan kapasitas SDM tangguh bencana; dan pengadaan sarpras penanganan bencana. Selain itu, fokus kerja pada prioritas ini adalah penyelesaian pembangunan jaringan internet di seluruh Perangkat Daerah dan kalurahan prioritas, penyelesaian regulasi penataan ruang, peningkatan sarana prasarana kerja, dan Peningkatan Inovasi Daerah.

Tabel 4.2
Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah Tahun 2026

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1.	- Kualitas sumber daya manusia - Peningkatan pelestarian nilai budaya	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat - Meningkatnya peran keberagaman dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat
2.	Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya taraf hidup masyarakat
3.	- Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah - Optimalisasi kecukupan pangan dan air bersih	- Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah - Pengembangan kawasan aerotropolis	- Meningkatnya kemandirian daerah - Meningkatnya daya saing daerah - Menurunnya pengangguran
4.	- Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah - Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan - Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	- Meningkatnya kesesuaian peruntukan ruang - Meningkatnya pelayanan infrastruktur daerah - Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup - Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5.	- Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah - Perwujudan wilayah yang aman dan nyaman	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel - Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Sumber: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025

4.2.3 Keselarasan Tema RKPD Tahun 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045

Visi Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah ***“Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan”***. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 4 misi pembangunan Kulon Progo 2025-2045 yakni:

1. Mewujudkan manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera;
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman & demokratis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkanlah sasaran-sasaran pokok. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah merupakan panduan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan holistik. Secara esensial, sasaran ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Sasaran-sasaran pokok tersebut yaitu:

A. Misi 1

1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif
4. Meningkatnya pengembangan & pelestarian kebudayaan
5. Terwujudnya Kesenjangan Gender

B. Misi 2

1. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah
2. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah
3. Terjangkaunya Pemenuhan Kebutuhan Bermukim

C. Misi 3

1. Meningkatnya Regulasi dan Tata Kelola yang Akuntabel
2. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
3. Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman

D. Misi 4

1. Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas
2. Terwujudnya Daerah yang Berketahanan dan Berdaulat Pangan
3. Terciptanya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

RKPD Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045, dengan penekanan pada penguatan fondasi pembangunan daerah. Pada periode satu (2025-2029), arah kebijakan akan berfokus dalam penguatan fondasi pembangunan daerah. Hal ini meliputi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari Kabupaten Kulon Progo. Ketika kondisi sumber daya manusia yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kondisi lingkungan dalam kondisi baik kemudian dengan dukungan kualitas pemerintahan yang mumpuni maka

dapat menjadi penggerak pembangunan daerah di periode selanjutnya yang akan masuk menuju percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan penegasan tersebut, maka tema pembangunan 2026 adalah **“Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan”** telah selaras dengan penekanan pembangunan pada tahun kedua RPJMD 2025-2029. Penekanan prioritas adalah pada penguatan fondasi pembangunan baik dari segi sumber daya manusia dan juga infrastruktur.

4.2.4 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD Tahun 2026 dengan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Pada saat dokumen RKPD ditetapkan, RPJMD 2025-2029 belum ditetapkan sehingga RKPD tahun 2026 mendasar pada Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029. Tema pembangunan 2026 yaitu **“Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan”** selaras dengan arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 pada tahun kedua (tahun 2026) yaitu **“Penguatan Ekonomi Lokal dan Tata Kelola: Mendorong pemberdayaan UMKM, inovasi produk lokal, dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi serta peningkatan efisiensi pelayanan publik”**. Adapun penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2026 dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2025-2029 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

Keselarasn Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan 2026
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	
Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	Penanggulangan kemiskinan
Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya; Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya; dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kemandirian Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto; PDRB Per Kapita (ADHB); Nilai	1. Pemberdayaan ekonomi dan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas Pembangunan 2026
			PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	peningkatan daya saing daerah; 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	
Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	Rasio Gini	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Pemerintahan Digital (Indesk Pemdi); Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP); Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK); Indeks Kepuasan Masyarakat; Indeks Maturitas SPIP	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis	Crime Rate	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHA); Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	1. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum; Tingkat Pelayanan Jalan (level of service)	2. Pengembangan kawasan aerotropolis
Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

4.2.5 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 mencantumkan tujuan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 adalah:

1. Terwujudnya kualitas hidup kehidupan masyarakat
2. Mengecilnya ketimpangan wilayah
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
4. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik

Adapun sasaran pembangunan tahun 2022-2027 difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural serta tata kelola pemerintah yang baik. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Keselarasan prioritas pembangunan dalam RKPD Kulon Progo 2026 dengan RPJMD DIY 2022-2027 digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kulon Progo 2026 dengan
Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027

Tujuan Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027	Indikator	Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027		Prioritas Pembangunan 2026
		Sasaran	Indikator	
Terwujudnya kualitas hidup – kehidupan – penghidupan masyarakat	Indeks	Semakin kecilnya	1. Angka Kemiskinan	1. Penanggulangan kemiskinan;
	Pertumbuhan	tingkat kemiskinan		2. Pengembangan kawasan aerotropolis
	Inklusif (IGI=Inclusive Growth Index)			
	Indeks Kebahagiaan	Penghidupan Ekonomi yang layak	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 2. Pendapatan Per Kapita (Rp Juta) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4. Inflasi	
		Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	Meningkatnya Kapasitas Ekonomi pada kawasan belum maju	1. Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah; 2. Pengembangan kawasan aerotropolis
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Good Governance	1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP 3. Indeks Demokrasi Indonesia	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tujuan Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027	Indikator	Sasaran Pembangunan RPJMD DIY 2022-2027		Prioritas Pembangunan 2026
		Sasaran	Indikator	
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

4.2.6 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2026

Sampai dengan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 ini disusun, tema pembangunan DIY tahun 2026 yang bersumber dari Rancangan Akhir RKPD DIY tahun 2026 adalah:

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2026 telah selaras dengan prioritas pembangunan DIY pada tahun 2026. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Keselarasn Prioritas Pembangunan DIY pada RKPD DIY 2026 dan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2026

No	Prioritas Pembangunan DIY 2026	Prioritas Pembangunan Kulon Progo 2026
1.	Penurunan tingkat kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan
2.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	• Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah • Pengembangan kawasan aerotropolis
3.	Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
4.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	• Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah • Pengembangan kawasan aerotropolis
5.	Penguatan <i>good governance</i> pada berbagai tingkatan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

4.2.7 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2026

Pada RKP tahun 2026, terdapat 8 prioritas nasional (PN) yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dengan Prioritas Nasional 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

Keselarasan Prioritas Nasional pada RKP 2026 dan Prioritas Pembangunan Kulon Progo pada RKPD Kulon Progo 2026

No	Prioritas Nasional 2026	Prioritas Pembangunan Kulon Progo 2026
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	• Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan • Pengembangan kawasan aerotropolis
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

	Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah • Penanggulangan kemiskinan
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2026 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026.

pada tahun 2026 berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat pada tahap masa reses III tahun 2023/ 2024 dan reses I tahun 2024/ 2025, terdapat 3.551 usulan permasalahan yang disampaikan dari 40 anggota DPRD (legislatif) kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (eksekutif). Berbagai usulan permasalahan tersebut disampaikan secara resmi melalui Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026.

Usulan permasalahan tersebut terbagi menjadi beberapa OPD tujuan yakni:

1. Sekretariat Daerah: 97 usulan permasalahan
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: 53 usulan permasalahan
3. Dinas Kesehatan: 19 usulan permasalahan
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: 8 usulan permasalahan
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 14 usulan permasalahan
6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga: 40 usulan permasalahan
7. Dinas Kebudayaan: 36 usulan permasalahan
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: 10 usulan permasalahan
9. Dinas Perdagangan: 12 usulan permasalahan

10. Dinas Tenaga Kerja: 397 usulan permasalahan
11. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM: 43 usulan permasalahan
12. Dinas Pertanian dan Pangan: 437 usulan permasalahan
13. Dinas Kelautan dan Perikanan: 39 usulan permasalahan
14. Dinas Pariwisata: 35 usulan permasalahan
15. Dinas Lingkungan Hidup: 18 usulan permasalahan
16. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman: 2.132 usulan permasalahan
17. Dinas Perhubungan: 155 usulan permasalahan
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah: 5 usulan permasalahan

Kemudian untuk sinkronisasi dengan program prioritas daerah yakni:

1. Prioritas pengembangan kawasan aerotropolis merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Penanggulangan kemiskinan merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
4. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan usulan permasalahan di OPD Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.3.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kulon Progo, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo :

Adapun tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 yaitu:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2026;

2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2026;
3. Menyelaraskan usulan Pokir dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan;
4. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian pembangunan Kabupaten Kulon Progo melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026;
5. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Kulon Progo;
7. Memastikan rencana pembangunan sejalan dengan kebutuhan masyarakat;
8. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
9. Mendukung terwujudnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang lebih baik.

4.3.2 Rekomendasi DPRD

Rekomendasi dari DPRD untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja adalah agar penyusunan RKPD tahun berikutnya dapat diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian target:

1. Pelaksanaan kegiatan/ subkegiatan agar memperhatikan manfaat (*output*) dan dampak (*impact*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Perangkat Daerah agar melakukan perencanaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan output subkegiatan/ kegiatan dengan berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
3. Perangkat daerah agar melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum optimal serta memperhitungkan dampak (*outcome*) dari subkegiatan/ kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2026.

4.4 Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama

Untuk menjamin keselarasan Kegiatan Prioritas Utama, disusun dukungan pemkab terhadap Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Utama. Keselarasan Prioritas hingga dukungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama				
NO.	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	Prioritas Nasional 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2	Prioritas Nasional 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Pengembangan Pangan Hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

		Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
		Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
		Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
		Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
		Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
		Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
		Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
		Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
3	Prioritas Nasional 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		

	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
		Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
4	Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang Berkualitas (PHTC)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
		Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In- Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		

		Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Penurunan Kematian Ibu dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Pencegahan dan Penurunan Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
		Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		

4	Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
		Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
		Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
5	Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
6	Prioritas Nasional 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
		Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		
		Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

4.5 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

Untuk meningkatkan keselarasan Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Kulon Progo, maka Pemkab Kulon Progo melaksanakan beberapa intervensi pendukung Pembangunan Kewilayahan sebagai berikut:

Tabel 4.8

Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan					
KODE	RKP 2026		RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A1 A2 A3	Kawasan Perkotaan Yogyakarta (A1), Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan	Pembangunan Pantai Congot Kab. Kulon Progo	Pantai Congot	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata

	Yogyakarta (A2), dan Kawasan Aerotropolis YIA (A3) (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan)	Persiapan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Kulonprogo (YIA)	Exit tol Yogyakarta YIA	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Pertaru
C1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air Progo-Opak	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat (D.I Kalibawang)	Daerah Irigasi Kalibawang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPKP
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPKP
		Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Serang dan DAS Progo	DAS Progo	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

4.6 Penerapan Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor 4 tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam rangka Pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029, intervensi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

Tabel 4.9
Intervensi Kabupaten Kulon Progo terhadap Proyek Strategis Nasional

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Kulon Progo	Subkegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Program Makan Bergizi Gratis	Pembekalan higiene dan sanitasi kepada pengelola MBG	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Program Direktif Presiden
2	Sekolah Rakyat	Penyiapan lokasi	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Direktif Presiden
3	Digitalisasi Pendidikan	- Peningkatan kompetensi guru - Penguatan pendidikan literasi dan numerasi	- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - Pengembangan konten digital untuk pendidikan - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Direktif Presiden
4	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pembentukan badan hukum koperasi merah putih	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	Program Direktif Presiden
5	Pengentasan Kemiskinan: - Kartu Kesejahteraan - Kartu Usaha Afirmatif	- Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah - penerapan data tunggal kemiskinan	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Bapperida - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Kulon Progo	Subkegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
		• pemenuhan perlindungan sosial • Pendanaan usaha mikro melalui KerisKu • Fasilitasi budi daya dan benih perikanan • Hibah sarana dan alat bantu penangkapan ikan • Pelatihan pertanian • bantuan sosial pangan pada keluarga	• Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga • Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	• Dinas Perindustrian Koperasi & UKM • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Pertanian dan Pangan	
6	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Pembangunan dan perbaikan sekolah dan madrasah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
7	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	• Optimalisasi pelayanan RSUD Wates (Peningkatan pelayanan: KJSU - KIA); • Perluasan RSUD NAS dan pengembangan layanan trauma center; • Optimalisasi Fungsi Pelayanan Puskesmas Kalibawang	• Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan; • Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan; • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas.	Dinas Kesehatan	
8	Program Penuntasan TBC	Tracing dan pengobatan tuntas TB, AIDS dan Malaria	• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; • Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	

No	Proyek Strategis Nasional	Intervensi di Kulon Progo	Subkegiatan	Perangkat Daerah	Keterangan
9	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	- Dinas Pertanian dan Pangan - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
10	Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi	Peningkatan Produksi Daging Sapi	- Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain; - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian dan Pangan	
11	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Integrasi layanan Publik (terkait portal layanan) serta dashboard layanan pimpinan	- Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah; - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas; - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
12	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	Penyusunan peta tematik	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
13	Pembangunan 3 Juta Rumah	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
16	Pengelolaan Sampah Terpadu	Edukasi pemilahan sampah dan 1 Padukuhan 1 Bank Sampah	- Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	
17	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo	Manajemen lalu lintas	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	
21	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam RKPD ini merupakan usulan program/ kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten serta Dana Keistimewaan DIY. Usulan program/ kegiatan melalui sumber dana APBN dan APBD DIY belum ada kepastian sampai dengan Rancangan Akhir RKPD ini disusun.

5.1. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kulon Progo (APBD Kabupaten)

Program Kegiatan pada RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. KULON PROGO
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						295.794.430.912,00							306.986.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						279.864.832.400,00							290.701.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						279.864.832.400,00							290.701.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 persen	246.583.149.800,00						-	249.258.000.000,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Laporan	161.000.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	167.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	151.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Laporan	244.142.401.761,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	-	246.505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3170 Orang/bulan	242.629.302.061,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		245.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1.452.049.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		1.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	61.049.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	7.099.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	-	20.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	7.099.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGALISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		15.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 Laporan	99.046.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	-	130.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGALISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		45.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	58.096.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo		85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor	-			1 Laporan	195.000.000,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	195.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Laporan	1.598.903.739,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	-	1.680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	315.788.439,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.283.115.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Laporan	379.698.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	-	555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	217.499.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	29.997.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				240 Unit	132.202.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo		135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	-			100 persen 57.25 persen 73.56 persen 84.43 persen	33.137.682.600,00						-	41.238.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SD Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SD Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SD	-			3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 7 Laporan	14.966.788.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	20.735.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	366.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	356.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2000 Peserta Didik	264.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				450 Orang	6.045.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		6.130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1090 Orang	120.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				335 Satuan Pendidikan	75.699.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1314 Orang	111.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	14.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	15.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	49.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	35.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	3.423.238.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				390 Orang	295.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				335 Satuan Pendidikan	588.300.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				34367 Peserta Didik	3.146.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		3.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang SMP Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang SMP Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Jumlah Laporan Peningkatan Capaian Kompetensi Minimum Literasi Numerasi Jenjang SMP	-			3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 7 Laporan	13.539.699.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	15.545.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	5.479.173.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	2.925.551.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	210.801.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				18598 Peserta Didik	2.566.014.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1660 Peserta Didik	287.366.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				72 Orang	960.375.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				319 Orang	98.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				67 Satuan Pendidikan	22.031.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				100 Orang	26.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				85 Orang	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	23.050.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				85 Orang	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Pengembangan kawasan aerotropolis	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	32.650.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningkata n kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningkata n kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	613.585.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				490 Orang	197.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Jenjang PAUD Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang PAUD Jumlah Laporan Peningkatan Kompetensi Guru	-			1 Laporan 7 Laporan 4 Laporan	4.146.119.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD	-	4.380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				387 Peserta Didik	50.754.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1470 Orang	2.982.870.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				330 Orang	60.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				825 Satuan Pendidikan	90.294.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>				825 Orang	164.478.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	33.840.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	7.315.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			0				20	25.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	8.412.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				814 Orang	215.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		0,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				825 Satuan Pendidikan	308.154.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan PAUD		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Jenjang Kesetaraan	-			6 Laporan	485.075.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan	-	578.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				230 Peserta Didik	266.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				23 Orang	75.175.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	9.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	63.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				10 Orang	12.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	32.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan Kesetaraan		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan	-			1 Kurikulum	65.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi	-			1 Laporan	65.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan	-	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik	-			41.88 persen	79.000.000,00						-	105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan	-			2 Laporan	79.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan	-	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	24.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.929.598.512,00							16.285.000.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						15.542.979.512,00							15.885.000.000,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha	-			36.33 persen	994.435.100,00						-	885.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	-			3 Laporan	99.435.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				80 Orang	50.244.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	37.162.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	12.028.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Pemuda di wilayah Kabupaten Kulon Progo		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	-			1 Laporan	895.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kulon Progo	-	765.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	895.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kulon Progo		765.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif.	-			55.78 persen	14.548.544.412,00						-	15.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	-			1 Laporan	10.281.544.412,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	10.281.544.412,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo		10.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	-			1 Laporan	4.267.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo	-	5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				744 Orang	4.267.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Atlet di wilayah Kabupaten Kulon Progo		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						386.619.000,00							400.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Implementasi Pendidikan Berbasis Budaya	-			26.87 persen	386.619.000,00						-	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya	-			1 Laporan	386.619.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan	-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				1 Laporan	386.619.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN						125.864.800.307,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						125.864.800.307,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						125.864.800.307,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 persen	98.777.590.008,00						-	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			2 dokumen	63.781.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	39.742.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	24.038.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 dokumen	96.923.576.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				755 Orang/bulan	96.660.170.060,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	238.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.106.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 dokumen	127.978.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.950.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	64.028.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 dokumen	61.363.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				36 Unit	61.363.640,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 dokumen	833.899.370,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	382.067.482,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	451.831.888,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 dokumen	766.989.938,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	437.173.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	181.963.638,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	147.852.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Pemenuhan UKP UKM	-			88,46 persen	26.917.845.399,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			4 dokumen	3.038.479.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	524.266.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	72.913.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	2.353.096.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	88.203.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			32 dokumen	23.775.925.699,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3391 Orang	106.976.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3349 Orang	19.635.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3329 Orang	34.364.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19210 Orang	18.820.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53063 Orang	116.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81400 Orang	48.448.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61406 Orang	129.110.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13,000 Orang	22.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5,000 Orang	75.828.360,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1450 Orang	8.640.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4318 Orang	76.435.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5710 Orang	153.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	30.200.383,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	141.310.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	27.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	162.253.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	94.176.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	47.449.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	146.662.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	20.873.016.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	18.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				10 Unit	12.010.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	136.515.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	376.754.756,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				44 Unit	39.319.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	23.135.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	429.333.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				741 Orang	62.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				197 Orang	11.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				11068 Orang	283.350.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	43.800.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	6.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			1 dokumen	3.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			2 dokumen	100.440.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				92 Unit	18.020.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	82.420.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	% Peningkatan kapasitas SDM	-			69,96 persen	86.609.600,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	5.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	5.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-			2 dokumen	76.929.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1248 Orang	25.212.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	51.716.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	4.380.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				43 Orang	4.380.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	% Sediaan farmasi, alkes, makmin sesuai standar	-			91,72 persen	25.912.800,00						-	0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Laporan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-			1 dokumen	14.766.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	14.766.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Laporan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-			1 dokumen	4.656.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	4.656.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Laporan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-			1 dokumen	6.490.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>				24 Unit	6.490.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan</i>	-			50,41 persen	56.842.500,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			1 dokumen	38.955.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	38.955.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	17.887.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	17.887.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangdang disabilitas.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES						181.250.000.000,00							185.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						181.250.000.000,00							185.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						181.250.000.000,00							185.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Wates	-			86 %	181.250.000.000,00						-	185.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	181.250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo; RSUD Wates	-	185.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	181.250.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo; RSUD Wates		185.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
		RSUD NYI AGENG SERANG						41.665.983.000,00							45.006.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						41.665.983.000,00							45.006.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						41.665.983.000,00							45.006.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS</i>	-			85,75 .	41.665.983.000,00						-	45.006.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Laporan Pelaksanaan Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	-			1 dokumen	41.665.983.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo	-	45.006.000.000,00	RSUD NYI AGENG SERANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	41.665.983.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo		45.006.000.000,00	RSUD NYI AGENG SERANG
		PUSKESMAS GALUR I						1.286.000.000,00						0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.286.000.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.286.000.000,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.286.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.286.000.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GALUR I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.286.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS GALUR I
		PUSKESMAS GALUR II						1.010.836.400,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.010.836.400,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.010.836.400,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.010.836.400,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.010.836.400,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GALUR II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.010.836.400,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS GALUR II
		PUSKESMAS GIRIMULYO I						1.132.197.375,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						995.197.375,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						995.197.375,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	995.197.375,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	995.197.375,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	995.197.375,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						137.000.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						137.000.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	137.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	137.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Penyangandang Disabilitas	-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	137.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Penyangandang Disabilitas		0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO I
		PUSKESMAS GIRIMULYO II						1.436.183.599,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.436.183.599,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.436.183.599,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.436.183.599,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.436.183.599,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.436.183.599,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS GIRIMULYO II
		PUSKESMAS KALIBAWANG						2.482.672.800,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.385.432.800,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.385.432.800,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.385.432.800,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.385.432.800,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.385.432.800,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						97.240.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						97.240.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	97.240.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	97.240.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	97.240.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS KALIBAWANG
		PUSKESMAS KOKAP I						1.546.921.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.546.921.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.546.921.000,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.546.921.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.546.921.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KOKAP I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.546.921.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS KOKAP I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KOKAP II						973.166.740,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						973.166.740,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						973.166.740,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	973.166.740,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	973.166.740,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS KOKAP II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	973.166.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS KOKAP II
		PUSKESMAS LENDAH I						1.586.953.645,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.586.953.645,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.586.953.645,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.586.953.645,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.586.953.645,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS LENDAH I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.586.953.645,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS LENDAH I
		PUSKESMAS LENDAH II						1.452.642.500,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.452.642.500,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.452.642.500,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.452.642.500,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.452.642.500,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS LENDAH II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.452.642.500,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS LENDAH II
		PUSKESMAS NANGGULAN						2.407.130.397,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.407.130.397,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.407.130.397,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.407.130.397,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.407.130.397,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS NANGGULAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.407.130.397,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS NANGGULAN
		PUSKESMAS PANJATAN I						1.592.512.800,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.592.512.800,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.592.512.800,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.592.512.800,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.592.512.800,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PANJATAN I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.592.512.800,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS PANJATAN I
		PUSKESMAS PANJATAN II						1.646.029.883,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.646.029.883,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.646.029.883,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.646.029.883,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.646.029.883,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PANJATAN II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.646.029.883,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS PANJATAN II
		PUSKESMAS PENGASIH I						1.693.014.573,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.693.014.573,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.693.014.573,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.693.014.573,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.693.014.573,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PENGASIH I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.693.014.573,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Sendangsari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS PENGASIH I
		PUSKESMAS PENGASIH II						1.743.910.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.743.910.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.743.910.000,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.743.910.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.743.910.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS PENGASIH II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.743.910.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS PENGASIH II
		PUSKESMAS SAMIGALUH I						1.657.070.699,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.657.070.699,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.657.070.699,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.657.070.699,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.657.070.699,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.657.070.699,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH I
		PUSKESMAS SAMIGALUH II						1.096.087.913,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.096.087.913,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.096.087.913,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.096.087.913,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.096.087.913,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.096.087.913,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Pagerharjo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SAMIGALUH II
		PUSKESMAS SENTOLO I						3.056.733.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.490.000.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.490.000.000,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.490.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.490.000.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.490.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						566.733.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						566.733.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	566.733.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	566.733.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	566.733.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Banguncipto Kab. Kulon Progo, Sentolo, Sentolo Kab. Kulon Progo, Sentolo, Kaliagung Kab. Kulon Progo, Sentolo, Sukoreno	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO I
		PUSKESMAS SENTOLO II						1.881.568.339,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.579.498.339,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.579.498.339,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.579.498.339,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.579.498.339,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			0				0 0	1.579.498.339,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						302.070.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						302.070.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	302.070.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	302.070.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	302.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS SENTOLO II
		PUSKESMAS TEMON I						2.351.640.572,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.223.500.572,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.223.500.572,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.223.500.572,00						-	0,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.223.500.572,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON I	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.223.500.572,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON I	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						128.140.000,00							0,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						128.140.000,00							0,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	128.140.000,00						-	0,00		
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	128.140.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON I	
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	128.140.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON I	
		PUSKESMAS TEMON II							1.066.520.088,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						975.035.088,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						975.035.088,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	975.035.088,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	975.035.088,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	975.035.088,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON II
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						91.485.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						91.485.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	91.485.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	91.485.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS TEMON II
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	91.485.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS TEMON II
		PUSKESMAS WATES							2.881.600.513,00						0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.881.600.513,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.881.600.513,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.881.600.513,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.881.600.513,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	PUSKESMAS WATES
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.881.600.513,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	PUSKESMAS WATES
		DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							108.176.403.070,00						10.593.565.040,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						108.176.403.070,00							10.593.565.040,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						89.289.757.047,00							10.593.565.040,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.212.107.393,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	26.619.900,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	14.369.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	12.250.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.792.853.181,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/bulan	5.677.953.181,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	97.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	17.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	155.425.100,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	57.357.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	98.068.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	43.423.400,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	43.423.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	588.340.212,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	320.990.580,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	267.349.632,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	605.445.600,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	368.845.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	183.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				49 Unit	53.000.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	undefined	-			undefined undefined	6.421.423.650,00						-	8.610.660.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	450.741.600,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	801.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				304 Lembaga	119.186.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		409.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	331.554.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		391.790.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.970.682.050,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	7.809.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	2.221.967.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		3.431.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				5,15 KM	3.748.714.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		4.378.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	450.000.000,00						-	491.400.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	450.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	491.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				80 SR	450.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		491.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	1.505.800.000,00						-	1.413.058.600,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.505.800.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	1.413.058.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	230.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		480.658.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				119 Rumah Tangga	1.275.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		932.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	9.439.252.000,00						-	78.446.440,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	9.439.252.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	78.446.440,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	9.320.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		78.446.440,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				180 Dokumen	119.252.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	35.035.493.800,00						-	0,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	35.035.493.800,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	627.408.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				807 KM	420.273.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				36 KM	7.186.555.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				0.5 KM	3.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.8 KM	2.625.635.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5.4 KM	20.011.253.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				40 Jembatan	1.164.367.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	575.986.504,00						-	0,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	133.396.804,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i>				70 Orang	133.396.804,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	442.589.700,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				110 Paket Pekerjaan	442.589.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-			-	28.649.693.700,00						-	0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	28.649.693.700,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				6 Dokumen	4.200.606.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates				3 Dokumen	16.196.697.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo				1 Dokumen	5.456.992.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo				2 Dokumen	2.795.398.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						18.886.646.023,00							0,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	1.236.999.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	106.999.800,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				3 Unit Rumah	66.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	40.999.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	1.130.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	1.130.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	4.121.907.100,00						-	0,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	4.121.907.100,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				195 Unit Rumah	4.121.907.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	13.527.739.123,00						-	0,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	13.527.739.123,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	99.999.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				68 Lokasi	13.427.739.223,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						7.129.408.889,00							6.985.818.610,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.942.506.889,00							6.785.818.610,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.942.506.889,00							6.785.818.610,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi</i>	-			100 %	4.983.702.089,00						-	4.540.334.130,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah</i>	-			14 dokumen	4.960.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	11.993.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	3.374.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	1.586.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		3.493.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji, administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan laporan keuangan	-			55	3.123.420.280,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	3.136.555.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.081.455.280,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		3.081.455.280,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	40.765.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		51.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	1.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		3.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-			25 orang	7.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	7.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			2	19.649.700,00			-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	33.730.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.163.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo		15.890.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10.486.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo		17.840.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan operasional/lapangan dan sarpras gedung kantor/gudang	-			2 unit	1.042.943.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	520.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	846.804.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	196.139.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan/dokumen penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Jasa Pelayanan Umum	-			2 laporan	635.725.009,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	635.726.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	68.194.809,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		68.196.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	567.530.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		567.530.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			80 unit	149.102.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	187.329.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	133.234.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		166.831.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				63 Unit	15.868.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo		20.498.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-			100 %	1.958.804.800,00						-	2.245.484.480,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penyediaan Layanan dasar dalam rangka dampak penegakan perda/perkada dan pemberdayaan linmas	-			25 dokumen	1.454.264.700,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	1.524.935.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	1.258.217.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		1.270.948.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	190.097.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		248.037.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	5.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		5.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan/dokumen penyelidikan, sosialisasi, penanganan dan pengawasan terhadap pelanggaran perda/perkada	-			26 laporan	504.540.100,00			-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	720.549.480,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	179.527.740,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		179.527.740,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	119.672.460,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo		179.527.740,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	102.819.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo		181.747.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	102.520.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kulon Progo		179.747.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						186.902.000,00							200.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						186.902.000,00							200.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-			100 %	186.902.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	-			180 orang	186.902.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo	-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.07.0012	Pembinaan Jagawarga														
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				180 Orang	186.902.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kulon Progo		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						3.948.898.000,00							2.033.161.010,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.948.898.000,00							2.033.161.010,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.948.898.000,00							2.033.161.010,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.305.758.929,00						-	1.994.236.010,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.938.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	2.638.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.299.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2.638.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		2.638.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.894.346.553,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	1.991.597.810,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	1.859.853.153,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		1.952.845.810,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	32.096.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		36.355.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.396.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		2.396.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	19.356.800,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	19.356.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	187.210.148,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	56.727.412,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu- nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.340.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu- nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	125.142.736,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.907.428,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	176.045.628,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	19.861.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	892.346.700,00						-	38.925.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	36.936.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				300 Orang	36.936.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	251.557.300,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	38.925.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	23.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		8.925.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	49.614.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				17 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	93.391.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				110 Kawasan	55.050.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	515.187.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	478.832.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	36.355.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	88.665.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	19.754.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	68.910.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	750.792.371,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	709.025.671,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	582.952.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	4.620.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran														
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				10 laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	21.453.671,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	41.766.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	28.134.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				5 Desa/Kelurahan	13.632.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						13.154.994.553,00							248.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.494.533.253,00							0,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						12.494.533.253,00							0,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	-			100 %	3.574.382.553,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	24.065.600,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	16.754.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	7.311.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	2.908.138.462,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	2.856.796.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	41.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	9.936.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	33.223.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.075.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	27.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	13.647.400,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	13.647.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	462.871.811,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN dan Non Dinas Sosial PPPA	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	63.260.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN dan Non Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	399.611.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN dan Non Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	132.435.880,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	115.352.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				17 Unit	17.082.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	ASN Dinas Sosial PPPA		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</i>	-			59.02 %	70.792.900,00						-	0,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	4.321.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Organisasi Kemasyarakatan	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>				1 Dokumen	4.321.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Organisasi Kemasyarakatan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	66.471.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	psks kelembagaan dan psks perseorangan	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	49.359.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	psks kelembagaan dan psks perseorangan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				66 Orang	17.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	psks kelembagaan dan psks perseorangan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	-			100 %	555.625.400,00						-	0,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			7 Dokumen	550.669.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				462 Orang	425.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	21.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				240 Orang	38.626.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	11.000.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	14.175.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	27.830.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	4.956.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	LKS	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>				5 Dokumen	4.956.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	LKS		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	-			29.13 %	8.007.159.200,00						-	0,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 Dokumen	8.007.159.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Penerima Manfaat,	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>				71000 Orang	67.796.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Penerima Manfaat,		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				3271 Orang	7.869.339.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Penerima Manfaat,		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				40000 Usulan	70.023.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	Penerima Manfaat,		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana	-			100 %	210.408.600,00						-	0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	32.119.900,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Non Alam	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	32.119.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	Korban Bencana Alam dan Non Alam		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	178.288.700,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	tagana, KSB	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Kampung	13.396.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	tagana, KSB		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	164.892.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	tagana, KSB		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	-			100 %	76.164.600,00						-	0,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	76.164.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	76.164.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						660.461.300,00							248.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						458.387.300,00							248.000.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	-			71.7 nilai	99.921.300,00						-	28.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	45.320.500,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	OPD, Kalurahan, GOW,Masyarakat	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				6 Laporan	45.320.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggul angan kemiskinan	OPD, Kalurahan, GOW,Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	54.600.800,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Desa Prima, P2WKSS, Industri Rumahan, Masyarakat,GOW	-	28.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				31 Lembaga	54.600.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Desa Prima, P2WKSS, Industri Rumahan, Masyarakat,GOW		28.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	-			10.24 per 100.000 prmpuan	237.324.500,00						-	0,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	48.454.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	perempuan dan anak	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				3 laporan	48.454.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	perempuan dan anak		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	120.034.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				80 orang	120.034.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Perempuan Korban Kekerasan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	68.835.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Perempuan	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan				180 Orang	68.835.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	Perempuan		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kalurahan Layak Anak	-			11,49 %	106.476.300,00						-	220.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	106.476.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	OPD, LSM, Stakeholder, Forum Anak, Kalurahan	-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				52 Lembaga	106.476.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	OPD, LSM, Stakeholder, Forum Anak, Kalurahan		220.000.000,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	-			0.02 %	14.665.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	14.665.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	anak	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				28 Orang	14.665.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	anak		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						202.074.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	-			0.040 %	202.074.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	202.074.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	desa prima	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan														
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya				70 Orang	202.074.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	desa prima		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS TENAGA KERJA						13.028.623.971,00						0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.954.716.271,00							0,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						11.894.957.371,00							0,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	3.613.607.671,00						-	0,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan sub kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 laporan	12.009.800,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	6.009.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 laporan	2.998.447.067,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	2.950.034.367,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	42.412.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	5.999.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 laporan	70.785.600,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.850.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	44.935.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 laporan	5.277.900,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	5.277.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			2 laporan	362.046.204,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	189.246.720,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	172.799.484,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 undefined	165.041.100,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	135.006.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	30.034.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	-			2 dokumen	116.811.500,00						-	0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	jumlah laporan perencanaan tenaga kerja	-			1 dokumen	116.811.500,00			-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				3 Dokumen	106.198.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				5 Orang	10.612.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Dinas Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Sertifikasi	-			93,75 %	1.225.922.000,00						-	0,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Penerapan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan Kualifikasi Klaster	-			100 %	1.101.106.100,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				192 Orang	1.060.006.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>				2 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				2 Unit	31.099.800,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-			10 lembaga	115.703.200,00			-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	LPKS dan BLKK	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Lembaga	115.703.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	LPKS dan BLKK		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	-			1 laporan	9.112.700,00			-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>				1 Dokumen	9.112.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan</i>	-			80,02 %	6.302.943.600,00						-	0,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan pelayanan antar Kerja</i>	-			2184 orang	6.161.776.600,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				1920 Orang	106.325.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				640 Orang	6.055.451.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja	-			4415 orang	141.167.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2510 Orang	141.167.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak	-			44,12 %	635.672.600,00						-	0,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP yang disahkan, PKB yang didaftarkan, LKS Bipartit, SP/SB yang dicatatkan	-			63 dokumen	59.139.300,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Perusahaan di Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				6 Laporan	59.139.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Perusahaan di Kabupaten Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan/laporan yang masuk	-			10 laporan	576.533.300,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Perusahaan di Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				2 Perkara	34.406.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Perusahaan di Kabupaten Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				2641 Orang	542.126.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Perusahaan di Kabupaten Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.059.758.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	1.059.758.900,00						-	0,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	1.059.758.900,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				112 Unit	1.059.758.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						73.907.700,00							0,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						73.907.700,00							0,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kerjasama antar Daerah Tujuan Transmigrasi	-			100 %	73.907.700,00						-	0,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase transmigran yang ditempatkan	-			100 %	73.907.700,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan</i>				2 Kepala Keluarga	73.907.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						28.250.410.400,00							29.990.625.687,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.538.815.000,00							2.538.815.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.538.815.000,00							2.538.815.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-			-	2.538.815.000,00						-	2.538.815.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	2.538.815.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	2.538.815.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh</i>				1 Dokumen	2.538.815.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		2.538.815.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.213.506.000,00							6.673.866.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						381.400.000,00							841.760.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	328.000.000,00						-	680.110.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	120.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	145.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3 Laporan	120.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		145.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	208.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	535.110.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			0				3 0	208.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		535.110.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-			-	20.000.000,00						-	101.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	101.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		101.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	33.400.000,00						-	60.650.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	60.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	33.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		60.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5.832.106.000,00							5.832.106.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	5.832.106.000,00						-	5.832.106.000,00	
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-	-			-	1.642.664.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	1.642.664.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi</i>				1 Objek	1.642.664.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan bangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		1.642.664.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	4.189.442.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan bangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	4.189.442.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman</i>				1 Laporan	502.664.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan bangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan aan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		502.664.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.22.08.5.06.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional</i>				1 Dokumen	3.686.778.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		3.686.778.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						19.498.089.400,00							20.777.944.687,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						19.498.089.400,00							20.777.944.687,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	13.796.101.719,00						-	15.292.790.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	64.839.956,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	101.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12.840.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	51.999.956,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.143.178.613,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok tani/ gabungan kelompok tani	-	12.853.790.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2338 Orang/bulan	12.067.478.613,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok tani/ gabungan kelompok tani		12.750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	63.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok tani/ gabungan kelompok tani		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	12.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok tani/ gabungan kelompok tani		23.790.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	7.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	70.189.700,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	190.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.265.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		90.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	40.924.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	33.692.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	33.692.400,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	864.548.950,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	1.030.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	200.999.458,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		280.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	663.549.492,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	609.652.100,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				135 Unit	278.271.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	266.234.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	65.145.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	2.129.723.600,00						-	1.726.095.687,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	313.274.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	178.274.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	313.274.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		178.274.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.176.393.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	1.148.375.387,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	1.016.393.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		985.425.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		162.950.387,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	640.055.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	399.445.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				65 Ekor	640.055.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguangan bangsan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		399.445.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			-	2.022.708.800,00						-	1.970.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	410.748.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguangan bangsan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	650.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	410.748.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguangan bangsan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		650.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.611.960.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	1.320.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	1.350.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	160.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi</i>				1 Unit	101.960.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	855.268.281,00						-	876.875.200,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	361.737.921,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	380.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				1 Laporan	99.512.140,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	262.225.781,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		270.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	252.622.260,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				4 laporan	153.881.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM</i>				1 Laporan	98.740.760,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	240.908.100,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	246.875.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				1 Laporan	70.907.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan</i>				4 Produk	170.000.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		176.875.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-			-	99.923.800,00						-	99.923.800,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	99.923.800,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	99.923.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				907,8 Ha	99.923.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		99.923.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	594.363.200,00						-	812.260.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	594.363.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan bangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani	-	812.260.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	174.363.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan bangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1628 Unit	420.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan bangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/ Gabungan Kelompok Tani		612.260.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)						10.845.996.246,00							11.288.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.423.746.346,00							5.638.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						5.423.746.346,00							5.638.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	3.473.769.796,00						-	3.623.000.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	17.662.600,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	19.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.293.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		12.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	6.368.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		7.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			3 Dokumen	2.627.004.100,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	2.668.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				36 Orang/bulan	2.511.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		2.550.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	80.927.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		82.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	35.076.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		36.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	75.113.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	89.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.113.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		39.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Dokumen	146.973.300,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	195.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				49 Unit	146.973.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		195.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	225.489.696,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	253.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	86.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		88.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	139.289.696,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		165.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Dokumen	381.526.900,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	-	399.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	169.434.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		184.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	173.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		175.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	38.292.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah		40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase perencanaan penataan ruang	-			11,53 %	1.296.374.550,00						-	1.335.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Laporan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-			3 Dokumen	551.610.550,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo	-	600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	290.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		310.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	190.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		210.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>				1 Laporan	71.610.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		80.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>	-			2 Dokumen	573.042.000,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo	-	560.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				100 Layanan	290.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		310.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	283.042.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			3 Dokumen	171.722.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo	-	175.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			<i>Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang</i>				5 Kasus	17.520.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		18.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				300 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		57.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR														
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	99.201.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang Kab. Kulon Progo		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Tata Ruang berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	653.602.000,00						-	680.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Laporan Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Satuan Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-			2 Dokumen	653.602.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	-	680.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				2 Dokumen	317.782.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		330.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.01.0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	335.820.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang		350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.422.249.900,00							5.650.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						5.422.249.900,00							5.650.000.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang terdaftar di BPN dan terekomendasi pemanfaatannya	-			100 %	30.068.700,00						-	35.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 80 Berita Acara	-			10 Berita Acara	30.068.700,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				10 Berita Acara	30.068.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Persentase pembayaran sewa tanah desa untuk pembangunan</i>	-			100 %	1.593.040.300,00						-	1.650.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			398 Dokumen	1.593.040.300,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	1.650.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				398 Dokumen	1.593.040.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		1.650.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN	-			16,36 %	498.076.400,00						-	530.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	498.076.400,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	-	530.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	127.431.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		130.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				710 Dokumen	370.645.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
4.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Pertanahan berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	1.611.064.500,00						-	1.710.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	-			30 Dokumen	1.611.064.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	1.710.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				4 Dokumen	1.313.665.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		1.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				30 Dokumen	297.399.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		310.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5.	-	-	-	-			-	1.690.000.000,00						-	1.725.000.000,00	
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	-			-	1.690.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	1.725.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				30 Dokumen	130.000.000,00	-	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		145.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa														
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				80 Berita Acara	1.560.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		1.580.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						13.184.470.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	-			-	0,00						-	0,00	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5.01.0008	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.184.470.000,00							0,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						12.205.471.700,00							0,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.284.831.578,00						-	0,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	51.798.900,00			-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	42.309.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.489.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.936.110.644,00			-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	2.872.951.544,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), P BJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	55.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	8.059.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	52.325.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	52.325.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	82.025.700,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.661.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	63.364.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	38.415.600,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	38.415.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	602.584.724,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	259.237.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	343.347.024,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	521.571.010,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	410.208.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	87.699.710,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	23.663.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	48.645.700,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	48.645.700,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				2 Dokumen	48.645.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	1.007.934.400,00						-	0,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	975.683.100,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	275.145.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkannya hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkannya hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				5 Dokumen	700.537.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkannya hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	32.251.300,00			Melanjutkannya hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	32.251.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	1.435.559.500,00						-	0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	1.435.559.500,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				8,6 Ha	1.240.099.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1259 Unit	195.460.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	33.122.300,00						-	0,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.122.300,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				70 Badan Usaha	33.122.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	149.485.600,00						-	0,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	149.485.600,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				180 Orang	42.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>				10 Lembaga	107.485.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	20.024.000,00						-	0,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	20.024.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola</i>				15 Pengaduan	20.024.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	5.225.868.622,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	5.225.868.622,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				0 Kelompok	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0 Ton	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	270.999.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				12045 Ton	4.954.868.822,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						978.998.300,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	978.998.300,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	978.998.300,00			-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	978.998.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.633.906.714,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.633.906.714,00							0,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.633.906.714,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	3.978.364.464,00						-	0,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	11.470.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.127.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2.343.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	3.045.904.909,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	3.000.847.209,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	42.010.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.047.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	3.623.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				56 Orang	3.623.600,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	33.873.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.679.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			-				-	18.194.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	136.791.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	128.227.800,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	8.563.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	576.270.255,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	109.987.944,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	466.282.311,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	170.430.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				8 Unit	61.669.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	88.762.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	19.998.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk memiliki kartu identitas	-			92,20 %	438.041.100,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	438.041.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	20.156.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				48000 Dokumen	407.625.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan</i>				2303 Laporan	10.259.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran</i>	-			99,55 %	109.957.500,00						-	0,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	81.560.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>				5000 Dokumen	32.770.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</i>				5000 Layanan	48.789.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	28.397.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</i>				135 Laporan	28.397.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Inovasi pelayanan</i>	-			2 Inovasi	84.437.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	39.752.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	39.752.650,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	31.422.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	10.159.950,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	21.262.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	13.262.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	13.262.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	-			100 %	23.105.850,00						-	0,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	23.105.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	23.105.850,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						11.011.435.483,00							11.664.017.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.742.225.483,00							11.464.017.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						182.765.000,00							183.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas kalurahan yang tersinkronisasi	-			76,14 %	182.765.000,00						-	183.400.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			1 dokumen	182.765.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	183.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				2 Dokumen	182.765.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		183.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						10.245.920.683,00							10.812.028.400,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	3.569.989.639,00						-	3.594.687.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			2 dokumen	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	13.127.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.127.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			3 dokumen	3.157.146.551,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	3.546.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.118.397.351,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.543.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	35.747.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	3.002.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			2 dokumen	30.372.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	34.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	15.320.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	15.052.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			2 dokumen	255.615.588,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121.217.780,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	134.397.808,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			2 dokumen	117.855.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				68 Unit	100.483.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	17.371.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDes Kategori Maju Persentase Kalurahan kategori TDD	-			20,69 % 48,28 %	1.993.183.344,00						-	2.066.671.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			8 dokumen	1.993.183.344,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	2.066.671.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	25.092.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		29.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				87 Dokumen	14.809.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				87 Dokumen	1.788.806.044,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>				87 Dokumen	20.036.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.821.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>				4 Laporan	18.085.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	33.136.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		35.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				87 Dokumen	20.841.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		21.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 dokumen Dokumen	72.375.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		73.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti	-			14 %	4.682.747.700,00						-	5.150.670.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			2 dokumen	4.682.747.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	5.150.670.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	2.997.196.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		3.465.119.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				16 Laporan	1.685.551.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		1.685.551.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						313.539.800,00							468.588.600,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB	-			82,95 %	73.819.200,00						-	262.443.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			2 dokumen	73.819.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	262.443.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	25.360.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		131.221.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	48.458.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		131.221.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet Need Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	-			14,55 % 60,10 %	155.129.300,00						-	206.145.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			1 dokumen	60.505.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				5 Organisasi	60.505.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			2 dokumen	94.623.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	126.145.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	32.823.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		32.785.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	61.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-		93.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera	-			6,57 %	84.591.300,00						-	0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			1 dokumen	77.276.500,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	77.276.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			1 dokumen	7.314.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga														
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				1 Laporan	7.314.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						269.210.000,00							200.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						269.210.000,00							200.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan dengan Aparatur Pemerintah Kalurahan yang Profesional	-			11,49 %	269.210.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Subkegiatan	-			1 dokumen	269.210.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota															
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				1 Lembaga	269.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS PERHUBUNGAN						17.260.812.200,00							0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						749.487.000,00							0,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						749.487.000,00							0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	-			16,96 %	749.487.000,00						-	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Laporan pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 dokumen	749.487.000,00			-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates				1 Dokumen	749.487.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.511.325.200,00							0,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						16.511.325.200,00							0,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	4.270.145.762,00						-	0,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disampaikan tepat waktu	-			20 dokumen	23.414.400,00			-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.506.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			0				18 0	13.908.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	-			14 laporan	3.387.834.070,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	3.328.492.870,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	45.559.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	13.781.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			5 dokumen	2.200.000,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	-			12 dokumen	59.905.500,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.869.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	38.036.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Aset	-			6 Unit	56.253.100,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	56.253.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			6 laporan	349.647.192,00			-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	187.054.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	162.592.692,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset dalam kondisi baik	-			66 Unit	390.891.500,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	327.433.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	63.458.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ketersediaan Perlengkapan Jalan	-			20,08 %	12.241.179.438,00						-	0,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang ada	-			10998 Unit	10.131.051.338,00			-	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangu nan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				170 Unit	2.980.108.238,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				110 Unit	721.915.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3548 Unit	360.184.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				212 Unit	6.068.844.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)</i>	-			4 Unit	331.840.300,00			-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>				4 Unit	331.840.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah Titik Parkir On Street yang Tertata</i>	-			60 titik	331.200.000,00			-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	331.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-			5.589 Unit	289.365.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				4265 Unit	180.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				21 Unit	108.865.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penurunan ketimpanga n (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Terperiksa Operasi Yustisi Jumlah Ruas Jalan yang sudah di VC Ratio	-			3000 Unit 177 ruas	660.755.000,00			-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	273.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				4 Laporan	387.755.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	-			2 Laporan	20.540.000,00			-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				2 Laporan	20.540.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Bis Sekolah Tersedianya Dokumen Load Factor	-			2 Unit 2 dokumen	476.427.300,00			-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	476.427.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						9.669.204.000,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.636.496.900,00							0,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.742.012.800,00							0,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	-			100 %	3.427.955.616,00						-	0,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	43.553.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	37.653.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.050.454.388,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	3.000.093.888,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	43.900.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.460.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	62.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.182.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	43.398.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	35.363.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.363.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	135.594.528,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	18.205.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	117.389.528,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.009.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	80.009.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan komunikasi media massa dan informasi (%)	-			90,48 %	1.313.142.784,00						-	0,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial (%)	-			90,48 %	1.313.142.784,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	802.932.784,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				6 Media	510.210.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	4.000.914.400,00						-	0,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.000.914.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				40 Perangkat Daerah	3.116.904.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	84.989.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				2 Aplikasi	110.697.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	412.812.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	182.689.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	92.821.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						157.821.800,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	157.821.800,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	157.821.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk</i>				80 %	16.872.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.</i>				80 %	140.948.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						324.177.400,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	324.177.400,00						-	0,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	305.224.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				3 Laporan	305.224.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	18.952.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				1 Kegiatan	18.952.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						412.484.900,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	412.484.900,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	412.484.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital														
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				1 Objek	412.484.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X	NON URUSAN						32.707.100,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						32.707.100,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	32.707.100,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.707.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	22.707.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						8.406.859.576,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.983.690.276,00							0,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						4.505.105.476,00							0,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			1001100 %	3.004.571.637,00						-	0,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.876.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				2 0	5.783.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.092.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.525.434.735,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.485.876.035,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	33.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	6.358.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	41.688.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.018.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	23.670.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	18.322.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	18.322.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.266.902,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	190.243.714,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.023.188,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	107.982.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				16 Unit	62.349.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				49 Unit	45.632.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase Peningkatan Koperasi Sehat</i>	-			24,04 %	108.595.000,00						-	0,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	108.595.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUMKM	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				13 Unit Usaha	97.888.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	KUMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			0				60 0	10.706.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	KUMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase pemberdayaan usaha mikro</i>	-			54,01 %	909.968.809,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	909.968.809,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				640 Unit Usaha	841.989.909,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				175 Unit Usaha	60.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				49724 Unit Usaha	7.778.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Omzet Usaha Mikro	-			6000000 Rupiah	481.970.030,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	481.970.030,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	481.970.030,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Penanggulangan kemiskinan	UMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.478.584.800,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	-			2 Pelaku Usaha	3.478.584.800,00						-	0,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	3.478.584.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUMKM	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif														
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				200 Unit	3.478.584.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUMKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						423.169.300,00							0,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						423.169.300,00							0,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n	-			0,83 %	423.169.300,00						-	0,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	423.169.300,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Industri Kecil	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	63.726.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Industri Kecil		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				3 Dokumen	76.830.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Industri Kecil		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	282.612.600,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Industri Kecil		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						3.675.977.650,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.204.900.650,00							0,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.204.900.650,00							0,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.611.067.250,00						-	0,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	12.478.800,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				2 0	7.258.900,00	-	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	5.219.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 Dokumen	1.942.771.299,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				28 Orang/bulan	1.937.191.599,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	5.579.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	75.802.300,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.550.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	52.252.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	387.476.951,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	162.588.295,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	224.888.656,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 Dokumen	192.537.900,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				15 Unit	81.791.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	52.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				38 Unit	57.896.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peta Potensi yang Tersusun	-			100 Persen	120.341.500,00						-	0,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	120.341.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	120.341.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal	-			30 Persen	161.206.400,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	161.206.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				3 Dokumen	161.206.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>IKM Pelayanan dan Perizinan</i>	-			84.75-89.82 Persen	261.686.400,00						-	0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 Dokumen	261.686.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				2650 Pelaku Usaha	235.435.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	8.813.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				400 Kegiatan Usaha	17.438.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	10.517.500,00						-	0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	10.517.500,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				20 Kegiatan Usaha	10.517.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-			-	40.081.600,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	40.081.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	40.081.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						440.777.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						440.777.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-	-			-	440.777.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	440.777.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	440.777.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Masyarakat Kulon Progo		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	NON URUSAN						30.300.000,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						30.300.000,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	30.300.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	30.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.300.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penurunan tingkat kemiskinan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)						42.281.405.000,00							83.420.671.259,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						42.281.405.000,00							83.420.671.259,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						42.281.405.000,00							83.420.671.259,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi.	-			100 %	3.326.179.468,00						-	5.667.221.259,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja disampaikan Tepat Waktu</i>	-			2 Laporan	39.167.059,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	59.167.059,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	17.380.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		27.380.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	21.787.059,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		31.787.059,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	-			3 Laporan	2.561.699.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	3.625.342.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	2.495.342.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		3.495.342.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	61.366.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	4.991.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</i>	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah	-	380.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah		380.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah	-	50.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan. Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah		15.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan. Pengembangan kawasan aerotropolis	Masyarakat Dalam Daerah		35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</i>	-			2 Laporan	62.284.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	146.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.611.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		56.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	45.673.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	-			1 Laporan	19.041.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	38.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	19.041.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		38.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</i>	-			2 Laporan	275.885.309,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	78.849.013,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	197.036.296,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	-			4 Laporan	368.101.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah	-	918.112.200,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	86.989.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	258.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23.112.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	1. Penurunan tingkat kemiskinan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		33.112.200,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat Dalam Daerah		425.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Penonton Pertunjukan seni di Taman Budaya	-			71.300 Orang	260.094.532,00						-	1.855.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.	-			1 Laporan	260.094.532,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni	-	1.855.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	260.094.532,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Pengasih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		1.855.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
3.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Warisan Budaya yang Sudah Ditetapkan. Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Keluarahan Kalurahan Budaya Kategori Berkembang. Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik Jumlah Aktifitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman.	-			233 Warisan Budaya 64 Kelurahan/ Kalurahan 82,56 % 8 Kegiatan	38.695.131.000,00						-	75.898.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman.</i>	-			3 Laporan	2.841.671.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo	-	12.395.721.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan</i>				3 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		8.204.050.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				4 Laporan	1.600.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningka- tan kualitas SDM Peningkata- n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		2.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				1 Unit	591.671.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningka- tan kualitas SDM Peningkata- n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		1.591.671.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelestarian Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya.	-			3 Laporan	12.833.685.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo	-	24.258.215.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				1 Objek	12.027.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		22.027.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				20 Objek	549.070.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		973.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia														
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				2 Objek	257.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		1.257.615.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Taman Budaya.	-			1 Laporan	3.500.000.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo	-	6.530.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota														
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	3.500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Pengasih	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		6.530.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	-			1 Laporan	1.000.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo	-	2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				20 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni Kab. Kulon Progo		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya.	-			11 Laporan	18.519.775.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni	-	30.714.514.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya														
			Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				2 Laporan	1.340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		2.340.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				2 Lembaga	1.064.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		2.064.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				3 Laporan	1.254.433.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		2.254.433.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				5 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		1.350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta														
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				10 Laporan	6.465.293.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		7.465.293.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				75 Orang	294.738.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		1.294.738.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				5 Laporan	1.665.261.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		4.560.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Even Penggiat Seni</i>				3 Laporan	2.654.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		3.654.327.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi														
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi</i>				5 Laporan	2.731.473.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Seni		3.731.473.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						4.432.625.096,00							4.332.986.700,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.432.625.096,00							4.332.986.700,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						139.296.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi</i>	-			200 Dokumen	139.296.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			1 Dokumen	139.296.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				1 Dokumen	139.296.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4.037.364.496,00							3.990.676.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	3.824.536.596,00						-	3.748.324.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	7.186.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	13.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	3.686.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			3 Dokumen	2.970.978.342,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	2.976.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	2.940.096.342,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		2.931.620.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	26.897.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		39.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.984.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	10.000.000,00			-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	47.644.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.708.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25.936.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			1 Dokumen	87.150.000,00			-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	87.150.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	366.538.704,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	394.204.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	107.429.760,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		118.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	259.108.944,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Peningka tan kualitas SDM Peningkata n kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		276.204.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			3 Dokumen	335.038.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	258.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	114.049.150,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	177.459.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				42 Unit	43.529.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		48.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	-			219.032 Pengunjung	210.616.500,00						-	242.352.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			5 Dokumen	185.127.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo	-	215.332.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				4 Perpustakaan	12.370.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		13.830.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	90.938.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		118.960.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	5.889.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				36000 Eksemplar	3.102.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	72.826.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		82.542.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			1 Dokumen	25.489.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo	-	27.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	25.489.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		27.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0 Perpustakaan	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				0 Lokus	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Perpustakaan di Wilayah Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Naskah kuno yang terdata	-			12 Naskah	2.211.400,00						-	0,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	2.211.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Pemilik Naskah Kuno	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno</i>				50 Orang	1.198.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Pemilik Naskah Kuno		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			<i>Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>				1 Eksemplar	1.013.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Masyarakat Kulon Progo, Pemilik Naskah Kuno		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						255.964.600,00							342.310.700,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	<i>Nilai ASKI Perangkat Daerah</i>	-			87 Nilai	255.964.600,00						-	342.310.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	195.109.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, Kelurahan/Kelurahan, BUMD	-	238.410.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			0				18700 0	158.410.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, Kelurahan/Kelurahan, BUMD		158.410.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	36.698.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, Kelurahan/Kelurahan, BUMD		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			1 Dokumen	50.503.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, Kelurahan/Kelurahan, BUMD	-	103.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				15000 Arsip	50.503.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Perangkat Daerah di Kab. Kulon Progo, Kelurahan/Kelurahan, BUMD		103.900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			1 Dokumen	10.351.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				100 Pengguna	10.351.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						6.338.114.051,00							482.989.629,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.591.231.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.591.231.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	2.591.231.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	2.591.231.000,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0005	Pengembangan Budaya Bahari														
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				15 Objek	2.591.231.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.746.883.051,00							482.989.629,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3.746.883.051,00							482.989.629,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.135.410.500,00						-	0,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	6.907.300,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.352.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	4.554.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			37 Orang/Bulan	2.727.931.706,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				518 Orang/bulan	2.679.657.306,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	45.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	2.374.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	-			1 Dokumen	1.215.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.215.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	56.091.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.272.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	44.819.250,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	207.505.544,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	60.479.544,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	147.026.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor</i>	-			1 Paket	135.759.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	123.171.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4.601.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	7.985.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	157.261.072,00						-	40.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-			8 Unit	52.509.300,00			-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	KUB Nelayan	-	15.154.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				16 Unit	52.509.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	KUB Nelayan		15.154.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-			75 Orang	24.905.700,00			-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	KUB Nelayan	-	24.905.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				75 Orang	24.905.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	KUB Nelayan		24.905.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-			1 Layanan	79.846.072,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	79.846.072,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	KUB Nelayan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	318.990.179,00						-	307.708.229,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-			3 Kelompok	178.946.600,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Pokdakan	-	167.664.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	178.946.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Pokdakan		167.664.650,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			59 Unit	140.043.579,00			-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Pokdakan	-	140.043.579,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	63.218.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Pokdakan		63.218.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			0				59 0	76.825.179,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Pokdakan		76.825.179,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	38.339.600,00						-	38.339.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota</i>	-			30 Pelaku Usaha	38.339.600,00			-	2. Pengembangan bangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	KUB Nelayan	-	38.339.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			0				30 0	38.339.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	KUB Nelayan		38.339.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	96.881.700,00						-	96.881.700,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko</i>	-			45 Unit Usaha	41.417.300,00			-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Poklahsar	-	41.417.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			<i>Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko</i>				45 Unit Usaha	41.417.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Poklahsar		41.417.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	-			20 Pelaku Usaha	55.464.400,00			-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Poklahsar	-	55.464.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	55.464.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	Poklahsar		55.464.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						26.227.803.000,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.100.943.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						19.100.943.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	19.100.943.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	296.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	296.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-			-	10.569.796.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya														
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				13 Objek	10.569.796.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	8.235.147.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan pembangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah														
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				13 Dokumen	5.585.147.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan pembangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				5 Laporan	2.650.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan pembangunan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.126.860.000,00							0,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						7.126.860.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.142.227.763,00						-	0,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	12.456.400,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	5.056.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.507.820.360,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.448.043.860,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	55.742.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.034.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	67.018.769,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	28.680.769,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	38.338.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	90.484.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	90.484.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	320.016.134,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	138.826.570,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	181.189.564,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	144.431.200,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	90.962.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.403.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	28.065.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	3.467.003.537,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	3.180.041.737,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3.180.041.737,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	286.961.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				8 Unit	286.961.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	260.970.200,00						-	0,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	260.970.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	165.341.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	95.628.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	256.658.500,00						-	0,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	256.658.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				35 Orang	159.228.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				50 Orang	97.429.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERDAGANGAN						13.868.778.800,00							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						13.868.778.800,00							0,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						13.868.778.800,00							0,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	4.222.940.673,00						-	0,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	-			2 dokumen	14.635.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			-				-	6.955.600,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	7.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan</i>	-			3 dokumen	3.633.247.488,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				47 Orang/bulan	3.552.393.488,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	58.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	22.254.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	-			2 dokumen	39.053.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.455.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	20.598.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	-			1 dokumen	18.371.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	18.371.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan</i>	-			2 dokumen	346.643.385,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	172.199.409,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	174.443.976,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan</i>	-			2 dokumen	170.988.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				21 Unit	144.936.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	26.052.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik	-			40 %	9.051.267.327,00						-	0,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	-			2 dokumen	8.613.878.927,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	6.315.693.027,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				25 Unit	2.298.185.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan</i>	-			2 dokumen	437.388.400,00			-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				2788 Dokumen	197.772.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				4086 Dokumen	239.615.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	<i>Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu</i>	-			5,87 %	303.767.000,00						-	0,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan</i>	-			1 dokumen	53.367.000,00			-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	53.367.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	-			1 dokumen	250.400.000,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				13 Laporan	250.400.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang	-			15 orang	151.197.000,00						-	0,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan	-			1 dokumen	151.197.000,00			-	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi</i>				120 Produk	151.197.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</i>	-			91,74 %	139.606.800,00						-	0,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Jumlah laporan pelaksanaan subkegiatan</i>	-			1 dokumen	139.606.800,00			-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				6020 Unit	139.606.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH						23.396.591.658,00							26.172.969.690,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						23.396.591.658,00							26.172.969.690,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						23.396.591.658,00							26.172.969.690,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. <i>Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi ; 2. Persentase fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan; 3.Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi ; 4. Persentase Peningkatan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	-			100; 100, 100, 100 %	18.305.844.731,00						-	20.293.985.696,25	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	13.797.800,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	23.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.250.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		10.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5.546.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		12.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 dokumen	9.701.028.522,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda	-	10.242.895.658,10	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				133 Orang/bulan	9.548.259.122,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		10.045.664.078,10	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	146.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		186.165.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	6.569.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	ASN Setda, Penatausaha Keuangan dan Barang Setda		11.066.580,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 dokumen	7.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	ASN Lingkup Sekretariat Daerah	-	8.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	7.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	ASN Lingkup Sekretariat Daerah		8.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	1.078.770.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah	-	1.611.232.665,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	425.162.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		517.507.515,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	653.607.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Sekretariat Daerah		1.093.725.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 dokumen	74.614.352,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Lingkup Sekretariat Daerah	-	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	74.614.352,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Lingkup Sekretariat Daerah		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 dokumen	3.015.003.957,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Lingkup Sekretariat Daerah	-	3.001.744.780,65	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	734.945.501,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Sekretariat Daerah		807.824.888,85	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	2.280.058.456,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah		2.193.919.891,80	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 dokumen	2.016.947.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	2.254.875.871,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				72 Unit	962.096.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		1.061.311.282,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	706.241.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		912.961.119,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				240 Unit	348.609.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo		280.603.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			4 dokumen	924.630.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati	-	1.015.557.921,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	178.797.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati		190.213.506,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				9 Paket	129.790.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati		178.499.055,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	16.043.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati		16.845.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				10 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati dan Wakil Bupati		630.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 dokumen	360.553.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah	-	405.177.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	197.435.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah		223.428.870,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	147.995.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah		161.260.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	15.122.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah		20.488.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Dokumen Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 dokumen	155.324.800,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	261.001.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				2 Dokumen	45.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				5 Laporan	52.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		92.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				8 Dokumen	57.824.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		89.851.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 dokumen	958.174.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo	-	1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				1 Laporan	958.174.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo		1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; 2. Persentase perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan; 3. Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	-			100%; 100%; 100%	4.426.697.200,00						-	4.876.819.907,40	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 dokumen	541.402.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon	-	707.039.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				3 Dokumen	254.993.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		290.453.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				4 Dokumen	133.414.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		169.509.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				5 Dokumen	152.994.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo, 12 Kapanewon		247.076.655,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 dokumen	2.715.758.400,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan	-	2.805.227.027,40	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				10 Dokumen	1.485.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		1.363.173.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				9 Dokumen	1.116.801.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		1.293.207.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	113.257.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penanggulangan kemiskinan	Masyarakat, Satuan Pendidikan, Ormas dan Organisasi Keagamaan		148.845.257,40	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 dokumen	1.133.003.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolah	-	1.320.365.865,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				420 Dokumen	80.992.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolah		125.370.735,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum</i>				12 Kasus	984.189.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolah		1.079.581.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				420 Dokumen	67.821.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Desa, Sekolah		115.413.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 dokumen	36.533.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo	-	44.187.675,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri</i>				4 Dokumen	36.533.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemkab Kulon Progo		44.187.675,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. <i>Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian</i> ; 2. <i>Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</i> ; 3. <i>Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan</i>	-			100%; 100%; 100%	592.555.727,00						-	927.095.386,35	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	209.520.127,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD	-	261.007.978,35	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5 Dokumen	108.483.127,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		129.832.423,35	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	101.037.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	Koperasi, UMKM, BUMDesa, OPD Terkait, BUMD, BLUD, LKD		131.175.555,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 dokumen	83.135.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait	-	123.637.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	37.781.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait		45.152.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	27.289.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait		46.984.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	18.064.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah Terkait		31.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 dokumen	229.355.200,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	336.473.025,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 Dokumen	150.951.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		226.600.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	33.569.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		54.008.430,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				240 Orang	44.834.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		55.864.095,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 dokumen	70.545.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan	-	205.977.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	18.136.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		153.477.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	22.409.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Perangkat Daerah Terkait, Distributor dan Kios Pengecer Pupuk, Pelaku Usaha Produk Lokal, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Pokdakan, Poklahsar, Kelompok Tani Hutan		31.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kematangan Perangkat Daerah; Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-			49,05 ; 100 Nilai Kematangan ; %	71.494.000,00						-	75.068.700,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	53.994.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo	-	56.693.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				18 Lembaga	28.122.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		29.528.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				1 Dokumen	25.872.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kulon Progo		27.165.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 dokumen	17.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Pamong Kalurahan, Pejabat Struktural	-	18.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	ASN, Pamong Kalurahan, Pejabat Struktural		18.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						35.930.046.100,00							48.908.053.257,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35.930.046.100,00							48.908.053.257,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						35.930.046.100,00							48.908.053.257,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Subkegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 Persen	23.900.575.356,00						-	25.290.601.462,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	6.404.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	28.006.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.568.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		14.715.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2.836.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		13.290.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	2.120.247.915,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	2.139.993.262,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	2.070.451.715,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		2.064.493.262,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	46.760.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		64.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	3.036.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		11.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	20.308.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	24.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	20.308.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		24.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	221.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	253.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	95.568.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		104.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	126.182.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		148.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	144.968.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	524.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				304 Unit	144.968.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		524.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	1.666.591.712,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	1.666.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	217.660.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		236.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.448.931.712,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		1.430.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	573.484.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	810.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	444.308.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		506.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	39.109.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		178.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				61 Unit	90.067.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		126.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	18.947.391.929,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD, Sekretariat DPRD	-	19.509.402.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	18.674.688.629,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD, Sekretariat DPRD		19.420.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				80 Paket	192.463.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD, Sekretariat DPRD		1.164.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	80.240.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD, Sekretariat DPRD		88.237.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	199.428.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD	-	335.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				10 Laporan	199.428.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Sekretariat DPRD		335.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Perda Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	-			100 Persen 100 Persen 100 Persen	12.029.470.744,00						-	23.617.451.795,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			4 Dokumen	1.993.390.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	3.741.158.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	177.721.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		205.212.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	1.072.982.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		1.646.831.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	134.456.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		219.314.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				4000 Orang	608.229.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		1.669.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	1.465.085.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	2.744.872.295,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	1.465.085.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		2.744.872.295,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	1.786.888.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	3.915.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	241.129.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		281.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	1.225.676.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		3.220.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	320.082.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		414.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	682.744.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	3.795.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	277.145.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		2.875.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				133 Dokumen	405.599.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		920.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	1.763.860.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	3.489.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				3 Dokumen	1.182.604.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan. Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		2.932.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah</i>				4000 Orang	581.255.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan. Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		556.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	149.544.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan. Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	203.550.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				4 Laporan	149.544.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		203.550.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-			-	0,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	1.020.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		1.020.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			4 Dokumen	4.187.957.844,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD	-	4.708.020.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				22 Dokumen	1.724.302.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		2.327.520.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				73 Laporan	1.454.323.044,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		1.167.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	258.652.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		345.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				3 Dokumen	750.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	DPRD		868.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH						6.738.374.737,00							7.528.581.799,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						275.841.000,00							404.752.500,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						275.841.000,00							404.752.500,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-			100 persen	275.841.000,00						-	404.752.500,00	
	4.01.04.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	112.586.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	225.172.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	4.01.04.5.05.0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun				3 Dokumen	112.586.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		225.172.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	163.255.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	179.580.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan														
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				4 Dokumen	121.297.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		133.426.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				3 Laporan	41.958.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		46.153.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.462.533.737,00							7.123.829.299,00	
	5.01	PERENCANAAN						5.954.195.937,00							6.564.657.719,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-			100 persen	4.772.137.937,00						-	5.238.857.529,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	11.030.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	12.132.790,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.091.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		6.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	4.938.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		5.432.790,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 dokumen	3.958.356.222,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	4.345.898.052,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	3.881.692.222,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		4.261.567.652,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	41.889.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		46.078.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	34.774.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		38.252.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 dokumen	26.687.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	29.356.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	26.687.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		29.356.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	149.366.395,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	162.103.255,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	21.470.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		21.418.210,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	127.895.495,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		140.685.045,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 dokumen	107.502.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	118.253.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				11 Unit	107.502.900,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		118.253.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 dokumen	301.756.420,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	331.932.062,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	95.043.240,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		104.547.564,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	206.713.180,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		227.384.498,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 dokumen	217.438.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	239.181.930,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				28 Unit	128.736.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		141.610.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	28.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		30.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				76 Unit	60.701.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		66.771.780,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan pembangunan daerah Persentase capaian fisik pelaksanaan pembangunan	-			100 persen 99,88 persen	680.694.200,00						-	747.113.620,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	438.245.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	480.419.830,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	24.668.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		27.135.570,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	413.576.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		453.284.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 dokumen	35.986.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	39.585.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	35.986.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		39.585.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumened	206.462.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo	-	227.108.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				10 Laporan	162.872.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		179.160.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				12 Laporan	43.589.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		47.948.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pengendalian lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia tepat waktu	-			100 persen	501.363.800,00						-	578.686.570,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 dokumen	239.263.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo	-	263.189.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	48.367.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		53.203.920,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				8 0	118.392.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		130.232.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	72.503.600,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	perangkat daerah dan masyarakat di kulon progo		79.753.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	95.165.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	104.681.610,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	27.373.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		30.110.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	67.791.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		74.570.650,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	166.935.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	210.815.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	81.350.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		108.130.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	85.584.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		102.685.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						508.337.800,00							559.171.580,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Inovasi Daerah	-			210 satinov	140.337.800,00						-	154.371.580,00	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	140.337.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	154.371.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	97.327.900,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		107.060.690,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				18 Laporan	43.009.900,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		47.310.890,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Capaian Riset Daerah	-			50 persen	368.000.000,00						-	404.800.000,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 dokumen	368.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo	-	404.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset</i>				1 Naskah	368.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kulon Progo		404.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						226.389.893.845,00							237.256.492.816,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						226.389.893.845,00							237.256.492.816,00	
	5.02	KEUANGAN						226.389.893.845,00							237.256.492.816,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	27.518.700.501,00						-	27.805.987.365,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	40.404.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	34.141.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		41.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	6.262.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		9.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	26.398.191.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	26.687.987.365,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	26.267.111.380,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		26.551.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	92.299.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		94.325.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.695.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.162.365,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	35.085.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		35.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	10.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	199.333.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	194.540.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.912.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		31.540.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	168.420.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		163.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	112.793.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	112.340.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	112.793.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		112.340.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	394.795.821,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	393.820.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	112.476.929,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		92.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	282.318.892,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		301.320.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	362.682.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	356.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				33 Unit	251.666.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		238.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	48.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG I NFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		23.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				107 Unit	62.915.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		95.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	193.609.412.044,00						-	203.879.505.451,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	405.210.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	471.894.480,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	60.811.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		65.704.180,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				85 Dokumen	29.393.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		59.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				12 Dokumen	209.146.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		231.031.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	105.859.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		115.859.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	229.586.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	190.904.180,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				110 Dokumen	50.148.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		55.704.180,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	12.370.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		23.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	9.444.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		19.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				42 Orang	157.622.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		92.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	60.148.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	94.800.591,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				168 Dokumen	7.847.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.430.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	6.260.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.236.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				504 Laporan	7.214.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		12.834.591,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	38.826.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		59.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	192.914.467.444,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	203.121.906.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	171.617.615.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		183.721.906.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	5.000.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		5.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	16.296.852.044,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		14.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	208.230.800,00						-	227.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	208.230.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	227.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	92.132.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		103.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	6.435.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	20.434.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				6 Dokumen	24.059.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	65.168.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		66.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	5.053.550.500,00						-	5.344.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	5.053.550.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	5.344.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	19.050.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	30.841.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		32.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	2.159.540.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		2.160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	1.817.276.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.890.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				29 Layanan	502.931.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		560.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	311.593.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		537.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	115.801.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		53.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	80.389.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	16.125.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		17.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						144.644.042.000,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						141.201.595.150,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						141.201.595.150,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	140.811.433.150,00						-	0,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	17.273.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.586.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	9.687.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	140.401.131.704,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2380 Orang/bulan	140.350.491.504,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	44.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	6.440.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	62.522.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.671.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.850.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	198.406.198,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	70.214.182,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	128.192.016,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	132.099.048,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	69.239.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	41.109.648,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	21.749.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik	-			100 %	390.162.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	390.162.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				2 Laporan	390.162.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.442.446.850,00							0,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						2.708.885.350,00							0,00	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan redistribusi Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Persentase Kedisiplinan ASN	-			247 Orang 77,69 % 99,82 %	2.708.885.350,00						-	0,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	939.836.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	713.392.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	157.147.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	69.296.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	449.035.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				247 Dokumen	39.912.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				600 Dokumen	56.098.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	353.024.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			4 Dokumen	1.248.556.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	14.530.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				65 Orang	57.048.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1.145.183.550,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	31.793.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	71.456.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	71.456.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						733.561.500,00							0,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi pengembangan kompetensi	-			43,14 %	733.561.500,00						-	0,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	733.561.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	733.561.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kabupaten Kulon Progo		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH						10.083.089.965,00							11.901.103.320,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						10.083.089.965,00							11.901.103.320,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						10.083.089.965,00							11.901.103.320,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya presentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	9.897.022.965,00						-	10.963.171.646,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 dokumen	39.910.100,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	82.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.734.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	37.176.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		42.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 dokumen	8.874.511.225,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	10.073.657.090,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	8.828.309.025,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		9.997.657.090,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	41.900.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.302.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 dokumen	45.220.000,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	45.220.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Laporan pelaksanaan sub kegiatan</i>	-			2 dokumen	131.249.300,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	124.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	19.775.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		33.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	111.474.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		91.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Laporan pelaksanaan sub kegiatan</i>	-			1 dokumen	415.160.900,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-	-	132.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				7 Unit	415.160.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		132.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan pelaksanaan sub kegiatan</i>	-			2 dokumen	178.723.740,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	225.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	81.686.832,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		78.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	97.036.908,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-		147.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan pelaksanaan sub kegiatan</i>	-			3 dokumen	212.247.700,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	-	-	255.164.556,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	157.566.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	19.891.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		37.268.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				178 Unit	34.789.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	-		17.896.556,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pengawasan	-			86,14 %	108.404.100,00						-	758.444.849,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			7 dokumen	92.272.200,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo	-	660.525.428,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				42 Laporan	9.997.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		26.828.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				109 Laporan	11.626.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		33.328.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				134 Laporan	14.025.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		227.340.432,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				170 Laporan	11.872.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		29.337.210,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa</i>				87 Laporan	17.545.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		220.689.040,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				5 Kesepakatan	4.202.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		25.345.530,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				5 Dokumen	23.002.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		97.656.216,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 dokumen	16.131.900,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	-	97.919.421,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				5 Laporan	6.657.600,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		21.664.545,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				54 Laporan	9.474.300,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		76.254.876,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</i>	-			100 %	77.662.900,00						-	179.486.825,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 dokumen	6.476.900,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo	-	18.027.765,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				4 Rekomend asi	6.476.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		18.027.765,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			4 dokumen	71.186.000,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo	-	161.459.060,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				6 perangkat daerah	2.978.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		24.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				1 perangkat daerah	8.177.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		17.468.430,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				9 Kegiatan	21.098.100,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		43.303.680,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				7 perangkat daerah	38.931.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	PD di lingkup Kabupaten Kulon Progo		76.186.950,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KAPANEWON TEMON						2.068.159.969,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan	-			100 %	100.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26.450.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						26.450.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi</i>	-			100 %	26.450.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	26.450.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi</i>				3 Dokumen	26.450.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.941.709.969,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.941.709.969,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	1.776.381.569,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	7.297.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.774.200,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen Laporan	3.523.700,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	1.485.721.345,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.453.197.945,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	28.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.923.400,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	40.232.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.702.400,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	30.530.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	30.103.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	30.103.300,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	127.519.324,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	31.825.312,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	95.694.012,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 Dokumen	85.507.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	51.068.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	20.092.400,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	14.346.900,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	-			100 %	70.675.400,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	62.851.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	48.570.200,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	14.281.200,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	7.824.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				12 Dokumen	7.824.000,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon Yang Disampaikan Tepat Waktu</i>	-			100 %	20.691.300,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	20.691.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				8 Laporan	20.691.300,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</i>	-			100 %	48.778.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	48.778.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 Orang	22.170.100,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	26.608.400,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa Yang Tepat waktu	-			100 %	25.183.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	25.183.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon	-	0,00	KAPANEWON TEMON
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	25.183.200,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Temon		0,00	KAPANEWON TEMON
		KAPANEWON WATES						4.724.595.020,00							252.786.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kelompok kesenian 8 kalurahan/kelurahan	-	0,00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			<i>Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	kelompok kesenian 8 kalurahan/kelurahan		0,00	KAPANEWON WATES
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						125.000.000,00							140.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						125.000.000,00							140.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan ketatalaksanaan dan kelembagaan</i>	-			100 %	125.000.000,00						-	140.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<i>Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan</i>	-			100 %	125.000.000,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	140.000.000,00	KAPANEWON WATES
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				4 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		140.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.499.595.020,00							252.646.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						4.499.595.020,00							252.646.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	2.485.892.820,00						-	250.508.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 0.4 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	7.621.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	9.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.698.900,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		5.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2.922.900,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		4.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 84 % terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	2.088.884.162,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	250.074.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				406 Orang/bulan	2.046.599.962,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		250.000.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	39.329.700,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		70.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.954.500,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		4.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan sebesar 0.07% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	43.610.800,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	55.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.730.800,00	Kab. Kulon Progo, Temon, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		25.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	27.880.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		30.000.000,00	KAPANEWON WATES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				21 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan sebesar 10% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	224.529.558,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	250.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	65.039.538,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		70.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	159.490.020,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	kapanewon wates		180.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Dukungan sebesar 3.4% terhadap Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 %	121.246.500,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	120.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	57.521.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	35.129.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		80.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				61 Unit	28.595.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		40.000.000,00	KAPANEWON WATES
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan non perizinan	-			100 %	57.721.600,00						-	43.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dukungan sebesar 90 % terhadap peningkatan Pelayanan Non Perizinan	-			100 %	54.855.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates	-	38.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	35.972.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates		8.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				5 Dokumen	18.882.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates		30.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Dukungan sebesar 10% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan</i>	-			100 %	2.866.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	kapanewon wates	-	5.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				12 Dokumen	2.866.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	kapanewon wates		5.000.000,00	KAPANEWON WATES
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu</i>	-			100 %	1.347.565.700,00						-	1.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dukungan sebesar 28,7 % terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-			100 %	20.750.900,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	kapanewon wates	-	35.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	20.750.900,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	kapanewon wates		35.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dukungan sebesar 98% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-			100 %	1.326.814.800,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	kapanewon wates	-	1.415.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				17 Lembaga Kemasyarak atan	889.456.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	2. Pengem bangan kehidupan ekonomi yang layak Pemberday aan ekonomi dan pening katan daya saing daerah	kapanewon wates		950.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	406.232.800,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kualitas SDM Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kapanewon wates		430.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	31.126.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates		35.000.000,00	KAPANEWON WATES
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum	-			100 %	593.560.900,00						-	615.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dukungan sebesar 97% terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum	-			100 %	593.560.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates	-	615.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				444 Orang	539.157.200,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	kapanewon wates		550.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	29.113.700,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kapanewon wates		35.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	25.290.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	kapanewon wates		30.000.000,00	KAPANEWON WATES
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-			100 %	14.854.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan Pelayanan Kecamatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-			100 %	14.854.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates	-	30.000.000,00	KAPANEWON WATES
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	14.854.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	kapanewon wates		30.000.000,00	KAPANEWON WATES
		KAPANEWON PANJATAN						2.206.199.748,00							2.390.093.946,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	-			100 %	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	100.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		100.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						21.660.000,00							40.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						21.660.000,00							40.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi</i>	-			100 %	21.660.000,00						-	40.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	21.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	40.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi</i>				3 Dokumen	21.660.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		40.000.000,00	KAPANEWON PANJATAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.084.539.748,00							2.250.093.946,00	
	7.01	KECAMATAN						2.084.539.748,00							2.250.093.946,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi</i>	-			100 %	1.919.745.948,00						-	2.098.115.306,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	6.563.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	10.620.667,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	3.085.500,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		7.469.220,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	3.477.700,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		3.151.447,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	1.639.609.676,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	1.802.934.989,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.608.334.076,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		1.769.167.484,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	27.877.600,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		30.170.360,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	3.398.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		3.597.145,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	37.625.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	31.631.490,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.315.400,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		9.191.490,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	29.310.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Panjatan		22.440.000,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	0,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	0,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Panjatan		0,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	156.489.072,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	166.125.730,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	28.884.432,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		34.416.148,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	127.604.640,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		131.709.582,00	KAPANEWON PANJATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	79.458.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	86.802.430,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	62.682.000,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		68.579.390,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-	Lingkup Kapanewon Panjatan		0,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	16.776.600,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		18.223.040,00	KAPANEWON PANJATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan non perizinan	-			100 %	60.214.200,00						-	36.940.750,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	54.318.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	29.775.020,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	40.279.800,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		11.307.780,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				8 Dokumen	14.038.400,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		18.467.240,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	5.896.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	7.165.730,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				12 Dokumen	5.896.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		7.165.730,00	KAPANEWON PANJATAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu</i>	-			100 %	26.140.500,00						-	28.754.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	26.140.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	28.754.550,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				8 Laporan	26.140.500,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		28.754.550,00	KAPANEWON PANJATAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penanganan gangguan trantibum</i>	-			100 %	60.031.900,00						-	66.035.420,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	60.031.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	66.035.420,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				76 Orang	19.001.300,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		20.901.430,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	41.030.600,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		45.133.990,00	KAPANEWON PANJATAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-			100 %	18.407.200,00						-	20.247.920,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	18.407.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan	-	20.247.920,00	KAPANEWON PANJATAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	18.407.200,00	Kab. Kulon Progo, Panjatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Panjatan		20.247.920,00	KAPANEWON PANJATAN
		KAPANEWON GALUR						1.918.860.000,00							58.724.200,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatam Urusan Kebudayaan	-			100 %	100.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						28.000.000,00							40.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						28.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Dengan Regulasi</i>	-			100 %	28.000.000,00						-	40.000.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	28.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	40.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi</i>				3 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		40.000.000,00	KAPANEWON GALUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.790.860.000,00							18.724.200,00	
	7.01	KECAMATAN						1.790.860.000,00							18.724.200,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Sub Kegiatan Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi</i>	-			100 %	1.657.168.200,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	6.714.300,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	4.114.300,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	2.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 Dokumen	1.386.229.462,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				19 Orang/bulan	1.358.465.462,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	25.250.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	2.514.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	41.780.200,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	9.550.200,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	32.230.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	143.240.059,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	32.899.794,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	110.340.265,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	79.204.179,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	58.709.600,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.778.379,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	12.716.200,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	-			100 %	53.507.500,00						-	18.724.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	48.551.500,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	9.693.200,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	34.736.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		9.693.200,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	13.815.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	4.956.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	9.031.000,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				12 Dokumen	4.956.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		9.031.000,00	KAPANEWON GALUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang Disampaikan Tepat Waktu</i>	-			100 %	16.030.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	16.030.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				7 Laporan	16.030.000,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</i>	-			100 %	52.740.400,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	52.740.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				70 Orang	22.034.600,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	30.705.800,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	-			100 %	11.413.900,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	11.413.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur	-	0,00	KAPANEWON GALUR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	11.413.900,00	Kab. Kulon Progo, Galur, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Galur		0,00	KAPANEWON GALUR
		KAPANEWON LENDAH						2.076.411.000,00							100.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kapanewon/ kalurahan	-	100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kapanewon/ kalurahan		100.000.000,00	KAPANEWON LENDAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26.481.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						26.481.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	26.481.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Laporan	26.481.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon/ kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			0				0 0	26.481.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kapanewon/ kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.949.930.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.949.930.000,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	1.796.862.400,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	undefined	-			undefined undefined	10.199.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.574.100,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	5.625.700,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.511.292.984,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.486.287.884,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	21.585.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	3.420.100,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	36.294.600,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	14.064.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.230.000,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	161.135.216,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	33.543.200,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	127.592.016,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.939.800,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	62.044.500,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	957.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	14.937.700,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON LENDAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan non perizinan	-			100 %	67.407.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			18 Laporan	61.651.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	39.515.100,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	22.136.800,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	5.755.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				12 Dokumen	5.755.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu</i>	-			100 %	17.483.600,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	17.483.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				8 Laporan	17.483.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penanganan gangguan trantibum</i>	-			100 %	49.567.200,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	49.567.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	18.584.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	30.982.600,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon dan kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-			100 %	18.609.300,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	18.609.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon/ kalurahan	-	0,00	KAPANEWON LENDAH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	18.609.300,00	Kab. Kulon Progo, Lendah, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon/ kalurahan		0,00	KAPANEWON LENDAH
		KAPANEWON SENTOLO						1.834.743.000,00							100.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Kebudayaan	-			100 %	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		100.000.000,00	KAPANEWON SENTOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						20.710.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						20.710.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-			100 %	20.710.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	20.710.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	20.710.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.714.033.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.714.033.000,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	1.535.228.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	6.529.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.604.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	2.925.200,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	1.263.322.091,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.230.599.091,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	29.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.923.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	33.859.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.824.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	24.035.000,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			undefined undefined	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	154.230.309,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	30.997.361,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	123.232.948,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Laporan	77.287.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	61.288.400,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pengembangan kawasan aerotropolis	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	15.998.700,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Non Perizinan	-			100 %	65.109.100,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	58.987.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				7 Laporan	39.542.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				9 Dokumen	19.444.900,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	6.121.700,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				12 Dokumen	6.121.700,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu</i>	-			100 %	17.687.700,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	17.687.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	17.687.700,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	-			100 %	70.234.500,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	70.234.500,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	26.244.600,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	43.989.900,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	-			100 %	25.773.500,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	25.773.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo	-	0,00	KAPANEWON SENTOLO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				6 Laporan	25.773.500,00	Kab. Kulon Progo, Sentolo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Sentolo		0,00	KAPANEWON SENTOLO
		KAPANEWON PENGASIH						1.949.939.740,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kebudayaan berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	100.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Pekerja seni di Kapanewon Pengasih, semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Pekerja seni di Kapanewon Pengasih, semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						22.096.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						22.096.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	22.096.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	22.096.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	22.096.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.827.843.740,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.827.843.740,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	1.677.393.740,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	5.294.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.188.300,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	2.105.700,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 Dokumen	1.416.097.451,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/bulan	1.388.714.651,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	24.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.432.800,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	40.158.500,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.083.500,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	33.075.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	9.029.200,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.029.200,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	132.957.789,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24.927.781,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	108.030.008,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	73.856.800,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	62.098.500,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Pengemba ngan kawasan aerotropolis	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	11.758.300,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan non perizinan	-			100 %	63.376.100,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	57.158.600,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	41.524.100,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				4 Dokumen	15.634.500,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	6.217.500,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Masyarakat di seluruh Kalurahan di Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				12 Dokumen	6.217.500,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Masyarakat di seluruh Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu</i>	-			100 %	16.956.200,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	16.956.200,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				2 Laporan	16.956.200,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penanganan gangguan trantibum</i>	-			100 %	53.816.600,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	53.816.600,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				35 Orang	16.453.000,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	37.363.600,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-			100 %	16.301.100,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	16.301.100,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih	-	0,00	KAPANEWON PENGASIH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	16.301.100,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Semua Kalurahan di Kapanewon Pengasih		0,00	KAPANEWON PENGASIH
		KAPANEWON KOKAP						1.763.299.612,00							1.802.427.900,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	-			100 Persen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		100.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						18.437.000,00							20.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						18.437.000,00							20.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada Urusan Kebudayaan berkinerja sangat tinggi	-			100 Persen	18.437.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil penerapan kaistiwemaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi	-			3 dokumen	18.437.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	20.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	18.437.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		20.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.644.862.612,00							1.682.427.900,00	
	7.01	KECAMATAN						1.644.862.612,00							1.682.427.900,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	-			100 persen	1.519.291.312,00						-	1.532.047.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.917.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	8.917.300,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.355.900,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.355.900,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	3.561.400,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		4.561.400,00	KAPANEWON KOKAP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.288.496.457,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	1.290.496.457,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.259.159.157,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		1.258.159.157,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			-				-	26.194.100,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		28.194.100,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.143.200,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		4.143.200,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 dokumen	24.904.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	29.709.800,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.709.800,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		5.709.800,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	20.195.000,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		24.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.617.555,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	127.923.543,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	27.923.543,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		29.923.543,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95.694.012,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		98.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.355.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	75.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	56.524.600,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		58.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	7.736.400,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		9.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	10.094.200,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		8.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	56.556.100,00						-	65.154.900,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i>	-			100 Persen	51.154.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	55.154.900,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	40.924.400,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		42.924.400,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	10.230.500,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		12.230.500,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang di laksanakan	-			12 dokumen	5.401.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	5.401.200,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	-			100 Persen	12.862.300,00						-	15.862.300,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	-			5 dokumen	12.862.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	15.862.300,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			-				-	12.862.300,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		15.862.300,00	KAPANEWON KOKAP
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Gangguan Penanganan Trantibum	-			100 %	48.007.400,00						-	59.363.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	48.007.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap	-	59.363.600,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 orang Orang	20.325.600,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		29.681.800,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	27.681.800,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	masyarakat kapanewon kokap		29.681.800,00	KAPANEWON KOKAP
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	8.145.500,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	8.145.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				5 Laporan	8.145.500,00	Kab. Kulon Progo, Kokap, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		10.000.000,00	KAPANEWON KOKAP
		KAPANEWON GIRIMULYO						2.114.360.937,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	<i>Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan kebudayaan</i>	-			100 %	100.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						21.461.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						21.461.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-			100 %	21.461.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	21.461.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	21.461.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.992.899.937,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.992.899.937,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	1.768.079.537,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	13.681.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.694.700,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan an	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5.986.300,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan an	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	1.396.417.657,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan an	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.359.159.157,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	6.558.500,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	32.742.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan an	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	14.142.700,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan an	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan an	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	24.890.120,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	24.890.120,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	120.136.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24.442.048,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	95.694.012,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	180.212.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	68.964.800,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.148.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	12.099.200,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Pelayanan non perizinan</i>	-			100 %	77.013.500,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	68.445.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				10 Laporan	53.604.700,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				7 Dokumen	14.840.500,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	8.568.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				12 Dokumen	8.568.300,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu</i>	-			100 %	28.951.100,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	28.951.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	28.951.100,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan trantibum	-			100 %	90.905.800,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	90.905.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				37 Orang	30.502.200,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	3. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				4 Laporan	60.403.600,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-			100 %	27.950.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	27.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	27.950.000,00	Kab. Kulon Progo, Girimulyo, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON GIRIMULYO
		KAPANEWON NANGGULAN						2.289.642.000,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta</i>				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover- nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						22.562.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						22.562.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<i>Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi</i>	-			100 %	22.562.000,00						-	0,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan</i>	-			1 Dokumen	22.562.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-gover- nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	22.562.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.167.080.000,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.167.080.000,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada perangkat daerah berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	2.041.907.260,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	8.226.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4.430.700,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	3.796.200,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan</i>	-			3 Dokumen	1.794.439.432,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				22 Orang/bulan	1.764.025.432,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	27.383.700,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	3.030.300,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	36.311.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.211.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	27.100.000,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			1 Dokumen	20.289.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20.289.200,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	112.480.028,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	16.786.016,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	95.694.012,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan</i>	-			3 Dokumen	70.159.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	48.656.700,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	10.269.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				0 0	11.233.200,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan non perizinan	-			100 %	59.923.840,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	52.636.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	39.039.440,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	13.597.500,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			1 Dokumen	7.286.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				12 Dokumen	7.286.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu</i>	-			100 %	13.353.900,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan</i>	-			1 Dokumen	13.353.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				8 Laporan	13.353.900,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penanganan gangguan trantibum</i>	-			100 %	41.164.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			2 Dokumen	41.164.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			-				-	9.251.300,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				3 Laporan	31.913.200,00	Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-			100 %	10.730.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan pelaksanaan sub kegiatan	-			1 Dokumen	10.730.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Nanggulan	-	0,00	KAPANEWON NANGGULAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	10.730.500,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Nanggulan		0,00	KAPANEWON NANGGULAN
		KAPANEWON SAMIGALUH						2.079.718.571,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	-			100 %	100.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelompok Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelompok Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						18.009.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						18.009.000,00							0,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	-			100 %	18.009.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	18.009.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	18.009.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.961.709.571,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.961.709.571,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sub kegiatan pada perangkat daerah berkinerja sangat tinggi	-			100 %	1.799.550.871,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	9.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	1.502.187.415,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	1.469.874.715,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	28.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	3.712.700,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	28.631.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.061.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	17.570.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			2 Dokumen	144.810.636,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	19.770.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	125.039.836,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			3 Dokumen	114.921.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	94.662.920,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.256.100,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	14.002.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Perangkat Daerah Kapanewon		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan non perizinan	-			100 %	64.318.400,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	60.635.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	42.338.200,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	18.296.900,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	3.683.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	3.683.300,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu</i>	-			100 %	22.095.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan</i>	-			1 Dokumen	22.095.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	22.095.000,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kegiatan Pemberdayaan Desa		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase penanganan gangguan trantribum</i>	-			100 %	56.630.400,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	56.630.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				45 Orang	25.066.800,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	31.563.600,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-			100 %	19.114.900,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	19.114.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintahan Desa	-	0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	19.114.900,00	Kab. Kulon Progo, Samigaluh, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pemerintahan Desa		0,00	KAPANEWON SAMIGALUH
		KAPANEWON KALIBAWANG						2.089.738.619,00							2.360.459.490,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	100.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	100.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja														
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		100.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						17.039.000,00							40.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						17.039.000,00							40.000.000,00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Sub Kegiatan Keistemawaan pada urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	17.039.000,00						-	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	17.039.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	40.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	17.039.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		40.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.972.699.619,00							2.220.459.490,00	
	7.01	KECAMATAN						1.972.699.619,00							2.220.459.490,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	-			100 %	1.814.085.069,00						-	2.017.108.081,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	11.000.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	11.500.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		7.000.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		4.500.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	1.526.436.195,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	1.526.436.195,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.492.436.195,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		1.492.436.195,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	29.800.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		29.800.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	4.200.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		4.200.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	36.750.800,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	48.326.600,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.050.800,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		18.626.600,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	29.700.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		29.700.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	0,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	168.433.397,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		168.433.397,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	147.567.874,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	152.898.422,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25.629.156,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		30.959.704,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	121.938.718,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		121.938.718,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			3 Dokumen	92.330.200,00			-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	109.513.467,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	72.680.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		80.384.367,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.945.300,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		11.787.400,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	13.704.900,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		17.341.700,00	KAPANEWON KALIBAWANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan non perizinan	-			100 %	57.586.500,00						-	61.262.909,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	51.580.100,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	51.580.100,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	37.653.300,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		37.653.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	13.926.800,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		13.926.800,00	KAPANEWON KALIBAWANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	6.006.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	6.006.400,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		9.682.809,00	KAPANEWON KALIBAWANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase dokumen pembangunan tingkat kapanewon yang disampaikan tepat waktu	-			100 %	20.609.500,00						-	24.900.300,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	20.609.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	24.900.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	20.609.500,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		24.900.300,00	KAPANEWON KALIBAWANG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	-			100 %	64.653.550,00						-	91.543.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			2 Dokumen	64.653.550,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	91.543.200,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				35 Orang	33.781.700,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		33.781.700,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				6 Laporan	30.871.850,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		57.761.500,00	KAPANEWON KALIBAWANG
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi produk hukum desa yang tepat waktu	-			100 %	15.765.000,00						-	25.645.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan	-			1 Dokumen	15.765.000,00			-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang	-	25.645.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	15.765.000,00	Kab. Kulon Progo, Kalibawang, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Lingkup Kapanewon Kalibawang		25.645.000,00	KAPANEWON KALIBAWANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						4.656.036.000,00							4.879.119.348,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.845.776.304,00							1.928.627.123,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1.845.776.304,00							1.928.627.123,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sub kegiatan pada Perangkat Daerah berkinerja sangat tinggi	-			100 %	1.845.776.304,00						-	1.928.627.123,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	16.875.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	15.675.135,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				0 0	8.638.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		7.026.495,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	8.236.800,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		8.648.640,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	1.520.409.028,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	1.590.924.434,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.481.384.128,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		1.555.453.334,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	29.600.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		31.080.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	9.424.900,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		4.391.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	-			2 Dokumen	40.087.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	42.890.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				0 0	12.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		11.955.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	27.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		30.935.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Dokumen	44.762.620,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	47.252.646,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	44.762.620,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		47.252.646,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	98.789.556,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	103.729.033,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			0				0 0	28.994.676,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	-		30.444.409,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	69.794.880,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		73.284.624,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			2 Dokumen	124.852.500,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-	-	128.155.475,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	96.923.500,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		99.467.025,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				25 Unit	27.929.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	-		28.688.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						2.810.259.696,00							2.950.492.225,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2.810.259.696,00							2.950.492.225,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Persentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan</i>	-			90 %	973.042.200,00						-	1.021.694.310,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	-			2 Dokumen	973.042.200,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.021.694.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				100 Orang	154.026.200,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		155.503.110,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				48 Orang	819.016.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Mencipta kan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisas i tata kelola pemerintah an dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		866.191.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Persentase siswa yang menggunakan hak pilih dalam Pemilos</i>	-			60 %	1.244.795.896,00						-	1.306.755.235,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			2 Dokumen	1.244.795.896,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.306.755.235,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				300 Orang	1.083.817.196,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		1.138.008.055,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka														
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Kegiatan	160.978.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		168.747.180,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyaratan	-			84.56 %	124.991.700,00						-	131.241.285,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-			1 Dokumen	124.991.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi i tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	131.241.285,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				2 Laporan	124.991.700,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		131.241.285,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase hasil penetapan kalurahan bersinar yang ditindaklanjuti</i>	-			34.78 %	134.101.100,00						-	140.806.155,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	-			1 Dokumen	134.101.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	140.806.155,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				100 Orang	134.101.100,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		140.806.155,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Persentase laporan penanganan konflik sosial</i>	-			100 %	333.328.800,00						-	349.995.240,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Laporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			3 Dokumen	333.328.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	349.995.240,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	128.850.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		135.292.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	99.075.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		104.029.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	105.403.400,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kesatuan Bangsa dan Politik		110.673.570,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H							1.505.036.476.275,00							1.294.275.860.701,00		

5.2. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, dinyatakan bahwa Dana Keistimewaan dimasukkan dalam struktur APBD Kabupaten/Kota pada rekening urusan keistimewaan, dicatat pada rekening anggaran pendapatan dan dialokasikan pada rekening belanja langsung, serta Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pasal 11 menyatakan bahwa Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota setelah diperoleh kepastian penganggaran dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Perencanaan atau Dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Program/ Kegiatan yang diusulkan untuk didanai menggunakan Dana Keistimewaan DIY masih bersifat indikatif dikarenakan masih menunggu persetujuan Pemerintah Pusat terkait alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2026. Akan tetapi untuk menjamin sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2026, usulan program/ kegiatan Dana Keistimewaan DIY menjadi bagian penting skema perencanaan di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019, Pasal 11 ayat (1 dan 2), Pemerintah DIY merinci usulan program/ kegiatan Kabupaten/Kota dalam dalam Berita Acara kesepakatan pembahasan pemberian BK Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah DIY Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Surat Paniradya Kaistimewan No. B/100.1.5.1/1652/PANI tentang Pemberitahuan Entry Dana Keistimewaan TA 2026 bahwa pagu dana keistimewaan tahun 2026 yang dimasukkan ke dalam dokumen RKPD 2026 adalah sesuai Berita Acara Penilaian Usulan Awal Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dana Keistimewaan DIY pada skema pesimis.

Usulan Program dan Kegiatan dana Keistimewaan setiap urusan tahun 2026 pada skema pesimis sebesar Rp 113.486.998.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Urusan Kebudayaan: Rp74.273.484.000,00
2. Urusan Kelembagaan: Rp3.138.087.000,00
3. Urusan Tata Ruang: Rp32.591.598.000,00
4. Urusan Pertanahan: Rp3.483.829.500,00

5.3. Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik belum masuk sebagai komponen belanja di dalam kerangka anggaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan belum bisa diberikan atau dipasang nilai/ pagu anggarannya. Hingga penetapan RKPD tahun 2026 ini, belum ada informasi dari Bappenas maupun Kementerian teknis lainnya terkait dengan alokasi DAK.

5.4 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang telah disepakati untuk didanai melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rincian Belanja Hibah Tahun 2026

No.	Subkegiatan	Uraian	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.992.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	691.275.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	569.100.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	256.500.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
5	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
6	Seleksi Atlet Daerah	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.335.600.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
7	Perluasan Kesempatan Kerja	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang	5.831.225.000	Dinas Tenaga Kerja

No.	Subkegiatan	Uraian	Anggaran	Perangkat Daerah
		Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
8	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.950.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.547.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	640.000.000	Kapanewon Wates
11	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	30.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	180.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
13	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	237.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat	750.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Subkegiatan	Uraian	Anggaran	Perangkat Daerah
		Keterangan Terdaftar		
15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	144.800.000	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	538.104.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
17	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.906.900	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.644.456.800	Dinas Pertanian dan Pangan
19	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.460.010.000	Dinas Pertanian dan Pangan
20	Pengembangan Lumbung Mataraman	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
21	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.232.530.200	Dinas Pertanian dan Pangan
22	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	269.180.000	Dinas Pertanian dan Pangan
23	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	849.967.000	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Subkegiatan	Uraian	Anggaran	Perangkat Daerah
24	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	58.867.600	Dinas Pertanian dan Pangan
25	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	601.325.200	Dinas Pertanian dan Pangan
26	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	591.950.000	Dinas Pertanian dan Pangan
27	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	188.332.000	Dinas Lingkungan Hidup
28	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
29	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	95.300.000	Dinas Lingkungan Hidup
30	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	729.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	988.750.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
32	Pengembangan Budaya Bahari	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.715.288.300	Dinas Kelautan dan Perikanan
33	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga	37.355.100	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Subkegiatan	Uraian	Anggaran	Perangkat Daerah
		Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
34	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	167.659.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	90.000.000	Dinas Kesehatan
36	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	850.000.000	Sekretariat Daerah
37	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	427.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.190.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
39	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.037.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
40	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.780.445.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
41	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.002.566.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
42	Peningkatan Partisipasi	Belanja Hibah Barang		Kapanewon

No.	Subkegiatan	Uraian	Anggaran	Perangkat Daerah
	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	174.875.800	Wates
43	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	28.728.600	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
44	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	949.682.696	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 5.2

Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2026

No.	Subkegiatan	Uraian	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	550.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	409.050.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3	Penyediaan Permakanan	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	100.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	12.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan	739.900.000	Dinas Sosial Pemberdayaan

No.	Subkegiatan	Uraian	Anggaran	Perangkat Daerah
		kepada Individu		Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000	Sekretariat Daerah
7	Penyediaan Alat Bantu	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.992.200	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Pengembangan Industri Kreatif	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.064.097.400	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	37.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.845.100.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	4.970.400.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	28.000.000	Dinas Tenaga Kerja
14	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	157.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Subkegiatan	Uraian	Anggaran	Perangkat Daerah
15	Penyediaan Permakanan	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	305.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/ pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari indikator tujuan, indikator sasaran daerah, indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah, indikator kinerja program, dan Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 ditampilkan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,18	76,00 - 76,23	76,40 - 76,69
2.	Tingkat Kemiskinan	%	15,62	14,12 - 15,12	13,69 - 14,69
3.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	63,31	64,00 - 66,00	65,00 - 67,00
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	4,78-5,38	4,80-5,40
5.	Rasio Gini	Nilai	0,373	0,372 - 0,402	0,371 - 0,401
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	87,04	87,50	87,90
7.	Crime Rate	Nilai	62,7	62,00	61,00
8.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,61	88,7	88,75
9.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	152,65	136,71 - 141,71	135,07 - 140,07

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,49	75,50 - 79,75	75,58 - 79,83
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,49	14,63 - 15,72	14,7 - 15,79

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
3.	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	10.990	11.232	11.487,6
4.	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	58,91	60,00 - 61,00	60,50 - 61,50
5.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,98	41,02 - 42,22	41,03 - 42,23
6.	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	37.976,26	40.043-40.272	42.865-43.357
7.	Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Miliar rupiah	655,55	684,46-1.228,98	766,86-1.360,34
8.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	1.709,15	1.892,11-1.984,03	2.048,17-2.159,39
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,01	1,95 - 2,55	1,90 - 2,50
10.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	3,91	4,11 - 4,61	1,41-1,50
11.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)
12.	Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,797	86,847	86,897
14.	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,195	3,221	3,231
15.	Indeks Harmoni Indonesia (IHA)	Nilai	7,32	7,38	7,42
16.	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	%	100	100	100

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
17.	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,86	89,90	89,95
18.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	48,40	49,28	50,15
19.	Tingkat Pelayanan Jalan (level of service)	Kategori	A (0,10)	A / Arus Bebas (0-0,2)	A / Arus Bebas (0-0,2)
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	65,46	69,75	69,84
21.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,64	0,65	0,66

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Tabel 6.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga						
1.	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan di semua Jenjang	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun	%	97,52	97,78	98,03
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun	%	98,61	98,72	98,82
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun	%	14,09	14,85	15,62
2.	Meningkatnya mutu pendidikan	Kemampuan literasi numerasi SD (skor)	Nilai	64	66,7	69,4
		Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)	Nilai	76,8	78,1	79,4
		Persentase Penguatan Pendidikan Karakter	Nilai	57,72	58,05	59,12
3.	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Persentase Pemuda berprestasi	%	58,82	64,71	76,47
4.	Meningkatnya prestasi olahraga dalam event olahraga pelajar dan umum	Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum	%	50,19	50,21	50,78
Dinas Kesehatan						

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Ibu Melahirkan/Bersalin	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	58,53	61,12	62,56
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan bagi Bayi yang dilahirkan	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	10,24	10,39	10,32
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	18,00	17,10	16,20
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman						
7.	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Capaian Akses Air Minum Aman	%	28,08	29,68	31,28
		Rasio Rumah Layak Berkelanjutan	%	94,55	94,56	94,58
		Rasio luas layanan jaringan irigasi Kabupaten	%	64,65	64,85	65,14
		Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	68,72	68,87	69,03
8.	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	10,32	4,10	4,28
Satuan Polisi Pamong Praja						
9.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
10.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	Persentase penanggulangan bencana	%	92,05	93,18	94,32
		Persentase penanggulangan kebakaran	%	100	100	100
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
11.	Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,62	0,61	0,6
12.	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,128	0,127	0,126
Dinas Tenaga Kerja						

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
13.	Pengurangan pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	78,57	76,41 - 78,91	76,44 - 78,94
Dinas Pertanian dan Pangan						
14.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88	89,1	90,2
15.	Meningkatnya produksi komoditas pangan strategis	Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis - Padi	ton	124.230	125.472	126.727
		Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis - Jagung	ton	23.471	23.706	23.943
		Produksi Komoditas Hortikultura Strategis - Cabai	kuintal	379.192,19	382.984	386.814
		Produksi Komoditas Hortikultura Strategis - Bawang Merah	kuintal	128.346	129.629	130.925
		Produksi Daging - Sapi	ton	643	646	650
		Produksi Daging - Kambing	ton	547	550	553
		Produksi Daging - Domba	ton	598	601	604
		Produksi Daging - Ayam	ton	12.887	12.952	13.017
		<i>DO: Daging ayam: ayam pedaging</i>				
		Produksi Telur - Ayam Buras	ton	494	496	499
		Produksi Telur - Ayam Ras Petelur	ton	16.156	16.237	16.318
		Produksi Telur - itik	ton	627	630	633
		Produksi Telur - Burung Puyuh	ton	567	570	573
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)						
16.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	%	16,67	33,33	50,00
		Persentase tertib administrasi pertanahan	%	56,09	63,98	72,27
Dinas Lingkungan Hidup						
17.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	44,24	71,9	72,1
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	91,62	75,7	75,71
		Persentase Pengelolaan Persampahan	%	46,78	48,70	50,13

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
18.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	89,189	89,19	89,191
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
19.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	anak	1,98	1,99	2
20.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Persentase Desa (kalurahan) Mandiri	%	82,76	87,36	89,66
Dinas Perhubungan						
21.	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi daerah	Tingkat kualitas layanan transportasi	%	100	100	100
Dinas Komunikasi dan Informatika						
22.	Meningkatnya layanan publik berbasis digital	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
23.	Meningkatnya koperasi dan UMKM yang berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	%	25,73	28,02	32,69
		Jumlah UMKM Mikro yang naik subkelas	Unit Usaha	15.631	18.141	20.653
24.	Meningkatnya nilai usaha industri	Nilai usaha industri	Rp	2.729.943.713.736	2.732.693.188.017	2.735.445.369.346
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
25.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai Investasi	Rp (Juta)	354.783	160.000	170.000
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
26.	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang sudah ditetapkan	%	50,82	52,82	54,69
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
27.	Meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai TGM	Nilai	74,55	75,00	75,50
28.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Nilai ASKE	Nilai	83,86	85,00	86,00
Dinas Kelautan dan Perikanan						

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
29.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Produksi perikanan	Rupiah	492.348.349.500	492.738.184.000	493.536.453.500
Dinas Pariwisata						
30.	Meningkatnya jumlah pendapatan sektor pariwisata	Pendapatan sektor pariwisata	Rupiah	7.378.133.000	7.599.476.990	7.827.461.229
Dinas Perdagangan						
31.	Meningkatnya nilai usaha perdagangan	Nilai usaha perdagangan	Rupiah	2.716.540.427.770	2.790.643.014.859	2.865.527.205.476
Sekretariat Daerah						
32.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai / kategori	sedang (3,3346)	sedang (3,3246)	sedang (3,3274)
		Nilai Kinerja TPID	Nilai	94,93	94,95	95
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	12,69	12,71	12,73
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	82,61	82,65	82,7
33.	Meningkatnya kualitas layanan publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,813	85	85,1
Sekretariat DPRD						
34.	Terfasilitasnya Kinerja DPRD	Persentase Kinerja DPRD yang terselesaikan	%	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah						
35.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian kinerja	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja & Pengukuran Kinerja	Nilai	52,41	52,49	52,57
36.	Meningkatnya riset dan Inovasi Daerah	Satuan inovasi daerah yang matang	Inovasi	87	88	89
Badan Keuangan dan Aset Daerah						
37.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset	Persentase Realisasi Belanja APBD	%	95,51	95,70	95,89
		Persentase Nilai Aset Tetap yang ada, tercatat dan berfungsi	%	88,00	88,88	89,76
		Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	25,60	26,11	26,62
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
38.	Meningkatnya kualitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	83,03	83,10	83,20
Inspektorat Daerah						

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
39.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintah Daerah	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,19	3,2	3,21
		Capaian MCP KPK	%	94	94,5	95
		Nilai Komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP	Nilai	18,65	19	20
12 Kapanewon						
40.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,21	87,241	87,291
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
41.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase penyelesaian konflik sosial	%	100	100	100
Semua Perangkat Daerah						
42.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	A (>80-90)	A (>80-90)	A (>80-90)
43.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal perangkat daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Level	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0	2,0 - 3,0

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Tabel 6.4

Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2026

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga						
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak	%	73,35	73,45	73,56
		Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan	%	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	%	84,23	84,33	84,43
		Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	%	56,43	56,96	57,25
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik	%	38,93	40,40	41,88
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan	Kurikulum	1	1	2
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha	%	35,00	35,66	36,33
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif.	%	55,24	55,58	55,78
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya	%	NA	26,87	32,84
Dinas Kesehatan						
7.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase FASYANKES yang Memiliki Sarana Prasarana Kesehatan	%	81,25	83,33	91,84

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		yang Memenuhi Standar				
		Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan				
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	91,29	100	100
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	99,85	100	100
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	98,71	100	100
		Pelayanan Kesehatan Balita	%	94,96	100	100
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	96,42	100	100
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	98,00	100	100
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	90,60	100	100
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	94,73	100	100
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	98,07	100	100
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	93,54	100	100
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	93,30	100	100
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya	%	94,39	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	86,88	90,23	91,29
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	40,62	100	100
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,11	99,14	99,18
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES	%	85	85,5	86
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS	angka	84,75	85,25	85,75
9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial	%	97,53	97,59	97,64
10.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pendampingan	%	41,67	22,22	25,56
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang	%	2,80	6,16	9,52

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		Mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)				
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kel/Kalurahan yang Menerapkan GERMAS	%	13,64	30,68	47,73
12.	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase FASYANKES yang Sudah Terakreditasi	%	43,48	44,57	47,83
13.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	4,76	23,81	28,57
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman						
14.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	64,65	64,94	65,22
15.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	%	97,75	98,12	98,46
16.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,15	8,34	8,53
17.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	%	58,73	58,77	58,80
18.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio Penanganan Jalan	%	7,77	7,93	8,11

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
19.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Capaian Layanan Jasa Konstruksi	%	100	100	100
		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi Kerja SKK	%	100	100	100
20.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Keterisian Hunian	%	45,86	46,99	47,74
21.	Program Kawasan Permukiman	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	10,32	4,10	4,28
22.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	54,98	2,24	3,16
		Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	%	29,55	29,62	29,69
23.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	%	100	100	100
Satuan Polisi Pamong Praja						
24.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	100	100
		Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	100	100	100
25.	Program Penyelenggaraan	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	%	NA	NA	22,73

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
	Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
26.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga yang tersosialisasi KIE rawan bencana	%	NA	100	100
		Persentase pelayanan terhadap warga di daerah rawan bencana	%	100	100	100
27.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pembinaan relawan kebakaran	%	100	100	100
		Persentase pelayanan terhadap warga terdampak kebakaran	%	NA	100	100
28.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Prosentase layanan dasar penanggulangan bencana dan kebakaran yang terfasilitasi Dana Keistimewaan	%	33,33	33,33	33,33
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
29.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	NA	42,62	59,02
30.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh	%	NA	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		rehabilitasi sosial di luar panti				
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	NA	100	100
		Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	NA	100	100
		Persentase gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	NA	100	100
31.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial	%	NA	29,94	29,13
32.	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan korban bencana	%	NA	100	100
33.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	%	100	100	100
34.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	71,68*)	71,69	71,7
35.	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	19,24	12,69	10,24

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
36.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kalurahan Layak Anak	%	6,90	9,20	11,49
37.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,04	0,03	0,02
38.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	%	NA	NA	0,040
Dinas Tenaga Kerja						
39.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	%	100	100	100
40.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang lulus sertifikasi	%	92,86	93,75	93,75
41.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	79,83	79,92	80,02
42.	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak	%	35,12	38,69	44,12
43.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kerjasama Antar Daerah Tujuan Transmigrasi	%	100	100	100
44.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	%	NA	NA	93,75
Dinas Pertanian dan Pangan						

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
45.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	Kkal/Kapita /Hari	2.949,00	2.951,00	2.953,00
		Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	Kkal/Kapita /Hari	1.831,00	1.855,50	1.879,90
46.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa kategori tahan dan sangat tahan pangan	Desa	20,45%	22,73%	25,00%
47.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	%	90,83%	91,67%	92,58%
48.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	kuintal/ha	69,22	69,91	70,61
		Produktivitas jagung	kuintal/ha	67,34	68,01	68,69
		Produktivitas cabai	kuintal/ha	57,7	58,3	58,8
		Produktivitas bawang merah	kuintal/ha	126	127,2	128,5
		Populasi ternak	Animal Unit	171.172	172.028	172.888
		Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik	%	74,98	75,17	75,35

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
49.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan yang terfasilitasi jalan pertanian	%	28,02	28,09	28,16
		Persentase lahan yang terfasilitasi irigasi	%	8,58	8,69	8,79
50.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penerapan teknologi yang dianjurkan	%	75,59	75,68	75,77
51.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang ditangani	%	95,32	95,46	95,65
52.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	%	90,02	90,16	90,36
		Persentase Keberhasilan penanganan penyakit hewan	%	98,57	98,61	98,65
53.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah luas pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	Ha	80	80	85
54.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap pengembangan (%)	%	24,66	25,68	29,11
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)						
55.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase perencanaan penataan ruang	%	28,57	57,14	71,43

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		Persentase pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	%	100	100	100
56.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	100	100
57.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemanfaatan tanah Kalurahan	%	100	100	100
58.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tertib administrasi tanah Pemda	%	74,23	73,50	74,10
59.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	8,33	12,50	30,00
		Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	NA	NA	NA
60.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	%	56,09	63,98	72,27
		Persentase pemanfaatan Tanah	%	5,47	22,10	33,33

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan				
Dinas Lingkungan Hidup						
61.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	%	50,00	52,86	54,29
62.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan	Parameter	21	26	29
63.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup	%	100	100	100
64.	Program Pengelolaan Persampahan	Proporsi cakupan layanan pengelolaan sampah	%	22,17	27,00	27,82
65.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup	%	28,3	41,51	54,72
		Persentase Taman Kondisi Baik	%	73,47	75,51	77,55
66.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Capaian penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	100	100
67.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	Persentase peningkatan pemberdayaan	%	76,54	76,83	77,11

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
	Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	kelompok peduli lingkungan hidup				
68.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase pengurangan sampah	%	32,78	32,99	35,01
69.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penanganan sampah	%	15,36	15,19	15,12
		Prosentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan	%	6,13	6,13	6,13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
70.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk memiliki kartu identitas	%	90,37	92,17	92,20
71.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk memiliki akta kelahiran	%	99,48	99,50	99,55
72.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Inovasi pelayanan	Satuan Inovasi	2	2	2
73.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
74.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB	%	80,68	81,82	82,95

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
75.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	68,24	59,24	60,10
		Persentase unmet need	%	8,57	15,00	14,55
76.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga yang terlayani konseling keluarga sejahtera	%	5,35	6,07	6,57
77.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kalurahan kategori TDD	%	43,68	45,98	48,28
		Persentase BUMDes kategori Maju	%	16,09	18,39	20,69
78.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Swadaya masyarakat dalam program TMMD dan Karya Bakti	%	10	12	14
79.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Persentase garis batas kalurahan yang tersinkronisasi	%	NA	38,64	76,14
80.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	%	NA	8,05	11,49

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
Dinas Perhubungan						
81.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	56,43	56,43	57,86
		Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	19,24	19,69	20,08
82.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	%	16,98	16,96	17,01
Dinas Komunikasi dan Informatika						
83.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah	%	27,50	24,11	27,40
		Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	63,93	20,45	40,91
84.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	63,93	20,45	40,91
85.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik	%	52,38	57,14	61,90
86.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Dilengkapi Metadata	%	52,38	61,90	71,43
87.	Program Penyelenggaraan	Cakupan Layanan Jaringan Intra	%	69,53	72,66	74,22

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
	Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik				
88.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	100
Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
89.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	7,28	12,08	24,04
90.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai legalitas	%	36,64	42,35	47,99
91.	Program Pengembangan UMKM	Omzet usaha mikro	Rp	117.013.000.000	171.600.000.000	177.600.000.000
92.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun ke-n	Unit	16.092	16.222	16.357
93.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	pelaku usaha	NA	2	5
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
94.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	33,33	35	35

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
95.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peta Potensi yang Tersusun	%	100	100	100
96.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi	%	85,71	85,71	85,71
97.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase dokumen data investasi yang disajikan	%	100	100	100
98.	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Pelayanan dan Perizinan	Nilai	89.79	84.75-89.82	85-89.85
99.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	100	100	100
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
100.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman	Kegiatan	7	7	8
		Warisan Budaya yang sudah ditetapkan	Warisan Budaya	216	225	233
		Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan Kalurahan Budaya kategori Berkembang	Kelurahan/ Kalurahan	57	62	64
		Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	%	79,84	81,20	82,56

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
101.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya	Orang	69.230	70.300	71.300
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
102.	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	218.832	218.932	219.032
103.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Naskah kuno yang terdata	Naskah	10	11	12
104.	Program Pengelolaan Arsip	Nilai ASKI Perangkat Daerah	Nilai	86	86,5	87
105.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi	Dokumen	NA	NA	200
Dinas Kelautan dan Perikanan						
106.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	2.190,03	2.195,00	2.200,00
107.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	16.968,63	16.989,00	17.044,00
108.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	N/A	67	67
109.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi pengolahan ikan	Kg	182.570,50	183.500	184.000
110.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	%	68,85	67,46	68,66

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik	%	50,00	50,00	50,00
Dinas Pariwisata						
111.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Objek Pariwisata Dalam Kondisi Baik.	Lokasi	2	2	3
112.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Orang	1.926.051	1.983.833	2.043.348
113.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Tersertifikasi	Pelaku Usaha	166	176	186
114.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	Orang	121.686	125.337	129.097
Dinas Perdagangan						
115.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu	%	5,97	5,92	5,87
116.	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang	Orang	8	12	15
117.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%	78,71	90,50	91,74
118.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik	%	36,00	40,00	40,00

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
119.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan	%	NA	NA	100
Sekretariat Daerah						
120.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi	%	100	100	100
		Persentase Fasilitasi Layanan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	%	100	100	100
121.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100	100	100
		Persentase Perumusan dan Monev kebijakan Pemerintahan, Dokumen Kerjasama dan Laporan Pemerintahan	%	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100
122.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	%	136,84	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100	100	100
		Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	160	100	100
123.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	%	100	100	NA
		Kematangan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi	NA	NA	49,07
		Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	Nilai	96	96,1	NA
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	NA	NA	100
Sekretariat DPRD						
124.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	%	100	100	100
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		terkait Penganggaran dan Pengawasan				
		Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah						
125.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100
		Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan	%	99,86	99,87	99,88
126.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu	%	100	100	100
		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu	%	100	100	100
		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu	%	100	100	100
127.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Capaian Riset Daerah	%	18,75	37,5	50

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
128.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Capaian Inovasi Daerah	Satuan Inovasi	208	209	210
129.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	100
Badan Keuangan dan Aset Daerah						
130.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100
		Persentase Penerbitan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100
		Persentase Penerbitan SPM yang Lengkap dan Benar	%	78,85	80,00	82,22
131.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100
132.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak	366.124	370.858	374.078
		Jumlah Pengawasan dan Penagihan Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak	2.314	2.529	2.740
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
133.	Program Pengembangan	Persentase ASN yang Memenuhi	%	39,87	41,53	43,14

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi				
134.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	%	76,39	77,35	77,69
		Persentase Kedisiplinan ASN	%	99,79	99,80	99,82
		Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan Redistribusi	Orang	232	242	247
135.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik	%	100	100	100
Inspektorat Daerah						
136.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	82,29	84,71	86,14
137.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	92,86	100	100
12 Kapanewon						
138.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100	100	100
139.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang	%	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
		disampaikan Tepat Waktu				
140.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100	100	100
141.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100	100	100
142.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100	100	100
143.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100	100	100
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
144.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	%	80,00	90,00	90,00
145.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Siswa yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu	%	50,00	60,00	65,00
146.	Program Pemberdayaan dan	Persentase Pengawasan	%	75,17	79,87	84,56

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi	Target	
				2024	2025	2026
	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan				
147.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Hasil Penetapan Kalurahan Bersinar yang ditindaklanjuti	%	0,00	17,39	34,78
148.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Laporan Penanganan Konflik Sosial	%	16,67	100,00	100,00
Semua Perangkat Daerah						
149.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Subkegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	NA	100	100

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Tabel 6.5
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
I.4	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (IE 16)		
I.4.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	89,14
I.4.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	15,10–17,10
I.4.4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	36,19
I.5	Lingkungan Hidup Berkualitas (IE 15)		
I.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,84
I.5.2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	13,51
I.5.3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	19,34

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
I.5.4	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	88,46
I.6	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE 17)		
I.6.2	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,66
I.6.3	Indeks Risiko Bencana	Nilai	135,07–140,07
I.7	Demografi		
I.7.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,46
I.7.2	Rasio Penduduk	-	98,00
I.7.3	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	777,84
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
II.1	Kesejahteraan Ekonomi		
II.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80-5,40
II.1.2	Tingkat Kemiskinan	%	13,69–14,69
II.1.3	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp juta	42,87-43,36
II.1.4	PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp juta	25,47–25,76
II.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,90–2,50
II.1.6	Rasio Gini	Nilai	0,371–0,401
II.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,40–76,69
II.2	Kesehatan untuk Semua (IE 1)		
II.2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,58–79,83
II.2.2	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,37
II.2.3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	16,20
II.2.4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	100,00
II.2.5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	91,29
II.2.7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,26–99,95
II.2.8	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	
II.2.9	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	
II.2.10	Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	
II.2.11	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	
II.2.12	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	
II.2.13	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	
II.2.14	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	%	
II.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE 2)		
II.3.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,46
II.3.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,7–15,79
II.3.3	Angka Literasi SD	%	74,19
II.3.4	Angka Numerasi SD	%	64,61
II.3.5	Angka Literasi SMP	%	85,11
II.3.6	Angka Numerasi SMP	%	73,70
II.3.7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	97,49
II.3.9	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi	%	81,66–83,66

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
II.3.10	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi	%	43,60–45,60
II.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif (IE 3)		
II.4.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	42,83–47,83
II.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (IE 13)		
II.5.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	65,00–67,00
II.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif (IE 14)		
II.6.2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	
II.6.3	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,093–0,142
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
III.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia		
III.1.1	Angka Ketergantungan	%	50,10
III.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE 4)		
III.2.1	Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,63–11,08
III.2.2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,98–6,98
III.2.3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,66–3,66
III.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,44–78,94
III.2.5	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,98–6,98
III.2.6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	56,00 (inovatif)
III.2.7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level kabupaten	%	2,05–2,55
III.2.8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,47–3,47
III.2.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	71,85–72,85
III.2.10	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,64
III.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (IE 7)		
III.5.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,03–42,23
III.5.2	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	9,07
III.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE 8)		
III.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	52,93
III.6.3	Persentase Desa Mandiri	%	87,36
III.7	Stabilitas Ekonomi Makro (IE 11)		
III.7.1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,66–0,79
III.7.2	Total Kredit per PDRB	%	25,30–28,24
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
IV.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (IE 9)		
IV.1.2	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	1,41–1,50
IV.1.3	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,57 (A/Pelayanan Prima)
IV.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial (IE 10)		
IV.2.1	Persentase Penegakan Perda	%	100,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
IV.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (IE 12)		
IV.3.1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,83

Sumber: Bapperida Kulon Progo, 2025

Tabel 6.6

Indikator Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2026

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
1.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1.1.1.	Pendidikan		
1.1.1.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98,03
1.1.1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,82
1.1.1.3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,82
1.1.1.4.	Iklim keamanan SMP	%	75,82
1.1.1.5.	Iklim Kebhinekaan SD	%	78,59
1.1.1.6.	Iklim Kebhinekaan SMP	%	74,7
1.1.1.7.	Iklim Inklusivitas SD	%	65,32
1.1.1.8.	Iklim Inklusivitas SMP	%	64,84
1.1.1.9.	Iklim Keamanan SD	%	81,13
1.1.1.10.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	74,19
1.1.1.11.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	64,61
1.1.1.12.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	85,11
1.1.1.13.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,7
1.1.1.14.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	77,5
1.1.1.15.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	77,58
1.1.2.	Kesehatan		

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.2.1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	62,56
1.1.2.2.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,18
1.1.2.3.	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	1
1.1.2.4.	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	10,32
1.1.2.5.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	17,5
1.1.2.6.	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	77
1.1.2.7.	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	1,4
1.1.2.8.	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	%	11,4
1.1.2.9.	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	%	100
1.1.2.10.	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	%	30
1.1.2.11.	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	%	100
1.1.2.12.	Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	%	100
1.1.2.13.	Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	%	22
1.1.2.14.	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	71
1.1.2.15.	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	46
1.1.2.16.	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	23,4
1.1.2.17.	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	kab/kota	100
1.1.2.18.	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	55
1.1.2.19.	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	252
1.1.3.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
1.1.3.1.	Rumah tangga dengan akses air minum aman	%	31,28
1.1.3.2.	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Ha	1.773
1.1.3.3.	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	5
1.1.3.4.	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	3
1.1.3.5.	Penetapan RTRW	Perda	1

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.3.6.	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	6
1.1.3.7.	Penetapan RDTR	Perda/ Perkada	2
1.1.5.	Ketenteraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
1.1.5.1.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76
1.1.5.2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	89,85
1.1.5.3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	76
1.1.6.	Sosial		
1.1.6.5.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100
1.1.6.6.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100
1.1.6.7.	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100
1.1.7.	Tenaga Kerja		
1.1.7.1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	22,07
1.1.7.2.	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	8.469
1.1.7.3.	Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi yang Bersertifikat	Orang	144
1.1.8.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		
1.1.8.1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,173-0,093
1.1.8.2.	Persentase ARG Daerah	%	6,2
1.1.8.3.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	801
1.1.8.4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,3
1.1.8.7.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,11
1.1.9.	Pangan		
1.1.9.1.	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu & Keamanan Pangan	%	92,58
1.1.9.3.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,2
1.1.11.	Lingkungan Hidup		
1.1.11.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,84
1.1.11.2.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	39,1
1.1.11.3.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Pengumpulan Sampah	Persentase	47,31-64,00

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.12.	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana		
1.1.12.2.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	3
1.1.12.3.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	Rata-Rata Anak Per Wanita	1,1
1.1.12.4.	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	%	60,10
1.1.14.	Komunikasi & Informatika		
1.1.14.1.	Nilai Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	1
1.1.14.2.	Nilai Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2
1.1.14.3.	Nilai Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	2
1.1.15.	Koperasi Usaha Kecil & Menengah		
1.1.15.1.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	2,70
1.1.15.4.	Rasio Kewirausahaan	Persentase	2,66
1.1.15.5.	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	4,6
1.1.15.6.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Berkoperasi	Persentase	26
1.1.16.	Penanaman Modal		
1.1.16.1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	0,170
1.1.17.	Kepemudaan & Olahraga		
1.1.17.1.	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dalam Tiga Bulan Terakhir	Persentase	15,93
1.1.17.2.	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang Mengikuti Kegiatan Organisasi Dalam Tiga Bulan Terakhir	Persentase	18,25
1.1.17.3.	Indeks Pembangunan Pemuda	Niai	72,50
1.1.17.4.	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan)	Persentase	21,43
1.1.17.5.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir	Persentase	33,44
1.1.17.6.	Jumlah Kampanye Olahraga yang Terselenggara Setahun Terakhir	Kegiatan	10
1.1.17.7.	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	54,65

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.17.8.	Persentase Olahragawan Dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional/Internasional)	Persentase	55
1.1.18.	Statistik		
1.1.18.1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,66
1.1.20.	Kebudayaan		
1.1.20.1.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Menonton Pertunjukan Seni	%	56,50
1.1.20.2.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Tempat/Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya Bersifat Kebendaan	%	5,0
1.1.20.3.	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni	%	2,8
1.1.20.4.	Persentase Rumah Tangga yang Menyelenggarakan atau Menghadiri Upacara Adat Dalam Setahun Terakhir	%	16,60
1.1.20.5.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	42,86
1.1.20.6.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Muatan Lokal (Bahasa Daerah atau Budaya Lokal) dan/atau Ekskul Kesenian	%	16,67
1.1.20.7.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni yang Menjadikan Keterlibatannya itu Sebagai Sumber Penghasilan (Dalam Setahun Terakhir)	%	0,51
1.1.21.	Perpustakaan		
1.1.21.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	96,43
1.1.21.2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	75,50
1.1.22.	Kearsipan		
1.1.22.1.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	86
1.1.23.	Kelautan & Perikanan		
1.1.23.3.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.200
1.1.23.4.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	17.044
1.1.24.	Pariwisata		
1.1.24.1.	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	Rp	2.259.400.000.000
1.1.24.2.	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	24.632.000
1.1.24.3.	Rasio PDB Pariwisata	%	10
1.1.25.	Pertanian		
1.1.25.1.	Jumlah Produksi Jagung	Ton	23.943
1.1.25.2.	Jumlah Produksi Padi	Ton	126.727

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026 HASIL RAKORTEKBANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.25.3.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	386.814
1.1.25.4.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Bawang Merah	Ton	130.925
1.1.25.7.	Jumlah Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Domba, Kambing, Ayam, Itik, Babi)	Ton	14.823
1.1.25.8.	Jumlah Produksi Telur	Ton	18.023
1.1.25.9.	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	16.037

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemda DIY tahun 2026 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro, dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen di bawahnya secara operasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/ pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah yaitu perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar-benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintah daerah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/ pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen

pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut Permendagri tersebut, tata cara pengendalian dilaksanakan dengan penyajian program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing PD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi PD pada tata cara pengendalian ini menjadi strategis, dimana PD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian PD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing PD agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.
2. PD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2. Kesimpulan

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 berlandaskan pada RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD DIY Tahun 2022-2027, dan Rancangan Akhir RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029.
2. Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo 2026 merupakan acuan/ pedoman bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD 2026.

3. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2026 yaitu: **“Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan”**. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing PD diarahkan pada pencapaian tema tersebut. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan komprehensif.
4. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Wates, 30 Juni 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN



bapperida.kulonprogo.go.id



bappeda@kulonprogo.go.id



(0274) 773247
0851-7678-4500

